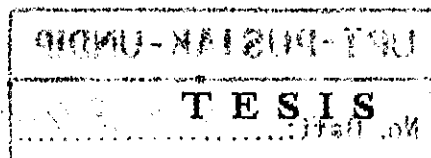




# **DEPENALISASI AKTIVIS GERAKAN MAHASISWA PRO-REFORMASI**

**(Sebuah Kajian Kriminologis Terhadap Gerakan Mahasiswa  
Pro-Reformasi di Kotamadya Bandung)**



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ACHMAD FADILAH**

**PEMBIMBING:**

**DR. I.S SUSANTO, S.H**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1998**

345  
FAD  
d @.1

# DEPENALISASI AKTIVIS GERAKAN MAHASISWA PRO-REFORMASI

(Sebuah Kajian Kriminologis Terhadap Gerakan Mahasiswa  
Pro-Reformasi di Kotamadya Bandung)

Disusun Oleh:

ACHMAD FADILAH  
NIM: B.4A.096.001

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal: 4 Januari 1999

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



DR. I.S. SUSANTO, S.H  
NIP: 130324139



Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. H. PURWAHID PATRIK, S.H  
NIP: 130307058

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, dan atas perkenan-Nya pulalah, penulis dapat menyelesaikan sebuah tugas akhir yang berbentuk tesis. Tesis ini merupakan sebuah bentuk penelitian yang didasarkan kepada sebuah realita empiris yang terjadi di akhir tahun 1997, awal 1998 dan pertengahan tahun 1998. Tesis ini mendeskripsikan tentang keberadaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, sikap oposan yang ada pada diri mereka dan pola penanganan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perilaku para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut.

Pada awalnya penulis hanya melokasikan penelitian ini di wilayah kotamadya Bandung, dengan asumsi bahwa keberadaan kota Bandung telah dianggap sebagai salah satu barometer gerakan mahasiswa, disamping kota Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya. Namun dalam perkembangannya penelitian tentang keberadaan dan aktivitas gerakan mahasiswa pro-reformasi tidak dapat dipisah-pisahkan secara parsial kewilayahan, sebab dalam perkembangannya pula gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut telah membuat sebuah gerakan yang hampir menasional, dan telah memfokuskan untuk melakukan sebuah tindakan penekanan terhadap para pemegang kekuasaan. Gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi pada awalnya dilakukan secara parsial kedaerahan berdasarkan lokasi dimana perguruan tinggi tersebut berada, namun menjelang Sidang Umum MPR 1998, gerakan mahasiswa pro-reformasi telah menjelma menjadi sebuah kekuatan moral, yang tergalang secara kuat untuk melakukan tindakan-tindakan penekanan secara fisik dan psikhis terhadap penguasa melalui berbagai gerakan yang dilakukannya.

Pemantauan keberadaan gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dilakukan oleh penulis selama kurang lebih satu setengah tahun cukup membuat penulis mengalami kerepotan, sebab fenomena-fenomena yang muncul sungguh diluar dugaan, dan membuat penulis terpaksa harus merubah beberapa kali perumusan permasalahan, pokok dan fokus kajian.

Pada awalnya titik fokus yang diamati oleh penulis adalah tentang keberadaan penerapan Haatzaai Artikelen dan UUPK Sub-versi kepada para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, namun setelah melihat perkembangan yang ada, '*segalak*' apapun apara aktivis gerakan mahasiswa tersebut, '*seberingas*' apapun, '*sekritis*' apapun mereka melakukan kritik terhadap penguasa, tidak ada para aktivis gerakan mahasiswa pro-refromasi tersebut yang ditangkap atau dijerat dengan menggunakan pasal-pasal pidana yang biasa dikenakan kepada para aktivis gerakan mahasiswa pada waktu-waktu yang lampau.

Fenomena ini sungguh berbeda dengan fenomena-fenomena hukum yang sering terjadi sebelumnya, dimana apabila ada seorang aktivis gerakan mahasiswa sudah mulai '*mbalelo*' atau '*kritis*' atau menyimpang dari kebijakan penguasa, maka pasal-pasal pidana yang ada telah siap untuk menjerat dan memidanakan mereka.

Berangkat dari perbedaan fenomena hukum inilah, perumusan permasalahan, pokok dan fokus kajian telah beralih menjadi mengapa terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut tidak dijerat atau dikenakan pasal-pasal pidana yang biasa dikenakan kepada para aktivis gerakan mahasiswa sebelumnya.

Dari tidak dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut, penulis mencoba untuk menjelajahi keputusa-



kaan yang ada, dalam artian mencoba mencari konsep membenarkan tindakan hukum tersebut. Secara hukum pidana materiil, apabila ada sebuah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur pidana, dan pelakunya sehat serta dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka pidana dapat dijatuhkan. Namun dalam realitas gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut seakan-akan rumusan tersebut tidak berlaku.

Realitas yang ada menunjukkan bahwa para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut secara jelas dan terang-terangan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Haatz-aai Artikelen maupun UUPK Subversi, dan orang-orangnyapun adalah orang-orang yang sehat dalam artian mampu untuk bertanggungjawab, tetapi realitas pula menunjukkan bahwa mereka tidak ditangkap maupun dipidanakan.

Penjelajahan kepustakaan yang dilakukan oleh penulis mencoba mencari penjelasan terhadap realita tersebut, hingga akhirnya penulis menemukan sebuah konsep *depenalisasi*, yaitu sebuah konsep yang dikemukakan oleh Prof. Sudarto S.H sebagai sebuah konsep yang mampu menjelaskan realita tersebut. Konsep *depenalisasi* oleh Prof. Sudarto S.H, dikemukakan sebagai sebuah terhadap sebuah perbuatan yang semula diancam dengan pidana, kemudian ancaman pidananya dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain yaitu dengan melalui hukum perdata maupun dengan menggunakan hukum administrasi<sup>1)</sup>.

## V

---

1) Dalam gerakan mahasiswa pro-reformasi yang terjadi menjelang Sidang Umum 1978, timbul sebuah fenomena yaitu dengan hampir tidak diterapkannya ketentuan-ketentuan pidana yang seringkali diterapkan pada aktivis gerakan mahasiswa sebelumnya. Fenomena ini disinyalir oleh penulis sebagai sebuah tindakan *depenalisasi* terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi. Ini terlihat bahwa dari banyaknya aktivis gerakan mahasiswa pro-refermasi yang melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi, aksi keprihatinan, dan aksi massa, namun sangat sedikit sekali yang dijerat dengan ketentuan-ketentuan pidana yang biasa digunakan.

Pembahasan tentang keberadaan *depenalisasi* menurut Prof. Sudarto S.H, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi*. *Kriminalisasi* dimaksudkan sebagai sebuah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai sebuah perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya sebuah undang-undang dimana perbuatan yang diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Sebaliknya pengertian *dekriminalisasi* adalah suatu proses dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya sebuah perbuatan, proses ini diakhiri dengan dicoretnya ketentuan yang bersangkutan dari perundang-undangan. Prof. Sudarto S.H menambahkan bahwa *dekriminalisasi* haruslah dibedakan dengan *depenalisasi*, yaitu adanya sebuah perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidananya dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain yaitu melalui hukum perdata atau hukum administrasi<sup>2)</sup>.

Ketiga Konsep tersebut dikemukakan oleh Prof. Sudarto S.H dalam kerangka pemikiran '*Sumbangan kriminologi untuk politik hukum pidana*', atau dengan kata lain, '*frame of references*' yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian kriminologi yang hasilnya dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-undang (*kriminalisasi*), pencabutan undang-undang (*dekriminalisasi*) maupun melakukan tindakan untuk tidak memidanakan sebuah perbuatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, namun

---

<sup>2)</sup> Dalam kaitannya dengan ketiga proses tersebut (*kriminalisasi*, *dekriminalisasi*, *depenalisasi*) maka kerangka kajian kritis dalam kriminologi telah melakukan sebuah upaya untuk memahami secara kritis tentang proses-proses pembentukan undang-undang dan sekaligus pola bekerjanya. Proses *kriminalisasi*, *dekriminalisasi* dan *depenalisasi*, dalam acuan kerangka kriminologi kritis merupakan sebuah pola kajian baru yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi guna perbaikan-perbaikan hukum pidana menuju bentuk hukum pidana yang lebih responsif. Penelitian-penelitian yang dilakukan dalam lingkup kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (*kriminalisasi*) atau pencabutan undang-undang pidana (*dekriminalisasi*) dan terjadinya tindakan *depenalisasi* sebuah perbuatan atau tindakan.

masih dapat diajukan tuntutan berdasarkan hukum perdata maupun hukum administrasi (*depenalisasi*)<sup>3)</sup>.

Kajian kriminologi digunakan untuk memberikan sumbangan terhadap keberadaan politik hukum pidana, kriminologi memberikan input-input yang bermanfaat bagi pengembangan hukum pidana itu sendiri menuju hukum pidana yang lebih responsif. Di satu sisi kriminologi memang tidak melakukan sebuah kebijakan, akan tetapi hasil dari penelahaan yang menggunakan '*frame of reference*' kriminologi dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan diambilnya sebuah kebijakan<sup>4)</sup>.

Dengan demikian kajian kriminologi yang digunakan dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang lebih nyata terhadap keberadaan hukum pidana itu sendiri khususnya dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, dimana realita menunjukkan bahwa tidak selamanya penanganan permasalahan sosial harus menggunakan hukum pidana atau hukum pidana tidak selalu harus digunakan untuk menghadapi sebuah fenomena sosial yang dianggap menyimpang, manakala

vii

---

3) Sudarto, 'Sumbangan Kriminologi untuk Politik Hukum Pidana', *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 153 dan 159, menurut Sudarto kriminologi bukan ilmu yang melakukan kebijakan, kriminologi adalah disiplin yang '*non policy making*' akan tetapi hasil penemuannya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Kriminologi dapat menyediakan bahan-bahan informasi untuk itu dan policy maker yang bijaksana tidak akan mengabaikannya. Konsep pengkajian masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi menurut G. Peter Hoefnagels merupakan dari ruang lingkup kajian kriminologi. G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer Holland, 1969, hal. 45, mengatakan: '*The field of criminology further covers the formal and informal processes which result in new penal laws (criminalization) and the abolition of penal laws (decriminalization). Criminal law is a logical cause of crime and a major element in the process of designating people as criminal. Provisionally, we can now say: criminology studies the formal and informal processes of criminalization and decriminalization, crime, criminals and those related there to, the cause of crime and the official and unofficial responses to it*'. Lihat Juga: Barda Nawawi Arief, '*Kebijakan Hukum Pidana*', *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 25.

4) I.S Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Edisi tahun 1995, hal. 13 dan halaman 24. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan merugikan atau membahayakan masyarakat luas akan tetapi hukum pidana belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini dapat dihasilkan apa yang disebut kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi. Lihat Juga Sudarto, *Ibid*.

fenomena sosial yang dianggap menyimpang tersebut memiliki akar permasalahan yang kompleks<sup>5)</sup>.

Realita inipun menunjukkan adanya bentuk-bentuk keterbatasan hukum pidana dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks, sehingga bentuk tindakan untuk tidak memidana para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut, dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau upaya non penal yang lebih mendekati kepada bentuk kebijakan sosial (*sosial policy*)<sup>6)</sup>.

Dalam berbagai perdebatan yang memperdebatkan kesahihan penggunaan konsep *depenalisasi* tersebut, muncul sebuah bantahan bahwa *depenalisasi* adalah sebuah bentuk kebijakan yang harus dilakukan secara terbuka, terang-terangan dan melalui proses formal, dalam artian ia merupakan sebuah bentuk kebijakan yang secara terang-terangan dikemukakan dan dilakukan oleh para

#### viii

5) Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP, Edisi Khusus 1997, Fakultas Hukum UNDIP, 1997, hal. 9-15. Barda Nawawi Arief yang mengutip pemikiran Sudarto (Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, 1983, hal. 35) mengutarakan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan suatu penanggulangan gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan dengan oleh sifat, hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar sebagai sarana untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa sanksi pidana inipun masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. terlebih 'obat' (pidana) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif atau paradoksal dan unsur-unsur negatif yang lebih membahayakan atau setidaknya tidaknya dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Disamping itu pula pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini ini sangat fragmentair, yaitu hanya terfokus pada dipidananya si pembuat. Dengan demikian efek preventif dan upaya perawatan atau penyembuhan (*treatment* atau *kurieren*) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan (efek prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat juga dilihat dari sifat atau fungsi ppidanaan selama ini, yaitu ppidanaan individual atau personal dan bukan ppidanaan yang bersifat struktural/fungsional.

6) Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Kriminal', Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 4. dan juga dalam bab III, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, hal. 47-62. Barda Nawawi Arief yang mengutip pemikiran G. Peter Hoefnagel (*The Other Side of Criminology*, 1969, hal. 56) menyebutkan bahwa upaya non penal dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan melakukan: pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan startegis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

pemegang penguasa terhadap sesuatu hal secara formal. Dengan kata lain konsep *depenalisasi* harus melalui proses formal sebagaimana layaknya proses *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi*, yaitu melalui sebuah proses kebijakan legislatif yang secara jelas dan terbuka mengangkat sebuah perbuatan sebagai tindak pidana, ataupun menghapuskan sebuah perbuatan sebagai bukan tindak pidana lagi.

Paparan atau bantahan tersebut bila ditilik memang berangkat dari konsep positivis yang melihat bahwa dalam melakukan *kriminalisasi*, *dekriminalisasi* dan *depenalisasi* haruslah secara kongkrit dan nyata melalui bentuk-bentuk keputusan formal yang diumumkan kepada masyarakat. Dalam satu sisi, secara positivis hal tersebut memang benar, bahwa keberadaan hukum pidana memang harus didasarkan kepada konsep legalitas yang mutlak, namun disisi lain, dalam realitanya ternyata konsep legalitas tersebut tidak selamanya harus diterapkan secara mutlak dan mati, tetapi dapat disimpangi oleh beberapa tindakan yang dikenal dengan istilah *diskresi*, *oportunitas*, *deponir* maupun *depenalisasi*.

Dalam realitanya, keberadaan hukum pidana justru tidak akan mampu memahami perkembangan kondisi dan situasi yang mungkin dapat berubah dengan cepat, bahkan dalam kondisi yang normal-pun terkadang hukum pidana mengalami '*ketidak-mampuan*' dalam menjelaskan realita yang sebenarnya. Oleh karena itulah dalam mengkaji hal-hal yang tidak mampu dijelaskan oleh kajian hukum pidana, maka kajian kriminologis sebagai sebuah kajian yang lebih luas digunakan untuk mengkaji sebuah realitas sosial yang sangat kompleks dan tidak terjangkau oleh bentuk pemahaman hukum pidana.

Kembali kepada konsep positivis atau konsep kebijakan formal yang mengemukakan bahwa konsep *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi* haruslah melalui konsep legalitas formal, atau melalui bentuk kebijakan legislatif agar kekuatan mengikatnya secara resmi terjaga, akan membuat hukum pidana terkungkung ke dalam sebuah bentuk keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam merespon kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaan hukum pidana akan lebih banyak mengalami kesulitan dalam menjelaskan realita yang berbeda.

Konsep *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi* sendiri menurut Hoefnagel, tidak selamanya harus bersifat formal, sebab ada juga proses yang bersifat informal. Mengacu kepada pandangan yang dikemukakan oleh Hoefnagel tersebut, penulis juga melihat bahwa konsep *depenalisasi*-pun tidak harus dilakukan secara formal, atau harus melalui kebijakan legislatif atau melalui kebijakan penguasa yang secara terbuka dan terang-terangan menyatakan '*depenalisasi terhadap sesuatu hal*'. Pengemukakan *depenalisasi* secara formal dan terang-terangan terhadap sesuatu hal atau perbuatan, memang pernah dilakukan oleh para pemegang kekuasaan, yaitu terhadap tindak pidana penarikan cek kosong (UU No. 12 tahun 1971 Jo. Perpu No. 1 tahun 1971). Namun *depenalisasi* secara informal-pun, atau tindakan *depenalisasi* yang tidak pernah dinyatakan secara terang-terangan atau tidak mendasarkan kepada sebuah keputusan formal yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan-pun dalam kenyataannya juga telah terjadi. Misalnya saja terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan '*tindakan pengemisan*', pasal-pasal yang berkaitan dengan '*tindakan menyiksa hewan*', atau terhadap sebuah fenomena sosial yang secara sadar diketahui dan memenuhi unsur-unsur rumusan sebuah tindak pidana namun hal tersebut dibiarkan saja atau diabaikan tanpa adanya sebuah tindakan penangkapan atau pemidanaan terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Realita yang menunjukkan adanya sebuah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi, dan para pelakunya mampu bertanggungjawab, namun tidak dipidana, secara tersirat tindakan tersebut sudah merupakan tindakan *depenalisasi* atau sebuah tindakan untuk tidak memidanakan atau menggunakan tindakan serta perangkat pidana terhadap perbuatan tersebut.

Berangkat dari realita inilah, maka penulis mendapatkan sebuah pokok kajian yang baru, dan belum banyak dikemukakan atau dikaji oleh banyak penulis. Dari beberapa literatur yang penulis gunakan untuk membangun konsep pemahaman tentang *depenalisasi*, penulis hanya menemukan 2 buah literatur yang mengemukakan tentang *depenalisasi*<sup>7)</sup>, namun itupun hanya satu alinea dan kurang membahas secara mendalam tentang bagaimana proses penerapannya dan kriteria apa saja yang digunakan untuk menggunakannya.

Dari keadaan inilah, maka penulis mencoba mendeskripsikan realita yang ada, untuk kemudian dapat digunakan sebagai acuan dalam membangun konsep *depenalisasi* dalam hukum pidana, menuju bentuk hukum pidana yang lebih responsif.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada pada penulis, dan dengan berbagai bimbingan, dorongan dan bantuan banyak pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Dengan kerangka utama mencoba memahami keberadaan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dan reaksi timbal-baliknya dari aparat-keamanan dan ketertiban, penulis mencoba untuk membangun sebuah kerangka konsep *depenalisasi* yang berdasarkan kepada realita-realita empiris yang penulis temui di lapangan.

---

7) Buku Hukum dan Hukum Pidana yang ditulis oleh Prof. Sudarto, S.H, serta Buku Kriminologi yang ditulis oleh DR. I.S Susanto, S.H, seperti yang telah dikemukakan diatas.

Pada kesempatan ini pula penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan mungkin terselesaikan bila bukan karena bantuan banyak pihak, oleh karena itulah penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung sehingga karya ini layak untuk disebut sebagai sebuah tesis.

Begitu banyak pihak yang telah membantu dan pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Purwahid Patrik S.H, selaku ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah berkenan menerima penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di lembaga ini, dan telah berkenan menguji teori dan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis dalam tesis ini.
2. DR. I.S Susanto, S.H, selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan rekomendasi kepada penulis untuk memasuki lembaga Magister Ilmu Hukum, dan telah dengan penuh keterbukaan, kepatuhan dan kesabaran membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, dan mampu membuka cakrawala baru bentuk pemahaman kriminologi yang lebih kritis kepada penulis.
3. Prof. Soehardjo Sastrosoehardjo, S.H dan Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, selaku anggota Dewan Penguji yang telah berkenan menguji dan memberikan informasi-informasi yang berguna untuk menyempurnakan pemahaman dalam tesis ini.
4. Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H dan DR. Esmi Warassih S.H, M.S, yang telah berkenan melakukan review terhadap proposal tesis ini, sehingga dalam melakukan penelitian lapangan penulis memperoleh gambaran kajian hukum yang lebih jelas. Kepada Prof. DR. Dimiyati Hartono S.H yang telah memberikan sebuah konsep wawasan keilmuan yang lebih terbuka dalam melakukan penelaahan hubungan antara hukum dengan ekonomi, hubungan hukum dengan politik, hubungan hukum dengan budaya,



dan hubungan hukum dengan politik, ekonomi dan budaya sebagai sebuah kesatuan alur kehidupan yang keberadaannya akan saling mempengaruhi.

5. *Keluarga Besar Lembaga Bantuan Hukum Bandung* di Jl. Kebon Bibit Utara No. 9 Bandung, khususnya kepada Om Toto, Om Suryadi, Om Wiraman, Om Irwan, Om Herman, Om Gatot, Hena-sari, Mulyadi, Saut, Midian, Ria, Tia, dan teman-teman di LBH lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas semua bantuan, penerimaannya dalam mencari dan membuka data serta informasi yang dibutuhkan dalam mengungkap keberadaan aktivitas gerakan mahasiswa pro-reformasi di Bandung sebagai sebuah langkah awal menuju bentuk pemahaman yang lebih luas dan kompleks.
6. *Keluarga Besar Lembaga Bantuan Hukum Jakarta* di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta, khususnya kepada Rino Subagyo, Echoline Situmorang, dan teman-teman lainnya yang tergabung dalam wadah *Kontras* beserta Munir, Mulyana W. Kusumah, Bambang Cs. , Kepada teman-teman di *Solideritas Nusa Bangsa*, yang secara tidak langsung telah ikut mengembangkan pola kajian kepada hal yang lebih kritis, membawa langsung kepada subjek-subjek pelaku aktivis gerakan mahasiswa di lapangan, dan memberikan beberapa informasi yang mungkin saat itu masih merupakan informasi yang belum dapat beredar secara bebas.
7. *Keluarga Besar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)* di Jl. Latuharhary, Jakarta, khususnya kepada Bapak Clementino Dos Reis Amaral, Bapak A.A Baramuli (sewaktu masih berada di Komnas HAM dan belum menjadi Ketua DPA), Bapak Joko, Bapak Bambang W. Suharto, yang saat itu mau menerima penulis dalam melakukan penelitian khususnya ketika terjadi insiden triksakti di Jakarta. Kepada Mba Atikah yang saat itu menjadi penghubung pertama kali di Komnas HAM beserta informasi-informasinya dari perpustakaan Komnas HAM,

dan tidak lupa kepada Prof. Soetandyo Wignyosoebroto MPA, yang saat itu bertemu lebih mengkhususkan diri dalam mengajak berdiskusi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membangun konsep penelitian kualitatif terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

8. *Keluarga Besar Majalah Detektif Romantika*, khususnya kepada Gatot Prihanto dan Muhammad Jaelani, yang telah memberikan banyak sekali informasi secara tertulis dan tidak terbatas kepada penulis mulai bulan Mei 1997 hingga akhir penelitian, baik melalui bentuk 'majalah-majalah' gratis hingga informasi-informasi lisan yang 'off the record'. Mulai dari kantor majalah 'DR' masih berada di jalan Cikini hingga kantor majalah 'DR' berada di Gedung Tempo di Jl. Proklamasi dan pindah lagi, serta tidak lupa kepada teman-teman Wartawan 'DR', yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalin hubungan yang lebih erat.
9. *Keluarga Besar Majalah Gatra*, khususnya kepada Agus Rahardjo dan 'Rini-nya', yang saat itu pernah memberikan informasi atas beberapa literatur tentang gerakan mahasiswa, serta memberikan sebuah buku notes kecil 'Gatra' yang ternyata berfungsi amat besar di lapangan, ketika terjadi kerusuhan, dan buku notes tersebut mampu menyelamatkan penulis dari amukan petugas keamanan dan ketertiban dengan mengaku sebagai wartawan Gatra.
10. *Kepada Keluarga Besar H.U Bandung Pos*, khususnya kepada Alm. Bapak Kosasih, Bapak Bastaman dan Bapak Herry Setiawan (redaktur opini) yang telah memberikan tempat khusus bagi penulis dalam menuangkan gagasan-gagasan secara parsial tentang perkembangan hukum, politik dan ekonomi dalam bentuk wacana-wacana ilmiah yang akhirnya menjadi artikel-artikel pendukung dalam tesis yang penulis buat, dan menjadi sebuah bahan-bahan literatur menuju kepada sebuah bentuk

pemahaman yang utuh tentang perkembangan hukum, politik, ekonomi di masa Orde Baru.

11. *Keluarga Besar ABRI dan Polri*, khususnya jajaran ABRI di Kodam III Siliwangi, dan Polda Jawa Barat, walaupun dengan segala keterbatasannya dalam memberikan informasi yang sebatas kerahasiaan militer diperbolehkan, namun dalam berbagai bentuk perbincangan yang *'off the record'* tersebut mampu membuka pemahaman kepada bentuk pemahaman yang lebih luas atas berbagai tindakan dan perlakuan aparat keamanan terhadap sesuatu hal yang dianggap kritis dan mendesak, maupun tindakan-tindakan baku standar militer yang harus diterapkan. Dalam sisi ini terlihat adanya bentuk bentuk pertimbangan tertentu yang teramat dilematis bagi ABRI dan Polri itu sendiri, karena bukan saja harus taat dan patuh pada hukum dan atasan, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara hati nurani, moral dan keselamatan negara dan bangsa. Dalam sisi ini akan terlihat pertimbangan-pertimbangan pribadi sebagai manusia biasa, maupun pertimbangan-pertimbangan yang bersifat jabatan karena tugas yang mengharuskan mereka bertindak mendahulukan keselamatan negara dan bangsa dari ancaman disintegrasi. Sebenarnya ada keinginan untuk mencantumkan beberapa nama pejabat yang saat itu ditemui oleh penulis sebagai sebuah penghargaan dan ucapan terima kasih, namun dikarenakan apa yang dinyatakan oleh mereka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah *'informasi formal'* (sebuah informasi formal menurut mereka merupakan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan informasi, misalnya Kadispen atau Panglima atau Kepala Kepolisian atau Pejabat yang ditunjuk langsung untuk memberikan informasi) diluar itu semua mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pers release. Melihat keadaan tersebut maka dengan sangat menye-

sal, nama-nama tersebut, hanya merupakan data tertutup yang hanya dimiliki oleh penulis dan bukan untuk disebarluaskan. Namun sebagai gambaran umum di Lingkup ABRI, informasi tersebut meliputi, aspek Teritorial, Operasional, Sosial Politik, Intelijen, dan dari Polri melingkupi aspek Binmas, Lantas, Intelpam, Reserse dan Semaptha.

12. *Keluarga Besar Perpustakaan Nasional* di Jl. Salemba Raya Jakarta, *Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah* di Jalan Sriwijaya, *Perpustakaan Wilayah Jawa Barat* di Jl. Cikapundung dan Jl. Soekarno Hatta, yang telah bersedia menerima penulis dalam melakukan observasi kepastakaan, khususnya kepada Bapak Aan Permana di Semarang, dan adinda Nur Farida yang secara tidak langsung telah membuka jalan dalam mencari bahan pustaka yang lebih banyak, melalui kegiatan pemilihan putri dan pangeran buku tahun 1997 di Jawa Tengah dan Jakarta. Melalui kegiatan ini penulis memperoleh gambaran tentang jalur-jalur informasi mana saja yang dapat dilakukan untuk menunjang penelitian kepastakaan.
13. *Keluarga Besar Perpustakaan S2 Ilmu Hukum* yang kemudian menjadi Perpustakaan Fakultas Hukum, khususnya kepada Pak Mukhson dan staf lainnya yang telah memberikan kesempatan yang luas (bahkan terkesan seluas-luasnya) dalam menggunakan dan memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan guna memberikan bentuk-bentuk pemahaman yang lebih luas, serta atas kesabaran Pak Mukhson yang mau menemani penulis kala menunggu kuliah atau menunggu dosen, ketika perpustakaan masih berada satu gedung dengan ruang kuliah. Dan juga keada segenap Staf Tata Usaha Magister Ilmu Hukum, Khususnya kepada Mas Susilo dan Mas Timan, yang selama ini berperan langsung membantu terlaksananya proses pendidikan dan penelitian.

14. *Kepada Teman-teman Mahasiswa* yang selama ini menjadi teman penulis dalam melakukan penelitian, namun karena atas permintaan mereka, mereka tidak mau disebutkan namanya, dan biarlah nama-nama itu tetap menjadi informasi tertutup yang hanya diketahui oleh penulis dan yang bersangkutan. Bahwa tanpa bantuan dan penerimaan mereka dalam melakukan penelitian, mustahil penelitian ini dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan atas berbagai bantuan dan penerimaannya penulis berkeyakinan mereka telah memberikan andil yang cukup besar dalam membuka jaringan informasi, mencari bentuk-bentuk isme yang berkembang di kalangan mahasiswa, dan yang paling penting, bersama mereka pula, penulis memahami arti sebuah metode penelitian observasi partisipan, yang mencoba melakukan berbagai bentuk kehidupan secara bersama-sama, memahami perilaku dalam kesehariannya dan memahami berbagai tindakan, diskusi, langkah-langkah, metode yang kerap digunakan oleh para aktivis gerakan mahasiswa. Jelas hal ini merupakan sebuah bentuk kehidupan tersendiri, langka dan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pembukaan diri dari mereka untuk menerima penulis masuk ke dalam lingkarannya.
15. *Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum, khususnya angkatan XV* yang telah banyak memberikan dorongan, kritikan dan Saran sehingga karya ini dapat terwujud, khususnya kepada Kang Endang, Bang Zul, Mas Tongat, Pak Heru, Pak Ketut, Mas Adi, Bu Ida, Hilda, Om John, Kang Sigid, Bang Ridwan, Bu Sari, Mba Uning dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, dan tidak lupa kepada Bang (Pak) Ismansyah, yang secara tidak sengaja bertemu dengan penulis di Jakarta ketika terjadi kerusuhan di jalan Salemba Raya, merupakan saksi utama terjadinya

peristiwa kekerasan, dan vandalisme, keburutalan pasca peristiwa Trisakti. Juga kepada Hasyim Asy'ari, yang memberikan berbagai bentuk pemahaman pendalaman tentang berbagai bentuk konflik, perubahan sosial dan pemahaman politik atas sebuah realita menuju bentuk teoritik berdasarkan beberapa bentuk pemahaman literatur yang ada. Dan juga kepada Gunawan BL, yang telah bersedia mengantarkan penulis ke dalam lingkungan Gedung MPR DPR, ketika terjadi Sidang Istimewa 1998, kepada Mas Abdul Kholik, sebagai *Legal Drafter* DPP Golkar yang memberikan jalur-jalur informasi yang harus penulis temui di Jakarta dalam mengungkap wacana teoritik keberadaan gerakan mahasiswa. Kepada Rachmat Ahadijat, teman Penulis dari UNPAD yang telah banyak membantu memberikan pemahaman dalam melakukan penerjemahan literatur asing dan memahami teks-teks asing berbahasa Inggris, dan memberikan petunjuk acuan-acuan apa saja yang harus digunakan dalam melakukan penerjemahan. Kepada adinda Fitri Pramutiyasih yang telah membantu secara nyata di Semarang dalam memperlancar penggunaan bahasa Inggris baik secara praktis, maupun untuk melakukan penerjemahan. Kepada Yus Windarto, yang pernah menemani penulis ketika penulis mengalami kejenuhan dan kemandegan dalam menggarap tesis.

16. *Keluarga Bapak Slamet Subagyo*, yang telah bersedia dan berkenan menerima penulis untuk ikut serta 'ngerepoti manggon' di rumah beliau, dan atas segala keramahannya, sehingga tanpa beliau rasanya sulit bagi penulis untuk dapat mewujudkan karya ini, karena bagaimanapun juga penyempurnaan karya ini dilakukan di tempat beliau. Khususnya kepada Pak Slamet, Bu Slamet, Awal, Beti dan Cepti yang disela-sela kesehariannya, dengan ceria mau menemani dan 'ngobrol-ngobrol' guna memperlancar proses sosialisasi dalam bahasan 'jawa' yang selama ini masih merupakan hambatan yang kerap penulis rasakan.

17. Keluarga Bapak Tjiptono Indrosoeparto dan Ibu Sri Sudarwati, yang telah berkenan menerima penulis untuk ikut serta 'ngerepoti manggon' di rumah beliau di Jakarta ketika melakukan studi lapangan di Jakarta, ketika terjadi aksi penembakan dan tragedi Trisakti di Bulan Mei dan aksi kerusuhan dan penembakan semanggi ketika terjadi Sidang Istimewa di Gedung MPR DPR, dan Universitas Atmajaya. Tidak lupa kepada yang tersayang atas segala pengertian, dukungan moril dan materiil, adinda Tuning Sumiasih, semoga engkau tetap menjadi *'the best in my life'*.
18. Kedua orang tua penulis, Bapak Sam Ghozali dan Ibu Sodikoh, yang atas perkenannyalah penulis dapat memasuki program magister, dan atas pembiayaannyalah karya ini dapat terselesaikan. Kepada Adik-adik penulis Nung, Awi dan Akih yang terkadang kerap direpoti oleh 'kakaknya' ini kalau berada di Bandung dengan segala permintaannya.
19. Serta berbagai pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan satu-persatu namun telah memberikan andil sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan memperoleh hasil yang baik.
- Penulis-pun menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna, demikian pula dengan keberadaan tesis ini, oleh karena itu sumbang kritik dan saran yang membangun akan senantiasa diterima oleh penulis demi menuju bentuk pemahaman yang lebih sempurna lagi.

*'Tidak ada gading yang tak retak'*, demikian menurut peri bahasa, dan tidak ada karya yang sempurna, namun walau karya ini mungkin teramat jauh dari kesempurnaan, penulis tetap memiliki keyakinan bahwa karya ini akan tetap memberikan manfaat, walaupun manfaat itu terasa kecil adanya.

Sebatas apa yang telah dikemukakan, dan apa yang telah dituangkan dalam bentuk karya tulis yang disebut tesis ini,

dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkena, atau ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung dalam materi tesis ini, itu semua hanyalah sebuah deskripsi atas sebuah realitas sosial yang ada, tanpa bermaksud menyinggung atau menghujat kepada orang-perorang. Semua ini dilakukan dengan harapan dapat membawa kita semua kepada bentuk-bentuk pemahaman yang lebih demokratis, kritis, dan responsif dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Kerelatifan sebuah ilmu sosial adalah sesuatu yang nyata, sehingga mungkin saja dalam tataran konsep atau dalam kacamata yang berbeda akan memiliki sudut pandang yang berbeda pula. *'Kepala boleh sama hitam, namun apa yang ada didalam isi kepala boleh tidak sama'*, justru disanalah letak dinamika ilmu pengetahuan sosial yang selalu mempertanyakan sebuah kemapanan atas sebuah realita dan dari konsep itu pulalah, ilmu pengetahuan sosial mampu mencari jalannya sendiri-sendiri untuk menemukan bentuk-bentuk pemahaman yang lebih mampu menjelaskan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis kembali mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik besar maupun kecil. Penulis menyadari tidak mungkin membalasnya secara nyata dan langsung bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, dan hanya Allah jua-lah yang mampu membalas amal perbuatan mereka. Semoga itu semua menjadi amal kebaikan dan pahala bagi kita semua, amin.

*'Bila ada jarum yang patah, janganlah dimasukkan ke dalam peti, dan bila ada kata yang salah, janganlah ia dimasukkan ke dalam hati'*, semoga anda semua yang membacanya mau dan mampu memaafkannya.

Semarang, 8 Januari 1999

**Achmad Fadilah**



## RINGKASAN

Menjelang Sidang Umum MPR 1998 aksi gerakan mahasiswa kembali marak di setiap perguruan tinggi. Fenomena ini semakin menarik manakala segenap sivitas akademiknya ikut serta terlibat dalam aksi mimbar bebas yang mengkritisi berbagai tindakan dan perilaku penguasa dan lembaga kekuasaan itu sendiri.

Penelitian ini pada awalnya dilakukan di kotamadya Bandung, namun dalam perkembangannya penelitian ini telah menjangkau beberapa kota lainnya yang memiliki keterkaitan atau hubungan yang erat dengan gerakan mahasiswa pro-reformasi itu sendiri. Pemilihan kota Bandung sebagai lokasi awal penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Bandung selama ini telah dikenal sebagai barometer kegiatan kemahasiswaan selain Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya. Perkembangan lokasi penelitian tidak lain sebagai konsekuensi dari penggunaan metode penelitian kualitatif yang berkehendak untuk menemukan hal-hal yang baru dan terinci, sampai tidak diketemukannya kembangan informasi yang baru.

Dari realitas ini ada sebuah fenomena hukum yang berbeda dengan fenomena hukum yang sebelumnya. Dimana dalam fenomena hukum yang sebelumnya setiap kali para aktivis gerakan mahasiswa melakukan tindakan atau perbuatan yang mengkritisi penguasa atau lembaga kekuasaan, maka hukum pidana selalu digunakan untuk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa tersebut. Aturan hukum pidana yang sering digunakan untuk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa tersebut adalah Pasal 154 KUHP (*Haatzaa* Artikel) dan UUPK Subversi No. 11/PnPs/1963.

Fenomena yang berbeda muncul manakala maraknya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang bergerak melalui aksi unjuk rasa, aksi demonstrasi, aksi mimbar bebas, menggelar spanduk dan baliho, bahkan melakukan pendudukan di gedung DPRD/DPR-MPR tidak dikenakan atau dijerat dengan hukum pidana yang biasa dikenakan kepada para aktivis gerakan mahasiswa sebelumnya.

Dalam fenomena tidak dijerat atau tidak dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menunjukkan adanya indikasi bentuk tindakan *depenalisasi* secara informal terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Tindakan untuk tidak menangkap atau mempidanakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dengan aturan-aturan hukum pidana yang biasa digunakan oleh penguasa untuk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa menunjukkan adanya bentuk-bentuk pertimbangan tersendiri yang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang munculnya sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap penguasa atau lembaga kekuasaan itu sendiri.

Sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sebenarnya merupakan sebuah bentuk reaksi atas sikap dan perilaku dari penguasa dan lembaga kekuasaan itu sendiri. Sikap oposan yang ditunjukkan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terbentuk oleh kondisi dan latar belakang pemikiran yang berbeda-beda, dimana kondisi dan latar belakang pemikiran tersebut dapat muncul secara sistematis maupun secara acak. Sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terbentuk karena timbulnya pemikiran kritis, merasa memiliki *moral force* dan sebagai *social control*, mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga formal dan informal, penguasa, wakil rakyat, tokoh agama

dan lembaga pendidikan, meyakini adanya kebobrokan dibidang moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian, dan meyakini adanya kebobrokan dibidang hukum dan sistem peradilan.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, melibatkan peran Polri sebagai kelompok inti dan ABRI sebagai kelompok pendukung. Secara teoritik pemisahan fungsi antara kelompok inti dan kelompok pendukung dalam menangani dan menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa lebih disebabkan pada perbedaan fungsi yang sangat mendasar, yaitu fungsi Polri sebagai sarana kamtibmas dan fungsi ABRI atau militer non Polri sebagai satuan tempur yang berfungsi menjaga keamanan negara apabila ada ancaman dari luar. Namun dalam realitanya perbedaan fungsi tersebut dapat diabaikan demi kepentingan untuk menjaga stabilitas nasional.

Secara formal prosedural untuk menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, Polri-lah yang pertama kali menangani dan bila masih membutuhkan bantuan, satuan ABRI atau militer non Polri diperbantukan untuk mendukung pengamanan. Namun dalam kondisi tertentu dimana menurut perhitungan taktis-strategis dan operasional memang membutuhkan penanganan pengamanan secara terpadu, maka kedua kelompok tersebut dapat diturunkan secara bersama-sama.

Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi bergantung kepada lokasi aksi, rencana aksi, jumlah massa peserta aksi dan tuntutan aksi. Sedangkan perlakuan pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban bergantung kepada: aksi yang berlangsung disekitar kampus, aksi yang memiliki rencana untuk mengadakan 'long march' atau turun kejalan, aksi yang berlangsung secara tertib dan damai, dan aksi yang memiliki kecenderungan untuk terjadinya kerusuhan massa.

Tidak dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi atas berbagai perbuatan yang dilakukannya merupakan indikasi adanya tindakan *depenalisasi* secara informal. Tindakan *depenalisasi* atau tidak dipidananya perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi berkaitan erat dengan munculnya sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang juga mengacu kepada latar belakang pemikiran yang memunculkan sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, tindakan *depenalisasi* berdasarkan realita merupakan tindakan yang mengakui adanya bentuk-bentuk keterbatasan hukum pidana dalam menangani masalah kejahatan yang bersifat kompleks.

Tindakan *depenalisasi* terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dilandasi tiga bentuk pertimbangan, dimana antara satu pertimbangan dengan pertimbangan berikutnya tersusun secara sistematis. Secara komponensial tindakan *depenalisasi* dilandasi dengan pertimbangan praktis-sosilogis, pertimbangan politis dan pertimbangan hukum, dengan memperhitungkan hal-hal yang lebih menguntungkan dari diterapkannya atau tidak diterapkannya hukum pidana pada perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut.

Realita dengan tidak dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi adalah sebuah realita yang berbeda ketika pengaruh 'kekuasaan' masih nampak dengan jelas di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer pada masa Orde Baru, yaitu dengan

banyaknya para aktivis gerakan mahasiswa yang dipidana oleh perbuatan yang serupa.

Di masa bergulirnya gelombang reformasi terjadilah perubahan sosial yang mempengaruhi aspek hukum, politik, ekonomi dan militer dan membawa dampak pada pola penanganan pengamanan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, yaitu dengan tidak dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Dengan demikian pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi tindakan *depenalisasi* terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi adalah pengaruh perubahan sosial dibidang ekonomi, politik dan militer.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN .....	xxi
DAFTAR ISI .....	xxiv
DAFTAR BAGAN .....	xxix
DAFTAR TABEL .....	xxxii
 BAB I. PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Kerangka Pemikiran .....	14
F. Metode Penelitian .....	41
G. Sistematika Penulisan Tesis .....	54
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	 58
A. Tinjauan Umum Gerakan Mahasiswa Indonesia ..	58
1. Pemahaman dasar gerakan mahasiswa dan pemuda Indonesia .....	58
2. Periode masa kebangkitan nasional .....	62
3. Periode masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia.....	69

4. Gerakan mahasiswa periode 1966 dan pasca 1966 .....	75
5. Gerakan mahasiswa periode tahun 1990-an ..	79
6. Teori umum gerakan mahasiswa .....	81
B. Haatzaai Artikel dan Gerakan Mahasiswa ...	93
1. Pasal-pasal Haatzaai Artikel .....	93
2. Sejarah dan penggunaan Haatzaai Artikel-pasal 154 KUH Pidana .....	96
3. Penerapan Haatzaai Artikel pada aktivis gerakan mahasiswa .....	110
C. Reintegrasi Hukum, Politik dan Teori Sosial dalam Kriminologi Kritis menuju Hukum yang Responsif .....	131
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>170</b>
A. Sikap Oposisi Para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi terhadap Para Pemegang Kekuasaan .....	170
1. Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi memiliki pemikiran yang kritis melalui berbagai informasi .....	176
2. Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi merasa memiliki kekuatan moral dan dapat berperan sebagai lembaga kontrol sosial .....	183
3. Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap keberadaan lembaga formal dan lembaga informal .....	189

4. Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap penguasa .....	192
5. Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap wakil rakyat .....	202
6. Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap tokoh agama .....	214
7. Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap lembaga pendidikan .....	219
8. Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan meyakini adanya kebobrokan di bidang moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian .....	224
9. Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan meyakini adanya kebobrokan di bidang hukum .....	227
B. Tindakan serta Perlakuan Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Menghadapi Perbuatan Para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi. ....	232
1. Tindakan serta perlakuan Polri dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	237
2. Tindakan serta perlakuan ABRI atau Mili-ter non Polri dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	244

3. Tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam melakukan pengamanan terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	250
C. <i>Depenalisasi</i> Perbuatan Para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi. ....	269
1. Pertimbangan praktis-sosiologis yang menyebabkan <i>depenalisasi</i> perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	273
2. Pertimbangan politis yang menyebabkan <i>depenalisasi</i> perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.....	279
3. Pertimbangan hukum yang menyebabkan <i>depenalisasi</i> perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	285
D. Pengaruh-pengaruh Non Hukum Yang Mempengaruhi <i>Depenalisasi</i> Perbuatan Para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi. ....	292
1. Pengaruh kekuasaan di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer di masa Orde Baru .....	300
2. Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa di masa Orde Baru .....	303
3. Pengaruh perubahan sosial di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer menjelang era reformasi .....	309
4. Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menjelang era reformasi. ....	312

BAB IV. PENUTUP .....	318
A. Kesimpulan .....	318
B. Saran .....	323

#### DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR BAGAN

Halaman

### BAB I. PENDAHULUAN

Bagan 1. Hubungan kriminologi kritis dan penelitian kriminologi bagi hukum pidana dalam hal kriminalisasi, dekriminialisasi, <i>depenalisasi</i> menuju hukum pidana yang reponsif .....	25
Bagan 2. Skema reintegrasi hukum, politik dan teori ilmu sosial untuk membuat ilmu hukum menjadi lebih hidup dan lebih relevan menurut Phillipe Nonet dan Philip Selznick .....	30
Bagan 3. Skema metode pemahaman kritis terhadap ' <i>legal order</i> ' dan kejahatan menurut Richard Quinney .....	44
Bagan 4. Skema penelitian kualitatif .....	51

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagan 1. Skema timbulnya pemikiran kritis dan kebebasan berpendapat pasca perang dingin serta pengaruhnya kepada gerakan mahasiswa secara global .....	83
Bagan 2. Skema akar sejarah Haatzaai Artikelen yang diambil dari pasal 124 a British Indian Penal Code .....	104
Bagan 3. Skema reintegrasi hukum, politik dan teori ilmu sosial dalam kriminologi kritis menuju hukum yang responsif.....	134

Bagan 4. Skema proses pemberdayaan masyarakat melalui informasi dan pendidikan oleh kelompok kelas menengah menuju kondisi yang responsif .....	164
Bagan 5. Skema keadaan yang terlalu responsif dapat mengakibatkan kondisi kembali menjadi represif .....	167

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagan 1. Taksonomi aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	171
Bagan 2. Munculnya sikap oposan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	175
Bagan 3. Taksonomi aparat keamanan dan ketertiban beserta unsur-unsur pendukungnya dalam menghadapi berbagai aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	235
Bagan 4. Perbedaan antara tindakan dan perlakuan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban .....	250
Bagan 5. Perlakuan aparat keamanan dan ketertiban .....	259
Bagan 6. Posisi pertimbangan praktis-sosiologis, politis dan hukum dalam membangun konsepsi <i>depenalisasi</i> perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi. ....	272
Bagan 7. Pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi <i>depenalisasi</i> perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	299

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Sumber informasi bagi aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang membentuk pola pikir kritis .....	181
Tabel 2. Konsep dasar pemikiran timbulnya kekuatan moral bagi aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menuju fungsi kontrol sosial .....	185
Tabel 3. Penyebab munculnya sikap krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dan implementasinya ....	192
Tabel 4. Penyebab krisis kepercayaan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap penguasa di bidang perekonomian dan sistem politik pemerintahan .....	201
Tabel 5. Penyebab krisis kepercayaan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap wakil rakyat di bidang sistem politik pemerintahan dan perekonomian .....	212
Tabel 6. Penyebab krisis kepercayaan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap tokoh agama di bidang agama, sistem politik pemerintahan dan perekonomian .....	217
Tabel 7. Penyebab krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap lembaga pendidikan.....	222

Tabel 8. Indikator kebobrokan moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian yang muncul dalam realita menurut aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi	226
Tabel 9. Indikator kebobrokan hukum dan sistem peradilan yang muncul dalam realita menurut aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	231
Tabel 10. Tindakan serta perlakuan Polri dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	243
Tabel 11. Tindakan dan perlakuan ABRI dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	249
Tabel 12. Tindakan aparat keamanan dan ketertiban dalam melakukan pengamanan terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	258
Tabel 13. Perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam melakukan pengamanan terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	268
Tabel 14. Pertimbangan praktis-sosiologis yang menyebabkan <i>depenalisasi</i> perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	278
Tabel 15. Pertimbangan politis yang menyebabkan <i>depenalisasi</i> perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi .....	284

Tabel 16. Pertimbangan hukum yang menyebabkan depenalisasi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro- reformasi .....	291
Tabel 17. Pengaruh kekuasaan di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer di masa Orde Baru. ....	303
Tabel 18. Tindakan dan perlakuan aparat keama- nan dan ketertiban terhadap aktivis gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru. ....	308
Tabel 19. Pengaruh perubahan sosial di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer menjelang era reformasi .....	312
Tabel 20. Tindakan dan perlakuan aparat keama- nan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-refor- masi menjelang era reformasi .....	317

## BAB I . PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi yang kini makin mudah diperoleh, ternyata makin membuat cakrawala dan pola berfikir yang terbuka. Informasi membentuk pola pikir seseorang menjadi semakin kritis, dan informasi pun membuat sebuah keadaan menjadi semakin transparan, sesuai dengan informasi yang dipaparkan olehnya<sup>1)</sup>.

Era keterbukaan, globalisasi dan demokratisasi yang kini berkembang ternyata makin membuat negara seakan-akan menjadi kehilangan batas-batasnya. Berbagai kebijakan yang dilontarkan oleh negara dan penguasanya, bukan lagi menjadi sesuatu hal yang bersifat rahasia, tabu dan tertutup. Namun menjadi sesuatu hal yang terbuka serta transparan untuk dicermati dan dikaji secara mendasar<sup>2)</sup>.

Pemahaman terhadap berkembangnya sebuah informasi, ternyata membentuk pola pikir kritis yang berkembang pula, sebab dengan semakin banyaknya perbendaharaan informasi yang dimiliki oleh seseorang, membuat seseorang semakin kaya pemahamannya dan makin mudah untuk melakukan sebuah analisis terhadap permasalahan yang ada<sup>3)</sup>.

---

1) Walter B Wriston, The Twilight of Sovereignty : How the Information Revolution is Transforming Our World (Bagaimana Revolusi Informasi Mengubah Dunia), dalam bab Percakapan Global dan Standar Informasi, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996, hal. 33-58. Konsep pemahaman dasar yang dikemukakan adalah bagaimana sebuah arus informasi tersebut mampu melakukan perubahan-perubahan sosial dan teknologi di masyarakat, sebab dengan perkembangan informasi berkembang pula kesadaran dan cakrawala berfikir yang makin luas.

2) Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 26-27. Huntington menggambarkan bahwa melalui revolusi di bidang informasi, maka isu demokratisasi begitu cepat berkembang dan mampu meruntuhkan dominasi pola pikir lama yang begitu erat di kukuhi oleh kelompok negara-negara komunis di Eropa Timur. Isu Demokratisasi ini melanda berbagai belahan dunia sehingga menimbulkan gejala bahwa negara-negara tersebut kehilangan batas-batas teritorialnya yang pasti, karena ternyata arus informasi yang masuk tidak dapat dibendung dan menggerakkan masyarakat menuju terciptanya masyarakat yang lebih demokrasi. Dengan demikian keadaan suatu negara dengan negara lain menjadi semakin transparan, mudah untuk dicermati dan dianalisis pola kebijakan politiknya.

3) Soedjatmoko, 'Kesadaran Sejarah dan Pembangunan', dalam Dimensi Manusia dalam Pembangunan - Pilihan Karangan, Buku Obor dan LPSES, Jakarta, hal. 63-64.

Konstruksi sosial pemahaman masyarakat terhadap sesuatu hal, tidak lepas dari seberapa banyak informasi yang diperoleh, diendapkan dan dianalisis dalam benak pemikrannya. Dengan informasi yang ia peroleh, maka jendela wawasan dan cakrawala berfikirnya-pun akan dapat menjangkau serta menganalisis sebuah permasalahan sebesar informasi yang ia miliki<sup>4)</sup>.

Masyarakat melihat dan menilai sebuah fenomena sosial tidak lepas dari konstruksi pemikiran yang ada dalam benaknya. Dalam konstruksi pemikirannya itulah, masyarakat melihat bahwa sebuah fenomena yang ada dan diutarakan secara berulang-ulang akan diyakini sebagai sebuah kebenaran, walaupun sebenarnya apa yang diyakini menjadi kebenaran itu-pun tidak lepas dari hasil rekayasa pembuat kebijakan dengan tujuan serta maksud tertentu. Dalam proses pembentukan konstruksi sosial inilah, semakin sering sebuah pemahaman itu dilontarkan dan dipromosikan sebagai sebuah kebenaran, maka semakin kuat dan erat pula pemahaman itu diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah 'kebenaran'<sup>5)</sup>.

Perkembangan informasi membuat sekelompok orang menjadi terbuka wawasan dan cakrawala berfikirnya, sehingga dengan perbendaharaan informasi yang ia miliki membuat sekelompok orang tersebut mampu melakukan analisis secara tajam terhadap berbagai hal yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah 'kebenaran'.

---

4) I.S Susanto, 'Crime and Social Construction' dalam *The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia*, Majalah *Hirodai UNIP Of Law and Political Review*, Kazuyoshi Takagi, Soekotjo Hardinoto (Editor), Published by Diponegoro University Press, Semarang, Indonesia; With the Assistance of Faculty of Law Hiroshima University, Hiroshima, Japan, 1993, hal. 33-34. 'interpreting an event or a phenomenon as a crime is certainly determined by the knowledge and perception of crime, meaning that peoples hold not see an event as crime if the fact according to him is not as it is'.

5) Peter L. Berger, Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 12. Konsep pemikiran Berger dan Luckmann berpijak pada bentuk pola pemikiran sosiologi pengetahuan dan konsep inipun tidak lepas dari pengaruh pemikiran Karl Mannheim dalam *Ideologi dan Utopia* yang mencoba mengajak berfikir kritis terhadap realitas sosial dalam lingkup sosiologi pengetahuan dan kaitan antara pengaruh pola pemikiran dan politik.

Sekelompok orang inipun mempertanyakan 'kebenaran' yang diyakini sebagai sebuah kebenaran, sebab dibalik 'kebenaran' itu ternyata 'kebenaran' tersebut tidak lain merupakan hasil rekayasa dari pembuat kebijakan yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, sehingga apa yang seringkali diyakini sebagai sebuah 'kebenaran' oleh masyarakat, oleh sekelompok orang tertentu masih dipertanyakan kebenarannya<sup>6)</sup>.

Sikap yang selalu mempertanyakan sebuah 'kebenaran' bukan merupakan kebenaran yang senyatanya, ternyata muncul dan berkembang juga di kalangan mahasiswa. Mahasiswa dengan daya pikir dan analisisnya yang mulai berkembang, membuat mereka tidak dapat menerima begitu saja apa yang diyakini masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Mereka selalu mempertanyakan dan mencari hal yang sesungguhnya dari inti permasalahan yang terjadi. Sikap ini tidak lain merupakan pencerminan dari hasil olah pikir dan daya analisis kritis yang diperoleh melalui informasi<sup>7)</sup>.

mahasiswa merupakan sebagian kecil dari sekelompok orang yang berkesempatan mengenyam dan memiliki perbendaharaan informasi yang cukup luas. Dengan bahan informasi yang mereka miliki, maka mahasiswa merupakan salah satu unsur dalam upaya pemberdayaan manusia menuju tingkat yang lebih

---

6) Arief Budiman, 'Dari Patriotisme, Ayam dan Itik sampai ke Sosiologi Pengetahuan' - Kata Pengantar dalam buku Ideologi dan Utopia - Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, yang ditulis oleh Karl Mannheim, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal. xv-xvii. Konsep ini mengemukakan tentang eksistensi kaitan antara pola pikir seseorang dengan apa yang dimilikinya. Pemikiran seseorang menentukan seberapa jauh pengetahuan yang dimilikinya, sehingga makin banyak ia mengetahui sesuatu, maka akan semakin luas pula cakrawala berfikirnya, sehingga ia akan selalu merelatifkan kebenaran sebuah pengetahuan atau ideologi sebagai sebuah kebenaran yang absolut.

7) Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia - Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal. 3-4. Karl Mannheim mengutarakan bahwa ada dua pokok yang harus diperhatikan dalam melakukan pendekatan dengan sosiologi pengetahuan. Pertama ialah bahwa sosiologi pengetahuan berusaha memahami pemikiran dalam latar belakang kongkrit dari situasi sosio-historis tertentu yang memunculkan pola pemikiran individu secara berbeda-beda dan secara sangat bertahap-tahapan. Dengan demikian bukanlah manusia pada umumnya yang berfikir, melainkan manusia dalam kelompok-kelompok tertentu yang telah mengembangkan suatu gaya pemikiran tertentu dalam rangkaian tanggapan secara terus menerus terhadap situasi-situasi tertentu yang mencirikan posisi umum mereka. Dan pokok kedua ialah ciri dari metodologi sosiologi pengetahuan tentang cara berfikir kongkrit dari konteks tindakan kolektif yang merupakan sarana untuk menemukan dunia keilmuan dalam pengertian intelektual.



sejahtera. Salah satu bentuk keunggulan mahasiswa bila dibandingkan dengan masyarakat awam, tidak lain terletak dari seberapa banyak ia memperoleh informasi dan mampu melakukan analisis terhadap sebuah permasalahan berdasarkan informasi yang diperolehnya untuk melakukan sebuah reformasi sosial<sup>8)</sup>.

Di berbagai negara yang pernah mengalami pergolakan politik, hampir dapat dikatakan bahwa reformasi sosial hampir selalu di motori oleh kelompok kelas menengah, dimana salah satu unsur kelas menengah tersebut antara lain adalah kelompok cendekiawan<sup>9)</sup>.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, peranan kelas menengah dalam upaya melakukan perjuangan kemerdekaan memiliki nilai dan posisi tertentu dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Mereka melakukan upaya pemberdayaan dan pembelaan melalui penyebaran informasi sesuai dengan tata norma yang saat itu berlaku untuk menghidupkan pola pemikiran yang lebih terbuka. Kini dengan informasi yang diperolehnya, mahasiswa mampu melakukan analisis secara tajam, dan dengan informasi yang diperolehnya pula dalam sebuah moment terten-

---

8) Sarlito Wiraman Sarwono, Perbedaan Antara pemimpin dan Aktivistis Dalam Gerakan Protes Mahasiswa, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal. 58-59. Sudah menjadi sebuah realita sejarah, bahwa keberadaan mahasiswa tidak lepas dengan dunia informasi yang senantiasa 'minir' terhadap pandangan kelas tertentu, sehingga secara tidak disadari pula melalui berbagai informasi yang dimilikinya andangan-pandangan tertentu, isme-isme tertentu, paham-paham tertentu akan terbentuk di kalangan mahasiswa itu sendiri.

9) Ariel Heryanto, 'Memperjelas Sosok Yang Samar' dalam Politik Kelas Menengah di Indonesia Richard Tanter; Kenneth Young (Editor), LPJES, Jakarta, 1993, hal ix-xxv. Keberadaan konsep kelas menengah di Indonesia, secara kongkrit memang belum disepakati secara tegas, namun hal ini bukan berarti dalam memperdebatkan keberadaan kelas menengah, para ahli yang memperdebatkan kelas menengah itu tidak memiliki dasar. Secara konseptual 'kelompok kelas menengah' adalah sebuah kelompok yang merupakan hasil produk dari masyarakat itu sendiri yang secara sadar atau tidak sadar akan menempatkan sebuah masyarakat kedalam susunan stratifikasi sosial yang cukup jelas. Secara Marxis dapat dikemukakan bahwa golongan masyarakat terbagi kedalam dua golongan, yaitu golongan Kapitalis-borjuis (sebagai kelompok yang mewakili golongan atas) dan kelompok masyarakat proletar (masyarakat kelas bawah). Hasil dari stratifikasi menurut Marxis ini menimbulkan sebuah bentuk golongan kelas masyarakat baru yang dinamakan dengan kelompok kelas menengah, yaitu sebagai bagian kelompok masyarakat yang bukan termasuk kelompok masyarakat atas maupun kelompok masyarakat bawah, akan tetapi berada ditengah-tengah yang menjebatani kepentingan kedua golongan tersebut. Masyarakat kelas menengah dapat dikategorikan sebagai kelompok yang mengambang, oleh karenanya siapa saja yang dapat mendekati keberadaan kelompok kelas menengah untuk ikut bergabung atau membela kepentingan salah satu kelompok, maka akan muncul sebuah keberpihakan yang kuat untuk menentang kelompok yang lainnya.

tu mahasiswa mampu melakukan bentuk-bentuk gerakan reformasi sosial terhadap sebuah keadaan<sup>10)</sup>.

Pada kurun waktu tertentu di Indonesia, mahasiswa sempat memiliki kedudukan dan pandangan tersendiri di masyarakat. Mahasiswa merupakan simbol kemandirian dan memiliki status sosial yang cukup berarti dalam keikutsertaannya melakukan reformasi sosial yang menghantarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju Orde Baru. Namun demikian masa ini tidak berlangsung lama, sebab pandangan yang ada dari pihak penguasa menjadi berbalik dan bersikap mengambil jarak dengannya<sup>11)</sup>.

Penguasa memandang bahwa mahasiswa memiliki potensi yang cukup besar dalam melakukan reformasi sosial dan menciptakan sebuah keadaan yang tidak stabil. Padahal penguasa beranggapan bahwa pembangunan tidak mungkin dilakukan dalam kondisi yang masih labil. Oleh karena itulah potensi-potensi mahasiswa yang ada diredam, dan disalurkan kembali pada jalur-jalur ilmiah sesuai dengan porsi dan bidangnya<sup>12)</sup>.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arief Awaludin terhadap gerakan mahasiswa, dari kacamata penguasa, mahasiswa dan kelompok-kelompok mahasiswa dipandang dan senantiasa dicurigai serta di'cap' sebagai sebuah golongan

10) Daniel S. Lev, 'Kelompok Tengah dan Perubahan di Indonesia' dalam Politik Kelas Menengah di Indonesia Richard Tanter; Kenneth Young (Editor), LP3ES, Jakarta, 1993, hal 23-45. Daniel S. Lev Memberikan contoh tentang reformasi sosial yang dilakukan oleh para Aktivis Gerakan Mahasiswa di tahun 1966, sebagai sebuah proses peralihan permulaan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Gerakan mahasiswa di tahun 1966 seakan-akan merupakan sebuah tonggak sejarah yang menetapkan kekuatan mahasiswa sebagai kekuatan *moral force* dan *social control* terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh penguasa.

11) Francois Pallion, Politik dan Idiologi Mahasiswa Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 44-46. Aksi Mahasiswa di tahun 1974 dianggap oleh beberapa pakar sebagai sebuah bentuk 'kegagalan' aksi mahasiswa dalam menghadapi kekuatan penguasa. karena selain isu permasalahan yang diajukannya kurang mencerminkan kepentingan kelas bawah, aksi yang dilakukan saat itu cenderung tidak terkendali, sehingga menimbulkan kerugian yang akhirnya membebani masyarakat juga.

12) Umar Juoro, 'Problema Pendidikan Tinggi : Aksi Protes Mahasiswa', Prisma No. 2 Tahun X, Februari 1981, hal. 52-53. Aksi protes di kalangan mahasiswa, seakan-akan merupakan sebuah fenomena yang mandiri tanpa ada keterkaitan dengan proses pendidikan, namun sebenarnya aksi tersebut memiliki kaitan yang erat dengan proses pendidikan, sebab dengan makin terkekangnya kebebasan mahasiswa melalui banyak hal, maka aksi protes merupakan bentuk-bentuk peluapan emosi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa.

yang 'anti kemapanan', radikal, ekstrim, bahkan pada titik-titik tertentu mahasiswa dan kelompok mahasiswa dianggap sebagai bagian dari golongan yang berbahaya serta perlu diwaspadai<sup>13)</sup>.

Mahasiswa yang senantiasa memiliki mobilitas, kreatifitas dan daya kritis sosial tidak lain merupakan produk dari hasil pemberdayaan manusia melalui jangkauan pemberdayaan informasi pada setiap zamannya<sup>14)</sup>. Dengan informasi yang diperolehnya, maka daya analisis mahasiswa terhadap sebuah masalah menjadi semakin tajam dan cenderung kritis serta menyerang pada kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap tidak layak<sup>15)</sup>.

Banyak upaya yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengentengahkan apa yang menjadi keyakinannya sebagai sebuah kebenaran. Mahasiswa dapat membentuk sebuah kelompok diskusi, membentuk lembaga-lembaga kajian tertentu, bahkan pada taraf yang paling radikal, mereka membuat sebuah aksi gerakan massa yang kerap disebut dan dikenal sebagai gerakan mahasiswa<sup>16)</sup>.

Peranan mahasiswa dalam melakukan reformasi sosial dengan jalan melakukan aksi gerakan massa, kerap dicurigai

---

13) Arief Awaludin, Stigmatisasi Gerakan Pro-Demokrasi (Tinjauan Kriminologi Gerakan Mahasiswa di Purwokerto), Tesis Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 1997, tidak diterbitkan, hal. V-VI). Stigmatisasi merupakan proses terbentuknya sebuah 'cap' atau 'label' terhadap sesuatu hal. Dalam hal ini Arief Awaludin melakukan penelitian terhadap proses terjadinya pemberian 'cap' atau 'label' 'buruk' terhadap Gerakan Mahasiswa.

14) Hendardi, 'Demo dan Politik Mahasiswa', Majalah Forum Keadilan, Edisi Nomor 21, Tahun II, 3 Februari 1994, hal. 17. Demonstrasi mahasiswa dalam banyak situasi memang dipengaruhi oleh iklim politik yang sedang memanas, hanya saja penguasa memandang bahwa aksi mahasiswa ini merupakan 'penyakit sosial' yang harus diobati, tanpa mau melihat mengapa mahasiswa tersebut melakukan aksi demonstrasi.

15) Burhan D. Magenda, 'Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Politik : Suatu Tinjauan', Prisma 12, Desember, 1977, hal 3-4.

16) Abdul Goyum, 'Proses Panjang Gerakan Mahasiswa Indonesia', Majalah Pro Justitia Fakultas Hukum UNSOED, No. 8 Th. VI, Oktober, Purwokerto, 1993, hal. 49-51. Pembagian ini tidak lepas dari dinamika mahasiswa itu sendiri sebab tidak semua mahasiswa gemar melakukan aksi massa yang melibatkan banyak mahasiswa tetapi mereka lebih suka melakukan kritik-kritik terhadap penguasa pada sebuah kelompok diskusi, kelompok kajian maupun kelompok studi.

dan diwaspadai sebagai gerakan radikal yang dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban. Oleh karena itulah, aparat keamanan dan ketertiban yang ada kerap pula melakukan tindakan preventif serta represif terhadap gerakan mahasiswa.

Beberapa tindakan yang selama ini dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban dalam mengatasi gerakan mahasiswa adalah dengan melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap berbagai kegiatan mahasiswa, baik yang dilakukan secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Namun disamping tindakan tersebut aparat keamanan dan ketertiban juga mengambil tindakan dengan menerapkan aturan-aturan pidana yang ada dalam KUH Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi untuk menjaring para aktivis gerakan mahasiswa<sup>17)</sup>.

Pasal-pasal pidana dari KUH Pidana yang banyak diterapkan untuk menjaring dan menjerat para aktivis gerakan mahasiswa ini adalah pasal-pasal Haatzaai Artikelen. Dalam Haatzaai Artikelen itu sendiri pasal pidana yang sering digunakan untuk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa adalah Pasal 154 KUH Pidana. Ini dapat dilihat dalam beberapa kasus demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dari sekian banyak pasal yang ada dalam Haatzaai Artikelen, aparat keamanan dan ketertiban melihat bahwa penggunaan pasal 154 KUH Pidana merupakan pasal yang dirasa cukup tepat untuk menjaring perbuatan para demonstran dan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut. Dalam survei pendahuluan yang telah dilakukan, diketahui bahwa dari tahun 1974

---

17) Iman dan Zuhri, *Beragam Pasal Buat Demontran*, *Forum Keadilan*, No. 21 TH II 3 Februari 1994, hal. 10. Pembungkaman yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa untuk tetap berada dalam status quo seringkali beralasan ' demi kepentingan umum dan negara', padahal dibalik itu semua hanya kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang sebenarnya sedang dijaga dan dilindungi.

sampai dengan tahun 1987 telah tercatat lebih dari 30 orang demonstran dan aktivis gerakan mahasiswa yang terjaring oleh pasal 154 KUH Pidana, dan tidak kurang dari 17 orang demonstran dan aktivis gerakan mahasiswa yang terjaring oleh UUPK Subversi<sup>18)</sup>.

Kini dalam iklim yang semakin mengedepankan keberadaan demokratisasi dan keterbukaan dalam setiap bidang, penggunaan *delik komunikasi publik* macam *Haatzaai Artikelen* dan *delik politik* macam UUPK Subversi semakin dipertanyakan relevansinya<sup>19)</sup>.

Menjelang Sidang Umum MPR 1998 berbagai aksi yang dilakukan oleh aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi mulai kembali marak di berbagai perguruan tinggi. Fenomena ini menjadi semakin menarik manakala segenap sivitas akademika, termasuk didalamnya dosen, guru besar hingga rektor-nyapun ikut serta melakukan aksi mimbar bebas di dalam lingkungan kampus.

Aksi mimbar bebas ini hampir terjadi di berbagai perguruan tinggi, walaupun masih dilakukan di dalam lingkungan kampusnya masing-masing namun penjagaan dan pengawasan dari pihak aparat keamanan dan ketertiban tetap disiagakan<sup>20)</sup>.

Pada awalnya gerakan mahasiswa pro-reformasi yang direalisasikan melalui aksi mimbar bebas ini dihimbau oleh

---

18) Penulis telah melakukan survei pendahuluan untuk menginventarisasi kasus-kasus gerakan mahasiswa di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Dari survei pendahuluan ini, penulis memperoleh keterangan bahwa penggunaan *Haatzaai Artikelen* khususnya Pasal 154 KUH Pidana lebih banyak digunakan untuk menjerat aktivis gerakan mahasiswa.

19) I.S. Susanto, Tentang Penggantian UU Produk Kolonial, *Suara Merdeka*, Semarang, 25 September 1993.

20) Menanggapi sikap dan perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi pihak aparat keamanan dan ketertiban (ABRI) telah menawarkan upaya dialog untuk mendengar dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa, namun upaya penawaran dialog ini kurang mendapat tanggapan yang serius dari mahasiswa. Melihat penawaran dialog antara pihak mahasiswa dan penguasa yang diwakili oleh Menhankam/Pangab kurang mendapat sambutan, maka pihak penguasa memperlunak sikap dan tindakannya dengan memperbolehkan melakukan aksi mimbar bebas dan demonstrasi tetapi hanya di lingkungan kampusnya saja, dan tidak boleh turun kejalan, karena dikhawatirkan akan tercampuri oleh gerakan massa non mahasiswa yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan anarkhi dan destruktif.

aparatus keamanan dan ketertiban untuk dilakukan hanya dalam lingkungan kampus saja dan jangan turun ke jalan-jalan. Namun rupanya himbauan ini kurang begitu diindahkan, karena dari pihak mahasiswa merasa bahwa aksi yang dilakukan dalam lingkungan kampus saja tidak akan banyak membawa perubahan apabila tidak dapat menarik perhatian dari pihak penguasa secara serius.

Selama itu pihak gerakan mahasiswa pro-reformasi merasa bahwa aksi mimbar bebas yang dilakukan di dalam kampus kurang dapat memberikan '*tekanan-tekanan*' kepada pihak penguasa agar mau memperhatikan aspirasi mereka secara serius. Oleh karena pemikiran itulah gerakan mahasiswa pro-reformasi yang ada mulai melancarkan aksi pawai damai dengan tujuan Gedung DPRD-DPR/MPR dengan harapan aksi yang dilakukan oleh mereka akan lebih diperhatikan dan ditanggapi secara serius<sup>21)</sup>.

Melihat tindakan, perilaku dan perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ketika melakukan aksi gerakan mahasiswa baik melalui mimbar bebasnya maupun melalui aksi pawai damai menuju gedung DPRD-DPR/MPR, sebenarnya jika dilihat dari sudut hukum pidana materil sudah memenuhi rumusan delik-delik hukum pidana yang ada pada Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi. Namun rupanya tindakan, perilaku dan perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut diabaikan begitu saja oleh aparat keamanan dan ketertiban tanpa melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh aparat keamanan dan keter-

---

21) Pada mulanya mahasiswa melakukan mimbar bebas yang diisi dengan berbagai orasi yang menuntut penurunan harga sembako dan menyuarakan aspirasi mereka untuk membuat Sidang Umum DPR/MPR lebih aspiratif dan terbuka, namun karena merasa diabaikan, maka gerakan mahasiswa ini mulai turun ke jalan, melakukan aksi pawai menuju gedung-gedung DPR/D. Di beberapa kota, pada mulanya aksi pawai berjalan dengan damai, namun karena sering terjadi pertentangan kepentingan dan friksi dengan petugas keamanan dan ketertiban, maka tidak jarang ditemui tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

tiban jika menghadapi perbuatan aktivis gerakan mahasiswa terdahulu yang serupa<sup>22)</sup>.

Adanya perbedaan dalam penanganan hukum terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa yang terdahulu dengan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menunjukkan adanya penerapan konsep pendekatan (*approach*) yang berbeda dalam menangani perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa saat ini. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian lapangan kedua yang telah dilakukan, bahwa dari sekian banyak aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang melakukan aksi demonstrasi dan aksi pawai damai di kota Bandung, Jakarta, Semarang dan Yogyakarta, secara mayoritas (bahkan hampir menyeluruh) tidak ada aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dijerat oleh pasal-pasal pidana dari Haatzaai Artikelen maupun UUPK Subversi. Dikatakan mayoritas, karena perbandingan antara para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dijerat dengan yang dibiarkan saja tanpa ditangkap dan disidik, lebih banyak yang dibiarkan saja<sup>23)</sup>.

Dengan adanya konsep penanganan yang berbeda terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut, terlihat bahwa penggunaan aspek-aspek hukum dalam menangani sebuah permasalahan, khususnya perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, dapat diabaikan demi sebuah kepentingan tertentu diluar kepentingan hukum itu sendiri. Mungkin dalam hal ini hukum mendapatkan pengaruh-pengaruh non

---

22) Bandingkan perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ini dengan perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa yang ditangkap dan diadili dalam kasus 'Golput', Stiker 'SDSB', Unjuk rasa menentang kedatangan Mendagri Rudini ke kampus ITB, dan kasus 21 mahasiswa yang dijerat dengan Haatzaai Artikelen. Apabila kita bandingkan, maka secara faktuil perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut tidak ada bedanya, namun dalam gerakan mahasiswa pro-reformasi perbuatan yang serupa itu tidak dijerat dan tidak proses lebih lanjut.

23) Penulis hanya menemui sebuah kasus penjeratan aktivis gerakan mahasiswa, dengan tuduhan menggunakan Pasal 154 KUHP Pidana Jo. Pasal 53 KUHP Pidana di PN. Bandung (Perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/1998/PN.BDG), atas nama Djuandi Bin Itja Djuhia, itupun dalam persidangan kasus tersebut Djuandi diputus hukuman badan sesuai dengan masa tahanan yang dijalannya. (Sumber: Divisi Hak Sipil dan Politik, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Bandung, 1998).

hukum yang mempengaruhi proses dan berfungsinya hukum, sehingga dalam berbagai aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, fenomena hukum yang terjadi adalah berbeda sama sekali dengan aksi gerakan mahasiswa yang sebelumnya<sup>24)</sup>.

Realita tidak ditangkap atau dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa tersebut, walaupun perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut telah memenuhi rumusan unsur-unsur delik dalam hukum pidana, menunjukkan bahwa ada sebuah 'penyimpangan' dari bentuk penegakan hukum yang biasanya selalu dilakukan. Dalam kondisi yang biasa yang selalu dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban dalam menanggapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa ialah, dengan melakukan penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis tersebut, namun ketika terjadi gelombang gerakan mahasiswa pro-reformasi, realitapun telah menunjukkan adanya bentuk penanganan hukum yang berbeda, yaitu dengan tidak ditangkap atau dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut. Tindakan ini berlaku secara luas dan hampir diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dari realita inilah muncul sebuah fenomena adanya bentuk tindakan 'depenalisasi' secara informal terhadap bentuk perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa, yang biasanya dan selama ini selalu dipidanakan.

Dalam hukum pidana sarana untuk memahami sebuah fenomena hukum yang berbeda, hanya dapat ditemui dalam kajian

---

24) Realita tidak ditangkapnya atau diprosesnya dan dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa tersebut, merupakan sebuah realita yang menunjukkan bahwa secara informal telah terjadi sebuah 'kebijakan' yang berlaku hampir diseluruh wilayah untuk memberlakukan tindakan 'depenalisasi' secara informal. Secara formal tindakan tersebut memang tidak pernah diakui secara nyata, akan tetapi apabila ada sebuah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur rumusan hukum pidana tertentu, dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi tidak dilakukan pengusutan dan pemidanaan, maka secara informal telah terjadi 'depenalisasi' atas perbuatan tersebut. Para aktivis gerakan mahasiswa ketika melakukan aksi unjuk rasa demonstrasi secara nyata telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam rumusan aturan-aturan pidana tertentu, dan jelas para aktivis tersebut dalam keadaan yang sehat serta dapat dimintai pertanggungjawaban, akan tetapi karena tidak diambilnya tindakan penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis tersebut, maka realita telah menunjukkan adanya tindakan depenalisasi terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut.



hukum pidana yang sosiologis, atau lebih tepatnya dalam kerangka kajian kriminologis. Oleh karena itulah konsep kajian kriminologis akan lebih banyak dikemukakan dalam upayanya memahami dan menjelaskan fenomena hukum pidana yang berbeda ini. Kongkritnya pada permasalahan ini ialah bahwa dalam kerangka kajian kriminologis, kajian yang ada bukan hanya mengkaji perilaku para aktivis gerakan mahasiswa, namun juga perilaku penguasa beserta alat perangnya<sup>25)</sup>.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi memiliki sikap oposan terhadap para pemegang kekuasaan?
2. Bagaimana tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi?
3. Mengapa terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi diterapkan *depenalisasi*?
4. Pengaruh-pengaruh non hukum apa saja yang mempengaruhi *depenalisasi* perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi?

---

<sup>25)</sup> Dalam kajian ini untuk dapat memahami perilaku penguasa yang melakukan tindakan tidak menanggapi atau memidanakan para aktivis gerakan mahasiswa, maka terlebih dahulu harus dipahami perilaku dan sikap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut. Dari pemahaman tentang perilaku dan sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut kita akan melihat bahwa sebenarnya apa latar belakang yang menjadi pola pemikiran mereka dan sikap oposan yang ada, dan ketika sikap tersebut diimplementasikan kedalam bentuk sebuah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana bagaimana tindakan penguasa dalam menanggapinya. Dengan demikian untuk memahami adanya tindakan penguasa sebagai reaksi atas sebuah perbuatan mahasiswa, adalah kurang tepat apabila kita hanya meneliti tindakan penguasa tersebut tanpa mengetahui apa yang menjadi sebab diambilnya tindakan tersebut.

Dengan kajian kriminologis ini diharapkan dapat ditemukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena tersebut, sehingga dapat tercapai sebuah bentuk penjelasan yang dapat dipahami secara obyektif.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui latar belakang pemikiran serta akar permasalahan yang sebenarnya, tentang sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa terhadap para pemegang kekuasaan.
2. Mengetahui tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.
3. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menyebabkan diterapkannya *depenalisasi* terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.
4. Mengetahui pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi *depenalisasi* perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman berlakunya sebuah teori kriminologi, serta membuka kemungkinan terbentuk dan berkembangnya sebuah pemahaman baru di lapangan yang diharapkan dapat menambah wawasan perkembangan kajian kriminologi.

Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan serta mengungkap tentang sikap perilaku dan latar belakang pemikiran kritis para aktivis gerakan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, saran serta pembelaannya terhadap rakyat kecil.

#### 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan informasi dan pemahaman tentang pola pikir kritis yang timbul, tumbuh serta berkembang di kalangan para aktivis gerakan mahasiswa.

Bagi para aparat keamanan dan ketertiban diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa dalam kondisi tertentu yang situasional penggunaan dan penerapan hukum pidana dapat saja menjadi berbeda sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki.

Sedangkan bagi para aktivis gerakan mahasiswa itu sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian serta pemahaman yang lebih baik dan responsif tentang upaya menyampaikan aspirasi, kritik, saran serta pembelaannya terhadap rakyat kecil kepada penguasa dengan cara yang lebih baik dan konstruktif.

#### E. Kerangka Pemikiran

Tuntutan reformasi, aksi demonstrasi dan gerakan massa yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa, ternyata menimbulkan sebuah fenomena sosial tersendiri yang menarik untuk dikaji. Banyaknya aktivis gerakan mahasiswa yang mendasarkan tuntutan mereka pada aksi keprihatinan atau gerakan moral menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa sebagai '*basic of social control in society*' masih merupakan kelompok sosial yang tetap diperhitungkan keberadaannya.

Maraknya aksi demonstrasi dan gerakan massa yang dipepori oleh para aktivis gerakan mahasiswa yang terjadi di beberapa kota besar dan memiliki dominasi kekuatan mahasiswa menunjukkan bahwa peran mahasiswa yang ada bukan lagi sebagai sebuah '*basic of social control in society*', melainkan mulai beralih menuju bentuk sebuah gerakan yang berfungsi sebagai '*basic of social mass movement*'<sup>26)</sup>.

---

<sup>26)</sup> Di beberapa kota bentrokan antara aktivis gerakan mahasiswa dan aparat keamanan telah menunjukkan realita bahwa fungsi gerakan mahasiswa sebagai '*basic of social mass movement*' lebih mengedepan ketimbang fungsinya sebagai '*basic of social control in society*'. Kondisi inilah yang akhirnya makin membuat marak dan suburnya aksi massa dari gerakan mahasiswa, menuju terpicunya sebuah gerakan massa yang menjurus pada aksi bentuk kekerasan. Lihat juga: Taufik Abdullah, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1974, hal. 1-10.

Realitas sejarah di dunia telah membuktikan bahwa di negara manapun dan dalam kurun waktu yang cukup lama, kelompok kelas menengah (*middle class power*) yang paling banyak mampu menggerakkan revolusi, reformasi dan perubahan sosial di masyarakat dalam sebuah komunitas atau negara adalah sebuah gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa<sup>27)</sup>.

Dalam realitas sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia sebenarnya fenomena ini sudah ada sejak adanya kelompok pemuda dan mahasiswa di tahun 1908. Namun karena saat itu istilah mahasiswa belum begitu populer, gerakan tersebut lebih dikenal dengan sebutan kelompok pemuda yang tergabung dalam Pergerakan Nasional. Sebutan '*mahasiswa*' baru memiliki '*gengsi politik*' atau predikat tersendiri dan terhormat di masyarakat setelah melalui masa gemilang di tahun 1966 dengan aksinya ikut serta menentang Orde Lama dan melahirkan Orde Baru<sup>28)</sup>.

Namun sayangnya masa ini tidak berlangsung lama. Ibarat masa '*bulan madu*' masa-masa indah dan istimewa bagi mahasiswa-pun usai sudah setelah terbentuk sebuah pemerintahan transformasi Orde Baru menuju pemilu pertama di tahun 1971. Pada masa pemilu ini sudah mulai dikenal adanya kelompok '*Golput* (*Golongan Putih*)' yaitu golongan yang memiliki

---

<sup>27)</sup> Teori kelas menengah ini sudah teruji keberadaannya. Ini terbukti dengan tragedi Tiananmen yang menimpa para mahasiswa sebagai martir perubahan di China. Kini yang tengah berlangsung di Myanmar dengan perlawanan aksi damai mahasiswa pendukung *Aung San Su Kyi* terhadap rezim junta militer. Kemudian aksi perlawanan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi dan politik terhadap pejabat-pejabat yang korup di Korea Selatan, disusul dengan jatuh-bangunnya para Presiden hingga penuntutan-nya dihadapan sidang pengadilan. Kondisi yang serupa-pun pernah terjadi di Jepang, dimana aksi mahasiswa dilakukan dengan turun ke jalan menentang pemerintahan yang korup di Jepang yang mengakibatkan jatuh-bangunnya format kabinet perdana menteri, dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Lihat juga: Dale L. Johnson, *Middle Class in Dependent Countries*, Sage Publication, Beverly Hills, London, New Delhi, 1985, dan Dale L. Johnson, *Class and Social Development A New Theory of the Middle Class*, Sage Publication, Beverly Hills, London, New Delhi, 1982.

<sup>28)</sup> Parakriti Tah Simbolon, 'Dibalik Mitos Angkatan 66' dalam *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia-Pilihan Artikel Prima*, Farhan Dulkan (editor), LP3ES, Jakarta, 1995. Pada masa awal kelahiran Orde Baru, mahasiswa seakan-akan merupakan masyarakat elit tersendiri yang memiliki kedudukan cukup istimewa di masyarakat. Predikat seseorang sebagai 'mahasiswa' pada saat itu jelas menunjukkan status sosial tertentu yang cukup dihargai, bahkan aktivis gerakan mahasiswa tertentu yang saat itu cukup menonjol sebagai 'leader' ternyata dapat membawanya menuju jenjang-jenjang posisi tertentu dalam kelompok eksekutif dan legislatif Orde Baru. Jelas saat itu posisi dan predikat mahasiswa sangatlah dihargai dan diperhitungkan.

aspirasi berbeda namun tidak menyuarakan aspirasinya melalui parta-partai politik yang ada waktu itu.<sup>29)</sup>

Merenggangnya hubungan antara para aktivis gerakan mahasiswa dengan kelompok eksekutif makin memuncak manakala hubungannya ini menjurus pada kondisi yang makin tidak harmonis di tahun 1974. Pada tahun 1974 para aktivis gerakan mahasiswa menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap keberadaan lembaga 'Aspri' dan hubungan Indonesia dengan Jepang. Puncak dari hubungan yang kurang harmonis ini meletup menjadi sebuah Peristiwa Lima Belas Januari (*Malari 1974*) di Jakarta yang mengakibatkan terbakarnya komplek Senen dan Glodok disertai penjarahan barang-barang oleh massa<sup>30)</sup>.

Semenjak itulah hubungan antara para aktivis gerakan mahasiswa dengan kelompok eksekutif makin merenggang, disintegratif dan kecurigaan pihak eksekutif untuk selalu mewaspadai keberadaan aktivis gerakan mahasiswa menjadi semakin ditingkatkan. Kondisi ini makin memperuncing ketegangan diantara kedua-belah pihak, sebab kini keduanya seakan-akan sudah berada pada posisi yang saling berseberangan tidak lagi berdampingan sebagaimana dahulu di tahun 1966<sup>31)</sup>.

Aksi demonstrasi, unjuk rasa dan gerakan massa yang dipelopori oleh para aktivis gerakan mahasiswa kembali marak menjelang diadakannya Sidang Umum MPR di tahun 1998. Dalam

29) Di tahun 1971 radikalisme mahasiswa mulai terlihat dan mulai bersikap oposan kembali kepada struktur kekuasaan yang ada. Walaupun sikap mahasiswa pada saat itu memperlihatkan sikap menentang, namun penggunaan tindakan represif dan pengawasan khusus kepada para aktivis gerakan mahasiswa belum digunakan secara intensif. Ingat kembali gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh *Arief Budiman* dengan Golongan Putih-nya di tahun 1971, dan gerakan menentang proyek Taman Mini Nasional Indah.

30) *Marzuki Arifin, Peristiwa Lima Belas Januari 1974*, Publishing House Indonesia, Jakarta, 1974, dalam bab III: Kronologi Peristiwa 15 Januari 1974, hal. 96-170.

31) Lihat juga: *Arief Amaludin, Loc.Cit.* Sejak itulah maka keberadaan gerakan mahasiswa dan para aktivisnya senantiasa dicurigai dan diwaspadai sebagai sebuah gerakan yang menyimpang. Konsep inilah yang dikenal dengan sebutan stigmatisasi gerakan mahasiswa. Stigmatisasi ini terus berlanjut hingga terjadinya kembali aksi-aksi mahasiswa di tahun 1978, tahun 1980-an dan tahun 1990-an.

kondisi ekonomi yang makin melemah akibat terpaan tagihan hutang luar negeri, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar, para aktivis gerakan mahasiswa mulai memandang bahwa biaya besar pengadaan Sidang Umum MPR adalah penghamburan dana yang sia-sia saja. Pemikiran ini timbul karena dari pihak aktivis gerakan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya sudah terlebih dahulu muncul sikap yang apriori dan berkurangnya rasa kepercayaan kepada wakil-wakil mereka di DPRD dan DPR/MPR<sup>32)</sup>.

Dari pemikiran yang apriori dan munculnya krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa terhadap para wakil-wakil rakyat di DPRD dan DPR/MPR ini, para aktivis gerakan mahasiswa lebih suka melakukan atau menggelar aksi jalanan yang kerap dikenal dengan sebutan '*DPR jalanan*'<sup>33)</sup>.

Erosi kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa dan masyarakat kepada wakil-wakil rakyat makin diperparah dengan adanya anggapan bahwa proses pemilihan wakil-wakil rakyat itu hanya merupakan formalitas legitimasi adanya proses demokrasi di Indonesia. Ketidakpercayaan para aktivis gerakan mahasiswa dan masyarakat kepada wakil-wakil rakyat tersebut terjadi karena, orang-orang yang menjadi wakil rakyat kebanyakan justru tidak mereka kenal, walaupun masyarakat tahu, itupun hanya sebatas tahu ketika kampanye bagi

---

32) Mahasiswa dan masyarakat pada umumnya memandang bahwa secara formil-prosedural Sidang Umum MPR memang diperlukan sebagai sebuah lembaga tertinggi dalam sebuah negara demokrasi, namun secara materil-substansial Sidang Umum MPR akan menjadi sia-sia belaka apabila yang dibicarakan dan dirumuskan serta disetujuinya itu sudah diketahui bersama atau telah diatur untuk menjadi sebuah kesepakatan yang bersifat klise legitimasi belaka.

33) Mahasiswa merasa bahwa erosi kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang seharusnya dapat mengemban amanat masyarakat itu terjadi karena mahasiswa beranggapan bahwa wakil-wakil rakyat yang ada, kurang dapat menyampaikan aspirasi mereka, aspirasi masyarakat yang sebenarnya dan walaupun wakil rakyat tersebut mau menerima, seringkali hal itu dilakukan hanya sekedar memenuhi prosedur formalitas belaka, tanpa menyentuh aspek yang substansinya. Ini terlihat dari banyaknya tatanan birokrasi untuk masuk dan menemui mereka di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu pula, kurangnya tindak lanjut secara nyata atas pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, sebab sejauh ini yang dapat diketahui oleh masyarakat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hanya baru mampu menampung, namun belum mampu bertindak-lanjut secara nyata, apalagi mengambil tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

orsospolnya masing-masing<sup>34)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa beranggapan bahwa dalam terjadinya proses pemilu, mulai dari pemilihan calon wakil-wakil rakyat, berkampanye dan pemungutan suara dirasakan hanya sebagai sebuah bentuk legitimasi adanya '*kehidupan demokrasi*' di Indonesia, sebab pada akhirnya nanti akan terlihat juga bahwa apa yang disebut sebagai wakil-wakil rakyat, tidak lebih dari wakil-wakil golongan yang berkepentingan atau mewakili kepentingan kelompok tertentu<sup>35)</sup>.

Melihat kondisi dalam negeri yang semakin kritis akibat tekanan politik dan ekonomi yang makin tak menentu, para aktivis gerakan mahasiswa mulai menggerakkan para mahasiswa untuk melakukan pembukaan aspirasi secara nyata, jujur dan terbuka dalam menghadapi situasi politik dan ekonomi di dalam negeri<sup>36)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa memandang bahwa kondisi ekonomi dan politik yang kian melemah tidak lain sebagai akibat dari sikap ketidakterbukaan pihak eksekutif dalam menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan hutang luar negeri. Desakan demi desakan yang dilakukan oleh mahasiswa memaksa pihak penguasa untuk mengemukakan jumlah perimbangan hutang luar negeri yang dilakukan oleh pihak

---

34) Ketidakpercayaan mahasiswa dan masyarakat kepada wakil-wakil rakyat tersebut juga terjadi karena adanya anggapan bahwa siapa-siapa saja yang menjadi wakil rakyat adalah orang-orang tertentu, dari golongan tertentu dan harus memiliki keterkaitan tertentu serta lolos litsus-bersih diri. Dan kalau wakil-wakil tersebut menginginkan lolos dari litsus-bersih diri, maka sangatlah wajar kalau calon wakil-wakil tersebut akan bersikap '*bermanis-manis*' kepada para penguji litsus-bersih diri, yang tidak lain tidak bukan dari pihak eksekutif juga.

35) Stigma yang kurang baik terhadap wakil-wakil rakyat juga timbul sebagai akibat adanya anggapan ketidakmampuan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dalam menghadapi posisi lembaga eksekutif yang lebih terlihat dominan.

36) Mahasiswa memandang bahwa penghamburan dana untuk mengadakan Sidang Umum MPR tidak lain merupakan sarana legitimasi belaka atas pelanggaran kekuasaan. Terlepas dari pihak mana yang dilanggengkan kekuasaannya, mahasiswa memandang bahwa fungsi Dewan dan anggota MPR yang ada tidaklah optimal, bahkan cenderung hanya bersifat mengesahkan saja. Ketidakpuasan mahasiswa makin terpicu manakala desakan ekonomi makin menghipit, belambungnya harga kebutuhan sembilan bahan pokok, dan makin terbukanya praktek-praktek politik yang curang serta pengabaian aspirasi mahasiswa serta masyarakat lainnya oleh anggota wakil-wakil rakyat tersebut.

pemerintah dengan pihak swasta, itupun tanpa menyebutkan pihak swasta yang mana<sup>37)</sup>.

Pematangan situasi oleh para aktivis gerakan mahasiswa dalam menjalankan aksinya secara langsung tidak akan lepas dari berbagai aksi aktivis gerakan mahasiswa yang secara sporadis timbul di beberapa daerah yang memiliki berbagai perguruan tinggi, namun titik kulminasi tertingginya justru terjadi di Jakarta<sup>38)</sup>.

Dalam konteks pemikiran yang lebih mendalam tentang pematangan situasi gerakan mahasiswa menjelang menghadapi masa-masa kritis, keberadaan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan secara parsial berdasarkan lokasi, atau pemisahan aksi para aktivis gerakan mahasiswa yang dilakukan di daerah serta di ibukota<sup>39)</sup>.

Fenomena ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa pro-reformasi lahir dalam sebuah krisis ekonomi, politik dan krisis kepercayaan, sehingga ia mampu menjadi bagian '*people power*' dalam kelompok kelas menengah (*middle class power*) yang memulai aksi menuntut diadakannya sebuah perubahan sosial dalam pemahaman seluas-luasnya. Gerakan mahasiswa pro-reformasi lahir dari sebuah bentuk kejenuhan, kemukakan akan segala bentuk praktek-praktek politik dan ekonomi yang curang, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang terlalu

---

37) Kondisi ekonomi dan politik yang makin memburuk, disusul dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, ditambahnya dengan terjadinya 'ganti harga' kebutuhan sembilan bahan pokok, membuat gerakan mahasiswa yang ada makin menjadi-jadi aksi demo-nya, apalagi setelah mengetahui diumumkan kenaikan harga jual bahan bakar minyak (BBM), yang secara tidak langsung akan tambah ikut memicu kenaikan harga-harga menjadi lebih tinggi dari harga sebelumnya.

38) Dari hasil pengamatan penulis terhadap keberadaan gerakan mahasiswa pro-reformasi secara langsung di lapangan, maka penulis menilai bahwa eksistensi gerakan mahasiswa yang bergerak di Ibukota atau pusat pemerintahan Jakarta ternyata lebih mampu menggerakkan reformasi secara cepat dan tepat ketimbang aksi gerakan mahasiswa yang dilakukan di daerah-daerah.

39) Ini dapat terlihat bahwa walaupun puncak dari perjuangan gerakan mahasiswa itu terjadi di Ibukota Jakarta, namun tentunya gerakan mahasiswa tidak akan berhasil secara cepat tepat dan mematangkan situasi apabila tidak didahului oleh berbagai aksi gerakan mahasiswa di daerah-daerah. Dengan demikian sebenarnya pematangan situasi yang mengarah kepada pemenuhan tujuan tidak akan terjadi seketika tanpa adanya proses pendahuluan yang dilakukan secara sporadis, parsial dan pragmatis di daerah-daerah di luar ibukota Jakarta.



vulgar tanpa tedeng aling-aling dan tanpa memiliki rasa malu.

Walau demikian hal ini bukan berarti proses terjadinya gerakan mahasiswa pro-reformasi ini lahir begitu saja, seketika dan dalam waktu menjelang dimulainya Sidang Umum MPR 1998. Gerakan mahasiswa pro-reformasi sebenarnya lebih tepat merupakan hasil sebuah proses pergerakan mahasiswa yang terus-menerus dan selalu mengambil sikap berseberangan (*oposan*) dengan pihak eksekutif<sup>40</sup>). Selain itu juga kekritis-an olah pikir mahasiswa, tidak lain juga merupakan hasil olahan informasi yang dikritisi secara tajam oleh mahasiswa dengan tidak menerima begitu saja (*taken for granted*) tentang apa yang menjadi pernyataan dalam sebuah informasi.

Dalam berbagai aksi, para aktivis gerakan mahasiswa merasa sebagai bagian dari masyarakat yang telah diberikan kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya dan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut merasa bahwa masyarakatlah yang telah ikut serta membesarkan mereka, sehingga tidak salah kalau mahasiswa lebih banyak menyoroti kepentingan masyarakat walaupun hal tersebut harus membawa akibat berhadapan dengan pihak pemerintah<sup>41</sup>).

Fenomena hukum yang menarik dan terjadi selama berjalannya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi saat itu adalah,

---

40) Dalam mengkaji kegeradaan Gerakan Mahasiswa, maka kita tidak dapat melihatnya secara parsial, atau terpisah-pisah, terpecah-pecah, sebab walaupun sebenarnya Mahasiswa itu sendiri setiap tahun berganti-ganti dan berubah-ubah (ada yang lulus dan ada yang datang lagi) tidak dapat dikatakan bahwa gerakan tersebut terputus dan berganti. Secara personil aktivis mungkin memang benar, tetapi jiwa yang diwariskan oleh para senior mahasiswa kepada mahasiswa juniornya akan tetap terus berjalan, sehingga Gerakan Mahasiswa lebih tepat dikatakan sebagai sebuah proses yang terus-menerus yang berawal dari informasi dan olah pikir yang diterimanya..

41) Lihat kembali kasus-kasus perlawanan mahasiswa bersama masyarakat dalam ikut serta mempertahankan hak-hak rakyat yang akan diambil alih, baik secara paksa maupun imbalan ganti rugi. Beberapa kasus perlawanan masyarakat dan mahasiswa, dapat dilihat kasus tanah Badega, Kacapiring, Kedungombo, Cimacan, merupakan beberapa model perlawanan mahasiswa serta masyarakat terhadap penggunaan kekuatan, kekuasaan dan kekerasan.

dengan tidak ditangkap atau dijeratnya para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut dengan pasal-pasal pidana yang selama ini sering dipergunakan untuk menjerat dan membungkam para aktivis gerakan mahasiswa<sup>42)</sup>.

Tabel 1. Ketentuan-ketentuan pidana yang sering digunakan pada para aktivis gerakan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, demonstrasi dan aksi massa.

Ketentuan Pidana	Penjelasan
Pasal 134 KUHP	Penghinaan terhadap kepala negara
Pasal 154-157 KUHP	Penyerabaran rasa kebencian
Pasal 160 KUHP	Penghasutan melakukan kejahatan
Pasal 170 KUHP	Pengrusakan
Pasal 187 KUHP	Membahayakan keselamatan umum
Pasal 212 KUHP	Penyerangan kepada petugas
Pasal 351 KUHP	Penganiayaan
Pasal 510 KUHP	Izin melakukan keramaian
UU No. 5/PNPS/1963	Izin melakukan pawai politik
UU No.11/PNPS/1963	Pemberantasan kegiatan subversi

Data diambil dari berbagai sumber, diklarifikasi dan diolah kembali berdasarkan perumusan masalah<sup>43)</sup>.

Ketika berhadapan dengan pemerintah, para aktivis gerakan mahasiswa tersebut telah menyadari bahwa ancaman-ancaman pidana yang dihadapinya tidaklah sedikit, disamping

42) Selama ini jika ada aktivis gerakan mahasiswa yang bersikap 'vokal', radikal, kritis dan memenuhi rumusan pasal-pasal dalam hukum Pidana, maka biasanya sudah diterapkan Haatzaai Artikel dan UUPK Subversi untuk menjerat dan memidanakannya. Pasal-pasal Pidana yang sering digunakan untuk menjerat para Aktivis Gerakan Mahasiswa, antara lain: Pasal 134 KUHP (penghinaan terhadap Kepala Negara), Pasal 154-157 KUHP (penyebaran rasa kebencian), Pasal 212 (penyerangan terhadap petugas), Pasal 510 (izin keramaian) dan UUPK Subversi.

43) Sumber data diklarifikasikan dari: Iwan dan Zuhri, 'Beragam Pasal Buat Demontran', Forum Keadilan, Nomor 21 Tahun II, 3 Februari 1994, hal. 10; Satot Prie, Mohammad Saroto, 'Dari Pawai Sampai Wiro Sableng', Detektif Romantika, 24 Agustus 1996; Zed Abidin, 'Jaring Haatzaai buat Demontran', Detektif Romantika, 28 September 1996, hal. 60-61; Loebby Logman, 'Ketentuan Pidana Terhadap Demontran', Detektif Romantika, 17 Agustus 1996, hal. 75.; Harada Sri Lastoto, 'Masalah Pidana Politik dan Hak Sipil Politik', Makalah Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Hukum, HMJ Al Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung - Lembaga Bantuan Hukum Bandung, 5-7 Juni 1998; Melani, 'Beberapa Catatan Tentang Masalah Pidana dan Hukum Acara Pidana', Makalah Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Hukum, HMJ Al Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung - Lembaga Bantuan Hukum Bandung, 5-7 Juni 1998; Iwan Hasibuan, Santoso, 'Menghina Presiden Enam Bulan Penjara Saja', Forum Keadilan, Nomor 4 Tahun III, 9 Juni 1994, hal. 23; Margana, 'Demonstrasi dan Hukumannya', Tempo 15 Januari 1994, hal. 21; Agus Basri, Andi Reza Rohadian, Bambang Soejatmoko, Heddy Lugito, 'Demo Sama Hukuman Berbeda', Tempo 15 Agustus 1994 hal.22-24

ancaman perlakuan tindakan fisik yang jelas sangat mungkin terjadi jika timbul friksi atau konflik secara fisik.

Namun dalam gerakan mahasiswa pro-reformasi yang terjadi menjelang Sidang Umum 1998, timbul sebuah fenomena yaitu dengan hampir tidak diterapkannya ketentuan-ketentuan pidana yang seringkali diterapkan pada aktivis gerakan mahasiswa sebelumnya. Fenomena ini disinyalir sebagai sebuah tindakan *depenalisasi* secara informal terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi. Ini terlihat bahwa dari banyaknya aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi, aksi keprihatinan, dan aksi massa, sangat sedikit sekali yang dijerat dengan ketentuan pidana yang biasa digunakan<sup>44)</sup>

Menurut Soedarto, *depenalisasi* adalah sebuah tindakan terhadap sebuah perbuatan yang semula diancam dengan pidana, kemudian ancaman pidananya dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain yaitu dengan melalui hukum perdata maupun dengan menggunakan hukum administrasi<sup>45)</sup>.

Pembahasan tentang keberadaan *depenalisasi* menurut Sudarto, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi*. Kriminalisasi dimaksudkan sebagai

---

44) Para petugas keamanan dan ketertiban yang bertindak melakukan pengamanan terhadap jalannya aksi demonstrasi, aksi keprihatinan, aksi unjuk rasa dan aksi massa hanya bertindak secara pasif, yaitu hanya melakukan penjagaan pagar betis agar para demonstran dan peserta aksi unjuk rasa tersebut tidak melakukan kegiatan anarkhi, pengrusakan, dan keluar dari jalur-jalur yang telah ditentukan. Padahal biasanya sebelum sampai kepada terjadinya bentuk unjuk rasa, aksi keprihatinan atau aksi massa, para petugas keamanan dan ketertiban telah melakukan tindakan preventif-represif dengan menangkap orang-orang yang dianggap tokoh penggerak, dan mengancamnya dengan delik-delik pidana macam *Haatzaai Artikelen* dan *UUP Subversi*. Namun dalam aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi ini jumlah perbandingan mahasiswa yang diancam dengan delik pidana dengan jumlah aktivis gerakan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, jauh lebih banyak yang melakukan aksi unjuk rasa, sedangkan yang diancam dengan pidana hanya beberapa gelintir aktivis saja, bahkan dari beberapa sumber dikatakan bahwa pidana yang dijatuhkan rata-rata ringan dan ada pula yang tidak diteruskan perkaranya.

45) Sudarto, 'Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita', *Hukum dan Hukum Pidana*, Aluwani, Bandung, 1986, hal. 31-32. Sudarto mengemukakan bahwa permasalahan mendasar dalam membangun Hukum Pidana di Indonesia adalah berkisar pada: Kriminalisasi dan dekriminalisasi, pemberian pidana, pelaksanaan hukum pidana dan sampai seberapa jauh urgensi KUPF Nasional. Dalam hal kriminalisasi dan dekriminalisasi Sudarto mengingatkan juga tentang *depenalisasi*.

sebuah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai sebuah perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya sebuah undang-undang dimana perbuatan yang diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Sebaliknya pengertian dekriminalisasi adalah suatu proses dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya sebuah perbuatan. Sudarto menambahkan bahwa dekriminalisasi haruslah dibedakan dengan *depenalisasi*, yaitu adanya sebuah perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidananya dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain yaitu melalui hukum perdata atau hukum administrasi<sup>46)</sup>.

Dalam kaitannya dengan ketiga proses tersebut (*kriminalisasi*, *dekriminalisasi*, *depenalisasi*) maka kerangka kajian kritis dalam kriminologi telah melakukan sebuah upaya untuk memahami secara kritis tentang proses-proses pembentukan undang-undang dan sekaligus pola bekerjanya<sup>47)</sup>. Proses kriminalisasi, dekriminalisasi dan *depenalisasi*, dalam acuan kerangka kriminologi kritis merupakan sebuah pola kajian baru yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi guna perbaikan-perbaikan hukum pidana menuju bentuk hukum pidana yang lebih responsif<sup>48)</sup>.

---

46) *Ibid.*, hal-32-33. Sudarto mengemukakan bahwa proses kriminalisasi dalam hukum pidana, sebenarnya sedang terus berlangsung mulai dari proklamasi kemerdekaan hingga sekarang dan tidak akan pernah berhenti. Sedangkan proses dekriminalisasi sudah mulai nampak ketika diundangkannya UU no. 1 tahun 1946 dengan pernyataan bahwa delik-delik yang sudah tidak sesuai dengan kepribadian dan menghambat kehidupan yang merdeka dinyatakan tidak berlaku kembali (pasal VIII). Disamping itu pula adanya dekriminalisasi dan depenalisasi dari delik-delik yang tidak disebutkan secara tegas ada pada pasal V.

47) I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Edisi tahun 1995, hal. 13 dan halaman 24. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan merugikan atau membahayakan masyarakat luas akan tetapi hukum pidana belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini dapat dihasilkan apa yang disebut kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi. Lihat juga: Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, PT Gramedia, Bandung, 1996, hal.20.

48) Sudarto, 'Sumbangan Kriminologi untuk Politik Hukum Pidana', *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 153 dan 159. menurut Sudarto kriminologi bukan ilmu yang melakukan kebijakan, kriminologi adalah disiplin yang 'non policy making' akan tetapi hasil penemuannya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Kriminologi dapat menyediakan bahan-bahan informasi untuk itu dan policy maker yang bijaksana tidak akan mengabaikannya. Konsep pengkajian masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi menurut G. Peter Hoefnagels merupakan dari ruang lingkup kajian kriminologi. G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer Holland, 1969, hal. 45, mengatakan: 'The field of criminology further covers the formal

Penelitian-penelitian yang dilakukan dalam lingkup kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang pidana (decriminalisasi) dan terjadinya tindakan depenalisasi sebuah perbuatan atau tindakan <sup>49)</sup>.

Tindakan depenalisasi terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menunjukkan adanya indikasi bahwa penggunaan sarana-sarana penal sebagai alat untuk menegakan hukum dan mengatur serta menjamin keamanan dan ketertiban bukan merupakan satu-satunya upaya hukum yang harus dilakukan. Fenomena terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan pidana secara tertulis (*law in books*) dengan pelaksanaan ketentuan pidana secara realita (*law in action*)<sup>50)</sup>. Oleh karena itulah untuk memahami realita yang berbeda digunakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis.

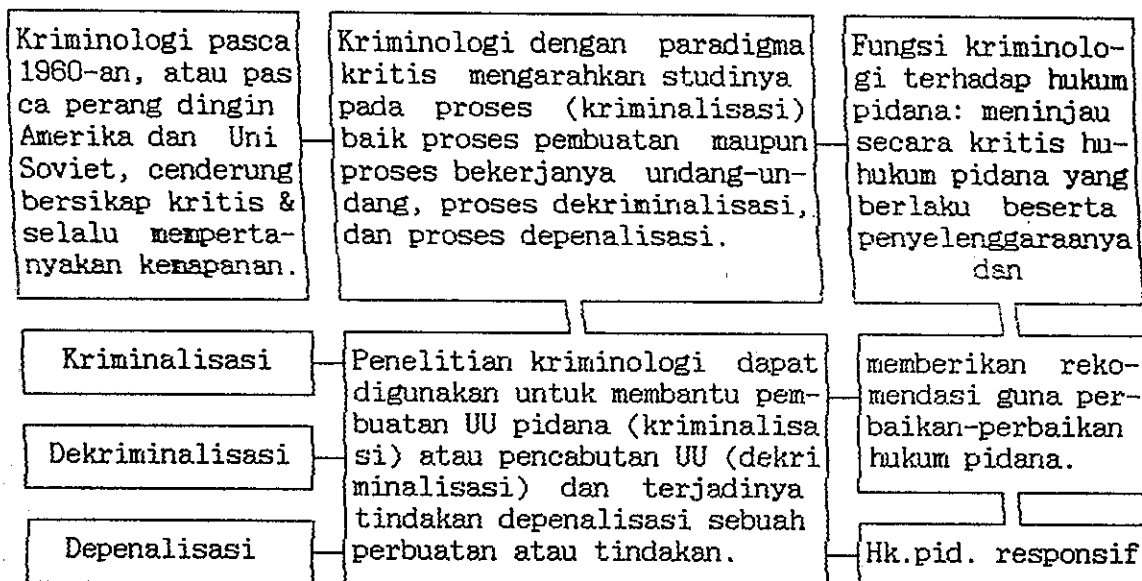
---

and informal processes which result in new penal laws (criminalization) and the abolition of penal laws (decriminalization). Criminal law is a logical cause of crime and a major element in the process of designating people as criminal. Provisionally, we can now say: criminology studies the formal and informal processes of criminalization and decriminalization, crime, criminals and those related there to, the cause of crime and the official and unofficial responses to it'. Lihat Juga: Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Hukum Pidana', Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1976, hal. 25.

<sup>49)</sup> Soedarto, 'Sumbangan Kriminologi untuk Politik Hukum Pidana', Op.cit, hal. 151-152. Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Dekriminalisasi adalah suatu proses penghapusan sama sekali sifat dapat dipidanya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana. Depenalisasi merupakan suatu proses penghapusan ancaman pidana terhadap perbuatan yang semula merupakan tindak pidana akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan secara lain. Contoh kriminalisasi menurut Soedarto: menodai Bendera kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia (Pasal 154 a KUHP Pidana). Contoh dekriminalisasi atau setidaknya depenalisasi adalah: pencabutan tindak pidana penarikan cek kosong (undang-undang No. 12 tahun 1971 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1971). Lihat juga: Soedarto, 'Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia Sejak Tahun 1945', Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 57-59. Soedarto mencontohkan bentuk kongkrit dekriminalisasi yang dilakukan dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie adalah Pasal 153 bis dan Pasal 153 ter, melalui UU NO. 1 Tahun 1946 Pasal VIII.

<sup>50)</sup> Soedarto, 'Ajaran Fungsi Hukum serta Korelasi antara Ilmu Hukum dan Politik Hukum', Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Op.cit, hal. 6. Soedarto mengutarakan bahwa dalam sebuah masyarakat yang sedang berkembang, bergerak atau berubah, atau dalam sebuah masyarakat yang sedang berevolusi atau membangun, maka akan dapat ditemui adanya ketidakcocokan antara *law in books* dan *law in action*, antara *sollen* menurut peraturan hukum yang ada dan *sollen* menurut kebutuhan dan kenyataan masyarakat, antara nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat didalam undang-undang dengan nilai-nilai atau norma-norma yang terdapat serta dianut oleh anggota masyarakat.

Bagan 1. Hubungan kriminologi kritis dan penelitian kriminologi bagi hukum pidana, dalam hal kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi menuju hukum pidana yang responsif.



Permasalahan kriminalisasi dan dekriminalisasi sebagaimana yang telah diajukan dalam simposium pembaharuan hukum pidana nasional di Semarang tahun 1980, dikemukakan bahwa haruslah melakukan pendekatan yang berorientasi kepada kebijakan sosial. Dalam simposium tersebut dikemukakan bahwa masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia<sup>51)</sup>.

Dalam hukum pidana itu sendiri diakui adanya keterbatasan-keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi

51) Barda Nawani Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996., hal. 36. Barda Nawani Arief Mengemukakan bahwa dari simposium pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 di Semarang menghasilkan pernyataan: 1). Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. 2). Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. 3). Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya. 4). Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

kejahatan<sup>52)</sup>, sehingga timbul sebuah pemikiran yang mengemukakan bahwa dalam menanggulangi kejahatan selain dikenal dengan upaya penal, terdapat pula penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal<sup>53)</sup>.

Mengingat keterbatasan-keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, maka dalam menangani perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan tertentu dalam hukum pidana dilakukanlah tindakan *depenalisasi*. Dengan kata lain dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan tertentu dalam hukum pidana, upaya penal tidak selalu harus digunakan. Ini sesuai dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang mengutip pemikiran Nigel Walker bahwa mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi 'upaya penal' seyogya-

52) Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Majalah Masalah-masalah Hukum UNDP, Edisi Khusus 1997, Fakultas Hukum UNDP, 1997, hal. 9-15. Barda Nawawi Arief yang mengutip pemikiran Sudarto (Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, 1983, hal. 35) mengutarakan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan suatu penanggulangan gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan dengan oleh sifat, hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (*sumber*) penyakit, tetapi sekedar sebagai sarana untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa sanksi pidana inipun masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. terlebih 'obat' (pidana) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif atau paradoksal dan unsur-unsur negatif yang lebih membahayakan atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan efek sampingan yang negatif. Disamping itu pula pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini ini sangat fragmentair, yaitu hanya terfokus pada dipidanya si pembuat. Dengan demikian efek preventif dan upaya perawatan atau penyembuhan (*treatment* atau *kurieren*) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan (efek prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat juga dilihat dari sifat atau fungsi pembedaan selama ini, yaitu pembedaan individual atau personal dan bukan pembedaan yang bersifat struktural/fungsional.

53) Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Kriminal', *Punga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 4, dan juga dalam bab III, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, hal. 47-62. Barda Nawawi Arief yang mengutip pemikiran G. Peter Hefnagel (*The Other Side of Criminology*, 1969, hal. 56) menyebutkan bahwa upaya non penal dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan melakukan: pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan startegis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

nya harus dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif<sup>54</sup>).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa penggunaan hukum pidana janganlah digunakan apabila ternyata penggunaan hukum pidana tersebut tidak memiliki dasar yang kuat (*groundless*), tidak diperlukan (*needless*), tidak menguntungkan (*unprofitable or inefficacious*). Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan atau tidak pandang bulu atau menyamaratakan (*indiscriminately*) dan dikenakan secara paksa (*coercively*) akan menjadikan sarana pidana tersebut menjadi suatu pengancam yang utama (*prime threatener*)<sup>55</sup>).

Apabila tindakan *depenalisasi* terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ternyata merupakan sebuah tindakan yang menyadari batas-batas kemampuan hukum pidana dalam menangani masalah kejahatan dan melakukan penanggulangan agar tidak terjadi bentrokan yang lebih besar dan lebih merugikan bagi semua pihak, maka tindakan tersebut merupakan upaya non penal sebagai upaya untuk menangani masalah yang sangat kompleks<sup>56</sup>).

54) Ibid, Barda Nawami Arief yang mengutip pemikiran Nigel Walker (*Sentencing in a Rational Society*, 1972, hal. 43 dst) mengatakan bahwa dalam menggunakan sarana penal ada prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang sudah sepatutnya dipertimbangkan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: a). Jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana tujuan pembalasan semata-mata; b). Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan; c). Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan; d). Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari kerugian kerugian atau bahaya perbuatan atau tindakan pidana itu sendiri; e). Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari perbuatan yang akan dicegah; dan f). Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

55) Ibid, Barda Nawami Arief mengemukakannya dari Herbert L. Packer, *Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal. 366.

56) Lihat: Barda Nawami Arief, *Batas-batas kemampuan Hukum Pidana dalam penanggulangan Kejahatan*, Op.cit, hal. 12. yang mengatakan bahwa 'sebab-sebab kejahatan yang sedemikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana'; dan lihat juga Barda Nawami Arief, 'Upaya Non-Penal dalam Kebijakan penanggulangan Kejahatan', Op.cit, hal. 53-54 bahwa beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang dikemukakan diatas adalah melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*)



Penggunaan upaya non penal sebagai sarana untuk mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya dari perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat dilakukan dengan pendekatan kriminologis kritis dan metode penelitian kualitatif<sup>57)</sup>.

Realitas sosial menunjukkan bahwa keberadaan gerakan mahasiswa selalu cenderung untuk dicurigai dan diwaspadai sebagai sebuah bentuk gerakan massa yang menyimpang (*deviant*). Aparat keamanan dan ketertiban yang menangani langsung gerakan massa yang dilakukan oleh mahasiswa terlihat lebih banyak melakukan tindakan represif, tanpa melihat akar permasalahan yang sebenarnya mengapa gerakan massa itu timbul. aparat keamanan dan ketertiban melihat gerakan massa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai sebuah realita yang menyimpang, sehingga mereka beranggapan perlu melakukan penanganan yang lebih represif<sup>58)</sup>.

Namun apakah benar realitas sosial tersebut menunjukkan akar permasalahan yang sebenarnya, sebab selama ini orang lebih banyak melihat aksi yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan ketimbang menemukan, memahami dan menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya.

---

yang dalam skema 6. Peter Hoefnagel diatas dimasukkan kedalam jalur 'prevention without punishment'. Lihat juga: skema besar yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagel dalam bukunya *The Other Side of Criminology*, terbitan Kluwer Deventer Holland, 1969, hal. 56.

57) I.S Susanto, *Kriminologi*, Op.cit, hal. 25-26, bahwa penelitian kriminologi bertujuan memperoleh pengetahuan tentang seluk beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta yang lain seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, hankam, struktur yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian kualitatif dibutuhkan untuk memenuhi kecenderungan baru dalam ilmu-ilmu sosial yaitu pada pengertian yang subyektif, pemaknaan dan pemahaman yang berdasarkan pada akal sehat (*common sense*) khususnya dalam mencari jawab atas kosa-kosa kata baru seperti prespektif manusia, konstruksi sosial tentang realitas, fenomenologi, dan etnometodologi. Lihat juga: Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, PT Granesia, Bandung, 1996, hal. 2. bahwa salah satu ciri khas dalam penelitian kriminologi adalah bentuk penelusuran yang kualitatif.

58) Lihat kembali pemaparan tentang stigmatisasi gerakan mahasiswa yang dipaparkan oleh Arief Amaludin dalam tesisnya bahwa stigma terhadap gerakan mahasiswa identik dengan gerakan politik sehingga perbuatannyapun dikonotasikan sebagai perbuatan politik dan dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana politik, macam Haatzaai Artikelien dan UNPK Subversi. *Loc.cit*.

Guna memahami realitas sosial tersebut, bentuk pemahaman terhadap aspek hukum saja tidaklah cukup dapat untuk menjelaskan secara mendasar realita yang ada. Oleh karena itulah diperlukan bentuk pemahaman baru yang melibatkan aspek-aspek ilmu sosial lainnya, dalam upaya menjelaskan realitas sosial yang ada secara lebih mendalam<sup>59</sup>).

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick ilmu hukum selalu memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai disiplin ilmu. Konsep abstrak tentang kewajiban hukum, berbicara mengenai perbedaan pemahaman tentang bagaimana hukum itu bekerja dan bagaimana hukum itu digunakan. Pandangan filosofi (*termasuk didalamnya kritik terhadap positivisme*) dan rangkaian analisis (*termasuk didalamnya perbedaan antara peraturan dan prinsip-prinsip yang digunakan*) adalah sarana implisit untuk melakukan diagnosa terhadap kesulitan-kesulitan yang timbul dan menimpa hukum<sup>60</sup>).

Ini bukan berarti bahwa teori hukum yang ada tidak mampu menjelaskan terhadap berbagai permasalahan dan realitas sosial. Tetapi apabila kita mau melihat bagaimana hukum itu bekerja, kita juga harus memahami bagaimana proses hukum itu terjadi, dimana hukum itu dibuat dalam sebuah masyarakat dan dalam kondisi yang bagaimana hukum tersebut dicetuskan<sup>61</sup>).

Solusi yang dilontarkan oleh Philippe Nonet dan Philip

---

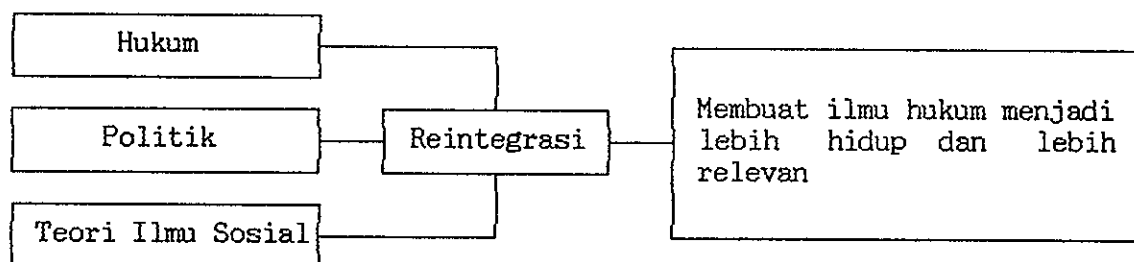
<sup>59</sup>) Philippe Nonet, Philip Selznick, 'Jurisprudence and Social Science' dalam Law and Society in Transition Toward Responsive Law, Harper Colophon Books, Harper and Row Publisher, New York, 1978.

<sup>60</sup>) Ibid, hal. 2-3 'Jurisprudence has always been more than an arcane intellectual discipline. Abstract concepts such as legal obligation, speak to issues that make a difference for the way law is conceived and how it is used. Philosophical standpoints (such as the critique of positivism) and analytical puzzles (such as the distinction between rule and principle) are implicit schemes for diagnosing the troubles that beset a legal order.'

<sup>61</sup>) Ibid, hal. 3, 'Thus legal theory is neither innocent of social consequence nor immune to social influence. Where we look for the foundations of law, the sense we make of the legal process, and the place we give law in society - all profoundly affect the the shape of the political community and the reach of the social aspirations.'

Selznick untuk membuat ilmu hukum menjadi lebih relevan dan lebih hidup, ialah dengan melakukan reintegrasi antara hukum, politik dan berbagai teori dalam ilmu sosial lainnya<sup>62</sup>). Dalam tahapan ini, kita harus memperhatikan masalah-masalah hukum ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan sosial. Kemudian untuk memahaminya kita mengajukan kerangka kerja dengan membandingkan masing-masing penalaran tersebut (*penalaran dari bidang hukum dan penalaran dari bidang ilmu sosial yang direintegrasikan*) untuk melakukan analisis mencari alternatif terhadap permasalahan yang ada<sup>63</sup>).

Bagan 2. Skema reintegrasi hukum, politik dan teori ilmu sosial untuk membuat ilmu hukum menjadi lebih hidup dan lebih relevan menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick.



Dalam kajian ini, perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi oleh penguasa dilihat sebagai sebuah perilaku yang menyimpang. Pada umumnya perbuatan tersebut dijaring oleh penguasa melalui hukum pidana sebagai sebuah kejahatan, bahkan dalam batas-batas tertentu perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut diidentikkan sebagai sebuah kejahatan politik<sup>64</sup>). Untuk memahami perbuatan para

<sup>62</sup>) Ibid, hal 3-4, 'To make jurisprudence more relevant and more alive, there must be a reintegration of legal, political and social theory'.

<sup>63</sup>) Ibid, hal 3-4. Thus understood, competing philosophical theories are seen as reflecting varieties of legal and social experience. We propose a framework for comparing these experiences, for analyzing the premises and assessing the worth of alternative modes of legal ordering.

<sup>64</sup>) Lihat kembali pemaparan konsep stigmatisasi gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh penguasa terhadap para aktivis gerakan mahasiswa. Pemaparan itu dilakukan oleh Arief Anwarudin dalam tesisnya 'Stigmatisasi Gerakan Pro-Demokrasi' Loc.cit.

aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut serta apa yang menjadi latar belakang pemikiran mereka, penggunaan ilmu sosial lainnya disamping ilmu hukum amatlah dibutuhkan.

Ilmu sosial yang banyak membantu ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam upayanya melakukan pendekatan dan memahami sebuah perilaku yang menyimpang tidak lain adalah sosiologi dan kriminologi<sup>65)</sup>. Namun sejauh mana sosiologi dan kriminologi itu dapat difungsikan sesuai kebutuhan tergantung pada penggunaan sosiologi dan kriminologi tersebut, serta dari sudut pandang sosiologi dan kriminologi yang mana yang digunakan untuk menganalisis perilaku yang menyimpang tersebut secara tepat dan mendekati<sup>66)</sup>.

Perkembangan kajian kriminologi, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan hukum pidana dan sosiologi hukum itu sendiri. Seiring perjalanannya kriminologi, hukum pidana dan sosiologi hukum memiliki lahan kajian yang saling berkaitan<sup>67)</sup>, sehingga tidaklah mengherankan apabila dengan memfungsikan keberadaan ketiga kajian ini secara komprehensif dan integral akan mendapatkan sebuah pemahaman yang jauh

---

<sup>65)</sup> Erich Goode, 'Contemporary Sociological Theories of Deviance', dalam *Deviant Behavior*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1984, hal. 44.

<sup>66)</sup> Untuk memahami sebuah perilaku yang menyimpang (*deviant behavior*), maka Erich Goode membagi ke dalam dua kelompok besar teori tentang perilaku yang menyimpang. Pertama kelompok teori tradisional (*traditional theories of deviance*), terdiri dari: *free will*, *the positive school*, *social pathology*, *social disorganization and chicago school*, *functionalism*, *anomie theory* dan *differential association*. Sedangkan kelompok kedua ialah kelompok teori sosiologi kontemporer (*contemporary sociological theories of deviance*), terdiri dari: (1) *Labelling Theory* yang terdiri dari: *labelling theory: the precursors*, *labelling theory: the main points*, *criticism of labelling theory*. (2) *Conflict Theory* yang terdiri dari: *conflict theory: Marxism*, *Marxist criminology: criticism*, *non-Marxist conflict theory*. (3) *Positivism: Causal Analysis* yang meliputi juga *criticism of positivism*.

<sup>67)</sup> Mulyana W Kusumah, 'Realitas Sosial Kejahatan', dalam *Prisma: Manusia dan Kejahatan*, 5 Mei 1982, LP3ES, Jakarta, hal. 3-9, ia mengutip pendapatnya William J. Chambliss bahwa "kejahatan adalah gejala hukum, politik, ekonomi dan sosial yang benar-benar kompleks yang harus sistematis dipelajari dari banyak segi". Banyak orang dan masyarakat awam memandang bahwa penggunaan sosiologi dan kriminologi tidak lebih hanya sebagai alat bantu dalam sebuah skema besar analisis. Ia hanya berfungsi bila difungsikan dan diperlukan keberadaannya, padahal diluar itu semua, sebenarnya kerangka pemikiran sosiologi dan kriminologi yang ada senantiasa bekerja untuk selalu melakukan analisis. Bahkan apabila difungsikan secara tepat dan benar, maka hasil yang akan diperoleh akan jauh lebih tajam.

lebih mendekati kepada sebuah kebutuhan senyatanya dan realita yang ada.

Pengkajian secara interdisipliner membuat sebuah kajian akan memiliki sebuah analisis yang komprehensif. Ia tidak hanya terpaku pada satu disiplin dan satu pisau analisis saja, tetapi ia akan selalu mengkaitkannya dengan berbagai disiplin ilmu dalam bidang yang berkaitan, sehingga kajian yang dihasilkannya akan menjadi semakin *komprehensif dan terintegralisasi*. Pengkajian secara interdisipliner membuat kajian hukum pidana dan kriminologi menjadi kehilangan batasan-batasannya yang baku. Ia tidak lagi mengkaji hukum dan kriminologi secara normatif namun berkembang kearah pemahaman yang komprehensif serta integral. *Komprehensif karena ia mencoba melakukan pepaduan analisis dari berbagai bidang ilmu yang terkait, integral karena kajian yang dilakukannya menyatukan dan saling melengkapi berbagai disiplin ilmu untuk mengupas obyek yang akan diteliti dan dianalisis*<sup>68)</sup>.

Pengkajian yang interdisipliner membuat kajian ini menyertakan pula keikutsertaan aspek politik sebagai sebuah aspek yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Aspek politik akan ditunjukkan memiliki pengaruh secara timbal balik terhadap sesuatu hal yang menyebabkan sebuah perilaku menjadi menyimpang. Sebaliknya pula perilaku yang menyimpang akan memiliki pengaruh terhadap keberadaan kondisi politik yang ada<sup>69)</sup>.

---

<sup>68)</sup> Lihat kembali pemaparan yang dikemukakan oleh Taylor, Walton, Young, tentang multi-factoral accounts of crime and deviance, dalam *The New Criminology for a Social Theory of Deviance*, hal 139-171, yang menunjukkan bahwa dalam mengkaji sebuah 'deviant behaviour' tidak dapat hanya menggunakan satu perangkat saja, sebab banyak segi serta faktor yang membuat terjadinya suatu penyimpangan, sehingga bahan untuk mengkajinya-pun diperlukan kajian yang interdisipliner dan multidimensional.

<sup>69)</sup> Mulyana W. Kusumah, *Loc.Cit.* Pengaruh timbal balik ini menunjukkan adanya dominasi kepentingan-kepentingan tertentu dalam mengendalikan sebuah kekuatan, hanya sejauh mana kekuatan itu mampu mengendalikan tergantung pada sejauh mana ia mampu memegang aspek politik secara terpadu dan menggunakannya secara tepat.

Dengan pengkajian yang interdisipliner, pengkajian terhadap fenomena sosial yang ada akan menjadi semakin tajam, ia tidak hanya akan memberikan penjelasan teoritik terhadap perilaku menyimpang yang 'nampak dipermukaan' tetapi mencoba mencari dan memahami 'akar permasalahan' yang sebenarnya agar dapat dipahami dan dapat dengan segera ditemukan pemecahannya<sup>70)</sup>.

Penggunaan ilmu sosial lainnya sebagai upaya untuk membantu memahami proses bekerjanya hukum dapat dilakukan dengan bantuan sosiologi atau sosiologi hukum<sup>71)</sup>. Sosiologi hukum pidana digunakan untuk menjelaskan tentang keberadaan sebuah 'legal order' dan pembentukannya. Dengan menggunakan pemahaman konstruksi sosial yang ditemukannya dari pendekatan etnometodological, sosiologi hukum pidana mampu menjelaskan tentang bagaimana sebuah peraturan yang ada dalam hukum pidana tersebut dibuat dan dikonstruksikan oleh penguasa sebagai sebuah kenyataan yang mengikat<sup>72)</sup>.

Namun demikian pemaparan yang dikemukakan oleh sosiologi hukum pidana memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut ialah bahwa sosiologi hukum pidana tidak dapat melakukan kritik kepada 'legal order' yang dibentuk oleh penguasa dan masya-

---

70) Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990, hal. 8. Menurut Sanafiah Faisal dengan melakukan pendekatan yang holistik kita dapat memperoleh pengetahuan dan pengertian yang mendalam dan komprehensif tentang suatu masalah sosial dan budaya. Dari bentuk pengkajian yang demikian kita dapat memberikan paparan atau deskripsi bahkan ekplanasi yang lebih holistik sifatnya tentang suatu fenomena, kenyataan atau perilaku di dunia sosial dan budaya. Dalam konteks pemikiran tentang watak hukum yang holistik di Indonesia, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sifat dasar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundamen hukum memiliki sifat holistik dalam paradigma yang harmoni (Satjipto Rahardjo, 'Mempertahankan Pikiran Holistik dan Watak Hukum Indonesia', Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP, Edisi Khusus 1997, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hal. 3-8).

71) Richard Quinney, 'Sociological Jurisprudence', dalam Criminology: Analysis and Critique of Crime in America, Little Brown and Company, Boston Toronto, 1975, hal. 33-35. Menurut Mulyana W. Kusumah, yang mengutip William Evans, menyebutkan bahwa terdapat tidak kurang dari enam perspektif yang tumbuh dalam sosiologi hukum, yaitu: teori behavioralist, teori yurisprudential, teori fungsionalis, teori konflik, teori sosialisasi dan teori sistem. Mulyana W. Kusumah, 'Perspektif dan Teori Tentang Konteks Sosial Hukum', dalam: Mulyana W. Kusumah, Paul S. Baur (editor), Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, YLBHI, Jakarta, 1988, hal. 22.

72) Richard Quinney, *Loc.cit.* 'Social constructionist thought, as found in ethnomethodological studies, may suggest that the administration of criminal law requires that those in position of power construct a reality'.

rakatnya. Sosiologi hukum pidana tidak dapat melepaskan diri dari bentuk ideologi yang ada serta tidak dapat mempertanyakan secara kritis tentang 'legal order' yang ada. Sosiologi hukum pidana hanya mampu mengungkap dan menjelaskan tentang keberadaan sebuah peraturan, namun tidak mampu mempertanyakannya secara kritis<sup>73)</sup>.

Ian Taylor, Paul Walton dan Jock Young yang mengutip pendapatnya Edwin M. Schur tentang pendekatan sosiologi dan kriminologi terhadap kejahatan, perilaku menyimpang di masyarakat dan permasalahan sosial mengemukakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh sosiologi dan kriminologi terhadap kejahatan, perilaku yang menyimpang dan permasalahan sosial adalah jauh lebih luas dan lebih tajam apabila dibandingkan dengan melakukan pendekatan yang hanya terpaku pada pendekatan legalistik dan positivis<sup>74)</sup>.

Untuk memahami secara kritis (*critical understanding*) dan dapat mempertanyakan sebuah 'legal order', Richard Quinney mengajukan empat (4) buah metode untuk melakukan penelitian<sup>75)</sup>. Metode penelitian inipun dapat digunakan

73) Ibid, 'a sociology of criminal law cannot break out of the ideology of age and ask critical questions about the legal order. It can only confirm the existing order'. Lihat juga : Donald Black, 'The Boundaries of Legal Sociology' dalam The Social Organization of Law, Donald Black, Maureen Mileski (editor), Seminar Press Inc. New York, 1973, hal. 42, Ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa literatur sosiologi hukum adalah literatur yang borjuis, liberal, pluralis dan melioris. Pandangan tersebut menganjurkan agar ilmu sosiologi yang ada agar menjadi lebih radikal. Hal ini diperlukan, agar pandangan sosiologi menjadi lebih kritis dalam mengungkapkan sebuah realita dan menjadi lebih berani dalam menyampaikan saran-sarannya (He went on to argue that a more radical sociology is required, one that is "more critical in its premis dan farther-reaching in its proposals").

74) Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, 'Social reaction, deviant comment and career', dalam The New Criminology For a Social Theory of Deviance, International Library of Sociology edited by John Rex, Routledge and Kegan Paul, London and Boston, 1973, hal. 140. The approach is part of a larger in criminology dan sociology against the legacy of positivistic or absolutist notions of crime, deviance and social problems. The approach rejects those genetic, psychological or multi factorial accounts of crime and deviance which stress the absolute nature of the causes of criminality or deviation. It usually, but not necessarily, rejects the standard sosiological structure-functional approach to such questions, and in its examination of the social processes giving rise to deviation it asks 'deviant to whom?' or 'deviant from what?'

75) Richard Quinney, 'Crime Control in Capitalist Society: A Critical Philosophy of Legal Order', dalam Critical Criminology, Edited by: Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young, Routledge and Kegan Paul, London and Boston, 1975, page 182. 'I will present the four modes of thought as follow: (1) the positivistic, (2) the social constructionist, (3) the phenomenological and (4) the critical. My objective is to develop a critical philosophy of legal order'.

untuk memahami secara kritis sebuah kejahatan atau perilaku yang dianggap menyimpang dalam kajian kriminologi<sup>76)</sup>.

Memasuki kajian kriminologi terhadap pemahaman 'perilaku menyimpang' (*deviant behaviour*), konsep pemahaman 'deviance' atau 'penyimpangan' menurut I.S Susanto adalah merupakan hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi yang secara umum dinyatakan dengan digunakannya konsep 'penyimpangan' (*deviance*) dan reaksi sosial<sup>77)</sup>.

Dalam pandangan sosiologis, 'perilaku menyimpang' dirumuskan sebagai sebuah tindakan melanggar aturan yang telah dipekat. Namun untuk selanjutnya dipertanyakan kembali bahwa 'siapa yang melanggar aturan' untuk kemudian diteliti faktor-faktor pribadinya, lingkungan yang mempengaruhinya serta situasi kehidupannya yang memiliki kemungkinan terjadinya pelanggaran tersebut. Apabila seorang individu melakukan sesuatu hal yang tidak biasa dilakukan oleh sebuah masyarakatnya, maka masyarakatnya akan memberikan sebuah pandangan bahwa individu tersebut melakukan sebuah penyimpangan dari kriteria atau tata aturan yang berlaku secara umum. Asumsi ini mengemukakan bahwa bentuk penyimpangan atau bukan penyimpangan adalah ditentukan oleh sebuah masyarakat bukan oleh individu tersebut, sebab apabila sebuah kelompok, group atau masyarakat telah memiliki kesepakatan untuk berperilaku yang 'demikian', lalu ada seorang individu yang

---

76) Richard Quinney, 'Research Methods and Modes of Inquiry', dalam *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America*, Loc.cit, 'Furthermore, each mode of inquiry is specifically related to the American order. They are: (1) the positivistic, (2) the social constructionist, (3) the phenomenological, and (4) the critical. From the last we will develop a critical theory of crime'.

77) I.S Susanto, 'Aliran-aliran Pemikiran dan pengaruhnya - Kriminologi Kritis', dalam *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 9. Dari pemahaman tentang 'deviance' tersebut, maka dapat dilihat bahwa untuk mengkaji sebuah realitas sosial, khususnya 'perilaku menyimpang' atau 'penyimpangan sosial' yang terjadi di masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pendekatan dan analisis secara legistis-positivistis hukum pidana saja. Namun diperlukan beberapa pandangan yang jauh lebih tajam dari sekedar pemahaman 'perilaku menyimpang (secara normatif)' yang diberikan oleh hukum pidana.



tidak berperilaku 'demikian' maka individu tersebut telah dianggap melakukan penyimpangan. Ini menunjukkan bahwa kriteria perilaku penyimpangan diberikan atau dilontarkan oleh sebuah kelompok atau group atau masyarakat kepada individu yang tidak berperilaku 'demikian'<sup>78)</sup>.

Untuk memahami bagaimana bentuk pemahaman terhadap adanya perilaku yang menyimpang, ada beberapa pemahaman baru yang dapat dipergunakan untuk mengupas secara terbuka tentang 'perilaku yang menyimpang' dan realitas sosial kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pemahaman ini dalam bidang hukum dan kriminologi dikenal dengan bentuk pemahaman kritis<sup>79)</sup>.

Gerakan mahasiswa sebagai sebuah gerakan massa seringkali diwaspadai dan dicurigai sebagai perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan dan ketertiban. Sikap para aktivis gerakan mahasiswa dalam mengkritisi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa seringkali pula diartikan dan diidentikkan sebagai sikap yang antike-

---

78) Howard S. Becker, *Outsider - Studies in The Sociology of Deviance*, The Free Press, New York, 1966, hal. 9. '...social group create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance...' Konsep ini menunjukkan bahwa sebenarnya konsep penyimpangan atau 'cap' perilaku yang menyimpang adalah sebuah tanggapan dari pihak lain terhadap diri seseorang atau individu yang berperilaku tidak sebagaimana lazimnya dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Sehingga apabila seorang anggota masyarakat tidak berperilaku sebagaimana yang telah digariskan oleh kelompok masyarakat tersebut, orang tersebut akan mendapatkan 'cap' sebagai orang yang telah berperilaku menyimpang. Sedangkan apa bentuk penyimpangan itu tergantung bagaimana masyarakat itu sendiri merumuskan kriteria yang melingkupi kehidupannya.

79) Simandjuntak B, Chidir Ali, 'Kriminologi Sebagai Kritisisme Sosial', dalam *Cakrawala Baru Kriminologi (Suatu Konsep Dialog)*, Yarsito, Bandung, 1980, hal 131-132. Pemahaman kritis atau pemahaman radikal tentang kriminologi, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh munculnya aliran sosiologi kritis atau sosiologi radikal, sehingga diakhir tahun 60-an aliran kriminologi kritis muncul sebagai perwujudan atas sikap menentang pemerintahan absolut yang cenderung korup di Amerika Serikat, Eropa, Asia dan Afrika. (I.S Susanto, *Ibid*, hal. 18). Lihat juga: Soedjono Dirdjosismoro, 'Perkembangan Pemikiran dan Prespektif Dalam Kriminologi', *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, PT Gramesia, Bandung, 1976, hal. 15, bahwa Aspek-espek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan perubahan-perubahannya mewarnai pergeseran prespektif kriminologi. Hal ini terbukti saat terjadinya perubahan menonjol pasca perang dingin 1960-an. Menurut Rudi Atmasasmita yang mengutip pemikiran Sudarto Pandangan yang bersifat kritis memandang hukum sebagai bagian dari masyarakat. Ajaran kritis melihat hukum sebagai kristalisasi dari unsur-unsur power yang hidup dalam kenyataan masyarakat, dan di lain pihak hukum merupakan perwujudan dari proses keadilan dan legitimitas. Watak hukum sesungguhnya dapat dipahami dari aspirasi-aspirasi yang optimal ditujukan untuk mengurangi kesewenang-wenangan penguasa dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pandangan ini menentang pandangan hukum yang bersifat dogmatis tradisional dan pandangan hukum sebagai alat belaka (Rudi Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, YLBHI, Jakarta, 1989, hal. 12-13. Lihat juga pada Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Aluani, Bandung, 1985, hal. 9-12).

mampanan, pembangkangan dan ketidaksetiaan<sup>80)</sup>.

Menghadapi sikap para aktivis gerakan mahasiswa tersebut, penguasa menerapkan tindakan represif dengan menggunakan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi sebagai sarana '*ultimum remedium*'. Dengan terjeratnya beberapa aktivis gerakan mahasiswa oleh Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi, secara formal perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut dianggap sebagai kejahatan.

Penerapan hukum represif inilah yang seakan-akan membentuk sebuah konstruksi pemahaman bahwa tindakan atau perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut identik dengan sebuah kejahatan politik.

Dengan demikian dalam kajian ini membutuhkan sebuah pemahaman kritis terhadap '*legal order*' yang diterapkan pada para aktivis gerakan mahasiswa dan sebuah pendekatan kritis terhadap terbentuknya kriminalisasi pada sebuah perbuatan.

Richard Quinney mengemukakan bahwa bentuk pemahaman yang lebih tajam terhadap realitas sosial kejahatan atau perilaku yang menyimpang dapat dilakukan dengan melakukan pemahaman kritis terhadap hukum (*legal order*) maupun pendekatan kritis terhadap kejahatan dalam bidang kriminologi<sup>81)</sup>.

Memahami sebuah realitas sosial secara kritis akan membawa kita kepada sebuah bentuk pemahaman yang tidak

---

80) Sikap ketidak-taatan, kritisme dalam tatanan hukum yang represif diartikan sebagai sebuah bentuk penyimpangan dan tanda ketidaksetiaan kepada pemegang kekuasaan yang ada. Demikian pula pandangan-pandangan atau sikap yang dianggap 'mabalelo' diartikan sebagai sebuah pengingkaran terhadap tatanan yang telah diakui. (Mulyana W. Kusumah, '*Perspektif dan Teori Sosial Tentang Konteks Sosial Hukum*', *Op. cit.*, hal. 15.)

81) Richard Quinney, '*Crisis Control in Capitalist Society: A Critical Philosophy of Legal Order*', dalam *Critical Criminology*, *Loc. cit.* Lihat juga: Richard Quinney, '*Research Methods and Modes of Inquiry*', dalam *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America*, *Loc. cit.* Mengapa Quinney memandang bahwa sebuah realitas sosial kejahatan itu harus dipahami secara kritis, karena Quinney menilai bahwa apa yang dikatakan sebagai sebuah kejahatan di masyarakat tidak lain adalah merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada di masyarakat tidak lain merupakan hasil konstruksi sosial yang dipahami dan diyakini kebenarannya tanpa harus dipertanyakan kembali. Padahal kejahatan yang ada pada konstruksi pemahaman masyarakat dan menjadi acuan utama dalam hukum pidana tidak lain merupakan hasil konstruksi kepentingan politik, ekonomi dan pemegang kekuasaan, dengan demikian realitas sosial kejahatan merupakan hasil konstruksi dari sebuah konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat.

selalu menerima begitu saja (*taken for granted*) apa yang menjadi sebuah realita. Pemahaman kritis terhadap realitas sosial yang dikemukakan oleh I.S. Susanto, melihat bahwa antara realitas konseptual dan realitas yang sedang terjadi di masyarakat adalah berbeda<sup>82)</sup>.

Mulyana W. Kusumah yang mengutip pemikiran Chambliss mengemukakan bahwa pemahaman mengenai realitas sosial kejahatan tidak lepas dari aspek politik dan ekonomi yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Perumusan 'penjahat' atau delik-uensi adalah hasil sebuah proses politik, dimana aturan-aturan yang melarang atau menganjurkan warga masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan adalah hasil konstruksi politik yang menentukan sesuatu perbuatan dianggap jahat atau tidak<sup>83)</sup>.

Tentang latar belakang kejahatan, Chambliss mengemukakan bahwa kejahatan atau bukan kejahatan berasal dari anggapan orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi kelompok dominannya. *Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan yang berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat*<sup>84)</sup>.

---

82) I.S. Susanto, 'Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial', Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan Sumber Daya, IMKA, Karangbendan 12-17 Agustus 1992, dimuat dalam *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, No. 9 tahun 1992. Ini terlihat dalam uraiannya: Suatu realitas sosial pada dasarnya adalah suatu kenyataan tentang kejadian-kejadian dan juga sebagai gambaran/pengetahuan tentang kenyataan. Hal yang pertama menggambarkan tentang kejadian-kejadian didalam masyarakat yang dapat dilihat, didengar dan dibaca dalam kehidupan sehari-hari dan dipandang sebagai realitas tentang fenomena, sedangkan yang kedua merupakan gambaran/pengetahuan yang kita miliki tentang kenyataan sosial sehingga dipandang sebagai realitas konseptual. Sedangkan kalau berbicara tentang realitas sosial pada dasarnya mengarah kepada realitas konseptual sebab perannya sangat penting dalam kehidupan sosial.

83) Mulyana W. Kusumah, *Realitas Sosial Kejahatan*, Op.Cit., hal.5, mengutip William J. Chambliss, *The State, The Law and The Definition of Behaviour as Criminal or Delinquent*, dalam *Handbook of Criminology*, Daniel Glasser (Editor), Rand Mc Nally and Co, Chicago, 1979. Pemahaman bahwa masuknya kepentingan politik dan ekonomi sebagai salah satu aspek yang menyebabkan terjadinya proses kriminalisasi, janganlah diartikan secara sempit, namun dilihat sebagai pengaruh-pengaruh eksternal yang mendukung kepentingan tertentu.

84) Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Op.Cit., hal. 35. Pemahaman Chambliss terhadap kejahatan tidak lepas dari pengaruh klas dominan dan persepsi mereka terhadap sebuah perbuatan jahat. Chambliss mengatakan: *We Must understand the political, economic and social forces leading to differences in crime rates in different historical periods as well as differences between countries in the same period.*

Edwin M. Schur juga melihat bahwa kejahatan dan pelanggaran yang ada tidak lain merupakan hasil penilaian yang dituangkan sebagai sebuah produk politik terhadap fenomena sosial. Ada beberapa *public policy* yang ikut serta mendasari mengapa sebuah perbuatan tertentu menjadi sebuah perbuatan jahat dan perbuatan lainnya tidak menjadi perbuatan jahat. Menurut Schur semua ini diformulasikan, dihasilkan dan kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan tentang kebijakan publik yang mengikat. Dimana *publik policy* yang dikeluarkan itu juga tidak lain merupakan produk dari pemegang kekuasaan sebagai hasil konflik diantara masyarakat sebagai sarana untuk mengatur keberadaan masyarakat (*politically organized society*)<sup>85)</sup>.

Pandangan kriminologi kritis terhadap kejahatan ialah bahwa kejahatan merupakan hasil dari konstruksi sosial, ini berarti bahwa manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dikonstruksikan tersebut adalah telah melakukan sebuah kejahatan<sup>86)</sup>.

Kriminologi kritis melihat bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah sebuah fenomena yang berdiri sendiri atau sebagai 'sesuatu yang jatuh dari langit' begitu saja, tetapi melalui rumusan-rumusan tertentu yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang tercela atau me-

---

85) Edwin M. Schur, 'Deviance and Politics', dalam *Radical Nonintervention, Rethinking The Delinquency Problem*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1973, hal. 139. Crime and delinquency are inherently political phenomena. This is so for at least two reasons : because public policy decisions of various sorts shape the social structures and value system within which such behavior occurs; and because ultimately the substance of crime and delinquency laws is, as we have seen, a matter for political decision. Furthermore, as one perceptive analyst has stressed, "the interest represented in the formulation and administration of public policy are those treasured by the dominant segment of society. Hence, public policy is created because segments with power differentials are in conflict with one another. Public policy itself its manifestation of an interest structure in politically organized society".

86) I.S Susanto, 'Crime and social Construction' dalam 'The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia', *loc.Cit.*

nyimpang<sup>87)</sup>. Oleh karena itulah pokok kajian kriminologi kritis menurut I.S Susanto adalah<sup>88)</sup>:

Mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang *didefinisikan* sebagai kejahatan, akan tetapi juga mempelajari perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum), disamping mempertanyakan diadakannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan.

Dengan pemahaman tersebut, Mardjono Reksodiputro melihat bahwa pemahaman kritis akan membawa pemahaman baru dalam memahami konstruksi kejahatan yang ada. *Pendekatan interaksionis* akan membawa kita kepada pemahaman untuk melihat bagaimana sebuah kejahatan atau penjahat itu diberi sebuah label atau cap jahat, *sedangkan pendekatan konflik* akan membawa kita kepada pemahaman bahwa bagi mereka yang memiliki kekuasaan (*power*) yang lebih besar (*dominant class, ruling class, powerfull* <sup>89)</sup>) akan memiliki kemudahan dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya, sebagai sebuah perilaku yang perlu untuk segera diancam dengan pidana atau dikatakan sebagai sebuah kejahatan. Tindakan ini menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari pemegang kuasa yang harus dilindungi demi kepentingannya.

---

87) I.S Susanto mengatakan bahwa konstruksi kejahatan adalah bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan dibentuk dan diarahkan oleh 'powerfull' sehingga tanpa sadar masyarakat mengakui bahwa apa yang dimaksud dengan kejahatan adalah apa yang telah dibentuk dan diarahkan oleh 'powerfull' secara nyata.

88) I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi, Op.Cit.*, hal. 8. Oleh karena itulah, maka fungsi lain dari kriminologi kritis adalah melakukan analisis terhadap proses bagaimana cap jahat (label) tersebut diterapkan pada tindakan dan perbuatan orang-orang tertentu. Dalam pandangan kriminologi kritis, pemahaman masyarakat terhadap kejahatan yang lebih banyak mengacu pada pandangan positivis, yaitu kejahatan hanya sebatas apa yang diatur oleh undang-undang, sehingga tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku lebih banyak ditentukan oleh bagaimana undang-undang tersebut dirumuskan dan dijalankan.

89) Penggunaan istilah 'Dominant Class (kelompok yang dominan)', 'Ruling Class (kelompok yang berkuasa)', 'Powerfull (orang atau kelompok yang memiliki kekuatan)' dalam konteks kajian ini memiliki pengertian makna yang serupa.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bermaksud mengungkap proses, terbentuknya latar belakang pemikiran dan sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap para pemegang kekuasaan; tindakan serta perlakuan para aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perilaku dan perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan perbuatan tertentu dalam hukum pidana; serta faktor-faktor non hukum apa yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum.

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mencoba menelusuri secara mendalam (*in depth*) dan nyata terhadap sebuah fenomena penerapan hukum pidana dari konteks sosial<sup>90</sup>).

Penelusuran fenomena penerapan hukum pidana dalam konteks sosial secara mendalam akan membawa peneliti kepada bentuk pemahaman yang sebenarnya akan akar permasalahan yang terjadi, sehingga konsep yang dihasilkan dari penelitian ini bukan hanya sekedar menggunakan dan menguji sebuah teori, namun berupaya untuk membangun sebuah pemahaman baru yang lebih dapat menjelaskan akan realitas sosial yang terjadi<sup>91</sup>).

Dalam penelitian sosiologis, perhatian peneliti akan lebih terfokus kepada upaya untuk memahami realitas

---

<sup>90</sup>) Ronny Hanitijo Soemitro, 'Grounded Research Dalam Ilmu-ilmu Sosial', Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985, hal. 158-159. Lihat juga: Soetandyo Wignjosebroto, 'Konsep Hukum, tipe Kajian, Dan Metode Penelitiannya', Makalah dalam Matrikulasi S2 Ilmu Hukum UNDIP, Juli-Agustus 1996, UNDIP, Semarang. Dalam konteks penelitian ini, maka hukum dimanifestasikan sebagai bentuk makna-makna simbolik para pelaku sosial yang nampak dalam interaksi diantara mereka, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian sosial atau non doktrinal dengan bentuk analisis yang kualitatif.

<sup>91</sup>) Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990, hal. 9.

sosial yang ada. Peneliti berupaya untuk memahami keberadaan hukum dalam keadaan yang senyatanya, dimana dalam kenyataannya keberadaan hukum tidaklah steril tetapi banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek non hukum<sup>92)</sup>.

## 2. Metode Penelitian

Melihat kepada garis besar perumusan masalah yang telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk memahami makna-makna sosial yang mendasari tingkah laku partisipan, untuk mendeskripsikan latar belakang dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinci<sup>93)</sup>.

Penggunaan metode penelitian kualitatif dimaksudkan agar peneliti dapat mengungkap secara lebih mendalam (*in depth*) tentang hal-hal yang melatar belakangi timbulnya sebuah pemikiran atau sikap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap sesuatu hal yang membuat aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi bersikap oposan terhadap pemerintahnya dan mampu mengungkapkan makna-makna sosial yang ada. Pengungkapan makna-makna sosial secara mendalam dalam sebuah penelitian akan lebih mudah ditemukan apabila menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh akan terus bergulir hingga menemukan data yang paling dasar dan yang sudah tidak dapat dikembangkan kembali.

---

<sup>92)</sup> Satjipto Rahardjo, 'Hukum Itu Tidak Steril', Suara Pembaruan, Jakarta, 31 Agustus 1989.

<sup>93)</sup> Sanafiah Faisal, 'Kapan Sebaiknya Menggunakan penelitian Kualitatif', Op.cit, hal. 21-22. Lihat juga: Soetandyo Wignjosebroto, Loc.cit.

Melihat titik fokus penelitian ini kepada bentuk pemaparan dan pemahaman mengenai sebuah latar belakang pemikiran yang menimbulkan sikap dan tindakan, metode penelitian kualitatif akan lebih tepat untuk digunakan. Hal ini diperlukan karena metode penelitian kualitatif dapat melakukan penyesuaian secara cepat dan fleksibel terhadap sebuah realitas sosial yang ada, dan mampu menanggapi secara responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi seketika di lapangan<sup>94</sup>).

Mengingat penelitian inipun merupakan bagian kajian dari kriminologi, metode penelitian yang dilakukan akan lebih spesifik apabila merujuk kepada metode penelitian dalam kriminologi yang dikemukakan oleh Richard Quinney. Quinney mengajukan empat buah metode untuk melakukan penelitian dalam kriminologi<sup>95</sup>). Keempat metode yang diajukan oleh Quinney ialah: *positivistik, konstruksi sosial, fenomenologi dan kritis*. Keempat metode ini dapat digunakan untuk memahami dan membangun secara kritis filosofi '*legal order*' (*develop a critical philosophy of legal order*) maupun untuk membangun secara kritis teori tentang kejahatan (*develop a critical theory of crime*)<sup>96</sup>).

---

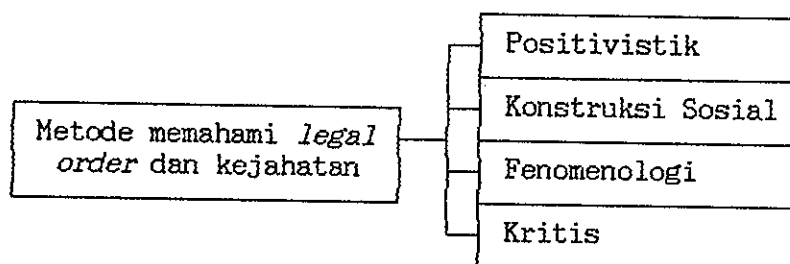
94) Metode kualitatif ini juga dapat digunakan untuk mengungkap hal-hal yang dirasakan amat rahasia, sensitif serta mendalam, yaitu dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan obyek yang akan dimintai keterangan secara terselubung. Metode ini pernah digunakan oleh Bahr dan Chadwick ketika melakukan penelitian terhadap demonstrasi mahasiswa yang terjadi di kantor penanganan masalah Indian di Seattle. (Bruce A Chadwick Dkk, *Op.cit*, hal. 246)

95) Richard Quinney, 'Crime Control in Capitalist Society: A Critical Philosophy of Legal Order', dalam *Critical Criminology*, *Loc.cit*. 'I will present the four modes of thought as follow: (1) the positivistic, (2) the social constructionist, (3) the phenomenological and (4) the critical. My objective is to develop a critical philosophy of legal order'

96) Richard Quinney, 'Research Methods and Modes of Inquiry', dalam *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America*, *Loc.cit*. 'Furthermore, each mode of inquiry is specifically related to the American order. They are: (1) the positivistic, (2) the social constructionist, (3) the phenomenological, and (4) the critical. From the last we will develop a critical theory of crime'.



Bagan 3. Skema metode pemahaman kritis terhadap *legal order* dan kejahatan menurut Richard Quinney.



Metode positivistik akan digunakan oleh peneliti untuk mengkaji keberadaan hukum pidana yang biasa diterapkan kepada para aktivis gerakan mahasiswa. Penelitian ini juga akan berusaha mengungkap akar sejarah yang ada serta penggunaan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi sebagai delik-delik pidana yang biasa diterapkan pada para aktivis gerakan mahasiswa. Metode konstruksi sosial akan digunakan oleh peneliti untuk mengungkap hal-hal yang diyakini bersama sebagai sebuah ideologi, mengungkap latar belakang pemikiran dari aktivis gerakan mahasiswa dan latar belakang pemikiran para aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan perbuatan tertentu dalam hukum pidana. Metode Fenomenologi akan digunakan oleh peneliti dalam upaya memahami terjadinya gerakan mahasiswa yang timbul secara sporadis dalam berbagai peristiwa dan konteks tertentu, sejalan dengan perkembangan keadaan yang ada. Dan metode kritis akan digunakan oleh peneliti untuk memahami secara kritis dari seluruh aspek yang penelitian yang ada dan mempertanyakan kembali 'kebenaran-kebenaran' yang diyakini sebagai sebuah ideologi di masyarakat.

Berangkat dari asumsi inilah, penelitian ini, diharapkan tidak hanya sekedar melakukan penerapan berbagai teori yang ada, tetapi juga mampu membangun teori yang

lebih spesifik terhadap keberadaan '*legal order*'<sup>97)</sup> dan membangun teori yang lebih spesifik tentang kejahatan.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di kotamadya Bandung, namun pada prakteknya dapat saja menjangkau lokasi-lokasi tertentu yang berada diluar kotamadya Bandung, yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Semarang. Untuk memahami keberadaan gerakan mahasiswa pro-reformasi serta para aktivisnya, kota Bandung merupakan lokasi yang cukup representatif, karena Bandung memiliki 67 perguruan tinggi negeri dan partikelir.

Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian, karena dari beberapa ibukota propinsi yang ada, Bandung merupakan salah satu barometer keberadaan gerakan mahasiswa, disamping Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan Ujungpandang.

Di Bandung terdapat empat buah perguruan tinggi negeri dan beberapa buah perguruan tinggi partikelir. Banyaknya jumlah perguruan tinggi yang berlokasi di Bandung ini membuat dinamika aktivitas gerakan mahasiswa akan semakin kompleks dan bervariasi.

Dalam beberapa kasus yang sempat menonjol kepermukaan, ada beberapa aktivis gerakan mahasiswa yang sempat mengemukakan isu nasional, regional dan lokal, sehingga dalam banyak hal terlihat bahwa kekritisian mahasiswa yang bergerak melalui gerakan mahasiswa sering diidentikkan dengan *moral force* yang membela kepentingan masyarakat.

---

<sup>97)</sup> Philippe Monet, Philip Selznick, 'Epilogue: Two Ways Law Can Die', dalam Law and society in Transition Toward Responsive Law, Op.Cit, hal. 115-118.

#### 4. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian sosiologis adalah data primer. Namun demikian keberadaan data sekunder tetap diperhatikan. Dengan metode kualitatif, data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan dari informan penelitian<sup>98)</sup>, sedangkan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sumber pelengkap lainnya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para aktivis gerakan mahasiswa, organisasi non pemerintah dan para pejabat pemerintah maupun pejabat di bidang pendidikan yang berkompeten dengan permasalahan.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan pustaka penunjang. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pustaka primer, sekunder dan tersier, yaitu: himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal atau buletin ilmiah, majalah, surat kabar, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Dalam metode kualitatif peneliti merupakan alat penelitian yang utama, karena penelitalah yang akan melakukan kontak langsung dengan informan serta melakukan penelusuran data secara bertahap dan mendalam berdasarkan

---

<sup>98)</sup> Secara teoritik hal ini memang amat mudah untuk diuraikan, dicatat dan ditafsirkan, namun didalam penelitian lapangan, ketika penulis langsung berhadapan dengan objek pelaku, maka apa yang diutarakan melalui kata-kata dan perilaku yang diperlihatkan dalam bentuk tindakan tidak selamanya dapat diterima dan ditafsirkan secara jelas. Kendala yang dihadapi adalah hambatan dalam hal berkomunikasi secara terbuka dan bebas. Data primer yang diutarakan melalui kata-kata dan tindakan tidak semuanya dapat diungkapkan seketika dan kita pahami maknanya saat itu juga, sebab pergaulan diantara sesama Aktivis Gerakan Mahasiswa memiliki ungkapan-ungkapan atau bahasa tersendiri dalam mengungkapkan pemikiran atau ide atau konsep-konsepnya, dan semua ini baru dapat dipahami setelah kita bergaul agak lama.

informasi yang dikemukakan oleh informan awal<sup>99)</sup>.

Peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan metode wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung maupun tidak langsung kepada informan baik secara formal maupun informal (terselubung), sedangkan pengamatan yang digunakan adalah pengamatan terlibat secara pasif (*passive participation observation*)<sup>100)</sup>.

Melihat permasalahan yang cukup sensitif, pendekatan pendahuluan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa dilakukan secara informal, melalui kegiatan-kegiatan tertentu, dan acara tertentu guna mengenal lebih dekat dan menumbuhkan kepercayaan. Bagi informan yang berada dalam sebuah lembaga atau instansi tertentu pendekatan formal dan informal dilakukan sesuai kebutuhan dalam kondisi yang memungkinkan<sup>101)</sup>.

---

99) Dalam melakukan penelitian ini, khususnya dalam menghadapi dan mendekati sumber informasi (informan) penulis mengalami bentuk-bentuk kecurigaan dan sikap yang ekstra hati-hati dalam menghadapi penulis. Sikap kaku, agak sedikit formal dan berkesan masih memiliki jarak masih nampak sekali ketika pada awal-awal pengenalan dan dalam mengutarakan maksud untuk ikut bergabung bersama dalam gerakan mahasiswa pro-reformasi. Sikap-sikap yang 'ekstra' hati-hati masih terkesan nampak ketika penulis mencoba bersikap akrab atau mengakrabkan diri, sehingga penulis menggunakan sebuah strategi gaya orang Sunda dengan istilah 'ngadu bako' atau 'saling bertukar rokok sambil ngobrol hal-hal yang ringan-ringan'. Pendekatan melalui pengakrabkan diri memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, namun hanya itulah yang dapat ditempuh, karena untuk membangun kepercayaan yang mendalam sehingga rasa curiga dan takut kepada penulis dapat sedikit-demi sedikit mulai sirna. Kendala dalam menghadapi informan yang demikian, dapat juga dilihat dalam metode studi history oral yang dilakukan oleh Anton Lucas, 'Masalah Wawancara Dengan Informan Pelaku Sejarah di Jawa', *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*, Koentjaraningrat, Donald K Emerson, Yayasan Obor Indonesia dan Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 211-244.

100) Bruce A. Chadwick, Howard M. Bahr, Stan L. Albrecht, Terj. oleh : Sulistia, Yan Mujianto, Ahmad Sofwan, Suhardjito, 'Penelitian Kualitatif', *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, IKIP Semarang Pres, I, 1991, Semarang hal. 234. bahwa dalam penelitian kualitatif mengacu kepada bentuk berbagai pengumpulan data yang berbeda, termasuk meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, wawancara mendalam, etnometodologi dan penelitian etnografi. Sebenarnya dalam bentuk-bentuk tersebut banyak terdapat perbedaan yang mendasar namun penekannya ialah tentang bagaimana mendekati data. Penelitian kualitatif berdasarkan kepada konsep bahwa pengalaman adalah cara yang terbaik untuk memahami perilaku sosial. Berangkat dari asumsi inilah, maka penulis melakukan bentuk penelitian kualitatif dengan bentuk wawancara secara terselubung melalui pengamatan terlibat secara pasif.

101) Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Rosda Karya, Bandung, 1994, hal. 117. Dalam hal melakukan wawancara dengan informan dari Aktivis Gerakan Mahasiswa penulis tidak menggunakan alat bantu untuk merekam dan mencatat, sebab hal itu akan banyak mempengaruhi keleluasan informan dalam mengemukakan dan mengutarakan apa yang ia alami, ia inginkan dan ia rasakan selama melakukan aksi gerakan massa. Secara otentik, data memang tidak tercatat atau terekam, namun penulis menggunakan daya ingat dan analisis langsung atau spontan untuk menggali data-data berikutnya dengan mencobanya menghubungkan dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh informan-informan tersebut. Kekakuan, sikap agak hati-hati dan mengambil jarak terkesan jelas sekali ketika penulis mengeluarkan tape recorder atau buku catatan, sehingga untuk menghindari sikap yang kurang atau tidak bersahabat penulis hanya mengandalkan daya ingat yang ada untuk menggali data yang terpendam.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan karena keberadaan gerakan mahasiswa tidak datang begitu saja, studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah<sup>102</sup>). Metode ini digunakan untuk mengungkap awal keberadaan aktivitas gerakan mahasiswa hingga perkembangannya. Disamping itu pula karena kajian ini juga berusaha mengungkap latar belakang kondisi-kondisi yang membentuk hukum pidana<sup>103</sup>), penelusuran keberadaan Haatzaai Artikel en dan UUPK Subversi akan dilakukan dengan metode penelitian sejarah juga.

## 6. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif sumber data primer di dapat dari informan atau orang yang dijadikan sebagai sumber informasi. Proses penelusuran data diperoleh dari informan awal menuju sumber informasi berikutnya (informan berikutnya) yang dilakukan secara tertentu dengan menggunakan kriteria atau karakteristik elemen-elemen tertentu sesuai dengan cakupan dan pembatasan permasalahan yang ada<sup>104</sup>). Informan penelitian diambil secara purposif yaitu sesuai dengan karakteristik elemen yang

---

102) Kuntodijoyo, 'Penelitian Sejarah', dalam Pengantar Ilmu Sejarah, Benteng, Yogyakarta, 1995, hal. 89. Penelitian sejarah digunakan untuk mengungkap tentang proses-proses yang terjadi dalam waktu yang lampau dari materi penelitian ini. Menurut Rowli Atmasasmita metode sosiologis tidak dapat diterapkan tanpa metoda sejarah, oleh karena hubungan antara hukum dan gejala sosial lainnya merupakan hasil dari suatu perkembangan dari masa lampau (Rowli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Op.Cit, hal. 17-18.).

103) Hengkie Liklikuwata, 'Sosiologi Hukum Pidana Sebagai Bagian Kriminologi', Op.cit, hal. 5. mengutip pemikiran Sutherland dalam Principle of Criminology: The sociology of law, which is a attempt at scientetific analisys, of the condition under which criminal law, develop and which is seldom included in general books of criminology.

104) Sanafiah Faisal, Op.Cit, hal. 56-57, bahwa dalam penelitian kualitatif penggunaan istilah 'sampel' sebagaimana yang dikenal dalam penelitian kuantitatif tidaklah dapat digunakan sebab pengambilan 'sampel' dalam penelitian kualitatif adalah bukan untuk menunjukkan keterwakilan sebuah populasi, akan tetapi lebih menunjukkan karakteristik elemen tertentu yang diharapkan dapat menuntun pada sumber-sumber informasi yang akan dijadikan sebagai sumber data yang valid. Oleh karena itu 'konsep sampel' dalam penelitian kualitatif adalah berkaitan dengan bagaimana cara memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang ada.

dibutuhkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

Selain itu pula pengambilan informan secara purposif (bukan secara acak) dilakukan karena dalam penelitian kualitatif titik penekannya lebih tertuju kriteria-kriteria atau karakteristik elemen-elemen tertentu yang mengarah pada proses ketimbang hasil<sup>105)</sup>. Oleh karena itulah pengambilan informan secara purposif dilakukan dengan mengetahui karakter dan variasi yang ada atau elemen-elemen tertentu yang secara utuh diperoleh dari lapangan.

Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Aktivis gerakan mahasiswa.

Informan awal adalah seorang aktivis dari gerakan mahasiswa pro-reformasi yang terlihat, diketahui dan dikenal paling sering terlibat dalam aktivitas gerakan mahasiswa pro-reformasi<sup>106)</sup>.

2. Pejabat di lingkungan pemerintahan.

Informan awal berasal dari lembaga yang terkait dan memiliki kepentingan terhadap stabilitas keamanan, ketertiban dan politik, serta memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan dan aktivitas gerakan mahasiswa pro-reformasi. Lembaga yang dimaksud adalah: kantor sospol, kepolisian, instansi militer dan kejaksaan.

---

105) Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Raka sarasin, Yogyakarta, 1993, hal. 48. Secara tertulis penulis memang tidak menetapkan secara baku dan kaku kriteria-kriteria atau karakteristik elemen-elemen secara detil informan yang akan ditemui untuk digali datanya atau dijadikan sumber data awal, namun penulis memiliki kriteria pokok yang di lapangan nanti akan dapat langsung menyesuaikan dengan kriteria-kriteria informan yang dikehendaki, sebab dalam kondisi lapangan yang dapat berubah dengan cepat apabila kita secara kaku berpegang pada kriteria pokok, maka akan sulit sekali menemui informan yang memadai, sebab di lapangan kriteria pokok yang ada dapat bertambah atau berkurang kriterianya, Misalnya saja seorang konseptor demonstran belum tentu ia seorang pemimpin demonstran, begitu pula sebaliknya namun disisi lain dalam waktu yang berbeda dapat saja seseorang menjadi konseptor sekaligus pemimpin demonstran. Pola ini tidak dapat dibakukan, karena bergantung pada kondisi dan massa yang dihadapi.

106) Proses penentuan informan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan secara personal. Melalui pendekatan yang ada mencoba membangun keakraban tanpa memasuki materi yang diinginkan, metoda ini digunakan untuk mengikuti arus pemikiran dan pergaulan para Aktivis Gerakan Mahasiswa, sehingga untuk mencoba memasuki lingkup pergaulan mereka diperlukan waktu dan kesabaran yang tinggi agar dapat diterima menjadi bagian dari kelompok yang ada. Penulis sendiri melakukan pendekatan dimulai sejak bulan Desember 1997. Dari informan awal ini klasifikasi informasi yang diperoleh menjadi berkembang sesuai dengan perkembangan keadaan dan dinamika gerakan mahasiswa itu sendiri.

### 3. Pejabat di lingkungan pendidikan.

Informan awal berasal dari lembaga pendidikan yang terkait dan memiliki kepentingan terhadap keberadaan dan perkembangan pendidikan mahasiswa serta aktivitas mahasiswa di lingkungan pendidikannya. Lembaga yang dimaksud adalah: lembaga-lembaga pembinaan kemahasiswaan di perguruan tinggi, baik tingkat fakultas maupun tingkat universitas.

### 4. Organisasi non pemerintah.

Organisasi non pemerintah atau biasa dikenal dengan nama lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap keberadaan gerakan mahasiswa. Lembaga yang dimaksud adalah: lembaga bantuan hukum yang menangani kasus gerakan mahasiswa pro-reformasi dan organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Sampel yang dikemukakan diatas, merupakan informan awal yang diharapkan dapat membuka jalan menuju informasi berikutnya secara lebih mendalam. Sedangkan sampel berikutnya akan bergerak dan berkembang sendiri mengikuti prinsip 'bola salju' (*snowball*). Pemilihan sampel dan penelusuran informasi akan berakhir apabila dapat diindikasikan 'tidak munculnya' variasi, kembangan atau informasi baru yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>107)</sup>.

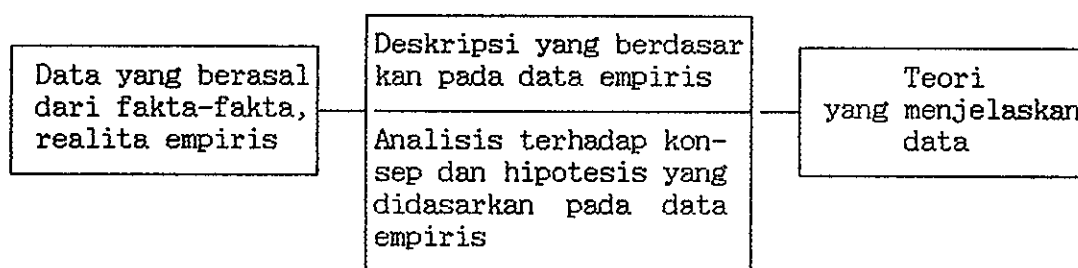
## 7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini strategi pendekatannya adalah *induksi-konseptualisasi*, yaitu penelitian bertolak dari

<sup>107)</sup> Sanafiah Faisal, *Op.cit*, hal. 158-159. Proses *snowball* dalam mencari guliran data atau informasi ternyata harus dilalui dengan penuh kehati-hatian sebab dalam kondisi yang serba represif, tidak semua informan guliran bola salju tersebut bersedia untuk mengungkapkan data serta informasi yang dimilikinya. Sikap hati-hati serba curiga dan terkesan formal terlalu ramah menunjukkan bahwa pada awalnya mereka (para aktivis gerakan mahasiswa) telah bersikap mengambil jarak. Namun setelah ada seorang aktivis gerakan mahasiswa yang memperkenalkan penulis dan mengemukakan bahwa dalam hal ini dilakukan hanya untuk penelitian maka kekakuan itupun segera mencair, namun belum sekaligus sebab masih nampak adanya jarak dan sikap curiga.

fakta atau informasi empiris (data) untuk membangun konsep dan teori. Dari fakta atau informasi ke konsep merupakan suatu gerak melintas ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi<sup>108</sup>). Dengan kata lain peneliti akan berusaha menarik data atau informasi empirik menuju abstraksi yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang bermakna teoritis.

Bagan 4. Skema Penelitian Kualitatif



Teknik analisis yang digunakan adalah: *analisis domain, taksonomis, komponensial dan tema kultural*<sup>109</sup>). Analisis domain digunakan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang konsep gerakan mahasiswa pro-reformasi serta tindakan, perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan perbuatan tertentu dalam hukum pidana.

Analisis taksonomis merupakan analisis lebih lanjut yang lebih rinci dan mendalam. Pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan pada domain tertentu dalam upaya

<sup>108</sup>) Sanafial Faisal, 'Analisis Data Penelitian Kualitatif', *Op.cit*, hal. 90. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa dari analisis-analisis induktif yaitu analisis yang bertolak dari data akan menuju pembentukan teori-teori baru setelah ia melalui proses teoritisasi atau proses induksi menuju teori yang dihasilkan dari generalisasi-generalisasi (Soetandyo Wignjosoebroto, *Penulisan Laporan Penelitian: Apa, Mengapa, Bagaimana*, Matrikulasi S2 Ilmu Hukum UNDIP, Juli Agustus 1996, UNDIP, Semarang, hal. 7)

<sup>109</sup>) *Ibid.*



mendesripsikan konsep gerakan mahasiswa pro-reformasi dan tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan perbuatan tertentu dalam hukum pidana.

Analisis komponensial merupakan analisis antarelelemen dalam domain yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dalam analisis ini peneliti akan melakukan eksplorasi data secara terfokus dan mendalam tentang kondisi-kondisi subyektif yang menimbulkan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, serta pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan perbuatan tertentu dalam hukum pidana.

Sedangkan analisis tema kultural atau '*discovering cultural themes*' sesungguhnya merupakan upaya untuk mencari '*benang merah*' atau keterkaitan lintas antar domain dalam upaya menjelaskan fenomena sosial yang ada. Pada analisis ini peneliti berupaya untuk menemukan rangkaian latar belakang sebab dan akibat terjadinya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, serta pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan perbuatan tertentu dalam hukum pidana.

Tabel 2. Model analisis penelitian kualitatif.

A. Domain	A. Taksonomis	A. Komponensial	A. Tema Kultural
Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.	1. Aktivis gerakan mahasiswa yang bersikap frontal-radikal: a. Pemimpin aktivis gerakan mahasiswa. b. Aktivis gerakan mahasiswa.	-Berfikir kritis karena informasi dan bahan bacaan. -Merasa sebagai <i>social control</i> dan <i>moral force</i> -Mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga formal dan informal. -Krisis kepercayaan thd. penguasa. -Krisis kepercayaan thd. wk.rakyat -Krisis kepercayaan thd. tkh.agama -Krisis kepercayaan thd. lembaga pendidikan.	Sikap oposan aktivis gerakan mahasiswa merupakan sebuah bentuk reaksi atas sikap dan perilaku penguasa dan lembaga kekuasaan itu sendiri.
	2. Aktivis gerakan mahasiswa yang bersikap lunak dan kompromis: a. Pemimpin aktivis gerakan mahasiswa. b. Aktivis gerakan mahasiswa.	-Melihat dan meyakini adanya kebrokan di bidang moral, sistem politik pemerintahan & perekonomian -Melihat dan meyakini adanya kebrokan di bidang hukum dan sistem peradilan.	
Aparat keamanan dan ketertiban yang menangani gerakan mahasiswa pro-refomasi	1 POLRI - Unsur Binmas - Unsur Lantas - Unsur Semapta - Unsur Intelpam - Unsur Reserse  2 ABRI - Unsur Teritorial - Unsur Sos.Pol. - Unsur Intelijen - Uns. Operasional a. Satgas anti huru-uata. b. Pasukan organik Kodam. c. Pasukan non-organik Kodam	-Tindakan serta perlakuan Polri & ABRI sebagai aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi - <i>Depenalisasi</i> perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sebagai hasil pertimbangan: praktis-sosiologis, politis dan hukum. -Pengaruh kekuasaan di bidang hukum politik, ekonomi dan militer dimasa Orde Baru, pengaruh perubahan sosial di bidang hukum, politik, ekonomi & militer di era reformasi.	Adanya pengaruh perubahan sosial di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer di era reformasi yang menyebabkan dilakukannya <i>depenalisasi</i> perbuatan & tindakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN THESIS

Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi atau paparan dengan sistematika sebagai berikut:

### Bab I. Pendahuluan

Di dalam bab ini akan diutarakan asumsi-asumsi dasar yang menggerakkan orang atau sekelompok orang untuk bersikap dan mengambil tindakan terhadap sesuatu hal. Asumsi dasar inilah yang menjadi latar belakang tentang dominasi konsep berfikir, bersikap serta mengambil tindakan yang oleh penguasa dianggap sebagai sebuah bentuk penyimpangan. Maraknya aksi gerakan mahasiswa di awal tahun 1998, yang muncul dengan berbagai isu aktual sebagai *moral force* yang membela kepentingan masyarakat kecil dianggap oleh penguasa sebagai sebuah bentuk penyimpangan yang patut untuk dipidana.

Penguasa memandang bahwa penggunaan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi yang diterapkan pada para aktivis gerakan mahasiswa merupakan sarana hukum yang tepat untuk menjaring berbagai perbuatan para aktivis tersebut, namun penindakan ini tidak membawa surut gerakan mahasiswa malah sebaliknya yaitu makin memicu berkembangnya gerakan mahasiswa di beberapa daerah.

Fenomena ini menarik untuk dikaji, sebab ternyata ancaman pidanaan melalui Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi tidak menyurutkan langkah para aktivis gerakan mahasiswa tersebut. Dari fenomena inilah, beberapa hal yang patut untuk dikaji kembali ialah tentang latar belakang sikap para aktivis gerakan mahasiswa yang cenderung berseberangan dengan pemerintahnya.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran dan saran kepada pihak-pihak yang bersikap saling berseberangan agar dapat terciptanya kondisi yang lebih responsif, menuju penyelesaian sebuah permasalahan yang

lebih responsif pula.

Penelitian ini beranjak dari pemikiran tentang konsep-konsep hukum dalam konteks sosial, sehingga spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang sosiologis dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dirasakan lebih tepat dalam penelitian ini, karena metode kualitatif mampu mengungkapkan realitas sosial yang ada secara lebih mendalam. Hal ini diperlukan karena berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, bahwa penggalian secara lebih mendalam terhadap sebuah realitas sosial akan membawa peneliti kepada sebuah bentuk pemahaman yang mendasar.

Pemilihan kota Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada asumsi bahwa Bandung merupakan salah satu barometer aktivitas gerakan mahasiswa, selain Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang dan Medan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan pengamatan. Perolehan data primer akan dilakukan secara bertahap mengikuti laju perkembangan informasi yang berhasil digali. Data akan berkembang sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi terhadap bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah data terkumpul, strategi pendekatannya adalah induksi-konseptualisasi, yaitu membangun konsep dan teori yang berangkat dari fakta dan informasi empiris. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis domain, taksonomis, komponensial dan tema kultural.

## **Bab II. Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan menjelaskan tiga hal pokok untuk menghantarkan sebuah pemahaman dasar tentang materi penelitian. Pokok yang pertama akan mengutarakan tinjauan umum dan

teoritik keberadaan gerakan mahasiswa di Indonesia; Pokok yang kedua akan memaparkan keberadaan serta perkembangan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi, serta penerapan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi pada para aktivis gerakan mahasiswa; dan Pokok yang ketiga adalah kajian teoritik yang mendasari pemikiran reintegrasi hukum, politik dan teori ilmu sosial dalam kriminologi kritis menuju hukum pidana yang responsif.

Bentuk pemaparan tinjauan umum dan teoritik gerakan mahasiswa Indonesia akan membawa kepada bentuk pemahaman akar sejarah yang pernah terjadi berdasarkan perkembangan budaya politik dan pendidikan yang pernah ada. Dalam tinjauan ini pemaparan akan mengungkap aktivitas pemuda dan mahasiswa berdasarkan pembagian generasi sebagai suatu hasil proses sejarah sesuai dengan peranan elit dalam masyarakat yang ada pada zamannya. Pembagian masa dan generasi ini dapat digolongkan pada: masa kebangkitan nasional, masa pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan, gerakan mahasiswa tahun 1966 dan pasca tahun 1966, gerakan mahasiswa tahun 1980 dan pasca tahun 1980 menuju tahun 1990.

Bentuk pemaparan keberadaan serta perkembangan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi akan membawa kepada bentuk pemahaman akar sejarah yang paling mendasar. Dalam pemaparan ini akan mengungkapkan latar belakang pembentukan dan penerapannya pada kasus-kasus tertentu, yaitu dalam pergerakan nasional, pers dan gerakan mahasiswa.

Bentuk pemaparan kajian teoritik yang mendasari pemikiran reintegrasi hukum, politik dan teori ilmu sosial dalam kriminologi kritis menuju hukum pidana yang responsif akan diutarakan sebagai kajian teoritik yang akan menjelaskan peran para pemegang kekuasaan melalui alat dan perangkat yang dikuasainya, dan menjelaskan juga dominasi pengaruh-

pengaruh non hukum yang mempengaruhi terjadinya serta bekerjanya hukum dalam kenyataannya. Dalam pemaparan ini, akan diuraikan pula konsep teoritik pemberdayaan masyarakat dan kelas menengah sebagai upaya menuju bentuk hukum yang lebih responsif.

### **Bab III. Hasil Penelitian dan Analisis**

Dalam bab ini akan mencoba mengungkap latar belakang, pemikiran dan sikap kritis para aktivis gerakan mahasiswa yang bersikap berseberangan (oposan) dengan para pemegang kekuasaannya.

Disamping itu pula, peneliti akan berusaha untuk mengungkap tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan keterlibatan dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan perbuatan tertentu dalam hukum pidana.

Pengungkapan realitas sosial ini akan membawa peneliti kepada sebuah bentuk pemahaman baru tentang pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi pertimbangan dilakukannya tindakan untuk tidak menahan atau menjerat para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi atas tindakan dan perbuatan yang telah dilakukannya.

Antara hasil penelitian dan pembahasan akan dilakukan secara melekat, karena dalam penelitian kualitatif antara hasil penelitian dan pembahasan tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri. Ini menunjukkan bahwa setiap hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasan akan menuju pengembangan berikutnya.

### **Bab IV Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan laporan penelitian. Kesimpulan akan dirumuskan dan disajikan berdasarkan fakta-fakta temuan yang diperoleh di lapangan, sedangkan saran akan dirumuskan secara praktis dan ditujukan bagi para pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Gerakan Mahasiswa Indonesia

##### 1. Pemahaman dasar gerakan mahasiswa dan pemuda Indonesia

Sebagai sebuah pemahaman awal perlu dikemukakan bahwa untuk membentuk sebuah definisi tentang *gerakan mahasiswa Indonesia* kedalam sebuah bingkai definisi yang mutlak adalah tidak mudah, sebab pembagian generasi sebagai suatu hasil pemahaman sejarah dapat dilihat dan diinterpretasikan sesuai dengan peranan golongan elit dalam masyarakat yang ada pada zamannya. Mengapa demikian, karena mahasiswa merupakan sebuah golongan elit yang dianggap mewakili masyarakat dan zamannya sendiri-sendiri, sesuai dengan porsi dan peranannya yang tentu saja pada setiap zaman dan generasi memiliki wawasan, peranan dan porsi yang tidak sama bahkan berbeda<sup>1)</sup>.

Zuhri Mahruz, dalam sebuah artikelnya mengatakan bahwa "gerakan mahasiswa adalah sebuah gerakan musiman dan terputus-putus, tetapi keberadaannya akan tetap ada sepanjang zaman". Asal mula adanya gerakan mahasiswa di Indonesia, dimulai pada zaman kolonial Belanda dimana perguruan tinggi yang ada, keberadaannya tidaklah mengakar di masyarakat. Akibatnya timbul dikalangan mahasiswa suatu gejolak dan gerakan yang berupaya menentang koloni-

---

<sup>1)</sup> B.M. Diah, Masalah Begitu Besar, Tapi Generasi Muda tak cukup Siap, Prisma 7 Nomor Khusus, 1976, hal. 52. Menurut B.M. Diah, dalam pengertian sosiologis dan politis elite adalah 'the ruling class', suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu mereka dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat, dalam suatu hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah suatu produk dari masyarakatnya. Demikian juga antara elite dengan elite sesudah atau sebelumnya senantiasa ada interkomunikasi, sehingga kreasi ataupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau dijemakan kedalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya. Demikian pula halnya dengan gerakan mahasiswa, ia juga merupakan bentuk dari elit tertentu yang sifatnya informal, karena memang tidak memiliki kekuatan dan power secara formal. Lihat juga konsep pemahaman tentang 'the ruling class' yang dikemukakan Selo Soemardjan dalam kata pengantarnya untuk Suzanne Keller, dalam Penguasa dan Kelompok Elit Peranan Elit-Penentu Dalam Masyarakat Modern, Rajawali Pers dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1984. hal. XV.

al dan membangkitkan semangat kebangsaan. Demikian pula keberadaannya ketika pada masa Orde Lama, mahasiswa menjadi objek politik dan kebobrokan sistem yang ada sehingga hal ini membangkitkan kembali sikap oposisi mahasiswa dengan harapan mereka dapat menghancurkan keburukan dan penyimpangan terhadap sistem yang ada<sup>2)</sup>.

Novel Ali mengutarakan bahwa berdasarkan catatan historik dan heroik yang ada, maka fungsi kontrol di banyak negara termasuk salah satunya di Indonesia, menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa memiliki suatu ciri khas dalam setiap aktivitasnya. Gerakan mahasiswa seringkali menjanjikan gerakan moral, walaupun keberadaannya seringkali dipadukan dengan gerakan politik<sup>3)</sup>.

Walau demikian apa sebenarnya yang dimaksud dengan gerakan mahasiswa? Bonar Tigor Naipospos, dalam sebuah tulisannya di Prisma yang mengulas keberadaan gerakan mahasiswa Indonesia mengatakan bahwa<sup>4)</sup>:

Gerakan mahasiswa adalah hasil dialektika dinamis antara kesadaran subyektif dengan realitas obyektif (yang representasinya adalah dinamika struktur ekonomi, politik, dan negara). Berbeda dengan kelompok sosial lainnya, kesadaran sosial mahasiswa ditentukan oleh gagasannya bukan karena keberadaannya. Latar belakang sosial dan lingkungan pergaulan sebagian besar mahasiswa berjarak dari kenyataan sosial. Retorika populisme dan kritisisme muncul bukan dikarenakan berbenturan dengan persoalan masyarakat sehari-hari, tetapi lebih dipengaruhi oleh pemikiran politik dan perkembangan teori pembangunan yang menjadi wacana tandingan dari kebijakan pembangunan yang ditempuh selama itu.

Bertitik tolak dari pemikiran inilah, maka dalam kajian ini akan dicoba untuk mengkaji beberapa generasi

---

2) Zuhri Mahruz, *Mengenal Gerakan Mahasiswa - Isu Keadilan Tetap Trendy*, *Pikiran Rakyat*, Bandung, 19 November 1989. Mitos klasik terhadap gerakan mahasiswa ialah dengan memandang bahwa gerakan mahasiswa itu merupakan gerakan yang memperjuangkan keadilan, kebebasan, demokrasi, dan aspirasi rakyat. Mahasiswa merupakan sarana kontrol sosial yang obyektif. Sikap dan gayanya yang cenderung oposisional dan kritis terhadap keadaan masyarakat, ini merupakan peninggalan dari masa-masa lalu yang berbekas dengan kuat dalam diri setiap aktivis mahasiswa, dan hal inilah yang menjiwai gerakan mahasiswa hingga sekarang.

3) Novel Ali, *Kapan Kaum Muda Berhenti 'Memusuhi' Pemerintahnya*, *Suara Merdeka*, Semarang, 11 November 1989.

4) Bonar Tigor Naipospos, *Mahasiswa Indonesia dalam Panggung Politik, K arah Gerakan Rakyat ?*, *Prisma* no. 7, edisi Juli 1996, hal 18.



yang ada, yang mulai membuat suatu gerakan dan dilakukan oleh sekelompok mahasiswa. Bila kajian ini ditarik rentang kebelakang, maka kajian ini akan bersumber pada momentum di tahun 1908, 1928, 1945, dan 1966<sup>5)</sup>.

Sebelum tahun 1946, penggunaan kata '*mahasiswa*' tidaklah sepopuler dan sedemikian bergengsinya di masyarakat. Mengapa demikian, karena pada masa sebelum tahun 1946, lebih dikenal penggunaan istilah '*pemuda*'. Penggunaan istilah '*pemuda*' dirasakan lebih egaliter dan masyarakat ketimbang penggunaan istilah '*mahasiswa*'<sup>6)</sup>. Ini tidak lepas dari pengaruh sejarah yang saat itu tengah mengalami pergolakan perang kemerdekaan, sehingga istilah pemuda terasa lebih memasyarakat dan lebih egaliter<sup>7)</sup>.

Menjelang tahun 1946, penggunaan istilah '*mahasiswa*' mulai diperkenalkan di masyarakat, sebelum itu penyebutan untuk mahasiswa dikenal dengan '*pelajar sekolah tinggi*', atau '*pemuda*'. Pengenalan penyebutan mahasiswa ini ditan-

---

5) B.M Diah, *Loc.cit.*. Jika B.M Diah membagi pergerakan pemuda yang ada menjadi angkatan 1908 dan angkatan 1928, maka Nugroho Notosusanto menggabungkan antara angkatan 1908 dengan angkatan 1928 menjadi satu angkatan yaitu angkatan tahun 1920-an (Nugroho Notosusanto, *Generasi, Sejarah dan Pewarisan Nilai*, Dialog *Prisma* 7 Nomor Khusus 1976, hal. 45). Taufik Abdullah menulis tentang peranan pemuda, bahwa sejarah kontemporer Indonesia seringkali di bagi kedalam Angkatan 1908, Angkatan 1928, Angkatan 1945 dan Angkatan 1966 (Onghokham, *Angkatan Muda Dalam Sejarah Politik*, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia-Pilihan Artikel Prisma*, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 112, lihat juga: Taufik Abdullah, *Tentang Pemuda dan Pembangunan*, Leksas, Jakarta, 1972, hal. 14).

6) Bonar Tigor Maipospos, *Loc.Cit.* Dengan pengaruh sejarah yang ada, maka istilah '*pemuda*' lebih populer ketimbang istilah '*mahasiswa*'. Namun demikian tanpa bermaksud melakukan pembedaan secara mendalam tentang penggunaan istilah '*mahasiswa*' dan '*pemuda*', maka dalam kajian ini keduanya memiliki konteks yang serupa dan mewakili penggunaan istilah pada zamannya. Dalam istilah '*pemuda*' penggolongan kelompok yang ada menunjuk pada pembedaan masyarakat yang digolongkan berdasarkan klasifikasi usia, tanpa membedakan jenjang pendidikan, sedangkan penggunaan istilah '*mahasiswa*' lebih digolongkan pada penggunaan diferensiasi tingkat pendidikan yang ada.

7) Sebelum kemerdekaan ada beberapa kelompok pemuda dengan susunan terorganisasi seperti militer tanpa dipersenjatai, yang nantinya ketika menjelang kemerdekaan dan sesudah proklamasi menjadi Laskar-laskar pemuda partikelir (non organik) dengan nama kelompok antara lain: Hizbullah, BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia), Laskar Rakyat (embrio laskar militer komunis), Laskar Bambu Runcing, Pemuda Siliwangi, Sabillilah, Sedangkan yang berada dibawah komando pemerintah Republik Indonesia adalah BKR-TKR. Pada awalnya BKR merupakan embrio dari TNI yang disponsori secara resmi oleh Pemerintah. BKR berubah menjadi TKR, TKR berubah kembali menjadi TRI, TRI berubah kembali menjadi TNI hingga kini. Sewaktu akan menjadi TNI ada sebuah keputusan untuk melakukan penyetaraan dan standarisasi tentara, oleh karena itulah laskar-laskar yang ada saat itu mencoba dilebur kembali dengan penempatan dan kepangkatan yang disesuaikan dengan tingkat kependidikan. Pada masa reorganisasi di tahun 1947 bagi mereka yang ingin melanjutkan karir sebagai militer dapat diteruskan, sedangkan yang ingin kembali bersekolah dapat meneruskan kembali bersekolah.

dai dengan dibukanya universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kala itu universitas Gadjah Mada (yang diprakarsai oleh Prof. Dr. Sardjito) sebagai universitas pertama di Indonesia belumlah memiliki kampus yang terpadu, dan fakultasnya-un tidak sebesar atau sebanyak kini. Pertama kali dibuka universitas Gadjah Mada hanya menerima mahasiswa untuk fakultas HESP (hukum, ekonomi, sosial, politik) yang menggunakan ruangan Sitinggil keraton Yogyakarta sebagai ruangan kuliah, sedangkan untuk fakultas kedokteran bertempat di (Ng)Asem dan fakultas teknik bertempat di (N)Jetis<sup>8)</sup>.

Menjelang tahun 1950-an, Istilah '*mahasiswa*' mulai dikenal secara meluas di masyarakat, bahkan mulai dipandang keberadaannya dimasyarakat karena status ini memiliki gengsi tersendiri di masyarakat<sup>9)</sup>. Ini terlihat dengan mulai beralihnya kriteria status sosial atas '*gelar*' yang ada. Pertama kali orang akan bangga dan memiliki status sosial yang cukup terpendang di masyarakat apabila ia memiliki '*gelar kebangsawanan*', namun ketika wawasan masyarakat mulai terbuka, maka status sosial seseorangpun akan bertambah apabila ia memiliki '*gelar berdasarkan akademis*'.

Hal ini tidak lepas dari pengaruh sejarah yang ada, sebab bukanlah menjadi sebuah rahasia apabila pada masa

---

<sup>8)</sup> Didapatkan dari hasil penuturan lisan Sam Ghazali, Alumnus Fakultas Hukum Gadjah Mada, tahun 1963 (generasi Sitinggil), yang menuturkan bahwa saat itu walaupun secara formal telah berdiri STOVIA (Sekolah Tinggi Kedokteran), HOSVIA (Sekolah Tinggi Pangreh/Pamong Praja), Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta dan Technischehogeschool (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung, namun itu semua masih merupakan sekolah tinggi yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau warisan kolonial, sedang universitas yang pertama kali didirikan di Indonesia setelah Indonesia Merdeka adalah universitas Gadjah Mada, dengan penuturan lokasi, fakultas, sebagaimana yang telah dituturkan diatas.

<sup>9)</sup> Menurut I.S Susanto, status '*mahasiswa*' ini dinilai cukup memiliki gengsi yang seimbang dengan gelar-gelar kebangsawanan, karena ternyata dalam realita-nya di masyarakat, para orang tua akan lebih memilih dan memperhatikan '*status sosial mahasiswa*', atau yang disebut orang saat itu '*Nggajahmodo*' (diasumsikan bahwa semua orang yang berstatus mahasiswa adalah mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, sehingga di Jakarta-pun, atau di Bandung, status mahasiswa dikenal dengan istilah '*Nggajahmodo*') akan lebih dipertimbangan dipilih untuk dijadikan menantu.

penjajahan pembatasan hak bumiputera untuk mendapatkan pendidikan sedemikian dibatasi. Pendidikan hanya diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu yang dianggap terpendang, memiliki keturunan ningrat dan memiliki kekayaan tertentu<sup>10)</sup>.

## 2. Periode masa Kebangkitan Nasional

Dalam rentang kurun waktu yang sedemikian lama, kiranya kita dapat melihat pasang dan surutnya gerakan mahasiswa, sebagai sebuah gerakan yang anti kolonialis, maupun sebagai gerakan yang revolusioner, hingga menjadi sebuah gerakan yang berkehendak sebagai golongan kaum reformis atau pembaharu menuju bentuk Indonesia baru.

Pergerakan kaum nasionalis menuju tatanan Hindia Belanda yang merdeka, sebenarnya sudah mulai ada dan tumbuh ketika mulai diberlakukannya bentuk *Politik Etis* oleh penguasa Hindia Belanda, sebagai sebuah bentuk perwujudan rasa terima kasih kepada kelompok bumiputera yang dianggap telah membantu naiknya kondisi perekonomian Belanda di Eropa sana<sup>11)</sup>.

Pergerakan mahasiswa STOVIA mulai berjalan dan dikenal dengan didirikannya Budi Utomo, yaitu sebuah wadah pendidikan yang lebih luas dari wadah pendidikan

---

10) Akira Nagazumi terjemahan: Pustaka Utama Grafiti dan KITLV-LIPI, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918 (The Origin and Earlier Years of the Budi Utomo, 1908-1918), Grafitipers, Jakarta, 1989, hal. 26-39. Dalam disertasinya ini, Akira Nagazumi menyoroti peranan mahasiswa-mahasiswa STOVIA, sebagai bentuk dari pemberlakuan politik etis di Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun hanya terbatas pada golongan priyayi, dan bukan bertujuan yang sebenarnya yaitu membangun pendidikan bagi kaum bumiputera yang sesungguhnya. Pendidikan yang diberikanpun bukan atas dasar kebajikan penjajah, hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi tuntutan 'balas budi' yang saat itu banyak berdengung di negeri Belanda dan mempengaruhi politik kebijakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda.

11) Akira Nagazumi, Loc.Cit. Sebab bagi orang Belanda ada anggapan bahwa Hindia Belanda adalah gabus yang membuat Nederland terapung (*Indie is de kurk waarop Nederland drijft*), sehingga mereka merasa perlu untuk memberikan timbal balik atau balas budi yang layak, karena telah sekian banyak kekayaan Hindia Belanda diangkut ke Nederland untuk mengisi kas kerajaan dan memakmurkan masyarakatnya. Walaupun ada sementara sejarahwan yang mempertanyakan niat murni dari Politik Etis ini (termasuk penulis), namun dari *Politik Etis* ini jelas memberikan sebuah wawasan baru bagi kelompok priyayi bumiputera yang berkesempatan mengenyam pendidikan hingga STOVIA (*School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten*), dalam membangun masyarakatnya melalui pendidikan dan wawasan kebangsaan yang lebih tinggi sebagai pemersatu faham kebangsaan.

yang ada pada saat itu, dengan para pencetus-nya Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Dr. Sutomo, dan Dr Ciptomangunkusumo. Melalui Budi Utomo pergerakan kemerdekaan Indonesia dimulai dengan pembentukan dan pembangunan wawasan kebangsaan nasional Indonesia yang bersatu<sup>12)</sup>.

Kesadaran ini tumbuh dan berkembang karena gagasan yang ada dalam pustaka yang mejadi bacaan mereka sehari-hari berbicara tentang kebebasan, demokrasi, persamaan hak dan kritik terhadap kolonialisme serta imprealisme<sup>13)</sup>. Disamping itu pula tumbuh kesadaran bahwa mereka-pun memiliki hak dan pendapat yang sama, walau berbeda warna kulit, merupakan embrio dari bentuk perlawanan terhadap kaum kolonial<sup>14)</sup>.

Menurut Bonar Tigor Naipospos, yang mengutip artikel dari Leo Suryadinata mengatakan bahwa secara lambat laun pemerintah kolonial menyadari bahwa perkembangan wawasan

---

12) Ibid, hal. 41-87. Lihat juga: Robert van Miel, Terj. Zahara Deliar Moer, Munculnya Elit Modern Indonesia, Pustaka Jaya, Jakarta, 1984, hal. 44. Sedangkan untuk masa-masa terpenting dari tumbuhnya kesadaran nasional dari pendidikan modern, dapat dilihat dalam: J.D. Legge, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Grafiti Pers, Jakarta, 1993. Walaupun pada saat itu belum begitu banyak orang yang dapat mengenyam pendidikan moderen, namun dalam pendidikan moderen ini telah berhasil melakukan banyak hal diantaranya ialah perubahan struktur masyarakat, perubahan yang melahirkan bentuk-bentuk elit baru dan terakhir yang paling penting ialah membuka wawasan mata pelajar Indonesia tentang politik diskriminatif kolonialisme, yaitu tentang perbedaan warna kulit, dualisme sistem ekonomi, politik penindasan, dan pengingkaran harkat dan martabat manusia. Lihat juga: John Ingelson, Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993 dalam bab: Generasi Baru Mahasiswa. Dengan munculnya konsep pemahaman baru dalam diri mereka, maka pengaruh-pengaruh primordialisme kesukuan, sedikit demi sedikit mulai dilebur dalam wawasan kebangsaan yang satu, oleh karenanya angkatan dari generasi ini memperoleh sebutan angkatan 1908, sebagai angkatan yang membangkitkan kesadaran nasional atau angkatan yang mewujudkan 'Kebangkitan Nasional'.

13) J.D. Legge, Ibid. Lihat juga suplemen tentang Indonesia 'Pasang Naik Gerakan Nasional di Indonesia' dalam 'Rising Tide of Color (Pasang Naik Kulit Berwarna)'-nya Lathrop Stoddart. Dari bacaan inilah kesadaran politik dan kaum terpelajar Indonesia menjadi meningkat, selain itu juga dengan adanya pendidikan modern maka pemahaman tentang arti identitas dan organisasi juga bertambah baik. Stoddart menulis tentang dunia kulit putih dan musuh-musuhnya yang potensial serta perjuangan kelompok yang bertentangan dengan kelompok kulit putih menuju bentuk kemerdekaan yang hakiki sebagai manusia dan sebagai bangsa yang sama, setara dengan bangsa-bangsa lainnya.

14) Dalam The Rising Tide of Color, Lathrop Stoddart memberikan contoh beberapa bentuk perlawanan dari 'kulit berwarna' terhadap dominasi 'kulit putih'. Memang dalam buku aslinya Stoddart tidak menyinggung tentang Indonesia, namun dalam terjemahannya, diberikan suplemen khusus tentang perjuangan 'kulit berwarna' (pribumi) Indonesia terhadap dominasi 'kulit putih' Belanda, hal. 275-311. Dalam suplemen ini panitia penerbitan mengulas dan membahas perjuangan bangsa Indonesia berdasarkan segi geografis, kultur, historis dan pedagogis. Panitia penerbitan menyoroti pentingnya segi pendidikan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Indonesia yang saat itu masih terjajah, sehingga selain perjuangan secara fisik, perjuangan melalui pendidikan untuk memajukan daya dan olah pikir masyarakat-nya-pun juga diulas.

kebangsaan yang diberikan melalui pendidikan moderen, dapat membawa akibat yang kurang baik pada posisi mereka di Hindia Belanda<sup>15)</sup>. Kegiatan organisasi pelajar yang diperbolehkan adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan aspek-aspek politis, seperti olah raga, pengajaran, pertunjukan kesenian dan kependuan<sup>16)</sup>.

Ada sebuah catatan penting tentang peranan dan fungsi kependuan dalam andilnya membuka wawasan kebangsaan secara nyata di Hindia Belanda. Pada awalnya kependuan atau saat itu dikenal dengan sebutan *padvinder* atau *advinderij* (pencari jejak, penemu jalan) hanya diperuntukkan bagi mereka yang tergabung dalam sekolah-sekolah pemerintah. Namun dikarenakan kegiatan ini amat menarik bagi kegiatan pendidikan non formal bagi anak-anak, pemuda dan orang dewasa, maka kegiatan kependuan ini makin meluas dan makin berkembang tidak hanya dikalangan anak-anak belanda dan priyayi, tetapi juga berkembang luas diberbagai kelompok masyarakat<sup>17)</sup>.

Dalam pendidikan kependuan ini, penanaman nasionalisme dan kebangsaan amatlah menjadi prioritas. Setiap pendidikan yang diberikan dalam kependuan selalu menggu-

---

15) Bonar Tigor Naipospos, *Loc.Cit.* mengutip dari Leo Suryadinata, *Indonesia Nationalism and Pre War Youth Movement: Reexamination*, *Jurnal of Southeast Asian Studies*, 1978, hal. 100 Pembatasan juga dilakukan bagi para siswa yang belajar di sekolah-sekolah pemerintah, para siswa tersebut dilarang terlibat dalam berbagai macam dan bentuk kegiatan politik. Pemerintah kolonial amat khawatir efek samping yang tumbuh dari pendidikan-pendidikan yang diberikan, ini terlihat dari bentuk kekhawatiran mereka dengan membatasi perluasan jenjang pendidikan.

16) Sebenarnya tindakan pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan pembatasan melalui kegiatan-kegiatan non politis tersebut tidak akan membawa hasil yang efektif, mengapa, sebab melalui pengajaran dan kependuan, para pemuda yang ada pada waktu itu justru makin terbuka wawasan nasionalitas dan kebangsaannya, apalagi melalui kegiatan kependuan, sebab disanalah nasionalisme mulai diperkenalkan. Memang pada awalnya kependuan hanya diberikan untuk kalangan tertentu, tetapi dalam perkembangannya justru tidak dapat diduga, ia memberikan andil yang besar dalam pembentukan watak kebangsaan.

17) Pertama kali perkumpulan kependuan di Hindia Belanda bernama *NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeniging : Persatuan Pandu-pandu Hindia Belanda)*, kemudian disusul dengan berbagai kelompok kependuan macam : *Javaanse Padvinders Organisatie*, *Jong Java Padvindery*, *Nationale Islamitische Padvindery*, *Sarekat Islam Afdeling Padvindery*, *Hizbul Wathan*, dll. Lengkapnya dapat dilihat dalam *'75 tahun Kependuan dan Kepramukaan di Indonesia'* diterbitkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 1986.

nakan permainan dan dilatar-belakangi oleh pendidikan kebangsaan. Oleh karena itulah pemerintah Kolonial Hindia Belanda kembali melarang penggunaan istilah '*padvinder*' dan '*padvinderij*' bagi kelompok-kelompok kepanduan yang beraliran kebangsaan dan nasionalis. Dalam kepanduan ini kader-kader pergerakan nasional menemukan arti kebangsaan dan cinta tanah yang sebenarnya. Sehingga ketika penggunaan istilah *padvinder* dan *padvinderij* dilarang, mereka menggunakan istilah '*pandu*' dan '*kepanduan*', sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Salim<sup>18)</sup>.

Disamping kegiatan '*kepanduan*', kegiatan pendidikan dan pengajaranpun ternyata membawa efek pencerahan terhadap sebuah wawasan yang lebih luas, terutama bagi para pemuda yang tinggal dan belajar di Belanda sendiri. Para pemuda tersebut justru mendapatkan pemahaman kongkrit tentang kolonialisme dari pengalaman tinggal di negeri Barat dalam suasana yang jauh berbeda dengan suasana di Hindia Belanda. Di Barat para pemuda itu pertama kalinya dipandang sederajat dengan masyarakat, bukan sebagai warga masyarakat kelas dua, sebagaimana yang mereka rasakan di Hindia Belanda. Mereka dipandang sederajat baik dalam konsep hukum maupun dalam hidup sehari-hari<sup>19)</sup>.

Bulan Februari tahun 1925 dibentuklah '*Perhimpunan Indonesia*' oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di

---

18) Achmad Fadilah, *Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Melalui Gerakan Pramuka Dahulu, Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Proyek Penelitian Pramuka Garuda dan Karya Tulis Bela Negara, UNSOED, Purwokerto, 1993, hal. 38, tidak diterbitkan. Ini terjadi ketika makin melembaganya kegiatan kepanduan dalam setiap organisasi pemuda kedaerahan menjelang Sumpah Pemuda di tahun 1928, bahkan dalam satu putusannya di Sumpah Pemuda 1928, ada kesepakatan untuk menggunakan kepanduan sebagai salah satu sarana pendidikan kebangsaan dan wawasan nasionalitas, lihat teks asli 'Soempah pemuda'.

19) Bonar Tiger Maipospos, *Op.Cit*, hal. 19. Lihat juga : perjuangan Mohammad Hatta dan teman-teman dalam '*Perhimpunan Indonesia*' di Belanda dalam : J.E.W Duijs, *Membela Mahasiswa Indonesia di Pengadilan Belanda*, Gunung Agung, Jakarta, 1985 dan Mavis Rose, Terj. oleh : Herman Sulisty, *Riografi Politik Mohammad Hatta*, Gramedia, Jakarta, 1991., Dari pemaparan sebagian kenyataan sejarah yang ada diatas, kita dapat mengetahui bahwa Kepanduan-pun ikut memberikan andil dalam pendidikan kebangsaan, penanaman nasionalisme dan perluasan wawasan tentang arti cinta akan tanah air, yang sebenarnya pada waktu itu bangsa bumi putera belum memiliki tanah air yang merdeka, yang ada hanyalah wilayah koloni Hindia Belanda.

Belanda. Perhimpoean Indonesia ini sebenarnya merupakan pengembangan dari '*Indische Vereniging*' yang awalnya hanya merupakan tempat berkumpul, dan membicarakan masalah sosial budaya sekedar mengisi waktu yang kosong di Belanda. Namun setelah menjadi Perhimpoean Indonesia, perkumpulan ini secara jelas tengah mengedepankan masalah politik dan dalam salah satu asasnya menyatakan "*usaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia*"<sup>20</sup>).

Pergerakan di Belanda ini bukannya tanpa pengawasan yang ketat, sebab kementerian jajahan mengedarkan sebuah brosur pengawasan yang mengatakan bahwa bagi para mahasiswa yang aktif dalam kegiatan politik, maka mereka akan dikenakan sanksi penolakan untuk menjadi pegawai negeri (*ambtenaar*) Belanda dan pembatalan beasiswa<sup>21</sup>).

Jika di Belanda berdiri Perhimpoean Indonesia, maka di Hindia Belanda-pun tepatnya di Batavia di tahun 1925 berdiri *Perhimpoean Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI)* yang diprakarsai oleh sejumlah 'pelajar sekolah tinggi (istilah untuk mahasiswa pada masa itu)'. PPPI ini mempunyai hubungan yang erat dengan Perhimpoean Indonesia, bahkan asas dan tujuannya mirip sekali dengan Perhimpoean Indonesia yaitu "*berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia raya merdeka*". Mereka melakukan perjuangan dengan cara dan medianya sendiri, namun tetap memiliki

---

20) Sartono Kartodirdjo, *Op.Cit.*, hal. xi. Di Hindia Belanda sendiri, perkumpulan pemuda yang pertama berdiri adalah 'Tri Koro Darmo' di tahun 1915, yang kemudian berubah menjadi Jong Java. Menurut Abdurrachman Surjomihardjo, perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda selain disebut dengan *Indische Vereniging*, disebut juga dengan *Indonesische Verehiging*. (Abdurrachman Surjomihardjo, *Pola-pola Pemikiran Menuju Kemerdekaan Indonesia*, *Prisma* 7 Nomor Khusus 1976, hal. 19.

21) Tindakan ini merupakan tindakan pemerintah kolonial untuk membatasi dan mengawasi gerakan-gerakan mahasiswa di Belanda yang aktif dalam kegiatan politik dan berpartisipasi dalam serikat perburuan, sehingga ancaman dan sanksi pembatalan beasiswa dilancarkan untuk membendung keaktifan tersebut. Bahkan bagi beberapa orang tua yang mensekolahkan anaknya di Belanda, dihibau agar menghentikan tunjangannya agar para anak-anaknya tidak dapat aktif dalam berbagai kegiatan politik.

tujuan yang sama<sup>22)</sup>.

PPPI memegang peranan penting dalam mempersatukan organisasi pemuda Indonesia, sebab selain terlibat dalam persiapan kongres pemuda I, PPPI juga mengusulkan untuk mempersatukan berbagai organisasi pemuda dengan jalan fusi. Usul ini diterima dengan baik oleh para organisasi pemuda, karena pada umumnya anggota PPPI juga merupakan anggota dari beberapa organisasi pemuda yang ada, sehingga untuk melakukan fusi tidak terlalu mengalami kesulitan yang berarti<sup>23)</sup>.

Gagasan fusi dilontarkan dan dirintis dengan diselenggarakannya kongres pemuda I di Batavia pada bulan Mei 1926. Dari kongres ini memang belum mendapatkan hasil yang optimal, namun solidaritas di kalangan pemuda sudah mulai terjalin. Dua tahun kemudian, tahun 1928, dilangsungkan kembali kongres pemuda II yang menjadi tonggak sejarah baru dalam perjuangan bangsa Indonesia, khususnya perjuangan kaum muda Indonesia dalam menggalang persatuan, karena pada akhir sidang ini diucapkannya *Sumpah Pemuda* yang secara tegas menyatakan pengakuannya atas bangsa, tanah air, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia<sup>24)</sup>.

Pada tahun-tahun berikutnya tekanan pemerintah

---

22) Bonar Tiger Maipospos, *Op.Cit*, hal. 20. Dibandingkan dengan organisasi kepemudaan lainnya yang ada pada masa itu, maka PPPI selain sudah tidak lagi bersifat primordialisme yang kuat, maka PPPI kelak di tahun 1930 tepatnya pada kongresnya pada tanggal 20-23 September 1930 menyatakan secara tegas berada diantara organisasi pemuda dan partai politik. PPPI tidak lagi didominasi warna kesukuan, dan PPPI secara terang-terangan menyatakan diantara berada diantara organisasi pemuda dan organisasi politik.

23) *Ibid*. Keterlibatan PPPI dalam berbagai kegiatan politik justru semakin terlihat setelah tahun 1932, dimana mereka menentang upacara peresmian patung Jenderal van Heutz pada bulan Agustus 1932. PPPI bersama-sama dengan organisasi pemuda lainnya memprotes *Ordonansi Wilde Scholen* dan *Onderwijs Verbod*, yaitu peraturan yang membatasi kegiatan perguruan nasional. PPPI juga memiliki majalah *Indonesia Raya* yang cukup keras dalam melontarkan kritik. Di tahun 1936 beberapa anggota PPPI ditangkap oleh polisi akibat artikel yang dimuat dalam *Indonesia Raya*. Majalah ini akhirnya di breidel oleh pemerintah kolonial. (J.D. Legge, *Op.Cit*, hal. 107-115).

24) Bonar Tiger Maipospos, *Loc.cit*.



kolonial makin menguat, beberapa organisasi kepemudaan diawasi secara ketat, namun semua ini tidak mengendurkan semangat para pemuda itu untuk mempersatukan pandangan. Beberapa organisasi kepemudaan yang lahir pada saat itu tidak lagi diwarnai oleh semangat *primordialisme*, melainkan lebih menonjolkan nasionalisme dan hasrat untuk mencapai kemerdekaan<sup>25)</sup>.

Pendidikan bagi bumiputera yang diberikan oleh kolonial Belanda seakan menjadi bumerang bagi Belanda itu sendiri. Berbagai kegiatan politis dan non politis tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, sebab dengan pendidikan pencerahan demi pencerahan wawasan, kebangsaan dan nasionalisme senantiasa tumbuh dan berkembang, seiring dengan usaha perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya<sup>26)</sup>.

Berawal dari Sumpah Pemuda inilah, pergerakan demi pergerakan nasional mulai memasuki dunia politik secara nyata maupun secara bawah tanah. Kelompok-kelompok masyarakat dan mahasiswa pada perguruan-perguruan tinggi yang ada saat itu seperti *STOVIA*, *Rechtshogeschool*, dan *Tech-nichehogeschool* berkembang wawasannya, sehingga oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dianggap dapat membahayakan kedudukan pemerintah kolonial. Oleh karena itu

---

25) Tekanan pemerintah kolonial secara terbuka terlihat dengan melakukan pengawasan yang ketat, serta pembatasan-pembatasan dalam melakukan berbagai kegiatan, tetapi tekanan pemerintah kolonial yang tersebut dilakukan dengan membentuk sebuah badan tandingan bagi PPPI yaitu USI (*Unitas Studiosorum Indonesiensis*) di tahun 1933. Sebagai sebuah organisasi tandingan, maka USI bertujuan memecah belah persatuan dan membelokkan perhatian mahasiswa dari politik dan kegiatannya. USI bersemboyan bahwa 'pelajar sekolah tinggi sebaiknya hanya belajar, mencari ilmu dan jangan berpolitik'. USI hanya mengelola pesta dansa. Namun walau demikian ada juga beberapa anggota USI yang memiliki andil dalam memegang jabatan penting dalam birokrasi pasca kolonial, tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa USI adalah badan yang dibuat oleh kolonial Belanda untuk mengimbangi peranan PPPI. (Legge, *Op.Cit.*, hal. 79-80).

26) Sartono Kartodirdjo, *Op.Cit.*, hal. 60. Setelah angkatan 1908 yang membuka jalan menuju 'Kebangkitan Nasional' maka pergerakan ini dilanjutkan dengan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan penanaman nasionalisme secara bertahap. Perjuangan angkatan 1908 mencapai titik utamanya ketika mereka berhasil mengadakan suatu Kongres Pemuda di tahun 1928, dan berhasil pula mencetuskan suatu perumusan Sumpah Pemuda yang dijadikan titik tumpuan berikutnya untuk mengembangkan wawasan kebangsaan menuju Indonesia merdeka.

dengan berbagai macam dalih hukum dan hak-hak khusus, macam hak *exorbitan*, dipergunakan untuk menjaring dan membuang para aktivis pergerakan, baik menahannya di berbagai penjara maupun pembuangan di Digul dan Tanah Merah, Flores, Bandanaira dll<sup>27)</sup>.

Dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, beberapa mahasiswa tokoh Pergerakan Nasional yang terjaring oleh pasal Haatzaai Artikelen antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, RM Abdul Madjid Joyodiningrat, Ali Sastroamidjojo, Nazir Sutan Pamuntjak, Gatot Mangkoepradja, Maskoen dan Soepriadinata<sup>28)</sup>.

### 3. Periode masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia

Awal Maret 1942 pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Jepang melakukan pendudukan atas seluruh wilayah Hindia Belanda, dan dalam masa ini pemerintah kolonial Belanda terpaksa melakukan pemerintahan dalam masa pengasingan di Brisbane, Australia. Dalam masa pendudukan Jepang, Jepang mengeluarkan maklumat tentang pelarangan semua kegiatan politik, termasuk juga membubarkan semua organisasi kepemudaan dan pelajar<sup>29)</sup>.

27) Abdurrahman Surjomihardjo, *Penempatan Kamp Konsentrasi Digul dalam Penulisan Sejarah Indonesia*, Prisma 7, LPSES, 1988, hal. 19. Di Sekolah Tinggi Kedokteran (STOVIA), Soetomo hendak diberhentikan dari pendidikannya karena ia aktif dalam berbagai kegiatan politik, oleh karena itu Dr. FH. Roll, Direktur STOVIA membela Soetomo, agar Soetomo tidak diberhentikan dari pendidikannya dengan mengajukan pertanyaan "Apakah ada di antara tuan-tuan yang hadir disini, yang tidak lebih merah dari pemuda Soetomo sewaktu tuan-tuan berumur 18 tahun?". (Bonar Tiger Maipospos, *Op.Cit*, hal. 21, mengutip dari wawancara Y.B Mangunwijaya dalam *Yogya Post*, 20 Mei 1991).

28) Achmad Fadilah, *Delik Politik (Sebuah Kajian Penggunaan UU No. 11 PNPS 1963 dan Haatzaai Artikelen Terhadap Gerakan Mahasiswa Indonesia 1974-1994)*. Makalah Ilmiah untuk mengikuti Program Magister (S2) Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1996, hal. 23. Para tokoh pergerakan ini dijerat menggunakan pasal-pasal Haatzaai Artikelen dengan dakwaan menyerang atau menghasut masyarakat Indonesia agar menentang atau mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peristiwa tersebut merupakan tonggak pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, dimana mahasiswa mulai berfikir secara kritis dan bukan hanya sekedar menerima ilmu pengetahuan, tetapi juga mulai peduli kepada kemerdekaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

29) Bonar Tiger Maipospos, *Op.Cit*, hal. 21. Memang pada awalnya Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi kepemudaan, pelajar dan politik, bahkan mereka juga melarang kegiatan-kegiatan Kepanduan yang dianggapnya sebagai sebuah kegiatan 'bawaan' dari Barat. Tetapi nanti menjelang masa jatuhnya Jepang dalam perang dunia kedua, Jepang mulai membuka kembali organisasi-organisasi kepemudaan dan pelajar, tentunya dibentuk dalam versi dan visi keinginan pemerintah Jepang. Lihat juga: Loebby Logman, *Delik Politik*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990 tentang Brisbane Ordonantie, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam pengasingan.

Jepang melakukan penutupan berbagai perguruan tinggi yang ada, mereka melakukan perubahan dan pergantian terhadap staf edukasi yang ada. Staf edukasi yang berkebangsaan Belanda atau dari Eropa, diganti, mereka segera dimasukkan kedalam 'kamp interniran'<sup>30)</sup>.

Selang beberapa waktu Jepang membuka kembali fakultas kedokteran di Jakarta dan fakultas teknik di Bandung, namun dengan komposisi staf edukasi yang berbeda. Kini staf edukasi yang ada terdiri dari orang-orang Jepang dan dari bumiputera. Walau kebijakan Jepang tentang pembukaan kembali fakultas-fakultas yang ada bagi bumiputera disambut dengan baik, tetapi keadaan dan kondisi pendidikan yang ada pada waktu pendudukan Jepang dirasakan lebih represif apabila dibandingkan dengan pendidikan pada masa kolonial Belanda<sup>31)</sup>.

Menjelang kemerdekaan 1945 peranan mahasiswa dan pemuda, tidak begitu ditonjolkan dalam hal pergerakan maupun pendidikannya, sebab mereka lebih banyak turun

---

30) Ada sebuah fenomena yang menarik pada masa pendudukan Jepang. Saat itu dahulu orang-orang pribumi-blasteran yang merasa memiliki darah Eropa, sebagai orang yang mengaku 'Indo', 'Sinyo', yang dahulu begitu mengagung-agungkan keturunan sebagian bagian dari kulit putih dan menganggap rendah kepada kaum pribumi, kini setelah Jepang menaklukkan mereka, para 'blasteraan', 'indo', 'sinyo' tersebut dengan terbuka mengakui bahwa mereka adalah bagian dari kaum bumiputera. Pengakuan ini dilakukan agar mereka tidak terkena peraturan yang mengharuskan bahwa setiap orang Eropa, diharuskan masuk kedalam kamp interniran. (Lihat juga: *Ktut Tantri*, terjemahan: Maj. Abd. Bar Salim, *Revolt in Paradise (Revolusi di Nusa Damai)*, Gunung Agung, Jakarta, 1965).

31) *Bonar Tigor Maipospos*, *Op. Cit.*, hal. 22. Pada masa ini informasi adalah barang yang berharga, sehingga penyegelan terhadap radiopun dilakukan oleh Jepang. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan informasi, sebab ada beberapa diantaranya yang bandel dan membuka segelnya untuk mendengarkan siaran radio-radio luar negeri. Jepang lebih bertindak keras, dan Jepang tidak segan-segan melakukan pemecatan, penahanan dan pemeriksaan yang cukup keras terhadap para pelajar dan pelajar tinggi (baca : Mahasiswa) yang ketahuan ikut serta dalam organisasi kepemudaan bawah tanah, membicarakan masalah politik, atau mencoba-coba melakukan kegiatan politik. *Burhan D. Magenda*, dalam *Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Politik: Suatu Tinjauan*, *Prisma* No. 12, Desember 1977, hal. 4, yang mengutip *George McT. Kahin*, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, 1952, hal. 32 mengatakan bahwa sampai saat masuknya Jepang ke Indonesia jumlah mahasiswa Indonesia hanyalah 637 orang, sedangkan pada saat yang sama jumlah mahasiswa Eropa dua kali lipat mahasiswa Indonesia. Namun demikian menurut *Harsya W. Bahktiar* dalam *Indonesia, dalam Students and Politics in Developing Nations*, halaman 184 *Donald K. Emerson* (Editor), bahwa jumlah mahasiswa Indonesia saat zaman Jepang adalah 387. Menurut *Joseph Fischer*, jumlah Sarjana Indonesia pada masa permulaan kemerdekaan adalah 1.100 orang. Karena itu perkiraan *Kahin* diambil sebagai estimasi yang moderat, lihat: *Joseph Fischer* 'Indonesia' dalam *James S. Coleman* (Editor), *Education and Political Development*, Princeton University Press, 1968, hal. 103.

langsung dalam bentuk melakukan perjuangan revolusi fisik<sup>32)</sup>.

Pada masa pematangan situasi ini, menjelang jatuhnya Jepang, ada beberapa pemuda dan mahasiswa yang melakukan jalan dan upaya yang berbeda. Kelompok Soekarno dan Hatta cenderung melakukan pendekatan terhadap pemegang kekuasaan, tetapi tindakan ini dianggap oleh Sukarni dan Sutan Syahrir sebagai tindakan kolaborator<sup>33)</sup>.

Ketika terkabarkan bahwa Jepang kalah perang, dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka Indonesia dengan segera memproklamlirkan kemerdekaannya<sup>34)</sup>.

<sup>32)</sup> Ibid. Ada beberapa dari mereka yang menonjol, tetapi bukan dalam bentuk pergerakan-pergerakan pendidikan, namun lebih berupa kelompok-kelompok perjuangan fisik. Perjuangan ini tidak lain dari hasil pengaruh pendidikan kemiliteran Jepang melalui PETA (Sukarelawan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia dan membantu Perang Asia Timur Raya), Heiho (Milisi reguler militer yang terdiri dari orang Jepang dan Indonesia), Seinendan (Kelompok pemuda sukarelawan pertahanan tetapi tidak bersenjata) dan Keibodan (Kelompok masyarakat diatas kelompok usia pemuda sukarelawan pertahanan yang diperbantukan kepada Jepang tetapi tidak bersenjata). Olah keprajuritan yang diperkenalkan oleh Jepang membawa dampak pada pola pendisiplinan dan karakteristik yang militan bagi para pemuda. lihat juga : A.H Nasution, Pokok-pokok Serilya, Angkasa, Bandung, 1984 dan Tjokropranolo, Panglima Besar TNI Jendral Soedirman Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia. Kisah Seorang Pengawal, CV Haji Masagung, Jakarta, 1993. Secara historis awal mula diperkenalkannya kehidupan militan melalui pendekatan militer dilakukan oleh Jepang dengan semboyan Perang Asia Timur Raya, dalam usahanya membuktikan superioritas bangsa-bangsa Timur terhadap kelompok bangsa Barat. Walaupun pola pendidikan dan pembinaan yang dilakukan Jepang kurang manusiawi, namun tempaan yang dilalui bangsa Indonesia selama tiga setengah tahun cukup membawa kesadaran militan melalui perjuangan bersenjata dan militerisme. Konsep inilah yang nantinya akan membawa kepada dua buah bentuk pemikiran yang berbeda di dalam militer, yaitu pertama konsep militer Indonesia yang didik dan dibesarkan oleh Jepang, dan kedua ialah konsep militer yang dididik dan dibina oleh Belanda, diambil oleh M.M Billah dari Robinson dan Hadiz, 1993, serta Jenkins 1984 (M.M Billah, Kubu-kubu Ideologis Yang Bersaing dan Pandangan Tentang HAM, Segi-segi Sosial Sengketa (konflik), Workshop Alternative Dispute Resolution, LBH Bandung, 1998).

<sup>33)</sup> Saat itu kelompok Soekarno-Hatta mengambil sikap tidak konfrontatif, tetapi Sukarni dan Syahrir lebih cenderung menggunakan kekuatan bawah tanah dan bersikap konfrontatif terhadap Jepang. Tindakan Soekarno dan Hatta ini dianggap oleh Syahrir sebagai tindakan kolaborasi dengan kekuasaan Jepang, sehingga perpecahan diantara mereka menjadi semakin nampak. Kedua kelompok ini memilih jalan yang berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama. Soekarno beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan olehnya adalah semata-mata untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat tentang kekuasaan dan kekuatan Jepang yang sebenarnya, karena pada masa itu Jepang sedang diambang kehancuran, dengan kekalahan-kekalahannya oleh pihak sekutu. (lihat : Cindy Adams, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, Gunung Agung, Jakarta, 1986). Lihat juga: Sumono Mustofa, Sukarni Dalam Kenangan Teman-Temannya, Sinar Harapan, Jakarta, 1986, Bagian Kedua, Tempat Sukarni Dalam Sejarah; dan lihat juga: Sutan Syahrir, Renungan dan Perjuangan, Penerbit Jambatan Dia Raya, Jakarta, 1990, bagian I Renungan dalam Tahanan, dan bagian II Aksi.

<sup>34)</sup> lihat : A.H Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan, mulai buku 1 - Proklamasi, hingga buku 5 Agresi Militer Belanda I, Angkasa, Bandung, 1980. Proses kemerdekaan yang terjadi bukanlah sebuah proses sejarah yang sederhana, sebab iapun memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi politik serta peperangan di dunia. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, dan di bom atom-nya Hiroshima dan Nagasaki merupakan puncak kekalahan Jepang. Menjelang Sekutu masuk ke Indonesia, terbetik kabar bahwa Belanda membongceng di belakangnya, dengan dalih melakukan pembebasan terhadap para 'interniran kulit putih' Belanda juga melakukan aksi polisionil I, atau dalam sejarah Indonesia disebut dengan Agresi Militer Belanda I. Belanda melakukan pembersihan terhadap balatentara Jepang yang kalah perang, namun merekapun rupanya memanfaatkan status quo yang ada (menurut anggapan Belanda) untuk menguasai kembali Indonesia (versi Belanda masih Hindia Belanda).

Menghadapi Belanda yang menyusup dibelakang sekutu, sejumlah pelajar dan pelajar tinggi melakukan gerakan dengan membentuk mobilisasi milisi pelajar dan mahasiswa (saat itu sudah mulai dikenal istilah mahasiswa). Mahasiswa membentuk semacam satuan Corps Mahasiswa sedangkan yang pelajar membentuk Tentara Pelajar<sup>35</sup>).

Dipihak lain Belanda selain melakukan aksi politisio-nil I, Belanda juga mencoba menarik simpati mahasiswa Indonesia dengan membangun kembali Universitas Indonesia yang fakultas-fakultasnya tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Belanda mencoba menggunakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai penarik perhatian massa dan kegiatan tersebut dipolakan persis seperti kegiatan mahasiswa di Belanda<sup>36</sup>).

Respon mahasiswa yang sedang belajar di universitas terpecah kedalam dua kubu yang berbeda. Kubu pertama adalah mahasiswa yang pro kepada republik, kubu kedua adalah kelompok yang bersikap apatis. Kelompok mahasiswa yang apatis benar-benar tidak aktif dalam kancah politik republik, mereka seakan-akan benar-benar mengikuti himbauan Belanda untuk tidak terjun dalam dunia politik-

---

35) Bagi mahasiswa dibentuk Corps Mahasiswa, sedangkan bagi pelajar tergabung dalam Brigade XVII, yang didalamnya terdiri Mas TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), Tentara pelajar IMAM (Indonesia Merdeka Atau Mati), TGP (Tentara Genie Pelajar), TP (Tentara Pelajar), dll. Khusus untuk tentara pelajar dapat dilihat dalam buku "Sangkur dan Pena" oleh Nugroho Notosusanto; buku "Benny Moerdani Profil Prajurit Negarawan" oleh Julius Paur, Yayasan Keuangan Panglima Besar Soedirman, Jakarta, 1993, khususnya Bab V. *Dinamika Tentara Pelajar*. Tetapi untuk melihat proses perlawanan oleh pemuda, pelajar dan mahasiswa dapat dilihat dalam "Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946", oleh Benedict R.O.G. Anderson (Ben Anderson), Sinar Harapan, Jakarta, 1988, Ben Anderson melihat bahwa Perjuangan di masa Revolusi di tahun 1945 sebagai suatu 'Revolusi Pemuda (Pemuda Revolution)' yang didorong oleh semacam sebuah kesadaran pemuda. Anderson menulis Disertasi untuk Ph.D. (*The Pemuda Revolution: Indonesia Politics 1945-1946*, diterbitkan dengan judul: *Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance, 1944-1946*, Cornell University Press, 1972) di tahun 1967 dengan melakukan riset pada tahun-tahun permulaan 1960-an mendapatkan inspirasi mengenai kesadaran pemuda ini dari suasana para pemuda zaman demokrasi terpimpin.

36) Bonar Tigor Naipospos, *Loc.Cit.* Namun kegiatan yang dipromosikan tersebut hanya berkisar seputar ajakan pesta dansa, *drinking meeting*, dan tidak mengandung unsur politis. Upaya ini dilakukan oleh Belanda sebagai taktik politik untuk meredakan daya kritis dan radikal pemikiran mahasiswa agar mereka lebih terkonsentrasikan pada studi belaka dan meninggalkan perjuangan fisik atau gerilya.

republik. Kelompok mahasiswa yang apatis tergabung dalam BKMI (*Badan Koordinasi Mahasiswa Indonesia*)<sup>37)</sup>.

Untuk mengatasi pengaruh BKMI, para mahasiswa yang pro-republik segera membentuk PPMI (*Perserikatan Perhimpunan-perhimpunan Mahasiswa Indonesia*) di Malang tahun 1947. Kemudian elemen dari mahasiswa yang pro-republik berhasil melakukan infiltrasi kedalam tubuh eksekutif BKMI dan berhasil pula melebur BKMI kedalam PPMI sebagai satu-satunya organisasi payung seluruh mahasiswa universitas di Indonesia<sup>38)</sup>.

Dalam alam kemerdekaan yang lebih leluasa, hilangnya ancaman kolonialisme membuat banyak mahasiswa lebih berkonsentrasi kepada studinya, mereka berusaha untuk dapat segera mengakhiri studinya, sedangkan kegiatan diluar studi adalah olah raga, hiburan dan rekreasi. Kondisi seperti ini makin membuat militansi mahasiswa menjadi menurun, mereka terpaku pada hal-hal yang formal dan mengurangi daya kritis mahasiswa<sup>39)</sup>.

Pembukaan perguruan tinggi yang baru disertai kemudahan dalam memasuki perguruan tinggi menumbuhkan bentuk golongan baru di masyarakat. Kini tidak hanya kelas priyayi saja yang dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, tetapi kesempatan itu dibuka seluas-luasnya bagi mereka yang mau dan mampu. Masyarakat banyak

---

37) Ibid. Kelompok yang apatis ini menurut mahasiswa yang pro-republik dianggap sebagai kolaborator dan perpanjangan tangan dari pemerintah kolonial. Sebab sementara mahasiswa yang lain sedang berjuang melawan Belanda, para mahasiswa yang tergabung dalam BKMI hanya sibuk menyelesaikan kuliah dan studinya.

38) Ibid. Menjelang tahun 1950-an kegiatan politik mahasiswa secara berangsur-angsur berkurang. Sebagian besar dari mereka lebih banyak menekuni studi, dan sebagian lagi lainnya ada yang memasuki dan menekuni karier di bidang politik, dan ada pula yang menjadi pegawai negeri atau swasta atau melanjutkan dinas di ketentaraan.

39) Memang dalam kondisi yang serba mencukupi, apalagi selepas Agresi Militer Belanda Ke II, dan pengakuan Belanda terhadap Negara Indonesia dalam KMB 1949 di Den Haag, membuat kondisi makin nyaman, walaupun harus diakui bahwa saat itu separatisme di Indonesia, masih juga ada. (Lihat : Achmad Fadilah, Korps Raret Merah Lahir di Jawa Barat, 178 Kali Tuqas operasi Tempur, Pikiran Rakyat, Bandung, 15-16 April 1992.)

yang mengharapkan adanya sebuah perubahan yang berarti dari pendidikan, dan nilai pendidikan memiliki posisi *bargaining* yang kuat dengan pemerintah<sup>40)</sup>.

Menjelang diadakannya Pemilu tahun 1955, partai-partai yang ada saat itu bersaing mencari pendukung, dan mereka melihat mahasiswa sebagai sebuah aset yang potensial bagi kelompoknya. Partai politik mulai meningkatkan kegiatannya di kalangan mahasiswa dengan merintis pembentukan organisasi-organisasi yang berafiliasi atau berpatron pada mereka. Organisasi kemahasiswaan ini berinduk pada partai politik yang membentuknya<sup>41)</sup>.

Sampai dengan tahun 1965, semua organisasi mahasiswa sangat aktif dalam setiap kegiatan partai yang menjadi afiliasinya. Keaktifan ini juga menjalar sampai ke kampus, mereka berlomba-lomba mencari pendukung dan anggota baru, termasuk dalam memperebutkan jabatan strategis dalam kepengurusan intern kampus<sup>42)</sup>. Persaingan juga terjadi dalam memperebutkan pengaruh di tubuh PPMI sebagai organisasi mahasiswa diluar kampus dan di MMI (Maje-

---

40) Bonar Tigor Maipospos, loc.cit., Tahun 1950, tepatnya pada tanggal 11 Januari, di Kampus Universitas Gajah Mada, untuk pertama kalinya dibentuk Dewan Mahasiswa, sebagai organisasi mahasiswa tingkat universitas. Berdirinya Dewan Mahasiswa di Gajah Mada ini, diikuti oleh beberapa universitas lainnya. Dewan Mahasiswa menjadi organisasi mahasiswa intern kampus yang menyelenggarakan hampir semua kegiatan mahasiswa yang bersifat intrakurikuler. Rektor memiliki posisi yang cukup penting, dan pemerintah-pun saat itu tidak begitu banyak melakukan 'campur tangan' dalam pengelolaan universitas, sehingga universitas benar-benar merupakan lembaga pendidikan yang mandiri, terutama dalam hal kebijakan kurikulum, kebebasan akademik, dan kegiatan kemahasiswaan. Pemerintah hanya mengatur seputar masalah kebijakan administrasi dan pendanaan.

41) Ibid PNI adalah partai pertama yang memprakarsai pembentukan organisasi mahasiswa yang berinduk pada partai, PNI membentuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), disusul dengan Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMS) yang berbasis di Universitas Indonesia dan dibentuk oleh PSI. Sedangkan untuk organisasi tingkat lokal, macam Consentrasi Mahasiswa Bandung (CMB), Consentrasi Mahasiswa Jogja (CMJ), dan Consentrasi Mahasiswa Bogor (CM Bogor) bergabung menjadi Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang kemudian dianggap pro-komunis. Sedangkan bagi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terbentuk sejak tahun 1947, menyalurkan aspirasi politiknya kepada Masyumi.

42) Pengkotak-kotakan mahasiswa ini dalam berbagai kelompok mahasiswa memang membawa dampak persaingan yang cukup keras, dan ini terbawa hingga ke kampus mereka masing-masing. Misalnya saja ketika ada acara intern kampus yang melibatkan mahasiswa secara umum, kelompok-kelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa yang berafiliasi kepada salah satu partai, akan berusaha mencari pengaruh, demikian pula dengan kelompok organisasi mahasiswa lainnya, sehingga tidak jarang bila dalam kampus tersebut seringkali diwarnai perpecahan karena afiliasi partai yang berbeda. Bahkan kini, suasana pertentangan dan persaingan keras antar organisasi mahasiswa masih terlihat secara nyata, khususnya apabila dalam pemilihan dan penyusunan organisasi mahasiswa intra kampus.

lis mahasiswa Indonesia) yang merupakan organisasi federasi dari kepengurusan intern kampus atau Dewan Mahasiswa<sup>43)</sup>.

#### 4. Gerakan mahasiswa periode 1966 dan pasca 1966

Setelah sekian lama mahasiswa berada dalam lingkaran akademis dan sosial politik yang memiliki keberpihakan secara nyata, terkotak-kotakan oleh perbedaan faham dan ideologi, maka era kebangkitan dan kejuangan mahasiswa Indonesia, kembali di tandai dengan adanya gerakan mahasiswa Angkatan 66, yang banyak bergerak untuk memperbaharui keadaan Indonesia pasca gerakan 30 S PKI. Angkatan 66 inilah yang kembali meletakkan mitos bahwa mahasiswa adalah salah satu tenaga penggerak bangsa yang mampu bersifat kritis dan terbuka<sup>44)</sup>.

Walau demikian menurut Nugroho Notosusanto Generasi angkatan 1966 tidak pernah mengalami masa penjajahan atau pahitnya perjuangan kemerdekaan dan betapa besar pengorbanan yang harus diberikan untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Angkatan 66 hanya mengambil kemerdekaan sebagai titik tolak aspirasi masa depan. Mereka cenderung untuk tidak menilai terlalu tinggi pengalaman nasional sejak kemerdekaan, dan mereka lebih mengagumi teori-teori

43) Bonar Tigor Naipospos, *Op.Cit.* Lihat juga : Andrew Gunawan, *Youth and Student Politics in Retrospect : With Special Reference to the Guided Democracy Period*, Kabar Seberang No. 17, hal. 131. Dengan demikian sejak tahun 1954, kampus menjadi semacam quasi battle ground partai-partai politik, terlebih lagi bila melihat situasi politik masa demokrasi terpimpin dan gaya kepemimpinan Soekarno yang sangat diwarnai retorika politik.

44) B.M Diah, *Op.Cit* hal. 24-25. Anggapan ini terus melekat dalam imajenasi mahasiswa, yang memang pada saat itu mahasiswa benar-benar memiliki sebuah kebebasan mimbar yang penuh dan dapat bergerak secara leluasa, bahkan dalam bentuk politik praktis sekalipun. Gerakan inipun selain tidak lepas dari pengaruh kondisi ekonomi dan politik dalam Negeri, juga mendapatkan pengaruh dari gerakan mahasiswa secara global yang terjadi sebagai bentuk perlawanan terhadap kemapanan kekuasaan pasca perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (Lihat dalam tesis ini bagian Teori Umum Gerakan Mahasiswa). Perbedaan terbesar antara gerakan mahasiswa angkatan 1957 dengan gerakan mahasiswa angkatan 1966 adalah pada persoalan ikatannya. Angkatan 1957 dapat dikatakan lebih berorientasi pada pemerintahan zaman itu, sedangkan Angkatan 1966 dari permulaan pergerakannya telah berusaha melepaskan diri dari pemerintahannya (Onghokham, *Op.cit*, mengutip pembahasan yang dilakukan oleh J. Eliseo Rocamora, *The Partai Nasional Indonesia 1963-1965*, Indonesia, Cornell Modern Indonesia Project, No. 10 (Oktober), 1970, hal. 143-183).



ilmiah dari barat<sup>45)</sup>. Pandangan mereka lebih universal, tidak terlampau nasionalistis atau partikularistik<sup>46)</sup>.

Keberhasilan angkatan 66 dalam melakukan reformasi sosial, tidak lepas dari dukungan keberadaan angkatan bersenjata yang ada (baca : angkatan darat). Bagaimanapun juga pola kerjasama dalam melakukan reformasi sosial terhadap tata pemerintahan yang ada, tidak semata-mata datang begitu saja yang hanya mengandalkan kekuatan mahasiswa dan rakyat. Keterkaitan dan peran angkatan darat, yang saat itu baru mengalami tragedi berdarah atas penculikan dan pembunuhan 6 orang perwira tinggi serta 1 orang perwira pertama, cukup membuat solid tubuh angkatan darat yang tersisa. Disini dukungan masyarakat dan mahasiswa membuat angkatan darat memiliki *moral force* yang lebih tegar dalam melakukan reformasi<sup>47)</sup>.

Aksi gerakan mahasiswa 'Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat)' yang dilakukan di tahun 1966 pada mulanya terjadi karena desakan ekonomi atas melambungannya harga-harga, munculnya sikap ketidak-percayaan kepada kabinet Dwikora dan bentuk perlawanan terhadap perbuatan dan perilaku PKI yang dinilai tidak bertanggungjawab. Semua ini dituangkan

---

45) Keberadaan Angkatan 66 tidak dapat dilepaskan dari Peristiwa 630 S PKI dan gerakan-gerakan yang menentang Bung Karno, atas indikasi kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Ketika itu sentimen masyarakat sudah menjurus kepada kepada bentuk penentangan kekuasaan Bung Karno yang dinilai sudah banyak menyimpang dari UUD 1945. Angkatan 66 menjadi sebuah tonggak bersejarah dalam masa peralihan dari Orde Lama menjadi Orde Baru, hanya saja dalam masa peralihan ini tidak lepas dari peristiwa terbunuhnya para aktivis gerakan mahasiswa (antara lain: Arief Rachman Hakim) oleh Pasukan Tjakrabirawa.

46) Mugroho Motosusanto, Loc.Cit. Menurut Mugroho Motosusanto, angkatan 66 ini kurang memiliki prespektif kesejarahan yang kuat. Satu-satunya kejadian besar yang mereka alami dan mereka miliki adalah aksi gerakan tritura pada tahun 1966. Mereka memiliki semacam romantisme yang agak berbeda, justru karena tidak pernah mengalami suatu perjuangan melawan kekuatan asing, baik secara politis maupun militer. Mereka sulit menemukan suatu tema perjuangan yang berharga untuk diperjuangkan, seperti tema-tema perjuangan yang ada pada generasi angkatan-angkatan sebelumnya.

47) Andi Amarullah, Loc.Cit. Lihat juga : Donar Tigor Naipospos, Loc.Cit., Terlihat dalam lintasan sejarah, bahwa tidak dapat dipungkiri peran serta Angkatan Darat, dalam melakukan reformasi sosial tidak lepas dari kepentingan pribadi Angkatan, yang sudah terlalu lama diombang-ambingkan oleh situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, sebagai akibat pertumbuhan politik yang jatuh bangun, mosi tidak percaya, pemberontakan di berbagai daerah dan separatisme. Dengan demikian angkatan 66 bergerak menjadi antitesis terhadap kondisi yang ada. Ia bergerak dengan basic *moral force* masyarakat, didukung oleh Angkatan Darat, menjadi sebuah kekuatan yang tidak terbendung lagi.

dalam bentuk pernyataan aksi Tritura: turunkan harga-harga, bubarkan PKI dan bubarkan kabinet Dwikora<sup>48)</sup>.

Aksi gerakan mahasiswa Tritura yang membawa implikasi kepada perubahan iklim politik secara mendasar, yaitu dengan terjadinya pelimpahan kewenangan untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dari Presiden Soekarno kepada jenderal Soeharto selaku pejabat presiden<sup>49)</sup>.

Menjelang tahun 1970-an semangat pembaharuan, kebanggaan dan imajenasi Angkatan 66 masih tetap digenggam oleh mahasiswa dan terus dibawa hingga awal tahun 1974. Pada awal tahun itu sudah mulai terlihat adanya benih-benih kecemburuan sosial yang tumbuh diantara warga pribumi dengan warga turunan asing, sehingga menimbulkan Peristiwa Malari. Sejak saat itulah keberadaan mahasiswa senantiasa diwaspadai dan dipantau setiap kegiatannya<sup>50)</sup>.

Belajar dari pengalaman tahun 1974, maka peristiwa 15 Januari itu menjadi semacam trauma politik terhadap mahasiswa, mahasiswa dianggap dapat menjadi sebuah kekuatan riil yang berbahaya jika tidak segera dibendung dan

---

48) Lihat dalam: Yozar Anwar, Angkatan 66 Sebuah Catatan Harian Mahasiswa, Sinar Harapan, Jakarta, 1981. Ketika terjadi aksi demonstrasi yang dimotori oleh mahasiswa didukung oleh masyarakat dan ABRI (Angkatan Darat-RPKAD) terjadi aksi serupa atau aksi tandingan yang mendukung kepemimpinan Bung Karno. Bentrokan tidak terelakkan, sehingga ada beberapa mahasiswa yang harus meninggal dunia (Arief Rachman Hakim) dan luka-luka (Zainal Sakse-Wartawan Harian KAMI) akibat perbuatan dari Resimen Tjakrabirawa. Situasi yang semakin genting dengan munculnya berbagai kerusuhan dan bentrokan-bentrokan fisik, akibat lambatnya Pemerintah mengambil keputusan yang tegas. Dengan desakan berbagai pihak, maka lahirlah Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) dengan maksud memberikan kewenangan kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan keamanan dan ketertiban serta menjaga keselamatan Presiden Soekarno.

49) Peralihan kewenangan menjalankan pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto, dilanjutkan dengan pengkukuhannya MPRS oleh Jenderal A.H. Nasution selaku Ketua MPRS. Tanggungjawab untuk memulihkan keamanan, ketertiban dan stabilitas politik menumbuhkan sebuah bentuk lembaga baru diluar sistem yang ada yaitu lembaga KOPKAMTIB dengan Panglima pertamanya adalah Soeharto sendiri. Lembaga ini akan lebih terlihat secara nyata peranan ketika terjadi aksi Gerakan Mahasiswa di tahun 1974 (MALARI-Peristiwa Lima Belas Januari 1974) dengan Pangkoptibnya Jendral Soemitro. Lihat juga: Ramadhan K.H., Soemitro Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkoptib, Sinar Harapan, Jakarta, 1994. dan lihat juga: Hariman Siregar, Hati Nurani Seorang Demonstran, Mantika Media Utama, Jakarta, 1994.

50) Lihat juga: Marzuki Arifin, Peristiwa 15 Januari 1974, Publishing House Indonesia, Jakarta, 1974. Dalam peristiwa 15 Januari, puncaknya terjadi ketika ada kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia, dan menimbulkan huru-hara, ditandai dengan perusakan barang-barang produksi Jepang, pembakaran toko dan perampasan barang-barangnya. Dalam peristiwa ini, disinyalir ada persaingan intern diantara elit politik yang ada khususnya antara Pangkoptib dan Aspri Presiden. Lihat juga: Ramadhan K.H., Soemitro dari Pangdam Mulawarman Hingga Pangkoptib, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

diarahkan kekuatannya. Oleh karena itulah untuk membatasi kegiatan mahasiswa, maka dikeluarkan SK 028/1974 yang membatasi setiap kegiatan mahasiswa dan melarang mahasiswa untuk melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus. Berdasarkan SK ini mahasiswa digiring kembali ke bangku kuliah, mereka hanya diperbolehkan melakukan kegiatan ilmiah yang sesuai dengan bidang kajiannya<sup>51)</sup>.

SK 028/1974 ternyata malah menimbulkan problema baru, mahasiswa yang selama ini telah merasakan kebebasan dan merasa memiliki kekuatan tersendiri dalam masyarakat, merasakan bahwa SK 028 tahun 1974 ini justru membelenggu aktivitas dan kegiatan yang selama ini mereka rasakan sebagai sebuah kegiatan non kampus tetapi memiliki makna yang besar bagi pertumbuhan masyarakat yang nyata<sup>52)</sup>.

Empat tahun setelah peristiwa 15 Januari 1974 terjadi tepatnya di tahun 1978, gelombang aksi protes mahasiswa terjadi kembali dan gerakan mahasiswa mulai bergejolak di kampus-kampus. Gerakan mahasiswa ini lebih banyak mempertanyakan kembali berbagai bentuk kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah, khususnya dalam mengambil kebijakan penanaman modal asing, lembaga keuangan non pribumi, serta peran pejabat-pejabat pemerintahnya. Namun walau demikian ada hal yang paling disoroti waktu itu,

---

51) Kegiatan ilmiah yang dimaksudkan ialah penelitian, Kuliah kerja nyata, wisuda sarjana, kerja bakti, bakti sosial mahasiswa, dan semua kegiatan yang tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan masalah politik dan politik praktis. Mahasiswa terkungkung dalam kegiatan statis dan monoton, tanpa adanya kebebasan dalam memilih dan mengadakan suatu kegiatan.

52) Menurut Hendardi, SK 028/1974 membuat kegiatan mahasiswa menjadi suram, segalanya serba diawasi. Dengan keadaan yang represif ini, maka di tahun 1978, munculnya sebuah gerakan mahasiswa yang isyunya dihinduskan untuk menentang penggunaan SK 024/1974. Namun walau demikian aksi mahasiswa tahun 1978, dirasakan kurang begitu mewakili isu-isu yang ada di masyarakat. Permasalahan yang diajukan oleh mahasiswa di tahun 1978 terlalu mengambang dan kurang menyentuh kepentingan masyarakat luas, saat itu mahasiswa hanya mewakili sebagian kepentingan yang ada, sehingga aksi ini kurang mendapat tanggapan yang luas. Rasa ketidakpuasan ini kembali diwujudkan dalam bentuk aksi yang menentang kebijakan tersebut, namun sayangnya aksi ini kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, karena masyarakat sendiri kurang memahami apa maksud dan tujuan dari aksi ini. Dan bila setelah tahun 1974 kegiatan mahasiswa selalu diawasi, maka setelah tahun 1978, maka gerakan dan kegiatan mahasiswa mengalami marginalisasi.

yaitu perihal keberadaan Presiden dan invasi kekuasaan keluarganya<sup>53)</sup>.

Menjelang terjadinya aksi gerakan mahasiswa di bulan Januari 1978, maka pihak keamanan negara melalui kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Kopkamtib melakukan sejumlah tindakan pengamanan dengan melakukan tindakan penjagaan 'on the spot' ke kampus-kampus yang diduga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, memberangus tujuh koran harian Jakarta, memberangus tujuh buah penerbitan mahasiswa, melakukan pendekatan keamanan aktif ke kampus-kampus serta melakukan penahanan kurang lebih 223 aktivis gerakan mahasiswa<sup>54)</sup>.

##### 5. Gerakan mahasiswa Indonesia periode tahun 1990-an

Di akhir tahun 1980-an, eksistensi gerakan mahasiswa mulai lagi tumbuh dan berkembang. Gerakan mahasiswa kembali dengan semangat dan retorikanya yang berslogan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan rakyat. Mahasiswa kini lebih merefleksikan gerakan-gerakannya dengan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kelas bawah. Mereka giat dan selalu ambil bagian dalam mengangkat isu-isu tentang kesenjangan sosial yang dialami oleh masyarakatnya<sup>55)</sup>.

---

53) David T. Hill, 'Surveying The New Order', *The Press in The New Order Indonesia*, University of Western Australia Press in Association with Asia Research Centre on Social Political and Economic Change, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, page 38-39. 'Four years later, further anti-government student protest, which were sweeping through the main campuses, were again reported extensively even in the moderate press, which was becoming assertive once more. Government development policies, specifically the questionable involvement of foreign investor, Chinese financiers and government officials, were target of student censure. The President's family was specifically critised and there were calls for him to stand down'.

54) *Ibid*, In January 1978, KOPKAMTIB responded by disbanding all university students councils, banning seven Jakarta Dailies and further seven student newspaper, prior to the military occupation of several key campuses and the arrest of some 223 students. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Laksmi Pamuntjak, 'The Indonesian Student Movement in The 1980s/1990s: The Development of Resistance by a "Marginally Minority"', Sebuah Thesis tidak diterbitkan, Murdoch University, Perth, 1993.

55) Bonar Tigor Maipospos, *Loc.Cit*. Kelihatannya ada beberapa keinginan untuk merubah format dan karakter gerakan mahasiswa dari gerakan yang berkarakter intelektualisme menjadi gerakan yang berkarakterkan kemasyarakatan. Ini terlihat setelah sekian lama keberadaan mahasiswa (pasca 1974 dan 1978) mahasiswa hanya menjadi semacam 'floating mass' tanpa dapat menunjukkan keberpihakan kepada siapa mereka bergerak mendukung, sebagai sebuah gerakan moral.

Bentuk gerakan mahasiswa di akhir tahun 1980-an dan di awal tahun 1990-an, memiliki karakteristik khas yang berpihak kepada kepentingan masyarakat kelas bawah, macam petani, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan kelompok-kelompok masyarakat kecil lainnya. Ini terlihat dari beberapa beberapa aksi yang dilakukannya macam, Aksi perlawanan terhadap kasus tanah Badega, tanah Cimacan, aksi solidaritas bagi buruh, aksi solidaritas bagi pedagang kaki lima dan asongan, serta aksi-aksi sporadis dan spontanitas yang membawa gerakan mahasiswa bersikap berhadapan dengan pemerintah, macam aksi gerakan mahasiswa anti Porkas-SDSB, dan aksi gerakan mahasiswa anti korupsi, upetisme<sup>56</sup>).

Friksi antara aktivis gerakan mahasiswa dengan aparat keamanan dan ketertiban tidak jarang terjadi, bahkan dalam batas-batas tertentu terjadi intimidasi secara terselubung dari pihak keamanan agar aktivis gerakan mahasiswa mau memperlunak sikap dan tuntutananya. Namun ada kalanya intimidasi ini bukannya membuat aktivis gerakan mahasiswa menjadi mundur dan surut, tetapi malah menjadi semakin kritis dan vokal.

Dalam menjaga stabilitas keamanan dan demi tak tergoyahkannya stabilitas politik, maka pihak aparat keamanan dan ketertiban mengambil tindak lanjut dengan menangkap dan mengamankan tokoh-tokoh aktivis gerakan mahasiswa. Bahkan beberapa orang diantaranya diajukan ke

---

<sup>56</sup>) Spontanitas gerakan mahasiswa di awal tahun 1990, menunjukkan sebuah progresifitas gerakan mahasiswa, mulai dari bentuk gerakan yang merakyat, bentuk-bentuk pemahaman dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan kadar informasi yang diperolehnya, berkembangnya jaringan kelompok mahasiswa dan berkembangnya bentuk-bentuk gerakan aktivitas mahasiswa, ada yang berbentuk kelompok diskusi maupun kelompok-kelompok sporadis-spontan sesuai isu aktual yang terjadi. Secara kuantitas, dalam periode ini jumlah aktivis gerakan mahasiswa yang dikenakan pidana terus bertambah, khususnya pembedaan yang menggunakan Pasal Haatzaai Artikel en dan UUK Subversi (untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam penerapan Haatzaai Artikel en pada aktivis gerakan mahasiswa dalam tesis ini).

pengadilan<sup>57)</sup>.

Kekritisan aktivis gerakan mahasiswa selain karena informasi yang mereka peroleh dan mereka analisis, mereka juga membuat semacam jaringan informasi antar perguruan tinggi, sehingga secara tidak disadari walaupun bukan jaringan secara formal namun tetap saling berhubungan. Beberapa kota yang memiliki perguruan tinggi dan kerap kali dijadikan barometer kegiatan kemahasiswaan antara lain: Yogyakarta, Bandung, Semarang, Jakarta, Surabaya, Ujungpandang dan Medan<sup>58)</sup>.

## 6. Teori umum gerakan mahasiswa

Melihat banyaknya gerakan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi dan unjuk rasa, menunjukkan bahwa image mahasiswa Angkatan 66 masih merupakan profil idola bagi segenap kalangan mahasiswa<sup>59)</sup>.

Kekritisan aktivis gerakan mahasiswa di tahun 1966, selain tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dan ekonomi yang terjadi di dalam negeri, keberadaannya juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi pengaruh pasca perang

57) Ibid. Lihat juga : Khoirul Rusydi, *Gerakan Mahasiswa Era 90-an Diaspora Kekuatan yang Siap Meledak*, Balairung, 25/XII/1997, hal. 17-21. Dalam kaitannya dengan *Haatzaai Artikelen*, maka banyak dari aktivis gerakan mahasiswa ini terjatuh oleh aturan-aturan pidana yang ada. Baik dengan menggunakan pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* maupun dengan *UUPK Subversi*. Bagi aktivis yang gemar melakukan aksi unjuk rasa, turun kejalan dan demonstrasi, biasanya mereka dikenakan *Haatzaai Artikelen* dan *UUPK Subversi*, tetapi bagi aktivis gerakan mahasiswa yang memilih aktif dalam kelompok diskusi dan kelompok-kelompok kajian lainnya, selain dapat dikenakan *Haatzaai Artikelen* dan *UUPK Subversi*, mereka juga dapat dikenakan *Pasal 510 KUHP Pidana*. Padahal penggunaan *UUPK Subversi* dan *Haatzaai Artikelen* itu sendiri sudah mengundang banyak masalah. (lihat juga: Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum dan Politik Perijinan di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Hukum dan Politik Perijinan di Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2-3 Mei 1995, hal. 11). Lihat juga: *Loebby Logman*, *Ketentuan Pidana terhadap Demonstrasi*, *Detektif Romantika*, 17 Agustus 1996, Jakarta, hal. 75.

58) Hilmar Farid, *Resistensi Mahasiswa dan Represi Negara, Catatan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1994*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 67-81. Atas dasar pemikiran inilah, maka dalam penelitian ini kota-kota tersebut dijadikan barometer dalam aktivitas gerakan mahasiswa. Dengan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam satu kota dengan kota lainnya memiliki sebuah jaringan informal, dalam bertukar informasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Metode Penelitian, bagian lokasi penelitian dalam tesis ini.

59) Yozar Anwar, *Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20 Kisah Perjuangan Anak-anak Muda Pemberang*, Sinar Harapan, Jakarta, 1981, hal. 31-34. Penunjukkan kenyataan ini bukan hanya sekedar terpengaruh oleh image yang ada, tetapi juga menunjuk pada realita dan kenyataan sosial yang ada, dimana mahasiswa di berbagai negara memang tergolong sebagai salah satu faktor yang berperan dalam hal perubahan sosial dan politik.

dingin antara Amerika Serikat-Uni Soviet dan munculnya gelombang perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat tahun 1960-1970-an<sup>60</sup>).

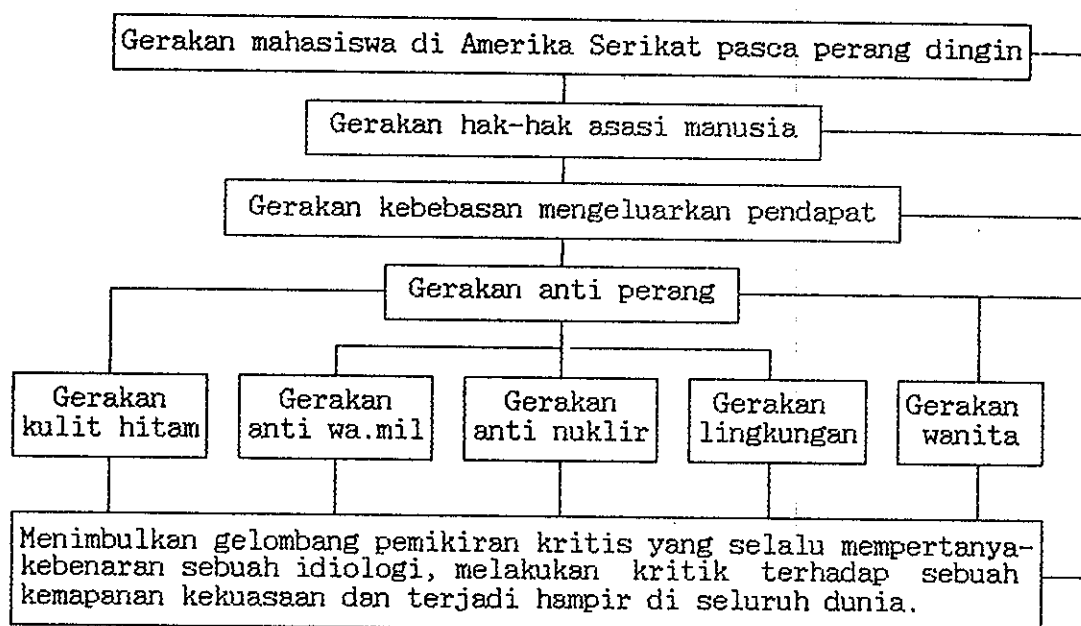
Dalam masa perang dingin di Amerika Serikat segalanya serba terkekang, dan kondisi negara membutuhkan dukungan yang kuat sehingga penekan terhadap masyarakat dirasakan agak terlalu berlebihan. Akibatnya setelah masa perang dingin usai, perasaan yang setelah sekian lama terpendam bangkit dan muncul dalam bentuk perwujudan maraknya gerakan-gerakan (*movement's*) masyarakat. Gerakan tersebut bermula dari munculnya gerakan Hak Asasi Manusia (*civil right movement*), berkembang menjadi gerakan kebebasan mengeluarkan pendapat (*free speech movement*), Meluas lagi menjadi gerakan anti perang (*antiwar movement*-karena saat itu Amerika Serikat terlibat peperangan dengan Vietnam). Dari gerakan anti perang ini dipecahkan lagi menjadi beberapa gerakan, yang masing-masing berkembang sesuai dengan konteks konsentrasi permasalahan yang didukungnya. Gerakan perluasan anti perang tersebut membentuk kelompok gerakan baru yaitu, gerakan kulit hitam (*black movement*) dan gerakan wanita (*womens movement*). Sedangkan gerakan anti perang membentuk sebuah kelompok tersendiri menjadi kelompok gerakan anti wajib militer (*antidraft movement*), gerakan anti nuklir (*anti-nuclear movement*) dan gerakan lingkungan (*environmental*

---

60) John W. Gardner, 'Hak-hak Sipil', *Yang Terbaik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hal 22-23. Di Amerika Serikat pasca Perang Dingin mulai timbul gejolak arus bawah yang menginginkan terjadinya persamaan, kebebasan, dan pilihan akan banyak hal. Ini terjadi karena setelah sekian lama Amerika Serikat berada dalam kondisi represif dalam tekanan Perang Dingin, maka masyarakat Amerika mulai menginginkan adanya kebebasan dalam berbicara, berkelompok, berserikat serta kebebasan dalam menentukan pilihan. Gejolak timbulnya perjuangan membela dan mempertahankan Hak-hak Sipil tidak lepas dari pengaruh kondisi rasial dan diskriminasi terhadap warna kulit, jenis kelamin, agama dalam memperoleh pekerjaan, karier, pendidikan, fasilitas dan pelayanan umum, sehingga sebuah permasalahan lama yang makin menumpuk menjadi sebuah gejolak yang menuntut persamaan hak yang berwujud gerakan kulit hitam, gerakan wanita, gerakan hak sipil dan asasi manusia. Memang ada sebagian literatur yang mengajukan fenomena tersebut sebagai sebuah gerakan yang dinamakan *The New Left*, tetapi dalam konsepsi pemahaman yang diajukan oleh John W. Gardner fenomena tersebut dikatakan sebagai gelombang kebangkitan perjuangan hak-hak sipil.

movement)<sup>61)</sup>.

Bagan 1. Skema timbulnya pemikiran kritis dan kebebasan berpendapat pasca perang dingin serta pengaruhnya kepada gerakan mahasiswa secara global<sup>62)</sup>.



Lyman Tower Sargent juga mengemukakan bahwa dampak dari bergeraknya gejolak aksi mahasiswa, muncul sebuah bentuk kritik terhadap keberadaan masyarakat kontemporer. Kritiknya yang paling mendasar adalah pada meluasnya bentuk kemunafikan di masyarakat.

Hal ini dikemukakan oleh Lyman Tower Sargent, pertama dengan terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga perwakilan rakyat, yang dianggap kurang mampu mengetahui

<sup>61)</sup> Lyman Tower Sargent, *'The New Left', Contemporary Political Ideologies - A Comparative Analysis*, The Dorsey Press, Chicago, Illinois, 1984, page. 148-167. 'The term was then appropriated by the growing world Student Movement and the mass media in the mid-1960s, then it was used to cover a wide variety of movement and individuals'. Lihat juga: Julian Nagel, Ed, *Student Power*, Merlin Press, London, 1969, page 225-235. Menurut Lyman Tower Sargent: Generasi Mahasiswa di Amerika Serikat di tahun 1950-an dikenal sebagai generasi yang apatis, tetapi menjelang berakhirnya tahun 1950-an dan menjelang memasuki tahun 1960-an, generasi mahasiswa apatis ini menjadi generasi mahasiswa yang paling aktif. Dorongan keaktifan ini muncul dari rasa tidak puas akan sebuah kekuasaan yang dihayutkan oleh pihak penguasa, sehingga banyak aktivis gerakan mahasiswa yang bergerak melakukan aksi gerakan hak asasi manusia, gerakan kebebasan mengeluarkan pendapat, gerakan anti perang, gerakan anti wajib militer, gerakan wanita, gerakan kulit hitam dan gerakan anti nuklir.

<sup>62)</sup> Bagan diambil dari dari Lyman Tower Sargent, *The New Left, Contemporary Political Ideologies A Comparative Analysis*, The Dorsey Press, Chicago, Illinois, 1984, page 149, namun dimodifikasi kembali dari bacaan dan informasi yang ada oleh penulis.



dan memahami keinginan rakyat yang sebenarnya. Lembaga perwakilan rakyat lebih mengetahui tentang kepentingan si kaya dan si kuat<sup>63</sup>). Kedua, terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta pemborosan yang dilakukan atas dasar kekuasaan penguasa<sup>64</sup>). Ketiga, adanya kecenderungan untuk melakukan penekanan dan penindasan terhadap kelompok oposan atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Penekanan terhadap kelompok oposisi lebih didasarkan adanya pertimbangan untuk menolak perubahan sistem politik secara mendasar<sup>65</sup>). Keempat, pandangan dalam bidang ekonomi yang terlalu mementingkan materialistis dan kapitalisme, termasuk didalamnya eksploitasi buruh, mengurangi hak-hak dasar kaum wanita, melakukan perbedaan ekonomi berdasarkan warna kulit (*white and black*)<sup>66</sup>). Kelima, sistem pendidikan yang terlalu otoriter dan tidak partisipatif, atau kurang responsif terhadap

---

63) *Ibid* hal. 131, 'The New Left was best known for its critical stance toward contemporary society rather than its goal. The most basic criticism was hypocrisy—the divergence between word and deed. This position was not monopolized by the New Left; it was widely believed that the expressed values of Western society must not be deeply felt since they are so seldom actually practiced. In addition to basic criticism, there were many points of attack. The most important criticism of the political system was that the representative system was not working. Representatives do not, it was argued, reflect the wishes of their constituents. The Representative don't even know what the people want, the only views known are those of the rich and the powerful'.

64) *Ibid*, This led to a second complaint—corruption. Critics believed decision about when and where the public money is spent were for sale. But this blatant misuse of office was not the only problem. Many issues were decided on the basis of who gave money to which candidate or for a variety of other reasons having nothing to do with the public interest.

65) *Ibid*, hal. 132, 'A Related charge was the public officials repress opposition. It is now clear that this charge was true when made. Recent cases suggest that such political repression may not have stopped entirely. The tendency to repress opposition was related to another criticism that the political system resist significant change. This is unsurprising because those in power are unlikely to support change that might remove them from power; if given a change, they are even likely to repress those supporting such change. Next to the political system, the economy was the main focus of the New Left criticism.'

66) *Ibid*, New Left thinkers believed the West had become too materialist, too concerned with acquiring objects with which to display worth. People identify themselves with their material possessions and believe that they will find satisfaction if they acquired enough possession. The New Left, drawing from the Marx, saw this as a major loss as degrading. ... Finally the modern economic system exploit workers in both the developed West and through economic imperialism, in the Third World. In the West, factories and mines are unsafe; in the Third World they are even less safe, and the workers are paid barely enough (by Western Company) to live and have no pension or health plans—workers are simply expendable. Since the right of minorities or in the case of women, a majority who are not accorded equal treatment has played such an important role in the New Left history. It is hardly surprising that racism and sexism were important points of attack on contemporary society. Few any longer doubt that discrimination is widespread. Our Awareness of that fact and the impetus to change it stem in large part from the New Left and the Black and Women's Movement.

perubahan-perubahan yang terjadi<sup>67)</sup>. Keenam, Peranan kelompok agamawan dan rohaniawan yang dianggap terlalu dekat dengan penguasa/kekuasaan sehingga ada anggapan bahwa agama dijadikan alat legitimasi untuk membenarkan sesuatu hal<sup>68)</sup>. Dan ketujuh bentuk kritikan terhadap lembaga perkawinan, dimana perkawinan hanya dianggap sebagai alat gereja atau negara untuk tetap mempertahankan kendali<sup>69)</sup>.

Kondisi di Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa pola pikir kritis yang selalu mempertanyakan atas sebuah 'kemapanan' atau atas sebuah 'ideologi yang diyakini kebenarannya' merupakan sebuah bentuk perwujudan 'pemberontakan menuju pembebasan' atas tekanan-tekanan yang ada dalam kondisi represif selama perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Dengan demikian aksi gerakan mahasiswa bukan hanya dimonopoli oleh kelompok-kelompok mahasiswa di negara berkembang saja tetapi juga terjadi di negara-negara yang maju namun berada dalam kondisi represif<sup>70)</sup>.

---

<sup>67)</sup> *Ibid*, 'Both education and religion were accused of not being relevant-a very important concept in New Left vocabulary. Relevance was the first test applied to any institution-did it speak to the immediate needs of the people involved? Long-term goals were not of much importance. Education was also attacked for being authoritarian rather than participatory. Many students later said that the only faculty response to this was to move the chairs in the classroom into a circle and lecture sitting in the circle rather than standing at the front. Private universities were also attacked for their holdings in company which manufactured weapons or had significant holdings in South Africa.'

<sup>68)</sup> *Ibid*, Religion was a particular focus of the charge of hypocrisy. If the principles of the religion were really accepted, so the argument went, how could believers support the war in Vietnam and not actively oppose racism and sexism? In fact many religious leaders became very sympathetic to the New Left Position and some became activists. Religion leaders were also accused of having sold out to capitalism. Some religious group, denominations and individual churches and synagogues appear wealthy; a few are. New Left activist contended that such wealth should be used to help the poor.'

<sup>69)</sup> *Ibid*, 'The family and in particular the institution of the marriage, was also a target of criticism. Hypocrisy about sex and the suppression of sexual activity was the first target. This was followed by the argument, from Engels, that marriage was an institution of the private property-the wife being the property of the husband. The general position was that marriage was irrelevant; it was merely a device by the church and/or state to maintain control.'

<sup>70)</sup> Menurut I.S Susanto dalam sebuah diskusinya dengan penulis, mengatakan awal muncul dan berkembang pola pemikiran kritis tidak dapat dilepaskan dari situasi yang ada di Amerika Serikat Pasca Perang Dingin. Selama kondisi Perang Dingin melawan Uni Soviet, kondisi Amerika dalam keadaan yang represif. Setiap perbuatan negara haruslah dibenarkan dan ditaati sepenuhnya tanpa perkecualian. Konsep yang represif ini menimbulkan keterbatasan-keterbatasan dan kurang berkembangnya ilmu-ilmu sosial, ditambah juga dengan terkungkungnya rasa kebebasan berpolitik, berbicara dan mengemukakan pendapat, kurang mendapat perhatiannya masalah hak-asasi manusia, masalah rasialisme antara kulit hitam dan kulit putih, perlakuan diskriminasi terhadap wanita, perlakuan buruh pabrik yang semena-mena, kemunafikan, korupsi dan masih banyak kondisi yang menyebabkan masyarakat

Menurut Tri T. Mulyaningsih, dalam sebuah artikelnya menyebutkan bahwa aksi dari gerakan mahasiswa merupakan sebuah gejala yang universal. Ia tidak hanya tumbuh, timbul dan bergerak serta terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga melanda negara-negara maju yang memiliki tingkat perekonomian tinggi dan stabilitas yang mapan<sup>71)</sup>.

Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, walaupun lebih mengarah kepada bentuk demonstrasi, menurut Michael Rush dan Phillip G. Altbach yang dikutip oleh Tri T Mulyaningsih menyebutkan bahwa demonstrasi merupakan urutan ketujuh dari sembilan tahapan hirarki yang ada untuk menunjukkan partisipasi terhadap sebuah permasalahan yang ada. Konsep ini menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa berdemonstrasi merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian penguasa dalam menyuarkan aspirasi politiknya<sup>72)</sup>.

Namun mengapa justru mahasiswa yang banyak berperan dalam melakukan perubahan sosial dan politik di masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Sarlito Wirawan Sarwono

---

kat Amerika berada dalam rasa kemauakan yang begitu mendalam. Namun ketika masa Perang Dingin Usai, ditandai dengan rekonsiliasinya Presiden John F. Kennedy dengan Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev, maka semakin terbongkarlah kedok-kedok kebobrokan pemerintah dan lembaga-lembaga formal lainnya. Masyarakat memandang bahwa Perang Vietnam (yang saat itu tengah berlangsung), Rasialisme, diskriminasi dan berbagai permasalahan sosial yang selama dalam Perang Dingin terpendam, menjadi tertumpah dan terwujud dalam bentuk gerakan-gerakan yang berfikir kritis. Mereka selalu mempertanyakan atas sebuah kemampuan, dan mereka pun selalu mempertanyakan kebenaran atas sebuah ideologi yang telah diyakini kebenarannya oleh banyak pihak. Pemikiran kritis inilah yang akhirnya mendunia dalam bentuk sebuah aliran yang selalu mempertanyakan atas sebuah kemampuan.

71) Tri T Mulyaningsih, *Kerap terjadi perbedaan - Antara Idealisme dan Realisme, Pikiran Rakyat*, Bandung, 14 Mei 1989. Dalam kepustakaan politik, aksi atau demonstrasi merupakan pola partisipasi baru; sama halnya dengan penyampaian petisi atau mosi. Pola ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari cara-cara konvensional seperti diskusi politik, kampanye, membentuk kelompok dan komunikasi individual. Anggapan bahwa pergolakan yang terjadi karena peran mahasiswa hanya terjadi di negara-negara berkembang saja, adalah tidak sepenuhnya benar, sebab ternyata di negara maju dan memiliki perekonomian mapan-pun pergerakan mahasiswa masih tetap ada, dan bahkan cenderung lebih kritis.

72) *Ibid.* Michael Rush dan Phillip G. Altbach menetapkan urutan pertama partisipasi adalah menduduki jabatan politik tertentu, kedua dengan mencari jabatan administrasi tertentu, ketiga menjadi keanggotaan aktif dari organisasi politik, keempat menjadi keanggotaan pasif dari suatu organisasi politik, kelima menjadi keanggotaan aktif organisasi semu politik (quasi political), keenam menjadi keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik, ketujuh partisipasi dalam rapat umum atau demonstrasi, kedelapan partisipasi dalam diskusi politik informal, dan kesembilan partisipasi dalam pemberian suara atau voting.

dalam Prisma bahwa<sup>73)</sup>:

Literatur membuktikan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang tergolong pemuda-lah yang lebih besar perannya dalam perubahan sosial atau politik dalam masyarakat. ... dan justru karena adanya status atau kedudukan tertentu dari mahasiswa dalam masyarakatnya inilah maka mahasiswa itu dapat berperan sebagai penggerak perubahan-perubahan sosial.

Lebih lanjut Sarlito Wirawan Sarwono menyimpulkan bahwa gerakan mahasiswa timbul oleh karena adanya rasa frustrasi yang disebabkan oleh *deprivasi relatif* (Gurr), yaitu keadaan dimana makin melebarnya perbedaan antara harapan (*value expectation*) dan kenyataan (*value capability*) yang ada<sup>74)</sup>.

Menurut Tri T Mulyaningisih apa yang dikemukakan oleh seorang sosiolog yaitu Seymour Martin Lipset dalam bukunya "*Political Man : The Social Bases of Politics*" menyebutkan bahwa terdapat sebuah bentuk korelasi yang positif antara intensitas tingkat partisipasi rakyat dengan tingkat pendidikan, status dan pendapatan<sup>75)</sup>.

Sadar akan posisinya yang strategis di tengah masyarakat, maka mahasiswa senantiasa memiliki jalinan yang

73) Sarlito Wirawan Sarwono, Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa : Suatu Studi Psikologi Sosial, Prisma 6, Juni 1979, hal. 69-70. Dalam literatur, khususnya apa yang diutarakan oleh Sarlito Wirawan didukung oleh Umar Juoro (hal.53), bahwa tidak hanya di Indonesia, pergerakan mahasiswa juga terjadi di Rusia (1956), Perancis, Korea, Thailand, dll. Penulis sendiri mengajukan gerakan mahasiswa di Burma (Myanmar), China, Jepang dan Korea Selatan. Dengan melihat realita sosial yang ada, maka kita akan dapat menilai bahwa gerakan mahasiswa paling tidak akan dapat menjadi sebuah *pressure group* bagi sebuah permasalahan yang tengah melanda masyarakatnya, dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lainnya.

74) Ibid, hal. 70, 73-74. Sebenarnya dalam gerakan mahasiswa ada bayang-bayang keberhasilan yang pernah dicapai oleh angkatan 1966, namun semua itu hanya dijadikan alasan patokan kekuatan tanpa memperhitungkan perkembangan zaman yang sebenarnya sudah tidak dapat menerima bentuk-bentuk yang demikian.

75) Tri T Mulyaningisih, Loc.Cit. Lihat juga : Arbi Sanit, Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa Refleksi dan Gagasan Alternatif, Lingkaran Studi Indonesia, YLEHI, Jakarta, 1989. Mahasiswa memang merupakan sekelompok anggota masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, sehingga dari persahaan mereka akan realita akan menjadi lebih kritis. Sebagai bentuk perwujudan kekritisan mereka, maka tidaklah berlebihan jika mereka lebih banyak bergerak dalam kegiatan-kegiatan massa, baik yang politis maupun yang non politis (sosial). Makin tinggi tingkat pendidikan, status, pendapatan, makin tinggi pula tingkat partisipasinya. Hal ini berarti bahwa intensitas partisipasi dapat dipakai untuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa, makin tinggi tingkat partisipasinya, maka makin tinggi pula tingkat pendidikannya. Namun untuk di Indonesia, teori ini belum tentu dapat diterapkan secara utuh, sebab masih perlu penalaran dan penelaahan yang lebih mendalam lagi

erat dan harmonis dengan masyarakatnya. Belum pernah tercatat dalam sejarah manapun yang terjadi, bahwa mahasiswa menentang masyarakat. Yang ada, justru sebaliknya, yaitu mahasiswa kerap kali tampil dalam barisan terdepan dalam membela kepentingan masyarakatnya, walaupun dia sendiri belum atau tidak memiliki kekuatan sendiri yang mapan<sup>76)</sup>.

Pendapat senada dikemukakan pula oleh Umar Juoro tentang keberadaan gerakan mahasiswa, hanya saja ia lebih menyoroti tentang faktor-faktor sosio historis yang melingkupi keberadaan mahasiswa itu sendiri<sup>77)</sup>.

Golongan muda, termasuk di dalamnya para aktivis gerakan mahasiswa senantiasa melihat bahwa dirinya dan peran generasinya kadang-kadang disodori atau dipaksakan berlaku sebagai aktor sejarah oleh kondisi politik. Sebab selain memiliki fungsi politis tersendiri, aktivis gerakan mahasiswa ternyata memiliki kemampuan yang lebih besar ketimbang para pelaku politik yang lebih dewasa<sup>78)</sup>.

---

76) Tri I Mulyaningsih, *Loc.Cit.*. Lihat juga, Entang Sastraatmadja, *Perjuangan Mahasiswa dalam Bentuk Berbeda, Pikiran Rakyat*, Bandung, 10 September 1969. Entang Sastraatmadja menyebutkan bahwa empat citra yang terus melekat tentang mahasiswa ideal dalam diri seorang mahasiswa. Pertama, mahasiswa sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, Kedua, mahasiswa sebagai warga akademis, ketiga, mahasiswa sebagai warga kampus, dan keempat, mahasiswa sebagai warga masyarakat. Citra yang keempat inilah yang senantiasa mendekatkan mahasiswa dengan masyarakatnya, khususnya dalam hal membela kepentingan rakyatnya (kasus Kacaping, tanah Badega, tanah Cimacan, Kedungombo) disamping melontarkan aksi anti-korupsi, kolusi, penyelewengan dan manipulasi.

77) Umar Juoro mengutarakan bahwa timbulnya aksi protes mahasiswa mempunyai latar belakang yang mencakup berbagai faktor yaitu: (1). Kegelisahan yang timbul dari rasa ketidak puasan terhadap kondisi masyarakat yang ada sebagai akibat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah membangkitkan sifat menentang pada diri mahasiswa. Sifat ini merupakan salah satu dari dua sifat kaum muda yang terdapat dalam masyarakat yaitu sifat menentang dan apatis. (2). Ketidak terikatan baik dalam hal birokrasi profesi maupun ideologi politik sehingga kebebasan bergerak sangat luas. (3). Aksi protes terhadap sesuatu yang dianggap merugikan masyarakat luas adalah manifestasi dari pengabdian masyarakat. (4). Mitos terhadap angkatan 66 tentunya tidak dapat diabaikan. (5). Melalui berbagai aksi mahasiswa, terpampang harapan dapat menduduki posisi-posisi pada kekuasaan-nya nantinya.

78) *Angkotham, Loc.cit.*, mengutip pembahasan yang dilakukan oleh Stephen A Douglas bahwa peranan Pemuda dan Mahasiswa ternyata lebih banyak diabaikan oleh banyak peneliti, penulis bahkan politikus dalam memperhitungkan kekuatan yang dimiliki atau akan dihadapi. Stephen A Douglas memberikan contoh bahwa di tahun 1965 ketika PKI melakukan *coup d'etat* terhadap pimpinan Angkatan darat, ternyata mereka tidak memikirkan kemungkinan kekuatan lain yang kelak harus dihadapinya yaitu kekuatan Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar (Stephen A. Douglas, *Political Socialization And Student Activism In Indonesia*, University of Illionis Press, 1970, hal. 7).

Latar belakang *sosio historis* dan *psikologis* yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa kondisi mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di beberapa negara bukan hanya sekedar terbawa arus, atau maraknya demonstrasi yang di lakukan oleh mahasiswa, tetapi juga lebih ditonjolkan kepada fungsi sosial kontrol terhadap berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku dan diterapkan di masyarakat<sup>79)</sup>.

Demikian pula halnya dengan beberapa aksi gerakan mahasiswa di Indonesia, bahwa selain dari image terhadap sebuah aksi gerakan mahasiswa, kegiatan protes mahasiswa merupakan cerminan bahkan merupakan reaksi belaka atas kepincangan-kepincangan yang terjadi dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa ditinjau dari sudut kepribadian mahasiswa ada saja mahasiswa yang lebih agresif dari pada mahasiswa lainnya<sup>80)</sup>.

Mahasiswa yang merasa sebagai bagian dari masyarakat yang telah diberikan kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya merasa bahwa masyarakatlah yang telah ikut serta membesarkan mereka sehingga tidak salah kalau mahasiswa lebih banyak menyoroti kepentingan masyarakat walaupun hal tersebut harus membawa akibat berhadapan dengan pihak pemerintah<sup>81)</sup>.

---

79) Ibid. Lihat juga : Yozar Anwar, Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20 Kisah Perjuangan Anak-anak Muda Pemberang, Sinar Harapan, Jakarta, 1981. Zuhri Mahruz, Loc.Cit. melihat bahwa penggunaan isu keadilan, HAM dan kesenjangan sosial merupakan permasalahan yang selalu aktual untuk selalu diangkat.

80) Sarlito Mirawan, Op.Cit., hal. 77. Lihat juga : Novel Ali, Kapan Kaum Muda Berhenti 'Memusuhi' Pemerintahnya, Suara Merdeka, Semarang, 11 November 1989.

81) Lihat kembali kasus-kasus perlawanan mahasiswa bersama masyarakat dalam ikut serta mempertahankan hak-hak rakyat yang akan diambil alih, baik secara paksa maupun imbalan ganti rugi. Beberapa kasus perlawanan masyarakat dan mahasiswa, dapat dilihat kasus tanah Badega, Kacapiring, Kedungombo, Cimacan, merupakan beberapa model perlawanan mahasiswa serta masyarakat terhadap penggunaan kekuatan dan kekuasaan.

Hal ini membawa mahasiswa selalu berada dalam pola pemikiran yang kritis dan selalu terpacu untuk mencari hal yang sebenarnya dan mendudukan sesuatu persoalan berdasarkan pola pemikiran dan teori yang mereka dapatkan di bangku kuliah. Namun setelah mereka berada di masyarakat dan bergabung dengan masyarakat serta ikut merasakan apa yang masyarakat rasakan, mereka harus tercengang, manakala tidak semua teori yang mereka peroleh itu sesuai dengan praktek atau realita di lapangan<sup>82)</sup>.

Mahasiswa seringkali menemui kejanggalan-kejanggalan yang tidak mereka temui dalam kuliah. Mereka mendapatkan pemisahan yang cukup tajam antara teori dan praktek, antara *das sein* dengan *das sollen*. Perbedaan yang tajam inilah yang membuat mahasiswa menjadi frustrasi serta mencoba mencari apa penyebabnya dan bagaimana pola penanganannya secara baik dan benar<sup>83)</sup>.

Namun tidak semua permasalahan itu dapat diatasi dan menghasilkan pola pemecahan yang baik dan benar, adakalanya malah menjadi semakin keruh dan tidak menunjukkan jalan keluar. Hal ini bisa saja terjadi, sebab teori-teori idealis yang mereka pelajari terkadang harus berbenturan dengan sistem birokrasi yang berlainan sama sekali, jauh berbeda dan terkadang tidak ada dalam teorinya. Mahasiswa kerap kali melihat sebuah realita hanya dari satu sisi yang dapat mereka lihat dan mereka pahami,

---

82) Yozar Anwar, *Loc.Cit.* kesenjangan antara realita dan harapan yang pernah mereka bayangkan tidak lain merupakan gambaran awal sebuah kekecewaan yang kemudian terakumulasi bersama beberapa bentuk kekecewaan-kekecewaan lainnya, berkumpul menyatu menjadi sebuah tenaga pendorong melakukan sebuah gerakan sosial, gerakan moral yang mengatasnamakan pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil, kelompok tertindas dan masyarakat kelas bawah.

83) lihat: Entang Sastraatmadja, *Mimbar Bebas Mahasiswa Nasih Perlu?*, *Pikiran Rakyat*, Bandung, 8 Oktober 1989. Dengan adanya kebebasan mimbar di kampus inilah, sebenarnya pematangan konsepsi berfikir mahasiswa menjadi semakin teruji dan terasah, walaupun kadang cenderung terlalu emosional, tetapi bila diarahkan, maka kefrustasian yang ada antara perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*nya akan menjadi lebih mudah dipahami.

tanpa dapat melihat sisi lain dengan seksama<sup>84)</sup>.

Mahasiswa mencoba untuk mendobrak hal-hal yang dianggapnya tidak sesuai, tetapi jalan yang mereka tempuh seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dari pengamatan yang dilakukan di lapangan, ada dua tipe aktivis mahasiswa yang berfikir kritis tetapi mereka menempuh dua jalan yang berbeda pula. Tipe yang pertama ialah tipe aktivis yang bergerak dengan menggunakan gerakan mahasiswa yang bergerak secara terbuka, progresif, pragmatis dan gemar pada rumor-rumor yang aktual dan merakyat. Tipe ini gemar melakukan berbagai macam aksi unjuk rasa, turun ke jalan, berdemonstrasi dan mengambil sikap berhadapan langsung dengan pihak penguasa. Seakan-akan mereka mengajak berhadapan langsung dan berharap pemecahan atas sebuah permasalahan dapat dilakukan dengan jalan frontal dan berlawanan<sup>85)</sup>.

Tipe kedua ialah tipe aktivis dimana mereka memiliki konsep yang bertentangan dengan pihak pemerintah, tetapi mereka berupaya tidak untuk menentang tetapi bergerak mengikuti arus sambil mendekatinya dan bergerak dari dalam sambil berupaya merubahnya agar sesuai dengan yang mereka harapkan. Tipe ini lebih cenderung kompromistis dan dapat melakukan negosiasi dibandingkan mereka harus turun ke jalan, demonstrasi ataupun berunjuk rasa. Mereka lebih memilih untuk beradu argumen, berdebat disertai

---

84) *Ibid.*, hal. 44-47. Perbenturan antara idealita dan realita itulah yang terkadang membuat kefrustasian mahasiswa makin memuncak, sehingga tindakan yang dilakukannya pun dilakukan tanpa berfikir panjang, dan menjadi sebuah perbuatan yang pragmatis, parsial serta seketika.

85) *Hendardi* dalam materi *Pembekalan Kepada Peserta Magang XII LEM Bandung*, mengatakan: bahwa gerakan mahasiswa tahun 80-an dengan 90-an adalah sangat berbeda, karena dalam gerakan mahasiswa 80-an isu-isu yang diangkat kurang memasyarakat dan terlalu elit sifatnya. Berbeda dengan gerakan mahasiswa tahun 90-an isu yang diangkat selalu aktual, memasyarakat dan sifatnya umum.



dengan dasar-dasar argumen yang tepat dan benar<sup>86)</sup>.  
Tabel 1. Tipe aktivis gerakan mahasiswa

Tipe aktivis gerakan mahasiswa	Sifat dan karakteristik yang menyolok
Tipe aktivis gerakan mahasiswa yang bersikap frontal - radikal dan pragmatis.	Bergerak secara terbuka, massal, gemar isu aktual, spontan, bersikap menentang dan berhadapan langsung dengan penguasa, biasanya berbentuk unjuk rasa/demonstrasi
Tipe aktivis gerakan mahasiswa yang bersikap lunak, tenang dan mudah untuk kompromis	Bergerak secara tidak terang-terangan tidak berbentuk massal, namun berkelompok gemar isu aktual, bersikap lebih menganalok logika dan daya nalar, biasanya berbentuk kelompok studi atau diskusi.

Tabel disusun, dirangkai dan dianalisis dari beberapa sumber.

Sebenarnya kedua tipe aktivis gerakan mahasiswa tersebut, lahir dari rasa ketidakpuasan mahasiswa atas sistem yang ada di perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki temperamen yang cukup tinggi, mereka akan segera tergabung ke dalam tipe yang pertama, dan bagi mereka yang memiliki temperamen yang dapat dikendalikan, mereka akan tergabung kedalam tipe aktivis yang kedua<sup>87)</sup>.

Walaupun demikian diakui ataupun tidak, dampak gerakan mahasiswa terasa di beberapa bidang. Karena mau tidak mau pemerintah harus mengambil langkah-langkah mulai dari peninjauan sektor yang menjadi sasaran protes sampai dengan melawan gerakan mahasiswa dengan alasan verbal mengganggu stabilitas sampai kepada membuat peratu-

86) Achmad Fadilah, *Delik Politik (Sebuah Kajian Penggunaan UU No. 11 PNPS 1963 dan Haatzaai Artikelien Terhadap Gerakan Mahasiswa Indonesia 1974-1974)*, Makalah Ilmiah untuk mengikuti Program Magister (S2) Ilmu Hukum (UNDIP, Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, 1996. Tipe ini cenderung bergumul dengan berbagai konsep yang mereka miliki dan mereka telurkan dari berbagai kelompok diskusi dan dari berbagai pokok bahasan, tetapi untuk merealisasikannya secara langsung terkadang harus menunggu saat yang tepat dengan perhitungan yang cermat pula.

87) *Ibid.* Namun ada kalanya bagi kepentingan yang sama keduanya bergabung menjadi satu serta sama-sama memperjuangkan aspirasi serta pendapat yang dirasakan oleh mereka itu benar. Lihat juga : Ramadhan S., *Gerakan Mahasiswa tahun 80-an, Suara Pembaruan*, 10 Februari 1992, hal. X. Ramadhan S. memberikan tanggapan atas uraian yang dikemukakan oleh Denny J.A dan Rizal Kallarangeng, bahwa pada tahun 1980-an Gerakan Mahasiswa mulai terpecah bentuknya, ada yang terbagi kedalam kelompok diskusi dan adapula yang bergerak dalam aksi massa. Menanggapi hal ini, Ramadhan mengatakan bahwa sebenarnya bentuk yang berbeda seperti itu tidak hanya terjadi di tahun 1980-an, sebab jauh sebelum itu, antara kelompok diskusi dan kelompok aksi sudah ada. Sehingga kurang tepat bila dikatakan bahwa di tahun 1980-an-lah lahir bentuk-bentuk baru Gerakan Mahasiswa.

ran yang membatasi aktivitas mahasiswa<sup>88)</sup>.

Disisi lain karena para mahasiswa karena merasa diawasi secara ketat akhirnya jalannya demonstrasi cenderung menyimpang dari batas yang telah mereka gariskan, sehingga menyebabkan berubahnya demonstrasi menjadi pertentangan keras antara mahasiswa dengan pihak keamanan yang akhirnya menimbulkan bentrokan fisik<sup>89)</sup>.

## B. Haatzaai Artikelen dan gerakan mahasiswa.

### 1. Pasal-pasal Haatzaai Artikelen

Salah satu aturan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pernah muncul kepermukaan dan menimbulkan pro dan kontra dari beberapa ahli hukum maupun ahli dalam bidang sosial lainnya adalah tentang penggunaan pasal-pasal Haatzaai Artikelen dalam KUH Pidana yang kini berlaku, maupun pencantuman kembali pasal-pasal Haatzaai Artikelen dalam Rancangan KUH Pidana Nasional yang baru<sup>90)</sup>.

88) Umar Juono, *Op.Cit.*, hal. 53. Bagi aksi Gerakan Mahasiswa yang dilakukan dalam bentuk demonstrasi dan unjuk rasa, biasanya pada mulanya dilakukan secara tertib dan terarah, tetapi dengan ikut serta pihak keamanan yang kadangkala terlalu keras dalam pelaksanaan tugasnya membuat para mahasiswa merasa diawasi secara ketat, bahkan terlampau ketat, sehingga tak jarang menimbulkan friksi.

89) Tim Redaksi Direktorat Komunikasi dan Program Khusus, *LBH Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 89, bahwa : intervensi pihak militer mulai dirasakan manakala protes mereka lancarkan terasa semakin "nyaring" dan "nakal". Lihat juga : Andi Amrullah, *Demonstrasi, Suara Pembaruan*, Jakarta, 28 Mei 1996. Berbagai demonstrasi yang terjadi memang tidak dapat lepas begitu saja dari latar belakang sejarah dan image terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri, terutama setelah tahun 1965, yaitu angkatan 1966 yang menjadi panutan gerakan massa dalam melahirkan Orde Baru. Tetapi jangan lupa angkatan 66 itu keberadaannya mendapatkan dukungan dari ABRI, karena ABRI (baca: Angkatan Darat) sendiri saat itu memiliki kepentingan politik tersendiri, yaitu kasus penculikan pimpinan Angkatan Darat. Kini bila mahasiswa mau mengadakan gerakan atau demonstrasi, apakah sudah siap mahasiswa tidak mendapat dukungan dari ABRI, tidak mendapatkan dukungan karena kini ABRI berada dalam posisi jalur yang berbeda. Bahkan kini mahasiswa harus siap berhadapan dengan ABRI, karena ABRI sendiri memiliki kepentingan terhadap stabilitas keamanan dan ketahanan yang ada.

90) Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud mendeskripsikan terlebih dahulu tentang keberadaan Haatzaai Artikelen, khususnya Pasal 154 KUH Pidana. Agar dapat memberikan gambaran secara umum dan kita juga memiliki pengetahuan serta persepsi awal, maka dalam kajian ini perlu kiranya penulis memberikan beberapa gambaran dan informasi yang berkaitan dengan Pasal 154 KUH Pidana serta keberadaannya dari beberapa waktu yang telah lampau. Namun keberadaan pasal-pasal Haatzaai Artikelen ini belum disepakati oleh para ahli hukum. Kesepakatan ini belum ada, karena ada beberapa ahli hukum yang mencantumkan pasal-pasal tertentu sebagai pasal yang termasuk kedalam Haatzaai Artikelen, sedangkan pasal lainnya tidak termasuk. Tetapi di sisi lain menurut ahli hukum yang berbeda, adalah sebaliknya atau bahkan pasal-pasal yang mengatur Haatzaai Artikelen adalah lebih dari hanya sekedar pasal-pasal tersebut. Ini terlihat dari beberapa pendapat yang dilontarkan oleh mereka.

Menurut Atmakusumah dan Tribuana Said, Haatzaai Artikelen adalah pasal-pasal penyebar kebencian yang diambil dari bahasa Belanda. Pasal-pasal ini tidak memerlukan pembuktian secara nyata bahwa didalam masyarakat memang telah terjadi akibat-akibat "*rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan*" yang tidak hanya dilontarkan dalam bentuk tulisan atau gambar yang diterbitkan atau dalam bentuk ucapan yang disampaikan di depan umum, melainkan dapat saja hanya didasarkan kepada kepercayaan hakim bahwa hal tersebut memang terjadi. Oleh karena itu Atmakusumah dan Tribuana Said menyebut pasal ini sebagai "*Pasal Karet*", sebab dapat dengan mudah mengundang penafsiran yang sangat subjektif<sup>91)</sup>.

Djoko Prakoso, Soesilo dan Moeljatno menyebutkan bahwa yang termasuk pasal-pasal Haatzaai Artikelen adalah pasal 154 sampai dengan pasal 157 KUH Pidana<sup>92)</sup>. Sedangkan Bachsan Mustafa mengatakan bahwa pasal-pasal Haatzaai Artikelen adalah tercantum dalam pasal 155 sampai dengan pasal 163 KUH Pidana<sup>93)</sup>. Disisi lain Lamintang mengemukakan bahwa Haatzaai Artikelen adalah Pasal 154 dan 156 KUH Pidana<sup>94)</sup>.

91) Atmakusumah, Tribuana Said, dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 4, "Delik Pers", PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 285. Lihat juga: Djoko Prakoso, Op.cit., hal. 90, bahwa Haatzaai Artikelen adalah: Pasal-pasal yang mengatur tentang delik-delik penyebar kebencian, yang maksudnya adalah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk dan masyarakat agar jangan sampai terkena macam-macam hasutan yang bersifat mengacau atau memecah belah dengan jalan berpidato, melalui tulisan atau gambar yang dilakukan dimuka umum maupun melalui surat kabar.

92) Djoko Prakoso, Ibid. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1988 hal. 132. Moeljatno, Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Openbare Orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 8.

93) Bachsan Mustafa, Hukum Pers Pancasila, Alumni, Bandung, 1987, hal. 92.

94) Lamintang, P.A.F, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 1987 hal. 435. "Yang disebut Haatzaai Artikelen itu ialah ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 154 dan pasal 156 KUHP, yang sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code (KUHP India, ketika di jajah Inggris - Penulis), dan yang waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah.

Oemar Seno Adji<sup>95)</sup> dan Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa pada dasarnya pasal-pasal yang mengatur tentang Haatzaai Artikelen adalah pasal 154 sampai dengan pasal 157 KUH Pidana. Akan tetapi mereka membedakannya kedalam dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah sebagai delik pokok, dan tafsiran kedua yang adalah sebagai delik lanjutan.

Senada dengan Oemar Seno Adji, Wirjono Prodjodikoro dan M. Sudradjat Bassar juga mengatakan bahwa "Pasal 157 merupakan lanjutan dari pasal 156, seperti pasal 155 adalah lanjutan dari pasal 154"<sup>96)</sup>.

Atmakusumah dan Tribuana Said menambahkan bahwa Haatzaai Artikelen pada intinya adalah Pasal 154 sampai Pasal 157 KUH Pidana yaitu yang menyangkut masalah ketertiban umum, namun Pasal 'kembarannya' yang menyangkut soal kejahatan terhadap kekuasaan umum ialah Pasal 207 dan Pasal 208<sup>97)</sup>. Namun kalau dilihat kembali maka pasal-

95) Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1990, hal. 38. Lihat juga: Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 28, dikatakan bahwa: "Haatzaai Artikelen, sekarang di Pasal 154-156 KUHPP dengan pasal-pasal peredarannya, yang mempunyai resonansi kurang enak, khususnya bagi kaum pergerakan dan yang hingga sekarang masih hidup di tengah-tengah perundang-undangan kita, tanpa ada perubahan dan pencabutan, oleh Mahkamah Agung pernah diberikan suatu penafsiran baru". Agar lebih jelas Oemar Seno Adji mengemukakan: Dimintakan perhatian bahwa rumusan "dalam bentuk penghinaan" (*in beledigende vorm*) oleh Mahkamah Agung tersebut pernah dirumuskan sebagai akibat dari suatu tafsiran, suatu interpretasi dari perbuatan pidana yang ada dalam "Haatzaai Artikelen", pasal-pasal 154-156 sebagai delik pokoknya, dan pasal 155-157 KUHPP sebagai "verpreidingsdlict"-nya ialah mengeluarkan pernyataan perasaan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan) yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun terhadap golongan rakyat dalam pasal-pasal "haatzaai".

96) Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986, hal. 149. Lihat Juga: M. Sudrajat Bassar, Tindak-tindakan Pidana Tertentu dalam KUH Pidana, Remadja Karja, Bandung, 1986, hal. 18.

97) Atmakusumah dan Tribuana Said, Loc.Cit. Sutawijah Hadi, Tentang Delik-Delik Pers, Seri Pustaka Ilmu, CV Djawa Timur Press, Surabaya, 1960, hal. 33. mengatakan bahwa pasal-pasal tersebut (Haatzaai Artikelen) terdapat di dalam Buku II bab V KUH Pidana, namun selain sebagai Pasal yang mengatur pelanggaran terhadap ketertiban umum, ia juga dapat berfungsi sebagai Pasal-pasal tentang delik Pers, khususnya Pasal 154, 156, 160 dan 171. Melihat pendapat para ahli hukum yang ada, maka dapat kategorikan bahwa yang termasuk kedalam pasal-pasal Haatzaai Artikelen adalah pasal-pasal yang terdapat pada buku II bab V KUH Pidana, yaitu yang mengatur tentang Kejahatan terhadap ketertiban Umum, khususnya pasal 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162 dan pasal 163 KUH Pidana. Pada dasarnya pasal-pasal tersebut memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang sama, yaitu ancaman pidana bagi orang-orang yang melakukan perbuatan atau tindakan baik secara lisan maupun tulisan menyebarkan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan yang dilakukan dimuka umum. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek-nya, yaitu dapat berupa Pemerintahan, Agama, atau Golongan tertentu. Tetapi sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, dan untuk mempersempit pokok bahasan, maka penelitian ini hanya akan dilakukan terhadap pasal 154 KUH Pidana, yang objek-nya adalah Pemerintah.

pasal Haatzaai Artikelen yang berobjekkan pemerintah adalah pasal 154 dan 155 KUH Pidana<sup>98)</sup>.

## 2. Sejarah dan penggunaan Haatzaai Artikelen - Pasal 154 KUH Pidana.

Penelusuran sejarah Haatzaai Artikelen, akan membawa kepada konsep dasar penggunaan pasal-pasal sejenis yang diduga kuat merupakan induk atau sumber pertama dari Haatzaai Artikelen. Penelusuran ini membawa kita ke Inggris, dimana jika diruntut, Haatzaai Artikelen merupakan pasal yang diambil dari Pasal 124 a dan Pasal 153 a British Indian Penal Code, yang berlaku di India, ketika India di jajah Inggris (dikenal juga dengan Law of Sedition)<sup>99)</sup>.

Jika ini diruntut kembali ke belakang dengan penelusuran sejarah yang tepat, maka akan dapat ditemukan bahwa pertama kali peraturan-peraturan Sedition ini dibuat dan diberlakukan di Inggris pada tahun 1275, dengan tujuan untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penghinaan, tindakan-tindakan mencela yang dapat mengakibatkan turunnya kewibawaan Raja. Peraturan inipun sengaja dibuat dan ditegakkan agar kerajaan dapat menjaga stabilitas negara dan mengawasi masyarakatnya dari perbuatan makar, apalagi hingga masyarakat tersebut dapat membentuk sebuah kelompok atau gerakan bawah tanah yang bermaksud melakukan

<sup>98)</sup> M. Sudradjat Bassar, *Ibid.* Lihat juga: Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hal. 91. Akan tetapi sesuai dengan pembatasan masalah dan juga terpegang pada apa yang telah diutarakan oleh Oemar Seno Adji dan Wirjono Pradjodikoro, bahwa pasal 155 merupakan kelanjutan dari pasal 154, atau dengan kata lain pasal 154 adalah sebagai delik pokok, maka penulis membatasi kembali untuk meneliti pasal 154 KUH Pidana, dan penggunaannya terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa.

<sup>99)</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, *Loc.Cit.*, Namun jajahan Inggris pada waktu bukan hanya India, Amerika-pun sempat mengalami masa penjajahan oleh Inggris, atau masa-masa menjadi daerah koloni Inggris. Oleh karenanya, di Amerika-pun diberlakukan Pasal-pasal sejenis dengan tujuan yang sama pula yaitu mencegah terjadinya arus pemberontakan atau gerakan bawah tanah yang dapat menggulingkan kekuasaan pemerintah koloni. Di Amerika Pasal ini dikenal dengan sebutan *Law of Sedition*. Menurut L.B. Curzon dan Baristen dalam *Criminal Hand Book - Seventh Edition*, The M+E Handbook Series, Putman London Publishing, London, 1994, page 305, 'Sedition is a common law offence consisting of the oral or written publication of word with a seditious intention. It is triable only on indictment. Lihat juga tentang Public Discussion and Criticism dan Seditious Intent.

sebuah perbuatan menggulingkan kekuasaan Raja<sup>100</sup>).

The Law of Sedition, digunakan di Inggris oleh Raja Henry ke VI (1422-1461) sebagai sebuah aturan yang mengatur delik politik dan tulisan-tulisan yang dapat menghasut masyarakat<sup>101</sup>).

Pada abad ke-16 Inggris mengeluarkan sebuah produk perundang-undangan yang mengatur tentang komunikasi publik bagi koloninya, yang kemudian jenis peraturan semacam ini menyebar keseluruh dunia melalui penjajahan. Amerika yang pada waktu itu masih berada dalam jajahan Inggris terkena penggunaan peraturan perundangan yang sama, sehingga di Amerika peraturan ini dikenal dengan nama The Law of Sedition<sup>102</sup>).

Di Amerika Serikat sendiri Undang-undang Anti Sedition, disahkan pada tahun 1798. Dijelaskan oleh Soewandi,

100) Sanford H. Kadish (Chief editor), *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 4, The Free Press Division of Mac Millan, Inc, New York, 1983, hal. 1425. 'Seditious libel first entered Anglo-American jurisprudence in a statute enacted by Parliament in 1275. This statute outlawed the telling or publishing of any false news or tales whereby discord or occasion of discord or slander may grow between the king and his people or the great men of the realm. "Violations were punished by the King's Council sitting in the 'starred chamber' (Slander and Sedition Act 1275, 3Edw. 1, c. 34 (England)).

101) *The American People Encyclopedia A Comprehensive Work*, 17, Grolier Incorporated, New York, 1963, page 17-143, 17-144. "Sedition, the act of inciting discontent against the government by speech or writing. Seditious conduct is distinguished from treason in that sedition does not encompass overt acts of violence. Although a government's right to punish citizens guilty of sedition was recognized in English Common Law in the fifteenth century, the definition of what constituted sedition changed markedly during the course of English political liberal thought and political right. Many offenses that were at one time thought to be treasonable were later considered merely seditious. Thus, during the reign of Henry VI, 1422-61, it was treasonous to insult the king, but during the reign of Henry VIII, 1509-47, this was mere sedition. During the sixteenth and seventeenth centuries, prosecution for both political libel and the writing of seditious words was common. Through the use of laws against seditious libel, the government was able to quash efforts for political reform in England, but the exact determination of what was or was not seditious remained unclear, and conviction or acquittal of a person accused often depended upon the whim of judge or jury and the prevailing political climate. After the passage of reform legislation, 1832, prosecutions for sedition in England were infrequent and generally unsuccessful. Although the common law of sedition became actually obsolete, specific offenses continued to be punishable under statutory law.. Untuk Inggris dapat juga dilihat dalam : "Sedition", terdapat dalam *"Encyclopedia Britannica-A New Survey of Universal Knowledge Vol. 20"*, The University of Chicago, Encyclopedia Britannica Inc. Chicago, page.273.

102) Peraturan perundang-undangan ini dibuat dengan maksud agar pemerintah koloni yang berkuasa dapat menatahkan setiap gerakan-gerakan anti penjajahan yang dilakukan para pejuang pribumi. Lukas Suwarso, *Bangkitlah Imajenasimu Indonesiaku*, Mayamuruk, No. 3 tahun VIII, hal. 48. Amerika saat itu masih menjadi daerah koloni Inggris yang dikenal dengan sebutan "Kontinental", hingga saat kemerdekaan Amerika yaitu tanggal 4 Juli 1776, yang ditandai dengan disahkannya Deklarasi Kemerdekaan tersebut oleh Kongres Kontinental Philadelphia. Deklarasi ini sebenarnya adalah hasil karya Thomas Jefferson, di bantu oleh John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, Robert L. Livingstone. (Prayudi Atsaudirjo, Usep Ranuwijaya, Padmo Wahjono, Soerjono Soekanto, Machrup Elrich (Ed.), *Konstitusi Amerika Serikat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 12-14.).

bahwa mengapa di Amerika Serikat diberlakukan Law of Sedition atau yang dikenal dengan Alien and Sedition Act di tahun 1798, karena pada saat itu negara dan pemerintah yang ada memiliki ketakutan-ketakutan tersendiri akan serangan dari negara asing, atau orang-orang asing yang bergerak secara diam-diam, tersembunyi atau untuk menangkal gerakan bawah tanah. Akan tetapi setelah berlangsung beberapa lama, berdasarkan Amandemen Pertama, maka keberadaan Sedition Act dicabut<sup>103</sup>).

Walau demikian, pada waktu perang dunia kesatu, Amerika Serikat kembali memberlakukan Undang-undang Sedition, namun dalam bentuk dan tujuan yang berbeda yaitu 'Espionage Act (tahun 1917)' dan 'Sedition Act (tahun 1918)'. Peraturan ini dibuat dan diberlakukan kembali untuk menindas pemikiran-pemikiran yang pro-Jerman dan aktivis-aktivis bawah tanah yang menggalang kekuatan untuk melakukan pemberontakan dan pengacauan. Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa akibat perang dunia kesatu, memberikan pengaruh yang nyata kepada negara untuk membatasi hak-hak penduduk dan warga-negaranya dalam melahirkan pemikiran-pemikiran yang bebas dan kritis. Pembatasan-pembatasan itu didasarkan pada asumsi bahwa tegaknya kedudukan negara, keamanan umum,

---

103) Soewandi, Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern, PT. Pembangunan, Djakarta, 1957, hal. 53. Di Amerika adanya pernyataan dalam Bill of Rights disebabkan karena pada jaman kolonial Inggris - sampai tahun 1720 - ada peraturan yang mengharuskan lisesnsi untuk mencetak, sedangkan untuk melakukan publikasi dalam bentuk pers harus di sensor terlebih dahulu. Sesuai dengan pernyataan Bill of Rights yang dikutip oleh Soewandi, dan sesuai dengan pasal 1 dari tambahan dan perubahan dari Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi: "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances". Pembatasan dengan menggunakan Undang-undang terjadi di tahun 1798 dengan Alien and Sedition Act sehubungan dengan adanya ancaman bahaya bagi negara dari orang-orang asing atau pemberontakan yang diorganisir atau terorganisir secara diam-diam. Sesudah keadaan menjadi mapan dan tenang, maka undang-undang ini dicabut, namun ketika terjadi Perang Dunia ke I muncul undang-undang Espionage Act (1917) dan Sedition Act (1918) untuk menindas pikiran-pikiran pro-Jerman dan aktivis gerakan bawah tanah yang mengorganisir pemberontakan. Pembatasan-pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan negara, keamanan umum dan kesusilaan harus dianggap lebih utama ketimbang hak perseorangan atas kebebasan dalam melahirkan pikirannya, apabila ternyata kebebasannya itu mengandung bahaya.

ketertiban umum dan kesusilaan, adalah harus dianggap lebih penting daripada hak-hak perseorangan atas kebebasan dalam melahirkan pola pemikiran yang tajam dan kritis, apabila ternyata pola pemikiran yang tajam dan kritis itu mengandung bahaya, khususnya mengancam kepentingan kelangsungan negara dalam menjalankan fungsinya<sup>104)</sup>. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary, Law of Seditious lebih dikenal dengan sebutan "Alien and Sedition Laws"<sup>105)</sup>

Penjelasan yang rinci dan bersifat melengkapi uraian The Law of Sedition tersebut diatas, bahwa terdapat 4 buah peraturan perundangan yang mengatur tentang orang asing dan sedition dapat juga dilihat dalam Alien and Sedition Acts dalam The American People Encyclopedia A Comprehensive Reference work<sup>106)</sup>.

104) Ibid, hal. 53-54., lihat juga: American People Encyclopedia A Comprehensive Work, Loc.Cit Lihat juga : "Sedition" dalam "Encyclopedia Americana, International Edition, Vol 24", Americana Corporation, International Headquarters 575 Lexington Avenue, New York, New York 10022, 1976, page. 514. Agar lebih jelasnya, latar belakang sejarah, mengapa Amerika Serikat bertindak demikian, dapat dilihat dalam uraian tentang Sedition Act, dalam The American People Encyclopedia A Comprehensive Reference work: "In the United States, The first antisedition legislation was the Sedition Act of 1798, which laid heavy penalties upon encouraging insurrection or other disorder, and upon publishing "false and malicious writing" against the government. The measure was the result of a threat of war with France and a consequent hostility toward aliens. Although the Constitutionality of the act was questioned, it was never passed upon by the Supreme Court, and after Jefferson became President, 1801, the law expired. In 1918, a sedition act was passed by Congress as an amendment to the Espionage Act of 1917. It provided for severe penalties for persons interfering with the war effort or using "disloyal, profane, scurrilous, or abusive language," about the government. The law led to many abuses by enforcement agencies and it was repealed, 1921. Although laws were later passed against specific acts of a seditious nature (the Alien Registration Act of 1940, for example), no broad legislation was enacted covering sedition. In the United States, the common law crime of sedition had all but been abolished by the free-speech guarantees of federal and state constitutions.

105) Black's Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn West Publishing C.O, 1979, page 66. Acts of congress of July 6 and July 14 1798, which made it a criminal offense to utter or publish, any false, scandalous and malicious writing against the federal government with intent to defame it, or bring it into contempt or disrepute or to excite hatred of people or stir up sedition against it. These shore-lived acts tightened recidency requirement for citizenship granted presidential power to deport and jail aliens, and provided penalties for seditious writing or speech critical of the government.

106) The American People Encyclopedia A Comprehensive Work, 17, Op.Cit, page 1-670,1-671 "Four acts passed by the U.S Congress and Signed by President Jhon Adams in June and July, 1798. (1) The first of these, the naturalization Act of June 18, 1798, raised the period of residence in the United States from 5 to 14 years in the case of alien immigrants seeking citizenship. This act was repealed in 1802. (2) The Alien Act of June 25, 1798, empowered the president to order out of the country all such aliens as he should judge dangerous to the peace and safety of the United States; to remove forcibly any aliens who might disregard his order, or to cause their imprisonment. This act expired in the 1800. (3) The Alien enemies Act of July 6, 1798, empowered the president, in cases of war to remove or detain as alien enemies all male subjects of a hostile nation. This act also expired in 1800. (4) The Sedition Act of July 14, 1798, provided for the punishment by fine and imprisonment of any persons conspiring against any measure of the government of the United States, impeding the operation of any U.S law, or uttering any malicious statement against U.S. officials. This act expired in 1801. The Alien and Sedition Acts were passed at



Selain sebagai sebuah peraturan perundangan yang mengatur tentang kewarganegaraan asing dan perlakuan sedition, maka The Law of Sedition juga dianggap dapat membahayakan kebebasan berbicara juga kebebasan pers.

Wishnu Basuki<sup>107)</sup>, yang mengutip dari Paul Fisher dalam 'Freedom of the Press' mengatakan bahwa Sedition Act (1798) adalah undang-undang pertama yang membatasi kebebasan pers di Amerika Serikat. Peraturan ini sempat dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tahun 1801, namun ketika Amerika Serikat memasuki perang dunia ke-satu dibuatlah 'Espionage Act' (1917)<sup>108)</sup> untuk mencegah perbuatan sabotase dan kegiatan komunikasi tentang rahasia militer dengan musuh<sup>109)</sup>.

---

the time when war with France seemed imminent, and when the federalist administration was being denounced in the Republican press. Under the Sedition Act several leading Republican editors were fined and imprisoned. Popular resentment was bitter and it led to the Virginia Resolutions and Kentucky Resolutions. The Acts contributed to the defeat and downfall of the Federalist. Lihat juga: Grolier Encyclopedia of Knowledge 1, Grolier Inc. "Alien and Sedition Acts" Corporation, Danbury, Connecticut, MCMXCI, page 270. Lihat juga: Encyclopedia Americana International Edition, Vol. 1, "Alien and Sedition Acts" page. 579.

<sup>107)</sup> Wishnu Basuki, Pers dan Penguasa-Pembocoran Pentagon Papers dan Pengungkapan oleh New York Times, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 64. Peraturan ini melarang tulisan yang tidak benar, keji dan jahat tentang pemerintah dan para pejabatnya. Undang-undang ini tidak diperbaharui dan tidak berlaku lagi sejak tahun 1801. Di Amerika sendiri banyak orang yang terkena Law of Sedition dalam hal kebebasan berbicara dan menulis, oleh karena itulah keberadaannya kurang begitu disukai oleh para jurnalis.

<sup>108)</sup> Grolier Encyclopedia of Knowledge 16, Grolier in Corporation Danbury, Connecticut, MCMXCI, page. 385. Untuk "Smith Act (28 June 1940)" dapat dilihat dalam Grolier Encyclopedia of Knowledge 17, Grolier in Corporation Danbury, Connecticut, MCMXCI, page. 131. atau "Blak's Law" sebagai: "Federal Law which punishes, among other activities, the advocacy of the overthrow of the government by force or violence. An anti Sedition Law. 18 USCA 2385" page. 1246. See also: The Columbia Encyclopedia Vol-I-A-Count, Edited by William Bridgwater and Seymour Kutrtz, Parent's Magazines Cultural Institute Advision of Parent's Magazine enterprises Inc, By Arrangement with Columbia University Pers New York and London, Third Edition 1963, page 51. Dalam Grolier Encyclopedia of Knowledge 16 disebut-kan: Sedition is the crime of advocating by word or deed the overthrow of the government. Laws against sedition have been viewed as potentially dangerous to Freedom of Speech. The 1st Amendement to the U.S Constitution is generally regarded as a protection against sedition laws. Nevertheless, the Congress has passed several such laws, the first being the Alien and Sedition Acts of 1798. Two sedition acts were passed during World War 1, and the Smith Act of 1940 was aimed specifically at communist and other left-wingers were convicted under the law but the U.S. Supreme Court ruled many many of those convictions unconstitutional, and the government abandoned prosecutions under the Smith Act.

<sup>109)</sup> The Columbia Encyclopedia Vol-I-A-Count, Ibid., see also: John C. Miller "Crisis in Freedom" (1951), and James Morton Smith "Freedom's Fetters" (1956). Untuk "First Amendement yang berkaitan dengan Smith Act, dapat dilihat dalam "Smith Act" Encyclopedia Americana, International Edition Vol 25, Op.Cit., page. 65. Untuk "Freedom of Speech an The Press" yang berkaitan dengan "Seditious Libel" dapat dilihat dalam "Press, Freedom of The" Encyclopedia Americana International Edition, Vol 22, page. 5541. Dalam The Columbia Encyclopedia disebutkan bahwa: President John Adams made no use of the alien acts. Most controversial, however, was the sedition acts devised to silence Republican criticism of the Federalists. Its broad proscriptio of spoken or written criticism of the government, the Congress, or the president virtually nullified the First Amendement freedoms of speech and the press. Prominent Jeffersonians, most of them journalist, such as John Daly Burk, James T.

Dengan uraian diatas, maka kita dapat melihat bahwa dari sumber aslinya, pasal tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang berseberangan jalan dengan penguasa setempat, tetapi juga dapat digunakan kepada orang-orang yang berfikiran kritis, orang-orang yang menulis secara kritis di mass media (*journalism*) dan juga terhadap kebebasan berbicara (*freedom of speech*)<sup>110</sup>).

Negara jajahan Inggris pada masa itu tidak hanya Amerika saja, India-pun mengalami nasib yang serupa. Bahkan peraturan yang serupa-pun diberlakukan di sana, hanya saja di India dikenal dengan nama Pasal 124 a British Indian Penal Code<sup>111</sup>). Indonesia yang pada masa itu menjadi daerah koloni dari Belanda, juga dikenakan peraturan ini, yang hingga kini dikenal dengan nama Haatzaai Artikelen<sup>112</sup>).

Menurut Sutamijah Hadi, pasal-pasal Haatzaai Artikelen tidak berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda (dalam bukunya Sutamijah Hadi menyebut KUHP

---

Callender, Thomas Cooper, William Duane (1760-1835), and Matthew Lyon were tried, and some were convicted, in sedition proceedings. The Alien and Sedition Acts provoked the Kentucky and Virginia Resolutions and did much to foster Republican Victory in the election of 1800.

110) Atmakusumah, Trikuana Said, Loc.Cit., Diluar negeri kasus-kasus delik pers yang kebanyakan menyangkut pencemaran nama baik, tuntutan di pengadilan biasanya bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi. Tetapi di Inggris, Republik Federal Jerman, Malaysia dan Singapura dari waktu ke waktu terjadi penuntutan pidana terhadap wartawan dan surat kabar dengan tuduhan melanggar undang-undang rahasia negara atau keamanan. Dalam banyak kasus yang demikian biasanya wartawan yang dituntut akan mengalami dan menjalani hukuman penjara.

111) Lamintang P.A.F, Djisman Samosir C. Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 109. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1988, hal. 132. "124 a British Indian Penal Code: Pasal 124 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana India pada masa penjajahan Inggris", Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid 4, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 285.

112) Lamintang P.A.F, Loc.Cit., Lamintang mengatakan: Yang disebut 'Haatzaai Artikelen' itu adalah ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 156 KUHP, yang sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code, dan yang waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Lihat juga: Demar Seno Adji, Asas-asas Tata Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Pidana, Dalam Mimbar Penerangan, Diterbitkan oleh Departemen Penerangan, Tahun XIV No. 2-1963, hal. 34, dikatakan: Sejarah tersebut jelas menunjukkan bahwa Pasal 154 KUHP ini khususnya dilahirkan untuk membendung dan mematahkan gerakan dari Douwes Dekker (Dr. Setya Budi) Dkk. Jelaslah ia dari pandangan yang dikemukakan oleh Direktur Justitie dahulu maupun dari Algemene Sekretaris, Gerakan Douwes Dekker dari Indische Partij dahulu hendak di hadapi antara lain dengan Pasal 154 KUHP, yang bersumber pada pasal 124 A British Indian Penal Code.

Belanda dengan 'Swb'), melainkan sudah ada sebelum adanya KUHP Belanda ('Swb') dan mengambil dari British Indian Penal Code (dalam bukunya Sutamijah Hadi menyebutnya dengan 'Penal Code British India')<sup>113</sup>).

Belanda juga mengambil rumusan yang serupa dari pasal 124 a British Indian Code Penal sebelum diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie* pada tahun 1915<sup>114</sup>).

Jonkers mengatakan bahwa walaupun antara Pasal 153 bis dan Pasal 154 KUH Pidana itu tidaklah sama, tetapi keduanya memiliki maksud yang sama yaitu sebagai peraturan anti revolusi yang dapat mengoyahkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga pasal ini digunakan untuk menindas propaganda revolusioner yang efektif. Akan tetapi dalam praktek penerapan hukumnya, tidak hanya para aktivis revolusioner saja yang terkena pasal ini, tetapi juga menjerat kegiatan pers<sup>115</sup>).

Peraturan ini diberlakukan dengan dasar pemikiran

113) Sutamijah Hadi, Loc.Cit., Semula redaksinya berbunyi: "Dengan Sengaja membangkitkan atau memperkuat perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan ...". Perumusan ini adalah perumusan materiil, karena yang dilarang ialah menimbulkan keadaan tertentu, yaitu dibangkitkannya perasaan permusuhan, kebencian dsb. Hal yang demikian ini agak sukar untuk dibuktikan, oleh karena itulah maka kemudian diadakan perubahan redaksional menjadi perumusan delik yang formil.

114) Demar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, hal. 38. Lihat Juga: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 - 7 - 1976 Nomor 71K/Kr/1973, khususnya dalam "mengenai keberatan kesatu". Perbuatan "mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan" dalam pasal 154 dan 156 KUH Pidana diartikan oleh Mahkamah Agung sebagai pengeluaran pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan dalam bentuk penghinaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Titel XVI Buku Kedua KUH Pidana. pengertian tersebut sebagai pengeluaran pernyataan dalam bentuk penghinaan tidak lagi memperkenankan suatu penafsiran secara luas dan tidak lagi menyinggung secara jauh kebebasan materiil untuk menyatakan pendapat (R. Soenarto Soerodibroto, KUH dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad, Rajawali Pers, Jakarta, 1991). Menurut Demar Seno Adji mengemukakan bahwa: Pasal-pasal kontroversial tersebut (pasal 154 dan 156 KUH) tersebut yang ditransfantasikan dari British Indonesia (mungkin maksudnya "Indian" bukan "Indonesia") Penal Code (pasal 124 A dan 154 A). Kata-kata tersebut baik dalam teksnya maupun dalam penjelasannya memuat kata-kata "to bring into hatred, ridicule or contempt, feelings of enmity" sehingga ia dalam teks Belanda yang dicangkubkan dalam kata-kata "vijndschap, haat of minachting" dan sekarang termuat dalam kata-kata "permusuhan, benci atau merendahkan".

115) J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 50. Pada masa yang lalu Pasal 153 Bis/Ter dimaksudkan sebagai peraturan anti revolusi yang dapat menggoyahkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda, sehingga penambahan Pasal tersebut kedalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* melalui S.1926-139, 140 merupakan alat menindas propaganda revolusioner yang efektif. Peraturan anti revolusi dalam pasal 153 Bis/Ter sudah dihapuskan oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 yang tercantum dalam Pasal VIII sub 32 dan dihapuskan oleh Pemerintah Federal Belanda dengan S. 1948-169.

bahwa peraturan tersebut sangat tepat bila diberlakukan di daerah jajahan dengan maksud agar, pemerintah kolonial pada masa itu didukung oleh suatu landasan hukum yang kuat untuk bertindak dan mematahkan setiap gerakan anti penjajahan yang dilakukan oleh kaum pribumi<sup>116)</sup>.

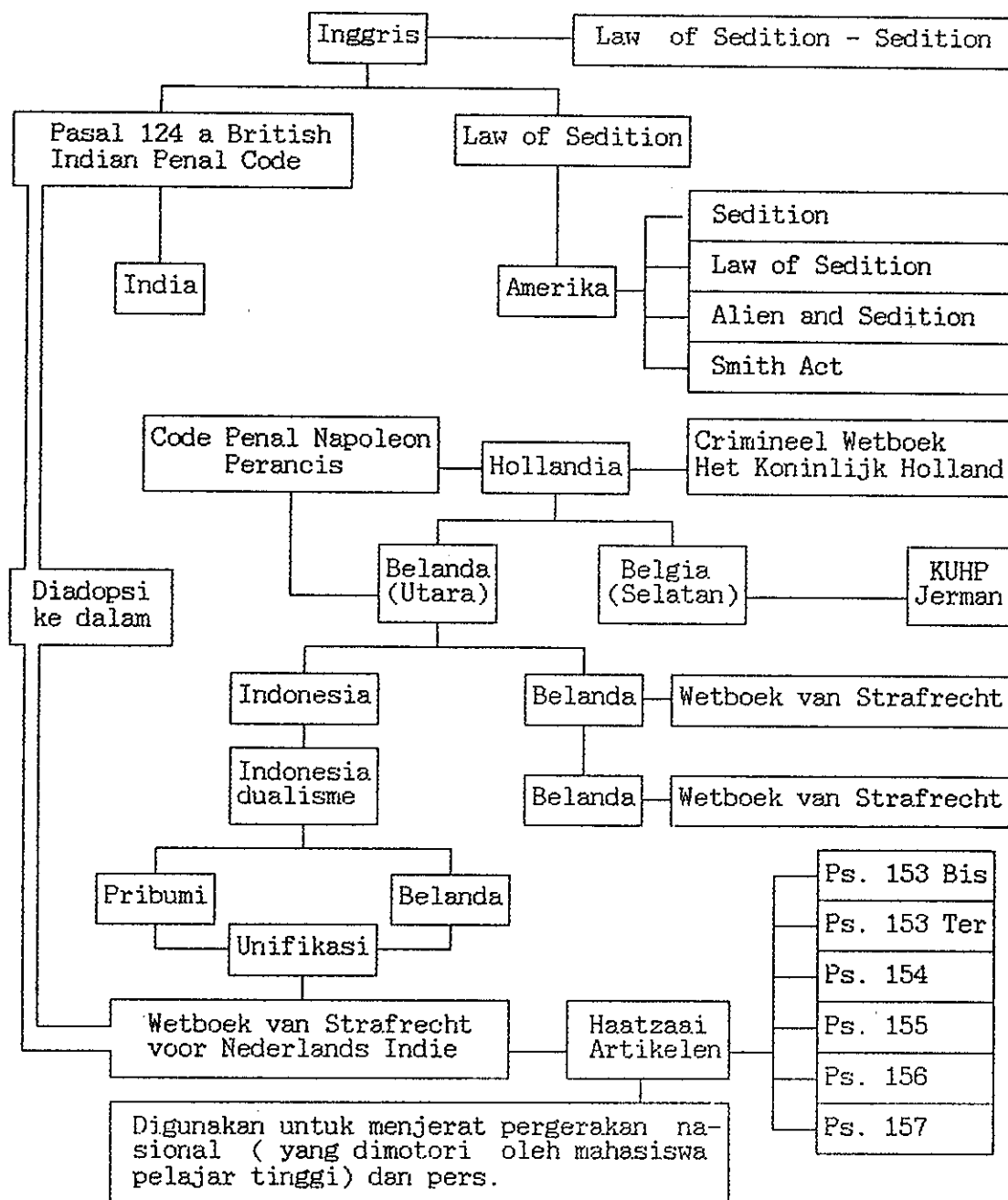
Kesaksian sejarah telah menunjukkan bahwa *Haatzaai Artikelen*, selalu digunakan oleh penguasa dalam peristiwa-peristiwa tertentu, manakala terjadi sebuah perbuatan yang dilakukan oleh para 'strategi elite' mengkritik penguasa. Pola pengekangan ini merupakan taktik politik yang menggunakan tangan hukum untuk mengekang kebebasan berpendapat. Seperti halnya pada zaman pergerakan kemerdekaan, pasal ini diancamkan kepada tokoh-tokoh pergerakan nasional, sedangkan setelah Indonesia merdeka, baik pada masa Orde Baru maupun pada masa Orde Lama pasal tersebut masih saja digunakan kepada pers, aktivis gerakan mahasiswa maupun kelompok cendekiawan yang banyak melakukan kritik terhadap penguasa. Dalam konteks yang demikian, apa yang pernah dikemukakan oleh *Maurice Duverger* bahwa: "Hukum adalah salah satu dari instrumen dasar di dalam pelaksanaan kekuasaan politik" ada benarnya<sup>117)</sup>.

---

116) *Dwitadi Y, Dwi Sudarlan Sy, Krisis Wibawa, Hayamwuruk*, No. 3 tahun VIII, 1993, hal. 41. Lukas Suwarso mengatakan bahwa: Secara filosofis pembuatannya untuk mengatur hubungan antara tuan penjajah dengan rakyat yang dijajah, penjajah ingin menguasai segala potensi negara jajahan maka mereka membuat hukum yang mampu melindungi dan menguntungkan mereka. Lihat juga: *Artidjo Alkostar, Pembangunan Hukum Nasional: Studi Introspeksi Terhadap Rumusan Delik Yang Tidak Beresensi Keadilan*, dalam *Artidjo Alkostar, M. Sholeh Amin (Editor), Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Pers dan LBH Yogyakarta, Rajawali Jakarta, 1986, hal. 203-207. Rumusan delik *Haatzaai Artikelen* yang termuat dalam Pasal 154 sampai 157 KUHPidana, sebab pada dasarnya diambil dari pasal 124 A *British Indian Penal Code*. Pasal tersebut sebenarnya telah ditolak di negeri Belanda karena hanya cocok untuk diterapkan di negeri jajahan yang masih diberlakukan hubungan sosial yang kolonialis. Dengan demikian apabila Pasal 154-157 KUHPidana masih dipertahankan eksistensinya, maka baik disadari maupun tidak, para pembentuk undang-undang di negara ini masih menempatkan pola hubungan masyarakat-bangsa pada struktur yang beretos kolonial.

117) *Ibid*, Lihat juga: *Maurice Duverger* (Terjemahan *Daniel Dhakidae*), *Sosiologi Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hal. 115. Secara teoritis, aliran instrumentalisme dalam ilmu hukum seperti yang ditunjukkan oleh *Maurice Duverger* tersebut, masih mengundang banyak perbantahan yang konotasinya ialah adanya perbedaan konseptual tentang apa yang disebut hukum dalam arti yang sebenarnya. Dalam arti bahwa timbulnya mazhab atau aliran hukum adalah hasil konsekuensi dari adanya perbedaan pandangan tersebut.

Bagan 2. Skema akar sejarah Haatzaai Artikelen yang diambil dari Pasal 124 a British Indian Penal Code



Bagan disusun dan dirangkai dari beberapa sumber.

Walaupun pasal-pasal Haatzaai Artikelen ini diilhami dari hukum *anglo saxon* dan diberlakukan di Indonesia (pada waktu itu dinamakan Hindia Belanda), namun pasal-pasal yang serupa tidak ada dalam *Wetboek van Stra-*

*frecht*<sup>118)</sup>.

Lebih lanjut Wina Armada juga mengatakan bahwa perumusan pasal-pasal ini sangatlah luas, karet dan elastis, ia dapat menjangka semua perbuatan tergantung pada pola interpretasi seseorang. Seharusnya pasal-pasal yang kontroversial ini, khususnya Haatzaai Artikelen, sudah tidak dipergunakan lagi dalam kondisi alam Indonesia yang merdeka, tetapi anehnya pasal-pasal ini masih tercantum dan bahkan semakin lentur penggunaannya. Jika kita mau melihat konsekuensi hukumnya, maka apabila sebuah pasal, khususnya Haatzaai Artikelen, sudah dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan, filosofis dan sosiologisnya, maka dari segi yuridisnya-pun, seharusnya dipertimbangkan untuk tidak lagi digunakan. Apabila masih tetap digunakan, maka konsekuensi yuridisnya putusan yang berdasarkan pada penggunaan pasal tersebut adalah *batal demi hukum*<sup>119)</sup>.

Jika dilihat dalam hukum *anglo saxon*, maka pasal-pasal tersebut akan terlihat dalam bentuk kata-kata yang mengandung "*enmity, hatred, ridicula of contemp*" yang termasuk dalam kata-kata "*libel*"<sup>120)</sup>.

Namun demikian, apakah di Belanda sendiri pasal-pasal ini ada dan berlaku? Loebby Loqman mengatakan bahwa di Belanda pasal-pasal tentang Haatzaai Artikelen, atau

---

118) M. Sudradjat Bassar, *Loc. Cit.*, Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers Indonesia*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 60. M. Sudradjat Bassar dan Wina Armada mengatakan bahwa: Pemerintah Belanda pada waktu itu beranggapan pasal-pasal ini hanya khusus diberlakukan di daerah koloni, tetapi tidak dianggap perlu diterapkan di daerahnya sendiri yaitu Belanda.

119) Wina Armada, *Ibid*, hal. 60-61.

120) Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, hal. 38. Oemar Seno Adji mengatakan: *Libel* ("Penghinaan") yang sering dirumuskan bagai suatu pernyataan, "*Which expres a man to hatred ridicule or contemp*". Ia pernah dikemukakan oleh sarjana-sarjana Amerika seperti Zechariah Chafee, James Kent dan di Inggris Jean Joseph Dean (dalam bukunya *Hatred, ridicule or contemp*"), sewaktu ia menguraikan tentang "*Libel*" (identik dengan pencemaran tertulis dan penghinaan ringan). Lihat juga "*Officiele Bescheiden welke hebben geleid tot het Koninklijk Besluit van 7 Januari 1919* (Stb. 205).

pasal-pasal penyebar kebencian, khususnya Pasal 154 dan 156 KUH Pidana tidak mempunyai padanannya yang serupa, sebab ia dapat menjadi senjata bagi penguasa terhadap adanya perbedaan pendapat dalam hak mengeluarkan pendapat. Sehingga pasal-pasal tersebut memang merupakan pasal kolonial, yang dikhususkan untuk mengatur dan membatasi kaum pergerakan di Hindia Belanda<sup>121</sup>).

Dalam lembaran sejarah Belanda, memang pernah terjadi usaha untuk memasukkan Haatzaai Artikelen, kedalam *Wetboek van strafrecht. Commissie voor Privat en Strafrecht* pernah menyarankan kepada Menteri Kehakiman Belanda untuk memasukkan "in de geest van de Indische Haatzaai Artikelen" atau beberapa pasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang disebut Haatzaai Artikelen kedalam *Wetboek van Strafrecht*. Namun rupanya usulan tersebut ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda<sup>122</sup>).

Penolakan untuk memasukkan pasal Haatzaai Artikelen kedalam *Wetboek van Strafrecht* oleh Menteri Kehakiman Belanda dilandasi oleh dua alasan:

1. Jika Haatzaai Artikelen dimasukkan kedalam *Wetboek van Strafrecht*, maka itu sama halnya dengan akan menyinggung perasaan masyarakat Belanda dan akan menghilangkan

---

<sup>121</sup>) Loebby Logman, Delik Politik. Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hal. 79-80. Menurut Loebby Logman, Pasal-pasal tersebut dianggap sebagai pasal-pasal yang kolonial sifatnya karena pasal tersebut dibuat khusus untuk Hindia Belanda dengan maksud untuk menghambat gerakan kebangsaan yang terjadi pada tahun 1930-an.

<sup>122</sup>) Demar Sano Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, hal. 38. Dikatakan oleh Menteri Kehakiman Belanda: *De ondergetekende zou deze bepalingen, welke op zich zelf te verklaren zijn door de behoffte van een koloniale samenleving zeker niet voor het Rijk in Europa willen overnemen*. Sifat non-demokratik ini dijelaskan oleh pengakuan Menteri Kehakiman Belanda sewaktu ia menolak usul untuk mencantumkan Haatzaai Artikelen tersebut dalam M.v.S Belanda. Ia menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang demikian tidak dapat dioper dan diterapkan begitu saja didalam Kerajaan Belanda sendiri. Penolakan untuk mencantumkan pasal-pasal semacam Haatzaai Artikelen hendak dibenarkan dan diargumentasikan dengan pernyataan bahwa pasal-pasal tersebut mempunyai tujuan yang lebih luas sedangkan lapangan yang termuat dalam peraturan tersebut tidak saja mengenai bentuk dari bentuk pernyataan tertentu melainkan juga melanggar secara jauh kebebasan materiel untuk menyatakan pendapat. Menurut Menteri Kehakiman Belanda, penafsiran kata "permusuhan, kebencian atau merendahkan" dapat dilakukan secara luas.

kan kebebasan material untuk berpendapat<sup>123</sup>).

2. Kemudian bahwa kata-kata "*vijandschap, haat* atau *minachting*", atau kata-kata permusuhan, kebencian atau merendahkan yang terdapat dalam rumusan-rumusan pasal 154 dan pasal 156 *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* itu dapat ditafsirkan secara luas, bahkan dapat ditafsirkan lebih luas dari penghinaan dalam kata aslinya<sup>124</sup>).

Jika di Belanda-pun menolak diberlakukannya pasal-pasal ini, dan *East Punjab High Court* (Pengadilan Tinggi Punjab Timur) serta *Supreme Court* (Mahkamah Agung) juga menolak keberadaan pasal yang kontroversial dan inconstitutional ini<sup>125</sup>). Hal lain yang menarik untuk ditelaah ialah perubahan rumusan pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* dari rumusan *delik materiil* menjadi rumusan *delik formil*. Dahulu ketika pasal ini pertama kali dikenal, rumusan yang dipergunakan dalam *British Indian Penal Code* adalah rumusan *delik materiil*, akan tetapi ketika pasal ini ditransfer kedalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, maka rumusannya berubah menjadi rumusan

---

<sup>123</sup>) *Lawintang, P.A.F. Djisman Samosir, Loc.cit.* (*tast daarnevens vergaand de materiale vrijheid van meningsuiting aan*). Ditambahkan pula olehnya bahwa sebenarnya pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* hanya cocok bagi masyarakat kolonial atau jajahan, ini menunjukkan bahwa latar belakang serta dasar pemikiran diterapkannya *Haatzaai Artikelen* di Indonesia tidak lain adalah untuk mengekang rakyat jajahannya agar tidak dapat melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman penguasa kolonial.

<sup>124</sup>) *Lawintang P.A.F., Djisman Samosir, Ibid.* (*Vijndschap, haat of minachting laten bovendien een heel ruime interpretatie toe*). Menteri Kehakiman Belanda mengatakan bahwa pasal tersebut selain dapat mengekang kebebasan berpendapat secara materiil, juga dapat ditafsirkan secara luas oleh pihak yang berkuasa.

<sup>125</sup>) *Demar Seno Adji, Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan di Masa Yang Akan Datang*, hal. 5. *Demar Seno Adji* menambahkan bahwa: pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* ini yang belum dicabut secara formil ini tidak semestinya diperkenankan kelangsungan hidupnya ditengah-tengah tata hukum kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Lihat juga: *Demar Seno Adji, Asas-asas tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana, Loc.cit.*, dikatakan: Pencantuman Pasal 154 KUHPP diilhami dari *British Indian Penal Code* Pasal 124 A, yang setelah diberlakukannya Undang-Undang dasar India Pasal 124 A dinyatakan Inkonstitusional oleh karena ia dianggap tidak termasuk *limitation clause* yang berjumlah empat yaitu: *defamation, contempt of court, decency or morality and security of the state* terhadap hak setiap warga untuk berbicara dan menyatakan pendapat.



*delik formil*<sup>126)</sup>.

Hal lain yang juga melatar belakangi mengapa rumusan delik Haatzaai Artikelen itu berubah menjadi delik formil adalah, timbulnya kesulitan untuk membuktikan, jika rumusan tersebut merupakan rumusan delik materiil. Dengan jenis delik formil, maka jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa di dalam masyarakat sudah terjadi atau sudah timbul perasaan permusuhan, kebencian dan menghina terhadap objek yang dituju. Berbeda jika delik tersebut masih menggunakan rumusan delik materiil, dimana jaksa penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu bahwa apakah dalam masyarakat tersebut sudah terjadi dampak atau akibat dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau diancam dengan pidana<sup>127)</sup>.

Perubahan delik ini menurut Wina Armada, tidaklah semata-mata masalah pembuktian delik yang cenderung menyulitkan, baik dalam hal pembuktian secara materiil, maupun juga dalam hal pembiayaan pemeriksaan, keahlian

---

126) Sutawijah Hadi, *Loc.Cit.* Djoko Prakoso mengutarakan bahwa: Pada mulanya redaksi pasal-pasal tersebut berbunyi : "Dengan sengaja membangkitkan atau memperkuat perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan ... dan seterusnya.", Rumusan ini dinamakan dengan rumusan delik materiil karena yang dilarang adalah menimbulkan keadaan atau akibat tertentu yaitu bangkitnya perasaan permusuhan dan sejenisnya. Jika rumusan delik ini masih menggunakan rumusan delik materiil, maka akan sangat sukar untuk dapat membuktikan bahwa apakah perasaan permusuhan dan kebencian itu timbul. Oleh karena itulah pembentuk undang-undang merubahnya menjadi delik formil yang bernada suatu penghinaan dan sejenisnya yang dilakukan dimuka umum. Lihat juga: Moeljatno, *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Openbare Orde)*, *Loc.Cit.* Menurut Moeljatno: Pada mulanya pasal-pasal Haatzaai Artikelen dirumuskan secara materiil, jadi yang dilarang adalah timbulnya perasaan kebencian dan sejenisnya terhadap objek yang dituju. Perbuatannya sendiri tidak dilarang, tetapi akibat dari perbuatan itulah yang dapat diancam dengan pidana. Tetapi jika rumusan delik Haatzaai Artikelen itu dirubah menjadi rumusan delik formil, maka delik sudah dianggap selesai jika pernyataan atau perbuatan yang dilarang tersebut sudah dilakukan, baik yang berupa tulisan, lukisan maupun ucapan. Apakah akibat yang negatif timbul atau tidak itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang diancam pidana adalah perbuatan yang dilakukan itu jelas-jelas dilarang, tanpa menunggu hasil atau akibatnya.

127) Lukas Smarso, *Op.Cit.*, hal. 49. Atmakusumah, Tribuana Said, *Loc.Cit.*. Wina Armada melihat bahwa perubahan rumusan Haatzaai Artikelen dari delik materiil menjadi delik Formil, adalah karena adanya kesulitan dalam hal pembuktian bila terjadinya delik yang dirumuskan. Dalam delik materiil, maka yang dilarang adalah 'akibat' yang ditimbulkannya sedangkan dalam delik formil, maka 'perbuatannya-lah' yang dilarang. Menurut Oemar Seno Adji, dalam *Asas-asas tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana*, *Loc.cit.*, bahwa secara sejarah perubahan rumusan delik materiil menjadi delik formil adalah selain dari segi pembuktiannya yang relatif lebih mudah, maka perumusannya menjadi delik formil adalah semata-mata menunjukkan bahwa delik tersebut memang sengaja diciptakan untuk menghadapi gerakan kebangsaan Indonesia.

yang cukup, tetapi juga menjurus pada pola kemudahan dalam mengambil sebuah tindakan. Orang tidak perlu menunggu setelah ada akibat, tetapi mereka dapat segera bergerak begitu ada perbuatan. Dan faktor inilah yang sebenarnya melatar belakangi dengan kuat, mengapa delik ini berubah rumusannya dari delik materil menuju delik formil<sup>128</sup>).

Lebih lanjut Sutamijah Hadi juga mengupas latar belakang mengapa pasal-pasal tersebut diambil dari *British Indian Penal Code* dan dipasang pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, ialah dengan maksud agar pemerintahan di zaman Hindia Belanda yaitu pemerintahan kolonial yang ada, dapat melakukan perbuatan penindakan terhadap gerakan-gerakan nasionalis yang ada tetapi dengan dasar hukum yang legal. Dalam pasal ini semua bentuk kritik yang ada dipandang sebagai sebuah bentuk penyerangan terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang ada<sup>129</sup>). Namun pendapat ini ditentang oleh Moeljatno bahwa selama kritik itu dilakukan dengan cara yang baik, tidak melukai perasaan, dan *zakelijk* serta bersifat membangun, maka arti 'penghinaannya' dapat disingkirkan<sup>130</sup>).

---

128) Wina Arwada, *Loc.Cit.*. Lihat juga: Sutamijah Hadi, *Op.cit.*, hal. 34. Sutamijah Hadi mengatakan bahwa kata-kata 'menyatakan penghinaan' yang terdapat dalam Pasal 154 KUHP Pidana dapat menimbulkan persoalan. Sebab apakah ia mengandung pengertian tidak diperbolehkannya kritik yang 'zakelijk' dengan maksud untuk meluruskan hal-hal yang dianggap kurang benar, ataukah memang dapat diajukan secara 'noodzakelijk' ditambah dengan fakta-fakta yang menunjukkan adanya kelemahan atau kekurangan dari pemerintah yang ada. Dan dengan perubahan delik ini, akan makin memudahkan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam melakukan tindakan penangkapan, penekanan terhadap kaum pergerakan nasional yang ada pada masa itu.

129) *Ibid.* Mengutip pemikiran Simons, maka Sutamijah Hadi menetapkan bahwa pada saat itu bentuk kritik yang bagaimana yang dapat dijaring, adalah semua bentuk kritik, baik kritik dalam arti formil maupun kritik dalam bentuk yang materil.

130) Soesilo, *Loc.Cit.* Ditegaskan kembali oleh Soesilo, bahwa: Jika Haatzaai Artikelén masih menggunakan delik materil, maka yang dilarang adalah akibat dari perbuatannya, dan ini akan mengalami kesulitan dalam pembuktian. Kemudian dengan dirubahnya Haatzaai Artikelén menjadi delik formil, maka yang diancam dengan pidana adalah perbuatannya, tanpa menunggu hasil atau akibat dari perbuatan tersebut, dan ini akan lebih mudah karena tidak perlu dibuktikan apakah perbuatannya tersebut membawa pengaruh atau akibat yang diharapkan oleh pelaku atau tidak. Lihat juga: R. Soegandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1980, hal. 164, bahwa Pasal 154 sampai dengan 157 disebut dengan delik pembangkit rasa permusuhan. Rumusannya bersifat formil artinya tidak perlu diselidiki apakah rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan itu

### 3. Penerapan Haatzaai Artikelén pada aktivis gerakan mahasiswa.

Dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ada beberapa orang tokoh Pergerakan Nasional yang harus terjaring oleh pasal Haatzaai Artikelén ini. Beberapa orang tokoh pergerakan nasional tersebut antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, RM Abdul Madjid Joyodiningrat, Ali Sastroamidjojo, Nazir Sutan Pamuntjak, Gatot Mangkoepradja, Maskoen dan Soepriadinata<sup>131)</sup>.

Pada akhir tahun 1922 "*Perhimpunan Indonesia*" memiliki pengurus baru yang terdiri dari Iwa Kusumasumantri, J.B. Sitanala, Moh. Hatta, Darmawan Mangunkusumo dan Sastromuljono. Para pengurus baru ini merubah susunan organisasi, corak gagasan, pemikiran dan aktivitasnya, yaitu dari suatu himpunan yang sifatnya sosial semata menjadi sebuah himpunan yang aktif juga dalam bidang politik.

Tiga tema utama yang selalu dijadikan landasan dalam melakukan reformasi kepengurusan mereka yaitu: hak untuk dapat menentukan nasib diri sendiri, kepercayaan kepada kekuatan dan kemampuan diri sendiri, serta persatuan dan kesatuan bersama untuk menghadapi Belanda. Selain tiga tema utama tersebut mereka juga menerbitkan sebuah majalah yang dinamakan "*Indonesia Merdeka*" sebagai alat propaganda perjuangan tentang kegiatan dan tujuan yang

---

mempunyai dasar-dasar yang nyata ataupun tidak, tidak perlu dibuktikan apakah pernyataan permusuhan, kebencian dan penghinaan itu mempengaruhi pada khalayak ramai, sehingga mereka betul-betul bersikap memusuhi, membenci dan merendahkan pemerintah. Syarat yang penting dari pasal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, tidak perlu ditepi jalan, asal di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak.

<sup>131)</sup> Achmad Fadilah, *Haatzaai Artikelén (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 154 KUHP Pidana Dalam Perkara No. 141/Pid/B/1989/ Pn.Bdg)*, Skripsi, Fakultas Hukum UNSOED, 1995, hal. 82. Lukas Swarso, *Loc.Cit.*, Lihat juga : Zuhri dan Iwan, *Op.Cit.*, hal. 11.

telah mereka lakukan serta cita-cita bersama yang hendak mereka capai<sup>132)</sup>.

Namun rupanya perubahan pola gerakan, tujuan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh '*Perhimpoean Indonesia*' bukannya tidak membawa resiko yang cukup berarti, tetapi justru mengundang pandangan yang pro dan kontra di masyarakat Belanda itu sendiri, yaitu dengan propaganda-propaganda yang ditulisnya dalam '*Indonesia Merdeka*', akibatnya beberapa orang pengurus dari '*Perhimpoean Indonesia*' ini harus berhadapan dengan pemerintah Belanda, karena dituduh melakukan penghasutan.

Mohammad Hatta, RM Abdul Madjid Joyodiningrat, Ali Sastroamidjojo dan Nazir Sutan Pamuntjak, dihadapkan ke depan pengadilan Belanda, karena mereka dianggap melakukan perbuatan yang dianggap dapat mengancam kehidupan pemerintahan di Hindia Belanda. Penangkapan dan penyidikan mereka sejak 23 September 1927 sampai dengan 7 Maret 1928 tidak lain karena "*Perhimpoean Indonesia*" yang mereka dirikan di negeri Belanda<sup>133)</sup>.

Mengapa para mahasiswa Indonesia yang ada di negeri Belanda dan tergabung kedalam "*Perhimpoean Indonesia*" ini dijerat oleh Pasal-pasal penghasutan, yaitu Pasal 131 KUHP Belanda yang rumusan deliknya hampir menyerupai rumusan delik dari Haatzaai Artikelen, karena para mahasiswa Indonesia itu telah memberikan gambaran dan bukti

---

<sup>132)</sup> Abdurrahman Surjomihardjo, Pola-pola Pemikiran Menuju Indonesia Merdeka, *Prisma* 7 Nomor Khusus, 1976, hal.19-20. Menurut Abdurrahman Surjomihardjo, kata "merdeka" menunjukkan adanya semangat dan dijadikan semboyan bagi 'kelompok Indonesia Muda' menuju kancah perjuangan. Merdeka merupakan gagasan yang umum terdapat di setiap diri manusia, dan juga terdapat pada jiwa setiap bangsa (Nation) untuk merdeka dan selalu hidup bersama dengan kukuh. Gagasan untuk merdeka tidak berbeda antara bagian dunia yang satu dengan belahan dunia lainnya. Kemerdekaan adalah hak milik kemanusiaan dan bukan hanya milik dunia barat, oleh karenanya 'kemerdekaan adalah sebuah tempat suci di belahan dunia manapun'. Dengan demikian penggunaan kata 'merdeka' setelah kata 'Indonesia' menunjukkan adanya suatu sikap jiwa bangsa atau Nation, dengan kesadaran kebangsaan untuk dapat dipersatukan secara ketata negaraan untuk merdeka, bersatu dan berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara.

<sup>133)</sup> J.E.W Duijs, *Membela Mahasiswa Indonesia di Depan Pengadilan Belanda*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal. VII.

yang senyatanya tentang keadaan Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu kepada masyarakat Belanda<sup>134)</sup>.

Rakyat Belanda barulah dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang Indonesia, setelah "*Perhimpoean Indonesia*" tersebut berdiri, dan para mahasiswa Indonesia inilah yang memberitakan keadaan yang sebenarnya tentang Indonesia. Oleh karena itulah pemerintah Belanda merasa kewalahan akan kenyataan-kenyataan yang ada, sehingga pemerintah Belanda menerapkan pengawasan yang ketat, memata-matai, bahkan akhirnya menerapkan Pasal 131 KUHP Belanda kepada keempat pemimpin "*Perhimpoean Indonesia*" tersebut<sup>135)</sup>.

Pembela keempat pemimpin "*Perhimpoean Indonesia*" tersebut, Mr. J.E.W Duijs membeberkan ini semua dengan maksud bahwa di Hindia Belanda-pun ada pasal-pasal yang serupa, bahkan lebih kejam dalam penggunaannya, namun pasal-pasal *Haatzaai Artikelen* hanya dipergunakan kepada para pembangkang yang dianggap dapat merusak keberadaan Belanda sebagai kolonial di Hindia Belanda. Tetapi Pasal ini tidak berlaku atau menjadi tumpul ketika harus berha-

---

134) *Ibid.* Pada umumnya rakyat Belanda tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Golongan pengusaha sengaja tidak pernah memberitakan keadaan yang sebenarnya tentang Indonesia kepada masyarakat Belanda. Dan walaupun diantara mereka ada yang mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang Indonesia, maka hal itu terbatas pada anggapan bahwa "*Indonesia adalah sumber keuntungan dagang yang sangat besar bagi Belanda*".

135) *Ibid.*, hal. 80-81. Dalam pembelaannya Mr. J.E.W Duijs banyak sekali memberikan ilustrasi dari buku "*Max Havelaar*" karya Multatuli (Eduard Douwes Dekker), salah satunya adalah ucapan Multatuli "*een blijk van schijn of een schijn van blijk*" (suatu pernyataan kepura-puraan atau kepura-puraan kenyataan), hal. 46. Dalam pembelaannya Mr. J.E.W Duijs mengatakan bahwa: Ada satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian, yaitu, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hindia Belanda (WvSNi-Pen) terdapat beberapa pasal yang melarang penyebaran tulisan-tulisan tajam, terutama tulisan-tulisan yang menyebarkan bibit permusuhan dan kebencian. Pasal-pasal itu disebut pasal-pasal tentang "penyebar kebencian" (*Haatzaai Artikelen*-Pen). Dalam Pasal 145 (maksudnya 154-Pen) dikatakan: "Seseorang yang mengutarakan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap pemerintah Belanda atau Hindia Belanda di depan umum, dijatuhi hukuman penjara setinggi-tingginya tujuh tahun atau denda sebesar 3000 gulden.". Pasal 155 menyebut : ....., Pasal 157 : ... Namun semuanya hanya ...teori belaka. Dalam praktek bagaimana ? Prakteknya adalah di Hindia Belanda pers Barat setiap saat bebas menyebar luaskan pernyataan dan ucapan yang menghina dan merendahkan rakyat Indonesia dengan cara yang bagaimanapun, tanpa ditegur atau dihukum. Mereka merdeka membakar dan menghidupkan rasa kebencian dan perausuhan terhadap bangsa Indonesia tanpa diganggu pelaksana Undang-undang, malah kepada orang yang paling "berjasa" dalam usaha "kepakihawanan" yang melawan hukum itu, oleh pemerintah atas rekomendasi Gubernur Jenderal Fock (D.Fock menjabat sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1921-1926) diberi penghargaan.

dapan dengan pers-pers barat atau Belanda, padahal justru pers-pers barat atau Belanda itulah yang lebih banyak melakukan delik yang tercantum dalam rumusan pasal-pasal Haatzaai Artikelen<sup>136</sup>).

*PNI-Partai Nasional Indonesia* didirikan di Bandung pada tahun 1927. PNI melakukan penerangan-penerangan atas 'kegelapan-kegelapan' yang terjadi di daerah jajahan Belanda khususnya di Indonesia. PNI melakukan propaganda secara intensif baik lisan maupun tertulis<sup>137</sup>).

Namun akibat propaganda serta gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PNI ini, maka para pimpinan PNI terpaksa harus berurusan dengan pengadilan kolonial di Bandung. Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen dan Soepriadinata, di Bandung-pun terkena jeratan pasal-pasal Haatzaai Artikelen<sup>138</sup>).

Peradilan yang dilakukan terhadap Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen dan Soepriadinata, berlangsung di Bandung. Jaksa penuntut umum pada waktu itu menggunakan

---

<sup>136</sup>) *Ibid.*, hal. 154. Peristiwa penahanan dan pemeriksaan para pimpinan "Perhimpunan Indonesia" ini terjadi sebelum Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen dan Soepriadinata, para pimpinan PNI ini dihadapkan ke pengadilan Belanda di Bandung. Akhirnya setelah melalui masa penahanan dan persidangan yang cukup panjang dan melelahkan itu, para pemimpin "Perhimpunan Indonesia" di Belanda diputus bebas dari dakwaan dan tuntutan yang ada. Namun hal itu tidak merubah situasi dan keadaan, karena mereka tetap saja diawasi gerak-geriknya dan selalu berada dibawah pengawasan Departemen Daerah Jajahan.

<sup>137</sup>) *Abdurrahman Surjomihardjo, Op.Cit.*, hal. 21. Mereka memiliki sebuah tujuan utama yaitu tercapainya Indonesia Merdeka, yang meliputi daerah jajahan Hindia Belanda. Cara yang digunakan oleh PNI untuk mencapai tujuan itu ialah dengan memadu semangat kebangsaan menjadi kekuatan nasional dengan memperdalam keinsyafan rakyat agar menjadi suatu gerakan yang sadar, yang akan membangun suatu kemauan yang satu, kemauan nasional, yang kemudian menjelma menjadi satu perbuatan, perbuatan nasional.

<sup>138</sup>) *Zuhri dan Iwan, Ibid.* Para tokoh PNI ini dijerat menggunakan pasal-pasal Haatzaai Artikelen dengan dakwaan menyerang atau menghasut masyarakat Indonesia agar menentang atau mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, disamping para tokoh itu juga didakwa merupakan kelanjutan dari Partai Komunis Indonesia, yang pada tahun 1926 mengadakan pemberontakan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Lihat juga : Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia (1926-1948-1965), oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, Jakarta, 1988. Lihat juga: Parakitri I Simbolon, Menjadi Indonesia, Kompas Grasindo, Jakarta, 1995, hal. 304-311, bahwa: Konsep pergerakan komunis di tahun 1921 hingga tahun 1926 bermula dari Partai Sarekat Islam, yang kemudian pecah menjadi Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam yang Putih. Sarekat Islam Merah merupakan sepalan dari Sarekat Islam yang beraliran komunis dan nantinya berubah menjadi Sarekat Ra'jat. Pergerakan Sarekat Ra'jat membawa ketakutan tersendiri bagi pemerintah kolonial dalam hal perberdayaan masyarakat oleh karena itulah, maka untuk menekan gerakan ini digunakanlah Haatzaai Artikelen kepada para tokoh dan aktivis pergerakan tersebut (hal. 308 dan 604).

*Pasal 153 Bis*, yang kerap kali disebut pasal mencegah penghasutan, untuk menjaring perbuatan Soekarno dan teman-temannya<sup>139</sup>).

Hasil persidangan, Hakim Siegenbeek memutuskan bahwa Soekarno dan teman-temannya dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman. Namun rupanya keputusan itu menimbulkan protes dan kecaman dari Partai Buruh Sosial Demokratis (*Sociaal Democratische Arbeiders Partij-SDAP*) Belanda. Dalam kongresnya di Arnheim, Belanda tanggal 4 April 1931, *Oudegeest*, salah seorang peserta kongres mengemukakan bahwa persidangan itu merupakan skandal besar dalam sejarah kolonial. Oleh karenanya SDAP mengeluarkan mosi protes dan meminta agar para pemimpin PNI dan tahanan politik lainnya (Soekarno dan kawan-kawan) dibebaskan<sup>140</sup>).

Kecaman dan protes terhadap putusan hakim Siegenbeek tersebut tidak hanya muncul dari SDAP saja, tetapi juga dari salah seorang anggota *Tweede Kamer Staten General* (anggota DPR Belanda) yaitu Mendels. Mendels mengecam kepada Albregts yang seakan-akan telah mengambil fungsi jaksa penuntut umum, dan Mendels juga mempertanyakan kebenaran prosedur hukum dalam persidangan kepada Menteri

---

139) Lothrop Stoddart, *The Rising Tide of Color* (Pasang Naik Kulit Berwarna), Panitia Penerbit : Letdjen H.M. Muljadi Djojomartono, Brigdjen R. Rusli, H. Mualiff Nasution, Drs. Syafa'at, Rauli Thoha S.H, Jakarta, 1966, hal. 310. Dalam suplemen 'The Rising Tide of Color' dikemukakan bahwa: Dua tahun sebelum memuntjaknya tuntutan Soekarno akan kemerdekaan negerinya. Maka pada tahun 1929, sebelum ia dapat bergerak lebih leluasa untuk mempropagandakan ideenya yang besar itu pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan terhadap PNI. Soekarno sendiri dan tiga pemimpin lainnya ditangkap dan kemudian diadjudkan kemuka pengadilan daerah di Bandung, untuk memungkinkan ia dimasukkan kedalam penjara, suatu tindakan yang semena-mena pendjajahan yang tiada taranja.

140) Cindy Adams, Alih Bahasa: Abdul Bar Salim, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, hal. 144. Setelah diperkarakan pada tahun 1929, maka Soekarno menceritakan pengalamannya saat dituduh oleh pemerintah kolonial Belanda: 18 Agustus 1930, setelah delapan bulan meringkuk dalam tahanan, perkara ini dihadapkan di muka pengadilan. Secara formal aku dituduh melanggar pasal 169 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan menyalahi pasal 161, 171 dan 153. Ini adalah "de Haatzaai Artikelen" yaitu pasal-pasal pencegah penyebaran rasa benci. Secara formal aku dituduh "mengambil bagian dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan menjalankan kejahatan disamping ...usaha untuk menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda.."

Urusan Koloni Belanda, De Graff<sup>141)</sup>.

Kritikan Mendels ini segera disambut oleh surat kabar 'Sinar Sumatera'. Surat kabar ini menuliskan "Ini menjadi pelajaran mahal untuk kemudian hari tentang bagaimana kaum pergerakan menggunakan taktik dan politik"<sup>142)</sup>.

Namun walaupun kecaman dan protes mengalir dari negeri Belanda, dan Soekarno sendiri sudah mengajukan pledoi, tetapi putusan *Landraad* tidak tergoyahkan. Begitu diajukan banding ke *Raad van Justitie*, Pengadilan Tinggi tersebut malah mengukuhkan putusan *Landraad*, tetapi menghapuskan tuduhan bahwa PNI adalah sebagai kelanjutan dari PKI<sup>143)</sup>.

Melihat banyaknya kasus-kasus Pergerakan Nasional yang dijerat dengan *Haatzaai Artikelen* dan menimbulkan polemik yang berkepanjangan di negeri Belanda sendiri, disertai terjadinya depresi ekonomi di negeri Belanda,

141) Zuhri dan Iwan, Sukarno Terjerat Haatzaai Artikelen, Forum Keadilan, Nomor 21 Tahun II, 3 Februari 1995.

142) Soekarno, Indonesia Menggugat (Indonesia Klagaftaan), Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial Belanda 1930, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, hal. 10-11. Beberapa ucapan Mendels yang diikuti oleh Soekarno dalam Pledoinya yang berjudul 'Indonesia Menggugat' antara lain: Mendels menyebutkan bahwa pasal ini, pasal undang-undang pidana yang mendirikan bulu roma, didalam tahun-tahun yang akhir ini belum pernah jumpai. Tetapi kalau begitu janganlah orang omong, bahwa di sini ada aturan hukum. Ini berarti tidak ada aturan hukum sama sekali. Ini adalah kesewenang-wenangan dengan mempergunakan undang-undang sebagai senjata. Soekarno sendiri dalam Pledoinya, 'Indonesia Menggugat', mengatakan bahwa: Kami anggap pasal-pasal ini sebagai halangan besar bagi menjalankan "hak berserikat dan berkumpul", yang toh tadinya sudah terancam sekali oleh adanya *Haatzaai Artikelen* (pasal-pasal pencegah penyebaran rasa benci), oleh adanya "hak pendigulan" dan sebagainya. Kalau *Haatzaai Artikelen* itu sudah tersohor dengan nama "aturan karet yang kelewatan kekaretannya". Lebih lanjut Soekarno, menekankan kembali tentang ke-karetan *Haatzaai Artikelen* itu sendiri. Soekarno mengatakan: Tuan-tuan Hakim, marilah kita dengan hati yang tenang dan tulus bertanya lagi : Adakah di sini bagi kami bangsa Indonesia kemerdekaan cetak, adalah di sini hak yang sebenarnya boleh kita namakan hak berserikat dan berkumpul ? Amboi,- adakah disini hak-hak itu, dimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih saja berisi itu pasal-pasal mengenai penyebaran rasa kebencian (*haatzaaiartikelen*) yang bisa diulur-ulur sebagai karet, itu *haatzaaiartikelen* yang hampir sonder perubahan diambil dari "*gewrocht der duisternis* (perangkap terse-lubung). Sebagai Thorbecke menyebut peraturan cetak mencetak, dimana horribel strafwetartikel 153 bis-ter yang lebih-lebih elastis lagi mengancam keselamatan tiap-tiap pemimpin sebagai kami hari ini, dimana hak pendigulan memberi kekuasaan yang hampir tak terhingga kepada pemerintah terhadap tiap-tiap pergerakan dan tiap-tiap manusia yang ia tak sukai?

143) Setelah dijerat dan dihukum dengan menggunakan *Haatzaai Artikelen*, berdasarkan hak *exorbitan* yaitu sebuah yang hak luar biasa dan dimiliki oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melakukan pembuangan tanpa proses pengadilan, maka De Jonge, melakukan pembuangan terhadap Soekarno ke Flores dan Bengkulu, serta Sutan Sjahrir dan Moh. Hatta dibuang ke Digul Atas (Tanah Merah). (Suyatno Kartodirdjo, Pemberontakan Anak Buah Kapal 'Zeven Provinciën' Tahun 1933, *Prisma* No. 7 Tahun XVII 1968, hal. 6) lihat juga : Abdurrahman Surjomihardjo, Penempatan Kamp Konsentrasi Digul dalam Penulisan Sejarah Indonesia, *Prisma* yang sama, hal. 17 dan 19.



maka dibawah kebijakan kolonial yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal De Graaf dan penggantinya De Jonge dibuat sebuah ordonansi yang mengawasi dan membatasi segala bentuk kegiatan pengajaran dan pendidikan bagi golongan bumiputera<sup>144</sup>).

Pada masa penjajahan kolonial Belanda, Haatzaai Artikelen pernah digunakan untuk menjerat R.M. Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) sebagai penanggung jawab mingguan "*Persatoean Hindia*" pada tahun 1920<sup>145</sup>). Ia dijatuhi hukuman penjara satu bulan, tetapi oleh pengadilan tingkat kedua ia dijatuhi hukuman lebih berat yaitu menjadi tiga bulan. Dan pasal yang sama-pun dijatuhkan kepada Mas Marco Kartodikromo untuk menjalani hukuman penjara selama enam bulan<sup>146</sup>).

Beberapa kasus yang pernah menimpa beberapa penerbitan yang berkaitan dengan Haatzaai Artikelen diantaranya

144) Suyatno Kartodirdjo, Pemberontakan Anak Buah Kapal 'Zeven Provinciën' Tahun 1933, *Prisma* No. 7 Tahun XVII 1988, hal. 4. Hal ini ditandai dengan keluarnya Ordonansi Pengawasan 1932 atau *Toezicht Ordonantie 1932*. Ordonansi ini juga melarang dan mengawasi pendidikan dan pengajaran yang dapat mengacaukan ketertiban masyarakat khususnya sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Ki Hadjar Dewantara.

145) Atmakusumah, Tribuana Said, *Loc.Cit.* Bersama dengan Ki Hadjar Dewantara, Doues Dekker-pun pernah dijaring dengan menggunakan Haatzaai Artikelen, ketika mereka akan mendirikan "De Indische Partij". Disini dikemukakan bahwa Haatzaai Artikelen memang sengaja digunakan untuk menekan gerakan-gerakan perjuangan Kemerdekaan Indonesia. (Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 60) Haatzaai Artikelen juga dikenal sebagai "ranjau" dalam bidang jurnalistik atau dalam bidang pers umum. Sebab seringkali pasal ini digunakan sebagai rambu-rambu yang seakan-akan membatasi untuk memberikan fungsi sosial kontrol kepada pers dalam memberikan saran dan kritik kepada pemerintah. Ki Hadjar Dewantara pernah mendapatkan teguran yang keras akibat menuliskan perjuangan komite bumiputera di Harian *De Expres* tanggal 19 Juli 1913, dengan judul artikelnya yang terkenal 'Als ik eens Nederlander was' (Parakriti Y. Siswono, *Menjadi Indonesia*, Diterbitkan oleh Kompas, 1995, hal. 256).

146) *Ibid.* Untuk daftar wartawan yang terjerat Haatzaai Artikelen tambahan dapat juga dilihat dalam "Jurnalis Independen Diadili, Pledoi Tiga Terpidana" terbitan Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, Maret 1996, hal. 29-30. Selama tahun 1919-1920, wartawan yang terkena "ranjau Pasal 154 sampai 157 KUHI Pidana" diantaranya ialah : Sariman Paratmodjo di Semarang, Kiai Tama alias Ismail di Pamekasan, Mas Soekandar di Kediri, Soerimittihardjo di Kediri, Adam Gelar Sutan Sari Alam di Padang, Parada Harahap di Padang, Muhammad Sanoesi di Tasikmalaya, Mas Soewito di Pekalongan, Danoedjoe di Semarang, Kamidin di Demak, Soekirman di Surabaya, Raden Darsono di Surabaya, Koesman di Blitar, Haji Misbah di Klaten, Dekker di Semarang, J.C Stam di Surabaya, J.P Pay di Medan, R. Abdul Wahid di Pekalongan, R.M Sumardi Suryaningrat di Semarang, Hadisubroto di Semarang, Mas Marco Kartodikromo di Semarang, Rukimin, Cokromijoyo, Nayoan, Abdulajis, Melas, Ali, Salekan, Rosmi, Rawi, Supardi semuanya di Semarang, Liew Ben Goei di Semarang, Kho Tjoen Wan di Semarang, Pronosasmito alias Bastan di Pasuruan, B van Durink di Surabaya, Rd. Ngaheli Jiwopradoto di Solo, Sastropranito di Klaten, R. Akhmad Tayib di Klaten, Wongsopamiro di Klaten dan Parada Harahap di Tapanuli. Sesudah Indonesia Merdeka delik pers inipun masih menjadi ranjau yang paling ditakuti. Walaupun tidak seluruhnya berkaitan dengan Haatzaai Artikelen, tetapi dalam kurun waktu 1950 sampai 1953, tercatat tidak kurang 22 perkara delik pers yang diajukan dan disidangkan.

adalah, terhadap Mochtar Lubis, yaitu pemimpin redaksi 'Harian Indonesia Raya'<sup>147)</sup>. Hal yang sama juga menimpa pemimpin redaksi harian 'Trompet Masyarakat' Goei Po An di Surabaya, sehingga Goei Po An harus menjalani hukuman penjara selama satu bulan<sup>148)</sup>.

Berikut data yang berhasil dihimpun oleh Edward C. Smith mengenai pembredelan pers di Indonesia:

Tabel 2. Tuduhan terhadap pers yang melakukan :

- A. Pengecaman pemerintah atau pejabat pemerintah,
- B. Penghinaan pemerintah atau pejabat pemerintah
- C. Cenderung mengganggu keamanan dan ketertiban.

Tahun	Tuduhan A	Tuduhan B	Tuduhan C
1952	-	1	-
1953	-	5	-
1954	-	1	1
1955	-	-	1
1956	2	8	-
1957	6	9	35
1958	3	5	15
1959	4	3	21
1960	2	9	42
1961	7	-	5
1962	2	-	4
1963	-	-	1
1964	1	1	8
1965	-	-	-

Data diambil dari: Edward C. Smith, Pembredelan Pers di Indonesia<sup>149)</sup>.

147) Edward C. Smith, Pembredelan Pers Indonesia, Pustaka Grafitipers, Jakarta, 1966, hal. 162. Edward C. Smith yang mengutip dalam 'Observer' 31 Juli 1957 di halaman satu mengutarakan: Pemimpin Redaksi Mochtar Lubis dituduh melanggar pasal 154 KUHP karena pemuatan berita dalam Indonesia Raya 14 Agustus 1956 berjudul "Menteri Luar Negeri Tersangkut perkara 1.500.000 rupiah" dan "PM Ali dan KSAD Masutim jelas bela yang batil", serta pada tanggal 6 September tahun lalu berjudul "Indonesia Raya Menuduh Kabinet Ali". Pemimpin Redaksi Lubis ditahan selama kira-kira dua minggu dan kemudian kepadanya dikenakan tahanan rumah kurang lebih tujuh bulan sampai sekarang.

148) Soesilo, Op.Cit., hal. 133. Moeljatno, Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. (Openbare Orde), hal. 93. Edward C. Smith, Op.Cit., hal. 158. Harian itu dipersalahkan karena telah memuat tulisan yang isinya dianggap menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Tulisan itu berbunyi " ....Pemerintah seakan-akan telah mata gelap, karena telah bertindak menangkapi beberapa orang penting di Jakarta pada waktu itu ".

149) Edward C. Smith, Op.Cit., Data dikualifikasi oleh Penulis.. Beberapa media massa yang sempat dituduh oleh tuduhan diatas antara lain : Harian Indonesia Raya, Harian Pedoman, Abadi, Merdeka, Musantara, Suluh Indonesia, Duta Masyarakat, Trompet Masyarakat, Berita Indonesia, Djiwa Baru, Times of Indonesia, Indonesian Observers, Java Post, Harian Belanda Java Bode, Koran Cina Keng Po dan Sin Po, Koran Komunis : Harian Rakyat dan Bintang Timur. Pengertian Delik Pers menurut ahli hukum yang dibatasi dengan tiga pengertian yaitu: pengertian umum delik pers berupa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pers, Pengertian yuridis sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang pers dan pengertian menurut ahli hukum yaitu: berupa pernyataan pikiran atau pendapat orang, dilakukan melalui alat cetak atau pers, dan harus adanya publikasi yang telah menjadi delik. Menurut Bambang Purnomo, delik-delik tersebut ada beberapanya yang sudah diatur dalam KUHP yaitu Pasal 137, 144, 157, 282 dan 321 (Bambang Purnomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 52).

Harjono Tjitrosoebono, juga memberikan sebuah contoh kasus Haatzaai Artikelen yang menimpa *Harian Nusantara* di tahun 1971, dimana dalam kasus tersebut M.R. T.D (Tengku Dzulkaflī) Hafaz, direktur harian Nusantara dituduh melakukan perbuatan delik pers berdasarkan pasal 154 KUH Pidana<sup>150</sup>).

Contoh lain dikemukakan oleh Harjono Tjitrosoebono ialah tidak hanya delik pers saja yang dapat dikenai Haatzaai Artikelen, akan tetapi ada juga beberapa perbuatan yang dapat dikenai Haatzaai Artikelen. Misalnya saja kasus Golput di Semarang, Kasus 5 Agustus oleh mahasiswa ITB terhadap Menteri Dalam Negeri Rudini di Bandung dan kasus pidato yang dilakukan oleh Kasman Singodimedjo di Magelang. Ketiga kasus diatas, menurut Harjono Tjitrosoebono, tidak termasuk delik pers, akan tetapi termasuk delik yang menyatakan perasaan kebencian di muka umum, walaupun dijaring dengan menggunakan pasal yang sama, yaitu pasal 154 KUH Pidana<sup>151</sup>).

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa Haatzaai Artikelen bukan saja sebagai pasal yang menjadi ranjau dalam bidang pers dan jurnalistik akan tetapi juga

150) Ariel Haryanto, Harjono Tjitrosoebono, Aristides Katoppo, Ashadi Siregar, Muladi, *Pers Hukum dan Kekuasaan*, Penerbit Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994, hal. 11-13. Lihat Juga : *Atakusumah*, Triuwana Said, *Loc.Cit*, Lihat juga: David T. Hill, 'Before the New Order', *Op.cit*, hal. 26. 'Under the Dutch Colonial regime Indonesian language periodicals, both those explicitly nationalist in editorial orientation as well as those with more commercial motivations, struggled against enormous financial odds. But more intimidating were a series of colonial laws and regulating governing printed matter. Most restricting were the despised Haatzaai Artikelen (Sowing of Hatred Articles) and a 1931 Press Act (Presbreidel Ordonantie), which could be invoked against anyone disturbing 'public order' or spreading 'hatred' Governor-General had the power to ban publications deemed of fensive or destabilising, a prerogative used with some alacrity. Between 1931 and 1936 at least 27 daily newspaper were subject to government action, including the detention of journalists.

151) Ariel Haryanto, Harjono Tjitrosoebono, Aristides Katoppo, Ashadi Siregar, Muladi, *Pers Hukum dan Kekuasaan*, Penerbit Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994, hal. 11-13. Khusus untuk kasus Kasman Singodimedjo, dapat dilihat pada: *Hidup itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun*, oleh : Panitia peringatan 75 Tahun Kasman Singodimedjo, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1982, hal. 213-224. Disini terlihat bahwa dengan aturan yang sama, yaitu Pasal 154 KUH Pidana, dapat mencakup dua perbuatan yang termasuk kedalam rumusan pasal tersebut. Haatzaai artikelen dapat dilakukan oleh umum, akan tetapi apabila sudah dipublikasikan, maka ia termasuk kedalam delik pers. Dikarenakan pasal Haatzaai Artikelen tidak terdapat di Belanda, maka Pers di Belanda akan lebih leluasa dalam mengkritik pemerintahnya atau dapat berfungsi sebagai sosial kontrol yang besar dibandingkan dengan Pers di Indonesia.

menjadi semacam rambu bagi beberapa gerakan mahasiswa yang dianggap sudah mencapai tingkat yang cukup radikal dan dapat membahayakan stabilitas keamanan dan ketertiban umum<sup>152)</sup>.

Era kebangkitan dan kejuangan mahasiswa Indonesia, kembali ditandai dengan adakan gerakan *Angkatan 66*<sup>153)</sup>, yang banyak bergerak untuk memperbarui keadaan Indonesia Pasca gerakan 30 S PKI. Semangat pembaharuan dan imajenasi yang tetap digenggam oleh mahasiswa, terbawa hingga awal tahun 1974, dimana pada awal tahun itu sudah mulai terlihat adanya benih-benih kecemburuan sosial yang tumbuh diantara warga pribumi terhadap warga turunan asing<sup>154)</sup>.

Ketegangan makin memuncak manakala mahasiswa-mahasiswa turun ke jalan dan ikut serta memojokkan posisi pemerintah, yang saat itu memang sudah terpojok. Massa mahasiswa dan masyarakat sudah semakin tak terkendali dan akhirnya terjadilah huru-hara yang menyebabkan terjadinya pembakaran mobil-mobil produksi Jepang, pengrusakan toko non pribumi dan perampasan isinya<sup>155)</sup>.

---

152) Achmad Fadilah, Delik Politik (Sebuah Kajian Penggunaan UU No. 11 PNPS 1963 dan Haatzaai Artikelien Terhadap Gerakan Mahasiswa Indonesia 1974-1994), Makalah Ilmiah, Persyaratan untuk mengikuti Program Magister (S2) Ilmu Hukum UNWIP, 1996. hal. 22-50.

153) Yozar Anwar, Angkatan 66 Sebuah Catatan Marian Mahasiswa, Sinar Harapan, Jakarta, 1981. Lihat juga: Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran, LP3ES, Jakarta, tahun tak tercatat. Angkatan 66 inilah yang kembali meletakkan mitos bahwa Mahasiswa adalah salah satu tenaga penggerak bangsa yang mampu bersikap kritis dan terbuka. Anggapan ini terus melekat dalam imajenasi mahasiswa, yang memang pada saat itu mahasiswa benar-benar memiliki sebuah kebebasan mimbar yang penuh dan dapat bergerak secara leluasa, bahkan dalam bentuk politik praktis sekalipun.

154) Ramadhan K.H, Soemitro: Dari Pandang Mulawarman Sampai Pangkoptikamtib, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal. 311. Soemitro mantan Pangkoptikamtib menjelaskan: Pemerintah pada saat itu mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat mengenai soal-soal korupsi, penanaman modal asing, peranan Jepang sampai dengan peranan-peranan Aspri-aspri Ali Murtopo dan Sudjono Humardani. (Lihat Juga : Marzuki Arifin, Peristiwa 15 Januari, Publishing House, Jakarta, 1974, Bab III : Kronologis Peristiwa 15 Januari 1974).

155) Ramadhan K.H, Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 379. Ali Sadikin yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta menggambarkan jumlah korban: Lebih dari 10 orang meninggal, dan lebih dari 170 orang mengalami luka berat, lebih dari 700 orang ditahan akibat malapetaka itu. Toh saya tidak mendapat laporan yang memastikan siapa yang punya lakon sehingga Proyek Senen terbakar dan Pengrusakan serta pembakaran gedung PT Toyota Astra Motor dan lain-lain.

Akibat peristiwa *Malari* ini, maka beberapa orang mahasiswa ditahan dan dimintai pertanggungjawabannya. Salah seorang mahasiswa yang saat itu dianggap sebagai pemimpin dari kelompoknya segera diperiksa dan akan segera disidangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Soemitro, menjelaskan bahwa Hariman Siregar sudah sepantasnyalah mempertanggungjawabkan perbuatannya, walaupun akibat-akibat yang ditimbulkannya bukanlah tujuan mereka dan sama sekali tidak dikehendaki<sup>156)</sup>.

Pasca Peristiwa 15 Januari 1974 (*Malari*), gerakan mahasiswa baik yang bersifat lokal maupun nasional mulai dilarang keberadaannya. Pers-pers mahasiswa mulai dike-biri bahkan mulai dilarang keberadaannya, gerakan intra dan ekstra kampus mulai diawasi oleh aparat yang berwenang. Daniel Dhakidae mengatakan bahwa keadaan pers mahasiswa dan kegiatan mahasiswa setelah peristiwa *Malari* amatlah menyedihkan<sup>157)</sup>.

Peristiwa *Malari* yang terjadi di tahun 1974 merupakan pelajaran yang pahit bagi Pemerintah dan segenap jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebab disaat itu setelah kelompok mahasiswa melakukan aksi demonstrasi terjadi aksi kerusuhan yang nyaris tidak dapat dibendung oleh aparat keamanan dan ketertiban. Belajar dari pengalaman ini, maka dicetuskanlah program

---

<sup>156)</sup> Ramadhan K.H., Soemitro: Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkoptib, hal. 322. Lebih lanjut Soemitro mengatakan bahwa: "Tidak Bisa" kata saya, " Mereka bukan anak kecil. Tidak bisa mereka cuci tangan. Mereka harus ngerti tanggungjawab," Maksud saya dengan itu, untuk mendidik mereka agar mereka mengerti akan tanggung jawab. Atas sesuatu perbuatan yang ada akibatnya, mereka harus ikut bertanggung jawab, karena mereka sudah duduk di tingkat akhir UI. Mereka sudah mengerti masalah sosial politik. (Untuk pembelaan yang dilakukan oleh Hariman Siregar dapat dilihat dalam : Hariman Siregar, Hati Nurani Seorang Demonstran, Mantika Media utama, Jakarta, 1994).

<sup>157)</sup> Daniel Dhakidae, Penerbitan Kampus: Cagar Alam Kebebasan Pers, Prisma 10, Oktober 1977, hal. 62. Dalam 'Prisma' ia menjelaskan: Peristiwa 15 Januari 1974 sampai sekarang masih merupakan tonggak terakhir bagi aksi mahasiswa yang lepas bebas. Setelah itu buat jangka waktu hampir selama dua tahun yang ada adalah kesepian politik mahasiswa. Sebuah Surat Keputusan Menteri Pendidikan yang lebih terkenal dengan SK 028 telah melarang kegiatan mahasiswa diluar kampus universitas. Semua kegiatan diluar kampus harus sepengetahuan dan seizin rektor universitas atau perguruan tinggi masing-masing.

NKK-BKK yang mulai diterapkan di kampus-kampus<sup>158)</sup>.

Tanggapan tentang diberlakukannya NKK-BKK ditahun 1978 bagi mahasiswa oleh Daoed Joesoef dikemukakan oleh Lukman Hakim, seorang aktivis dewan mahasiswa UI beranggapan bahwa NKK-BKK telah mengekang kebebasan mahasiswa dalam mengemukakan pendapatnya secara praktis<sup>159)</sup>.

Namun awal tahun 1990, era kebangkitan mahasiswa mulai nampak kembali, mahasiswa-mahasiswa mulai menampilkan daya pemikiran yang kritis terhadap berbagai permasalahan yang ada. Mahasiswa mulai mengadakan gerakan kembali. Mereka mulai menjalin hubungan antar lembaga perguruan tinggi yang satu dengan lembaga perguruan tinggi yang lain. Mereka mulai mengadakan gerakan-gerakan yang sifatnya tidak hanya sebagai sumbangan pemikiran belaka, tetapi juga mulai turun ke jalan dan berdemonstrasi<sup>160)</sup>.

Melihat gejolak yang timbul dan berkembang di kalangan mahasiswa, maka aparat yang berwenang untuk menangani masalah ketertiban dan keamanan merasa perlu untuk memberikan batasan-batasan perbuatan yang dianggap dapat sedikit meredam gejolak tersebut. Selain pendekatan

---

<sup>158)</sup> Fadli Zon, Pers Mahasiswa, Gerakan Mahasiswa dan Upaya Pengembangan Intelektualitas Mahasiswa, Makalah Dalam Pendidikan Pers Mahasiswa, Fisip UNSOED, 1993, tidak diterbitkan, hal.2. Ini semua dilakukan semata-mata untuk me-normalisasi kegiatan kampus. Dimana agar kampus hanya berfungsi sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi, yang memberikan tempat bagi transfortasi ilmu pengetahuan dan bukan sebagai lembaga pendidikan praktis bagi mahasiswanya. Sedangkan beberapa kegiatan politik praktis yang dianggap dapat mengacaukan stabilitas keamanan, sedikit demi sedikit mulai diredam.

<sup>159)</sup> Lukman Hakim, Kudengar Indonesia Memanggil, Pledoi Dihadapan Penegadilan Mahasiswa, Badan Kerjasama Pembelaan Mahasiswa Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 28. Lukman Hakim mengatakan: Akan halnya dunia Kemahasiswaan yang selama ini dija-lankan, sebenarnya tradisi penalaran individu sudah senantiasa berkembang. Forum-forum seminar, diskusi, atau penelitian bukan komoditi baru bagi kami. hanya konsep NKK-lah yang berusaha seakan-akan mengintrodusir hal ini sebagai kebiasaan yang harus dimulai, dengan menghapuskan esensi-esensi demokrasi dan pijakan moral kegiatan dalam rangka penalaran. Disini kita telah berbeda faham tentang arti kata "Penalaran Individu", yang ditawarkan oleh NKK hanyalah sekedar verbalisme dan formalitas, sedangkan dasarnya dalam kepentingan politik dan kekuasaan.

<sup>160)</sup> Hendardi, Demo dan Politik Mahasiswa, Forum Keadilan, Nomor 21, Tahun II 3 Februari 1994, hal. 4-17. Ini terpaksa dilakukan karena berbagai jalan yang telah ditempuh mengalami hasil yang buntu, sehingga sebagian besar mahasiswa melakukan demonstrasi itu, merupakan perwujudan dari rasa tidak puas mereka terhadap permasalahan yang timbul dan berkembang

preventif yang telah dilakukan, aparat keamanan-pun telah menyiapkan suatu "obat" bila suatu saat gerakan mahasiswa dianggap terlalu berlebih. Beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai "obat" antara lain menggunakan Undang-undang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan pasal-pasal dalam KUH Pidana. Namun penggunaan UUPK Subversi ini terlalu banyak yang mengecam, karena pasal-pasal dalam UUPK Subversi sudah dikenal sebagai pasal-pasal karet yang dapat dipergunakan sebagaimana maksud yang diinginkan oleh penguasa.

Beberapa aktivis gerakan mahasiswa yang dituduh dan dipidana dengan menggunakan UUPK Subversi No. 11/PnPs/1963 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Tuduhan terhadap gerakan mahasiswa dengan menggunakan UUPK Subversi No.11/PnPs/1963:

Tahun	Nama Kasus	Keterangan Pelaku
1974	Peristiwa 15 Januari 1974	- Hariman Siregar - Syahrir - Dll.
1978	Gerakan mahasiswa 1978	- Lukman Hakim - Dll.
1989	Penyebaran paham Marxisme dan Leninisme	- Bonar Tigor Naipospos - Bambang Subeno - Bambang Isti
1991	Demonstrasi Santa Cruz	- Gregorio Da Cunha - Dll.
1996	Peristiwa 27 Juli/PRD	- Budiman Sudjatmiko - B. Garda Sembiring - Eko Kurniawan - Petrus H Hariyanto - Suroso - Ign. Pranowo - Victor Da Costa - Ign. Putut Pranowo - Ken B. Kusumandaru - Wignyo - dll

Data diambil dan diolah kembali dari berbagai sumber.

Penggunaan UUPK Subversi ini atau yang lebih dikenal dengan istilah pasal karet ini menimbulkan banyak tanggapan yang intinya menunjuk bahwa pemerintah dapat saja

berbuat sewenang-wenang, sehingga untuk menghindari anggapan bahwa Pemerintah sewenang-wenang, maka digunakanlah pasal-pasal dari KUH Pidana. Hal pernah ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Penerangan Polda Jaya, Latief Rabar<sup>161</sup>).

Namun rupanya penggunaan pasal-pasal dalam KUH Pidana, tidak berbeda jauh dengan UUPK Subversi, karena dalam kenyataannya penggunaan pasal-pasal dalam KUH Pidana mirip sekali dengan UUPK Subversi, sehingga hampir semua mahasiswa yang aktif melakukan gerakan yang bersifat mengkritisi tindakan dan kebijakan penguasa selalu dikenakan pasal-pasal Haatzaai Artikel<sup>162</sup>).

Salah satu peristiwa demonstrasi mahasiswa yang sempat naik ke permukaan adalah demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ITB Bandung di tahun 1989, karena mereka menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini untuk membuka Penataran P4 yang akan diadakan di ITB Bandung<sup>163</sup>).

Peristiwa penjarangan enam orang mahasiswa ITB dalam "dunia aktivis gerakan mahasiswa" lebih dikenal dengan sebutan "*Peristiwa 5 Agustus*". Mereka beranggapan bahwa penangkapan serta pembungkaman para aktivis gerakan

---

161) Iwan dan Zoehri, Op.Cit. hal. 10. Diberitakan dalam Forum Keadilan: Jerat Hukum yang dipakai juga lebih lunak. UUPK Subversi yang pada masa sebelumnya kerap dipakai untuk menjerat demonstran-perkara Malari 1974, gerakan mahasiswa 1978, dan perkara Gregorio Da Cunha (demonstran Santa Cruz), serta mahasiswa yang Timor-Timur yang berdemo di Jakarta setahun yang lalu, kini tidak digunakan. Yang dipakai sekarang adalah pasal-pasal yang tersedia dalam KUH. "Hukum kita, kan kian tertib, makin ada kemajuan" kata Kepala Dinas Penerangan Polda Jaya, Letkol Latief Rabar.

162) A. Margana, Demonstran dan Hukumannya, Tempo 15 Januari 1994, hal. 21. Diberitakan dalam Tempo: Hampir semua mahasiswa yang melancarkan unjuk rasa, mimbar bebas atau sejenisnya - kalau toh perlu ditindak - dijerat dengan pasal-pasal yang ada. Ada yang kena Haatzaai Artikel (penyebarkan kebencian), penghinaan mengancam keamanan negara, mengganggu ketertiban umum atau paling berat UUPK Subversi.

163) Iwan Hasibuan dan Santoso, Menghina Presiden, Enam Bulan Penjara Saja, Forum Keadilan Nomor 4 tahun III, 9 Juni 1994, hal. 23. Forum Keadilan memberitakan: Pada 1989, enam mahasiswa Institut Teknologi Bandung, yang berunjuk rasa menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini, juga divonis 2 sampai 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Mereka Tersambar KUH pasal 154 yang mengatur tindak pidana penyebaran kebencian kepada Pemerintah. Dengan Haatzaai Artikel itu pula Bambang Beathors Suryadi, seorang aktifis mahasiswa di Jakarta, terpaksa mendekam 4,5 tahun di penjara.



mahasiswa ini tidak lebih dari tindakan militerisme dan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Ini semua dikemukakan oleh para aktivis ini dalam pledoi mereka di hadapan sidang Pengadilan Negeri Bandung tahun 1989-1990<sup>164</sup>).

Hasil persidangan "*Peristiwa 5 Agustus*" menunjukkan bahwa vonis yang dijatuhkan ini lebih berat dari yang dituntutkan.

Tabel 4. Tuntutan dan vonis "*Peristiwa 5 Agustus*"

Nama	Tuntutan	Vonis
Moh. Jumhur Hidayat	2 tahun 3 bulan	3 tahun
Arnold Purba	2 tahun	3 tahun
Ammarsyah	2 tahun	3 tahun
M. Fadjoel Rachman	2 tahun 3 bulan	3 tahun
Bambang Sugianto	2 tahun 3 bulan	3 tahun 3 bulan
Enin Supriyanto	2 tahun	3 tahun

Data diambil dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung.

Menjelang pemilu tahun 1992, terjadi fenomena baru dikalangan mahasiswa, dimana isu adanya Golongan Putih atau 'Golput' merebak dan mulai dicurigai keberadaannya sebagai upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam rangka menggagalkan pemilu. Isu 'Golput' rupanya juga membawa beberapa orang mahasiswa Semarang ke muka sidang pengadilan sebagai terdakwa<sup>165</sup>).

Dalam kasus ini, terjadi demonstrasi massa yang mempertanyakan penggunaan Haatzaai Artikelen sebagai

<sup>164</sup>) Lihat Pledoi dari masing-masing terdakwa, Enin Supriyanto dkk "*Bertarung demi Demokrasi (Kumpulan Eksepsi)*", Bandung, KOMPPAK FK3-ITB, Amarsyah "*Indonesia : Kisah tentang Sangkur dan Topi Raja*", Mohammad Jusur Hidayat "*Mengugat Rezim Anti Demokrasi*", Arnold Purba "*Biarkan Rakyat Bicara*", M. Fadjoel Rachman "*Manifesto Perjuangan Manusia Baru*", Bambang Sugianto "*Mentari Belum Lagi Terbit*", Enin Supriyanto "*Menolak Menunduk*" (Team YLBHI, *Laporan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1990*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 4).

<sup>165</sup>) Agus Basri, Andi Reza Rohadian, Bambang Soejatno, Heidi Lugito, *Demo sama Hukuman Yang Berbeda*, Tempo, 15 Januari 1994, hal. 24. Lihat juga : Tim Liputan Khusus Majalah Mahasiswa Hayamuruk, *Mengadili Imajenasi - Pengadilan Lukas - Poltak di Pengadilan Negeri Semarang*, Hayamuruk No. 3 tahun VIII/1993, UNDIP, Semarang, 1993. Mereka dituduh melakukan kegiatan yang menghasut massa agar massa tidak melaksanakan Pemilu atau tidak melakukan pemilihan atau tidak menggunakan hak pilihnya alias 'Golput'. Oleh karena perbuatannya ini, maka kedua mahasiswa semarang itu, yaitu Poltak Ike Wibowo dan Lukas Suwarso, dijerat dengan Haatzaai Artikelen yaitu Pasal 154 KUHP Pidana.

pasal-pasal peninggalan kolonial yang dipergunakan kembali dalam rangka menjerat dan menjaring pemikiran-pemikiran yang berbeda. Setelah melalui proses persidangan kurang lebih selama 5 bulan, maka Poltak Ike Wibowo dan Lukas Suwarso divonis dengan hukuman potong masa tahanan<sup>166)</sup>.

Tabel 5. Tuntutan dan vonis "Kasus 'Golput' Semarang"

Nama	Tuntutan	Put.PN	Put.PT	Put.MA
Lukas Suwarso	5 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan
Poltak Ike Wibowo	5 Bulan	4 Bulan	4 Bulan	4 Bulan

Data diambil dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

Melihat beberapa kasus penggunaan pasal-pasal Haatzaai Artikelen diatas, maka kita dapat menelaah bahwa penggunaan pasal-pasal Haatzaai Artikelen, khususnya pasal 154 KUH Pidana ini telah mengalami beberapa kali perluasan maksud dan kegunaan<sup>167)</sup>.

Dengan melihat realitas yang ada, maka dapat dilihat bahwa pada mulanya pasal-pasal Haatzaai Artikelen, khususnya pasal 154 KUH Pidana digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai macam gangguan dan hasutan atau penghinaan yang dilakukan di muka umum. Namun ketika diterapkan oleh pemerintah yang berkuasa maksud dari pasal tersebut diperluas kembali, dengan tujuan agar dapat melindungi kepentingan pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sebagai penguasa untuk menjaga kekuasaannya dan mengatur jalannya roda kekuasaan

<sup>166)</sup> Tim Liputan Khusus Majalah Hayamwuruk, *Ibid*, 'Tanggapan Jaksa Penuntut Umum' hal. 71 dan 'Vonis Golput' hal. 80.

<sup>167)</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hal. 90. Menurut Djoko Prakoso, maksud dari pasal 154 KUH Pidana ialah: Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dikalangan penduduk agar jangan sampai terkena oleh macam-macam hasutan yang berniat mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan perbuatan lainnya yang dilakukan di depan umum. Pendapat senada juga dilontarkan oleh Soesilo (*Op.Cit*): Pasal 154 s/d 157 adalah yang biasa disebut delik-delik penyebar kebencian Haatzaai Artikelen, yang maksudnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dikalangan penduduk jangan sampai kena rupa-rupa hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dsb, didepan umum atau disurat kabar.

dalam pemerintahannya<sup>168)</sup>.

Dalam kasus '21 mahasiswa' di tahun 1994 terjadi putusan yang cukup menghebohkan, sebab tidak biasanya majelis hakim pengadilan negeri menjatuhkan vonis *lebih ringan* dari apa yang dituntutkan oleh penuntut umum. Namun setelah banding, ternyata hakim tinggi menjatuhkan hukuman *menjadi lebih berat* dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum<sup>169)</sup>.

Tabel 6. Tuntutan dan vonis "21 mahasiswa"

Nama	Tuntutan	Put.PN	Put.PT	Kasasi
Yeni Rosa Damayati	18 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	Ditolak
Hendrik Sirait	18 Bulan	6 Bulan	10 Bulan	
Ferry Machus	8 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	
Wandi Tuturoong	15 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	
Andi Hartono	8 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	
Adrianto	8 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	
Tony Sinaga	8 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	
Saef Lukman	8 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	
M. Yunus	8 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	
Adi Kurniawan	18 Bulan	6 Bulan	14 Bulan	Ditolak
Suwito	10 Bulan	6 Bulan	10 Bulan	
Priyadi	8 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	Ditolak
Rifki Kholid	10 Bulan	6 Bulan	10 Bulan	
Munasir Huda	8 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	Ditolak
BM Sri Mardiana	10 Bulan	6 Bulan	10 Bulan	
Masduki	18 Bulan	6 Bulan	10 Bulan	Ditolak
Gunardi	15 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	
Anthony J Ratag	10 Bulan	6 Bulan	10 Bulan	Ditolak
M Farid Rasyad	8 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	
Teddy Wibisana	1 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	
Sunandar	8 Bulan	6 Bulan	8 Bulan	

Data diambil dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

<sup>168)</sup> *Moeljatno, Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Openbare Orde)*, hal. 15. Ini dapat kita lihat dari pendapat yang dilontarkan oleh *Moeljatno*: Berhubung dengan ini perlu juga saya ajukan apa yang ditulis oleh *Mr. Buschens* sebagai komentar pasal 154 dalam bukunya : *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Komentar yang diterjemahkan oleh R. Soesilo*, Jakarta 1950 halaman 96. Disitu dikatakan bahwa pasal tersebut sudah usang, hal mana saya tentang karena, seperti telah dikatakan di atas, pasal ini masih perlu untuk melindungi pemerintah dari perbuatan-perbuatan destruktif. Pendapat senada juga dilontarkan oleh *Satjipto Rahardjo (Petrus H. Hariyanto, (Ed), Op.Cit.*, hal. 89) : Bahwa setiap negara pasti memiliki undang-undang yang menjamin jalannya roda pemerintahan. Perundang-undangan itu memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan apabila kondisi dirasakan membahayakan kehidupan kenegaraan. Kalaupun *Kaatzaai Artikelen*, misalnya dihapus, tetap harus ada undang-undang yang menjaga negara agar tidak diruntuhkan orang.

<sup>169)</sup> *Agung Rwanantara, Roudiana Debora Sari, Pengadilan 21 mahasiswa - Dari rata-rata Menjadi tidak Sama Rata, Detik No.* 067 Tahun XVIII, 22-28 Juni 1994. Hal. 12. Menurut para terdakwa dalam kasus 21 mahasiswa ini, dirasa ada beberapa kejanggalan, sebab vonis pengadilan tinggi dijatuhkan setelah satu hari sebelumnya, terdakwa baru menerima memori banding dari Jaksa penuntut umum, sehingga seakan-akan terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membela diri, atau untuk membuat kontra memori banding. Dari putusan banding ini sebagian besar terdakwa menyatakan menerima, namun bagi *Yeni Rosa Damayanti dan Mandri Sri Martiana*, bersiap untuk menyatakan kasasi.

Setelah gerakan Gregorio Da Cunha di Timor-Timur, maka praktis untuk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa pasal-pasal dalam KUH Pidana-lah yang digunakan. Sehingga dengan demikian terhadap kasus '21 mahasiswa' yang mencoba untuk bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah digunakanlah pasal Haatzaai Artikelen sebagai senjata untuk menjaring demonstran tersebut<sup>170)</sup>. Yeni Rosa Damayanti, salah seorang demonstran yang dijaring dengan pasal 154 KUH Pidana dalam kasus 'mahasiswa 21', setelah di vonis ia segera mengajukan banding serta kasasi<sup>171)</sup>.

Setelah kasus 21 mahasiswa yang terjaring dengan Pasal-pasal Haatzaai Artikelen, maka pada tahun 1995, 1996 dan 1997, terjadi pula penjeratan-penjeratan terhadap mahasiswa dengan menggunakan pasal yang sama. Ada sebuah kecenderungan dari tindakan aparat keamanan dan ketertiban untuk mengambil 'mudahnya' saja dalam menjerat dan memidanakan para aktivis dengan pasal-pasal karet.

Pada tahun 1995, aktivis AJI, *Aliansi Jurnalis Independent*, terpaksa harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena ia dituduh mengedarkan majalah gelap tanpa SIUPP, sehingga iapun dijatuhi dengan hukum penjara. Achmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo adalah aktivis AJI dan office boy sekretariat AJI dijerat

---

<sup>170)</sup> Ging Ginanjar, Amartiwi Saleh : *Hukum Disalahgunakan*, *Tabloid Detik*, Jakarta, No. 042 tahun XVII 22-28 Desember 1993, hal. 26. Amartiwi Saleh, Mantan Direktur LBH Bandung mengutarakan kepada 'Detik': Lebih keterlaluan lagi bahwa delik politik macam Haatzaai Artikelen, penyebaran kebencian bisa masuk dalam RUU KUMP. Di Zaman Belanda saja sudah di caci-maki oleh pejuang-pejuang kita. Sekarang dimunculkan lagi. Delik politiknya memberi keleluasaan untuk menangkap orang hanya karena punya pikiran berbeda.

<sup>171)</sup> Agung Basantara dan Roudiana Deborasari, *Dari Rata-rata Menjadi Tidak Sama Rata*, *Detik* Nomor 067, Tahun XVIII, 22-28 Juni 1994, hal. 12. Lihat juga : "Mahasiswa 21" Utdara Bebas Di Penghujung Tahun, *Majalah Independen*, No. 10/1995, Edisi 10 Januari 1995, Jakarta-Bandung, hal. 20. Yeni mengatakan kepada 'Detik': Langkah yang diambil semata-mata memanfaatkan peluang untuk memperdebatkan pasal subversi dan haatzaai artikelen pada forum yang tepat. Jadi orientasi kami bukan lagi soal peringatan atau pemberatan vonis, tetapi lebih dari itu.

pula dengan Haatzaai Artikelen<sup>172)</sup>.

Pada peristiwa 27 Juli 1996, Wignyo seorang aktivis gerakan pro demokrasi, dijerat juga dengan menggunakan Pasal 154 KUH Pidana atau Haatzaai Artikelen dan juga menggunakan UU Subversi<sup>173)</sup>.

Di tahun 1996, pasca peristiwa 27 Juli, tiga orang mahasiswa kelompok pro demokrasi di Jombang dan Jawa Timur, yaitu Syamsunar, Romli, dan Misbachul didakwa dengan Pasal 154 KUH Pidana karena mereka melakukan aksi demonstrasi didepan kantor DPRD dan Bupati Jombang pada tanggal 18-20 Oktober 1995<sup>174)</sup>.

Menjelang Pemilu tahun 1997, rupanya ada juga yang harus berurusan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan karena mereka dituduh melakukan perbanyakan dan penempatan "selebaran gelap" yang isinya mendiskreditkan pemilu dan pemerintah Orde Baru. Slamet Bibit dan Faud Chafidin, keduanya adalah mahasiswa fakultas Tarbiyah IAIN Walison-go, yang terpaksa harus berurusan dengan Pasal 154 KUH Pidana atau Haatzaai Artikelen berkaitan dengan selebaran

172) Dadang Rhs dan Roy Pakpahan (Editor), Jurnal Independen Diadili - Pledoi Tiga Terpidan, Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Jurnal Independen, Jakarta, Maret 1996. Lihat juga : Article 19 (XIX) Internationale Centre Against Censorship, Pengadilan Pers di Indonesia - Kasus Aji dan Pijar, Lancaster House 33 Islington High Street London, N19 1JH, 1995. Untuk kasus Danang Kukuh Wardojo, dapat dilihat dalam buku 'Dari Celah Bui Tidurlah Akal Sehat', Diterbitkan oleh Aliansi Jurnal Independen, 1997. Informasi tentang Aliansi Jurnal Independen dapat juga dilihat dalam: David I Hill, 'Government Agencies and Industry Bodies', Op.Cit., page. 72. 'In the wake of the bans, a variety of lobby groups emerged, some community based, such as the SIUPP (Solidaritas Indonesia Untuk Pembebasan Pres-Indonesian Solidarity for Press Freedom), and others formed by workers within the industry, like the Alliance of Independent Journalists (Aliansi Jurnal Independen). On 7 August 1994, about 60 journalists, including such leading figures as Gunawan Mohamad, Fikri Jufri, Bambang Harymurti (frem Tempo), Eros Jarot (of BeTIK) Aristides Katoppo (formerly Sinar Harapan), Christato Wibisono (media analyst and columnist) and Arief Budiman (academic and columnist), established the Alliance by signing the Sirna Galih Declaration, which stated 'we reject all kinds of interference, intimidation, censorship and media bands which deny freedom of the speech and open the access to information' since 'freedom of speech, access to information and the freedom of association...[are] the basic right of citizens.'

173) Anonim, Peristiwa 27 Juli 1996 Gerakan Pro Demokrasi di Gebuk, Human Rights Watch/Asia, Tanpa Kota, Oktober 1996, hal. 100.

174) Zed Abidien, "Jaring Haatzaai Buat Demontran", Detektif Romantika, 28 September 1996., hal. 60-61. Mereka ditangkap, ditahan, diperiksa dan dipidana karena mereka berdemonstasi sembari melontarkan kata-kata "Dandim, Kapolres, Bupati, Mundur", "Bupati, Buruh bukan tumbal pembangunan" dan "ABRI seharusnya melindungi kok malah Nggebuki". Akibat demostrasi yang dilakukan di tahun 1995 itu, maka di tahun 1996, pasca peristiwa 27 Juli, ketiga-nya diperiksa dan disidangkan untuk memper-tanggungjawabkan perbuatannya.

gelap yang ditempelkannya<sup>175)</sup>.

Beberapa gerakan mahasiswa yang dituduh dan dipidana dengan menggunakan Pasal 154 KUH Pidana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Tuduhan terhadap gerakan mahasiswa dengan menggunakan Pasal 154 KUH Pidana :

Tahun	Nama Kasus	Keterangan Pelaku
1989	Selebaran Gelap daftar kekayaan keluarga Presiden Soeharto	- Bambang Beathors Suryadi
1989	Aksi 5 Agustus 1989 di ITB Bandung	- Ammarsyah - Jumbuh Hidayat - Arnold Purba - Fajroel Rahman - Enin Supriyanto - Bambang Suprihanto
1992	Golongan putih di Semarang	- Lukas Suwarso - Poltak Ike Wibowo
1993	Stiker SDSB menghina presiden - Dakwaan menjadi Pasal 154	- Nuku Sulaeman
1994	Aksi unjuk rasa 21 mahasiswa	- Yeni Damayanti - Hendrik Sirait - Ferry Machus - Wandi Tuturoong - Andi Hartono - Adrianto - Tony Sinaga - Saef Lukman - M. Yunus - Adi Kurniawan - Suwito - Priyadi - Rifki Kholid - Munasir Huda - BM Sri Mardiana - Masduki - Gunardi - Anthony J Ratag - M Farid Rasyad - Teddy Wibisana - Sunandar
1996	Demonstrasi buruh (1985) baru diadili pasca 27 Juli 1996	- Syamsunar - Romli
1997	Selebaran gelap Golput	- Misbachul - Slamet Bibit - Faud Chafidhin

Data diambil dari dari berbagai sumber, dan diolah kembali berdasarkan permasalahan.

<sup>175)</sup> Hadi Sasono, "Yang Tersandung Selebaran Gelap Pemilu", Lembar Yustisia, Suara Merdeka, Sabtu 15 Maret 1997, hal. 1

Dari tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa ada beberapa aktivis gerakan mahasiswa yang dijerat dengan menggunakan Haatzaai Artikelen-Pasal 154 KUH Pidana dan beberapa kasus lainnya dengan menggunakan UUPK Subversi. Dan dari uraian tersebut, maka kita telah memiliki gambaran tentang Haatzaai Artikelen, UUPK Subversi serta penerapannya pada para aktivis gerakan mahasiswa.

Kecenderungan aparat keamanan dan ketertiban untuk menggunakan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi sebagai sarana pidana untuk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa, telah membentuk sebuah konstruksi sosial bahwa perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut telah dikonstruksikan oleh penguasa sebagai sebuah kejahatan politik, karena Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi identik dengan perbuatan delik politik.

Bentuk pemaparan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi sebagai delik politik yang diterapkan kepada para aktivis gerakan mahasiswa tidak lain merupakan sebuah produk kekuasaan yang akan membawa kepada bentuk pemahaman terjadinya kriminalisasi perbuatan-perbuatan tertentu sebagai sebuah kejahatan politik berdasarkan konflik kepentingan-kepentingan tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelaahan kriminologi kritis terhadap kriminalisasi perbuatan aktivis gerakan mahasiswa sebagai sebuah kejahatan politik, akan menunjukkan bahwa penggunaan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi adalah produk kekuasaan yang bermaksud melindungi sebuah kepentingan tertentu.

Dari uraian-uraian tersebut, maka sedikit banyak kita telah memiliki gambaran tentang Haatzaai Artikelen, pasal-pasal yang dianggap termasuk pasal Haatzaai Artikelen dan peristiwa-peristiwa yang pernah di jaring oleh pasal-pasal tersebut.

### C. Reintegrasi Hukum, Politik dan Teori Sosial dalam Kriminologi Kritis Menuju Hukum yang Responsif

Dalam kajian ini, penulis mencoba untuk mengkaji gerakan mahasiswa sebagai hasil pemberdayaan manusia melalui proses pembelajaran dan pemahaman mereka yang didapat melalui informasi. Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh kelompok-kelompok tertentu (tidak menutup kemungkinan oleh orang-orang tertentu) keberadaannya ternyata cukup diawasi dan diwaspadai oleh penguasa, karena gerakan mahasiswa sebagai sebuah realitas sosial dianggap cukup memiliki potensi dalam menggerakkan massa<sup>176)</sup>.

Guna memahami realitas sosial tersebut, bentuk pemahaman terhadap aspek hukum saja tidaklah cukup dapat untuk menjelaskan secara mendasar realita yang ada. Oleh karena itulah diperlukan bentuk pemahaman baru yang melibatkan aspek-aspek ilmu sosial lainnya, dalam upaya menjelaskan realitas sosial yang ada secara lebih mendalam<sup>177)</sup>.

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengatakan bahwa dalam duapuluh tahun terakhir ini, akan dapat dilihat kebangkitan kembali minat penelitian yang kuat terhadap lembaga-lembaga hukum. Khususnya tentang bagaimana hukum itu bekerja, bagaimana pengaruh kekuatan non hukum terhadap hukum, dan bagaimana kekuatan non hukum membatasi hukum dan

---

<sup>176)</sup> Dari realita inilah, maka keberadaan gerakan mahasiswa selalu cenderung untuk dicurigai dan diwaspadai sebagai sebuah bentuk gerakan massa yang menyimpang (*deviant*). Aparat keamanan dan ketertiban yang menangani langsung gerakan massa yang dilakukan oleh mahasiswa terlihat lebih banyak melakukan tindakan represif, tanpa melihat akar permasalahan yang sebenarnya mengapa gerakan massa itu timbul. Aparat keamanan dan ketertiban melihat gerakan massa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai sebuah realita yang menyimpang, sehingga mereka beranggapan perlu melakukan penanganan yang lebih represif. Namun apakah benar realita tersebut menunjukkan akar permasalahan yang sebenarnya, sebab selama ini orang lebih banyak melihat aksi yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan ketimbang menemukan, memahami dan menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya.

<sup>177)</sup> Philippe Nonet, Philip Selznick, 'Jurisprudence and Social Science' dalam Law and Society in Transition Toward Responsive Law, Harper Colophon Books, Harper and Row Publisher, New York, 1978.



potensialitasnya<sup>178)</sup>.

Sejak tahun 1950-an terjadi perubahan minat yang cukup besar terhadap ilmu-ilmu sosial, mereka mendukung dan menaruh harapan terhadap generasi yang lebih dahulu ada, agar generasi yang lebih dahulu ada tersebut mau mengemukakan alasan dan memberikan solusi yang tepat untuk membuka kerterkungkungan (*ketertutupan*) hukum sebagai sebuah tertib hukum<sup>179)</sup>.

Dengan demikian sejak saat itu ada sebuah program baru yang merefleksikan kedua bidang tersebut (*hukum dan ilmu sosial*) dalam satu bentuk kajian. Program baru ini mencoba melakukan perluasan dan pegabungan antara prespektif ilmu hukum yang telah ada dengan metoda dan analisis yang kerap digunakan oleh ilmu pengetahuan sosial. Tindakan ini dilakukan dengan harapan bahwa dari pegabungan kedua ilmu pengetahuan ini (*hukum dan ilmu sosial*), diharapkan akan dapat lebih memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya penelaahan terhadap proses administrasi peradilan<sup>180)</sup>.

Para ilmuwan tersebut memprediksikan bahwa problema hak-hak sipil, kemiskinan, kejahatan, protes massa, mening-

---

<sup>178)</sup> *Ibid*, hal. 1, 'The past twenty years have seen a strong revival of interest in legal institutions - how they work, the forces that impinge upon them, their limits and potentialities'.

<sup>179)</sup> *Ibid*, Mereka melakukan pendekatan yang nyata terhadap hukum, yaitu tentang bagaimana hukum itu dibuat, bagaimana sebuah putusan itu dijatuhkan, bagaimana sebuah kebijakan itu diambil dan bagaimana kebijakan regulasi itu diambil secara mudah dengan memisalkannya dari realita pengalaman sosial (*realities of social experience*) serta dari peradilan yang ideal itu sendiri (*ideal of justice itself*). Jadi di tahun 1950-an kebangkitan terhadap ilmu-ilmu sosial berkembang dengan sebuah pemahaman baru.

<sup>180)</sup> *Ibid* hal. 1-2, 'Suddenly "law and society" became a topic of the first importance, posing problems far beyond the competence of its votaries to meet or even comprehend'. Pembahasan atas berbagai masalah yang ada ini dimulai ketika para profesor ilmu hukum, ilmuwan sosial dan para pejabat yayasan penyelenggara program baru ini berbicara dalam sekup pembicaraan yang sangat luas. Dalam agenda sidang tersebut, pembicaraan tentang politik dan peradilan menempati posisi yang diutamakan, sehingga perhatian massa lebih banyak terfokus kepada permasalahan politik dan peradilan. Setelah melalui beberapa perdebatan, maka akhirnya, pembicaraan yang membahas keberadaan '*Hukum dan Masyarakat*' menjadi sebuah topik utama yang amat penting, disamping pembahasan berbagai macam permasalahan yang berkaitan secara erat dengan topik tersebut dan akan melakukan pendekatan terhadap topik tersebut secara lebih komprehensif.

katnya urbanisasi, kerusakan ekologi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah sebuah masalah yang akan menjadi sebuah permasalahan sosial yang paling penting dan paling mendesak untuk segera dibahas<sup>181)</sup>.

Kompleksitas subjek permasalahan yang ada dalam topik tersebut dan suasana pertemuan yang tegang membuat suara dan sudut pandang pembicaraan menjadi tidak sepaham. Disatu sisi ada orang atau kelompok yang melihat dan menginginkan agar hukum tetap berada diluar bagian-bagian non hukum lainnya (*secara parsial-terpisah atau tetap berada dalam kajian aspek hukum itu sendiri*), sedangkan disisi yang lain ada orang atau kelompok lainnya yang menginginkan dan memandang bahwa hukum merupakan bagian integral serta tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek non hukum lainnya (*partisan prespective*)<sup>182)</sup>.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick ilmu hukum selalu memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai disiplin ilmu. Konsep abstrak tentang kewajiban hukum, berbicara mengenai perbedaan pemahaman tentang bagaimana hukum itu bekerja dan bagaimana hukum itu digunakan. Pandangan filosofi (*termasuk didalamnya kritik terhadap positivisme*) dan rangkaian analisis (*termasuk didalamnya perbedaan antara peraturan dan prinsip-prinsip yang digunakan*) adalah sarana

---

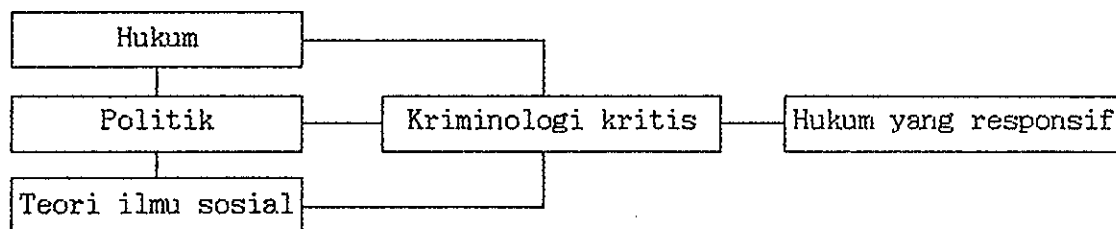
<sup>181)</sup> Ibid, 'Civil rights, poverty, crime, mass protest, urban riots, ecological decay, and the abuse of power gathered unprecedented urgency as social problems'.

<sup>182)</sup> Ibid, Keadaan ini menimbulkan kondisi yang sulit untuk menentukan sudut pandang yang koheren terhadap hukum. Memang penyatuan pandangan dalam hal intelektual adalah diperlukan, paling tidak untuk dijadikan acuan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat dan sebagai sarana pendidikan kepada masyarakat. Hal ini juga penting warga negara lainnya, termasuk didalamnya adalah para praktisi hukum agar mereka dapat memahami kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam sebuah sistem dan beban kepentingan nilai-nilai yang ada. Hal ini juga amat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri, dimana hal ini amat dihargai sebagai sebuah kerangka menuju pemahaman hukum yang utuh melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial. Kendati demikian integritas pemahaman terhadap hukum tetap saja akan memiliki sudut pandang yang parsial. Pandangan ini untuk mencoba untuk mengetengahkan sebuah pemahaman baru yang merupakan hasil dari sebuah sintesis. Kita percaya bahwa sintesis akan dapat dicapai, jika studi empirik terhadap hukum dipergunakan kembali dan dilanjutkan dengan pemahaman kritis terhadap ilmu hukum yang klasik.

implisit untuk melakukan diagnosa terhadap kesulitan-kesulitan yang timbul dan menimpa hukum<sup>183)</sup>.

Solusi yang dilontarkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick untuk membuat ilmu hukum menjadi lebih relevan dan lebih hidup, ialah dengan melakukan reintegrasi antara hukum, politik dan berbagai teori dalam ilmu sosial lainnya<sup>184)</sup>.

Bagan 3. Skema reintegrasi hukum, politik dan teori ilmu sosial dalam kriminologi kritis menuju hukum yang responsif.



Dalam kajian ini, perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa oleh penguasa dilihat sebagai sebuah perilaku yang menyimpang dan pada umumnya perbuatan tersebut dijaring oleh penguasa melalui hukum pidana sebagai sebuah kejahatan, bahkan dalam batas-batas tertentu perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut diidentikkan sebagai sebuah kejahatan politik. Untuk memahami perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut serta apa yang menjadi latar belakang pemikiran mereka, penggunaan ilmu sosial lainnya disamping ilmu hukum amatlah dibutuhkan.

Ilmu sosial yang banyak membantu ilmu hukum, khususnya

183) *Ibid*, hal. 2-3. Ini bukan berarti bahwa teori hukum yang ada tidak mampu menjelaskan terhadap berbagai permasalahan dan realitas sosial. Tetapi apabila kita mau melihat bagaimana hukum itu bekerja, maka kita juga harus memahami bagaimana proses hukum itu terjadi, dimana hukum itu dibuat dalam sebuah masyarakat dan dalam kondisi yang bagaimana hukum tersebut dicetuskan.

184) *Ibid*, hal 3-4, 'To make jurisprudence more relevant and more alive, there must be a reintegration of legal, political and social theory'. Dalam tahapan ini, kita harus memperhatikan masalah-masalah hukum ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan sosial. Kemudian untuk memahaminya kita mengajukan kerangka kerja dengan membandingkan masing-masing penalaran tersebut (penalaran dari bidang hukum dan penalaran dari bidang ilmu sosial yang di-reintegrasikan) untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.

hukum pidana dalam upayanya melakukan pendekatan dan memahami sebuah perilaku yang menyimpang tidak lain adalah sosiologi dan kriminologi<sup>185</sup>). Namun sejauh mana sosiologi dan kriminologi itu dapat difungsikan sesuai kebutuhan tergantung pada penggunaan sosiologi dan kriminologi tersebut, serta dari sudut pandang sosiologi dan kriminologi yang mana yang digunakan untuk menganalisis perilaku yang menyimpang tersebut secara tepat dan mendekati<sup>186</sup>).

Ian Taylor, Paul Walton dan Jock Young yang mengutip pendapatnya Edwin M. Schur tentang pendekatan sosiologi dan kriminologi terhadap kejahatan, perilaku menyimpang di masyarakat dan permasalahan sosial mengemukakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh sosiologi dan kriminologi terhadap kejahatan, perilaku yang menyimpang dan permasalahan sosial adalah jauh lebih luas dan lebih tajam apabila dibandingkan dengan melakukan pendekatan yang hanya terpaku pada pendekatan legalistis dan positivis<sup>187</sup>).

Perkembangan kajian kriminologi, sebenarnya tidak dapat

---

185) Erich Goode, 'Contemporary Sociological Theories of Deviance', dalam *Deviant Behavior*, Prentice Hal, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1984, hal. 44. Banyak orang dan masyarakat awam memandang bahwa penggunaan sosiologi dan kriminologi tidak lebih hanya sebagai alat bantu dalam sebuah skema besar analisis. Ia hanya berfungsi bila difungsikan dan diperlukan keberadaannya, padahal diluar itu semua, sebenarnya kerangka pemikiran sosiologi dan kriminologi yang ada senantiasa bekerja untuk selalu melakukan analisis. Bahkan apabila difungsikan secara tepat dan benar, maka hasil yang akan diperoleh akan jauh lebih tajam.

186) Untuk memahami sebuah perilaku yang menyimpang (deviant behavior), maka Erich Goode membagi ke dalam dua kelompok besar teori tentang perilaku yang menyimpang. Pertama kelompok teori tradisional (traditional theories of deviance), terdiri dari: free will, the positive school, social pathology, social disorganization and chicago school, functionalism, anomie theory dan differential association. Sedangkan kelompok kedua ialah kelompok teori sosiologi kontemporer (contemporary sociological theories of deviance), terdiri dari: (1) Labelling Theory yang terdiri dari: labelling theory: the precursors, labelling theory: the main points, criticism of labelling theory. (2) Conflict Theory yang terdiri dari: conflict theory: Marxism, Marxist criminology: criticism, non-Marxist conflict theory. (3) Positivism: Causal Analysis yang meliputi juga criticism of positivism.

187) Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young, 'Social reaction, deviant commitment and career', dalam *The New Criminology: For a Social Theory of Deviance*, International Library of Sociology edited by John Rex, Routledge and Kegan Paul, London and Boston, 1973, hal. 140. The approach is part of a larger in criminology dan sociology against the legacy of positivistic or absolutist notions of crime, deviance and social problems. The approach rejects those genetic, psychological or multifactoral accounts of crime and deviance which stress the absolute nature of the causes of criminality or deviation. It usually, but not necessarily, rejects the standard sociological structure-functional approach to such questions, and in its examination of the social processes giving rise to deviation it asks 'deviant to whom?' or 'deviant from what?'

dilepaskan dengan keberadaan hukum pidana dan sosiologi hukum itu sendiri. Seiring perjalanannya kriminologi, hukum pidana dan sosiologi hukum memiliki lahan kajian yang saling berkaitan, sehingga tidaklah mengherankan apabila dengan memfungsikan keberadaan ketiga kajian ini secara komprehensif dan integral akan didapatkan sebuah pemahaman yang jauh lebih mendekati kepada sebuah kebutuhan senyatanya dan realita yang ada<sup>188)</sup>.

Pengkajian secara interdisipliner membuat sebuah kajian akan memiliki sebuah analisis yang komprehensif. Ia tidak hanya terpaku pada satu disiplin dan satu pisau analisis saja, tetapi ia akan selalu mengkaitkannya dengan berbagai disiplin ilmu dalam bidang yang berkaitan, sehingga kajian yang dihasilkannya akan menjadi semakin *komprehensif dan terintegralisasi*. Pengkajian secara interdisipliner membuat kajian hukum pidana dan kriminologi menjadi kehilangan batasan-batasannya yang baku. Ia tidak lagi mengkaji hukum dan kriminologi secara normatif namun berkembang kearah pemahaman yang komprehensif serta integral. *Komprehensif karena ia mencoba melakukan pepaduan analisis dari berbagai bidang ilmu yang terkait, integral karena kajian yang dilakukannya menyatukan dan saling melengkapi berbagai disiplin ilmu untuk mengupas obyek yang akan diteliti dan dianalisis*<sup>189)</sup>.

---

<sup>188)</sup> Mulyana W Kusumah, 'Realitas Sosial Kejahatan', dalam *Prisma: Manusia dan Kejahatan*, 5 Mei 1982, LP3ES, Jakarta, hal. 3-9, ia mengutip pendapatnya William J. Chambliss bahwa "kejahatan adalah gejala hukum, politik, ekonomi dan sosial yang benar-benar kompleks yang harus sistematis dipelajari dari banyak segi". Pemahaman yang interdisipliner terhadap sebuah kajian, keberadaannya kini mutlak dibutuhkan. Kita tidak dapat mengkaji sebuah permasalahan secara terpisah dari bidang kajian lainnya. Pemahaman yang konservatif terhadap sebuah bidang kajian, bahwa ilmu hanya untuk ilmu (*imanensi*) dan hanya terbatas serta membatasi untuk lingkungan sendiri, sudah tidak dapat lagi dikembangkan kajiannya. Sebab selain ia hanya akan menjadi 'seekor katak dalam tempurung' ia juga tidak akan menghasilkan sesuatu pemecahan yang berguna.

<sup>189)</sup> Lihat kembali pemaparan yang dikemukakan oleh Taylor, Walton dan Young, tentang *multi-factoral accounts of crime and deviance*, dalam *The New Criminology for a Social Theory of Deviance*, hal 139 - 171, yang menunjukkan bahwa dalam mengkaji sebuah '*deviant behaviour*' tidak dapat hanya menggunakan satu perangkat saja, sebab banyak segi serta faktor yang membuat terjadinya suatu penyimpangan, sehingga bahan untuk mengkajinya-pun diperlukan kajian yang interdisipliner dan multidimensional.

Pengkajian yang interdisipliner membuat kajian ini menyertakan pula keikutsertaan aspek politik sebagai sebuah aspek yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Aspek politik akan ditunjukkan memiliki pengaruh secara timbal balik terhadap sesuatu hal yang menyebabkan sebuah perilaku menjadi menyimpang. Sebaliknya pula perilaku yang menyimpang akan memiliki pengaruh terhadap keberadaan kondisi politik yang ada<sup>190)</sup>.

Dengan pengkajian yang interdisipliner, pengkajian terhadap fenomena sosial yang ada akan menjadi semakin tajam, ia tidak hanya akan memberikan penjelasan teoritik terhadap perilaku menyimpang yang 'nampak dipermukaan' tetapi mencoba mencari dan memahami 'akar permasalahan' yang sebenarnya agar dapat dipahami dan dapat dengan segera ditemukan pemecahannya<sup>191)</sup>.

Penggunaan ilmu sosial lainnya sebagai upaya untuk membantu memahami proses bekerjanya hukum dapat dilakukan dengan bantuan sosiologi atau sosiologi hukum<sup>192)</sup>.

Mengapa kita mempergunakan sosiologi untuk membantu memahami sebuah realitas sosial, karena jika kita mencoba berfikir dalam konteks pemikiran sosiologi, kita akan selalu mencoba mempertanyakan sebuah realita. Sikap yang selalu mencoba untuk mempertanyakan sebuah realita inilah

---

190) Mulyana W. Kusumah, Loc.Cit. Pengaruh timbal balik ini menunjukkan adanya dominasi kepentingan-kepentingan tertentu dalam mengendalikan sebuah kekuatan, hanya sejauh mana kekuatan itu mampu mengendalikan tergantung pada sejauh mana ia mampu memegang aspek politik secara terpadu dan menggunakannya secara tepat. Lihat Juga: Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung, 1983, hal. 18-19.

191) Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990, hal. 8.

192) Richard Quinney, 'Sociological Jurisprudence', dalam Criminology: Analysis and Critique of Crime in America, Little Brown and Company, Boston Toronto, 1975, hal. 33-35. Menurut Mulyana W. Kusumah, yang mengutip William Evans, menyebutkan bahwa terdapat tidak kurang dari enam perspektif yang tumbuh dalam sosiologi hukum, yaitu: teori behavioralist, teori yurisprudential, teori fungsionalis, teori konflik, teori sosialisasi dan teori sistem. Mulyana W. Kusumah, 'Perspektif dan Teori Tentang Konteks Sosial Hukum', dalam: Mulyana W. Kusumah, Paul S. Bant (editor), Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, YLBRI, Jakarta, 1988, hal. 22. Lihat Juga: Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977, hal. 45-47.

yang oleh Nietzsche dikatakan sebagai sebuah 'seni kecurigaan' (*the art of mistrust*)<sup>193</sup>).

Penggunaan sosiologi hukum menurut Donald Black adalah bukan untuk mempelajari manusia dalam pengertian yang biasa, tetapi ia mempelajari hukum sebagai sebuah sistem perilaku. Dengan pemahaman yang demikian, hukum dapat dipahami secara ilmiah sebagai suatu realitas sosial dalam kebenarannya sendiri<sup>194</sup>).

Penggunaan sosiologi hukum untuk memahami sebuah realitas sosial dalam kajian hukum pidana dikenal dengan sosiologi hukum pidana (*sociology of criminal law*). Menurut Richard Quinney<sup>195</sup>), ada beberapa bentuk penelitian kriminologi yang menjadi dasar bagi sosiologi hukum pidana, walaupun pada awalnya sosiologi telah memberikan bentuk kerangka penelitian yang empirik bagi kriminologi<sup>196</sup>).

Sosiologi hukum pidana digunakan untuk menjelaskan tentang keberadaan sebuah 'legal order' dan pembentukkannya. Dengan menggunakan pemahaman konstruksi sosial yang ditemukannya dari pendekatan etnometodological, sosiologi hukum pidana mampu menjelaskan tentang bagaimana sebuah

---

193) Peter L. Berger (Terjemahan: Daniel Dhakidae), *Humanisme Sosiologi*, Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1985, hal. 46-47.

194) Donald Black, 'The Boundaries of Legal Sociology', dalam *The Social Organization of Law*, Donald Black, Maureen Mileski (editor), Seminar Press INC, New York, 1973, hal. 52. 'A pure sociology of law does not study humans in the usual sense. It studies law as a system of behaviour. Taken in this sense, law feels nothing. It has no joy or sorrow or wonderment. Scientifically conceived as a social reality in its own right'.

195) Richard Quinney, 'Sociology of Criminal Law' dalam *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America*, Little Brown and Company, Boston Toronto, 1975, hal. 36-37. 'from recent research in criminology form the basis for the sociology of criminal law, which has gathered a body empirical research in a relatively short time'.

196) Hengkie Liklikuwata, 'Sosiologi Hukum Pidana Sebagai Bagian Kriminologi', dalam *Sosiologi Hukum Pidana Kejahatan dan Penjahat*, Ind-Hillco, Jakarta, 1990, hal. hal. 5, mengutip dari Edwind. H Sutherland, *Principles of Criminology*, Edisi ke-6, J.B. Lippenscott Company, 1955, hal. 3. Dalam kaitannya antara sosiologi hukum pidana dan kriminologi, maka Sutherland mengutarakan: *Criminology consist of three principal division as follows: a. The sociology of law, which is a attempt at scientetific analisys, of the condition under which criminal law, develop and which is seldom included in general books of criminology. b. Criminal etiology which is an attempt at scientific analisys of the causes of crime and, c. Penology which is concerned with the control of crime.*

peraturan yang ada dalam hukum pidana tersebut dibuat dan dikonstruksikan oleh penguasa sebagai sebuah kenyataan yang mengikat<sup>197)</sup>.

Namun demikian pemaparan yang dikemukakan oleh sosiologi hukum pidana memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut ialah bahwa sosiologi hukum pidana tidak dapat melakukan kritik kepada '*legal order*' yang dibentuk oleh penguasa dan masyarakatnya. Sosiologi hukum pidana tidak dapat melepaskan diri dari bentuk ideologi yang ada serta tidak dapat mempertanyakan secara kritis tentang '*legal order*' yang ada. Sosiologi hukum pidana hanya mampu mengungkap dan menjelaskan tentang keberadaan sebuah peraturan, namun tidak mampu mempertanyakannya secara kritis<sup>198)</sup>.

Untuk memahami secara kritis (*critical understanding*) dan dapat mempertanyakan sebuah '*legal order*' Richard Quinney mengajukan empat (4) buah metode untuk melakukan penelitian<sup>199)</sup>. Metode penelitian inipun dapat digunakan untuk memahami secara kritis sebuah kejahatan atau perilaku yang dianggap menyimpang dalam kajian kriminologi<sup>200)</sup>.

Keempat metode penelitian yang diajukan oleh Quinney

197) Richard Quinney, *Loc.cit.* 'Social constructionist thought, as found in ethnomethodological studies, may suggest that the administration of criminal law requires that those in position of power construct a reality'.

198) *Ibid.*, 'a sociology of criminal law cannot break out of the ideology of age and ask critical questions about the legal order. It can only confirm the existing order'. lihat juga : Donald Black, *Op.cit.*, hal. 42, Ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa literatur sosiologi hukum adalah literatur yang borjuis, liberal, pluralis dan melioris. Pandangan tersebut menganjurkan agar ilmu sosiologi yang ada agar menjadi lebih radikal. Hal ini diperlukan, agar pandangan sosiologi menjadi lebih kritis dalam mengungkapkan sebuah realita dan menjadi lebih berani dalam menyampaikan saran-sarannya (He went on to argue that a more radical sociology is required, one that is "more critical in its premises and farther-reaching in its proposals").

199) Richard Quinney, 'Crime Control in Capitalist Society: A Critical Philosophy of Legal Order', dalam *Critical Criminology, Loc.cit.* 'I will present the four modes of thought as follow: (1) the positivistic, (2) the social constructionist, (3) the phenomenological and (4) the critical. My objective is to develop a critical philosophy of legal order'

200) Richard Quinney, 'Research Methods and Modes of Inquiry', dalam *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America, Loc.cit.* 'Furthermore, each mode of inquiry is specifically related to the American order. They are: (1) the positivistic, (2) the social constructionist, (3) the phenomenological, and (4) the critical. From the last we will develop a critical theory of crime'.



ialah: *positivistik*, *konstruksi sosial*, *fenomenologi* dan *kritis*. Keempat metode penelitian ini dapat digunakan untuk memahami dan membangun secara kritis filosofi '*legal order*' (*develop a critical philosophy of legal order*) maupun untuk membangun secara kritis teori tentang kejahatan (*develop a critical theory of crime*).

Memasuki kajian kriminologi terhadap pemahaman '*perilaku menyimpang*' (*deviant behaviour*) konsep pemahaman '*deviance*' atau '*penyimpangan*' menurut I.S Susanto adalah merupakan hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi yang secara umum dinyatakan dengan digunakannya konsep '*penyimpangan*' (*deviance*) dan reaksi sosial<sup>201</sup>).

Alvin W. Gouldner dalam kata pengantarnya di buku '*New Criminology : For A Social Theory of Deviance*' mengatakan bahwa keberadaan studi kriminologi merupakan sebuah bentuk pemahaman yang kritis (*critical understanding*) terhadap masyarakat dengan bentuk pengkajian teori sosial yang lebih luas. Menurut Gouldner, pandangan para penganut *The New Criminology* terhadap perilaku yang menyimpang (*deviant behaviour*) adalah normal. Hanya saja sejauh mana penyimpangan itu dapat ditolerir atau diberikan reaksi sosial bergantung pada kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya secara relatif. Untuk memahaminya Gouldner mengupayakan untuk mengkaji secara kritis perilaku menyimpang dalam kelompok tersebut, berdasarkan pemahaman sosiologi dan filosofi yang hidup di masyarakatnya. Pendekatan kritis yang dilakukan dalam kriminologi akan memberikan pemahaman yang lebih tajam

---

<sup>201</sup> I.S Susanto, '*Aliran-aliran Pemikiran dan pengaruhnya - Kriminologi Kritis*', dalam *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hal. 9. Lebih lanjut I.S Susanto memandang bahwa: Kejahatan dipandang sebagai bagian dari '*penyimpangan sosial*' dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan '*berbeda*' dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai normal atau '*biasa*' di masyarakat dan terhadap '*tindakan menyimpang*' tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai '*berbeda*' dan '*jahat*'. Dengan demikian siapa yang dipandang menyimpang pada masyarakat tertentu terutama tergantung pada masyarakat itu sendiri.

dan terarah, baik terhadap masyarakat yang lebih luas maupun dalam pembangunan dasar teorinya. Pemahaman ini tidaklah sederhana, karena apa yang diperhatikan dan dianalisis dilapangan haruslah dibatasi sesuai dengan fakta yang ada<sup>202)</sup>.

Ada beberapa pemahaman baru yang dapat dipergunakan untuk mengupas secara terbuka tentang 'perilaku yang menyimpang' dan realitas sosial kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pemahaman ini dalam bidang hukum dan kriminologi dikenal dengan pemahaman kritis<sup>203)</sup>. Namun diantara para pakar hukum dan kriminologi keberadaan pemahaman kritis hukum dan kriminologi belum memiliki kesepakatan yang bulat.

Dalam pemahaman hukum kritis (*critical legal studies*) dikatakan bahwa pemahaman hukum secara doktriner akan mengalami berbagai kesulitan yang mendasar dalam menjelaskan sebuah fenomena sosial secara utuh. Pemahaman hukum yang doktriner akan melakukan penolakan terhadap berbagai penjelasan-penjelasan non hukum, khususnya dari bidang politik, sejarah dan penjelasan sosial lainnya. Allan C. Hutchinson<sup>204)</sup>, dalam bab pendahuluannya di buku '*Critical Legal*

---

202) Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young, 'Foreword', dalam *The New Criminology: For A Social Theory of Deviance*, Loc.cit, hal. x. Here, then the proper study of criminology is made throughly clear: it is the critical understanding of both the larger society and of the broadest social theory; it is not simply the study of some marginal, exotic or esoteric group, be they criminals or criminologist. This study, of what at first seems to be a limited field, is in point of fact, the occasion for the exhibition of the broadest sociological and philosophical concerns. Dari pemahaman tentang 'deviance' tersebut, maka dapat dilihat bahwa untuk mengkaji sebuah realitas sosial, khususnya 'perilaku menyimpang' atau 'penyimpangan sosial' yang terjadi di masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pendekatan dan analisis secara legistis-formalistis hukum pidana saja. Namun diperlukan beberapa pandangan yang jauh lebih tajam dari sekedar pemahaman 'perilaku menyimpang (secara normatif)' yang diberikan oleh hukum pidana.

203) Sisandjuntak B, Chidir Ali, 'Kriminologi Sebagai Kritisme Sosial', dalam *Cakrawala Baru Kriminologi (Suatu Konsep Dialog)*, Tarsito, Bandung, 1980, hal 131-132. Pemahaman kritis atau pemahaman radikal tentang kriminologi, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh munculnya aliran sosiologi kritis atau sosiologi radikal, sehingga diakhir tahun 60-an aliran kriminologi kritis muncul sebagai perwujudan atas sikap menentang pemerintahan absolut yang cenderung korup di Amerika Serikat, Eropa, Asia dan Afrika. (*Ibid*, hal. 18).

204) Allan C. Hutchinson (Editor), 'Introduction', dalam *Critical Legal Studies*, Rowman and Littlefield Publisher, Inc., New Jersey, 1989, hal. 4. The CLS (Critical Legal Studies) claim of indeterminacy and contradiction do not simply penetrate legal doctrine and theorizing; they go to the very heart of liberal democratic politics. Doktrinal indeterminacy as a localized illustration of the bankruptcy liberal theory and practice. The ailing corpus of black-letter legal theory can not be made good by injecting a dose of black-letter political theory.

*Studies'* mengutarakan bahwa pengkajian terhadap studi hukum kritis, memang boleh dikatakan agak sedikit ketinggalan ketimbang perkembangan studi kriminologi kritis. Menurut Hutchinson, pada awalnya para pendiri studi hukum kritis berasal dari para mahasiswa yang bergerak dalam bidang gerakan perjuangan hak-hak sipil dan melakukan gerakan anti perang Vietnam di tahun 1960-an. Namun dalam perkembangannya kemudian, mereka mulai melakukan pengembangan pemahaman terhadap studi hukum dan melakukan kajian teoritical yang melihat pada praktek untuk membangun sebuah teori yang mantap<sup>205</sup>).

Setelah melalui beberapa diskusi secara ketat, Kelompok studi hukum kritis secara resmi dilahirkan pada musim semi tahun 1977 di Universitas Wisconsin. Para anggotanya terdiri para staf pengajar bidang hukum, pengacara, ilmuwan sosial dan mahasiswa hukum. Mereka berkeinginan agar dengan adanya studi hukum kritis keadaan hukum akan menjadi lebih baik dan lebih egaliter<sup>206</sup>). Studi hukum kritis (CLS) tidak hanya mendasarkan pada pemahaman teori-teori doktiner belaka, sehingga teori yang muncul menjadi teori hasil pengujian lapangan dan berkembang lapangan<sup>207</sup>).

---

<sup>205</sup>) *Ibid*, hal. 2. 'CLS (Critical Legal Studies) recognizes these activist roots as the energy source of much of its theoretical endeavor-nothing is as good theory'. Di awal tahun 1970-an studi hukum kritis (radikal) mulai menemukan kajiannya dengan menempatkan hukum dimasyarakat, khususnya dengan melakukan kajian pemahaman 'perilaku empiris (empirico-behaviourist)'.

<sup>206</sup>) *Ibid*, hal. 2-3 'CLS (Critical Legal Studies) People work toward a world that is more just and egalitarian'. Tujuan dari para pendiri dan anggota Studi hukum kritis adalah mengembangkan pemahaman keterkaitan antara hukum dengan masyarakat, saling berkaitan dan menyatu menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. (Hutchinson, *Ibid*, hal. 7). Studi hukum kritis memang menampilkan sisi yang agak berbeda dengan studi hukum yang konvensional. Mereka melakukan pengkajian berdasarkan teori yang ada, diuji dengan penerapan praktek lapangan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengembangan teori berdasarkan batu uji yang ada lapangan (praktek).

<sup>207</sup>) Kermit L. Hall, William M. Wiechek, Paul Finkelman, 'Critical Legal Studies: An Introduction to Its Origins and Underpinnings - 1986', dalam *American Legal Histories: Cases and Material*, Oxford University Press, New York, 1991, hal. 552-553. Menurut Mark Tushnet, salah seorang anggota pendiri 'Critical Legal Studies' mengemukakan bahwa: CLS accepts the critical aspect of Legal Realism but challenges its constructive program. Because it does so by using critical techniques developed by the Realist, CLS in this sense a true descendant of Realism. The way in which CLS is concerned with the political dimensions of law and domination can be explored by examining the CLS attack on policy analysis, balancing, and shared social values that is, on the constructive program of Legal Realism.

Setelah kita melihat sejenak perkembangan studi hukum kritis, yang perkembangannya justru muncul belakangan dari lahirnya kriminologi kritis, kini kita akan kembali mencoba melakukan pengkajian terhadap keberadaan kriminologi kritis dan perkembangannya.

Kriminologi kritis muncul diakhir tahun 1960-an, ia merupakan simbol perlawanan dari dominasi kekuasaan yang absolut dan cenderung korup. Namun fenomena kritis ini tidak hanya melanda kriminologi, tetapi juga hampir merasuki seluruh disiplin ilmu untuk dapat mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana ia hidup<sup>208</sup>).

Menurut David F. Greenberg, di tahun 1970-an, di fakultas-fakultas yang mengajarkan kriminologi, mulai diperkenalkan sebuah pemahaman kajian keilmuan baru terhadap kejahatan. Kajian ini menggunakan paradigma dalam pandangan kriminologi. Namun dalam beberapa penggunaan istilah terhadap kajian keilmuan baru ini belum ada keseragaman<sup>209</sup>).

Penggunaan istilah yang berbeda dalam mengajukan pandangannya tentang kriminologi kritis ini terlihat dalam beberapa pendapat yang dilontarkan oleh beberapa pakar kriminologi dalam berbagai karya ilmiah yang ada. Ketidakeragaman penyebutan bagi pemahaman kritis dalam bidang

---

208) I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Op.Cit, hal. 8, menyebutkan bahwa "Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan adalah hasil konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan". Marjono Reksodiputro, 'Perkembangan Pemikiran Teoritik Tentang Kausa Kejahatan di Indonesia', dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan - Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 30, menyebutkan bahwa : "mashab kritikal (critical criminology), yang dimulai dengan masuknya perspektif interaksionis, misalnya oleh Howard S. Becker dengan 'labelling approach to crime' (1963, mungkin buku yang dimaksud adalah 'Outsiders : Studies in the Sociology of Deviance' - penulis) dan yang kemudian mengembangkan pendekatan 'sociology of conflict' misalnya oleh Richard Quinney (1970) dan William J. Chambliss and Robert B. Seidman (1971)".

209) David F. Greenberg, 'Introduction', dalam *Crime and Capitalism : Reading in Marxist Criminology*, Mayfield Publishing Company, California, USA, 1981, hal. 1. In the 1970s a new school of criminological thought, known variously as "New," "Critical," "Radical," or Marxist, came on the scene. It challenged the paradigms that then dominated criminology, and drew on the insight of New Left Social Criticism in developing a host of new and controversial ideas about crime.

kriminologi terlihat dalam: *Critical Criminology, Radical Criminology, The New Criminology, Radical Deviancy Theory, Radical Human Right Criminologi, Conflict Criminology, Critical Marxism dan Radical Reflexiveness*<sup>210</sup>).

Di Indonesia sendiri keberadaan pemahaman kritis dalam kriminologi masih menjadi polemik yang belum terselesaikan. Ada beberapa pakar yang sependapat dengan pandangan pemahaman kritis atau radikal, namun ada juga menentang penggunaan pemahaman kritis<sup>211</sup>).

Perbedaan pandangan terhadap pemahaman kritis dalam kriminologi timbul karena ada beberapa perbedaan paham bahwa pandangan kritis atau radikal adalah sebuah pandangan atau pemahaman yang mendasarkan pada konsep Marxist. Mereka mengajukan dasar bahwa pemahaman kritis adalah identik dengan Marxist karena mereka menggunakan pemahaman *teori konflik atau pertentangan (perjuangan) class* untuk mencapai tujuan<sup>212</sup>).

Menurut Sahetapy, keberadaan Marxist sendiri di Indonesia adalah merupakan hal yang bertentangan dengan Pancasila,

---

210) Penggunaan istilah '*Critical Criminology, Radical Criminology, The New Criminology*' dapat dilihat dalam : Tony Platt, '*Prospects for A Radical Criminology in The USA*', dalam *Critical Criminology*, Ian Taylor, Paul Walton dan Jock Young, International Library of Sociology edited by John Rex, Routledge & Kegan Paul, London and Boston, 1975. hal. 95-109. Istilah '*Radical Human Right Criminology*' dipergunakan oleh Herman dan Julia Schwendinger, dalam buku yang sama. Ian Taylor, Paul Walton dan Jock Young sendiri menggunakan istilah '*Radical Deviancy Theory and Marxism*', dalam buku yang sama juga. Istilah '*Conflict Criminology*', digunakan oleh Gwyn Nettler. Sedangkan untuk penggunaan istilah '*Radical Reflexiveness*', dapat dilihat dalam : Steven Box, *Power Crime and Mystification*, Tavistock Publications, London and New Yor, 1983, hal. 6.

211) Soerjono Soetanto, Mulyana W. Kusumah, Hengki Liklikuwata, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 96-117. Mengemukakan bahwa arus pemikiran baru dalam kriminologi dikenal dengan nama 'kriminologi radikal atau kriminologi kritis'. I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Op.Cit, hal. 9-13. Mengemukakan bahwa aliran pemikiran baru dalam kriminologi dikenal dengan nama 'kriminologi kritis'. Namun pemikiran yang berbeda pandangan dan menentang adanya penggunaan kriminologi kritis sebagai sebuah aliran baru dalam kriminologi. Menurut Sahetapy, disamping pemahaman kritis itu menunjukkan pemikiran yang Marxis, Sahetapy juga mengutip pendapat Jackson Toby bahwa pandangan kritis dalam kriminologi bukanlah hal yang baru, karena itu faham kriminologi kritis tidak tumbuh dan berkembang di Soviet ataupun Afrika Selatan, melainkan di Inggris, sehingga pandangan baru dalam kriminologi itu sebenarnya tidak ada. (Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hal. 47-58.) Lihat juga : Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Armico, Bandung, 1984, hal. 10-21. tentang idiologi Marxisme dan pendekatan yang diajukannya konsep **SEKULAR** (Sosial Budaya dan Struktural).

212) Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Loc.Cit.

oleh karenanya, keberadaan kriminologi kritis ini tidaklah disetujui<sup>213</sup>). Namun demikian tidak semua bentuk pemahaman kritis dan konflik itu identik dengan Marxist<sup>214</sup>). Memang dalam kedua pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mendasar dalam memandang keberadaan kriminologi kritis. Perbedaan ini menunjukkan adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda dalam penggunaan kriminologi kritis. Perbedaan ini terletak pada dasar pemahaman bahwa dalam kriminologi kritis, ada yang mengatakan bahwa teori konflik dalam kriminologi kritis ada yang Marxist dan non Marxist. Apa yang kita pahami sebagai dualisme pemikiran tentang teori konflik dalam kriminologi kritis juga dikemukakan oleh Gwynn Nettler<sup>215</sup>). Pandangan Nettler ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan teori konflik memang ada dua aliran yang berbeda. Aliran pertama yang mendasarkan pada faham Marxisme (Marxist), dan kedua yang tidak mendasarkan pada faham Marxisme (non-Marxist). Namun keberadaan faham konflik non Marxist jumlahnya sedikit, apabila dibandingkan dengan pendukung faham konflik Marxist<sup>216</sup>).

---

213) *Ibid.* Sahetapy mengutarakan bahwa: Sejak semula saya telah tidak setuju dengan apa yang dinamakan "kriminologi kritis". Pendirian saya bukan saja karena pandangannya bernafaskan Marxisme, atau karena pendirian kriminologi radikal ini sedikit banyak bertentangan dengan Pancasila, melainkan juga karena adanya larangan menyebarkan faham Marxisme.

214) I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Op.Cit. hal. 11. Konsep 'Ruling class' yang dikatakan oleh Reid, adalah konsep Kriminologi Marxist, sebab dalam teori konflik non-Marxist, konsep 'Ruling class' tidak dipergunakan oleh Sellin, Vold dan Turk. Lihat juga argumen yang dikemukakan oleh Gwynn Nettler, bahwa dalam faham Marxist 'conflict class-lah' yang ditonjolkan. Menurut I.S Susanto: Perlu dicatat bahwa teori konflik tidak sama dengan teori Marxist. Lebih-lebih jika ada anggapan bahwa aliran kritis sama dengan Marxist, perlu dipertanyakan. Teori Marxist (kriminologi kritis) hanyalah merupakan salah satu usaha "mengembangkan" teori konflik -- yang juga dipertanyakan istilah tersebut sebagai disebutkan diatas -- di samping terdapat teori konflik yang non Marxist, yang sangat berbeda. Selain itu juga perlu dicatat bahwa beberapa penulis bahkan mencampur adukkan antara teori konflik yang Marxist dengan yang non Marxist seperti Reid dan Allen.

215) Gwynn Nettler, 'Crime and Conflict', dalam *Explaining Crime* - Second Edition, Mc Graw Hill Book Company, New York, USA, 1978, hal. 207. It seem useful to consider a minority of conflict criminologist as non-Marxist and a majority as adhering to some version of Marxist thesis. The unifying Marxian theme is the kind of conflict emphasized. In the Marxian version of the conflict perspective, it is class conflict that produces the criminal law. This School believes that crime is defined by a ruling class as part of its program of exploitation and repression of powerless people, the 'working class'.

216) Memang masih banyak yang sulit membedakan antara konflik Marxisme dan konflik non-Marxisme, namun dari Nettler tersebut terlihat bahwa pengguna konflik non-Marxist memang lebih sedikit bila dibandingkan dengan pengguna konflik Marxisme. (*Ibid.*).

Dalam faham kriminologi radikal yang dikemukakan oleh Jay Livingston, dikemukakan bahwa penggunaan pemikiran radikal (*kritis*) akan membawa kepada pemahaman yang lebih kritis. Namun Livingston menggunakan konsep pemahaman konflik '*rulling class*' (dalam studinya di Amerika) untuk melihat bagaimana sebuah alur demokrasi dan pembangunan ekonomi itu berjalan di Amerika<sup>217)</sup>.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Livingston bahwa dengan menggunakan pendekatan konflik '*rulling class*' ini kita akan mendapatkan : (1) pemahaman yang lebih tajam tentang distribusi kekuasaan, dimana ada sejumlah kelompok atau lembaga tertentu yang memiliki kekuasaan lebih besar dari kelompok atau lembaga lainnya (*tidak adanya pendistribusian kekuasaan secara jelas*). Ini membuktikan bahwa dengan kekuasaan yang dimilikinya itu sekelompok '*the rulling class*' akan mampu melakukan perubahan berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya. (2) Mereka yang memiliki kekuasaan akan menggunakan kekuasaan tersebut untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Walaupun mereka tidak melakukan penguasaan terhadap bidang ekonomi dan politik secara langsung, tetapi mereka menggunakan lembaga yang mereka kuasai untuk melakukan kontrol terhadap setiap posisi ekonomi dan politik yang dominan. (3) Dan walaupun apa yang dilakukan oleh '*the rulling class*' itu cuma sebatas pengontrolan, namun mereka-

---

217) Jay Livingstone, '*Criticism of Radical Theory*', dalam *Crime and Criminology*, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, hal. 411. Menurut J.R Ewing yang dikemukakan kembali oleh Livingston bahwa: *Radical criminology has come in for a good deal of criticism. To talk about a ruling class in Amerika offends many people, including some sosiologist. After all, the United State is a democracy-a government of, by and for the people-and our free enterprise economy, in principle, reinforce this democratic distribution of power. The argument between radical and mainstream criminologist, therefore, goes beyond question of crime; it is about different picture that people of how society work. The most extreme radicals offer a model where a small rulling class runs nearly every part of the society in order to reinforce its position - a sort collective.* Faham konflik '*the rulling class*' yang dikemukakan oleh Livingston memang mengarah kepada pertentangan class di masyarakat, yaitu antara *powerfull* dan *powerless*, namun dari uraian ini dan uraian berikutnya kita akan dapat melihat bahwa, bagaimana Livingston mengungkapkan pendapatnya bahwa sebuah kekuasaan mampu melakukan dominasi dan pengawasan terhadap politik dan ekonomi.

pun melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan, hukum dan sistem peradilan pidana. Pengawasan ini dilakukan dengan sebagaimana layaknya pengawasan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang berkuasa (*powerfull*) terhadap masyarakatnya (*powerless*)<sup>218</sup>).

Walau apa yang dikemukakan oleh Livingston ini menggunakan pemahaman 'pertentangan class' namun apa yang dikemukakannya dapat dijadikan landasan bahwa penggunaan kekuasaan untuk melakukan penindakan terhadap apa yang dikuasainya (*powerless*) bukan lagi menjadi sesuatu yang rahasia. Kekuasaan mampu melakukan apapun untuk melegitimasi kekuasaannya. Kekuasaan mampu melakukan kriminalisasi terhadap sebuah perbuatan, bahkan kekuasaan-pun mampu melakukan kontrol terhadap hukum, keadilan dan sistem peradilan pidana.

Menggunakan pemahaman konflik non-Marxis, secara umum teori ini menunjukkan bahwa dalam terjadinya hubungan kekuasaan akan mendasari terjadinya proses kriminalisasi atas sebuah perilaku tertentu. Proses kriminalisasi ini tentunya akan mengarah pada pola keinginan dari pemegang kekuasaan, sehingga analisis obyektif 'proses kriminalisasi' adalah bersifat 'politis'<sup>219</sup>).

Lebih lanjut I.S Susanto mengatakan bahwa sebuah perbedaan mendasar antara kriminologi Marxist dan non marxist

---

218) *Ibid.* Let's put it a bit more reasonably. *First*, power and wealth are not evenly distributed in society; some people and institution have much more than other. *Second*; those who have power will use it to enhance their position. At a minimum, they will not do things that go against their economic or political interests; they will use the institution they control in order to keep their positions of dominance. *Third*; this ruling class controls not only the economic institutions but also, ultimately their institutions of justice. Therefore, the law and criminal justice system, like other institution in society controlled by the powerfull, will tend to reproduce these basic inequalities of wealth and power. Bandingkan dengan apa yang dikemukakan Steven Box dalam *Power, Crime and Mystification*, Tavistock Publication, London, 1983, hal.201, menurut Lord Acton bahwa "all power corrupts, and absolute power corrupts absolutely - kekuasaan cenderung untuk melakukan perbuatan yang korup, dan kekuasaan yang absolut akan menjadikannya ke-korupan yang absolut pula".

219) I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Loc.Cit.



adalah ada pada pandangannya<sup>220</sup>). Terlepas dari beberapa pandangan yang pro dan kontra terhadap penggunaan pemahaman kritis dalam kriminologi, ada beberapa hal yang kiranya perlu di diperhatikan secara seksama tentang penggunaan atau aplikasi pemahaman kritis sebagai pisau analisis dalam membedah sebuah permasalahan sosial atau realita sosial kejahatan dan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat.

Gerakan mahasiswa sebagai sebuah gerakan massa seringkali diwaspadai dan dicurigai sebagai perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan dan ketertiban. Sikap para aktivis gerakan mahasiswa dalam mengkritisi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa seringkali pula diartikan sebagai sikap yang antikemampanan, pembangkangan dan ketidaksetiaan<sup>221</sup>).

Richard Quinney mengemukakan bahwa bentuk pemahaman yang lebih tajam terhadap realitas sosial kejahatan atau perilaku menyimpang dapat dilakukan dengan melakukan pemahaman kritis terhadap hukum (*legal order*) maupun pendekatan kritis terhadap kejahatan dalam bidang kriminologi<sup>222</sup>).

---

<sup>220</sup>) *Ibid.* I.S Susanto mengatakan: Perbedaan mendasar antara kriminologi Marxis dengan yang non Marxist adalah pandangnya apakah kejahatan bersifat patologis. Pada perspektif konflik yang non Marxist maka kejahatan dipandang sebagai tindakan yang normal dari orang-orang yang normal yang tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengontrol proses kriminalisasi, dan dalam perspektif perilaku menyimpang, kejahatan dipandang sebagai permwujudan dari kebutuhan masyarakat untuk mengkriminalisasi perbedaan. Sebaliknya dalam pandangan kriminologi Marxis konsep yang ada kembali ke ide positivis yaitu bahwa kejahatan memang bersifat patologis.

<sup>221</sup>) Sikap ketidak-taatan, kritisme dalam tatanan hukum yang represif diartikan sebagai sebuah bentuk penyimpangan dan tanda ketidaksetiaan kepada pemegang kekuasaan yang ada. Demikian pula pandangan-pandangan atau sikap yang dianggap 'mbalelo' diartikan sebagai sebuah pengingkaran terhadap tatanan yang telah diakui. (Mulyana W. Kusumah, 'Perspektif dan Teori Sosial Tentang Konteks Sosial Hukum', *Op. cit.*, hal. 15.) Menghadapi sikap para aktivis gerakan mahasiswa tersebut, maka penguasa menerapkan tindakan represif dengan menggunakan *Haatzai Artikelen* dan *UUK Subversi* sebagai sarana 'ultimum remedium'. Dengan terjeratnya beberapa aktivis gerakan mahasiswa oleh *Haatzai Artikelen* dan *UUK Subversi*, maka secara formal perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut dianggap sebagai kejahatan. Penerapan hukum represif inilah yang seakan-akan membentuk sebuah konstruksi pemahaman bahwa tindakan atau perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut adalah sebuah kejahatan politik. Dengan demikian dalam kajian ini membutuhkan sebuah pemahaman kritis terhadap 'legal order' yang diterapkan pada para aktivis gerakan mahasiswa dan sebuah pendekatan kritis terhadap terbentuknya kriminalisasi pada sebuah perbuatan.

<sup>222</sup>) Richard Quinney, 'Crime Control in Capitalist Society: A Critical Philosophy of Legal Order' dalam *Critical Criminology*, *Loc. Cit.*, dan lihat juga: Richard Quinney, 'Research Methods and Modes of Inquiry', dalam *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America*, *Loc. cit.*

Pemahaman kritis terhadap kejahatan dalam bidang kriminologi yang diajukan oleh **Quinney** dalam upayanya memahami realitas sosial kejahatan dan perbuatan yang menyimpang di masyarakat adalah beragntung kepada keberadaan dinamika faktor ekonomi dan struktur politik yang ada<sup>223</sup>).

Mengapa **Quinney** memandang bahwa sebuah realitas sosial kejahatan itu harus dipahami secara kritis, karena **Quinney** menilai bahwa apa yang dikatakan sebagai sebuah kejahatan di masyarakat tidak lain adalah merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada di masyarakat tidak lain merupakan hasil konstruksi sosial yang dipahami dan diyakini kebenarannya tanpa harus dipertanyakan kembali. Padahal kejahatan yang ada pada konstruksi pemahaman masyarakat dan menjadi acuan utama dalam hukum pidana tidak lain merupakan hasil konstruksi kepentingan politik, ekonomi dan pemegang kekuasaan. dengan demikian realitas sosial kejahatan merupakan hasil konstruksi dari sebuah konflik kepentingan yang terjadi di masyarakat<sup>224</sup>).

Mulyana W. Kusumah yang mengutip pemikiran **Chambliss**

---

223) **Richard Quinney**, 'The Social Reality of Crime', dalam *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America*, Ibid, hal. 37. Ini diutarakannya sebagai berikut: *A Theory help us begin to examine the legal order critically is the one I call the social reality of crime. Applying this theory, we think of crime as it is affected by the dynamics that mold the society's social, economic, and political structure. First, we recognize how criminal law fits into capitalist society. The legal order gives reality to the crime problem in the United States. Everything that makes up crime's social reality, including the application of criminal law, the patterns of those who are defined as criminal, is related to the established legal order. The social reality of crime is constructed on conflict in our society.* Perhatikan juga kalimat terakhir **Quinney** bahwa: 'Realitas sosial kejahatan yang ada di masyarakat, adalah merupakan hasil pertentangan-pertentangan kepentingan, dimana perbuatan tersebut dikonstruksikan untuk diyakini sebagai sebuah kejahatan atau perbuatan jahat berdasarkan kesepakatan dan kepentingan yang ada'.

224) **I.S. Susanto**, 'Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial', Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan Sumber Daya, INKA, Karangbendan 12-17 Agustus 1992, dimuat dalam *Majalah Masalah-Masalah Hukum* UNDIP. Memahami sebuah realitas sosial secara kritis akan membawa kita kepada sebuah bentuk pemahaman yang tidak selalu menerima begitu saja (taken for granted) apa yang menjadi sebuah realita. Pemahaman kritis terhadap realitas sosial yang dikemukakan oleh **I.S. Susanto**, melihat bahwa antara realitas konseptual dan realitas yang sedang terjadi di masyarakat adalah berbeda. Ini terlihat dalam uraiannya: Suatu realitas sosial pada dasarnya adalah suatu kenyataan tentang kejadian-kejadian dan juga sebagai gambaran/pengetahuan tentang kenyataan. Hal yang pertama menggambarkan tentang kejadian-kejadian didalam masyarakat yang dapat dilihat, didengar dan dibaca dalam kehidupan sehari-hari dan dipandang sebagai realitas tentang fenomena, sedangkan yang kedua merupakan gambaran/pengetahuan yang kita miliki tentang kenyataan sosial sehingga dipandang sebagai realitas konseptual. Sedangkan kalau berbicara tentang realitas sosial pada dasarnya mengarah kepada realitas konseptual sebab perannya sangat penting dalam kehidupan sosial.

mengemukakan bahwa pemahaman mengenai realitas sosial kejahatan tidak lepas dari aspek politik dan ekonomi yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Perumusan 'penjahat' atau delikuenensi adalah hasil sebuah proses politik, dimana aturan-aturan yang melarang atau menganjurkan warga masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan adalah hasil konstruksi politik yang menentukan sesuatu perbuatan dianggap jahat atau tidak<sup>225</sup>).

Tentang latar belakang kejahatan, Chambliss mengemukakan bahwa kejahatan atau bukan kejahatan berasal dari anggapan orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi kelompok dominannya. *Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan yang berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat*<sup>226</sup>).

Perumusan sebuah perbuatan menjadi sebuah perbuatan yang dianggap 'jahat' atau kejahatan berkaitan erat dengan proses 'delikuenensi' yang terjadi dan kekuatan-kekuatan tertentu yang mempengaruhinya<sup>227</sup>).

Edwin M. Schur juga melihat bahwa kejahatan dan pelang-

225) Mulyana W. Kusumah, *Realitas Sosial Kejahatan*, Op.Cit., hal.5, mengutip William J. Chambliss, *The State, The Law and The Definition of Behaviour as Criminal or Delinquent*, dalam *Handbook of Criminology*, Daniel Glasser (Editor), Rand McNally and Co, Chicago, 1979. Pemahaman bahwa masuknya kepentingan politik dan ekonomi sebagai salah satu aspek yang menyebabkan terjadinya proses kriminalisasi, janganlah diartikan secara sempit, namun dilihat sebagai pengaruh-pengaruh ekstern yang mendukung kepentingan tertentu.

226) Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Op.Cit., hal. 35. Pemahaman Chambliss terhadap kejahatan tidak lepas dari pengaruh kelas dominan dan persepsi mereka terhadap sebuah perbuatan jahat. Chambliss mengatakan: *We Must understand the political, economic and social forces leading to differences in crime rates in different historical periods as well as differences between countries in the same period.*

227) Mulyana W. Kusumah, *Realitas Sosial Kejahatan*, Loc.Cit. Lihat juga pendapat yang dikemukakan oleh Austin T. Turk, *Political Criminality: The Defiance and Defense of Authority*, Sage Publication Inc. New Bury Park California, 1982, dalam bab 'Political Crimes and Legal Definition', hal. 37-68, bahwa perumusan sebuah perbuatan menjadi sebuah kejahatan tidak lain merupakan hasil pilihan (politik) sebuah masyarakat, atau pemegang kekuasaan (*dominant class*) yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Mulyana W. Kusumah mengatakan: Proses inilah yang harus dipahami dalam mempelajari kejahatan. Dengan begitu, mempertanyakan "mengapa suatu tindakan dirumuskan sebagai tindakan kejahatan sedangkan tindakan-tindakan yang lain tidak", adalah titik tolak bagi setiap studi sistematis mengenai kejahatan dan penjahat. Tak ada suatu tindakanpun yang pada dasarnya kejahatan. Jika kita akan menjelaskan kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan kejahatan, maka pertama-tama harus dijelaskan kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan sejumlah tindakan dirumuskan sebagai kejahatan sedangkan tindakan-tindakan yang lain tidak dirumuskan demikian.

garan yang ada tidak lain merupakan hasil penilaian yang dituangkan sebagai sebuah produk politik terhadap fenomena sosial. Ada beberapa *public policy* yang ikut serta mendasari mengapa sebuah perbuatan tertentu menjadi sebuah perbuatan jahat dan perbuatan lainnya tidak menjadi perbuatan jahat. Menurut Schur semua ini diformulasikan, dihasilkan dan kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan tentang kebijakan publik yang mengikat. Dimana *publik policy* yang dikeluarkan itu juga tidak lain merupakan produk dari pemegang kekuasaan sebagai hasil konflik diantara masyarakat sebagai sarana untuk mengatur keberadaan masyarakat (*politically organized society*)<sup>228)</sup>.

Berangkat dari pemikiran bahwa realitas sosial kejahatan adalah terbentuk karena suatu realitas konseptual dan juga realitas fenomenal, Quinney memaparkan sebuah teori mengenai realitas sosial kejahatan yang terdiri dari enam preposisi. Preposisi pertama menyangkut rumusan kejahatan, empat preposisi berikutnya merupakan satuan penjelasan dan preposisi yang keenam merupakan perangkuman dalam menggambarkan sebuah realitas sosial kejahatan<sup>229)</sup>.

---

228) Edwin M. Schur, 'Deviance and Politics', dalam *Radical Nonintervention, Rethinking The Delinquency Problem*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1973, hal. 139. *Crime and delinquency are inherently political phenomena. This is so for at least two reasons: because public policy decisions of various sorts shape the social structures and value system within which such behavior occurs; and because ultimately the substance of crime and delinquency laws is, as we have seen, a matter for political decision. Furthermore, as one perceptive analyst has stressed, "the interest represented in the formulation and administration of public policy are those treasured by the dominant segment of society. Hence, public policy is created because segments with power differentials are in conflict with one another. Public policy itself its manifestation of an interest structure in politically organized society".* Lihat juga: Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alauddin, Bandung, 1976, hal. 153-156.

229) Richard Quinney, 'Social Reality of Crime', *Op.Cit.*, hal. 37-41. Keenam preposisi ini menunjukkan bagaimana sebuah persepsi terhadap kejahatan itu terbentuk, ada banyak aspek dan pengaruh yang membuat 'gambaran kejahatan' terbentuk. Dan banyak aspek kepentingan tertentu bahwa sebuah perbuatan dirumuskan menjadi sebagai sebuah 'kejahatan' atau perbuatan yang menyimpang. Keenam preposisi tersebut ialah: 1. *The Official Definition of Crime: Crime as a legal definition of human conduct is created by agent of the dominant class in a politically organized society.* 2. *Formulating Definition of Crime: Definition of crime are composed of behaviour that conflict with the interest of the dominant class.* 3. *Applying Definition of Crime: Definitions of crime are applied by the class that has the power to shape the enforcement and administration of criminal law.* 4. *How Behaviour Patterns Develop in Relation to Definition of Crime: Behaviour patterns are structured in relation to definitions of crime, and within this context people engage in actions that have relative probabilities of being defined as criminal.* 5. *Constructing An Ideology of Crime: An ideology of crime is constructed and diffused by the dominant class to secure its hegemony.* 6. *Constructing the Social Reality of Crime: The Social reality of crime is constructed by the*

Dari pandangan Quinney ini terlihat bahwa: (1) konstruksi pemahaman terhadap kejahatan merupakan hasil pendefinisian hukum dari sebuah perbuatan yang didefinisikan sebagai perbuatan yang menyimpang oleh *'the dominant class'*, (2) bahwa kejahatan diformulasikan sebagai sebuah kejahatan, yaitu dengan melihat perilaku yang bertentangan dengan kepentingan *'the dominant class'*, (3) bahwa penerapan definisi kejahatan dilakukan oleh *'the dominant class'* melalui kekuatan penegakan hukum pidana, (4) bahwa perilaku dan pemahaman yang berkembang di masyarakat juga ikut serta memberikan warna pemahaman terhadap konstruksi sebuah kejahatan, (5) bahwa ideologi kejahatan dikonstruksikan dan disebarkan oleh *'the dominant class'* sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya, (6) dan bahwa realitas sosial kejahatan yang ada di masyarakat, dikonstruksikan oleh perumusan dan penerapan definisi-definisi kejahatan, perkembangan pola perilaku yang berkaitan dengan definisi ini<sup>230</sup>).

Pandangan yang dilakukan oleh Quinney ini tidak lain beranjak dari pemahaman kritis tentang kejahatan. Selama ini kita terideologikan oleh konstruksi pemahaman *'positivis'* terhadap bentuk sebuah kejahatan, sehingga tindakan-tindakan lain diluar pemahaman positivis sebagai kejahatan tidaklah dianggap sebagai kejahatan<sup>231</sup>).

---

*formulation and application of definitions of crime, the development of behaviour patterns in relations to these definitions, and the construction of an ideology of crime.*

230) Lihat juga penafsiran realitas sosial kejahatan dari Richard Quinney yang dilakukan oleh Mulyana W. Kusumah, dalam *'Realitas Sosial Kejahatan'*, Prisma Loc.cit, serta dalam *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Op.cit, hal. 36-37. Lihat juga: Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung, tahun penerbitan tak tercatatkan, Bab Penegakan Hukum dan Struktur Kekuasaan.

231) Pemahaman positivis hanya melihat dan mengandol apa yang telah dicantumkan dan dirumuskan sebagai kejahatan dalam peraturan tanpa dapat melihat aspek kejahatan yang lebih merusak moral dalam jangkauannya yang lebih luas dan lebih ganas, misalnya kejahatan korporasi, kejahatan politik kerah putih, kejahatan struktural, dll.

Dalam pemahaman radikal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Doug A. Timer dan Stanley Eitzen disebutkan bahwa selama ini kejahatan hanya dipahami secara rumusan positivis. Kejahatan dipandang sebagai sebuah kategori perbuatan yang memenuhi rumusan hukum dan perundang-undangan, dimana hukum atau perundang-undangan tersebut merupakan hasil konstruksi penguasa atau kelompok yang dominan di masyarakat (*dominant class*) yang memiliki interes-tertentu (*khususnya kepentingan ekonomi*), serta dijadikan alat untuk mempertahankan diri dalam upayanya melakukan eksploitasi terhadap golongan yang dipekerjakan (*exploited class*)<sup>232</sup>).

Menurut I.S. Susanto pandangan kriminologi kritis terhadap kejahatan ialah bahwa kejahatan merupakan hasil dari konstruksi sosial<sup>233</sup>), ini berarti bahwa manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dikonstruksi tersebut adalah telah melakukan sebuah kejahatan.

I.S. Susanto melihat bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah sebuah fenomena yang berdiri sendiri atau sebagai 'sesuatu yang jatuh dari langit'<sup>234</sup>) begitu saja, tetapi melalui rumusan-rumusan tertentu yang telah dikonstruksikan

---

<sup>232</sup>) Drew Hughes, 'Crime and the State' dalam *Crime in the Street and Crime in The Suites : Prespective on Crime and Criminal Justice*, Doug A. Timer, D. Stanley Eitzen, Allyn and Bacon, A Division of Simon and Schuster Needham Heights, USA, 1989, hal. 15. Radical see crime as a legal category created by the state and used by the economically dominant social class for its own purpose...The radical of analysis of the state argues that its the chief function is to defend the interest of the rulling class againts the exploited class in society. Bandingkan dengan pemaparan yang dikemukakan oleh Quinney, Greenberg, Livingston, Taylor, Walton dan Young yang mengatakan bahwa kejahatan merupakan hasil dari konstruksi pemahaman yang dilakukan oleh penguasa.

<sup>233</sup>) I.S. Susanto, 'Crime and social Construction' dalam 'The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia', *Loc.Cit.* Crime indeed is not the only phenomenon whose realization need to be observed clearly like people waching a horse or a table, but it is the product of construction - the image created by the social doer - which constitutes people interpretation of a certain phenomenon toward an interaction in a certain context'

<sup>234</sup>) I.S. Susanto mengatakan bahwa konstruksi kejahatan adalah bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan dibentuk dan diarahkan oleh 'powerfull' sehingga tanpa sadar masyarakat mengakui bahwa apa yang dimaksud dengan kejahatan adalah apa yang telah dibentuk dan diarahkan oleh 'powerfull' secara nyata.

oleh masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang tercela atau menyimpang<sup>235</sup>). Dalam pandangan kriminologi kritis, pemahaman masyarakat terhadap kejahatan yang lebih banyak mengacu pada pandangan positivis, yaitu kejahatan hanya sebatas apa yang diatur oleh undang-undang, sehingga tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku lebih banyak ditentukan oleh bagaimana undang-undang tersebut dirumuskan dan dijalankan<sup>236</sup>).

Dengan pemahaman tersebut, Mardjono Reksodiputro melihat bahwa pemahaman kritis akan membawa pemahaman baru dalam memahami konstruksi kejahatan yang ada. *Pendekatan interaksionis* akan membawa kita kepada pemahaman untuk melihat bagaimana sebuah kejahatan atau penjahat itu diberi sebuah label atau cap jahat, *sedangkan pendekatan konflik* akan membawa kita kepada pemahaman bahwa bagi mereka yang memiliki kekuasaan (*power*) yang lebih besar (*dominant class, ruling class, powerfull*<sup>237</sup>) akan memiliki kemudahan dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya, sebagai sebuah perilaku yang perlu untuk segera diancam dengan pidana atau dikatakan sebagai

---

235) I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Op.Cit, hal. 8. Oleh karena itulah, maka fungsi lain dari kriminologi kritis adalah melakukan analisis terhadap proses bagaimana cap jahat (label) tersebut diterapkan pada tindakan dan perbuatan orang-orang tertentu. Oleh karena itulah pokok kajian kriminologi kritis menurut I.S Susanto adalah: Mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga mempelajari perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatur penegak hukum), disamping mempertanyakan diadakannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan.

236) Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, hal. 31. Pandangan yang senada tentang keberadaan kriminologi kritis juga dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa: Dalam pandangan mashab kritikal tidaklah penting untuk melihat apakah manusia itu bebas memilih perilakunya (mashab klasik) ataupun manusia itu terikat oleh faktor-faktor biologis (fisik), sosial kultural. Pendekatan mereka ditujukan pada proses-proses sosial yang mendasari dan membentuk dunia dimana manusia ini hidup. Menurut mereka jumlah kejahatan yang terjadi maupun karakteristik para pelaku kejahatannya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu dirumuskan dan dilaksanakan (pelaksanaan penegakan hukum pidana). Kalau pendekatan interaksionis (dalam mashab ini) ingin mempelajari bagaimana proses diberikan 'label' kejahatan dan penjahat oleh masyarakat, maka pendekatan konflik akan melihat aspek 'kuasa' (*power*) dalam perumusan kejahatan. Disini Mardjono Reksodiputro melihat bahwa pendekatan kritis, dapat dilakukan dengan pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.

237) Penggunaan istilah 'Dominant Class (kelompok yang dominan)', *Ruling Class (kelompok yang berkuasa)*, *Powerfull (orang atau kelompok yang memiliki kekuatan)* dalam konteks kajian ini memiliki pengertian makna yang serupa. Tindakan ini menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari pemegang kuasa yang harus dilindungi demi kepentingannya.

sebuah kejahatan. Pengkonstruksikan kejahatan oleh *powerfull* tidak lain menggunakan perangkat hukum dan hukum pidana yang ada untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Richard Quinney memberikan gambaran bahwa konstruksi kejahatan adalah hasil rekayasa dari orang-orang atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atas perilaku-perilaku tertentu<sup>238</sup>).

Kajian seperti ini tidak akan kita dapatkan apabila kita hanya menggunakan 'kacamata' hukum pidana atau kriminologi positivis saja, sebab apa yang dibahasnya tidak lain merupakan kajian-kajian yang hanya memperhatikan aspek pembedaan dan kriminalisasi secara positivis belaka<sup>239</sup>).

Dengan pemahaman yang dikemukakan dalam kriminologi kritis, menurut Gresham Sykes kita tidak akan mengatakan bahwa hal tersebut benar atau salah tetapi kita akan melihat bagaimana sebuah realita empiris dan sebuah teori tersebut dibangun<sup>240</sup>).

---

238) Pendapat Richard Quinney ini dapat dilihat dalam 'Social Constructionism' dalam *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America* hal. 10, juga dapat dilihat dalam 'Social Constructionism' dalam buku *Critical Criminology* yang dieditori oleh Taylor, Walton dan Young, hal. 184-185. Hal ini dikemukakan oleh Quinney yang mengutip pemikiran Alfred Schutz: *Following these assumptions, the social scientist's constructs have to be founded upon the world created by social actors. Alfred Schutz conceptualized the problem: "the constructs of the social sciences are so to speak, constructs of the second degree, that is constructs of the constructs made by the actors on the social scene, whose behavior the social scientist has to observe and explain in accordance with the procedural rules of his science"*. Beberapa kajian yang telah dikemukakan diatas, memberikan sebuah pemahaman dan gambaran baru, bahwa kejahatan yang dilontarkan oleh *powerfull* tidak semata-mata hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang terdapat dalam 'legal system', tetapi juga menunjukkan adanya bentuk pengkonstruksian kejahatan berdasarkan kepentingan politik dari *powerfull*.

239) Lihat kembali pembagian aliran-aliran dalam Kriminologi menurut, I.S Susanto, Mardjono Reksodiputro, dll, bahwa aliran dalam kriminologi: Aliran Klasik, Positivis, Neo Klasik dan Kritis atau radikal. Perbuatan *powerfull* tersebut menunjukkan adanya bentuk-bentuk kejahatan baru dalam dimensi kejahatan politik kerah putih. Tidak berlebihan kiranya apabila kajian kriminologi kritis akan mendapat tempat yang lebih tajam dalam menganalisis, sebab ia tidak hanya melakukan analisis terhadap sebuah perbuatan tetapi juga melakukan analisis terhadap proses terjadinya sebuah perbuatan. Lihat juga: I.S Susanto, *Kejahatan White Collar Crime dan Pembangunan Masyarakat Adil Makmur*, Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP, Semarang, No. 3/XXI/1991, hal. 2. Pemahaman tentang proses terjadinya konstruksi kejahatan dikemukakan oleh I.S Susanto: *Realitas sosial tentang kejahatan merupakan hasil konstruksi sosial*. Ini berarti bahwa realitas kejahatan tersebut dapat dikonstruksikan dalam "wajah" realitas yang lain atau berbeda, yaitu dipengaruhi oleh nilai-nilai kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh yang mengkonstruksikannya.

240) Tony Platt, 'Prospect for A Radical Criminology in The USA' dalam *Critical Criminology*, Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young, *Op.Cit.*, hal. 107. "The viewpoint of critical criminology as it stands today probably cannot be said to be true or false. Rather it is a bet on what empirical research and theoretical development in the field will reveal in the future-and in many ways I think the bet is not a bad one".



Pendapat senada juga dilontarkan oleh Tony Platt bahwa dengan pemahaman kriminologi yang radikal (*kritis*), mata kita akan semakin terbuka dengan melihat kejahatan tidak hanya apa yang ada dan dirumuskan dalam legal system, tetapi juga merefleksikan berdasarkan realita yang ada<sup>245</sup>).

Dengan demikian apabila kita ingin membangun pemahaman baru, khususnya pemahaman kritis terhadap kejahatan dalam dimensinya yang baru pula, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan menurut Richard Quinney adalah<sup>246</sup>):

*In developing this critical theory of crime we must consider these topics : (1) crime and dominant class, (2) crime control in the capitalist state, and (3) demystifying criminal law. Our objective is a critical understanding of the modern legal order.*

Dari uraian dasar kerangka pemikiran yang ada, kita dapat melihat bahwa sebuah kejahatan atau perilaku yang dianggap menyimpang untuk kemudian dianggap jahat, tidak lain merupakan hasil dari pengkonstruksian oleh pihak penguasa (*dominant class, rulling class, powerfull*) berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu yang dikehendakinya. Kepentingan yang melandasi pengkonstruksian tersebut dapat saja berupa pengaruh dari aspek politik.

Pengaruh aspek politik dalam membentuk konstruksi sosial kejahatan yang dilakukan oleh pihak penguasa (*dominant class, the rulling class, powerfull*) merupakan bentuk perwujudan atau realisasi bentuk hukum yang represif. Dalam hukum yang represif, hukum digunakan sebagai alat untuk membenarkan perbuatan-perbuatan penguasa agar mendukung kepen-

---

<sup>245</sup>) *Ibid*, hal. 103. *A Radical Criminology requires a redefinition of a subject matter, concerns and commitments. In the past, we have been constrained by a legal definition of crime which restricts us to studying and ultimately controlling only legal-defined 'criminals'. We need a definition of crime which reflects the reality of a legal system based on power and privilege; to accept the legal definition of crime is to accept the fiction of neutral law"*

<sup>246</sup>) Richard Quinney, 'A Critical Theory' dalam *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America*, Op.Cit, hal. 285.

tingannya. Demikian pula halnya perlakuan penguasa terhadap para aktivis gerakan mahasiswa yang lebih banyak dijerat dengan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi merupakan salah satu tindakan represif yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang ada.

Keberadaan hukum yang represif senantiasa tidak terlepas dari pengaruh aspek politis yang melingkupinya. Demikian juga dengan keberadaan hukum responsif dimana aspek-aspek politik-pun senantiasa berada untuk mempengaruhinya. Kedua bentuk hukum tersebut (baik represif maupun responsif) tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aspek-aspek politik, hanya saja letak perbedaannya ada pada bagaimana hukum itu menanggapi peran politik yang ada. Untuk itulah dalam kajian teoritik ini penulis bermaksud mengemukakan sebuah peralihan bentuk hukum, dari bentuk hukum yang represif menuju hukum yang responsif<sup>247)</sup>.

Namun sebelum menguraikan tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum responsif secara lebih jauh, penulis mencoba untuk melihat dan mengkaji perkembangan hukum menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick keberadaan hukum dibagi kedalam tiga tipe hukum yaitu: hukum represif (*repressive law*) yaitu hukum yang merupakan alat dari kekuatan represif, hukum otonom (*outonomous law*), yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu membuat lunak sifat represi dan melindungi integritasnya sendiri, dan hukum responsif (*responsive law*), yaitu hukum yang merupakan sarana respon atas kebutuhan dan

---

247) Phillipe Nonet, Philip Selznick, 'Responsife Law' dalam Law And Society In Transition, Toward Responsive Law, Harper Colophon Books, Harper And Row Publisher, New York, Hagerstown, London, San Francisco, 1978. hal. 73-113. Hukum Responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya 'Law and Society in Transition: Toward Responsif Law' mengemukakan tentang sebuah perkembangan hukum yang bersifat terbuka dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial.

aspirasi yang berasal dari masyarakat.

Tujuan utama dari hukum represif adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengamanan masyarakat. Aturan yang ada dalam hukum represif bersifat ketat dan seringkali terperinci namun kurang mengikat pembuat aturan itu sendiri dan seringkali terjadi diskresi<sup>248)</sup>.

Dalam hukum otonom tujuan yang hendak dicapai adalah legitimasi yang berdasarkan pada kejujuran prosedural. Disini aturan-aturan bersifat mengikat penguasa dan masyarakatnya. Hukum dipisahkan secara tegas dengan politik, dan paksaan-paksaan yang timbul dari aturan-aturan itu dikendalikan oleh aturan-aturan hukum dan moralitasnya adalah moralitas institusional. Ketaatan dalam hukum otonom tidaklah terlalu ketat, tetapi partisipasi masyarakat dibatasi oleh prosedur-prosedur yang mapan<sup>249)</sup>.

Pada hukum responsif keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksanaan yang ada. Diskresi dilakukan dalam rangka mencapai tujuan, dan paksaan yang ada nampak kedalam berbagai bentuk alternatif positif seperti insentif ataupun pada sistem kewajiban-kewajiban mandiri. Moralitas yang ada dalam hukum responsif adalah moralitas kerjasama. Keberadaan politik dan hukum adalah saling mengisi dan ketidaktaatan dinilai dalam sebuah ukuran dan kerugian-kerugian substantif

---

<sup>248)</sup> 'Repressive Law', *Ibid*, hal. 29-54. Keadaan ini menurut Donald Black dalam bukunya 'The Behaviour of Law' dikatakan bahwa "Centrifugal law is greater than centripetal law" (Hukum yang mengarah keluar seringkali lebih besar atau lebih kuat ketimbang hukum yang mengarah kedalam). Ini menunjukkan bahwa sifat Hukum Represif adalah memaksa dan yang dikembangkan adalah moralitas kekangan. Hukum tunduk pada kepentingan politik kekuasaan, serta harapan dan ketaatan yang ada bersifat tanpa syarat, sebab ketidaktaatan dalam Hukum Represif dianggap sebagai sebuah penyimpangan dan pola kritisisme dianggap sebagai tanda ketidaksetiaan. Lihat juga, Mulyana W. Kusumah, Paul S. Bant, Hukum Politik dan Perubahan Sosial, YLBHI, Jakarta, 1988, hal. 15.

<sup>249)</sup> 'Autonomous Law', *Ibid*, hal. 53-72. Lihat juga: Mulyana W. Kusumah, Paul S. Bant, *Ibid*, Atau dalam A.A.G Peters, Koesriani Siswosoebruto, 'Tesis Hukum yang Responsif', Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku III, Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hal 170-175.

serta dipandang sebagai sebuah masalah legitimasi. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi diperluas melalui banyak media dan penyaluran aspirasi<sup>250)</sup>.

Berikut merupakan gambaran perbandingan tentang sifat dan tipe dari ketiga bentuk hukum tersebut<sup>251)</sup>.

Tabel 8. Tiga tipe hukum menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick:

	hukum represif	hukum otonom	hukum responsif
Tujuan hukum	Tata tertib	Legitimasi	Kepentingan
Legitimasi	Pertahanan sosial demi kepentingan negara sendiri	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
Peraturan yang dibuatnya	Kasar, mendetil, bersifat kuat bila keluar dan lemah bagi pembuatnya.	Panjang lebar, namun mengikat pemerintah dan yang diperintah	Tunduk pada prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan.
Kebijakan yang diambil	Sangat umum dan oportunis	Terikat sekali pada aturan baku, kaku dan kurang pendelegasian	Banyak mengeluarkan kebijakan tetapi demi tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan
Alasannya	Dibuat secara cepat dan khusus	Menjunjung otoritas hukum, mudah menjurus pada formalisme dan legalisme	Bertujuan perluasan kepentingan yang sebenarnya
Pemaksaan	Ekstensif, di-kendalikan secara lemah sekali	Diawasi oleh kendali-kendali hukum	Pencarian alternatif secara positif, misalnya insentif, sistem swasembada.
Moralitas	Moralitas komunal, moralisme hukum, moralitas pengawasan	Moralitas instiusional, sangat memperhatikan proses integritas hukum	Moralitas rakyat moralitas kerjasama

250) 'Responsive Law', *Loc.Cit.* Lihat juga dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Loc.cit.*, A.A.G Peters, Koesriani Siswosetbroto, *ibid*, hal. 176-180.

251) *Law And Society in Transition, Toward Responsive Law, Ibid*, 'Jurisprudence and Social Science'-Tree Types of Law, hal. 16., Lihat juga dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Loc.Cit.*, dan lihat juga: A.A.G Peters dan Koesriani Siswosetbroto, *Loc.cit.*

Sambungan Tabel 8.

	hukum represif	hukum otonom	hukum responsif
Politik	hukum tunduk pada politik kekuasaan	hukum bebas dari politik, atau ada pemisahann kekuasaan	Aspirasi-aspirasi hukum dan politik berintegrasi, pembauran kekuasaan
Harapan ketaatan	Tanpa syarat, ketidaktaatan harus dihukum sebagai pembangkangan.	Penyimpangan peraturan dibenarkan secara hukum misalnya untuk mengkaji kesahihan Undang-undang atau perintah	Tidak taat dilihat sebagai kerugian substantif dipandang sebagai pengajuan masalah tentang legitimasi
Partisipasi	Menurut dengan patuh, kritik tanda tak loyal	Kemungkinan dibatasi oleh prosedur-prosedur yang dibuat munculnya kritik hukum	Kemungkinan diperluas oleh integrasi kepengacaraan hukum dan sosial

Melihat penjelasan yang ada diatas, untuk mengkondisikan hukum kedalam hukum responsif adalah membuat perilaku masyarakat menjadi lebih banyak tertuju dalam partisipasi terhadap hukum itu sendiri, sebagaimana yang diinginkan oleh hukum responsif itu sendiri<sup>252</sup>).

Pada keadaan terdapatnya hukum responsif kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum menjadi lebih terbuka, arena hukum menjadi semacam forum politik dan partisipasi hukum mengandung dimensi politik. Dengan perkataan lain aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum.

Untuk mengkondisikan sebuah perubahan, khususnya melakukan sebuah reformasi sosial, banyak hal yang harus dilakukan oleh banyak kalangan, tetapi biasanya yang paling

<sup>252</sup>) Mulyana W. Kusumah, *Perspektif dan Teori Tentang Konteks Sosial Hukum*, dalam Mulyana W. Kusumah, Paul S. Bant, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, YLRHI, Jakarta, 1983, hal. 15-17. Menurut Mulyana W. Kusumah beberapa ciri Hukum Responsif yang bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan terbuka pada pengaruh dan lebih efektif dalam menangani masalah-masalah sosial ialah: pertama, dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan; kedua, mengendalikan tuntutan pada ketaatan serta mengurangi kekakuan hukum; ketiga, bantuan hukum menampilkan suatu dimensi politik; dan keempat, terdapatnya perencanaan pranata-pranata hukum secara lebih kompeten.

dominan dalam melakukan dan mengupayakan sebuah perubahan dan reformasi sosial golongan adalah kelas menengah dari sebuah masyarakat.

Mengutip Barrington Moore dalam *'The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the making of The Modern World'*, Abdul Hakim Garuda Nusantara memberikan sebuah contoh dimana peranan kelas menengah dalam pembentukan hukum responsif yang ada di Inggris menjadi semakin kuat manakala keberadaannya didukung oleh kelas menengah<sup>253)</sup>

Namun peranan kelas menengah yang bagaimana yang dapat melakukan perubahan-perubahan di Indonesia, masih tercakup dalam banyak definisi. Albert Hasibuan yang mengutip pemikiran Daniel S. Lev tentang *"Intermediate Classes and Change in Indonesia"* dalam bukunya *'The Politics of Middle Class Indonesia'*, menguraikan sekalipun definisi untuk kelas menengah ini masih harus ditajamkan kembali dan masih dapat dibatasi, namun hal ini mengarah pada kelompok profesional, pengusaha, kaum terpelajar dll<sup>254)</sup>.

Pengkondisian terhadap kelas menengah, banyak dilakukan oleh golongan kaum terpelajar dimana mereka merupakan sosok yang selalu tidak pernah puas dengan keadaan yang ada. Posisi

---

<sup>253)</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *'Mencari Strategi Pembangunan Hukum'*, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta 1988, hal. 28-30, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa Penerapan model strategi pembangunan Hukum Responsif dalam tradisi hukum adat di Inggris pada awal abad ke dua belas adalah hasil perjuangan politik dari kelompok-kelompok sosial diluar sektor negara (birokrasi kerajaan). Dalam perkembangan selanjutnya kelompok-kelompok sosial tersebut, yang umumnya berasal dari Kelas Menengah yang kuat, berhasil pula mendesak lebih jauh tuntutan-tuntutan mereka pada negara (birokrasi dan raja) sehingga pada akhirnya tradisi hukum adat di negara tersebut menjadi semakin kukuh dan menjadi landasan yang penting bagi perkembangan hukum dan perubahan sosial dikemudian hari.

<sup>254)</sup> Benny K. Harman, Mulyana W. Kusumah, Hendarti, Paskah Irianto, Sigit Pranawa, Tedjabayu (ttd redaktur), *LBH Masyarakat* dayakan Rakyat Membangun Demokrasi, YLBHI, Jakarta, 1995, hal. 148-149. Penulis dalam kajian ini menggunakan peran aktivis gerakan mahasiswa sebagai bagian dari kelompok kelas menengah. Aktivis gerakan mahasiswa merupakan bagian dari kelompok kaum terpelajar yang merasakan sebuah kesenjangan sosial serta terjadinya penekanan serta penindasan dari sebuah penguasaan. Oleh karena itulah, peran dan aktivistas para aktivis gerakan mahasiswa merupakan contoh kongkrit sebuah pelaku sejarah dalam melakukan dan mengupayakan sebuah perubahan atau reformasi sosial. Realitas sosial ini menunjukkan bahwa reformasi sosial yang dapat dilakukan di Indonesia akan berkaitan erat dengan peranan Kelas Menengah sebagai Agen Perubahan Sosial. Daniel S. Lev mengutarakan bahwa Kelompok Kelas Menengah ini memiliki potensi yang besar dalam membawa angin pembaharuan, namun bila tidak digalang dan dilakukan secara transformatif, maka tidak akan menjadi sebuah kekuatan yang sanggup mengadakan perubahan.

kaum terpelajar yang senantiasa mencari yang terbaik membuat gerakan demi gerakan membawa sedikit demi sedikit perubahan. Alur keberadaan kelas menengah yang dianggap dapat membawa perubahan memiliki potensi yang besar, sebab disatu sisi mereka memiliki pijakan teoritik yang kuat, disisi lain mereka juga memiliki dukungan yang kuat dari arus bawah.

Keberadaan kelas menengah di Indonesia sedikit banyak agak terabaikan, karena disatu sisi kelompok ini saling bertentangan sendiri dan terjebak dalam masalah-masalah konflik intern yang mungkin dibuat oleh pihak penguasa untuk memecah belah mereka. Dengan tidak adanya kekompakan dan kesatuan pendapat dan pandangan diantara mereka, maka bukan hal yang sulit untuk mengkondisikan agar kelas menengah itu berada dalam cengkeraman tangan penguasa<sup>255</sup>).

Untuk mengkondisikan agar kelas menengah ini berada dalam kekompakan dan kesatuan pandangan dan tujuan, pola pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan haruslah terlebih dahulu diutamakan, sebab dengan menggalang masyarakat dan memberinya sebuah wawasan atau persepsi tentang sesuatu hal akan membuat masyarakat itu memiliki kesadaran bahwa mereka juga berhak atas pembangunan dan diri mereka sendiri<sup>256</sup>).

---

255) Realitas menunjukkan bahwa keberadaan Kelas Menengah baik yang didukung oleh golongan terpelajar maupun oleh kelompok politikus kondisinya sudah terkotak-kotak, dalam perbedaan faham, warna bendera, baju, dan simbol-simbol tertentu yang makin mengungkung mereka dalam bentuk keformalitasan. Kelompok ini saling bersaing namun dibalik persaingan ini timbul dan tumbuh rasa arogansi sepihak dan memandang kelompok lainnya sebagai kelompok underdog. Kondisi seperti memang dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadinya persatuan di antara kelompok kelas menengah. Di satu sisi ada kelompok yang diakui oleh penguasa di sisi lain ada pula kelompok 'mabalelo' yang bersikap oposan dan menentang kelompok dukungan penguasa. Bahkan mungkin justru adanya kelompok-kelompok tertentu yang didukung penguasa sengaja diciptakan untuk memecah belah kekuatan yang ada, sehingga kondisi seperti ini lebih mudah untuk diawasi dan dikendalikan.

256) Lihat kembali konsep proses pemberdayaan manusia melalui informasi dan pendidikan yang dikemukakan oleh penulis dalam bab pertama bahwa kelompok kelas menengah khususnya aktivis gerakan mahasiswa merupakan sebuah produk dari pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang diperolehnya. Pemahaman terhadap berkembangnya sebuah informasi akan membentuk sebuah pola pikir kritis sebanyak informasi yang diperolehnya. Makin banyak informasi yang diperoleh, maka akan makin lengkaplah daya analisis seseorang terhadap sebuah permasalahan. Lihat Juga: Richard Tanter, Kenneth Young, Politik Kelas Menengah di Indocensia, Loc.Cit. Golongan Kelas menengah dalam upayanya melakukan berbagai macam pembaharuan, seringkali diidentikkan dengan pola perkembangan jaman, sebab mereka juga yang akhirnya nanti ikut memberi warna hitam atau putihnya sejarah.

Pemberdayaan masyarakat ialah melakukan tindakan terhadap masyarakat agar mereka memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan kepentingan mereka dan memberikan pengertian kepada masyarakat agar mereka senantiasa ikut serta atau peduli terhadap keadaan yang ada di sekitar lingkungan mereka dan negaranya<sup>257</sup>).

Peran serta masyarakat ini hanya dapat diperoleh dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, apakah pendidikan formal maupun informal. Kadangkala arus informasi yang ada dan beredar di masyarakat adalah lebih tajam, terbuka serta tanpa batasan bila dibandingkan dengan arus informasi yang ada melalui pelbagai media resmi<sup>258</sup>).

Dalam banyak hal gelombang informasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk konstruksi sosial masyarakat akan sesuatu hal. Dalam masyarakat yang semakin terbuka, semakin tertutupnya sebuah informasi akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Dengan ditutup-tutupinya informasi, masyarakat akan merasa 'ada yang tidak beres' dalam informasi tersebut<sup>259</sup>).

---

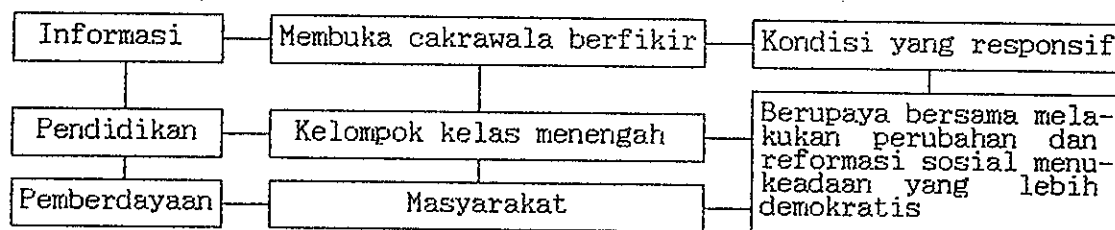
<sup>257</sup>) lihat kembali konsep partisipasi masyarakat menuju hukum responsif yang dikemukakan oleh Monet dan Selznick bahwa: pemberdayaan masyarakat ini akan membuat masyarakat makin sadar akan kedudukannya, hak dan kewajibannya. Ini akan membuat peran serta atau partisipasi masyarakat akan meningkat dengan sendirinya. Keperdulian akan situasi dan kondisi yang ada menimbulkan peran serta aktif dari masyarakat, masyarakat tidak cuma diam dan menerima tentang apa yang dikeluarkan oleh penguasa tetapi juga bersikap aktif memberikan saran, usulan ataupun sanggahan bila memang hal tersebut tidak berkenan di hati mereka.

<sup>258</sup>) Pemberdayaan masyarakat yang menghasilkan masyarakat yang kritis, terbuka dan tajam dalam menganalisa sebuah permasalahan, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan menunjukkan sikap kritis dan tajam terhadap hal-hal yang dikeluarkan oleh penguasa, khususnya dalam bidang aturan dan hukum. Seringkali apa yang mereka terima dalam media resmi tidak lain hanya sebagian dari data dan fakta yang faktuil, sebab yang sebagian lagi masih merupakan rahasia atau tidak layak untuk diberitakan. Namun ini bukanlah hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh apa yang sebenarnya terjadi dari sebuah permasalahan, sebab dengan tumbuhnya arus informasi yang tajam, terbuka serta tak terbandung ini membuat pola pemikiran masyarakat akan menjadi semakin kritis dalam memilih dan memilih mana yang menurut dirinya merupakan kebenaran, yang tentu saja didukung oleh data dan fakta yang faktuil.

<sup>259</sup>) Kecenderungan dalam sebuah masyarakat yang represif maka informasi adalah sesuatu yang teramat langka. Informasi yang beredar hanyalah sebatas informasi 'yang boleh beredar' sedangkan hal-hal yang dianggap cukup sensitif akan diberangus dan ditahan untuk beredar. Oleh karena itulah dalam masyarakat represif orang atau masyarakat tidak percaya lagi kepada informasi resmi yang beredar, bahkan cenderung menafsirkan sebaliknya atas informasi resmi tersebut, atau bertanya-tanya akan makna yang sebenarnya dibalik informasi resmi tersebut. Ketidakpercayaan masyarakat kepada bentuk informasi resmi tersebut tidak lain karena masyarakat sudah terlalu 'paham' akan informasi-informasi 'lip service' yang hanya menceritakan hal-hal tertentu dengan baik, tanpa mengungkapkan hal yang sebenarnya.



Bagan 4. Skema proses pemberdayaan masyarakat melalui informasi dan pendidikan oleh kelompok kelas menengah menuju kondisi yang responsif.



Dengan adanya kekritisian inilah, secara tidak langsung peran serta masyarakat yang telah menjadi golongan kelas menengah, sedikit demi sedikit akan mengubah persepsi penguasa, bahwa apa yang mereka hadapi kini bukan lagi golongan mayoritas yang hanya dapat diperintah dan tunduk pada setiap kebijakan penguasa, tetapi mereka juga mempunyai pola pemikiran dan andil dalam ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa<sup>260</sup>).

Pengkondisian yang utama dilakukan kepada masyarakat, dimana masyarakatlah yang mayoritas dapat diikutsertakan dalam pola pemahaman akan kondisi yang ada. Jika pola ini hanya diberlakukan pada golongan kelas menengah saja tanpa menyentuh keberadaan masyarakat yang paling bawah, maka tidak mustahil pola perubahan ini akan kurang mendapat dukungan yang obyektif karena perubahan ini bersifat mengambang, yaitu hanya disuarakan oleh golongan kelas menengah saja<sup>261</sup>).

<sup>260</sup>) Tanpa disadari kondisi ini kondusif untuk tercapainya keadaan Hukum Responsif yang diinginkan, sebab peran serta masyarakat dalam ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan yang ada menunjukkan salah satu ciri bahwa pola hukum yang ada sudah mulai mengarah kepada pola hukum yang Responsif. Dengan adanya dorongan dari Kelas menengah untuk melakukan reformasi sosial berdasarkan kekuatan sosial politik yang ada, disertai dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang dipelopori oleh Kelas Menengah, maka secara tidak langsung kondisi akan menuju pada keadaan dimana Hukum Responsif itu akan mulai menampilkan sifat dan ciri khasnya.

<sup>261</sup>) Lihat aksi gerakan mahasiswa tahun 1974, 1978 dan tahun 1980 yang kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat karena isu yang dilontarkan ke masyarakat kurang mengakar dan hanya memenuhi kepentingan sekelompok orang saja (sekelompok elit tertentu), bukan kepentingan masyarakat dalam arti luas. Tidak heran bila banyak angin perubahan yang dilontarkan oleh Golongan Kelas Menengah ini terpaksa harus kandas di tengah jalan, karena kurang berakar di hati masyarakatnya, tetapi bila kita menggunakan kelas menengah sebagai ujung tombak dalam mengadakan perubahan atau pengkondisian menuju Hukum yang Responsif dan mengikutsertakan masyarakat sebagai arus kekuatan yang ada, maka sedikit demi sedikit perubahan pasti akan terlaksana.

Bila melihat kepada ciri hukum responsif, maka keberadaan peran serta masyarakat adalah penting dalam ikut serta menentukan apa yang akan mengatur mereka. Partisipatif inilah yang juga ditonjolkan dalam arus perubahan, dengan kata lain memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa hal ini merupakan kewajiban mereka juga dalam mencapai keadaan hukum yang responsif<sup>262</sup>).

Secara umum konsepsi pemikiran ini adalah untuk mengemukakan kembali pesan-pesan yang ada di dalam realisme hukum dan ilmu hukum kemasyarakatan (*legal realism and sociological jurisprudence*). Semua doktrin itu adalah kerangka yang kita sebut sebagai sebagai sebuah studi empirik mengenai hukum. Tetapi dalam perbincangan para kaum intelektual itu sendiri telah terjadi perdebatan yang cukup keras, sehingga diperlukan sebuah pertemuan untuk mempersatukan kembali persepsi yang ada. Hukum responsif, bukanlah sosiologi, ia merupakan kegiatan yang nyata dari sosiologi dan realita dari ilmu hukum. Permasalahannya ialah bagaimana mereka membuat batasan formal dari perluasan pengetahuan tentang hukum, aturan-aturan untuk menentukan kebijakan hukum, perkiraan tugas hukum adalah untuk berusaha menjadi sebuah kebijakan yang bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan di masyarakat<sup>263</sup>).

---

262) Masyarakat yang diikutsertakan dalam adanya perubahan bukan hanya sekedar ikut tanpa tahu apa sebenarnya yang diinginkan, tetapi mereka ikut serta berperan aktif karena mereka tahu dan mengerti apa yang sebenarnya yang mereka kehendaki melalui proses pendidikan pemberdayaan masyarakat sebelumnya. Keikut-sertaan masyarakat yang buta bukan hanya akan menghambat terjadinya arus perubahan tetapi juga dapat membuat image kurang baik bagi golongan Kelas Menengah, karena mereka dapat saja dituding sebagai kelompok yang menunggangi atau dijadikan sebagai kambing hitam bila arus perubahan ini mengalami kekeerdasan.

263) Phillippe Nonet, Philip Selznick, 'Two Ways Law Can Die', *Op.Cit.*, hal. 115-118. Pandangan tersebut akan membuat pengertian khusus dalam kondisi yang modern, tetapi walaupun demikian batas pengertian yang spesifik bergantung pada konteks sejarahnya. Karena ketidak sabaran mereka, maka mereka menemukan pengertian hukum yang bertentangan dengan pandangan umum, ilmu hukum mendukung keberadaan sosiologi sebagai ilmu yang banyak memberikan penjelasan tentang keberadaan hukum di masyarakat apabila hal itu tidak dapat dijelaskan atau di apresiasi oleh kerangka hukum atau pengalaman hukum. Kita mencari rumusan yang tepat bagi Hukum Responsif dalam kerangka kerja yang lebih kuat untuk menemukan atau menguji-cobakan berbagai model alternatif tentang hukum dan masyarakat berdasarkan masing-masing permasalahan dan aspirasi yang ada. Pendekatan kita tekankan pada kontinuitas yang relevan terhadap hukum represif dan hukum otonom dalam setiap masyarakat yang kontemporer. Sehingga dalam waktu yang bersamaan kita membuka kembali dan memperluas kembali agenda untuk penelitian sosiologi. Lihat juga: Ronny Hanitijo Soesastro, 'Perkembangan Hukum dan Birokrasi Menurut Nonet dan Selznick', *Majalah Masalah-masalah Hukum* UNDIP, No. 3 Tahun 1990, UNDIP, Semarang.

Intinya, mungkin kita dapat menolong untuk mengemukakan kembali beberapa model pembangunan atau perkembangan hukum yang kita ajukan yaitu pengertian dari hukum responsif sebagai hukum dalam tingkatan yang tertinggi, dari sebuah proses evolusi hukum setelah melalui hukum represif dan hukum otonom. Tesis Philippe Nonet dan Philip Selznick yaitu hukum yang responsif menampilkan banyak kepentingan lembaga untuk menjawab atau menemukan keadilan<sup>264</sup>).

Model ini dapat dituangkan kembali menjadi point-point dimana terdapat dua jalan/cara yang dapat menyebabkan matinya hukum, yaitu hukum kehilangan identitas khususnya. Menurut sejarahnya ide dari hukum itu terkumpul dengan baik dari beberapa tujuan yang ideal, beberapa jalan pemikiran dan perkembangan institusional dari model *Rule of Law*<sup>265</sup>).

Dari keduanya, baik itu model hukum yang represif maupun model hukum yang responsif, tugas hukum kehilangan perlindungannya dari batas-batas kemandirian hukum dan menjadi bagian yang terpadu dalam pemerintahan dan politik. Oleh karenanya hal itu merupakan tindakan pelemahan/pengikisan dari ide "hukum yang khusus/mandiri".

Kematian dari hukum maksudnya ialah dalam kedua tahapan ini baik dalam tahapan hukum represif maupun dalam

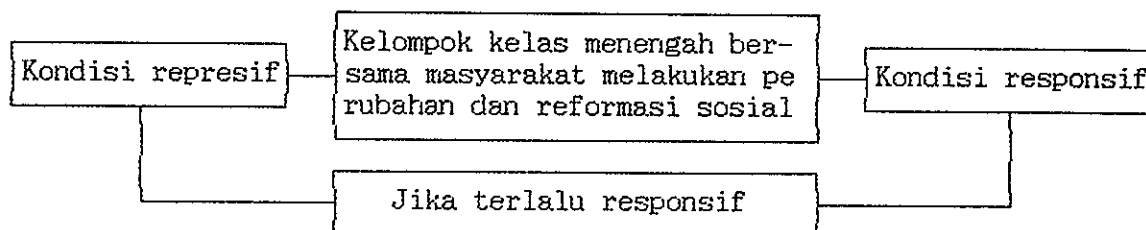
---

264) Dimana evaluasi ini, tidak memerlukan petunjuk yang mendua ataupun penyuluhan. Dalam pandangan penulis, hukum responsif adalah bentuk ideal dan merupakan prestasi dari hal yang disenangi menurut sejarah perkembangan hukum dan bergantung pada kepentingan khusus dalam mempertahankan semua sumber-sumber hukum yang ada dan yang dapat diolah. Dalam menjaga atau mempertahankan tugasnya atau menjinakkan tekanan (represi) kita membutuhkan semua tenaga yang tersedia agar dapat merubahnya menjadi hukum yang responsif, yang hanya dapat menyebabkan kerusakan berbahaya dari banyak kepentingan yang mendasarinya. Dalam setiap kesempatan kita banyak menampilkan sifat yang lebih responsif yang kesemuanya bergantung pada sejauh mana sebuah masyarakat atau institusi tersebut dapat mempertahankan nilai-nilai yang ada. Termasuk didalamnya adalah prestasi yang dimiliki dalam hal peradaban untuk menjawab atau menemukan keadilan. Lihat Juga: Renny Hanitijo Soesastro, 'Konsep Mengenai Hukum yang Responsif', *Majalah Masalah-masalah Hukum UNOIP*, No. 2 tahun 1984, UNOIP, Semarang.

265) Tentu saja hal itu merupakan tahapan pemikiran dari tugas hukum itu sendiri yang berbeda dan dipertajam dengan lingkungan sosial, susunan, tujuan politik dan dapat menjadi lebih mudah dimiliki apabila ada yang menguasai keahlian khusus dan tanggung jawab yang baik. Integritas dan penyokongan terhadap tindakan yang memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dan perhitungan untuk manifestasi yang tetap dan prestasi yang sungguh-sungguh dari hukum otonom.

tahapan hukum yang responsif, otoritas dari hukum atau kemandirian dari hukum ini menjadi melemah; diskresi diperluas; instrumental sudut pandang yang ada mengurangi segi keformalitasan yang ada dari "alasan yang dibuat-buat"; argumentasi hukum menjadi lebih sedikit karena dikesampingkan oleh analisis politik dan lembaga (bantuan) hukum menjadi lebih mudah diperoleh dan menjadi lebih mudah mendapat kritikan. Kondisi ini dapat mengakibatkan resiko terjadinya regresi (kemunduran) dari keadaan yang *responsiveness* menuju keadaan yang represif<sup>266</sup>).

Bagan 5. Skema keadaan yang terlalu responsif dapat mengakibatkan kondisi kembali menjadi represif



Meskipun demikian, walaupun secara nyata bertemu di suatu tempat, namun secara moral ada jurang pemisah antara hukum yang represif dengan hukum yang responsif. Dalam hukum yang represif integrasi antara hukum dan politik membatasi peradabannya, nilai dari *rule of law*, yaitu secara legal membentuk sebuah keadilan dan melakukan pengekangan dengan menggunakan kekuasaan. Sedangkan dalam hukum yang responsif, tujuan hukum adalah membuat reintegrasi antara hukum dan pemerintah dengan jalan memperluas pengertian dan jalinan

<sup>266</sup>) Monet, Selznick, Loc.cit, 'In both its repressive and its responsive modes, the legal order loses the protection of firm institutional boundaries and becomes an integral part of government and politics. ... In both repressive and responsive law the authority of rules is weakened; discretion is enlarged; an instrumental perspective undermines the formalism of 'artificial reason' legal argument is less easily distinguishable from policy analysis; legal institution become at once more accessible and more vulnerable. This condition create a risk of regression from responsiveness to repression. Lihat juga Penafsiran hukum yang responsif oleh Ronny Hanitijo Soemitro, dalam Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remadja Karya, Bandung, 1985.

nilai-nilai hukum dari sebuah pembatasan yang minimal untuk membentuk sebuah kelompok yang bertanggung jawab<sup>267</sup>).

Dengan kata lain perbedaan yang fundamental (mendasar) antara hukum yang represif dengan hukum yang responsif ialah ada pada pemisahan dalam penggunaan "kekuatan/kekuasaan politik", konflik yang kasar dan akomodasi dari tujuan-tujuan atau kepentingan yang khusus, dari "politik tingkat tinggi-elit politik" (*high politics*) sebagai alasan dalam upaya untuk merealisasikan ide-ide politiknya<sup>268</sup>).

Mengakhiri konsep pemikiran teoritik yang diajukan dalam tinjauan pustaka, penulis menekankan bahwa kondisi yang demokratis memang cukup menunjang dalam terbentuknya pola hukum yang responsif, tetapi tanpa bermaksud membantah itu semua, penulis lebih cenderung mengoptimalkan peran serta masyarakat dan kelas menengah yang ada melalui pendidikan yang ada, sebab tanpa pendidikan dan kemauan untuk bergerak atau mengadakan perubahan, rasanya akan sulit mewujudkan iklim yang demokrasi sekalipun.

Mewujudkan keadaan hukum yang responsif tidak hanya sekedar berkaitan dengan masalah demokrasi dari suatu negara, tetapi juga bagaimana sumber daya manusianya dan bagaimana keberadaan masyarakat dan kelas menengah dalam menghadapi serta memanfaatkan arus perubahan untuk mewujudkan

---

<sup>267</sup>) Hal ini memang mengundang banyak resiko yang muncul kepermukaan yang berusaha untuk menilai. Hukum memang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan, sekurang-kurangnya seseorang pada awalnya, maupun keberadaan lembaga yang menegakannya. Tetapi semua itu hanya diperlukan apabila tugas hukum untuk membentuk keadaan seperti demikian tidak mampu, atau akan menjadi lebih efektif apabila menyerap sumber-sumber yang ada pada kewajiban-kewajiban di masyarakat (*social order*). Dalam membentuk nilai-nilai hukum, hukum responsif cenderung diatas dan termasuk melindungi masyarakat politiknya, bukan melindungi hak milik (*property*) dan melindungi organisasi sosial sebagai sebuah mekanisme untuk mengamati pemerintah agar tetap pada tujuan utamanya.

<sup>268</sup>) Walaupun batas yang ada tidak lebih panjang untuk memulai sebuah bentuk kelembagaan, meskipun demikian kekhususan antara hukum dan politik dapat dipertahankan. Sekarang tentu saja kita lebih banyak mendatangkan atau memperhatikan tujuan-tujuan yang lebih substantif untuk mengurangi elemen-elemen kebijaksanaan dan partikularistik dalam proses politik. Untuk menjarang komitmen ke-abadi-an moral yang muncul dalam keputusan politik dan untuk membangun teori keperdulian masyarakat yang dapat mempertinggi rasionalitas dari diskursus politik dan pelayanan mandiri yang moderat digunakan untuk menggapai kekuatan dalam konflik politik.

keadaan hukum yang responsif di Indonesia. Sebab bukankah untuk mewujudkan demokrasi, diperlukan perubahan dahulu di masyarakatnya, apakah melalui pengkodisian maupun melalui pendidikan dan dorongan dari kelas menengah untuk memeloporkannya. Dengan adanya perubahan terlebih dahulu di masyarakat tentang konsepsi dan persepsi yang menyangkut diri mereka melalui pendidikan, dan peran serta kelas menengah dalam memulai arus pembaharuan, maka demokrasi dan perubahan hukum menuju hukum responsif akan lebih mudah dicapai.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Sikap Oposan Para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi Terhadap Para Pemegang Kekuasaan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuknya sikap oposan dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap para pemegang kekuasaan merupakan sebuah proses yang timbul dan berkembang dikalangan para aktivis gerakan mahasiswa itu sendiri. Sikap oposan yang muncul dan berkembang, sebenarnya tidak lain dari sebuah reaksi atas berbagai ketimpangan sosial-politik-perekonomian yang terlalu nyata dan terlalu mencolok keberadaannya di masyarakat<sup>1)</sup>.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa awal timbulnya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi tidak lain juga merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak berdiri sendiri. Ia merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki berbagai latar belakang kepentingan atas sebuah perubahan sosial yang dikehendaki<sup>2)</sup>.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap latar belakang pemikiran sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, secara *taksonomis*

---

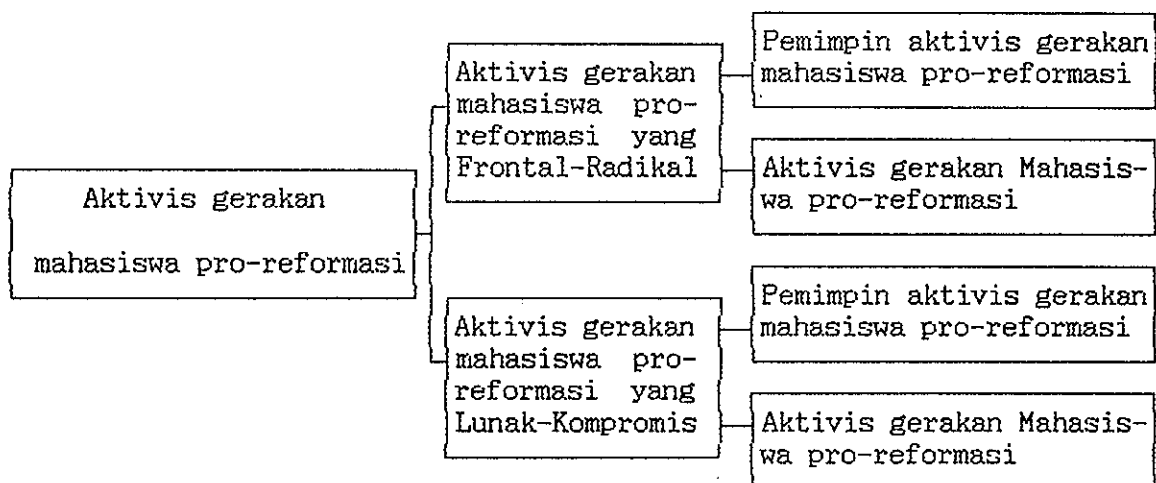
1) Asumsi ini diangkat dari realita yang menunjukkan bahwa hampir sebagian besar berbagai bentuk aksi mahasiswa merupakan sebuah bentuk reaksi atas berbagai kebijakan yang dilontarkan oleh penguasa. Berbagai kebijakan tersebut banyak yang menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sosial secara nyata, walaupun dalam bentuk perumusannya bersifat netral dan tidak memihak, namun dalam penerapannya atau dalam prakteknya telah menyimpang terlalu jauh, sehingga hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki atau dekat dengan sumbu kekuasaan. Asumsi ini diangkat dari beberapa argumen informan yang berhasil penulis temui dilapangan, namun berdasarkan permintaan yang bersangkutan, maka nama dari yang bersangkutan tidak berkenan untuk dicantumkan dalam penulisan laporan ini.

2) Fenomena sosial yang memiliki berbagai latar belakang yang penulis maksudkan adalah adanya peranan-peranan kelompok tertentu yang memang memotivasi bentuk-bentuk gerakan sosial disamping gerakan mahasiswa itu sendiri. Sebab dalam kenyataannya sebuah gerakan yang sudah bercampur baur menjadi gerakan massa sulit untuk di klarifikasi secara jelas dan nyata tentang apa tujuan, kehendak dan darimana mereka berasal, sehingga dalam hal ini penulis-pun menyadari adanya kekurangan dalam mengkaji gerakan mahasiswa pro-reformasi sebagai bagian dari gerakan massa yang sulit untuk diidentifikasi. Namun tanpa mengingkari adanya kekurangan tersebut penulis telah berusaha untuk memaparkan sebuah pemaparan tentang aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sejauh yang penulis dapatkan dalam penelitian empiris.

keberadaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terbagi kedalam dua kategori. Kategori yang pertama ialah aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang bertemperamen emosional tinggi, sehingga ia cenderung bersikap frontal dan radikal, sedangkan kategori yang kedua ialah aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang bertemperamen emosional sedang, sehingga ia cenderung bersikap lunak dan kompromis. Dari masing-masing kategori aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut, masih terbagi lagi menjadi dua tipe aktivis. Tipe pertama ialah tipe pemimpin aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, dan tipe kedua adalah tipe aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami keberadaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi secara *taksonomis*, dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Bagan 1. Taksonomi aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi



Bagan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari aparat keamanan dan ketertiban.

Dari bentuk pemaparan *taksonomis* tersebut untuk membahas sesuai permasalahan yang ada berdasarkan konsep pemaparan analisis *komponensial*, yaitu: mengapa para aktivis



gerakan mahasiswa pro-reformasi memiliki sikap oposan terhadap para pemegang kekuasaan. Secara *komponensial*<sup>3)</sup>, penulis berusaha memaparkan secara rinci temuan-temuan dalam bentuk preposisi yang didapat dari hasil penelitian secara empiris.

Secara *komponensial* penulis membagi temuan-temuan yang ada ke dalam beberapa preposisi, dan dalam beberapa preposisi tersebut akan kembali diuraikan berdasarkan detail-detail faktual yang mendukung preposisi tersebut<sup>4)</sup>.

Dalam mengungkap latar belakang pemikiran yang menyebabkan munculnya sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa terhadap para pemegang kekuasaan, penulis mengajukan sembilan (9) preposisi. Dua preposisi yang pertama (preposisi 1 dan 2) lebih terfokus pada kondisi intern aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, dan tujuh preposisi berikutnya (preposisi 3 sampai 9) terfokus pada kondisi ekstern yang mempengaruhi munculnya sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap para pemegang kekuasaan.

Dari kesembilan preposisi tersebut secara umum dapat dikemukakan bahwa sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap para pemegang kekuasaan muncul dan

---

3) Bentuk paparan metode penelitian yang penulis gunakan dapat dilihat dalam Bab I perihal Metodologi Penelitian tentang Model Metode Analisis dalam Penelitian Kualitatif yang penulis paparkan dalam bentuk tabel, sehingga lebih memudahkan kerangka berfikir yang sistematis akan materi yang hendak penulis kemukakan dalam penelitian ini.

4) Temuan-temuan ini sebenarnya dikemukakan oleh para informan secara acak, tidak sistematis dan dikemukakan dalam berbagai pertemuan dan dalam berbagai kondisi yang berbeda, sehingga pengklarifikasian secara *komponensial* dilakukan sepenuhnya oleh penulis. Temuan yang satu dengan temuan yang lainnya dituangkan oleh penulis dalam bentuk preposisi yang dicoba untuk disusun secara sistematis per-bahan kajian, namun dalam kenyataannya temuan-temuan tersebut dapat saja muncul secara acak dan mempengaruhi temuan-temuan lainnya. Sehingga walaupun penulis sudah menyusunnya secara sistematis, tidak menutup kemungkinan apabila temuan-temuan tersebut akan muncul dalam temuan lainnya sebagai indikator, atau sebagai faktor yang mempengaruhi atau faktor yang dipengaruhi, karena dalam penelitian ini keterkaitan antar temuan sangatlah erat dan terbukti secara nyata bahwa keterpengaruhan temuan satu dan temuan lainnya amatlah menentukan kondisi yang ada. Temuan-temuan ini dibentuk oleh penulis menjadi beberapa preposisi berdasarkan hasil diskusi dan perbincangan dengan para informan, dalam beberapa waktu dan beberapa peristiwa. Berdasarkan kesepakatan penulis dengan informan, maka informan tersebut tidak bersedia dicantumkan namanya dalam penelitian ini.

terbentuk karena<sup>5)</sup>:

- Preposisi 1:** *Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi memiliki pemikiran yang kritis melalui berbagai informasi.*
- Preposisi 2:** *Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi merasa memiliki Kekuatan moral dan dapat berperan sebagai lembaga kontrol sosial.*
- Preposisi 3:** *Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap keberadaan lembaga formal dan lembaga informal.*
- Preposisi 4:** *Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap penguasa.*
- Preposisi 5:** *Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap wakil rakyat.*
- Preposisi 6:** *Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap tokoh agama.*
- Preposisi 7:** *Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap lembaga pendidikan.*
- Preposisi 8:** *Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan meyakini adanya kebobrokan di bidang moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian.*
- Preposisi 9:** *Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan meyakini adanya kebobrokan di bidang hukum.*

Dalam penelitian ini proses pergaulan yang cukup lama dan membutuhkan keuletan serta ketabahan untuk memasuki 'dunia' aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, ternyata

---

<sup>5)</sup> Preposisi ini merupakan hasil temuan penulis setelah melakukan klarifikasi secara sistematis dan acak atas realita sosial yang ada di lapangan. Preposisi dikemukakan berdasarkan hasil temuan setelah penulis melakukan pendekatan, perbincangan, diskusi terbatas dengan beberapa informan pokok dan informan perantara, dan juga berdasarkan realita sosial yang terjadi ketika melakukan aksi demonstrasi, unjuk rasa, menggelar mimbar bebas, menggelar baliho dan spanduk serta saat melakukan pendudukan di gedung DPRD-DPR/MPR di Jakarta. Preposisi ini diharapkan dapat dijadikan kerangka acuan utama mengapa sikap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi bersikap oposan terhadap para pemegang kekuasaan.

membuahkan beberapa bentuk preposisi. Salah satunya dikemukakan sebagai awal kajian, sebab dalam kenyataannya antara preposisi satu dengan preposisi yang lainnya memiliki saling keterkaitan dan dapat pula merupakan sebuah proses yang saling berhubungan secara sistematis maupun acak<sup>6)</sup>.

Preposisi pertama merupakan sebuah preposisi pokok untuk mulai beranjak memahami perilaku kritis para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, kemudian dilanjutkan ke Preposisi yang berikutnya sampai dengan preposisi yang terakhir. Atau dengan pemahaman yang lain dapat dikatakan bahwa antara preposisi yang satu dengan preposisi yang berikutnya dapat juga dikategorikan sebagai sebuah jenjang untuk mengantarkan memahami preposisi berikutnya.

Dari bentuk pemaparan preposisi-preposisi tersebut, penulis mencoba untuk menguraikannya, sehingga dari masing-masing preposisi dapat terlihat dengan jelas konsep-konsep pemikiran yang melatar belakangi munculnya sebuah sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap para pemegang kekuasaan<sup>7)</sup>. Dan implementasi dari sikap oposan ini muncul berupa tindakan atau perbuatan yang 'menyerang' para pemegang kekuasaan dalam bentuk yang lebih radikal, yaitu melakukan demonstrasi, menggelar mimbar bebas, melakukan aksi massa turun ke jalan, menggelar baliho dan spanduk serta menduduki gedung DPRD serta DPR/MPR.

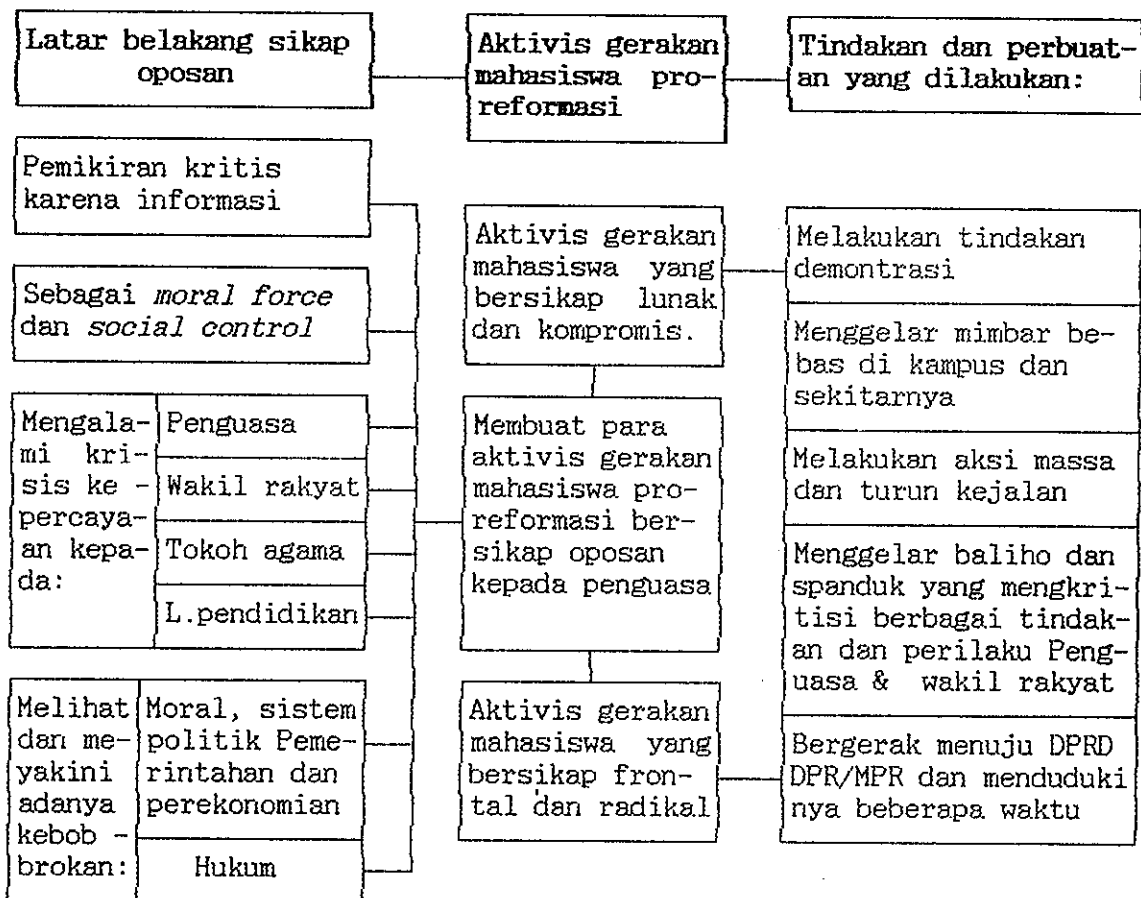
---

6) Keberadaan ke-semilan preposisi ini sebenarnya tidak sekaligus datang menjadi sembilan preposisi, tetapi ia datang secara bertahap dan diendapkan untuk kemudian disusun secara sistematis yang saling mempengaruhi. Keberadaan ke-semilan preposisi ini bukan sebuah jumlah yang tetap, ia dapat saja berkembang apabila ditemui komposisi-komposisi baru yang dikemukakan oleh informan. Tetapi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengungkap sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi hanya menunjukkan ke-semilan preposisi tersebut.

7) Realita menunjukkan bahwa komposisi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tidaklah se-sistematis apa yang diuraikan dalam kajian ini, mereka dapat saja melakukan aksi unjuk rasa kejalan dahulu baru kemudian dialokasikan di sekitar kampus, atau sebaliknya, namun secara umum dapat dikategorikan bahwa dari tingkat yang paling normal hingga tingkat yang paling radikal dapat dilihat di bagan, yaitu mulai dari aktivis yang bersikap lunak dan kompromistis hingga aktivis yang bersikap radikal.

Guna memahami secara lebih jelas gambaran munculnya sikap oposan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap para pemegang kekuasaan dengan melihat juga ke-sembilan preposisi tersebut, dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Bagan 2. Munculnya sikap oposan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi



Bagan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Berdasarkan beberapa preposisi yang dikemukakan diatas dan digambarkan dalam bentuk bagan serta hubungannya dengan sikap oposan dan implementasi dari sikap oposan tersebut, maka preposisi-preposisi tersebut akan diuraikan berdasarkan kepada realita yang ada dan yang diperoleh di lapangan.

1. Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi memiliki pemikiran yang kritis melalui berbagai informasi.

Dalam memasuki lingkungan kegiatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi diperlukan waktu dan moment yang tepat, sebab untuk dapat menjalin hubungan secara mendalam dan menumbuhkan rasa kepercayaan agar dapat melakukan eksplorasi data secara cermat dibutuhkan penghubung dalam sebuah aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi (*tentunya yang tengah berlangsung*). Hubungan yang terjalin tidak begitu saja terbuka dan diterima secara penuh, sebab bagaimanapun juga sikap kecurigaan untuk berdialog dan bertukar pendapat masih terlihat secara jelas<sup>8)</sup>.

Hal ini dapat dimaklumi karena bagaimanapun juga kondisi politik dan keamanan yang ada saat berlangsungnya penelitian ini masih dalam kondisi yang represif, dimana pola-pola pikir yang berbeda dengan pandangan penguasa pada umumnya merupakan sebuah bentuk pola pikir yang dilarang. Walaupun kedatangan penulis disambut dengan tangan terbuka namun sikap kecurigaan dan sedikit 'menyelidik' masih terasa hangat<sup>9)</sup>.

Adalah bukan hal yang mudah untuk mencoba memasuki sebuah dunia aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi manakala suhu politik sedang memanas, dan tekanan repre-

---

8) Hubungan dengan informan awal terjadi ketika penulis mencari informasi tentang aktivitas kegiatan kemahasiswaan yang tengah berlangsung di sebuah kampus. Penulis berkenalan dengan seorang informan yang aktif juga dalam bidang penerbitan mahasiswa. Karena penulis-pun memiliki latar belakang pernah aktif dalam 'dunia' penerbitan mahasiswa di UNSOED, maka tidak sulit untuk menjalin komunikasi melalui jalur penerbitan pers dan menggunakannya sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam. Melalui informan awal juga penulis diperkenalkan dengan informan-informan berikutnya, baik informan berikutnya maupun informan perantara. Namun memang untuk memasuki kalangan mereka, masih terlihat adanya bentuk kecurigaan, tetapi karena ada semacam 'jaminan pribadi' dari informan awal tersebut, hubungan dapat berlangsung walaupun masih suka terlihat adanya sikap menyelidik.

9) Sikap mencurigai merupakan sikap yang wajar, karena kedatangan penulis masih merupakan sosok orang asing. Walaupun telah penulis kemukakan bahwa penulis adalah mahasiswa juga yang sedang melakukan penelitian, tetapi sikap kecurigaan tetap masih kentara. Untuk mengakrabkannya penulis berusaha untuk datang berulang kali, ikut ngobrol-ngobrol dan mencoba membaur dengan kelompok mereka. Hubungan baru semakin akrab ketika penulis terlihat ikut serta dengan mereka dalam berbagai kelompok diskusi yang mencoba melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan Penguasa.

sif dari penguasa sedang gencar-gencarnya dijalankan. Namun dengan perantaraan seorang aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang telah dikenal serta jaminan pribadi darinya, sedikit demi sedikit, lambat-laun kehadiran penulis di antara para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut dapat diterima, walaupun untuk aktivis-aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang baru berjumpa pertama kali, selalu masih terlihat sikap curiga dan *'agak sedikit menyelidik'*.

Ibarat memasuki sebuah dunia gerakan *'bawah tanah'* untuk profil-profil baru yang mencoba membaur serta memasuki dunia tersebut, tidak mudah untuk diterima sekaligus, tidak mudah pula untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang diinginkan. Semua informasi diperoleh secara bertahap dan senantiasa dilakukan upaya pengecekan silang secara tidak kentara melalui berbagai perbincangan dalam membahas fluktuasi kondisi sosial-politik-ekonomi yang tengah bergejolak di saat itu<sup>10)</sup>.

Dalam dunia aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi Informasi adalah sesuatu *'barang'* yang sangat berharga, sebab dengan informasi yang mereka miliki, mereka seakan telah menggenggam beberapa kekuatan dan menaksir kemampuan untuk melakukan sebuah upaya-upaya tertentu sebagaimana yang diinginkan. Namun bagi seorang profil baru (*pendatang baru*) dalam dunia aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi belum tentu sebuah informasi yang ada dapat

---

<sup>10)</sup> Informasi yang diperoleh oleh para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi, pada awalnya berupa informasi yang disebarkan dari satu perbincangan ke perbincangan lainnya, kemudian disusun dengan beredarnya jenis buku-buku tertentu, selebaran tertentu, baik yang memang dapat dibeli dengan mudah dipasaran maupun dengan bentuk buku-buku dan selebaran jenis tertentu yang tidak beredar secara bebas. Buku-buku dan selebaran yang beredar bebas biasanya membicarakan tentang masalah Hak Asasi Manusia, Hukum, Politik, Demokrasi dan Perekonomian. Sedangkan buku atau selebaran yang tidak diperedarkan secara bebas dapat berupa salinan informasi yang berasal dari internet, salinan informasi dari Radio BBC atau buku-buku tertentu yang memang dilarang beredar oleh Penguasa, atau buku-buku terbitan dari Amnesty Internasional, Asian Human Right Watch, dan buku-buku tertentu yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit tertentu, macam ISAI, YLSHI, ELSAM, dll.

beredar bebas kepada dirinya, sebab adapula informasi-informasi tertentu yang hanya diedarkan dan hanya disebar-barkan pada dan kalangan tertentu saja<sup>11)</sup>.

Hal ini dilakukan bukan hanya sekedar untuk menjaga sumber-sumber informasi tertentu (*langkah-langkah pengamanan informasi kedalam*), namun juga menjaga informasi itu sendiri agar tidak ditafsirkan secara keliru oleh orang-orang yang 'mengintai' kegiatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi (*langkah-langkah pengamanan keluar*). Tidak jarang sebuah informasi hanya dimiliki dan diketahui oleh kalangan tertentu saja (*beredar secara terbatas*), tetapi banyak juga informasi yang beredar secara bebas, diperbincangkan, diperdebatkan bahkan dianalisis melalui beberapa kelompok perbincangan dan kelompok-kelompok studi insidental<sup>12)</sup>.

Sebuah informasi oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat diperoleh dari banyak sumber, dapat berupa sumber lisan, tertulis maupun dari media elektronik. Berbagai jenis informasi dapat dikembangkan dan cek silang dengan beberapa sumber lainnya, sehingga sebuah informasi yang diperoleh oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut tidak saja langsung dipercaya, namun dikonfirmasi lebih lanjut kepada sumber

---

11) Pada awalnya penulis hanya mendapatkan informasi-informasi yang beredar secara umum dan sedikit sekali informasi yang beredar secara terbatas, tetapi lambat laun, lingkungan tersebut mau terbuka dan mau berbagi dengan penulis tentang berbagai informasi yang mereka peroleh, khususnya informasi yang berkaitan Internet, atau buku-buku yang berasal dari terbitan khusus yang diterbitkan oleh penerbit khusus pula.

12) Realita terbentuknya kelompok-kelompok studi di kalangan mahasiswa dan aktivis gerakan mahasiswa pada dasarnya tidak jauh berbeda. Namun kelompok studi yang muncul di kalangan mahasiswa biasanya berbentuk sebuah lembaga 'resmi' yang memang memfokuskan diri untuk mengkaji dan mempelajari bidang-bidang tertentu yang memang bidang kajiannya, tetapi dalam kelompok studi para aktivis gerakan mahasiswa kelompok tersebut bersifat serabutan, tidak pernah menggunakan nama-nama resmi untuk dijadikan 'merek' dan bidang kajiannya pun serabutan tidak harus terpaku pada satu hal. Biasanya dalam kelompok studi para aktivis gerakan mahasiswa bidang kajiannya multidisiplin, dapat dari politik, loncat ke hukum dan tiba-tiba saja lari ke kajian ekonomi. Tak pernah batasan baku dalam fokus diskusi dan perbincangan mereka. Hanya saja mereka pengkajian-pengkajian tersebut dalam sudut pandang praktis dengan menyertakan sedikit teori yang mereka ketahui.

lisan tersebut (*open network information*), atau menunggu sumber-sumber lainnya, yang tidak jarang sulit untuk diketahui jaringannya (*close network information*)<sup>13)</sup>.

Konsep dasar yang diperoleh dari pergaulan dengan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ini adalah tentang bagaimana merubah sebuah informasi menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan sebuah perubahan sosial. Informasi mampu melakukan perubahan apapun dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kondisi yang paling minim pun sebuah informasi mampu menentukan bergulir atau berhentinya sebuah gerakan.

Untuk menentukan validitas sebuah informasi di kalangan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi digunakanlah imbalanced informasi-informasi yang beredar bebas, yang diperoleh melalui media massa dan media elektronika (televisi, radio dan internet). Namun uniknyanya apa yang beredar melalui media massa dan media elektronika seakan-akan bertentangan dengan informasi yang beredar di '*gerakan bawah tanah*'. Misalnya saja apabila dikemukakan oleh penguasa sebuah pernyataan yang menyatakan "A", maka oleh lapisan '*gerakan bawah tanah*' akan ditafsirkan "Z", atau sebaliknya, sehingga dari informasi saja sudah mulai terlihat adanya bentuk-bentuk ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga formal maupun informal<sup>14)</sup>.

---

13) Realita menunjukkan bahwa informasi bergerak sangat cepat di kalangan para aktivis gerakan mahasiswa. dapat saja sebuah informasi yang datang pada pagi atau sore hari, sore atau pagi harinya sudah berubah lagi. Perputaran informasi tidak jarang bercampur dengan isu-isu yang tidak jelas ujung pangkalnya, atau bercampur dengan gosip-gosip perihal kekuasaan yang lebih banyak bersifat 'membakar' ketimbang memberikan informasi yang sebenarnya. Validitas informasi di kalangan berita yang diterima oleh para aktivis tersebut memang sangat sulit sekali untuk dicek kembali, sebab terkadang pula informasi yang benar bercampur baur dengan gosip, isu, serta berita angin yang tidak jarang sulit sekali dilacak sumbernya.

14) Penafsiran yang sebaliknya menunjukkan bahwa antara realita dan informasi yang mereka peroleh sudah tidak dapat disinkronisasikan lagi. Terkadang berita-berita yang dikeluarkan secara resmi sudah di-apriorikan penuh dengan '*kebohongan*' '*lip service*' bahkan penuh dengan berita yang hanya mengemukakan yang baik-baik saja tanpa mau mengutarakan kondisi yang sebenarnya. Disamping itu pula penggunaan eufemisme di kalangan jurnalistik semakin membuat berita yang sebenarnya menjadi tersamar. Misalnya saja diberitakan bahwa '*telah menelan korban 3 orang*' ternyata korban yang sebenarnya lebih dari tidak orang. Atau contoh lain misalnya '*telah diberhentikan*' merupakan sebuah penghalusan dari kata '*dipecat*' dll. bentuk pemaparan yang



Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi memiliki sikap kritis sebagai akibat adanya berbagai informasi yang mereka peroleh dalam pergaulannya. Melalui pergaulan, sumber bacaan tertentu dan informasi yang berasal dari media elektronika membuat mereka mampu melihat dan membandingkan antara teori dan realita yang ada.

Konsepsi pemikiran yang demokratis, terbuka, jujur dan lugas merupakan hasil dari sebuah proses yang berlangsung secara terus menerus melalui proses interaksi sesama mereka, dan juga merupakan proses pencarian pribadi untuk menemukan konsepsi yang lebih sesuai dengan alam pemikirannya. Tidak jarang terjadi friksi diantara mereka manakala konsepsi-konsepsi yang mereka kemukakan saling berbeda, saling berseberangan dan sulit untuk menemukan serta memutuskan konsepsi mana yang benar dan harus didahulukan. Namun hal ini bukan berarti adanya '*friksi secara fisik*', sebab para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut menganut pola pemikiran yang terbuka dan senantiasa menghargai adanya perbedaan pendapat, selama memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itulah bentuk-bentuk friksi hanya terjadi dalam konteks pemikiran dan ide-ide implementasi yang berbeda<sup>15)</sup>.

Dari berbagai bentuk informasi yang mereka peroleh (dengan mengesampingkan validitas informasi tersebut, sebab ada juga informasi yang invalid), informasi menjadi-

---

ditafsirkan sebaliknya menunjukkan bahwa realita kepercayaan masyarakat sudah mulai berkurang sehingga mereka justru menafsirkan secara terbalik dari berita yang beredar bebas, atau menafsirkan apa yang ada di balik berita tersebut, atau ada tendensi-tendensi apa mengeluarkan berita yang demikian.

15) Perbedaan pendapat dikalangan mahasiswa merupakan hal yang biasa, walaupun terlihat kadang bersitegang dalam mengemukakan sebuah konsep yang diyakininya paling benar, namun mereka menerima perbedaan sikap, pola pandang dan kegiatan dengan keterbukaan. Realita menunjukkan bahwa dilapangan mahasiswa tersebut tergabung dalam beberapa kelompok, bahkan ada yang tadinya satu kelompok kemudian karena mengalami perbedaan visi menjadi pecah dan membentuk kelompok baru.

kan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan sebuah kegiatan. Tidak jarang karena informasi yang keliru atau tidak lengkap, maka kegiatan yang sudah direncanakan dapat saja dibatalkan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Guna memahami secara lebih jelas sumber-sumber informasi dalam '*dunia*' aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, pemaparannya dalam bentuk tabel dapat dilihat berikut ini:

Tabel 1. Sumber informasi bagi aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang membentuk pola berfikir kritis.

Media	Sumber-sumber informasi yang membuka berbagai bentuk pemikiran yang kritis.
Lisan	Sumber informasi lisan diperoleh dari berbagai bentuk percakapan baik formal maupun informal, melalui diskusi terbatas, maupun kelompok studi.
Tertulis	Sumber informasi tertulis diperoleh dari berbagai buku bacaan, leaflet, pamflet, buletin, media massa, terbitan terbatas, terbitan terbatas asing, jurnal berkala, jurnal asing, jurnal insidental yang beredar secara resmi maupun secara sembunyi-sembunyi.
Media Elektronika	Sumber informasi yang bersumber dari media elektronika: melalui televisi, radio (BBC, VOA, Radio Hilversum, Deutsche Welle, Radio Australia) dan melalui internet.

Tabel disusun dan dikualifikasikan berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Realita menunjukkan bahwa dari beberapa aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, informasi yang mereka peroleh melalui '*jaringan bawah tanah*' seringkali diakui secara mutlak validitasnya, namun disamping itu adapula beberapa aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang juga bersifat selektif terhadap informasi yang berasal dari sumber '*jaringan bawah tanah*' sembari menggunakan

nalar dalam menerima dan mencerna informasi yang diterima melalui '*jaringan bawah tanah*' tersebut.

Proses terjadinya pola pikir kritis yang menjadikan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi bersikap oposan terhadap para pemegang kekuasaan adalah melalui beberapa informasi yang diperolehnya. Di satu sisi para aktivis tersebut menerima '*pemberitaan resmi*' yang isinya '*baik-baik*' (dan dianggap penuh dengan '*kebohongan*' saja) padahal realitanya tidak menunjukkan demikian, sedangkan di sisi lain informasi yang beredar melalui '*jaringan bawah tanah*' oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi '*hampir-selalu*' menunjukkan realita-realita yang terjadi (walaupun tidak selalu sepenuhnya benar)<sup>16)</sup>.

Ketidaksesuaian antara teori dan realita yang kerap ditemuinya dalam kehidupan bermasyarakat membuat para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi mencoba untuk menganalisisnya, dan mengkajinya sebagai sebuah '*ketidakberdayaan*' sistem sosial dan politik sebagai akibat '*jargon-jargon*' yang selama ini diyakini kebenarannya sebagai sebuah ideologi.

Proses mengkritisi berbagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa berawal dari banyaknya kesenjangan-kesenjangan antara beberapa pemahaman yang mereka peroleh di bangku kuliah atau teoritik dengan realita yang terjadi di masyarakat. Secara umum kesenjangan itu dimunculkan dalam bentuk berbagai penyimpangan moral, sistem politik pemer-

---

<sup>16)</sup> Kesenjangan antara pemberitaan dan realita inilah yang kerap mengguncang para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ini berfikir "Akan ada move politik apakah dalam pemberitaan ini", atau "Akan ada move ekonomi apakah setelah pemberitaan ini". Kondisi yang selalu berada di dalam ketidakpastian, tertekan dan penuh dengan berita-berita '*lip service*' membuat rasa kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi kepada lembaga formal dan lembaga informal semakin meluntur. Kondisi yang melunturkan berbagai rasa kepercayaan yang ada membuat para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi semakin kian percaya hanya kepada kemampuan yang dimilikinya sendiri, dan hanya mengandalkan berbagai informasi yang diperolehnya secara selektif untuk melakukan sebuah kegiatan.

intahan, perekonomian, dan hukum.

Dari pola pemikiran kritis inilah sebagai bentuk preposisi yang pertama, proses berikutnya akan melahirkan bentuk preposisi yang kedua yaitu gerakan mahasiswa pro-reformasi sebagai kekuatan moral dan lembaga kontrol sosial.

**2. Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi merasa memiliki kekuatan moral dan dapat berperan sebagai lembaga kontrol sosial.**

Kesadaran moral dan sosial yang tinggi untuk memikul sebuah tanggungjawab atas keberadaan masyarakatnya semata-mata timbul karena para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi merasakan bahwa ada sebuah beban tanggungjawab moral dan beban tanggungjawab sosial yang harus diemban oleh mereka. Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sudah sedari awal menyadari bahwa selain karena 'beban sejarah' yang mereka miliki bahwa gerakan mahasiswa merupakan sebuah kekuatan moral dan lembaga kontrol sosial, maka gerakan mahasiswa-pun sudah merasa bahwa untuk melakukan sebuah perubahan sosial harus menunggu saat dan waktu yang tepat.

Seperti yang sudah dikemukakan dalam beberapa pemaparan sebelumnya bahwa gerakan mahasiswa pro-reformasi merupakan sebuah hasil proses pergerakan mahasiswa yang berjalan selama bertahun-tahun sebelumnya, sehingga gerakan mahasiswa pro-reformasi itu sendiri sudah merupakan sebuah bentuk-bentuk pergerakan yang tidak langsung 'selalu' mengambil tempat berseberangan dengan pihak pemegang kekuasaan. Ini dapat terlihat sejak dimulainya Pemilu di tahun 1971 dan ditandai dengan mun

Perpaduan antara 'beban sejarah' dengan realita sosial yang memang 'mengharuskan' gerakan mahasiswa pro-reformasi mulai 'bergerak' untuk segera menghasilkan sebuah kekuatan moral yang nyaris tak terbendung. Ancaman-ancaman 'penindakan' oleh aparat keamanan dan keterlibatan yang biasanya selalu membayangi pada setiap kegiatan kemahasiswaan, terutama kegiatan kemahasiswaan yang dianggap 'sudah keluar jalur' tidak lagi diperhitungkan sebagai ancaman-ancaman serius dalam mempertahankan apa yang diyakini oleh aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sebagai sebuah kebenaran.

Konsep dasar timbulnya kekuatan moral bagi para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menuju fungsinya sebagai sebuah lembaga kontrol sosial, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Konsep dasar pemikiran timbulnya kekuatan moral bagi aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menuju fungsi kontrol sosial.

Fungsi	Konsep dasar pemikirannya
Kekuatan moral ( <i>moral force</i> )	Merasa memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dari masyarakat umumnya.
	Merasa dibiayai oleh uang atau dana (disubsidi) yang berasal dari masyarakat.
kontrol sosial ( <i>social control</i> )	Memiliki sebuah gambaran sejarah bahwa gerakan mahasiswa mampu melakukan perubahan sosial.
	Memiliki sebuah kekuatan yang mampu melakukan kontrol sosial sebagai wujud kekuatan moral.

Tabel disusun dan dikualifikasikan berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Pada para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi kesadaran moral sebenarnya sudah sejak adanya gejolak ekonomi di pertengahan tahun 1997. Para aktivis gerakan

mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa dampak yang paling parah dari adanya gejolak dan krisis ekonomi ini adalah menimpa dan melanda masyarakat kecil secara meluas. Fenomena yang timbul adalah dengan pertama kali mengedepankan permasalahan-permasalahan ekonomi, pengadaan sembako dan kemudian baru menyusul sedikit demi sedikit masalah yang bersinggungan dengan aspek politik.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang mulai merasakan bahwa menaiknya suhu politik dan ekonomi tentunya secara langsung akan membawa sedikit tekanan kepada gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Tindakan-tindakan pembatasan dan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban tanpa disadari justru membuat para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi makin berfikir kritis dan meningkatkan kualitas gerakannya secara diam-diam.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap masyarakatnya mulai dilakukan dengan cara menggelar aksi unjuk rasa, demonstrasi dan mimbar bebas hanya dibatasi lingkungan kampus mereka, itupun dengan penjagaan secara ketat oleh aparat keamanan dan ketertiban di seputar kampus dan lokasi aksi unjuk rasa, demonstrasi dan mimbar bebas tersebut dilakukan<sup>18)</sup>.

Fungsi lembaga kontrol sosial yang dijalankan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dimulai

---

18) Pada awalnya aksi tersebut dilakukan dengan memaparkan isu-isu aktual diseperti masalah perekonomian dan naiknya harga-harga sembako. Namun sebenarnya dengan aksi yang telah dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut telah memberikan sebuah pemaparan realita baru bahwa aktivis gerakan mahasiswa-pun tidak hanya mampu bergerak secara insidental dan berkuat diseperti konsep pemikiran yang berbeda. Tetapi juga mampu membangkitkan kesadaran masyarakat disekelilingnya bahwa mereka-pun peduli akan kepentingan masyarakat luas, walaupun hanya baru sebatas demonstrasi dan mimbar bebas di lingkungan sekitar kampusnya saja. Paling tidak dari aksi tersebut sudah menunjukkan kepada masyarakat bahwa aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi-pun peduli kepada kepentingan masyarakat dan mampu membangkitkan sebuah 'langkah permulaan' menuju sebuah bentuk pergerakan yang lebih progresif.

ketika para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut melakukan aksi-aksi yang menyoroti secara langsung berbagai kebijakan yang dilakukan oleh penguasa. Berbagai kebijakan tersebut walaupun hanya sebatas dikritisi melalui berbagai aksi demonstrasi atau menggelar mimbar bebas dilingkungan kampusnya, namun hal itu sudah menunjukkan kepedulian yang mengarah kepada fungsi lembaga kontrol sosial.

Secara subyektif aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi lebih merupakan sebuah bentuk konsolidasi kedalam yang menyadarkan peran dan posisi mahasiswa yang selama ini lebih banyak '*dinina bobokan*' oleh kondisi kampus dan perkuliahan yang cenderung membangun watak-watak manusia yang egois dan kurang bermasyarakat. Bentuk konsolidasi ke dalam dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sebagai upaya penyadaran yang lebih gencar atas '*beratnya*' menyangsang status sebagai '*mahasiswa*' yang kehidupannyapun didukung dan ditunjang oleh masyarakat namun kurang memberikan sumbangsih bagi masyarakat yang ikut serta membesarkannya<sup>19)</sup>.

Anggapan kampus sebagai '*menara gading*' merupakan sebuah cambuk dan tamparan yang cukup berasa apabila ternyata para kelompok ilmuwan-cendikiawan yang ada di lingkungan kampus tersebut kurang memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakatnya. Anggapan ini merupakan sebuah '*stigma*' yang seakan membebani para aktivis gerakan

---

19) Subyektifitas aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi inipun menggugah segenap kepedulian sivitas akademika dilingkungan kampusnya agar mau ikut serta mendengarkan permasalahan sosial dan bukan hanya berlindung di balik '*tirai-tirai*' akademis yang seakan-akan steril tanpa kepedulian sosial apapun. Padahal '*tirai-tirai*' akademis yang ada di lingkungan akademisi menurut para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sama sekali akan menjadi kurang berguna apabila tidak difungsikan untuk kesejahteraan masyarakat.

mahasiswa pro-reformasi untuk segera bergerak, sehingga dengan berbagai cara mereka berusaha menghapuskan anggapan yang kurang baik ini.

Keberpihakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi kepada masyarakatnya merupakan sebuah bentuk '*pengabdian*' yang nyata kepada masyarakat. Walaupun mereka tidak dapat membantu secara materiil untuk ikut serta meringankan beban kehidupan yang saat itu tengah melanda masyarakat dengan tekanan ekonominya, namun sikap yang ditunjukkan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, paling tidak telah memberikan sebuah dorongan, bahwa masih ada yang peduli nasib dan kehidupan masyarakat.

Keberpihakan secara nyata para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi kepada kepentingan masyarakat yang ditunjukkan dengan melakukan berbagai aksi demonstrasi dan mimbar bebas secara tidak langsung merupakan bentuk pematangan situasi di kalangan sivitas akademika kampus itu sendiri. Dan juga merupakan sebuah bentuk pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakatnya (*show a force*) bahwa lingkungan masyarakat kampus-pun peduli dan mendukung kepentingan masyarakat dalam arti yang luas.

Fungsi kontrol sosial yang didukung oleh kekuatan moral untuk melakukan sebuah perubahan sosial merupakan sebuah basis kekuatan yang sebenarnya dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dalam menggalang kekuatan yang sebenarnya pula. Fenomena ini semakin kentara dengan jelas ketika mulai banyaknya sivitas akademika sebuah perguruan tinggi yang tadinya bersikap apriori dan melecehkan keberadaan gerakan mahasiswa pro-reformasi, menjadi bergabung dan ikut serta dalam perjuangannya. Realita juga menunjukkan bahwa setelah gerakan mahasiswa pro-



reformasi melakukan berbagai aksi, sedikit-demi sedikit tokoh-tokoh politik yang bersikap berseberangan dengan para pemegang kekuasaan mulai bermunculan dan menyatakan dukungan kepada aksi reformasi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi<sup>20)</sup>.

### 3. Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap keberadaan lembaga formal dan lembaga informal.

Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap keberadaan lembaga formal dan lembaga informal terjadi karena banyak hal. Krisis kepercayaan adalah berkurangnya rasa percaya terhadap kemampuan sesuatu hal atau sebuah lembaga untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara tuntas.

Dalam alam pikiran para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang cenderung teoritis, sehingga dalam melihat sebuah realita yang banyak mengalami penyimpangan dari teori secara tajam dapat menimbulkan sikap frustrasi yang mendalam. Bentuk-bentuk kekecewaan atas sebuah realita yang menyimpang begitu jauh dari teorinya, 'mementahkan' kembali konsep-konsep pemahaman yang selama ini dipelajari dan dipahami sebagai sebuah kebenaran dan keyakinan. Misalnya saja ketika dalam sebuah pendidikan yang ditanamkan sikap tenggang rasa, silih asah silih asih dan silih asuh, namun dalam prakteknya begitu banyak friksi-friksi tajam yang terjadi, saling menjatuhkan dan

---

<sup>20)</sup> Keterpaduan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dengan anggota sivitas akademika lainnya non mahasiswa, serta dukungan tokoh-tokoh politik menjadikan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi menjadi sebuah gelombang kekuatan besar yang menyadarkan para pemegang kekuasaan bahwa gerakan mahasiswa pro-reformasi yang bergerak pada awalnya sebagai basis kekuatan moral, telah berubah menjadi sebuah lembaga kontrol sosial yang didukung oleh banyak pihak. Melihat realita inilah, maka secara kongkrit dapat dikatakan bahwa keberadaan gerakan mahasiswa pro-reformasi adalah merupakan sebuah hasil dari proses sikap yang berseberangan dengan para pemegang kekuasaan secara terus-menerus, yang dimulai dari perjuangan mahasiswa itu sendiri hingga mendapatkan berbagai dukungan dari banyak pihak untuk menyatakan keberpihakannya kepada masyarakat secara luas.

saling 'tikam' demi keuntungan diri sendiri.

Realita sosial sistem politik pemerintahan dan perekonomian yang nampak dimasyarakat menunjukkan bahwa rumusan sistem politik pemerintahan dan perekonomian menurut teori yang ada dan dipelajari selama ini adalah berbanding terbalik dengan realitanya. Perbedaan yang terlalu tajam inilah yang akhirnya menuntun para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi kepada bentuk-bentuk sikap kurangpercayaan terhadap keberadaan lembaga formal dan lembaga informal. Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa keberadaan lembaga formal dan lembaga informal yang ada tidak lain hanya sekedar perangkat-perangkat formal yang melengkapi kehidupan bermasyarakat tanpa mampu memberikan dan melayani kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya<sup>21)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sudah tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap keberadaan lembaga formal dan lembaga informal, sebab seringkali para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi mengalami kekecewaan yang berulang terhadap lembaga-lembaga tersebut. Peran lembaga-lembaga tersebut kebanyakan hanyalah berperan secara formal tanpa menyentuh substansi yang sebenarnya, sehingga seringkali pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh lembaga tersebut hanya pelayanan yang bersifat 'lip service'<sup>22)</sup>.

---

21) Penafsiran lembaga formal dan lembaga informal dalam masyarakat hanya sebagai alat, adalah sebuah bentuk penafsiran yang sangat luas, karena nanti dalam penjelasan berikutnya yang lebih detil dan mendalam akan terungkap mengapa bentuk-bentuk krisis kepercayaan itu muncul dan mengakibatkan gerakan mahasiswa pro-reformasi hanya percaya kepada diri sendiri dan kemampuan yang dimilikinya secara mandiri.

22) Berbagai bentuk kekecewaan yang ditimbulkan sebagai akibat ketidakmampuan peran lembaga-lembaga tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang seharusnya menjadi kewajiban mereka untuk menyelesaikannya. Kalaupun ada lembaga yang dapat menyelesaikannya, tidak jarang masih meninggalkan masalah atau tidak menyelesaikannya secara tuntas. Kalaupun ada lembaga yang menyelesaikan secara tuntas seringkali itupun dilakukan hanya sekedar menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa menyentuh substansinya atau berpikah secara jelas kepada salah pihak, atau malah justru melindungi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

Krisis kepercayaan terhadap keberadaan lembaga-lembaga yang seharusnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat membuat para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi lebih mempercayai kekuatan yang dimilikinya sendiri dan memandang secara apriori terhadap keberadaan semua lembaga yang terlihat secara nyata mewakili sebuah kepentingan tertentu<sup>23)</sup>. Oleh karena itulah para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi membuat jaringan informasi diantara kelompok-kelompok mahasiswa yang ada, baik jaringan yang terjalin antara fakultas yang berbeda maupun dalam universitas yang berbeda pula. Kontak komunikasi antar jaringan senantiasa dijaga, walaupun bukan berbentuk perkenalan antar *person*, namun perkenalan antar kelompok yang memiliki visi dan tujuan yang sama tetap berlangsung<sup>24)</sup>.

Penyebab munculnya sikap krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap peranan lembaga formal dan lembaga informal serta implementasi dari bentuk ketidakpercayaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

---

23) Sikap apriori yang ditunjukkan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi merupakan sebuah bentuk krisis kepercayaan terhadap keberadaan lembaga-lembaga formal dan informal atas kekuatan yang mereka miliki. Para Aktivis memandang bahwa keberadaan lembaga tersebut sudah sejak lama merupakan bagian dari 'pilar-pilar' kekuasaan yang memang sengaja dilestarikan agar dapat menunjang kekuasaan secara terselubung. Misalnya saja dengan memelihara 'sistem pemilihan wakil-wakil rakyat' membuat para wakil rakyat yang ingin menjadi wakil rakyat akan bergantung penuh kepada penguasanya. Disini lain dari perekonomian ialah dengan membuat berbagai aturan yang membuat para penguasa akan selalu membutuhkan penguasa, sehingga para pengusaha tersebut akan memelihara 'kedekatannya' dengan penguasa.

24) Kontak komunikasi antar jaringan yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi pada awalnya dilakukan oleh orang-per-orang yang saling berkenalan dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan aksi bersama yang kemudian bersepakat untuk terus menjalin hubungan. Dari kontak awal ini kemudian dilanjutkan dengan kontak antar kelompok, walaupun pada nantinya masing-masing anggota kelompok yang berhubungan itu tidak saling mengenal, tetapi masing-masing dapat saling memahami bahwa kontak *person* yang diajak berdialog merupakan rangkaian jaringan informasi. Misalnya dalam penelitian ini terdapat beberapa kelompok aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang anggotanya tidak saling mengenal dengan anggota kelompok lainnya, tetapi jika turun bersama kelapangan, mereka menanggalkan 'bendera' kelompoknya dan bergabung bersama.

Tabel 3. Penyebab munculnya sikap krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dan implementasinya.

Sikap	Penyebab dan implementasinya
Krisis kepercayaan kepada	Penguasa, wakil rakyat, tokoh agama, lembaga pendidikan, sistem politik pemerintahan, perekonomian dan hukum.
Sikap yang diambil dan implementasinya.	Hanya mempercayai kekuatan sendiri yang dimilikinya dan melakukan berbagai perbuatan yang dapat mendatangkan perhatian umum (demonstrasi, unjuk rasa, mimbar bebas, turun kejalan) dan membuat jaringan atau jalinan informasi antar fakultas atau antar perguruan tinggi.

Tabel disusun dan dikualifikasikan berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Dari tabel diatas krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap keberadaan lembaga formal dan lembaga informal, secara kongkrit tertuju pada para penguasa, wakil rakyat, tokoh agama, lembaga pendidikan, sistem politik pemerintahan, perekonomian dan hukum. Untuk memaparkan secara lebih rinci bentuk-bentuk krisis kepercayaan, pemaparan diuraikan dalam bentuk preposisi-preposisi berikutnya.

#### 4. Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap penguasa.

Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang ditujukan kepada penguasa secara umum dapat dikategorikan kedalam dua sebab pokok, yaitu krisis ketidakpercayaan terhadap penguasa yang disebabkan oleh aspek perekonomian dan yang kedua adalah krisis kepercayaan terhadap penguasa yang disebabkan oleh aspek sistem politik pemerintahan.

Dari aspek perekonomian para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi mengalami krisis kepercayaan terhadap penguasa karena peranan para penguasa dalam bidang pere-

konomian secara tidak langsung telah melakukan sistem perekonomian yang menuju pada bentuk perekonomian kapitalis terselubung, sehingga hanya memberikan keuntungan bagi sebagian atau sekelompok atau segelintir orang tertentu yang dapat memainkan pasar, yang dekat dengan sumbu-sumbu kekuasaan dan yang memiliki modal besar untuk melakukan '*penindasan ekonomi*' terhadap pemilik modal yang menengah kebawah<sup>25)</sup>.

Peran para pemilik modal besar yang ternyata juga memiliki kedekatan dengan para pemegang kekuasaan merupakan sebuah bentuk hubungan '*timbang balik yang saling menguntungkan sesama mereka*'. Disatu sisi penguasa diuntungkan dengan berbagai bentuk '*pendapatan*' yang diberikan oleh pemilik modal secara '*terbuka*' maupun '*terselubung*', disisi lain para pemilik modal-pun diuntungkan dengan berbagai kemudahan, fasilitas, bahkan pengucuran kredit yang hampir melalui ambang batas resmi-nya<sup>26)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi juga melihat dan merasakan adanya berbagai bentuk penyimpangan perekonomian yang dilakukan oleh penguasa, dimana bentuk-bentuk penguasaan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas, termasuk didalamnya sumber daya alam dan sumber daya manusia, dikuasai dan dikelola oleh sebagian orang atau sekelompok tertentu untuk kepentingan dan keuntungan

---

25) Dengan penguasaan modal yang sangat besar, maka pemilik modal yang besar dapat melakukan penguasaan sumber-sumber ekonomi di segala bidang, baik bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat secara pokok maupun bidang-bidang yang hanya menjadi perantara. Namun patut disayangkan pola untuk mendapatkan lahan perekonomian yang dibutuhkan seringkali didapatkan dengan bentuk-bentuk persaingan yang tidak sehat, yaitu melalui pola-pola kedekatan tertentu dengan yang memberikan order, dengan memberikan sejumlah '*pelicin*', atau dengan menyerahkan '*memo*' bahwa pelaksana yang ditunjuk untuk mengerjakan produk-produk tertentu sudah ditangani oleh kelompok-kelompok tertentu pula.

26) Kekuasaan para pemilik modal, seakan-akan menjadi sebuah kekuasaan yang harus dipatuhi oleh penguasa, karena sudah menjadi realita bahwa hampir disetiap sektor ekonomi yang menguntungkan terjadi '*penguasaan*' bidang produksi dan pemasaran dengan tujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya, tanpa berani melalui bentuk-bentuk persaingan yang sehat. Realita ini ditunjukkan dengan maraknya penguasaan HPH yang hampir melebihi batas, penguasaan bahan-bahan tambang, menguasai produk-produk industri hulu: macam terigu, dan menguasai industri otomotif dengan dalih sebagai produk mobil nasional.

pribadinya.

Pengistimewaan perekonomian yang dilakukan oleh penguasa terhadap kelompok-kelompok tertentu memberi peluang secara bebas dan sebesar-besarnya terjadinya berbagai bentuk monopoli terselubung (*ada juga yang terang-terangan*) demi keuntungan pribadi atau sekelompok orang tertentu, dan bukan untuk kesejahteraan bersama<sup>27)</sup>.

penguasaan sumber daya alam sebagai salah satu komponen faktor produksi yang dilakukan secara tanpa batas, dengan tidak memperkirakan keseimbangan alam dan kesinambungan kehidupan alam dan masyarakat sekitarnya terjadi secara mencolok, dan semua ini dilakukan dengan dasar bisnis semata tanpa memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan generasi mendatang.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi juga melihat bahwa penguasaan sumber daya manusia secara non-manusiawi juga terjadi dalam bentuk melakukan eksploitasi terhadap buruh, pekerja atau karyawan, khususnya buruh, pekerja atau karyawan wanita dan secara terselubung adanya buruh atau pekerja anak-anak<sup>28)</sup>.

Keberpihakan penguasa menjadi terlihat apabila terjadi konflik atau pertentangan pendapat antara para

---

27) Pengistimewaan dapat dilihat dalam realita bahwa kedekatan orang-orang tertentu, atau orang-orang yang memiliki akses dengan kekuasaan akan mendapatkan pelayanan dengan cepat, mendapatkan lahan-lahan yang diinginkan dengan prosedur relatif lebih mudah, dan dapat menguasai lahan-lahan produksi serta pemasaran yang jauh lebih banyak, lebih bernilai bersaing dengan pemilik modal kelas menengah kebawah. Pengistimewaan perekonomian yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu tidak lepas dengan keuntungan yang akan mereka peroleh, baik bagi orang yang memiliki modal maupun bagi mereka yang memberikan izin serta fasilitas-fasilitas tertentu.

28) Bentuk-bentuk eksploitasi ini dapat dilihat dengan tingkat UMR yang tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan kesejahteraan pekerja yang kurang diperhatikan oleh perusahaan. Fenomena ini terjadi karena perusahaan beranggapan bahwa unsur pekerja adalah unsur yang paling mudah dicari dan paling murah untuk dibeli di Indonesia, sehingga apabila pekerja tidak mau menerima 'perlakuan' yang demikian, maka perusahaan beranggapan masih banyak 'calon pekerja' yang mau masuk untuk bekerja dengan upah yang minim. Di berbagai industri yang banyak menggunakan tenaga kerja manusia sebagai maka tenaga kerja Indonesia adalah tenaga kerja yang paling murah, bahkan mengapa Indonesia banyak melakukan 'eksport tenaga kerja' karena memang di pasaran tenaga kerja internasional, nilai tenaga kerja Indonesia jauh lebih murah dan bersedia dibayar berapa pun agar mereka dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan.

pekerja dengan pengusaha. Penguasa menunjukkan keberpihakkannya kepada pengusaha, sebab dari banyak hal keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa melalui perangkat Hubungan Industrial Pancasila lebih tertuju untuk menguntungkan pihak pemilik modal<sup>29)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi juga melihat bahwa penguasa telah melakukan bentuk-bentuk diskriminasi perekonomian secara mencolok, yaitu dengan memperlakukan secara khusus pelaku-pelaku perekonomian (pengusaha) non-pribumi, serta menomorduakan pelaku-pelaku perekonomian (pengusaha) pribumi, kecuali pengusaha-pengusaha pribumi yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Diskriminasi perlakuan dan pemberian fasilitas dalam bidang perekonomian nampak sekali apabila pengusaha tersebut berasal dari kalangan non-pribumi (keturunan) atau pengusaha pribumi yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, misalnya saja dalam hal pengucuran kredit, pemberian lahan perekonomian yang strategis, kemudahan dalam mendapatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang sebenarnya memiliki fungsi umum dan sosial, bahkan diberikan berbagai kemudahan dalam melebarkan sayap perusahaan dengan membentuk anak-anak perusahaan dibawah dominasi individu-individu tertentu.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi beranggapan bahwa pemberian berbagai bentuk-bentuk fasilitas

---

<sup>29)</sup> Ada beberapa aktivis gerakan mahasiswa yang juga melakukan pemberdayaan dan pendampingan bagi para pekerja, karyawan atau buruh yang bekerja di pabrik-pabrik, cleaning service dll, sehingga mereka mampu memberikan advokasi secara lisan dan berupaya memberikan pengertian bahwa keberadaan antara pekerja dan pengusaha dalam Hubungan Industrial Pancasila adalah sederajat. Tetapi realitanya menunjukkan berbeda bahwa kenyataannya apabila terjadi konflik antara pekerja dan pengusaha dan masalahnya dibawa hingga ke Depnaker, P4D dan P4P maka keberadaan pengusaha-lah yang lebih banyak diuntungkan oleh pihak penguasa. Walaupun ternyata keberadaan pengusaha kalah, tetap saja eksekusi atas putusan P4D atau P4P sangat sulit dilakukan, karena pihak pengusaha-pun bersikukuh tidak mau mempekerjakan kembali atau membayar ganti kerugian yang diderita oleh pekerja selama di skorsing, selama menunggu atau selama menjalani pemeriksaan di P4D dan P4P.

husus dan kemudahan bagi orang dan kelompok tertentu yang bersifat tidak transparan adalah sangat merugikan masyarakat. Karena selain tidak dapat dilakukan kontrol secara terbuka atas bidang-bidang perekonomian tertentu yang sifatnya strategis, juga dapat menimbulkan iklim yang kondusif bagi terciptanya persaingan yang tidak sehat, membudayanya korupsi, merajalelanya kolusi dan berkembangnya nepotisme.

Dari aspek sistem politik pemerintahan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi mengalami krisis kepercayaan terhadap penguasa karena peranan penguasa dalam bidang sistem politik pemerintahan telah memperlihatkan secara nyata keberpihakan penguasa dan memberikan berbagai kemudahan serta fasilitas kepada salah satu orsospol peserta pemilu dan 'menganaktirikan' orsospol peserta pemilu yang lainnya<sup>30)</sup>.

Keberpihakan secara nyata penguasa terhadap salah satu orsospol peserta pemilu oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi mencerminkan sebuah bentuk berlakunya paham '*kekuasaan mayoritas*' sebagai sebuah hasil Pemilu yang dianggap Luber oleh penguasa, namun dianggap sebaliknya oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi. Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan beranggapan bahwa campur tangan penguasa dalam terlaksananya Pemilu adalah terlalu dominan, sehingga mengurangi kadar kejujuran dan keseimbangan yang sebenarnya ingin dicapai dalam Pemilu tersebut.

---

<sup>30)</sup> Keberpihakan penguasa kepada salah satu orsospol peserta pemilu dapat dilihat dalam realita bahwa berbagai kemudahan akan diberikan, mulai dari pengadaan bantuan, mengadakan musyawarah besar, mengadakan dan pengamanan kampanye, menggunakan media-massa tertentu untuk orsospol tertentu, menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintah untuk kepentingan orsospol tertentu tersebut dan pemberian sumber dana yang lebih dari orsospol lainnya. Konsep seperti ini memang lazim dalam dunia ketatanegaraan dimana partai yang menang dalam pemilu akan menguasai secara lebih besar dalam pemerintahan bila dibandingkan dengan orsospol lainnya. Namun hal tersebut jangan sampai mengesampingkan peran orsospol lainnya.



Disamping itu pula para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi juga melihat bahwa akibat campur tangan penguasa dalam melakukan rekayasa politik yang tidak sehat kepada salah satu orsospol peserta pemilu, telah mengakibatkan terjadinya perpecahan secara terbuka di tubuh orsospol tersebut dan menjadi konflik yang berkepanjangan<sup>31)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan merasakan bahwa pihak penguasa telah melakukan berbagai macam penekanan, baik secara terbuka maupun terselubung terhadap bentuk-bentuk pemikiran yang berbeda atau pendapat yang tidak senada. Penekanan secara represif telah banyak dilakukan bagi orang-orang yang telah bersikap melakukan penentangan secara terbuka maupun terselubung, bahkan tidak mengakui adanya sikap-sikap yang oposan. Dari berbagai bentuk penekanan ini para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa iklim perbedaan pendapat yang sehat tidak dapat tercipta dan terbina dengan baik. Jika iklim perbedaan pendapat secara sehat tidak dapat tercipta dan terbina dengan baik, maka yang ada adalah bentuk-bentuk pemaparan pendapat atau 'petunjuk-petunjuk' dari 'his master voice' secara kuat.

Kondisi ini mengarah kepada sebuah bentuk masyarakat *hipokrit* yang tidak berani mengemukakan pendapatnya, tidak berani untuk mengemukakan pandangan yang berbeda

---

31) Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menilai bahwa rekayasa ini bertujuan untuk memecah sebuah kekuatan orsospol peserta pemilu, agar dalam pemilu yang dikehendaki ia tidak akan menjadi ancaman bagi orsospol lain yang menginginkan mendapatkan kemenangan secara mutlak atau mayoritas. Anggapan rekayasa politik yang dilakukan oleh Penguasa terhadap salah satu orsospol peserta Pemilu yaitu dalam kasus PDI. Realita menunjukkan bahwa dalam kasus PDI terjadi konflik intern yang berkepanjangan antara PDI Soerjadi dengan PDI pro-Mega. Rekayasa politik disinyalir dilakukan oleh pihak Penguasa untuk melakukan 'penyabotan' terhadap kepemimpinan Megawati di dalam tubuh PDI. Kepemimpinan Megawati dianggap sebagai ancaman bagi kekuatan orsospol tertentu, karena profil Megawati mampu menarik simpati masyarakat kelas bawah dengan kharisma Bung Karno. Untuk lebih jelasnya kasus perpecahan PDI dapat dilihat dalam: Irawan Saptono, Lukas Luwarso (penulis), Megawati Soekarnoputri Pantang Surut Langkah, Penerbit ISAI, Jakarta, 1996, dan lihat juga dalam Ahmad Bahar, Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996, PT Pena Cendikia, Yogyakarta, 1996.

dan tidak memiliki keyakinan untuk mengutarakan pendapatnya sendiri atau berdiri diatas pendapatnya sendiri, yang ada hanyalah sikap-sikap 'mem-beo', tidak memiliki keyakinan dan suburnya *oportunisme*.

Pola masyarakat yang demikian telah menunjukkan bahwa pola masyarakat tersebut telah bergantung secara erat dan terikat secara kuat pada pola *patronitas* yang mendasarkan pada asumsi "*L'etaat cest moi*" atau "*The King can do not wrong*", sebab dalam masyarakat yang demikian tidak akan pernah ada penyangkalan, tidak akan pernah ada perbedaan pendapat dan segalanya dikondisikan untuk satu suara-satu pendapat dengan dalih keutuhan bersama menuju tujuan yang diinginkan. Dan dari kondisi ini yang paling tragis adalah bahwa apa yang diucapkan oleh pemimpin negeri adalah sebuah kebenaran yang tidak boleh dibantah atau dipertanyakan lagi.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa proses penyebaran informasi seringkali dibayangkan dengan 'rambu-rambu' kekuasaan yang mendasarkan pada asumsi untuk 'menjaga stabilitas dan keamanan nasional'. Konteks penyebaran informasi yang demikian menyebabkan kondisi pers dan lembaga penerbitan yang ada senantiasa berada dibawah ancaman 'presbreidel' atau Undang-undang Pokok Pers yang lebih banyak menjaga ke-langgengan kekuasaan ketimbang memberikan ruang gerak pers yang proporsional<sup>32)</sup>.

---

32) Realita menunjukkan bahwa keterkekangan pers oleh 'tangan-tangan kekuasaan' yang dilakukan melalui Departemen Penerangan, merupakan indikasi bahwa kebebasan pers merupakan sesuatu yang amat dikekang. Pers dikendalikan dengan sangat kuat untuk ikut serta mendukung elit-elit politik tertentu dan tidak diperkenankan untuk 'berticara' diluar jalur. Banyak kasus yang dapat dikemukakan dalam bidang pers ini, namun yang jelas dalam kerangka pikir para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, pengekangan pers sebagai salah satu unsur indikator adanya demokrasi dalam sebuah negara merupakan sebuah tindakan yang tidak benar. Beberapa contoh kasus pers yang sempat mencuat kepermukaan antara lain kasus dicautnya SIUPP majalah TEMPO, EDITOR dan Tabloid De'Tik. Untuk kasus tersebut dapat dilihat dalam: Heri Akhadi (penyunting), Ilusi Sebuah Kekuasaan, penerbit ISAI dan Pus-HAM URAYA, Midas Surya Grafindo, Surabaya, 1997. Lihat juga dalam: Iwan Hasibuan, Sitok Srengenge, Bredel di Udara Rekaman Radio ABC, BBC, DW, Nederland, VOA, Penerbit ISAI, Jakarta, 1996. Atau lihat juga: Bambang Bujono, Putu Setia

Dalam bidang sistem politik pemerintahan yang berkaitan dengan masalah keberadaan peranan dwi fungsi ABRI, para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa peranan dwi fungsi ABRI di berbagai bidang terlalu dominan, sehingga mengurangi porsi kepercayaan orang sipil untuk berkarya dan memperlihatkan kemampuan serta prestasinya. Konsep dwi fungsi ABRI yang terlalu dominan ini seakan-akan tidak memberi peluang kepada orang sipil untuk maju dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Selain itu pula para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa peranan dwi fungsi ABRI yang terlalu dominan telah mengarahkan dan memihak terlalu dekat kepada salah satu orsospol peserta pemilu (*dimana seharusnya posisi ABRI adalah berdiri diatas semua golongan dan bukannya berdiri diatas sebuah golongan*). Posisi ABRI selama ini telah menunjukkan keberpihakan yang terlalu kentara dan nyata, sehingga menimbulkan anggapan adanya 'kolaborasi' antara ABRI dengan salah satu orsospol peserta pemilu untuk mewujudkan dan mempertahankan kepentingan golongan tertentu<sup>33</sup>).

Kedekatan dan keintiman yang terlalu mendalam antara ABRI dengan salah satu orsospol peserta pemilu telah

---

Thoriq Hadad, "Mengapa Kami Menungguat", Penerbit Yayasan ALUANI TEMPO, Jakarta, 1995.

33) Realita menunjukkan bahwa sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa 'kedekatan' sebuah orsospol peserta pemilu (Golkar) dengan ABRI selain memang berupa realita sejarah, juga merupakan sebuah pemusatan konstelasi politik yang nyata setelah Orde Baru. Tidak dapat dipungkiri oleh sejarah bahwa ABRI merupakan 'bidan' yang ikut serta membantu kelahiran Sekber Golkar dan menjaganya hingga besar, namun hal itu bukan berarti bahwa keberadaan Golkar harus senantiasa selalu berada dibawah 'suapan' dan 'lindungan' ABRI. Jikalau memang Golkar menginginkan sebagai sebuah partai yang mayoritas, maka hendaknya ia mampu untuk berdiri sendiri tanpa selalu meminta dukungan dan bantuan dari ABRI. Namun dalam masa Orde Baru peranan ABRI dalam Golkar terlalu dominan, dan kedekatan ABRI dengan Golkar memang menimbulkan reaksi-reaksi di masyarakat. Kasus ini sempat memuncak manakala KSAD yang saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Hartono mengemukakan secara terang-terangan dan vulgar bahwa "Setiap anggota ABRI adalah kader Golkar". Pernyataan ini memicu banyak opini yang akhirnya menjadi polemik tersendiri yang berkepanjangan. Untuk lebih jelasnya kasus ini dapat dilihat dalam: Toqi Simadjuntak (penyunting), ABRI Punya Golkar, Penerbit ISAI, Jakarta, 1996.

menunjukkan adanya sikap yang sudah tidak proporsional lagi dari ABRI dan secara terang-terangan pula telah bersikap '*menganaktirikan*' orsospol peserta pemilu yang lainnya.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi memandang bahwa peranan ABRI yang terlalu dominan dalam hal pengamanan politik telah menyebabkan pertumbuhan politik yang aspiratif menjadi terhambat dan tidak dapat berkembang dengan baik. Peranan ABRI sebagai aparat keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kewajibannya seringkali mengedepankan penggunaan sistem pendekatan keamanan (*security approach*) yang terlalu mencolok, bahkan cenderung represif dan bersifat arogan, sehingga telah menimbulkan kesan bahwa ABRI hanyalah '*satpam*' bagi golongan atau kelompok tertentu yang diarahkan serta difungsikan untuk melindungi kepentingan golongan atau kelompok tertentu tersebut.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi juga melihat bahwa penggunaan alasan '*demi keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasional*' yang berlebihan dan tidak proporsional telah membuat ABRI seakan-akan berfungsi sebagai '*pemadam kebakaran (brandweer)*' bagi konflik-konflik tertentu yang bersifat politik, etnis maupun ekonomi. Peran ini sangatlah tendensius sekali sehingga tanpa memperhitungkan dampak negatif yang mungkin timbul bagi ABRI itu sendiri, peran tersebut telah mencoreng dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap ABRI itu sendiri.

Berikut ini adalah tabel penyebab krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap penguasa yang terjadi di bidang perekonomian dan sistem politik pemerintahan.

Tabel 4. Penyebab krisis kepercayaan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap penguasa di bidang perekonomian dan sistem politik pemerintahan.

Bidang	Penyebab krisis kepercayaan terhadap penguasa
Perekonomian	Perekonomian bebas menuju bentuk perekonomian kapitalis yang hanya menguntungkan sebagian atau sekelompok orang, bukan kemakmuran rakyat banyak
	Penguasaan Sumber Daya Ekonomi tak terbatas oleh kelompok tertentu (monopoli) demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu pula.
	Melakukan berbagai bentuk eksploitasi, baik terhadap sumber daya alam maupun pekerjanya.
	Melakukan berbagai bentuk diskriminasi dalam bidang perekonomian: pribumi dan non-pribumi.
	Pemberian berbagai bentuk fasilitas dan kemudahan terhadap sekelompok orang tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Sistem politik dan Pemerintahan	Peranan penguasa yang terlalu dominan dalam mengawasi kebebasan pers yang cenderung mengekang sehingga tidak tercipta arus informasi yang terbuka dan informatif.
	Memperlihatkan secara nyata keberpihakan dan memberikan berbagai kemudahan kepada salah satu orsospol peserta pemilu.
	Melakukan rekayasa politik kepada salah satu orsospol peserta pemilu sehingga mengakibatkan perpecahan secara terbuka dalam orsospol tsb.
	Melakukan penekanan (terbuka/terselubung) terhadap pendapat yang berbeda, menentang sikap oposan (perbedaan pendapat) dan terikat kuat pada pola patronitas.
	Peranan dwi fungsi ABRI yang terlalu dominan sehingga mengesampingkan peran sipil.
	Peranan dwi fungsi ABRI yang terlalu dekat dengan salah satu orsospol peserta Pemilu.
	Peranan ABRI yang terlalu dominan dalam pengambilan politik, menyebabkan pertumbuhan politik yang aspiratif menjadi terhambat, terutama dengan pendekatan keamanan ( <i>security approach</i> )

Tabel disusun dan dikualifikasikan berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Sikap penguasa yang terlalu dominan dalam bidang sistem politik pemerintahan mengakibatkan mengendurnya peran wakil rakyat yang seharusnya dapat mengimbangi peran penguasa dalam bidang sistem politik pemerintahan. Mengendurnya peran wakil rakyat yang disebabkan karena peranan penguasa terlalu dominan membawa dampak terhadap rasa kepercayaan masyarakat kepada para wakil rakyat-nya.

Peran wakil rakyat terlihat lebih didominasi oleh sikap kepasifan, menunggu, dan terlihat '*kurang berani*' dalam mengemukakan pendapat yang berbeda dengan penguasa dan dalam mengemukakan berbagai aspirasi yang telah diungkapkan masyarakat kepada para wakil rakyat tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam memahami mengapa sebuah masyarakat mulai kehilangan rasa kepercayaannya terhadap peran para wakil rakyat dan rasa kepercayaan terhadap keberadaan lembaga perwakilan rakyat, beberapa pandangan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat dilihat dalam preposisi berikutnya.

#### 5. Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap wakil rakyat.

Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang ditujukan kepada wakil rakyat secara umum dapat dikategorikan kedalam dua sebab pokok, yaitu krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat yang disebabkan oleh aspek sistem politik pemerintahan dan kedua adalah krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat yang disebabkan oleh aspek perekonomian.

Dari aspek sistem politik pemerintahan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi mengalami krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat karena mereka beranggapan bahwa di lembaga DPRD-DPR/MPR peranan wakil-wakil rakyat lebih banyak berperan sebagai sarana legitimasi dari

berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa. Secara realita para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi beranggapan bahwa keberadaan wakil-wakil rakyat di lembaga DPRD-DPR/MPR tidak lebih sebagai sebuah produk kekuasaan, sehingga sikapnya-pun cenderung banyak berpihak kepada kekuasaan<sup>34)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi beranggapan bahwa keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD-DPR/MPR adalah lebih banyak berperan sebagai bagian perpanjangan tangan penguasa secara semu, karena dalam realitanya wakil-wakil rakyat tersebut lebih banyak bersikap dan berperan sebagai '*corong*' kepentingan penguasa kepada masyarakatnya ketimbang bersikap dan berperan sebagai '*corong*' kepentingan masyarakat kepada penguasanya. Ini terlihat dari begitu banyaknya peran wakil-wakil rakyat dalam usaha mensosialisasikan berbagai kebijakan kepentingan penguasa, padahal yang seharusnya terjadi dan dilaksanakan adalah para wakil rakyat-lah yang harus lebih banyak menyuarakan dan mensosialisasikan kepentingan masyarakat kepada penguasanya.

Keberadaan para wakil rakyat di lembaga DPRD-DPR/MPR lebih banyak berperan sebagai '*kaum birokrat*' yang merasa selalu ingin dihormati, dilayani, dan diposisikan lebih dari masyarakat biasa pada umumnya. Ini terlihat dari bentuk-bentuk perlakuan yang ada pada mereka, dimana mereka diperlakukan secara istimewa dengan penuh tata

---

34) Realita menunjukkan bahwa peran dan campur tangan pihak penguasa dalam menentukan para calon wakil rakyat, pemilihanya hingga para calon tersebut menjadi wakil rakyat terpilih tidak lepas dari peran dan pengawasan pihak kekuasaan. Peran calon wakil rakyat hanya dapat pasif, sebab sejak pemilihan untuk dapat menjadi calon dikenal adanya peran lembaga '*Litsus*' yang akan menilai dan menguji kredibilitas calon wakil rakyat. Pemantauan pihak penguasa begitu ketat, bahkan setelah mereka menjadi wakil rakyat-pun masih dapat ditarik kembali atau '*direcall*' apabila ternyata mereka mencoba keluar dari kesepakatan bersama atau kesepakatan yang sudah digariskan oleh fraksi. Realita ini menunjukkan bahwa betapa rapuhnya komposisi dan konstruksi lembaga perwakilan rakyat, sebab secara tidak langsung akses-akses tangan kekuasaan masih saja dapat menjangkau keberadaan para wakil rakyat.

cara-protokoler yang formal prosedural. Perilaku-perilaku yang formal prosedural inilah yang menyebabkan fungsi dari para wakil rakyat ini dinilai kurang tajam. Walaupun ia memiliki posisi politis yang dianggap setara dengan penguasa, namun dalam realitanya tetap saja para wakil rakyat ini cenderung bersikap lebih 'sopan' kepada kelompok lembaga eksekutif karena tetap merasa bahwa keberadaan mereka secara tidak langsung bergantung kepada keberadaan kelompok yang berkuasa<sup>35)</sup>.

Sikap formal prosedural dari para wakil rakyat inipun banyak dikritik oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, sebab dalam berbagai kesempatan yang ada, dimana terjadi adanya keluhan atau adanya pengaduan dan adanya hal-hal yang ingin disampaikan oleh masyarakat kepada wakil-wakilnya di lembaga DPRD-DPR/MPR lebih banyak ditanggapi dan disikapi sebagaimana layaknya perilaku seorang birokrat dan bukan perilaku sebagaimana layaknya seorang wakil rakyat. Sikap dan perilaku yang formal prosedural inilah yang dengan sendirinya secara tidak langsung sudah membuat jarak yang cukup dalam antara masyarakat dengan wakil rakyat itu sendiri.

Seringkali masyarakat mengeluhkan dan menyesalkan perilaku para wakil rakyat yang terkadang lebih 'birokratis' ketimbang kelompok 'birokrat' itu sendiri. Tata

---

35) Sebagai contoh betapa bahwa para wakil rakyat tersebut 'tetap memiliki ketakutan' terhadap penguasa, atau tetap merasa berada di bawah kekuasaan para penguasa ialah ketika para wakil rakyat menerima pengaduan tentang adanya sekelompok pedagang kaki lima yang diusir dari tempat berjualannya, dan diperlakukan secara semena-mena oleh aparat ketertiban umum, maka para wakil rakyat tersebut hanya mampu menjawab "akan kami konfirmasi dengan aparat tibus", atau "akan kami perhatikan dan akan kami sampaikan kepada aparat yang berwenang menanganinya", atau "akan kami usulkan dalam agenda sidang mendatang", atau "akan kami usahakan dan untuk sementara kami tampung". Dan ketika para pedagang kaki lima itu mendesak kepada para wakil rakyat untuk segera meminta kejelasan dan kepastian lahan dagang mereka dan mendesak para wakil rakyat itu juga agar melakukan tindakan pendesakan kepada kelompok eksekutif, maka jawaban para wakil rakyat adalah "kami tidak dapat mendesak, sebab nanti kami dimarahin oleh pak walikota". Ini merupakan realita bahwa walaupun secara teoritik keberadaan wakil rakyat itu sederajat dengan eksekutif, tetapi dalam realita 'para wakil rakyat' itu tetap 'tunduk dan takut' kepada eksekutif, karena secara realita juga keberadaan mereka di lembaga wakil rakyat-pun tidak lepas dari kekuasaan tangan kelompok penguasa.



aturan protokoler yang bertele-tele serta berbagai macam pengaman dan persyaratan untuk dapat bertemu dan menyampaikan keluhan, seringkali diterapkan secara kaku dan *'zakelijk'* tanpa memandang segi prioritas-responsifitas dari permasalahan yang hendak diajukan oleh masyarakat.

Penanganan permasalahan yang dilakukan oleh para wakil rakyat dirasakan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi seringkali terlalu bertele-tele, formalitas dan tidak mencapai pada akar permasalahannya. Seringkali *'sidak'* atau *'turun ke daerah'* hanyalah sekedar mengikuti pra-syarat atau *'format baku'* untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, sehingga tidak jarang permasalahan yang ada bukannya ditangani secara serius malah menjadi semakin rumit dan berkepanjangan.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa *'ketidak-seriusan'* para wakil rakyat dalam menangani keluhan-keluhan masyarakat dapat dilihat dari bentuk penanganannya. Para Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ditanggapi oleh para wakil rakyat hanya sampai pada batas, *'akan kami pertimbangkan'*, atau hanya pada batas *'akan kami perhatikan'* atau *'akan kami usahakan'* tanpa memiliki kejelasan sampai dimana hak-hak masyarakat itu diperjuangkan oleh para wakil-wakil rakyat tersebut. Tidak pernah ada jaminan khusus dari para wakil rakyat bahwa permasalahan tersebut benar-benar diperjuangkan dan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Seringkali tindakan *'penerimaan'* masyarakat oleh para wakil rakyat untuk berdialog dan menyampaikan keluhan-keluhannya hanyalah sebuah tindakan untuk sekedar menenteramkan atau menenangkan kelompok masyarakat yang tengah bergolak atau tengah bermasalah.

Proses ini menurut para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sudah berlangsung sedemikian lama dan proses ini menurut mereka penuh dengan ke-formalitas dan '*kepura-puraan*' belaka, yaitu hanya sekedar memenuhi syarat adanya Lembaga Perwakilan rakyat dalam bentuk negara yang mengaku dan mengagungkan demokrasi dalam bentuknya yang '*khas*'. Dengan demikian proses yang sudah '*melembaga*' sedemikian lama ini menimbulkan sikap kurangpercayaan dan menimbulkan keraguan atas kemampuan lembaga perwakilan rakyat dalam memperjuangkan berbagai masalah yang ada di masyarakat, menimbulkan pula sikap tidak peduli dan sikap acuh tak acuh kepada para wakil rakyat-nya (*kalaupun tidak mau disebut sebagai sebuah bentuk atau perwujudan sikap antipati masyarakat kepada para wakilnya di lembaga perwakilan rakyat*).

Dalam pandangan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD-DPR/MPR sebenarnya kurang mewakili kepentingan masyarakat yang sesungguhnya. Para wakil-wakil rakyat yang telah berhasil duduk di lembaga perwakilan rakyat baik tingkat daerah maupun tingkat pusat terlihat lebih banyak menyuarakan aspirasi kepentingan golongan maupun kelompoknya. Ini terlihat dari begitu banyak motif-motif politik yang saling berbenturan dalam lembaga tersebut, terlihat begitu banyak '*aturan main*' yang lebih didasarkan kepada kepentingan golongan atau kelompoknya, sehingga apabila ada seorang anggota dari golongan atau kelompoknya yang keluar dari '*jalur*' atau keluar dari '*aturan main*' yang telah disepakati akan di '*cap*' sebagai orang yang '*mbale-*

lo' dan segera dikenakan 'recall'<sup>36)</sup>.

Namun demikian para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi-pun melihat bahwa tidak semua para wakil rakyat tersebut bersifat *hipokrit*, sebab ada juga yang memang benar-benar berusaha mewakili kepentingan masyarakat dan menyuarakan kepentingan mereka. Walau demikian para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi juga melihat bahwa walaupun ada wakil rakyat yang mencoba untuk menyuarakan kepentingan masyarakatnya, maka wakil-wakil rakyat itupun kurang dapat menangkap sepenuhnya aspirasi masyarakat yang senyatanya. Seringkali aspirasi tersebut tidak diterima secara penuh atau keliru dalam menafsirkannya. Hal ini terjadi karena pada dasarnya para wakil-wakil rakyat tersebut kurang sosialisasi atau tersosialisasikan kepada masyarakatnya sendiri<sup>37)</sup>.

Tidak sedikit pula para wakil rakyat yang memang benar-benar melakukan advokasi untuk masyarakat dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Namun setelah dicermati kembali oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, wakil rakyat yang bersangkutan ternyata hanya berusaha memencuatkan sebuah permasalahan, mangajukannya dan '*mendompleng*' ketenaran dari kasus atau masalah yang terjadi di masyarakat untuk ketenaran pribadi.

---

36) Realita ini lebih menunjukkan bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam lembaga perwakilan rakyat disamping lebih banyak bersifat formal-prosedural, lembaga inipun merupakan lembaga yang lebih tepat dikatakan sebagai lembaga yang mewakili kepentingan golongan atau kelompok, dan tidak tepat untuk menyandang peran sebagai lembaga perwakilan rakyat. Perlindungan terhadap kepentingan golongan atau sekelompok orang terlihat melalui peraturan-peraturan yang sangat mengikat dan begitu 'protectif' diterapkan.

37) Hal ini tidak lepas dari proses bagaimana para wakil-wakil rakyat 'yang terhormat' itu dicalonkan, dilitus dan dipilih oleh penguasa untuk dapat diedarkan kepada masyarakat untuk dipilih kembali oleh masyarakat sebagai syarat adanya Pemilihan Umum dalam negara yang mengaku menganut faham demokrasi dengan coraknya yang khas. Bagaimana akan dapat tersosialisasikan apabila para 'calon-calun wakil rakyat yang terhormat' tersebut pada dasarnya memang tidak dikenal secara umum, dan hanya dikenal melalui nama tanpa tahu wujud, tampang dan kredibilitasnya yang sebenarnya. Para 'calon wakil rakyat yang terhormat' tersebut hanya tampil ketika melakukan kampanye dan menjanjikan berbagai macam program serta kemudahan bagi masyarakat agar masyarakat bersedia memilihnya, itupun terjadi dalam seminggu dalam wilayah yang luas, sehingga kemungkinan untuk terbuka dan melakukan komunikasi secara baik dan timbal balik secara representatif, sulit untuk tercapai.

Menurut para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi keberadaan para wakil-wakil rakyat di DPRD-DPR/MPR lebih banyak dikenal oleh masyarakat melalui '*nama yang ditempelkan*' ketika diselenggarakannya pemilu tanpa mengetahui orangnya sama sekali, sehingga menimbulkan keberadaan wakil rakyat yang kurang berakar dan mengakar di masyarakat. Keberadaan wakil-wakil rakyat yang kurang berakar dan mengakar di masyarakat menimbulkan posisi para wakil rakyat tersebut sebagai '*kader-kader jenggot*' atau kader-kader orsospol yang hanya dapat '*bergantung keatas*' tanpa memiliki basik dan akar yang kuat di masyarakat<sup>38)</sup>. Oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila masyarakat kurang mengenal wujud yang sebenarnya dari wakil-wakil rakyat mereka dan sebaliknyaapun para wakil-wakil rakyat tersebut kurang dapat menangkap aspirasi masyarakat yang sebenarnya dan seutuhnya.

Sikap apriori para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD-DPR/MPR yang ada menjadi semakin bertambah dengan adanya sebutan '*4D yaitu datang, duduk, diam, duit*', bagi para wakil rakyat. Sikap apriori ini semakin diperparah dengan penampilan para wakil rakyat yang '*glamor*' atau '*bersafari-ria*' namun kurang memiliki daya inisiatif yang tinggi dalam berbagai hal di bidang pelaksanaan pemerintahan sebagai '*sparing-partner*' dari penguasa.

---

38) Keberadaan 'kader-kader jenggot' yang tidak memiliki basik atau massa masyarakat dan tidak mengakar di masyarakat kini semakin terlihat dan terbukti ketika tokoh-tokoh utama dalam orsospol yang diwakilinya 'tumbang' mereka tidak memiliki lagi tempat untuk bergantung dan menikmati berbagai pelayanan atau fasilitas yang biasa mereka peroleh ketika tokoh tersebut masih ada. Para 'kader jenggot' inipun lebih menampilkan aslinya sebagai 'kader-kader kardus' yang nampak besar diluar namun kosong didalamnya, karena sebananya ia hanya bergantung pada kharismatik seseorang. Ketika terjadi perubahan sosial yang besar dan luar biasa, makin terbukti lagi bahwa kebanyakan orang-orang yang bergantung dalam sebuah orsospol menjadi pecah dan saling memecahkan diri, bertengkar sendiri, mencari pengaruh sendiri-sendiri dan 'bercakar-cakaran sendiri' untuk mencari massa, popularitas agar dapat mencapai jenjang politik yang lebih tinggi dalam orsospol tersebut. Penggunggan istilah 'kader jenggot' adalah kader yang tidak memiliki akar ke bawah, tetapi hanya memiliki akar ke atas, atau hanya akar yang menggantung, seperti 'lambang' dari sebuah orsospol peserta pemilu.

Penunjukkan sikap dan perilaku atas status sosial yang disandanginya sebagai seorang wakil rakyat ternyata lebih banyak bersikap sebagai seorang birokrat dan bukan sebagai abdi dari masyarakat. Sikap dan perilaku dari para wakil rakyat ini membuat masyarakat menjadi lebih mempercayai peranan Komnas HAM atau LSM yang ada sebagai lembaga-lembaga yang dipercayai oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, keluhan dan kepentingan masyarakat, ketimbang menyampaikan aspirasi atau keluhannya ke lembaga perwakilan rakyat yang ada.

Dari aspek perekonomian para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi mengalami krisis kepercayaan terhadap peranan wakil rakyat sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat karena peranan wakil-wakil rakyat dalam bidang perekonomian menunjukkan posisi yang sangat minimal walaupun berbagai kebutuhan para wakil rakyat itu sudah dicukupi dan dipenuhi oleh masyarakat<sup>39)</sup>.

Sikap dan penampilan para wakil rakyat menurut para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi adalah kontras dengan masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa sangat sedikit sekali para wakil rakyat yang benar-benar memahami kondisi masyarakatnya, sebab dalam kondisi yang serba 'pas-pasan' para wakil rakyat tersebut masih saja mempersoalkan hak-hak mereka sebagai wakil rakyat yang kurang pada tempatnya dikemukakan (misalnya saja keberadaan

---

<sup>39)</sup> Mohon diingat bahwa pembiayaan segala kebutuhan para wakil rakyat itu ditanggung oleh masyarakat dan didapat dari dana yang diberikan oleh masyarakat melalui berbagai pajak dan pungutan yang dikelola oleh penguasa. Mulai dari kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum hingga Sidang Umum MPR tersebut mengeluarkan dana yang tidak sedikit, namun apa yang dihasilkan sama sekali bukan yang dikehendaki oleh masyarakat. Peran wakil rakyat di bidang perekonomian menunjukkan adanya keberpihakan walaupun secara 'malu-malu' kepada pihak yang memiliki modal. Tidak sedikit peraturan perundangan yang dihasilkan dari lembaga ini yang memiliki muatan-muatan ekonomis yang menguntungkan bagi salah satu pihak. Hal lain yang patut dipertanyakan, kalau memang lembaga perwakilan rakyat memang serius untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat, maka seharusnya sudah sedari dulu mengajukan rancangan undang-undang antimonopoli dan perlindungan konsumen. Ini sebenarnya bisa terlaksana karena lembaga perwakilan rakyat memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang.

fasilitas pengadaan mobil dinas yang baru atau pemberian kredit mobil dengan fasilitas dinas, pemberian cincin mas souvenir ucapan terima kasih, dan permintaan berbagai fasilitas atas pelayanan yang dirasa cukup berlebihan). Realita yang menunjukkan bahwa para wakil rakyat lebih memikirkan kondisi perekonomian pribadi ketimbang memikirkan kondisi perekonomian masyarakat telah membuat posisi para wakil rakyat yang sudah kurang mendapat kepercayaan menjadi semakin kurang disukai<sup>40)</sup>.

Selain itu pula para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi juga melihat adanya sikap yang mendua dalam diri wakil-wakil rakyat yang berprofesi juga sebagai pengusaha. Dimana pada satu sisi mereka berperan sebagai wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan hak-hak masyarakat, namun disisi lain mereka-pun turut serta mengambil keuntungan atau fasilitas dari posisi-nya sebagai wakil rakyat untuk memperlancar bisnis atau perusahaan yang dilakukan atau dikelola oleh lingkup keluarga, kerabat atau temannya. Tidak sedikit *'tender-tender'* yang dikeluarkan oleh penguasa dikelola juga oleh *'sebagian'* anggota wakil rakyat yang berprofesi sebagai pengusaha, sehingga timbul kesan bahwa tender yang ada tidak melalui lelang tetapi melalui penunjukan. Di sisi lain, karena tender penguasa itu dikerjakan oleh salah seorang anggota wakil rakyat, maka fungsi pengawasan lembaga wakil rakyat

---

40) Dalam beberapa kasus yang sempat menyolok dipermukaan ialah dengan ribut-ributnya para anggota DPR/MPR dengan kasus pemberian cincin mas souvenir yang beratnya serta kadarnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ini menunjukkan sebuah perilaku bahwa apabila hak-hak mereka (para wakil rakyat) itu yang dilanggar maka mereka akan gencar melakukan perlawanan, bahkan kalau perlu mengundang media massa untuk mengumumkan dan menyatakan akan mengusutnya sampai tuntas. Tetapi apabila yang mengadakan permasalahan adalah masyarakat dan tidak ada kaitannya dengan dirinya, maka kinerja para anggota wakil rakyat tersebut terlihat kurang antusias. Contoh lain ketika para wakil rakyat diperbolehkan mengambil kredit mobil, maka ramai-ramai mereka segera menggunakan hak tersebut untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ini terlihat bahwa mereka *'masih haus'* akan harta dan bukannya mendahulukan kewajibannya sebagai wakil-wakil rakyat yang seharusnya justru mempertanyakan mengapa mereka justru diberikan kemudahan untuk mengambil mobil *'Timor'* yang jelas-jelas merupakan bentuk sebuah persaingan industri yang tidak sehat.

atas proyek-proyek yang dilakukan oleh penguasa tidak dapat berjalan dengan baik, karena baik penguasa yang memberikan 'order' maupun 'pelaksana order' berada dalam lingkup kerja yang hampir sama, dan dalam hal ini masyarakatlah yang paling banyak dirugikan<sup>41)</sup>.

Belum lagi masalah keterkaitan 'orang-orang' tertentu yang dekat dengan lembaga kekuasaan tetapi juga berada di lembaga perwakilan rakyat, sehingga amat diragukan sekali adanya keobyektifitasan sebuah pekerjaan dan tanggungjawab yang dibebankan baik kepada penguasa sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan sebuah negara, maupun kepada lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi mendampingi dan mengawasi penguasa<sup>42)</sup>.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap para wakil rakyat di bidang sistem politik pemerintahan dan perekonomian, pemaparan dalam bentuk tabel dapat dilihat berikut ini:

---

41) Sudah menjadi rahasia umum apabila ada sebuah tender yang dikeluarkan oleh pihak penguasa, maka beberapa persen bagian yang dikeluarkan dari dana yang tersedia merupakan 'upeti' bagi yang mengeluarkan tender tersebut. Dalam hal ada keterlibatan orang-orang dalam sebagai perantara atau pemberi 'order' seakan-akan sudah merupakan kelaziman agar kedua belah pihak, baik yang memberi order maupun yang menerima order dapat tetap berjalan dan saling membantu. Fungsi lembaga pengawasan yang seharusnya juga dapat dilakukan oleh para wakil rakyat akan menjadi rapuh, karena sudah menjadi rahasia umum pula apabila ada sebagian dari para wakil rakyat tersebut yang justru hidup tidak hanya sebagai wakil rakyat tetapi juga dari tender-tender yang dikeluarkan oleh pemerintah. Disini ada satu pihak yang mengerjakan dua pekerjaan berbeda yang saling bertentangan. Di satu sisi ia harus mengerjakan pekerjaan yang ditenderkan karena ia juga seseorang yang mendapatkan pekerjaan, disisi lain ia juga harus mengawasi jalannya tender tersebut karena ia juga seorang wakil rakyat yang berhak mengawasi jalannya pembangunan. Kerumitan proses pemberian dan pengawasan tender yang terjadi di satu orang kerap terjadi, lebih-lebih para wakil rakyat yang sekaligus juga pemenang tender tersebut adalah 'kelompok atau orang tertentu' yang memiliki akses dengan kekuasaan atau memiliki 'kedekatan pribadi' dengan sumber kekuasaan.

42) Lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat atas tender-tender yang diberikan oleh penguasa menyebabkan banyak terjadi korupsi, kolusi, nepotisme dan upetiisme. Korupsi karena ada bagian-bagian tertentu dari keuangan negara yang dirugikan oleh pihak-pihak yang berkolusi, kolusi karena para pihak yang melakukan penyimpangan tersebut baik yang memberikan tender maupun yang menerima tender melakukan kesepakatan yang tidak sehat, nepotisme karena dalam pemberian tender tersebut mengacu kepada pola-pola kedekatan tertentu, baik kedekatan dengan sumbu kekuasaan, kedekatan kekeluargaan, kedekatan teman atau kerabat dan upetiisme karena bagi mereka yang memenangkan tender sudah menjadi kelaziman untuk menyerahkan sekian persen dari nilai tender kepada orang yang memberikan tender atau kepada orang yang membantunya memenangkan tender.

Tabel 5. Penyebab krisis kepercayaan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap wakil rakyat di Bidang sistem politik pemerintahan dan perekonomian.

Bidang	Penyebab krisis kepercayaan thd. wakil rakyat
Sistem politik dan pemerintahan.	Hanya merupakan sarana legitimasi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa, dan wakil rakyat dianggap sebagai produk kekuasaan.
	Dianggap sebagai perpanjangan tangan penguasa karena lebih banyak menyuarakan kepentingan penguasa kepada rakyat bukan sebaliknya.
	Wakil rakyat lebih banyak berperan sebagai birokrat bukan sebagai orang yang mewakili kepentingan masyarakat (minta dilayani bukan melayani).
	Wakil rakyat kurang mewakili kepentingan rakyat dan lebih banyak menyuarakan kepentingan golongan atau kelompoknya.
	Keberadaan wakil rakyat kurang mengakar sehingga kurang dikenal masyarakat. wakil rakyat dianggap sebagai 'kader jenggot' kader yang bergantung keatas.
	Adanya persepsi yang kurang baik terhadap Wakil rakyat (4d), bersikap mengambil jarak dengan masyarakatnya, glamor dan kurang memiliki inisiatif, sehingga masyarakat lebih percaya kepada Komnas HAM atau LSM.
Perekonomian	Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan pemilihan wakil rakyat dan sidang-sidangnya, namun kurang aspiratif.
	Wakil rakyat lebih banyak memikirkan kondisi perekonomian pribadi ketimbang kondisi perekonomian masyarakatnya.
	Sikap mendua dari wakil rakyat, yang juga mengambil keuntungan atau fasilitas dari posisinya sebagai wakil rakyat untuk memperlancar bisnis yang dilakukan oleh lingkup keluarga, kerabat atau temannya.
	Adanya bentuk korupsi, kolusi, nepotisme dan u-petiisme di kalangan penguasa dan wakil rakyat.

Tabel disusun dan dikualifikasikan berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.



Krisis kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyatnya dan terhadap keberadaan lembaga perwakilan rakyat dalam upaya mengemukakan aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya, tidak lepas dari berbagai persepsi apriori masyarakat terhadap orang-per-orang.

Disamping peran lembaga perwakilan rakyat yang kurang dapat mensejajarkan diri dengan peran penguasa yang terlalu dominan, kondisi yang ada semakin diperparah dengan adanya sikap apriori masyarakat terhadap orang-per-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Masyarakat menilai bahwa sikap 'kevakalan' seseorang yang selama ini terlihat nyata di masyarakat dan menjadi 'singa' dalam berbagai mimbar ternyata ketika masuk dalam lingkup 'kelembagaan', 'kevakalan' tersebut nyaris lenyap, menjadi sirna tertutup oleh berbagai kebijakan fraksi<sup>43)</sup>.

Walau demikian tidak seharusnya peran melakukan kontrol terhadap perilaku penguasa menjadi mengendur dan bersikap acuh tak acuh atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Salah satu bentuk 'person' yang begitu banyak dikecewakan perannya di lembaga perwakilan rakyat oleh masyarakat adalah peranan tokoh agama, dimana pada awalnya masyarakat begitu berharap banyak terhadap peran tokoh agama tersebut agar dapat memberikan warna dan nuansa baru di lembaga perwakilan rakyat. Tetapi ternyata setelah mereka memasuki sebuah lingkungan kelembagaan telah begitu banyak perubahan yang terjadi pula

---

43) Realita menunjukkan bahwa seseorang yang biasanya bersikap 'vokal' dan selalu melihat dalam sisi yang berbeda dengan sisi penguasa, namun apabila setelah ia berada di lingkungan kekuasaan, bahkan berada di dalamnya, 'kevakalan' itu menjadi sirna, hilang terbawa oleh arus yang ada dalam kekuasaan tersebut. Fenomena inipun terlihat secara nyata di pihak wakil-wakil Rakyat, yang saat melakukan kampanye mereka mengumbar berbagai macam janji, namun ketika mereka sudah terpilih dan berada dalam sebuah Sistem maka kevakalan itupun menjadi lenyap.

dalam diri tokoh agama tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam melakukan klasifikasi dan penguraian secara sistematis krisis kepercayaan terhadap para tokoh agama dapat dilihat dalam preposisi berikutnya.

#### 6. Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap tokoh agama.

Secara umum krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap para tokoh agama terjadi disebabkan adanya berbagai bentuk penyimpangan '*halus*' yang '*memperalat*' agama itu sendiri demi kepentingan terselubung dari sistem politik pemerintahan dan perekonomian.

Dalam bidang sistem politik pemerintahan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa telah terjadi berbagai bentuk '*pendekatan*' yang dilakukan oleh penguasa kepada para tokoh agama sebagai sarana legitimasi mendapatkan kepercayaan dari ummat tokoh agama yang bersangkutan. Kedekatan para penguasa kepada para tokoh agama dipandang sebagai sebuah '*kedekatan tendensius*' yang menghendaki dengan '*terkuasainya*' para tokoh agama sebagai pemimpin informal secara tidak langsung kelompok ummatnya pun dapat dikuasai untuk dikendalikan secara lebih mudah<sup>44)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa kedekatan para tokoh agama dengan sumber-sumber

---

<sup>44)</sup> Realita ini menunjukkan bahwa sebenarnya kedekatan para penguasa kepada para tokoh agama merupakan bentuk tindakan '*pisau bermata dua*'. Disatu sisi para penguasa secara terselubung telah melakukan tindakan preventif atau pengamanan sosial dengan jalan melakukan pendekatan informal untuk menjaga agar para tokoh agama tersebut tetap berada dalam jalur kekuasaannya dan dalam sisi yang lain kedekatan para penguasa dengan para tokoh agama tersebut merupakan sarana legitimasi bahwa para penguasa tersebut telah mendapatkan '*pengakuan*' sebagai penguasa oleh para tokoh agama. Keduanya mendapatkan manfaat dari hubungan yang dilakukannya. Penguasa seakan-akan mendapatkan legitimasi dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh agama pun mendapatkan berbagai kemudahan dari penguasa. Dari segi sistem politik pemerintahan, legitimasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama merupakan sebuah kekuatan informal yang mendukung pelaksanaan pemerintahan, sebaliknya bagi para tokoh agama keuntungan yang diperoleh, mungkin saja para tokoh agama tersebut diberikan jabatan khusus, sebagai penasehat atau mungkin jabatan-jabatan formal yang berkaitan dengan bidangnya. Sebuah simbiosis mutualisme yang cukup baik dan saling menguntungkan.

kekuasaan atau orsospol tertentu merupakan sebuah tindakan politis yang bermaksud memanfaatkan kondisi untuk populeritas diri disamping juga menunjukkan eksistensi diri sebagai bentuk perwujudan '*pemimpin informal*' yang diakui dan terpendang di masyarakat. Namun disini lain oleh kelompok tertentu yang dekat dengan sumber kekuasaan atau orsospol tertentu, kedekatannya dengan Tokoh-tokoh agama tersebut dijadikan alat sebagai alat promosi untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik dari masyarakat luas.

Kedekatan para tokoh agama dengan sumber-sumber kekuasaan atau orsospol tertentu telah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, sehingga himbauan-himbauan yang berasal dari tokoh agama tersebut secara terselubung pula lebih banyak berpihak atau membela kepentingan penguasa yang dekat dengan dirinya, dan bukan membela kepentingan ummat atau masyarakatnya<sup>45)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa penggunaan dalih atau konsepsi ajaran agama tertentu oleh para tokoh agamanya digunakan untuk membela kepentingan-kepentingan penguasa tertentu, bahkan bila perlu penguasa dapat meminta dicarikan '*dasar hukum secara agama*' untuk melegitimasi atau memberikan pembenaan bagi tindakan yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Sehingga dari realita ini terlihat seakan-akan telah terjadi bentuk-bentuk '*penjualan ayat*' atau '*dalil-dalil*'

---

45) Realita ini menunjukkan bahwa tokoh agama-pun masih manusia yang masih dilingkupi oleh beberapa kepentingan yang tendensius, baik dari dirinya sendiri maupun kepentingan tendensius dari pihak luar (penguasa misalnya). Realita kongkrit dapat ditunjukkan dengan bergerombolnya tokoh-tokoh agama (ulama) tertentu dengan gerakan politik tertentu yang menyatakan dukungannya untuk memilih kembali tokoh politik sebagai presiden kembali, mengucapkan dan membangun doa politik agar tokoh politik tertentu terpilih kembali menjadi presiden, atau menyandarkan berbagai kepentingan yang ada pada tokoh politik yang sama. Atau dalam bentuk yang lebih mencolok dan spesifik dengan masuknya beberapa tokoh agama tertentu kedalam sebuah orsospol tertentu secara terang-terangan dan mempublikasikannya di depan umum. Kedekatan-kedekatan yang bersifat politis inilah yang banyak ditentang oleh para aktivis gerakan mahasiswa.

tertentu yang *'dipesan oleh'* penguasa.

Penggunaan tokoh agama sebagai *'tameng terakhir'* untuk menentramkan masyarakat dipandang oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sebagai sebuah perbuatan untuk melindungi kepentingan penguasa, apabila *'kepentingan'* penguasa yang sesungguhnya telah terbongkar atau telah terjadi friksi, baik friksi secara fisik maupun friksi secara non fisik. Oleh para penguasa tokoh agama digunakan sebagai perpanjangan tangan untuk mententeramkan masyarakat melalui tokoh-tokoh informalnya dengan cara menempatkan (memberi kedudukan) tokoh agama tersebut pada posisi-posisi tertentu dengan *'imbalan'* memberikan dukungan juga atas kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh penguasa<sup>46)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi telah melihat adanya praktek *'penjualan agama'* sebagai sarana untuk mencapai popularitas tertentu sehingga Tokoh yang bersangkutan dipandang sebagai *'pemimpin informal'* yang akhirnya dapat membawanya kepada jenjang karier politik tertentu atau jenjang tingkat perekonomian yang lebih baik. Dalam karier berpolitik para tokoh agama *'karbitan'* ini terlihat lebih banyak mengurus kepentingan pribadi dan golongannya ketimbang mengurus kepentingan masyarakatnya secara luas, bahkan para tokoh agama yang tadinya terkenal cukup *'vokal'* dalam memperjuangkan sebuah keyakinanannya, menjadi cukup *'patuh'* setelah ia berada dalam

---

46) Realita yang ada menunjukkan bahwa penggunaan tokoh agama sebagai *'tameng'* atas kepentingan tertentu dapat dilihat dalam kasus peristiwa Nipah, kerusuhan Tasikmalaya, kerusuhan Lampung, kerusuhan Aceh, kerusuhan Timor-Timur (baik kerusuhan terhadap masyarakat asli Timor-Timur, maupun kerusuhan terhadap masyarakat Muslim yang berdiam di Timor-Timur) dan dalam bidang ekonomi, yaitu ketika digunakannya tokoh agama untuk menetralkan isu lemak babi, penggunaan tokoh agama untuk memasyarakatkan penggunaan dan pemahaman bank dengan sifat-sifat yang sesuai dengan konsep agama tertentu, memasyarakatkan konsep asas tunggal melalui pendekatan agama, dan menghibau masyarakat agar jangan sampai terpengaruh membeli dolar dengan tujuan spekulasi, maka para tokoh agama sampai mengeluarkan *'dalil'* bahwa spekulasi mata uang dengan melakukan pembelian dolar adalah *'haram'*. Terlihat sekali bahwa tokoh agama menjadi sarana perpanjangan tangan penguasa untuk mendukung kebijakan tertentu.

lingkaran kekuasaan.

Kondisi-kondisi yang menyebabkan runtuhnya kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap para tokoh agama dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Penyebab krisis kepercayaan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap tokoh agama di bidang agama, sistem politik pemerintahan dan perekonomian.

Bidang	Penyebab krisis kepercayaan terhadap tokoh agama
Agama, sistem politik dan pemerintahan serta Perekonomian.	Kedekatan tokoh agama tertentu dengan sumber-sumber kekuasaan atau orsospol tertentu, sehingga himbauan yang dikemukakannya lebih banyak berpihak kepada kepentingan-kepentingan tertentu.
	Penggunaan konsepsi ajaran agama untuk berpihak pada kepentingan penguasa, sehingga ada anggapan adanya 'penjualan ayat' demi kepentingan tertentu.
	Penggunaan tokoh agama sebagai tameng untuk menenteramkan masyarakat apabila terjadi friksi (fisik-non fisik) dengan penguasa, dan menempatkan tokoh agama sebagai sarana pendukung atas kebijakan tertentu.
	'Penjualan agama' sebagai sarana popularitas tertentu untuk mencapai jenjang karier politik tertentu, atau tingkat perekonomian tertentu

Tabel disusun dan dikualifikasikan berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Menipisnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga formal dan informal dalam lingkup sosial politik dan perekonomian, membawa imbas terhadap keberadaan lembaga pendidikan<sup>47)</sup>. Dahulu lembaga Pendidikan

47) Lembaga Pendidikan dahulu dianggap sebagai benteng terakhir yang menegakkan moral diatas segalanya. Kebebasan ilmiah, perbedaan pendapat dijunjung tinggi demi kesejahteraan umat manusia. Tetapi kini dengan adanya dominasi paham tertentu yang diberlakukan sebagai sebuah ideologi membuat lembaga pendidikan yang ada menjadi seakan-akan berafiliasi dengan paham atau doktrin-doktrin tertentu. Indoktrinasi dilakukan dengan halus melalui praktek-praktek pengajaran yang mengarah pada paham tertentu. Proses pendidikan yang selalu diawali dengan Penataran P4 seakan-akan melembaga menjadi sebuah kebenaran yang harus diakui kebenarannya tanpa boleh dipertanyakan kembali. Banyak orang yang pada awalnya simpati dan mengakui kebenaran-kebenaran yang ada pada pola pendidikan yang ada (khususnya pada Penataran P4) Menjadi bersikap mengambil jarak dan mulai mempertanyakannya kembali, bahkan pada sisi-sisi tertentu yang paling kritis orang menjadi antipati karena selalu dipaksakan untuk menerima doktrin-doktrin tersebut dalam bentuknya yang kaku sebagai sebuah kebenaran dan ideologi.

dianggap sebagai sebuah lingkungan yang demokratis dan membuka seluas-luasnya dalam kebebasan berpendapat, ternyata dalam kurun waktu tertentu, dan dalam kekangan pola kekuasaan tertentu kampus sudah terinterfensi oleh berbagai kepentingan politik yang mengatasnamakan '*stabilitas dan keamanan nasional*', sehingga peran kampus yang dahulu begitu terbuka dan demokratis kini berubah menjadi dalam kekangan ideologi tertentu yang secara diam-diam digunakan untuk '*menjinakan*' dan '*mereposisikan*' mahasiswa sebagai sebuah kelompok elit yang hanya diposisikan sebagai '*pelajar*' tanpa boleh memiliki keperdulian politik dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk yang ilmiah<sup>48)</sup>.

Kecenderungan keberpihakan lembaga pendidikan Tinggi yang ada terhadap sebuah ideologi tertentu membuat peran mahasiswa berada dalam keterkekangan dalam membuka aspirasi dan cakrawala yang berbeda<sup>49)</sup>. Pengemukakan pandangan yang berbeda dalam tataran tertentu dianggap sebagai sebuah penyimpangan dan otorisasi mahasiswa dalam mengu-

---

48) Realita menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang sudah sedemikian lama, yaitu sejak diberlakukannya konsep NKK BKK pada aktivitas kemahasiswaan, sebagai akibat terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974, maka sedikit demi sedikit peran mahasiswa dalam tataran politik praktis makin surut dan makin diposisikan dalam ruang gerak batasan 'ilmiah'. Berbagai kegiatan kemahasiswaan secara drastis mulai diawasi dan diposisikan sebagai sebuah kegiatan yang memerlukan kewaspadaan dan ekstra kehati-hatian yang teramat sangat. Berbagai kegiatan kemahasiswaan sudah mulai diarahkan dalam bentuk tataran akademis, ilmiah dan cenderung dikonsumsi oleh lingkungan kampus tersebut tanpa memiliki keperdulian terhadap masyarakatnya. Porsi keperdulian terhadap masyarakatnya disalurkan oleh pihak pengurus kampus melalui program akademis kuliah kerja nyata. Kondisi seperti ini memicu maraknya kelompok-kelompok studi kemahasiswaan, dan memicu afiliasi-afiliasi tertentu para aktivis gerakan mahasiswa kepada faham-faham tertentu. Bandingkan dengan konsep peranan dan keberpihakan mahasiswa yang dikemukakan oleh Arbi Sanit dalam Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa, Lingkaran Studi Indonesia - YLBHI, Jakarta, 1989 dan lihat juga pemaparan Philip G. Altbach (Editor) tentang kondisi yang keterkekangan mahasiswa di dunia politik dalam cakupannya yang lebih luas dalam Politik dan Mahasiswa Prespektif dan Kecenderungan Masa Kini, diterbitkan oleh Yayasan API bekerja sama dengan Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1988.

49) Keberpihakan lembaga pendidikan tinggi kedalam sebuah ideologi tertentu membuat iklim kebebasan dan keterbukaan yang senantiasa dijaga di lingkungan akademis menjadi semakin terkungkung dalam bentuk pembenaran dan indoktrinasi terhadap faham-faham politik tertentu yang memang dikondisikan oleh penguasa agar diterima sebagai sebuah kebenaran dan ideologi. Keterkungkungan kampus sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi ke dalam ideologi tertentu membuat mahasiswa tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat dan mengeluarkan pandangannya dalam bentuk yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah penyimpangan dan penyimpangan kala itu adalah sesuatu yang sangat 'diharamkan'. Sebenarnya biarkanlah para mahasiswa tersebut memiliki visi atau cara pandang yang berbeda, tinggal para staf edukasinya yang mengarahkan dan membimbing agar mereka tidak mengalami ketersesatan.

rus dan mempola kelembagaan kemahasiswaannyapun sudah sedemikian jauh dicampuri.

Untuk lebih memahami kecenderungan-kecenderungan tertentu yang dilakukan lembaga pendidikan sehingga memicu timbulnya krisis kepercayaan terhadap lembaga pendidikan yang ada, dapat dilihat dalam uraian preposisi berikutnya.

## 7. Krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap lembaga pendidikan.

Secara umum para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi pada awalnya menilai bahwa lingkungan kampus sebagai lingkungan yang ilmiah adalah sebuah lingkungan yang bebas, demokratis dan menerima adanya perbedaan-perbedaan secara terbuka dan dewasa. Namun dengan adanya bentuk pengekangan terhadap kebebasan ilmiah, dan keterikatan para staf edukasinya kepada sebuah lembaga yang berafiliasi dengan salah satu orsospol dan tidak diperbolehkan menyalurkan aspirasinya diluar orsospol tersebut, maka iklim pengekangan inipun membawa dampak terhadap bentuk-bentuk kepercayaan mahasiswa kepada para dosen dan perangkat pendidikan lainnya.

Keterikatan para staf edukasi dan perangkat perguruan tinggi lainnya dengan sebuah lembaga yang berafiliasi dengan salah satu orsospol dan<sup>50)</sup>, tidak diperbolehkannya para staf edukasi dan perangkat perguruan tinggi lainnya menyalurkan aspirasinya kepada orsospol lainnya membentuk persepsi para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sebagai sebuah pengekangan politik yang

---

50) Sudah menjadi rahasia umum bahwa staf edukasi di berbagai lembaga pendidikan yang sifatnya 'negeri' maka tampak jelas sekali adanya afiliasi politik tertentu yang berada sangat dominan. Afiliasi diluar afiliasi politik yang ada sangatlah ditentang. Walaupun kampus digambarkan sebagai lingkungan yang bebas dalam mengemukakan pendapat, pandangan, tetapi ternyata dalam hal afiliasi politiknya sangatlah dibatasi, hanya pada satu afiliasi politik tertentu.

dilakukan di lingkungan ilmiah.

Apabila sebuah pengekangan politik ini diteruskan dan seakan-akan '*dibenarkan*' melalui perangkat hukum yang memang telah dipersiapkan, maka pengekangan politik ini dapat membawa dampak dalam bentuk-bentuk pengajaran dan pendidikan yang diberikan kepada para mahasiswanya. Pengekangan yang samapun dilakukan terhadap mahasiswa, dimana mahasiswa yang ada tidak diperbolehkan memiliki pemikiran atau pendapat yang berbeda dengan apa yang telah digariskan. Mahasiswa tidak diperbolehkan memiliki kebijakan tersendiri untuk memilih dan membentuk kelompok mahasiswanya (*Dewan Mahasiswa atau Senat Mahasiswa*), dan mahasiswa tidak diperbolehkan menyalurkan aspirasi politik yang berbeda secara terang-terangan di lingkungan kampusnya<sup>51</sup>).

Bentuk pendidikan yang '*semi feodal*' yaitu menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat secara ilmiah, atau menutup dan memasung berbagai kreatifitas, membuat kondisi pendidikan tidak memungkinkan timbulnya bentuk-bentuk pemikiran yang kreatif dan berbeda. Bentuk pendidikan dan pemikiran mahasiswa digiring kepada sebuah bentuk pemikiran yang sudah ditetapkan sesuai jalur kebijakan dan dikonstruksikan untuk menerima apa yang disodorkan oleh apara pengajarnya sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu untuk dipertanyakan kembali, sehingga apabila ada mahasiswa yang mencoba berfikir tidak sesuai jalur, atau berpendapat tidak sesuai dengan yang

---

<sup>51</sup>) Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa lingkungan kampus akan menjadi sebuah lingkungan hipokrit yang mati dari kreatifitas dan terpasung dalam bentuk satu garis kebijakan yang telah ditetapkan. Terpasungnya kreatifitas dan terhambatnya kehidupan demokratis yang terbuka membentuk sikap dan mental otoriter dan sulit untuk menerima adanya perbedaan. Jika ini terus menerus dibiarkan dan seakan-akan dibenarkan melalui berbagai legitimasi kebijakan hukum yang ada, maka anggapan bahwa kampus adalah sebagai sebuah bentuk sarana pendidikan yang bersifat tertutup, otoriter dan tidak terbuka akan menjadi kenyataan.



telah dikonstruksikan oleh penguasa maka pemikiran tersebut dianggap keliru, *'mbalelo'* dan dapat distigma sebagai kelompok radikal yang patut diwaspadai atau dicurigai. Bahkan pada titik-titik tertentu keberadaan mahasiswa dianggap sebagai sebuah ancaman instabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi-pun melihat bahwa bentuk-bentuk pendidikan yang terlalu dipaksakan untuk mematuhi secara ketat, kaku dan menuju bentuk pengkonstruktian pemahaman dogma-dogma politis tertentu dapat menimbulkan *'iklim pembodohan'*. *'Iklim pembodohan'* dalam bidang ilmiah, aspirasi politik dan keterbukaan yang demokratis. *'Iklim pembodohan'* ini melihat segala sesuatu yang berada dan dibentuk dalam keseragaman adalah merupakan bentuk tatanan kehidupan dan bermasyarakat yang ideal. Tatanan kehidupan bermasyarakat yang demikian hanya akan mematikan bentuk-bentuk kreatifitas-kreatifitas yang majemuk dan beragam, serta memandang ketidakseragaman dan ketidakpatuhan adalah sebuah bentuk penentangan, pencerminan sikap yang *'mbalelo'*, bahkan dalam pandangan yang radikal dianggap sebagai sebuah bentuk penyimpangan dari sebuah kelaziman.

Pemberian berbagai fasilitas yang tidak sama, serta perlakuan yang lebih mengistimewakan kelompok-kelompok lembaga pendidikan tertentu menunjukkan bentuk diskriminasi terhadap berbagai lembaga pendidikan yang ada. Diskriminasi dan perlakuan istimewa kepada lembaga-lembaga pendidikan khusus yang dikelola oleh negara telah membuat jurang perbedaan yang terlalu dalam dan kecemburuan yang terlalu berlebihan. Dalam artian pengistimewaan ini menunjukkan adanya upaya untuk menomorsatukan lembaga-lembaga pendidikan khusus yang dikelola oleh negara

ketimbang lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

Berikut adalah tabel penyebab krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap lembaga pendidikan.

Tabel 7. Penyebab krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap lembaga pendidikan.

Peran & proses	Penyebab krisis kepercayaan terhadap lembaga pendidikan
Peran lembaga pendidikan formal.	Terlalu teoritik, kaku dan terlalu banyak di-muati dogma-dogma politis yang hanya memihak pada kepentingan salah satu golongan atau kelompok saja. Perbedaan yang terlalu mencolok antara teori dan realita yang ada.
proses pendidikan dan pengajarannya.	Konsep pendidikan dan pengajarannya terlalu dogmatis tertutup yang tidak memungkinkan adanya perbedaan pendapat secara terbuka dan sportif, sehingga timbul anggapan 'proses pembodohan', otoriter dan diskriminatif.
proses pendidikan dan perlakuan yang istimewa bagi lembaga pendidikan khusus.	Adanya bentuk perlakuan khusus dan pengistimewaan terhadap lembaga pendidikan khusus yang di tangani dan dikelola langsung oleh negara, menimbulkan kecemburuan bagi lembaga pendidikan lainnya.

Tabel disusun dan dikualifikasikan berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Apabila krisis kepercayaan sudah melanda lembaga pendidikan yang ada, maka secara realita sudah menunjukkan terjadinya krisis kepercayaan yang teramat dalam. Sebab apabila sebuah lembaga pendidikan sudah tidak lagi dapat dipercaya, maka siapakah lagi yang dapat dipercaya. Apabila lembaga pendidikan sebagai sebuah basik pendidikan yang mencoba membentuk kepribadian, moral dan akhlak masyarakat sudah tidak dapat dipercaya, maka tinggal benteng moral yang dapat diandalkan untuk mempertahankan sebuah kepercayaan.

Lembaga pendidikan sebagai sebuah lembaga yang men-

gemban tanggungjawab pendidikan dan pembinaan kader-kader penerus bangsa adalah sebuah lembaga formal pertama diluar keluarga (*batih*) yang dapat membentuk watak, kepribadian dan perilaku para calon-calon penerus bangsa. Namun apabila hal ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan banyaknya pembatasan-pembatasan berdasarkan kepentingan politis tertentu, maka tinggal aspek moral saja yang dapat menjadi benteng terakhir dalam membentuk kepribadian dan akhlak bangsa.

Namun apakah moral juga mampu menanggung beban tanggungjawab yang sudah sedemikian berat tanpa didukung oleh faktor-faktor pendukung lainnya? Sungguh sebuah tanggungjawab yang tidak ringan, sehingga dalam realitanya berbagai kondisi dan himpitan berbagai kepentingan atas kekuasaan tertentu, moral-pun akhirnya mengalami sebuah erosi. Erosi kepercayaan terhadap moral yang berimplikasi terhadap sistem politik pemerintahan, perekonomian dan hukum.

Untuk lebih memudahkan dalam menguraikan komponen demi komponen yang menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap moral, sistem politik pemerintahan, perekonomian dan hukum, maka dalam uraian berikut dapat dikembangkan dalam dua bagian preposisi yaitu bagian krisis kepercayaan terhadap moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian, kemudian yang berikutnya adalah krisis kepercayaan terhadap hukum.

Kedua Preposisi ini dipisahkan agar dalam penguraiannya dapat menjadi lebih jelas, yaitu mana yang berupa indikator-indikator '*kepentingan*' yang sebenarnya, dan yang mana pula hanya berupa sebagai '*alat*' belaka. Preposisi yang menjelaskan tentang krisis kepercayaan terhadap moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian

merupakan bagian yang mengemukakan indikator-indikator atas munculnya '*kepentingan*' yang sebenarnya, sedangkan preposisi yang menjelaskan tentang krisis kepercayaan terhadap hukum merupakan bagian yang mengemukakan indikator-indikator yang menggunakan hukum hanya sebagai '*alat*' belaka.

8. Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan meyakini adanya kebobrokan di bidang moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian.

Secara umum para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan meyakini adanya berbagai bentuk kebobrokan yang sudah terlalu parah baik di masyarakat maupun di pihak penguasa dan wakil rakyat-nya, baik pada sisi moral, pada bidang sistem politik pemerintahan maupun dalam bidang perekonomian.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan meyakini adanya tingkat korupsi, kolusi, nepotisme dan upetiisme yang tinggi. Perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dan upetiisme dan seakan-akan sudah '*mendarah daging*' di kalangan masyarakat, penguasa serta wakil rakyatnya, sehingga seakan-akan pula perbuatan tersebut sudah dianggap sebuah perbuatan biasa dan seakan-akan sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman pula.

Tingginya tingkat korupsi, kolusi, nepotisme dan upetiisme yang melibatkan penguasa dan para wakil rakyat, sudah tidak hanya terjadi dikalangan lingkungan kerja mereka saja tetapi juga sudah melibatkan keluarga, kerabat dan teman dekatnya secara terang-terangan tanpa memiliki rasa malu. Bahkan di berbagai '*sisi tertentu*' atau bidang tertentu, penyebutan salah satu '*nama*' orang tertentu yang memiliki jabatan tertentu atau memiliki kedekatan dengan '*jabatan*' tertentu merupakan sebuah

kelaziman untuk memperoleh berbagai kemudahan, memperoleh 'bagian', atau memperoleh 'jatah' tertentu. Kondisi yang lebih parah ditunjukkan dengan adanya tindak penyalahgunaan wewenang, pemberian kemudahan, atau meminta 'bagian' atas sebuah proyek atau tender tanpa rasa malu dan rasa takut-takut lagi<sup>52)</sup>.

Terkikis dan hilangnya budaya malu di kalangan masyarakat, penguasa dan wakil rakyat menyebabkan budaya korupsi, kolusi, nepotisme dan upetiisme dianggap sebagai sebuah kebiasaan, kelaziman dan diterima sebagai sebuah kelayakan dalam masyarakat, bahkan apabila ada seseorang yang menolak untuk diberi upeti atau memiliki kesempatan untuk korupsi namun tidak korupsi termasuk golongan 'orang-orang yang aneh'<sup>53)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa di kalangan para penguasa dan para wakil-wakil rakyat telah muncul sifat dan sikap hipokrit, eufemisme, munafik dan oportunis yang mampu berbuat apapun demi

52) Realita menunjukkan bahwa pengucapan 'nama' seseorang dengan jabatan tertentu, dalam berbagai tingkatan jabatan dan stratifikasi sosial merupakan sebuah kelaziman bahwa orang yang menyebutkan tanpa malu tersebut menginginkan adanya bentuk perlakuan istimewa, mendapatkan berbagai fasilitas atau kemudahan dari orang yang melayaninya, atau paling tidak agar tidak dipersulit oleh orang yang melayaninya. Dan sudah menjadi realita pula bahwa tindakan-tindakan demikian, walaupun secara kenyataan merupakan tindakan kolusi, atau apabila memberikan sejumlah 'pelicin' sebagai tindakan korupsi atau upetiisme, atau pungli, tetap saja tidak diakui telah melakukan kolusi, korupsi, upetiisme, atau pungli. Bandingkan dengan pemaparan tentang pungli yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, dalam Pungli, Penerbit Mandar Maju, tahun tak tercatat. Soedjono mengemukakan bahwa permulaan pungli dilakukan secara malu-malu, tertutup, halus dan tidak pernah meminta secara kasar. Tetapi kini dengan kondisi yang makin parah ternyata pungli sudah dianggap merupakan bagian dari anggaran yang harus dikeluarkan oleh pihak masyarakat atau orang yang menginginkan adanya pelayanan.

53) Realita menunjukkan bahwa tindakan korupsi, kolusi, nepotisme dan upetiisme sudah sedemikian parahnya, masyarakat sudah menganggapnya sebagai sebuah kebiasaan yang dimaklumi oleh banyak pihak. Sisi terkecil yang seringkali kita lihat adalah mulai dari penarikan parkir yang sering tidak diberikan tanda parkirnya, pengurusan KTP, mengurus berbagai kepentingan dengan pemerintah daerah, melakukan kegiatan bisnis yang harus disertai dengan 'uang pelicin' semuanya merupakan realita keseharian yang secara nalar adalah keliru dan salah, tetapi karena sudah dianggap sebagai kelaziman, kita menganggap biasa saja. Disini terlihat terbentuknya konstruksi sosial bahwa sebuah perbuatan yang sebenarnya keliru dalam tataran pemahaman normatif namun karena dalam realitanya sudah terjadi pergeseran, dilakukan setiap hari dengan biasa tanpa memiliki rasa bersalah karena dianggap sebuah kebiasaan dan kelaziman, maka lambat-laun konstruksi sosial masyarakat membenarkannya dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Justru ketika ada orang yang mencoba mempermasalahkan hal tersebut orang tersebut dianggap 'menyimpang', aneh, 'tidak mengerti atau tidak lazim' sehingga malah orang tersebut dikucilkan. Bandingkan dengan pemaparan teori penerapan rasa malu yang dikemukakan oleh John Braithwaite, dalam Crime, Shame and Reintegration, Cambridge University Press, Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1989.

keuntungan mereka pribadi. Baik keuntungan dari segi materil, maupun keuntungan dari segi sosial-politik<sup>54)</sup>.

Berikut adalah tabel Indikator kebobrokan moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian yang muncul dalam realita menurut para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Tabel 8. Indikator kebobrokan moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian yang muncul dalam realita menurut aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Melihat dan meyakini	Indikator yang muncul dalam realita menurut aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.
Kebobrokan moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian.	Tingginya tingkat korupsi, kolusi, nepotisme dan upetiisme di kalangan masyarakat, penguasa dan wakil rakyat.
	Hilangnya budaya malu sehingga korupsi, kolusi nepotisme dan upetiisme dianggap sebagai sebuah kebiasaan dan kewajaran.
	Munculnya sikap hipokrit, munafik, eufemisme, dan oportunis yang sudah terlalu mencolok tanpa memiliki rasa malu, yang mampu berbuat apapun demi keuntungan pribadi, kelompok atau golongan tertentu.

Tabel disusun dan dikualifikasikan berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Kebobrokan moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian yang terjadi di lingkungan masyarakat, penguasa dan wakil rakyat serta dianggapnya perilaku-perilaku tertentu sebagai sebuah kewajaran merupakan

54) Realita menunjukkan bahwa sifat dan sikap hipokrit, eufemisme, munafik dan oportunis akan nampak dan terlihat jelas pada perilaku para pejabat dan para wakil rakyat. Tidak memiliki sikap yang mandiri, dan memiliki sikap yang 'mengikuti kemana angin berhembus' merupakan kriteria yang nampak. Seorang pejabat atau wakil rakyat dalam realita dapat memberikan pernyataan berbeda, satu orang dapat mengemukakan pernyataan yang berbeda dalam waktu yang berbeda, semua ini dikeluarkan bergantung pada kondisi yang dirasa paling menguntungkan bagi mereka. Mereka tidak malu lagi untuk 'menjilat' ucapannya sendiri agar posisi dan kedudukan mereka tidak terancam dipindahkan atau digeser. Realita dapat saja berbalik secara drastis dan sikap oportunis telah memberikan 'kekebalan rasa' untuk tidak merasakan rasa malu, bahwa sebenarnya ia telah memberikan pernyataan yang berbalik drastis dengan pernyataan sebelumnya. Lihat saja misalnya tentang kasus kerjasama listrik swasta, kenaikan BBM, pemberian otoritas Mobnas.

indikator-indikator tertentu bahwa kebobrokan memang sudah mencapai taraf yang sangat menkhawatirkan.

Masyarakat beranggapan apabila kita membutuhkan sesuatu kemudian kita memberikan sedikit '*pelicin*' untuk mendapatkan sesuatu tersebut merupakan sebuah kewajaran, sehingga dari realita yang demikian dapat dikaji masyarakat menerima adanya perlakuan-perlakuan yang menyimpang dari lembaga-lembaga tertentu sebagai sebuah kebiasaan atau kewajaran dalam kesehariannya.

Disisi lain berbagai penyimpangan yang dilakukan demi tujuan politis atau perekonomian semata dengan melegalkannya melalui produk-produk hukum tertentu juga merupakan indikator bahwa penggunaan hukum hanyalah sebagai alat demi tercapainya tujuan di bidang sistem politik pemerintahan dan perekonomian.

Untuk lebih memahami indikator-indikator apa saja yang muncul dalam konstruksi pemahaman masyarakat atau para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap kebobrokan hukum, maka akan dikemukakan dan diuraikan dalam preposisi berikutnya.

#### 9. Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan meyakini adanya kebobrokan di bidang hukum.

Secara umum para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi telah melihat dan meyakini adanya berbagai macam penyimpangan, penyalahgunaan fungsi dan wewenang dari hukum yang ada, sehingga terjadi '*praktek-praktek*' hukum yang jauh dari rasa keadilan di masyarakat. Penyimpangan inipun menimbulkan terjadinya '*pemaksaan hukum*' terhadap rasa keadilan melalui kelegalitasannya, dan berimplikasi terjadinya konflik-konflik intern akibat penggunaan hukum yang dipaksakan melalui '*tangan-tangan kekuasaan*'.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan meyakini bahwa dalam kenyataannya banyak sekali hukum, lembaga hukum, perangkat hukum dan berbagai pranata sosial lainnya seringkali hanya berfungsi sebagai sarana untuk melegitimasi atau membenarkan tindakan-tindakan tertentu bagi kepentingan penguasa atau kelompok-kelompok tertentu.

Penggunaan hukum yang didasarkan atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum, lembaga hukum dan perangkat hukum itu sendiri. Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan meyakini bahwa hukum dan berbagai pranata sosial lainnya hanya berperan sebagai perpanjangan tangan dari berbagai kepentingan politik dan ekonomi penguasa atau kelompok-kelompok tertentu.

Keberadaan hukum dinilai oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tidak lebih sebagai sebuah '*perangkat mati*' yang kurang mewadahi dan merespon kepentingan masyarakat yang sesungguhnya serta kurang dapat memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat yang sebenarnya. hal ini disebabkan karena, selama ini masyarakat lebih merasakan bahwa hukum hanyalah sarana untuk melindungi hak-hak penguasa atau kelompok-kelompok tertentu, atau bagi mereka '*yang mampu membelinya*'.

'*Keadilan hukum*' dimata para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi seringkali hanya merupakan sebuah keadilan formalitas dan merupakan sesuatu yang nisbi serta sangat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Bentuk '*keadilan hukum*' yang banyak dituangkan dalam bentuk '*keadilan formalitas*' membuat masyarakat mempercayai bahwa bahwa keberadaan hukum seringkali pula digunakan oleh '*tangan-tangan kekuasaan*' untuk melegitimasi



sebuah keadaan. Oleh karena itulah di dalam 'keadilan hukum' yang sangat didambakan oleh masyarakat tersebut terkandung berbagai macam penafsiran hukum, yang ditafsirkan bergantung bagaimana 'pola kekuasaan' menafsirkannya.

Penafsiran hukum yang bergantung pada sebuah 'pola kekuasaan' sangat memungkinkan sekali terjadinya penafsiran sepihak oleh penguasa, sehingga memungkinkan juga terjadinya sebuah 'kebenaran' menjadi 'ketidakbenaran' dan sebaliknya 'ketidakbenaran' menjadi sebuah 'kebenaran' oleh kuasa 'tangan-tangan kekuasaan'<sup>55</sup>).

Dalam kondisi yang penuh dengan tekanan politis, dan lebih mengedepankan stabilitas politik dan keamanan, keberadaan supremasi hukum tidak lagi diakui secara mutlak, sebab dalam realitanya supremasi kekuasaanlah yang sebenarnya lebih mendominasi jalannya sebuah pemerintahan. Hal ini menimbulkan sikap apriori terhadap hukum dan menimbulkan berbagai bentuk sikap pelecehan terhadap hukum, lembaga hukum dan perangkat hukum itu sendiri.

Dalam kondisi yang sama, sikap ketidakpercayaan terhadap hukum, muncul juga karena perilaku penguasa dan para wakil rakyat itu sendiri yang seringkali tidak konsisten dengan apa yang diucapkannya. Sikap yang ditampilkan oleh para penguasa dan para wakil-wakil rakyat itu muncul sebagai sikap seorang pemilik (*eigenaar*), sehingga

---

<sup>55</sup>) Realita ini menunjukkan bagaimana sebuah kekuasaan melalui tangan-tangan kekuasaannya, mampu melakukan pengkonstruksian tentang hukum, perilaku hukum dan atas kepentingannya pula hukum digunakan untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan kekuasaan. Perilaku menyimpang hukum yang dikendalikan atas dorongan kekuasaan lambat laun dipahami sebagai sebuah kebenaran, dan diluar itu adalah 'ketidakbenaran'. Dalam realita tersebut batasan antara 'kebenaran' menurut hukum dan 'ketidakbenaran' menurut hukum sifatnya relatif dan batasannya tipis sekali, sebab benar atau tidakbenarnya sebuah permasalahan, dalam konstruksi kekuasaan bergantung bagaimana kekuasaan tersebut mau mengatakannya. Kalau memang 'kebenaran' dalam kerangka kekuasaan yang menguntungkan bagi penguasa, maka kebenaran itulah yang dipilih, tetapi apabila 'ketidakbenaran' dalam kerangka kekuasaan tersebut yang lebih menguntungkan bagi Penguasa, maka ketidakbenaran itulah yang dipilih. Bandingkan pula dengan konteks pemahaman hukum yang dikemukakan oleh Douglas Hay, dalam *Law and Ideology*, penerbit dan tahun penerbitan tidak diketahui.

hukum hanya dijadikan alat untuk membenarkan perilaku mereka dan hukum hanya dikemudikan sesuai dengan keinginan mereka<sup>56)</sup>.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menilai bahwa pelecehan terhadap berbagai produk hukum, seringkali dimulai oleh orang-orang yang tahu hukum itu sendiri dan mereka menggunakan produk hukum itu demi kepentingan dan keuntungannya sendiri. Kondisi ini menimbulkan bentuk-bentuk ketidakpercayaan adanya kepastian hukum, seakan-akan hukum hanyalah '*sebuah barang mainan*', hukum seakan-akan hanyalah '*sebuah benda atau kondisi*' yang dapat dibeli dan dapat diatur serta diarahkan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Setelah melihat realita yang ada para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi mengemukakan pandangannya bahwa walaupun dalam berbagai ketentuan dikatakan harus berdasarkan hukum, namun ternyata keberadaan hukum kurang dapat menjamin '*kepastian hukum*' dan keadilan itu sendiri, sebab dalam realitanya kepastian hukum itu sendiri adalah bias dan nisbi, bergantung pada siapa yang '*dapat membeli*' kepastian hukum itu, atau bergantung kepada siapa yang '*sedang berkuasa*' diatas hukum sendiri.

---

<sup>56)</sup> Realita menunjukkan bahwa sikap penguasa dan wakil rakyat yang '*mencila-mencila*', plin-plan, tidak punya pendirian dan hanya bergantung kepada kemana isu angin berhembus serta bergantung pada ucapan '*his master voice*' dalam memberikan pengarahan telah menimbulkan bentuk-bentuk pelecehan dan ketidakpercayaan terhadap penguasa, wakil rakyat dan hukum itu sendiri. Hukum digunakan sebagai sarana untuk mengatur dan melegitimasi berbagai kepentingan, namun dalam prakteknya ia banyak sekali disimpangi oleh berbagai kebijakan yang bertumpu pada kepentingan politik dan ekonomi, sehingga keberadaan hukum-pun makin banyak '*di kebiri*' oleh lengan-lengan kekuasaan. Konteks kekuasaan yang masih terlalu dominan menimbulkan pengendalian yang hanya bertumpu pada tujuan tanpa menghiraukan bahwa tujuan tersebut-pun harus dilegitimasi oleh proses yang baik pula. Hukum bertindak sebagai rambu-rambu dalam proses tersebut, dan hukum bukanlah tujuan, namun karena proses banyak mengabaikan hukum, maka proses-pun berjalan secara anarkhi, proses berjalan hanya mengarah kepada tujuan dengan dasar kerangka kekuasaan. Bandingkan dengan sebuah analisis penggunaan kekuasaan yang dilakukan sesuai rencana yang dikemukakan, atau bagaimana kekuasaan tersebut mampu melakukan sebuah perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan, John Forester, *Planning in the Face of Power - The Politics of Muddling Through*, dalam *Planning in The Face of Power*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1989, page, 27-64.

Tabel 9. Indikator kebobrokan hukum dan sistem peradilan yang muncul dalam realita menurut aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Melihat dan meyakini	Indikator yang muncul dalam realita menurut aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.
Kebobrokan hukum dan sistem peradilan.	Hukum dan pranata sosial hanya berfungsi sebagai sarana untuk melegitimasi berbagai kepentingan penguasa atau kelompok tertentu.
	Hukum dan pranata sosial hanya berperan sebagai perpanjangan tangan dari berbagai kepentingan politik dan ekonomi penguasa atau kelompok tertentu.
	Hukum dinilai sebagai perangkat mati yang kurang mawadahi kepentingan masyarakat yang sesungguhnya. Kurang memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat yang sesungguhnya tetapi lebih melindungi hak-hak penguasa atau kelompok tertentu, atau bagi mereka 'yang mampu membelinya'
	'Keadilan hukum' adalah sebatas 'keadilan formalitas' dan 'penafsiran hukum' adalah sebatas 'penafsiran oleh kekuasaan'
	'Supremasi hukum' tidak lagi diakui keberadaannya yang diakui adalah 'supremasi kekuasaan'
	Pola penerapan hukum oleh penguasa seringkali tidak konsisten dengan apa yang diucapkannya
	hukum hanya dijadikan alat untuk membenarkan perilaku penguasa, dan hukum dapat dikemudikan sesuai dengan keinginan penguasa.
	'Pengkhianatan terhadap hukum' seringkali dilakukan oleh orang yang justru tahu hukum itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan dan kepastian dari hukum itu sendiri.
	Keberadaan hukum kurang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan itu sendiri. Keberadaan hukum bergantung kepada siapa yang 'mampu membeli' dan siapa yang 'sedang berkuasa'.
	Keberpihakan hukum merupakan sesuatu yang sangat nyata, sehingga anggapan bahwa hukum akan dapat memberikan keadilan adalah jargon belaka

Tabel disusun dan dikualifikasikan berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

## B. Tindakan serta Perlakuan Aparat Keamanan dan Ketertiban Dalam Menghadapi Perbuatan Para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi

Dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang melakukan aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa, menggelar mimbar bebas, menggelar spanduk dan baliho serta melakukan aksi turun kejalan dilanjutkan dengan menduduki gedung DPRD-DPR/MPR, para aparat keamanan dan ketertiban mengambil beberapa tindakan serta perlakuan untuk melakukan pengamanan atas jalannya aksi tersebut<sup>57)</sup>.

Secara *taksonomis*, aparat keamanan dan ketertiban yang melakukan pengamanan atas perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Bagian pertama ialah aparat keamanan dan ketertiban yang termasuk kelompok inti, dan bagian yang kedua ialah aparat keamanan dan ketertiban yang termasuk kedalam kelompok pendukung. Kelompok inti aparat keamanan dan ketertiban merupakan kelompok yang terdiri dari unsur Polri, sedangkan kelompok pendukung terdiri dari unsur ABRI atau Militer non Polri<sup>58)</sup>.

Kelompok inti aparat keamanan dan ketertiban yang berunsurkan dari Polri melakukan tugasnya sebagai alat

---

<sup>57)</sup> Pembahasan dalam bagian ini merupakan hasil dari pengamatan di lapangan, ketika terjadi beberapa aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi di beberapa lokasi. Adapun beberapa bagian pelengkap secara teknis diperoleh dari hasil wawancara dan pembincangan baik secara resmi maupun informal dengan beberapa aparat pelaksana lapangan, maupun dengan pejabat-pejabat tertentu dari lingkungan Polri dan ABRI yang memang berwenang untuk memberikan keterangan sesuai dengan bidangnya. Namun atas permintaan para informan, maka nama, pangkat, jabatan, kesatuan, lokasi tempat informan bertugas tidak dapat disebutkan secara terbuka dan rinci. Namun atas permintaan penulis agar data yang diperoleh dapat dikonfirmasi secara ulang, maka penulis hanya diperbolehkan menuliskan sumber yang didapat hanya dengan 'satuan' tanpa menyebutkan nama, pangkat, dan lokasi tempat ber dinas. Dengan demikian pembahasan dalam bagian ini diperoleh dari hasil pengamatan realita di lapangan serta konfirmasi ulang dan hasil analisis serta penangkapan penulis yang diperoleh dari hasil penafsiran sebuah realita.

<sup>58)</sup> Satuan-satuan tugas yang memberikan informasi, tanpa dapat menyebutkan nama, pangkat, jabatan, lokasi tempat ber dinas, dari pihak Polri didapat dari satuan Binmas, satuan Lantas, satuan Intelpam, satuan Semapta dan satuan Reserse. Sedangkan dari pihak ABRI informasi diperoleh dari satuan Teritorial, satuan Sosial Politik, satuan Intelijen, dan satuan Operasional. Dalam paparan ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan beberapa paparan data yang diperoleh dari beberapa informan yang terpisah-pisah, sehingga untuk melakukan penyusunan secara sistematis lebih banyak dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan penafsiran yang dilakukan dari beberapa sumber informasi.

negara dalam mengamankan kondisi dan situasi dalam negeri yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam negeri. Tugas utamanya ialah melindungi dan melayani masyarakat agar tidak terjadi kekacauan yang merugikan masyarakat atau terjadi kekacauan dan kerusakan yang lebih parah<sup>59)</sup>.

Dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, Polri melakukan tindakan dan perlakuan sebatas mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, demonstrasi, mimbar bebas, aksi turun kejalan dan melakukan pengamanan terhadap gedung DPRD-DPR/MPR serta menjaga agar aksi tersebut berlangsung secara aman, tidak menimbulkan kekacauan, kerusakan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Unsur-unsur satuan Polri yang langsung menangani perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi antara lain: unsur Binmas, unsur Lantas, unsur Semapta, unsur Intelpam dan unsur Reserse<sup>60)</sup>.

Keberadaan unsur Polri sebagai tim inti yang menangani berbagai macam aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, didukung oleh keberadaan tim pendukung yang berasal dari unsur ABRI atau Militer non Polri. tim pendukung yang berunsurkan ABRI secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam unsur

59) Realita menunjukkan bahwa hampir disetiap aksi yang dilakukan oleh aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi keberadaan tim Polri dan tim ABRI senantiasa disiagakan. Walaupun tim Polri diturunkan terlebih dahulu, itu merupakan sebuah bentuk sikap tindakan secara prosedural yang memang mengharuskan tim Polri menangani terlebih dahulu. Bahkan di beberapa lokasi terjadinya aksi yang menyebabkan terjadinya friksi fisik, satuan Dalmas Polri bertindak menggunakan kekerasan untuk melakukan pembubaran massa. Ini terjadi ketika aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi berkembang menjadi aksi massa yang hampir tidak dapat dikendalikan oleh mahasiswa itu sendiri. Saat itu mahasiswa bergerak dari lokasi kampus menuju sebuah tujuan tertentu, namun dijalan aksi massa mencoba bergabung, karena kondisi dan situasi mulai terlihat tak terkendali, para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi segera menyerukan agar 'yang merasa dirinya mahasiswa' segera kembali ke kampus dan tidak melakukan perbuatan pengrusakan. Setelah mahasiswa kembali ke kampus, tinggal massa yang ada, dan massa itulah yang aditubarkan oleh satuan Dalmas Polri.

60) Realita menunjukkan bahwa keterpaduan unsur-unsur pelaksanaan pengamanan di lapangan merupakan kunci utama dalam melakukan penanganan terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi secara preventif. Namun dalam realita yang berbeda, dimana unsur-unsur tersebut terlibat dan melakukan tugas sesuai fungsinya, tetap saja bentrokan dengan mahasiswa tidak dapat dihindarkan. Realita tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sebuah sistem yang sudah tertata dengan baik akan memunculkan hasil yang berbeda apabila muncul variabel-variabel baru yang menyebabkan pengamanan di lapangan menjadi berbeda. Pengamatan juga menunjukkan bahwa tingkat kejenuhan dan ketegangan psikhis baik aparat maupun aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat juga menyebabkan terjadinya friksi fisik yang cukup tajam.

satuan tugas pasukan anti huru-hara (*Satgas Pasukan AHH*), pasukan organik dari Kodam yang bersangkutan dan pasukan non organik yang dapat dimintai bantuan jika keadaan mendesak.

Dalam menangani berbagai macam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, selama tim inti yang berunsurkan Polri masih dapat menangani dan menanggulangi berbagai macam aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, dukungan dari tim pendukung yang berunsurkan ABRI atau Militer non Polri belumlah dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa dalam penanganan awal terhadap berbagai aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, yang berhadapan secara langsung dengan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi adalah Polri. Namun ketika Polri sebagai tim inti mengalami kesulitan untuk mengarahkan dan membendung gerakan mahasiswa pro-reformasi yang sudah berubah menjadi gerakan massa dan Polri membutuhkan bantuan dan dukungan, maka kehadiran tim pendukung dari ABRI amatlah dibutuhkan.

Konsep dasar yang dilakukan dalam menangani berbagai macam aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi ialah dengan menurunkan dahulu tim inti Polri ke lapangan, dan apabila terjadi kekemelutan yang lebih rumit dukungan dari ABRI segera diturunkan. Hal inipun berkaitan dengan status 'Siaga' yang mungkin dikeluarkan oleh Pangdam, sebagai penguasa daerah militer setempat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban diwilayahnya<sup>61)</sup>.

Konsep ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pengamanan kamtibmas dalam negeri, fungsi dan peran Polri beserta

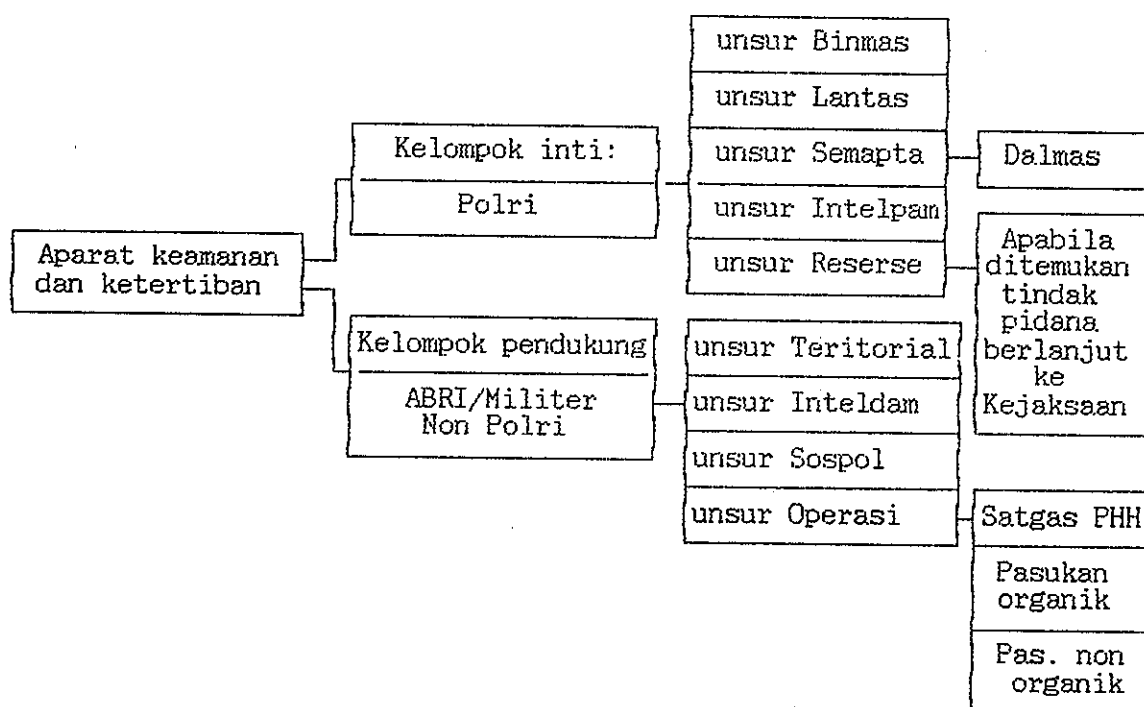
---

<sup>61)</sup> Secara teoritik pembagian peran pengamanan wilayah dan beban tanggungjawab yang harus dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban dalam sebuah aksi massa atau demonstrasi mahasiswa merupakan tanggungjawab tim inti yang berunsurkan kekuatan dari Polri. Namun apabila pengamanan yang dilakukan oleh tim inti Polri kurang dapat memadai dan kurang dapat mengamankan lokasi, maka bantuan kekuatan pengamanan dari tim pendukung ABRI barulah diturunkan.

unsur-unsurnyalah yang harus lebih didahulukan, dan bila belum mencukupi atau belum tertanggulangi, maka bantuan dari tim pendukung ABRI dan unsur Militer non Polri baru diperbantukan, tetapi tetap konsep dasar pengamanan kamtibmas yang utama ada pada Polri<sup>62</sup>).

Untuk lebih memudahkan dalam mengklasifikasikan peran aparat keamanan dan ketertiban serta unsur-unsur yang mendukungnya, secara *taksonomis* keberadaan aparat keamanan dan ketertiban dapat diuraikan dalam bentuk bagan seperti berikut ini:

Bagan 3. Taksonomi aparat keamanan dan ketertiban beserta unsur-unsur pendukungnya dalam menangani berbagai aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi.



Bagan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari aparat keamanan dan ketertiban.

<sup>62</sup>) Namun secara realita bentuk-bentuk prosedur pengamanan Kamtibmas tidaklah harus secara prosedural dengan urutan yang kaku seperti yang telah dikemukakan diatas. Dalam prakteknya prosedur pengamanan Kamtibmas dapat saja dilakukan secara langsung oleh kedua Tim tersebut (Tim Inti dan Tim Pendukung) sekaligus. Keberadaan Tim Inti yang berunsurkan Polri dan Tim Pendukung yang berunsurkan ABRI atau Militer non Polri seringkali diturunkan sekaligus guna melakukan pengamanan Kamtibmas atau mengamankan lokasi tempat berlangsungnya aksi demonstrasi. Pemikiran dan pertimbangan menurunkan kedua Tim tersebut sekaligus biasanya bergantung kepada kondisi dan lokasi yang harus diamankan, melihat jumlah massa yang mengadakan aksi, tuntutan dan rencana aksi, serta kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin saja dapat terjadi.

Dalam aksi demonstrasi yang tidak terlalu menggerakkan banyak massa, dan dilakukan dalam lingkungan tertutup, atau dilakukan dalam lingkungan tertentu tanpa bermaksud melakukan aksi turun ke jalan, keterlibatan ABRI sebagai tim pendukung pengamanan belumlah diperlukan, jadi hanya tim inti Polri-lah yang menangani pengamanan di lapangan. Dalam kondisi yang demikian keberadaan tim pendukung hanya cukup bersiap-siap saja apabila ternyata nanti dibutuhkan bantuannya untuk membantu melakukan pengamanan.

Namun apabila aksi massa berlangsung dalam jumlah massa yang cukup besar, dilakukan dalam lingkungan yang terbuka dan berencana melakukan aksi turun ke jalan, tanpa menunggu adanya permohonan bantuan dari tim inti Polri, keberadaan tim pendukung ABRI segera diberangkatkan untuk membantu dan mendampingi tim inti Polri. Hal ini sengaja dilakukan tetapi bukan berarti pengamanan tersebut telah mengabaikan prosedur yang ada. Pola pengamanan tersebut lebih menitikberatkan kepada pola pengamanan terpadu mengingat jumlah personil Polri sebagai tim inti sudah diperhitungkan akan kurang berimbang dengan massa yang harus diamankan dan dihadapinya, oleh karena itulah sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keberadaan tim pendukung ABRI segera diturunkan untuk mendampingi tim inti Polri dalam melakukan pengamanan secara terpadu.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis mengajukan tiga (3) preposisi tentang tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi. Dua preposisi pertama (*preposisi 1 dan 2*) merupakan bentuk preposisi yang mandiri, sedangkan preposisi yang terakhir (*preposisi 3*) merupakan bentuk preposisi gabungan dari preposisi 1 dan preposisi 2.



Secara *komponensial* dari pemaparan diatas dapat dikemukakan bahwa tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi adalah dalam bentuk preposisi sebagai berikut:

**Preposisi 1:** *Tindakan serta perlakuan Polri dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.*

**Preposisi 2:** *Tindakan serta perlakuan ABRI atau Militer non Polri dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.*

**Preposisi 3:** *Tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi*

Berdasarkan ke-tiga preposisi yang telah dikemukakan diatas, penulis berusaha untuk menguraikan preposisi-preposisi tersebut berdasarkan realita yang ada dan yang diperoleh di lapangan.

#### **1. Tindakan serta perlakuan Polri dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.**

Peran Polri dalam melakukan tugasnya sebagai aparat keamanan dan ketertiban yang bertanggungjawab atas situasi kamtibmas yang terkendali, dalam menghadapi beberapa aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, dilakukan beberapa tindakan pengamanan yang melibatkan beberapa unsur satuan yang berada didalam tubuh Polri itu sendiri.

Dalam melakukan tugasnya sebagai aparat kamtibmas yang berfungsi memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (*to protect and serve*), sudah menjadi tugas dan kewajiban Polri untuk melakukan pengamanan utama, atau sebagai alat negara yang pertama kali

ditugaskan untuk melakukan pengamanan terhadap masyarakat di dalam negeri<sup>63)</sup>.

Tindakan serta perlakuan Polri sebagai aparat kamtibmas dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melibatkan beberapa unsur satuan yang ada didalam Polri itu sendiri. Keterlibatan beberapa satuan yang memiliki tugas serta fungsi yang berbeda ini merupakan pola penanganan secara profesional menurut tugas dan kewajibannya serta spesifikasi keahliannya agar penanganan pengamanan terhadap berbagai aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat terselenggara secara baik, damai dan tidak menimbulkan kekacauan apalagi menimbulkan kerusuhan yang berbuntut dengan penjarahan.

Unsur-unsur satuan yang dilibatkan dalam melakukan pengamanan atas berbagai aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi ialah: unsur pembinaan masyarakat (*Binmas*), unsur lalu lintas (*Lantas*), unsur semapta, unsur intelijen dan pengamanan (*Intelpam*), dan unsur reserse.

Peran Polri yang melaksanakan unsur pembinaan masyarakat (*Binmas*) bertujuan memberikan tindakan-tindakan preventif atau pencegahan kepada masyarakat, khususnya kepada para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dengan melakukan berbagai macam pendekatan secara manusiawi untuk melakukan pengamanan intern terlebih dahulu. Peran *Binmas* lebih ditonjolkan kepada pola-pola pendekatan yang berusaha agar dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan, saran-saran kepada para aktivis gerakan

---

<sup>63)</sup> Polri merupakan ujung tombak yang utama dalam berhadapan dengan masyarakat ketika terjadi permasalahan-permasalahan sosial yang melibatkan konflik dan friksi antara person dan negara. Polri merupakan sarana Kamtibmas yang pertama dalam menangani dan menanggulangi permasalahan sosial dimasyarakat sebelum melibatkan beberapa aparat Kamtibmas lainnya yang berasal dari ABRI atau Militer non Polri.

mahasiswa pro-reformasi dalam melakukan aksinya. Peran Binmas ini cenderung merupakan upaya-upaya preventif manusiawi yang dilakukan secara bijaksana agar tidak terjadi konflik atau friksi antara aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dengan satuan-satuan Polri yang bergerak sebagai satuan '*Dalmas (pengendalian massa)*' serta memberikan arahan-arahan yang sekiranya dapat disetujui atau disepakati bersama<sup>64</sup>).

Peran Polri yang melaksanakan unsur lalu lintas (*Lantas*) merupakan peran yang bertujuan memberikan arahan jalur yang sebaiknya akan dilalui apabila para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi berniat melakukan gerakan aksi turun kejalan atau berkehendak melakukan '*long march*' menuju gedung DPRD-DPR/MPR. Selain hal tersebut peran Lantas juga berusaha mengamankan jalur-jalur lalu lintas lainnya dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya kemacetan arus lalu lintas yang mungkin saja terjadi akibat adanya arus gerakan mahasiswa pro-reformasi yang turun kejalan. Dan bila perlu unsur Lantas tersebut melakukan pengawalan agar perjalanan atau '*long march*' yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut dapat segera sampai ketujuan atau diberikan '*prioritas jalan*'. Bahkan bila perlu disediakan kendaraan, atau diangkut oleh kendaraan yang disediakan oleh Polri atau mengawal kendaraan pengangkut para Akti-

---

<sup>64</sup>) Dalam realitannya peran Binmas selain melakukan negosiasi dengan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, juga menjadi ujung tombak Polri dalam melakukan upaya pendekatan secara terbuka. Peran Binmas memang membutuhkan tingkat kesabaran yang cukup dan penguasaan emosional yang tinggi pula, sebab dalam kondisi yang dihadapkan dalam suatu yang konfrontatif, tidak menutup kemungkinan apabila terjadi salah langkah dalam melakukan pendekatan dapat mengakibatkan friksi fisik yang berkepanjangan. Di beberapa lokasi terjadinya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi menunjukkan adanya konsep reformasi secara damai, sehingga proses negosiasi untuk melakukan aksi secara damai-pun tidak mengalami kesulitan, namun dalam realita yang berbeda pula, sifat apriori para aktivis gerakan mahasiswa terhadap para aparat keamanan dan ketertiban telah menyebabkan proses negosiasi tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan. Dalam proses negosiasi yang mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak ialah, aksi berlangsung secara damai dan mencapai tujuan, pihak aparat-pun hanya bersikap mengamankan tanpa harus menggunakan tindakan kekerasan.

vis gerakan mahasiswa pro-reformasi menuju tujuan yang dikehendakinya<sup>65)</sup>.

Peran Polri yang melaksanakan unsur Semapta merupakan peran yang bertujuan untuk melakukan pengamanan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dan Masyarakat agar tidak terjadi bentrokan massa, kebrutalan massa, serta melakukan penjagaan secara fisik terhadap instansi-instansi vital yang diperkirakan dapat menjadi sasaran kemarahan atau kebrutalan massa. Peran Semapta lebih dititikberatkan kepada pola penanganan pengamanan secara fisik yaitu melalui unit-unit Dalmasnya yang diperlengkapi dengan tameng, rompi, helm, pentungan karet atau rotan dan beberapa pucuk senapan yang berisikan peluru hampa dan peluru karet. Unsur Semapta merupakan unsur yang paling depan jika terjadi bentrokan massa, oleh karena itulah unsur Semapta inipun diperlengkapi dengan topeng dan gas-gas airmata dengan tujuan agar dapat melakukan pembubaran massa secara aman dan meminimalisasi adanya korban<sup>66)</sup>.

---

65) Dalam realitanya peran unsur Lantas amatlah vital dalam mengamankan jalur route aksi, namun dalam beberapa aksi mahasiswa yang sudah banyak bersikap apriori terhadap Polri, maka satuan Polri ini-lah yang lebih banyak 'dibicarakan' keberadaan. Satuan Lantas oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dianggap sebagai satuan Polri yang banyak sekali melakukan hal-hal yang menyimpang terutama dalam hal 'ke-lalu-lintasan'. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam unsur satuan inilah penyimpangan demi penyimpangan banyak ditemui. Mulai dari pembuatan SIM, perihal penilangan, 'lemparan korek api', sampai dengan 'hal-hal yang dicari-cari kesalahannya'. Terlepas dari sikap apriori para aktivis gerakan mahasiswa pro-Reformasi tersebut, dalam melakukan penanganan terhadap berbagai aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi realitanya menunjukkan bahwa Unsur Lantas ini paling banyak berperan melakukan pengamanan lalu lintas, mengusahakan kendaraan untuk mengangkut para aktivis ke tempat tujuan, dan memprioritaskan jalur lalu lintas untuk digunakan oleh massa.

66) Dalam realitanya unsur Semapta merupakan satuan Polri yang bertugas paling depan dalam melakukan pengamanan secara fisik terhadap aksi yang dilakukan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi. Ketegangan psikhis dan panasnya situasi seringkali menyebabkan timbulnya ketegangan situasi yang terjadi diantara kedua belah pihak yang saling berhadapan. Di satu sisi tidak jarang mahasiswa berusaha memaksakan kehendaknya untuk melakukan aksi yang melebihi batas-batas yang disepakati atau diperbolehkan, disisi lain Aparat Semapta-pun berupaya untuk menahan agar aksi tersebut tidak mengalami perluasan secara kuantitas. Dalam beberapa realita yang berbeda, unsur Semapta (tentunya dengan segala keterbatasan manusiawi yang dimilikinya) terlihat harus menerima perlakuan yang tidak pantas dari para peserta aksi, sehingga terjadi beberapa ketegangan emosi yang hampir menjurus kepada kerusuhan massa. Namun demikian ketabahan unsur semapta dalam menghadapi aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, dan dengan berbagai 'cercaan' yang ditujukan kepadanya, unsur semapta merupakan bagian satuan Polri yang paling memiliki risiko fisik paling tinggi. Risiko tersebut merupakan bagian dari beban dan tanggungjawabnya dalam melakukan pengamanan secara fisik.

Peran Polri yang melaksanakan unsur intelijen dan pengamanan (*Intelpam*) merupakan peran yang bertujuan untuk melakukan pengamanan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi secara tersembunyi dan dilakukan dari dalam. Peran ini dilakukan untuk melihat apakah ada perilaku para aktivis gerakan mahasiswa tersebut yang sudah mengarah kepada perilaku yang destruktif, melanggar hukum atau menciptakan adanya situasi yang deintegrasi. Peran pendekatan yang dilakukan oleh Unsur intelijen dan pengamanan lebih mendekatkan kepada unsur pengamanan di bidang sosial dan politik. Peran ini juga berupaya mencermati perilaku-perilaku para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi apabila disinyalir adanya penyusupan-penyusupan ideologi, atau paham-paham dari pihak ketiga yang berupaya memanfaatkan gerakan mahasiswa pro-reformasi untuk kepentingan pihak ketiga tersebut<sup>67)</sup>.

Peran Polri yang melaksanakan unsur reserse merupakan peran yang bertujuan untuk melakukan upaya penegakan hukum apabila dari berbagai aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut sampai ada yang melanggar hukum, unsur reserse inilah yang menangannya. Peran ini tidak dapat dilepaskan keberadaan dari peran-peran Polri yang lainnya (*peran Binmas, Lantas, Semapta dan Intelpam*). Peran Polri dalam penegakan hukum dilakukan oleh unsur reserse. Perbuatan-perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang diang-

---

<sup>67)</sup> Dalam realitanya peran nsur Intelijen dan Pengamanan memiliki risiko penyusupan yang cukup tinggi. Ia tidak hanya melakukan pengamanan secara internal, tetapi juga mencoba melakukan penelahaan 'isme-isme' yang berkembang dikalangan para aktivis gerakan pro-reformasi. Dari beberapa pengalaman di lapangan, para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, kelihatannya sudah 'hafal' akan ciri-ciri dan perilaku dari unsur satuan Polri yang berasal dari *Intelpam*, walaupun kadangkala, para aktivis gerakan mahasiswa itu sendiri seringkali mempersamakan antara 'intel' dan 'reserse'. Konstruksi yang berkembang dikalangan mahasiswa ialah mempersamakan 'intel dan reserse', pada intinya mereka menilai bahwa 'intel atau reserse' adalah orang-orang dari aparat keamanan dan ketertiban yang 'disusupkan' secara tersembunyi untuk mengawasi kegiatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

gap melanggar hukum ditangani oleh unsur reserse, sehingga unsur reserse dianggap sebagai unsur penegakan hukum secara represif<sup>68)</sup>.

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan pemahaman terhadap peran Polri beserta unsur-unsurnya yang melakukan tindakan dan perlakuan pengamanan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, secara *komponensial* tindakan dan perlakuan Polri dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

---

<sup>68)</sup> Peran unsur Reserse dalam melakukan penegakan hukum merupakan sarana represif yang menggunakan hukum pidana, sehingga dalam realitanya satuan inilah yang banyak melakukan pemrosesan secara hukum terhadap peserta aksi massa yang disinyalir berkehendak melakukan kekacauan atau kebrutalan massa. Unsur Reserse merupakan sebuah jajaran 'crime squad' yang melakukan tugas penegakan hukum berdasarkan aturan yang ada dan perkembangan situasi. Dalam situasi tertentu yang lebih mengutamakan kepentingan lainnya, maka dimungkinkan terjadinya 'diskresi' yaitu pengesampingan perkara demi kepentingan umum dapat saja dilakukan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa unit reserse dengan 'seragam hitam dan baret merahnya' juga melakukan pola pengamanan preventif bersama-sama dengan unsur semapta yang dikendalikan dari Puskodalops (Pusat Pengendalian Operasional). Unsur Semapta sendiri biasanya berasal dari satuan Erimob (Brigade Mobil). Pengendalian massa yang dilakukan secara preventif tidak hanya terjadi disekitar pola pengamanan aksi saja tetapi juga merupakan bagian dari pola pengamanan terhadap instansi-instansi vital yang memang harus diamankan.

Tabel 10. Tindakan serta perlakuan Polri dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Unsur-unsur pengamanan dalam Polri	Tindakan serta perlakuan Polri dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan Mahasiswa pro-reformasi.
Unsur pembinaan masyarakat (Binmas)	Melakukan tindakan preventif dengan mencari kesepakatan jalannya aksi gerakan mahasiswa
	Melakukan pendekatan secara manusiawi guna pengamanan intern agar tidak terjadi konflik atau friksi fisik antara mahasiswa dengan satuan Polri dari ' <i>pengendalian massa</i> '
Unsur lalu lintas (Lantas)	Mengarahkan dan mengamankan jalur lalu lintas yang hendak dilalui oleh aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi jika hendak melakukan aksi turun ke jalan atau long march menuju gedung DPRD-DPR/MPR.
	Mengamankan jalur-jalur lalu lintas dari kemungkinan adanya kemacetan lalu lintas akibat adanya arus demonstrasi.
	Melakukan pengawalan lalu lintas bagi para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, bahkan bila perlu menyediakan kendaraan dan pengawalan Lantas untuk ' <i>prioritas jalan</i> '.
Unsur Semapta	Melakukan pengamanan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dan masyarakat agar tidak terjadi bentrokan massa.
	Melakukan pengamanan dan penjagaan secara fisik instansi-instansi vital yang diperkirakan dapat menjadi sasaran kemarahan atau kebrutalan massa.
	Menjadi unsur terdepan dalam melakukan pengamanan secara fisik jika terjadi bentrokan massa.
Unsur intelijen dan pengamanan (Intelpam)	Melakukan pengamanan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi secara tersembunyi dan dilakukan dari dalam.
	Mencari informasi perbuatan para aktivis Gerakan mahasiswa pro-reformasi agar dapat dilakukan tindakan pencegahan dari tindakan yg destruktif, melanggar hukum dan deintegrasi.
	Melakukan pengamanan secara sosial politik apabila ada perkiraan penyusupan ideologi atau pihak ketiga yang mencoba mencari keuntungan bagi pihak ketiga itu sendiri.
Unsur reserse	Melakukan upaya penegakan hukum apabila diperkirakan ada perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana). Dalam bekerjanya tidak dapat dilepaskan dari unsur Polri lainnya

Tabel disusun berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari Polri.

## 2. Tindakan serta perlakuan ABRI atau Militer non Polri dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Secara umum tugas satuan-satuan ABRI atau Militer non Polri dalam menangani berbagai macam aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi hanya sebatas sebagai unsur pendukung atau bantuan apabila dibutuhkan oleh Polri sebagai tim inti. Proses pengamanan yang dilakukan oleh satuan-satuan ABRI atau Militer non Polri dilakukan apabila kondisi lapangan membutuhkan dukungan personil yang lebih banyak. Dukungan personil yang lebih banyak biasanya dilakukan apabila kondisi lapangan menunjukkan bahwa, areal wilayah yang harus diamankan cukup luas, didalam arel wilayah tersebut terdapat cukup banyak instansi-instansi publik atau suasta yang harus dijaga keamanannya dari ancaman yang mungkin terjadi, atau apabila jumlah massa yang melakukan aksi memerlukan imbalan personil yang cukup sepadan<sup>69)</sup>.

Pengamanan wilayah yang dilakukan oleh ABRI atau Militer non Polri sebagai sebuah unsur pendukung, bukan berarti bahwa ABRI atau Militer non Polri tersebut hanya bersikap pasif atau menunggu apabila ada permintaan bantuan untuk mengamankan sebuah wilayah atau areal tertentu. Tetapi konsep pengamanan yang dilakukan oleh ABRI atau Militer non Polri adalah pengamanan yang bersifat pro-aktif, yaitu melakukan tindakan pengamanan dengan

<sup>69)</sup> Keberadaan ABRI sebagai satuan pendukung dalam melakukan pengamanan wilayah tidak dapat dilepaskan dari perannya untuk membantu tugas Polri sebagai Tim Inti. dalam beberapa aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang sempat terjadi di beberapa wilayah, ABRI mengemukakan bahwa porsi pengamanan dan penertiban lebih banyak dilakukan oleh unsur Polri, karena memang itulah fungsi dan tugas Polri yang sebenarnya, walaupun ada keterlibatan Unsur ABRI maka itu hanya sekedar bentuk bantuan atau satuan pendukung yang berupaya mengamankan lokasi dari aksi kerusuhan massa yang hampir menimbulkan kebrutalan dan penjarahan oleh massa. Konteks keterlibatan ABRI selama tidak dibutuhkan oleh Polri dalam menangani aksi massa hanyalah secara insidental, dan bukan merupakan tugas serta kewajiban pokok, tetapi apabila dibutuhkan ABRI senantiasa bersedia membantu melakukan pengamanan dan penertiban sebuah wilayah.



berdasarkan perkiraan keadaan (*kirka*) yang diperoleh dari hasil analisis teritorial<sup>70)</sup>.

Peran ABRI atau Militer non Polri walaupun telah dinyatakan sebagai unsur pendukung, tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya sebagai Bhayangkara Negara apabila terjadi sebuah kamelut atau kekacauan yang memerlukan bantuannya. Proses pengamanannya dapat saja dilakukan dengan berkoordinasi dengan satuan Polri yang ada, maupun dengan inisiatif sendiri berdasarkan perkiraan keadaan untuk segera melakukan tindakan pengamanan.

Dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang membutuhkan kecepatan bergerak serta mengambil keputusan dengan segera untuk melakukan pengamanan, maka pengamanan sebuah wilayah dapat segera dilakukan oleh personil ABRI atau Militer non Polri. Namun apabila kondisi tersebut sudah dapat tertangani dan dapat dikuasai serta dikendalikan keamanan wilayahnya, satuan-satuan ABRI segera ditarik kembali dan penjagaan pengamanan wilayah tersebut diserahkan kembali kepada satuan-satuan Polri<sup>71)</sup>.

Perkiraan keadaan dan keamanan yang dilakukan oleh ABRI atau Militer non Polri untuk melakukan pengamanan di suatu wilayah, biasanya ditangani oleh unsur teritorial, unsur sosial politik, unsur intelijen dan unsur opera

---

70) Dalam sebuah wilayah daerah yang memerlukan pengamanan teritorial, maka keberadaan ABRI dianggap cukup bertanggungjawab secara penuh disamping peran Polri itu sendiri. Secara teoritik peran pengamanan dalam negeri dan dilakukan pada masa damai merupakan tugas dan kewajiban Polri. Dalam melakukan pengamanan tersebut, maka peran Polri-lah yang harus mengedepankan dan melaksanakan fungsinya sebagai sarana Kamtibmas, akan tetapi proses pelaksanaan pengamanannya tidak akan terlepas dari peran ABRI atau Militer non Polri itu sendiri.

71) Fungsi ABRI atau satuan Militer non Polri lebih banyak berfungsi sebagai satuan-satuan pemukul sesuai dengan doktrinnya. Akan tetapi dalam menangani aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi fungsinya sebagai satuan pemukul tidak begitu ditonjolkan. Satuan-satuan ABRI tersebut lebih banyak mengedepankan fungsi penjagaan, pengawalan dan pengamanan yang bersifat pasif. Satuan-satuan ABRI yang biasa digunakan untuk menjadi satuan pemukul antara lain Satuan Pasukan Anti Huru-Hara, pasukan organik Kodam, yaitu pasukan-pasukan tempur yang khusus berada dibawah kendali operasional Kodam yang bersangkutan, serta pasukan-pasukan non organik, yaitu pasukan yang tidak secara langsung berada dibawah pengendalian kodam, akan tetapi secara kewilayahan ada di lingkungan wilayah Kodam yang bersangkutan.

sional. Masing-masing unsur tersebut melakukan kajian dan perkiraan untuk melakukan pengamanan berdasarkan bidangnya masing-masing.

Peran unsur teritorial ABRI dalam melakukan pengamanan terhadap berbagai aksi para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang terjadi di wilayahnya yaitu dengan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang 'rawan' dalam kewilayahan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari unsur sosial politik, intelijen dan operasional. Peran teritorial lebih banyak menggunakan pendekatan kemasyarakatan, yaitu melalui bentuk-bentuk pendekatan dan pembinaan non militer, misalnya saja dengan melakukan upaya-upaya nyata yang memperkecil kemungkinan timbulnya pemicu kerusuhan dan kesenjangan sosial<sup>72)</sup>.

Peran unsur sosial politik ABRI dalam melakukan pengamanan terhadap berbagai aksi para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi di wilayahnya yaitu dengan melakukan berbagai macam pendekatan kepada para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh akademis (bila perlu mengadakan dialog dengan para mahasiswanya) serta melakukan berbagai kajian sosial politik yang menjadi tanggungjawabnya. Kajian sosial politik ABRI dalam menghadapi berbagai aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-

---

<sup>72)</sup> Upaya nyata yang biasa dilakukan oleh unsur teritorial ialah pembinaan wilayah melalui program ABRI Masuk Desa, Bhakti Sosial (donor darah, operasi bibir sumbing, operasi pembagian sembako, dll), Menyiapkan lokasi-lokasi tertentu bagi program kemandirian ABRI dan Rakyat, serta melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu di wilayahnya. Peran Sosial Politik juga tidak mengesampingkan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang secara formal maupun informal diakui keberadaan 'ketokohnya' di mata masyarakat. Sehingga dengan melakukan pendekatan tersebut beberapa himbauan yang memang dilakukan untuk menenangkan massa dapat segera tersampaikan tanpa harus terkesan adanya penaksaan. Konsep pendekatan yang dilakukan dalam sebuah Lembaga Teritorial ABRI (Kodam) tidak lain merupakan konsep pendekatan bahwa ABRI adalah milik masyarakat juga, kalau pun dalam kesehariannya terkesan 'agak sedikit arogan' hal tersebut memang sebuah kekurangan yang harus segera dibenahi. Konsep pendekatan Kodam III Siliwangi yang dilakukan secara memasyarakat ialah dengan menciptakan dan menumbuhkan sebuah kebersamaan dan kedekatan melalui konsep Siliwangi yang berasal dari Rakyat dan Rakyat itulah cikal bakal Siliwangi. melalui konsep ini diharapkan rasa memiliki dan kebersamaan akan tumbuh dan menjalin ikatan kebersamaan sebagai sebuah keluarga besar Siliwangi.

reformasi lebih menekankan kepada kajian pertahanan, keamanan dan ketertiban<sup>73)</sup>.

Peran unsur intelijen ABRI dalam melakukan pengamanan berbagai aksi para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi di wilayahnya yaitu dengan melakukan pendekatan secara terselubung untuk mengetahui pola gerakan, latar belakang terjadinya aksi dan tokoh-tokoh yang berperan belakangnya atau didalamnya guna melakukan pengamanan secara menyeluruh. Unsur intelijenpun berperan dalam melakukan analisis terhadap potensi-potensi sosial yang dapat menjadi unsur-unsur kerawanan sosial sebagai bahan informasi bagi operasional, teritorial dan sosial politik<sup>74)</sup>.

Peran unsur operasional ABRI dalam melakukan pengamanan berbagai aksi para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi di wilayahnya yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan pengamanan secara fisik yaitu dalam bentuk menurunkan sejumlah personil ABRI sebagai pasukan pengamanan atau menjadi pasukan anti huru-hara dengan memperhatikan dan mempertimbangkan informasi dari unsur Inteli-

---

73) Kajian Sosial Politik mengupayakan untuk melihat unsur-unsur apakah yang lebih dominan sehingga menimbulkan aksi-aksi tersebut atau terhadap unsur-unsur yang menimbulkan kerawanan sosial berdasarkan informasi dari Intelijen, Teritorial, dan Operasional. Kajian Sosial Politik melihat bahwa aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi merupakan sebuah aksi yang timbul sebagai reaksi dari adanya 'kemacetan-kemacetan sistem sosial politik' dalam sarana penyampaian pendapat, penyampaian aspirasi dan terjadi karena banyaknya perilaku yang menyimpang di pemerintahan. Dengan demikian penanganan yang dilakukan oleh Unsur Sosial Politik ini lebih merupakan upaya preventif secara konseptual dengan menguraikan unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerawanan sosial, serta memberikan saran untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang memperkecil kerawanan sosial tersebut. Aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi dalam kacamata kajian Sosial Politik ABRI lebih merupakan sebuah cetusan rasa ketidakpuasan akan bekerjanya pemerintahan yang dianggap sudah terlalu banyak kekuarangan dan penyimpangan, sehingga untuk melakukan tindakan preventif, peran Sosial Politik lebih banyak mengupayakan adanya konsep berdialog dengan memberikan kesempatan kepada para aktivis tersebut untuk melakukan berbagai macam kritik dan saran secara vokal dan terbuka.

74) Dalam realitanya peran unsur Intelijen ABRI dalam menangani aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi tidaklah semenonjol peran unsur Intelijen dan Pengamanan yang dilakukan dari unsur Polri. Penanganan Intelijen ABRI hanyalah bersifat koordinatif dan menangani secara keseluruhan bersama-sama dengan peran Intelijen yang ada di Kantor Sospol, Kejaksaan dan Polri. Namun ketika ditelusuri lebih jauh, peran Intelijen ABRI yang ada di suatu wilayah mampu menyebutkan lokasi-lokasi yang 'rawan', mampu menyebutkan jumlah 'perguruan tinggi yang ada di wilayahnya' serta perguruan-perguruan tinggi tertentu yang memiliki sikap 'radikal'. Ketika ditanyakan tentang apakah peran Intelijen ABRI-pun menangani 'isme-isme' yang sedang berkembang di masing-masing perguruan tinggi, Intelijen ABRI mengungkapkan mereka mengetahui 'isme' yang ada dan berkembang namun hanya sekedar pemantauan, mengetahui jaringannya, berinduk kemana, serta mengetahui peran tokoh-tokohnya yang ada di daerahnya.

jen, teritorial dan sosial politik. Penangananan awal penggunaan pasukan sebagai sarana untuk menjaga keamanan atau menjaga lokasi-lokasi tertentu yang vital, atau menjadi bagian dari personil pendukung Polri merupakan sebuah fungsi preventif yang dilakukan tanpa unsur kekerasan fisik. Pasukan hanya bersifat pasif, melakukan pengamanan dan penjagaan secara intensif. Namun apabila kondisi sudah mulai memanas dan memuncak menjadi kerusuhan, penggunaan pasukan sebagai sarana pemukul untuk memadamkan aksi kerusuhan massa dapat digunakan, tetapi itu semua bergantung pada perkembangan kondisi atau situasi. Penggunaan kekuatan pasukan sebagai sarana pemukul merupakan sebuah tindakan dalam fungsi pasukan yang represif<sup>75)</sup>.

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan pemahaman terhadap peran ABRI beserta unsur-unsurnya yang melakukan tindakan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, secara *komponensial* tindakan dan perlakuan ABRI dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

---

75) Secara faktual pengendalian keamanan dan ketertiban dilapangan merupakan bentuk tugas dan tanggungjawab dari unsur Operasional, sebab dalam unsur operasional inilah terdapat berbagai macam satuan tempur dan non tempur yang dapat digunakan untuk menjadi satuan bantuan untuk mengendalikan massa dan mengamankan masyarakat. Satuan-satuan tersebut dapat berupa satuan Pasukan Anti Huru-Hara, Satuan Pasukan Organik, yaitu pasukan yang berada langsung dibawah kendali operasional kodam yang bersangkutan, maupun pasukan non organik yaitu pasukan yang tidak berada di bawah kendali langsung kodam namun secara kewilayahan dapat dimintakan bantuannya untuk ikut serta sebagai pasukan pengamanan. Konsep operasional yang digunakan dalam mengamankan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi ialah memperlakukan massa mahasiswa itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai masyarakat sendiri yang harus diberikan pengamanan dalam menyalurkan aspirasi mereka, sehingga konsep apapun yang diterapkan didalamnya berintikan bahwa penggunaan kekuatan represif harus sekecil mungkin dihindarkan.

Tabel 11. Tindakan serta perlakuan ABRI dalam Menghadapi Perbuatan Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Unsur-unsur pengamanan dalam ABRI/Mil.non.Pol.	Tindakan serta perlakuan ABRI atau Militer non Polri dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.
Unsur teritorial	Pengawasan secara menyeluruh terhadap lokasi yang 'rawan' berdasarkan informasi dari sos-pol, intelijen dan operasional.
	Melakukan pendekatan kemasyarakatan ( <i>Pendekatan non militer</i> ) dan melakukan upaya nyata yang memperkecil unsur-unsur timbulnya pemicu kerusuhan atau kesenjangan di wilayahnya.
Unsur sosial politik	Pengawasan secara menyeluruh terhadap unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kerawanan sosial berdasarkan informasi dari intelijen teritorial dan operasional.
	Melakukan penanganan preventif secara konseptual dengan menguraikan unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan memberikan saran untuk melakukan tindakan tertentu yang memperkecil kerawanan sosial.
Unsur intelijen	Melakukan pendekatan secara terselubung untuk mengetahui pola gerakan, latar belakang terjadinya aksi dan tokoh-tokoh yang berperan di belakangnya atau didalamnya.
	Melakukan analisis terhadap potensi-potensi sosial yang dapat menjadi unsur kerawanan sosial sebagai bahan informasi bagi operasional, teritorial dan sosial politik.
Unsur operasional	Melakukan tindakan pengamanan secara fisik dalam bentuk menurunkan sejumlah personil ABRI atau pasukan anti huru-hara, dengan informasi dari unsur intelijen, teritorial, dan sosial politik.
	Melakukan fungsi preventif, yaitu hanya dengan melakukan pengamanan dan penjagaan lokasi atau instansi vital atau menjadi bagian tim pendukung bagi Polri tanpa melakukan tindakan kekerasan fisik.
	Melakukan fungsi represif, yaitu menjadi bagian dari pasukan pemukul untuk memadamkan aksi yang sudah menjadi kerusuhan massa. Namun fungsi ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang tengah berlangsung.

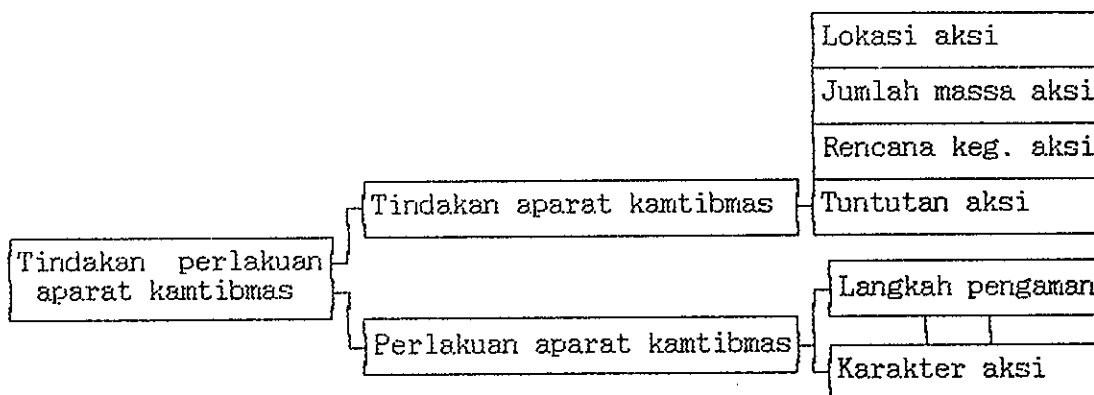
Tabel disusun berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh dari ABRI.

### 3. Tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam melakukan pengamanan terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi

Seperti yang telah dikemukakan didalam uraian-uraian sebelumnya, pola tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam melakukan pengamanan secara umum dapat dilakukan oleh Polri secara mandiri, tetapi pola pengamanan ini juga tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dan dukungan dari personil ABRI atau Militer non Polri untuk melakukan bantuan pengamanan.

Dalam bahasan ini penulis mencoba untuk membedakan antara bentuk dan pengertian '*tindakan*' yang diambil oleh aparat keamanan dan ketertiban dengan bentuk dan pengertian '*perlakuan*' yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban dalam mengamankan dan mengatasi terjadinya sebuah aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Bagan 4. Pembedaan antara tindakan dengan perlakuan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban



Bagan disusun berdasarkan hasil penelitian.

Pengkajian terhadap bentuk '*tindakan*' yang diambil oleh aparat keamanan dan ketertiban lebih dititik beratkan kepada bentuk pola kebijakan yang diambil untuk melakukan pengamanan, sedangkan pengkajian terhadap

bentuk '*perlakuan*' yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban lebih ditonjolkan pada perbuatan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban secara detil dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda.

Pola tindakan penanganan pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, didasarkan kepada empat unsur yang harus dipertimbangkan. Keempat unsur tersebut ialah: (1). lokasi terjadi aksi, (2). jumlah massa yang mengikuti aksi, (3) rencana kegiatan aksi, (4). tuntutan yang dilontarkan melalui aksi tersebut<sup>76)</sup>.

Pertimbangan pola tindakan pengamanan yang mendasarkan kepada '*lokasi terjadinya aksi*' dapat ditafsirkan sebagai sebuah tindakan pengamanan yang dilakukan untuk melihat sebatas lokasi mana aksi tersebut dilakukan. Apakah hanya dilakukan dalam lingkungan kampus, dilakukan dalam lingkungan yang tertutup, dilakukan dalam lingkungan yang terbuka, ataukah dilakukan diluar lingkungan kampus dan terbuka (misalnya didepan gedung DPRD-DPR/MPR atau dalam lokasi-lokasi umum yang dapat mengundang banyak massa)<sup>77)</sup>.

---

76) Pengemukakan keempat unsur yang harus dipertimbangkan tersebut, secara implisit memang tidak pernah diucapkan atau dilontarkan dalam berbagai perbincangan dengan teterapa informan, tetapi keempat unsur tersebut merupakan hasil penafsiran penulis berdasarkan realita yang ada di lapangan. Realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa penanganan aksi-aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi secara umum memang sama, hanya saja memiliki berbagai macam perkecualian. Perkecualian tersebut menurut penulis berdasarkan hasil penafsiran realita yang ada di lapangan, menunjukkan bahwa pengamanan tersebut mempertimbangkan keempat unsur yang dikemukakan oleh penulis, sebab apabila unsur-unsur tersebut berbeda variabelnya, maka penanganannya-pun akan berbeda, bergantung variabel mana yang muncul di lapangan atau unsur mana yang lebih dominan di lapangan. Penafsiran keempat unsur tersebut merupakan hasil kristalisasi realita yang ada di lapangan, bahwa dengan unsur dengan variabel yang berbeda penanganannya-pun akan berbeda pula.

77) Lokasi terjadinya aksi dapat menentukan jenis perlakuan yang berbeda, misalnya saja apabila aksi dilakukan disekitar lokasi kampus, maka pengamanannya ialah dengan memblokir kampus tersebut agar massa mahasiswa tidak keluar kampus, melokalisasi kegiatan hanya terjadi disekitar kampus disertai dengan pengawalan yang tidak terlalu ketat karena dilakukan di kampusnya sendiri. Tetapi jika aksi tersebut dilakukan di tempat umum yang banyak ditemui fasilitas umum, dan instansi-instansi vital, maka pola pengamanannya-pun akan memperhitungkan lokasi tersebut guna melakukan pengamanan terhadap berbagai fasilitas sosial dan instansi vital. Perlakuan aksi yang dilakukan di gedung DPR MPR pun akan berbeda, sebab dalam lingkungan gedung tersebut walaupun dijaga dengan ketat guna melakukan pengamanan terhadap fasilitas yang ada, kebebasan berbicara tetap diperbolehkan selama tidak melanggar aturan hukum yang ada.

Pertimbangan pola tindakan pengamanan yang mendasarkan kepada '*jumlah massa yang mengikuti aksi*' dapat ditafsirkan sebagai sebuah tindakan pengamanan yang melihat bentuk, dan karakteristik serta jumlah peserta yang mengikuti atau bergabung dalam aksi. Dalam unsur kedua ini bentuk dan karakteristik peserta aksi dapat ditafsirkan dengan homogenitas peserta aksi atau heterogenitas peserta aksi (misalnya, apakah peserta aksi tersebut mahasiswa semua atau, apakah pesertanya sudah bercampur dengan massa non mahasiswa). Sedangkan jumlah massa yang mengikutinya dapat dilihat dengan jumlah secara kuantitas banyak atau sedikitnya peserta aksi<sup>78)</sup>.

Pertimbangan pola tindakan pengamanan yang mendasarkan kepada '*rencana kegiatan aksi*' dapat ditafsirkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang diselenggarakan dalam aksi tersebut. Apakah hanya mengadakan mimbar bebas saja, mengadakan aksi unjuk rasa tanpa keluar dari kampus, ataukah mengadakan aksi unjuk rasa yang dilanjutkan dengan mengadakan aksi pawai atau '*long march*' menuju tempat-tempat tertentu<sup>79)</sup>.

---

78) Pertimbangan '*jumlah massa yang mengikuti aksi*' merupakan sebuah klarifikasi kekuatan massa, baik dari segi jumlah, homogenitas atau heterogenitas, maupun unsur-unsur anggota massa yang ada didalamnya. Penafsiran terhadap sebuah realita yang dilakukan oleh penulis dalam berbagai aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi menunjukkan bahwa semakin sedikit massa yang mengikuti maka penanganan keamanannya pun tidak akan terlalu formal dan represif, tetapi bila massa yang mengikutinya semakin banyak maka satuan pengamanannya pun harus segera ditambah atau diperbaharui agar dapat melakukan pengendalian massa secara aman dan tertib. Massa yang homogen akan lebih mudah diatur dan diarahkan kehendaknya dan lebih mudah mencari beberapa kesepakatan untuk melaksanakan aksi tetapi massa yang heterogen maka penanganannya pun akan semakin sulit dan semakin ketat, sebab dari ke-heterogenitasan tersebut akan sulit mencari titik temu, sulit dalam mempersatukan fisi untuk memulai sebuah aksi secara damai dan tertib. Penafsiran penulis atas realitas tersebut dilakukan setelah melihat dan mengalami beberapa aksi yang berbeda dengan berbagai penanganan yang berbeda pula.

79) Pertimbangan '*rencana kegiatan aksi*' merupakan sebuah bentuk pemantauan terhadap perkembangan aksi yang mungkin saja terjadi, misalnya saja apabila dilapangan aksi tersebut berkembang menjadi aksi yang turun kejalan atau mengadakan '*long march*' maka bentuk penanganannya pun akan berbeda. Bentuk aksi massa yang turun kejalan akan membutuhkan satuan tugas yang lebih besar, baik untuk mengawakan peserta aksi maupun melakukan pengamanan instansi-instansi tertentu. Perjalanan yang dilakukan dapat saja berubah sewaktu-waktu menjadi sebuah kerusuhan massa apabila di perjalanan terjadi sebuah friksi yang memicu pertentangan antara peserta aksi dengan petugas. Perjalanan yang ada sedapat mungkin diamankan, ditambah pula dengan pola penanganan preventif agar aksi massa tidak berubah menjadi aksi kebrutalan massa atau aksi kerusuhan massa yang memang sangat rawan terjadi. Pola penanganan pengamanan yang mendasarkan kepada pertimbangan '*rencana kegiatan aksi*' maka prediksi



Dan pertimbangan pola tindakan pengamanan yang mendasarkan kepada *'tuntutan yang dilontarkan melalui aksi tersebut'* dapat ditafsirkan sebagai sebuah pola penanganan pengamanan secara hukum atau intelijen terhadap permasalahan tersebut untuk mengetahui secara jelas apa yang menjadi permasalahan, keinginan atau tuntutan agar dapat segera ditanganinya dengan segera. Tuntutan yang dilontarkan biasanya mengandung hubungan-hubungan tertentu dengan bidang hukum atau intelijen, sehingga pola penanganannyapun dilakukan secara hati-hati<sup>80)</sup>.

Setelah memperhatikan keempat unsur tersebut, aparat keamanan dan ketertiban dapat mengambil sebuah kebijakan tertentu untuk segera melakukan sebuah tindakan pengamanan, baik terhadap peserta aksi itu sendiri, maupun terhadap lokasi-lokasi tertentu yang dimungkinkan dapat menjadi sasaran aksi. Pengamanan tidak hanya terbatas menangani masalah peserta aksi dan lokasi terjadinya aksi, tetapi juga langsung melakukan pengamanan secara intelijen apabila disinyalir adanya campur tangan pihak-pihak tertentu yang berkehendak *'mengacaukan'* jalannya aksi.

---

kekuatan yang akan digunakan untuk mengamankan dapat segera dipersiapkan dan diaktifkan untuk berjaga-jaga.

80) Pertimbangan yang mendasarkan kepada *'bentuk tuntutan yang diajukan'* juga merupakan sebuah bahan-bahan untuk melakukan prediksi terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Namun dari *'bentuk tuntutan yang diajukan'* sudah dapat diprediksikan secara teoritik apakah hal ini akan mengundang kerawanan sosial atau tidak. Biasanya kalau bentuk tuntutan itu merupakan bentuk tuntutan yang bersifat politis, maka penanganannya akan lebih represif dan ketat, tetapi kalauuntutannya hanya bersifat *'untuk menurunkan harga sembako'* maka penanganannya tidak akan terlalu ketat atau represif. Pola penanganan pengamanan juga melihat apakah *'kata-kata'* dalam poster, spanduk, baliho atau kata-kata yang diucapkan tersebut telah melanggar hukum atau tidak. Misalnya apabila telah melakukan unsur penghinaan, fitnah, kebencian, permusuhan, atau justru mendukung salah satu kebijakan tertentu. Sebab dari kata-kata yang dilontarkannya dapat dilihat bentuk-bentuk penanganannya. Apabila aksi tersebut merupakan sebuah *'aksi balasan'* dari aksi yang dilakukan maka biasanya pengamanan hanya bersifat preventif, bahkan petugas hanya akan berjaga-jaga secara *'santai'*, lain halnya apabila kata-kata yang dilontarkan tersebut mengandung unsur ancaman, penghinaan, pelecehan, fitnah, kebencian atau permusuhan, maka sikap petugas akan lebih ketat dan lebih represif. Contoh kongkritnya terhadap aksi yang dilakukan oleh Aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, akan berbeda penanganannya dengan aksi yang mendukung salah satu pihak, satu kelompok, atau aksi yang kontra terhadap aksi yang berlawanan dengan kebijakan penguasa.

Pola penanganan pengamanan yang terjadi di lapangan secara taktis-strategis dan operasional dilakukan oleh tim inti Polri dan tim pendukung dari ABRI. Pola penanganan pengamanannya secara baku tetap memperhatikan keempat unsur yang ada dalam sebuah aksi tersebut, tetapi pola pengamanannya bukanlah pola pengamanan yang kaku dan statis, ia dapat berubah sewaktu-waktu bergantung kepada prioritas tindakan yang harus dilakukan serta perkembangan situasi dan kondisi aksi yang harus ditangani.

Pola penanganan pengamanan terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang *hanya dilakukan dilingkungan kampus*, hanya mengadakan mimbar bebas dilingkungan terbuka tanpa bermaksud melakukan aksi massa turun kejalan, dan hanya mengundang *sedikit massa*, pengamanannya hanya dilakukan oleh Polri beserta unsur-unsurnya<sup>81)</sup>.

Pola penanganan pengamanan terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang *hanya dilakukan dilingkungan kampus*, hanya mengadakan mimbar bebas dilingkungan terbuka tanpa bermaksud melakukan aksi turun kejalan tetapi telah berhasil mengundang *massa yang cukup besar*, pengamanan inti dilakukan oleh tim Polri beserta unsur-unsurnya, sedangkan tim pendukung ABRI bersiap-siap untuk segera memberikan bantuan apabila diperlukan<sup>82)</sup>.

---

81) Pola penanganan aksi yang hanya dilakukan dilingkungan kampus dan hanya melibatkan sedikit massa biasanya secara praktis diatasi oleh unsur Binmas dari kepolisian sektor setempat. Namun walau demikian biasanya unsur Dalmas dari Semapta telah disiagakan didekat lokasi tersebut tanpa harus campur tangan terlebih dahulu. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu dimana lokasi tersebut dianggap tidak 'rawan' (misalnya hanya didalam kampus dan tertutup dari mana-mana), maka aparat keamanan dan ketertiban tidak akan masuk kekampus, bahkan tidak akan mengawasi jalannya aksi tersebut, tetapi hanya berjaga-jaga diluar tanpa disertai pasukan Dalmas. Pengamanan semacam ini biasanya hanya diserahkan kepada pengamanan yang berasal dari lokasi setempat biasanya oleh unsur satpam. Polisi hanya mengawasi dari luar tanpa turut campur, dan hanya diberikan laporan tentang apa yang terjadi dan dilakukan didalam kampus tersebut. Namun biasanya juga dalam kondisi aksi yang demikian satuan intel atau reserve ikut serta mengawasi dari dalam, agar dapat memantau perkembangan yang mungkin saja terjadi.

82) Pola penanganan terhadap terhadap aksi yang hanya dilakukan dilingkungan kampus namun berhasil mengundang massa yang cukup besar, biasanya lebih dipertimbangkan untuk melakukan tindakan pengawasan agar aksi tersebut tidak berkembang atau meluas. Pengamanan ini padaawalnya dilakukan oleh unsur Polri, yaitu dari unsur Binmas dan Dalmas, tetapi juga tetap melakukan koordinasi dengan satuan-satuan ABRI apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Aksi yang dilakukan dilingkungan kampus walaupun dihadiri oleh massa yang besar, selama masih dapat dibendung dan hanya dilakukan dilingkungan kampus maka penanganan pengamanannya hanya dilakukan oleh Polri dengan menyiagakan satuan-satuan Dalmas untuk mencegah agar aksi tidak sampai merambat keluar. Satuan pengamanan yang ada tetap tidak diperbolehkan memasuki kampus dan hanya dapat membiarkan, mengawasi jalannya aksi serta mencegah agar aksi tidak menjadi brutal atau meluas ke lokasi-lokasi lainnya.

Pola penanganan pengamanan terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dilakukan dilingkungan kampus, mengadakan mimbar bebas dilingkungan terbuka dan bermaksud melakukan aksi turun kejalan tetapi massa yang mengikuti aksi tersebut sedikit, pola pengamanannya secara inti tetap dilakukan oleh tim Polri beserta unsur-unsurnya, sedangkan keberadaan tim pendukung ABRI bersiap-siap untuk memberikan bantuan apabila diperlukan<sup>83)</sup>.

Pola penanganan pengamanan terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dilakukan dilingkungan kampus serta mengadakan mimbar bebas dilingkungan terbuka dan bermaksud melakukan aksi turun kejalan dimana massa yang mengikuti aksi tersebut cukup besar, pola pengamanannya secara inti tetap dilakukan oleh Polri beserta unsur-unsurnya dan keberadaan tim pendukung ABRI langsung diterjunkan untuk menjadi lapis kedua pengamanan setelah tim Dalmas Polri pada lapis pertama<sup>84)</sup>.

Pola penanganan pengamanan terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dilakukan dari lingkungan

---

83) Pola penanganan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dilakukan tidak hanya di kampus, tetapi sudah mulai melakukan aksi turun kejalan secara tidak langsung telah memberikan isyarat perlunya penanganan pengamanan yang lebih ketat dan lebih banyak petugas. Dalam sebuah aksi turun kejalan biasanya perhatian umum akan tertumpah kepada aksi tersebut, baik dari segi jumlah maupun isi tuntutan. Melihat aksi yang dilakukan, maka kecenderungan massa untuk melakukan hal-hal secara 'kebersamaan' dapat saja tersulut dengan cepat. Walaupun dalam aksi tersebut jumlah massa sedikit, namun sebuah 'penyulut' dapat saja menumbuhkan sebuah gerakan untuk menimbulkan kebersamaan, sehingga gerakan massa yang tadinya berlangsung secara aman, tertib dan damai, dapat saja berubah menjadi sebuah gerakan massa yang beringas. Walaupun jumlah pesertanya sedikit, namun bukan berarti aksi tersebut harus diabaikan, sebab dalam sebuah aksi yang turun kejalan secara psikologi massa, kelompok-kelompok yang ada dapat saja mengerakkan massa apapun walaupun massa itu kecil adanya.

84) Penanganan pengamanan terhadap sebuah aksi yang terjadi hingga turun kejalan dan berhasil mengumpulkan massa yang banyak, maka penanganan pengamanan akan dilakukan oleh dua tim, yaitu Tim Inti dan Tim Pendukung. Secara teknis penanganan aksi tersebut tetap ditangani oleh jajaran Polri tetapi untuk mempersiapkan pengamanan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, maka keberadaan Tim pendukung tetap dibutuhkan. Biasanya dalam sebuah aksi massa yang turun kejalan dan diikuti oleh massa yang banyak, maka keutuhan massa tidaklah dapat dipertahankan. Berbagai kepentingan dapat saja masuk dan menyebar secara tidak diketahui secara pasti. Pengaman yang tepat ialah menggiring massa tersebut menuju lokasi teraman yang dapat dijangkau, serta jauh dari masyarakat pada umumnya dan jauh dari berbagai sarana sosial dan umumnya. Sebuah aksi turun kejalan yang membawa massa cukup besar, apabila tidak dapat dikendalikan dengan baik, akan rawan sekali terhadap terjadinya kebingasan massa. 'Tangan-tangan jahil' yang memulai terjadi bentrokan massa dapat saja muncul, melemparkan batu tanpa diketahui siapa yang melakukan pelemparan sehingga menimbulkan kerusakan dan kekacauan massa. Apabila ini sudah sampai terjadi, maka pengendalian aksi ini akan menjadi lebih sulit dan memerlukan personil pengamanan dalam jumlah yang cukup besar.

kampus dan bergerak menuju gedung DPRD-DPR/MPR, para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut melakukan pawai atau 'long march' dan mengadakan mimbar bebas di gedung DPRD-DPR/MPR serta diikuti oleh sejumlah massa yang cukup besar, pengamanannya dilakukan secara terpadu oleh Polri beserta unsur-unsurnya dan tim pendukung ABRI beserta unsur-unsurnya. Pola pengamanan terpadu dilakukan dalam artian tidak lagi membedakan unsur Polri atau ABRI namun lebih dititikberatkan pada pola pengamanan secara menyeluruh yang mengambil sikap 'bertahan' atau 'mempertahankan'. Selama tidak terjadi permasalahan fisik atau timbul bentrokan-bentrokan massa, pola penanganan pengamanan terpadu lebih banyak bersikap pasif mengamankan<sup>85)</sup>.

Sebagai bahan pertimbangan yang paling operasional adalah bahwa pola penanganan pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan ABRI baik sebagai tim inti maupun sebagai tim pendukung, atau dilakukan secara terpadu, adalah tidak bersifat kaku dan statis. Tetapi lebih bersifat dinamis, koordinatif dan harus dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pengamanan yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan taktis-strategis<sup>86)</sup>.

---

<sup>85)</sup> Pola pengamanan aksi massa yang bergerak menuju gedung DPRD-DPR/MPR dan diikuti oleh massa yang cukup besar menunjukkan bahwa aksi massa tersebut bukan semata-mata melakukan aksi unjuk rasa untuk mengundang perhatian masyarakat tetapi juga bermaksud menyampaikan aspirasinya 'yang selama ini mungkin tak dapat tersampaikan atau tersalurkan'. Aksi tersebut cenderung memiliki tujuan yang paling pasti. Peserta aksi biasanya memiliki komitmen kebersamaan untuk mencapai tempat yang dituju dan tidak akan membubarkan diri apabila tujuannya yang hendak disampaikan tersebut belum tercapai. Aksi massa yang seperti ini menunjukkan adanya kepentingan yang hendak diutarakan. Walau demikian penanganan pengamanan aksi ini tidak dapat diabaikan begitu saja, selain ia memiliki massa dalam jumlah yang cukup besar, pengamanan secara preventif di lingkungan gedung DPRD-DPR/MPR juga perlu diperhitungkan. Dengan demikian personil pengamanan membutuhkan jumlah satuan yang cukup besar pula.

<sup>86)</sup> Pola pengamanan yang ada akan selalu berkembang dalam menghadapi situasi yang berbeda dan dapat berubah secara drastis, oleh karena itulah petunjuk-petunjuk baku terkadang menjadi 'batasan-batasan' yang kurang membuat leluasa untuk melakukan improvisasi terhadap kebutuhan di lapangan. Pengamanan dilakukan secara dinamis dengan memperhitungkan kondisi serta massa yang akan dihadapi. Konsep penekanan terhadap massa tidaklah harus selalu dilakukan, selama massa masih dapat diarahkan, maka 'teori bottle neck' sebagai sarana penyampaian-pembukaan saluran gelombang massa dapat diterapkan. Penanganan tidak akan membawa kepada kebringasan massa akan tetapi kepada pola penanganan yang lebih simpati.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami peran aparat keamanan dan ketertiban beserta unsur-unsurnya yang melakukan tindakan pengamanan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, secara *komponensial* tindakan para aparat Kemananan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

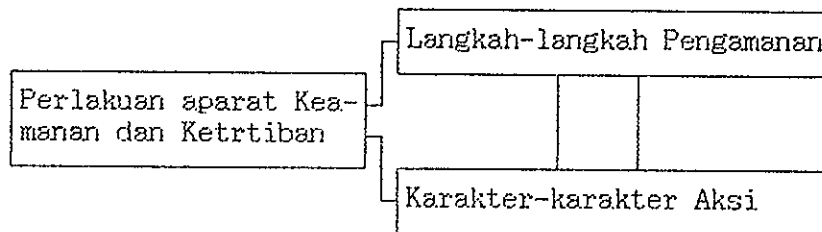
Tabel 12. Tindakan aparat keamanan dan ketertiban dalam Melakukan Pengamanan Terhadap Perbuatan Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Tindakan pengamanan oleh ABRI dan Polri	Tindakan aparat keamanan dan ketertiban dalam melakukan pengamanan terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.
Pola penanganan pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan ABRI secara taktis strategis dan Operasional	Penanganan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang <i>hanya dilakukan dilingkungan kampus</i> , mengadakan mimbar bebas dilingkungan terbuka, tanpa melakukan aksi turun kejalan, dan hanya mengundang <i>sedikit massa</i> , pengamanannya hanya dilakukan oleh Polri beserta unsur-unsurnya.
	Penanganan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang <i>hanya dilakukan dilingkungan kampus</i> , mengadakan mimbar bebas dilingkungan terbuka, tanpa melakukan aksi turun kejalan tetapi mengundang <i>massa yang cukup besar</i> , pengamanan inti dilakukan oleh tim Polri beserta unsur-unsurnya, sedangkan tim pendukung ABRI bersiap-siap untuk segera memberikan bantuan apabila diperlukan.
	Penanganan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dilakukan dilingkungan kampus, mengadakan mimbar bebas dilingkungan terbuka, tetapi bermaksud melakukan <i>aksi turun kejalan</i> , namun <i>massa yang mengikuti aksi tersebut sedikit</i> , pengamanan inti dilakukan oleh tim Polri beserta unsur-unsurnya, sedangkan tim pendukung ABRI bersiap-siap untuk memberikan bantuan.
	Penanganan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dilakukan dilingkungan kampus, mengadakan mimbar bebas dilingkungan terbuka, tetapi bermaksud melakukan <i>aksi turun kejalan</i> , namun <i>massa yang mengikuti aksi cukup besar</i> , pengamanan inti dilakukan oleh Polri beserta unsur-unsurnya dan tim pendukung ABRI langsung diterjunkan untuk menjadi lapis kedua pengamanan setelah tim Dalmas Polri pada lapis pertama.
	Penanganan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dilakukan dari lingkungan kampus dan <i>bergerak menuju gedung DPRD-DPR/MPR</i> , melakukan <i>pawai atau 'long march'</i> , mengadakan mimbar bebas di gedung DPRD-DPR/MPR, diikuti oleh <i>massa yang cukup besar</i> , pengamanannya dilakukan secara terpadu oleh Polri beserta unsur-unsurnya & tim pendukung ABRI beserta unsur-unsurnya.
	Pola penanganan <i>pengamanan</i> yang dilakukan oleh Polri dan ABRI baik sebagai tim inti maupun sebagai tim pendukung, atau <i>dilakukan secara terpadu, tidak bersifat kaku dan statis</i> . Tetapi lebih bersifat dinamis, koordinatif dan harus dapat cepat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pengamanan yang dibutuhkan.

Tabel disusun berdasarkan hasil penelitian,

Perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam melakukan pengamanan terhadap berlangsungnya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi lebih dititikberatkan tentang bagaimana *langkah-langkah* yang harus diambil oleh para aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi aksi tersebut dan *karakter-karakter aksi* gerakan mahasiswa pro-reformasi yang bagaimanakah yang harus dihadapi oleh aparat keamanan dan ketertiban<sup>87)</sup>.

Bagan 5. Perlakuan aparat keamanan dan ketertiban



Bagan disusun berdasarkan hasil penelitian.

Perlakuan aparat keamanan dan ketertiban yang pertama dititikberatkan pada *langkah-langkah* pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban. Langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban untuk melakukan sebuah pengamanan bukanlah sebuah urutan langkah yang sistematis atau sebuah langkah yang berurutan, namun langkah tersebut biasanya digunakan dari cara yang paling lunak hingga kepada cara yang paling keras atau memaksa.

<sup>87)</sup> Penulis mencoba untuk membagi unsur-unsur yang membangun perlakuan aparat keamanan dan ketertiban menjadi dua unsur yang masing-masing unsur memiliki variabel yang variatif. Unsur tersebut ialah 'langkah-langkah' yang harus diambil dan 'karakter-karakter' aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi. Seperti yang telah diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dalam melakukan penanganan pengamanan akan bergantung banyak sekali kepada beberapa variabel yang menyebabkan perlakuannya pun akan berbeda. Secara teknis memang tidak pernah dikemukakan oleh para informan bahwa ada bentuk 'tindakan' dan ada bentuk 'perlakuan' dan dari perlakuan itu sendiri di bagi dua yaitu 'langkah-langkah' dan 'karakteristik-karakteristik aksi'. Pembagian tersebut hanyalah metode penulis untuk memaparkan dan menjelaskan yang penulis peroleh dari hasil penafsiran dan analisis atas realita yang terjadi di lapangan. Sedangkan susunan variabel tersebut juga merupakan hasil penafsiran penulis dari beberapa informan yang dikaitkan dengan penafsiran atas realita yang ada.

Pengambilan langkah-langkah tersebut walaupun tidak secara sistematis atau berurutan, namun kriteria pokoknya adalah *'tetap memperlakukan para demonstran tersebut secara damai dan pasif'*. Namun walaupun demikian bukan berarti langkah-langkah tersebut tidak memperbolehkan adanya tindakan-tindakan represif. Tindakan represif hanya digunakan untuk membela dan mempertahankan diri apabila keadaan dan posisi pasukan pengamanan sudah sedemikian terdesak<sup>88)</sup>.

Penerapan langkah-langkah tersebut walaupun dijabarkan secara berurutan dari kondisi yang paling damai hingga kondisi yang paling rawan, bukan berarti langkah-langkah pengamanan tersebut bersifat kaku. Langkah-langkah pengamanan tersebut dapat saja berubah secara drastis, berkembang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang akan dihadapi di lapangan. Responsifitas perlakuan aparat keamanan dan ketertiban di lapangan, sangatlah bergantung penuh kepada aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang tengah berlangsung. Misalnya jika aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut berlangsung secara tenang dan damai, maka aparat keamanan dan ketertiban-pun hanya sebatas melakukan pengamanan aksi tanpa harus menggunakan perlakuan yang represif, apalagi hingga menggunakan tameng dan pentungan atau gas air mata dan peluru. Sebaliknya jika aksi tersebut sudah hampir berubah menjadi

---

88) Beberapa informan yang sempat penulis temui di lapangan maupun ketika mengkonfirmasi ulang perihal perlakuan aparat keamanan dan ketertiban, maka pada intinya terdapat bahwa pola dasar yang digunakan adalah 'pengamanan' sedangkan bagaimana perlakuan yang diterapkan di lapangan akan berkembang sesuai kondisi yang ada. Namun secara baku tetap mengedapnkan pola perlakuan yang manusiawi, karena para informan tersebut mengatakan bahwa yang mereka hadapi adalah masih masyarakat dan bangsa sendiri, bukan musuh sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai musuh yang harus dihancurkan atau dimusnahkan, akan tetapi jika gerakan massa itu sudah mencapai taraf yang genting, dimana keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional dipertaruhkan, maka apa boleh buat pengamanan secara represif dengan sangat terpaksa dilakukan. Tetapi tetap pada dasarnya pengamanan yang dilakukan adalah memandang bahwa massa tersebut adalah massa yang harus diperlakukan secara manusia berdasarkan pola-pola pengamanan yang ada.



aksi kebrutalan dan kerusuhan massa, maka aparat keamanan dan ketertibannya-pun akan segera menyesuaikan.

Dengan demikian langkah-langkah pengamanan tersebut pada dasarnya bersifat dinamis dan reaktif, yaitu bergantung penuh pada kondisi dan keadaan yang harus dihadapi. Dinamis karena ia dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya, reaktif karena bentuk perwujudan perlakuan tersebut merupakan sikap reaksi balik atas perbuatan yang dilakukan lebih dahulu. Dalam hal sikap reaktif, bentuk pola penekanan secara represifpun merupakan sebuah sikap balik atas adanya kegiatan aksi yang memungkinkan terjadinya aksi kekacauan atau kerusuhan massa.

*Langkah-langkah* perlakuan pengamanan yang diterapkan oleh aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi aksi para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yaitu<sup>89)</sup>:

1. Mengamankan lokasi kampus atau lokasi tempat berlangsungnya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi dan areal sekitarnya agar aksi tersebut menjadi terlokalisir dan lebih memudahkan dalam mengawasinya.
2. Membatasi ruang gerak atau ruang-lingkup berlangsungnya aktivitas aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi agar aksi tersebut tidak makin melebar dan tidak makin melibatkan banyak massa.
3. Mengawasi perbuatan dan tindakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi agar dapat dipantau perkembangannya.

---

<sup>89)</sup> Langkah-langkah perlakuan aparat keamanan dan ketertiban ini merupakan hasil penyusunan dan penafsiran penulis dari hasil sinkronisasi antara realita yang terjadi di lapangan dengan perbincangan dengan beberapa informan. Pada dasarnya langkah-langkah tersebut dikemukakan dan diuraikan secara sistematis oleh penulis berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh dari beberapa informan dan berdasarkan pengamatan terhadap berbagai aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang terjadi di lapangan. Penafsiran terhadap beberapa langkah pengamanan yang dilakukan oleh penulis merupakan hasil pengamatan dan perbincangan dengan beberapa sumber informasi.

4. Mengamankan arus lalu lintas di seputar areal aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, dan apabila menjadi aksi yang bergerak menuju tujuan tertentu (pawai atau '*long march*'), disamping melakukan pengamanan terhadap arus lalu lintas diseputar areal aksi, juga mengarahkan jalur pawai atau '*long march*' agar tetap terjaga keamanannya dan keutuhannya.
5. Dalam hal pengamanan lalu lintas aksi, kalau dirasa perlu petugas lalu lintas dapat melakukan pemblokiran arus lalu lintas tertentu dan memberikan '*prioritas jalan*' terhadap rangkaian aksi pawai atau '*long march*' dan menyalurkannya arus lalu lintas lainnya kejalur yang lebih aman.
6. Melakukan pengawalan dan mendampingi aksi pawai atau '*long march*' yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, agar route perjalanan menjadi lancar dan aksi tersebut tetap berlangsung secara damai tanpa menyimpangi beberapa kesepakatan yang mungkin telah dilakukan.
7. Melakukan pengawasan dan mengamankan terhadap peserta aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi apabila diketahui ada peserta aksi yang berasal dari '*luar unsur mahasiswa*', agar aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, tetap utuh, murni dan terjaga keamanannya.
8. Mengarahkan route pawai atau '*long march*' agar perjalanan dapat lancar dan mengamankan lokasi tempat tujuan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi agar tidak terjadi kekacauan yang dapat menyebabkan timbulnya kekacauan dan kerusuhan massa.
9. Melakukan pengamanan secara preventif, yaitu mencoba berdialog untuk mengetahui kehendak dan tujuan yang

sebenarnya, agar dapat dicapai beberapa kesepakatan dalam melakukan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi.

10. Melakukan pengamanan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi dan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan masuknya massa non mahasiswa kepada aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi.
11. Melakukan pengamanan secara represif, yaitu melakukan pengamanan dengan penekanan-penekanan, baik secara fisik maupun secara psikhis. Namun sedapat mungkin pengamanan secara represif ini dihindari agar tidak menimbulkan bentrokan massa.
12. Dalam keadaan yang sangat memaksa dimungkinkan menggunakan kekuatan fisik atau kekuatan secara militer sebagai kekuatan penekan atau kekuatan pemukul, khususnya apabila diperkirakan akan terjadi kekacauan dan kerusakan massa.
13. Dalam kondisi yang terdesak, kritis dan sangat memaksa, untuk pembelaan dan pertahanan diri dimungkinkan untuk menggunakan tameng dan pentungan, masker dan gas air mata, peluru hampa dan peluru karet. Pengamanan inipun dapat dilakukan untuk memadamkan sebuah aksi massa yang telah berubah menjadi kekacauan dan kerusakan massa.

Langkah-langkah tersebut pada dasarnya adalah sikap baku yang harus diterapkan, namun penerapannya bergantung pada kondisi dan keadaan mana yang harus dihadapi. Oleh karena itulah, penerapan langkah-langkah tersebut merupakan sebuah reaksi bagi kondisi yang ada dan harus dihadapi di lapangan.

Penentuan langkah-langkah apa yang harus diambil dalam menghadapi aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi bergantung penuh pada kondisi aksi yang dihadapi, sedang-

kan kondisi aksi yang harus dihadapi memiliki empat (4) karakteristik yang berbeda, dimana dapat saja karakter yang satu dengan karakter yang lain merupakan masing-masing karakter yang mandiri, disisi lain dapat juga karakter yang satu dengan karakter yang lain merupakan sebuah urutan dari karakter yang satu menuju karakter yang berikutnya<sup>90)</sup>.

Karakter-karakter kondisi aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang harus dihadapi oleh para aparat keamanan dan ketertiban yaitu<sup>91)</sup>:

1. Aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang hanya berlangsung diseputar kampus.
2. Aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang berlangsung di sekitar kampus dan memiliki rencana untuk melakukan aksi turun kejalan atau mengadakan pawai atau 'long march'
3. Aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang berlangsung secara tertib dan damai
4. Aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memiliki kecenderungan dan potensi terjadinya kakacauan dan kerusuhan massa

Keempat karakter ini akan memberikan bentuk perlakuan yang berbeda atau tidak sama. Aparat keamanan dan ketertiban akan memperhitungkan kondisi yang dihadapinya

---

<sup>90)</sup> Penulis menempatkan karakter-karakter tersebut dengan beberapa variabel yang berbeda, sehingga dari pemilahan ini akan terlihat dengan jelas bagaimana pengaruh variabel yang berbeda antara variabel yang satu dengan variabel yang lain akan memberikan hasil serta penanganan yang berbeda. Pada dasarnya konsep untuk menyusun karakteristik ini hanya merupakan bentuk 'trial and error' yang dilakukan oleh penulis, namun setelah melihat dan mengalami beberapa aksi, serta memperhatikan beberapa konsep perlakuan yang berbeda, maka penulis mencoba untuk merumuskannya dalam bentuk beberapa karakteristik dengan variabel yang berbeda pula.

<sup>91)</sup> Penyebutan karakter-karakter ini merupakan hasil penangkapan dan penafsiran penulis dari beberapa perlakuan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban terhadap berbagai macam aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi. Masing-masing karakter mendapatkan bentuk perlakuan standar yang berbeda. Sedangkan penyebutan keempat karakter tersebut merupakan hasil pembagian yang penulis lakukan berdasarkan beberapa paparan informasi yang dikemukakan oleh informan dan berdasarkan hasil pengamatan sendiri di lapangan terhadap berbagai macam aksi yang terjadi di beberapa lokasi dan beberapa waktu yang berbeda.

sehingga perlakuannya-pun akan disesuaikan dengan kondisi tersebut. Keempat karakter tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak sama, sebab jika keliru dalam memahami kondisi dan keadaan yang tengah terjadi, dan keliru pula dalam memberikan perlakuan, maka kekeliruan perlakuan tersebut justru dapat memicu terjadinya kondisi dan keadaan yang makin panas pula, sehingga dapat menimbulkan terjadinya bentrokan dan kerusuhan massa<sup>92)</sup>.

Perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang hanya berlangsung diseputar kampus ialah: melakukan pengamanan lokasi kampus atau areal berlangsungnya aksi dan sekitarnya. Mencoba melakukan pembatasan ruang gerak atau lingkup aktivitas dari aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi. Melakukan pengawasan terhadap perbuatan dan tindakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi. Melakukan pengamanan arus lalu lintas di seputar areal kampus atau lokasi yang digunakan untuk mengadakan aksi dan jika dirasa perlu dapat melakukan pemblokiran arus lalu lintas dan mengarahkannya menuju jalur lain yang lebih aman<sup>93)</sup>.

Perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang berlangsung di sekitar kampus dan memiliki rencana untuk melakukan aksi

---

<sup>92)</sup> Jika dipaparkan dalam sebuah bentuk kajian yang aplikatif, maka dapat dilihat bahwa hubungan antara kondisi dan keadaan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang tengah berlangsung dengan perlakuan-perlakuan aparat keamanan dan ketertiban, lebih merupakan bentuk hubungan timbal balik antara adanya aksi yang menimbulkan reaksi dan reaksi tersebut memicu reaksi yang lebih besar pula. Oleh karena itulah bentuk-bentuk perlakuan yang tepat akan melihat kondisi dan keadaan mana yang tengah dihadapi, sehingga perlakuan-perlakuan yang diambil-pun akan dapat disesuaikan dengan tepat dan segera.

<sup>93)</sup> Lihat kembali variabel-variabel yang ada pada 'langkah-langkah' dikaitkan dengan 'karakteristik aksi' akan menunjukkan pola perlakuan yang berbeda. Semakin kompleks aksi yang timbul maka akan semakin rumit pula proses penanganan pengamanannya, tetapi sebaliknya jika semakin sederhana aksi tersebut berlangsung, maka pola penanganannya-pun sebatas perlakuan yang standar saja. Pola perlakuan pengamanan yang diberikan merupakan bentuk reaksi dari aksi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa pro-reformasi, jika aksi tersebut berjalan tanpa menimbulkan kecenderungan anarkhi, maka perlakuan aparat keamanan dan ketertiban-pun akan memperlakukannya secara wajar.

*turun kejalan atau mengadakan pawai atau 'long march, ialah: melakukan pengamanan lokasi kampus dan areal sekitar tempat berlangsungnya aksi. Melakukan pembatasan ruang gerak atau lingkup aktivitas dari aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi. Melakukan pengawasan terhadap perbuatan dan tindakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi. Melakukan pengamanan arus lalu lintas di seputar areal kampus dan jalur pawai atau 'long march' dan jika dirasa perlu dapat melakukan pemblokiran arus lalu lintas dan mengarahkan arus kendaraan dan arus pawai tidak pada jalur yang sama. Melakukan pengawalan dan mendampingi 'rombongan pawai' atau 'rombongan long march'. Melakukan pengawasan dan mengamankan peserta aksi apabila diketahui ada peserta aksi yang berasal dari 'luar unsur mahasiswa'. Mengarahkan dan mengamankan lokasi tempat tujuan aksi<sup>94)</sup>.*

Perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang berlangsung secara tertib dan damai yaitu dengan melakukan pengamanan secara preventif. Aparat keamanan dan ketertiban melakukan pengawalan dan pendampingan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, mengamankan lalu lintas dan mengarahkan jalur yang hendak ditempuh 'long march' serta melakukan pengamanan dan pencegahan masuknya massa non mahasiswa

---

94) Lihat kembali variabel-variabel yang dipaparkan dalam 'langkah-langkah' dengan 'karakteristik aksi'. Dalam sebuah aksi yang makin kompleks dengan perluasan rencana aksi, maka pola penanganannya pun akan semakin luas, hal ini diperhitungkan sebagai sarana untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi kerusuhan atau kebrutalan massa yang memang tidak dikehendaki. Apabila sebuah aksi massa sudah berlangsung sedemikian lama, terjadi dengan massa yang cukup, serta mengadakan rencana untuk melakukan aksi turun kejalan, maka secara emosional massa yang sudah cukup tegang, lama berhadapan-hadapan dengan aparat Keamanan dan ketertiban dapat mencetuskan sebuah pertentangan secara fisik. Kondisi emosional di kedua belah pihak yang sedang tegang dan berada dalam kondisi saling mencurigai merupakan unsur-unsur psikhis yang dapat membuat friksi fisik antara kedua belah pihak yang berhadapan-hadapan.

kepada aksi mahasiswa<sup>95)</sup>

Perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memiliki kecenderungan dan potensi terjadinya kekacauan dan kerusuhan massa, yaitu dengan melakukan pengamanan dilakukan secara represif, namun sedapat mungkin menghindari bentrokan massa. Mulai menggunakan kekuatan militer sebagai kekuatan penekan atau pemukul apabila terjadi kekacauan dan kerusuhan. Mulai menggunakan tameng dan pentungan, masker dan gas air mata, peluru hampa dan peluru karet untuk memadamkan aksi yang berubah menjadi kekacauan dan kerusuhan massa<sup>96)</sup>.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami perlakuan aparat keamanan dan ketertiban beserta unsur-unsurnya dalam melakukan pengamanan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, secara *komponensial* perlakuan para aparat Keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

---

95) Realita menunjukkan apabila aksi berlangsung secara tertib dan damai, maka friksi fisik sangat kecil kemungkinannya untuk timbul. Tetapi hal inipun tidak menjamin bahwa friksi tidak mungkin terjadi sebab dapat saja karena emosional, karena kondisi cuaca yang panas dapat membuat kesabaran seseorang menjadi cepat hilang. Pada aksi yang berlangsung secara tertib dan damai, biasanya lebih banyak sikap kompromis yang berhasil dicapai oleh kedua belah pihak, baik pihak aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi maupun pihak aparat keamanan dan ketertiban lebih banyak mencapai kesepakatan, misalnya dalam hal route yang akan dilalui, pengangkutan mahasiswa bila diperlukan, pembatasan aksi untuk tidak mendekati tempat-tempat tertentu, serta kesediaan mahasiswa untuk mau diatur keamanannya oleh aparat, sebaliknya kesediaan aparat untuk tidak menahan atau menghambat aksi yang mahasiswa lakukan.

96) Realita menunjukkan bahwa secara umum kecenderungan aksi massa akan membawa dampak kepada potensi terjadinya kekacauan dan kerusuhan massa. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan dalam massa yang besar-pun memiliki kecenderungan yang demikian. Ketegangan secara fisik maupun psikis dapat menjadi pemicu terjadinya friksi fisik, oleh karena itulah maka dengan variabel-variabel yang ada aparat keamanan dan ketertiban berusaha untuk melakukan pengamanan, baik secara preventif maupun represif.

Tabel 13. Perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam melakukan pengamanan terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Perlakuan pengamanan oleh ABRI dan Polri	Perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam melakukan pengamanan terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.
Aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang hanya berlangsung diseputar kampus	Mengamankan lokasi kampus dan areal sekitarnya.
	Membatasi ruang gerak/lingkup aktivitas aksi.
	Mengawasi perbuatan & tindakan para aktivisnya.
	Mengamankan arus lalu lintas di seputar areal kampus yang digunakan untuk aksi.
	Kalau dirasa perlu dapat memblokir arus lalu lintas dan menyalurkannya kejalur lainnya.
Aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang berlangsung di sekitar kampus dan memiliki rencana untuk turun ke-jalan (pawai).	Mengamankan lokasi kampus dan areal sekitarnya.
	Membatasi ruang gerak/lingkup aktivitas aksi.
	Mengawasi perbuatan & tindakan para aktivisnya.
	Mengamankan arus lalu lintas di seputar areal kampus dan jalur pawai atau 'long march'.
	Mengawal dan mendampingi pawai atau long march
	Kalau dirasa perlu arus lalu lintas dapat di-blokir dan disalurkan ke jalur lainnya.
	Mengawasi dan mengamankan peserta aksi apabila diketahui ada peserta aksi yang berasal dari luar 'unsur mahasiswa'.
Aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang berlangsung secara tertib dan damai	Mengarahkan dan mengamankan lokasi tempat tujuan aksi.
	Pengamanan dilakukan secara preventif.
	Melakukan pengawalan dan pendampingan aksi.
	Mengamankan lalu lintas dan mengarahkan jalur yang hendak ditempuh 'long march'.
Aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang berlangsung menuju kekacauan dan ke rusuhan massa.	Melakukan pencegahan dan pengamanan masuknya massa non mahasiswa kepada aksi mahasiswa.
	Pengamanan dilakukan secara represif, namun se-dapat mungkin menghindari bentrokan massa.
	Mulai menggunakan kekuatan militer sebagai ke-kuatan penekan atau pemukul apabila terjadi ke-kacauan dan kerusakan.
	Mulai menggunakan tameng dan pentungan, masker dan gas air mata, peluru hampa dan peluru karet untuk memadamkan aksi yang berubah menjadi ke-kacauan dan kerusakan massa.

Tabel disusun berdasarkan hasil penelitian.



### C. Depenalisasi Perbuatan Para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi

Menurut Soedarto, *depenalisasi* adalah sebuah tindakan terhadap sebuah perbuatan yang semula diancam dengan pidana, kemudian ancaman pidananya dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain yaitu dengan melalui hukum perdata maupun dengan menggunakan hukum administrasi<sup>97)</sup>.

Pembahasan tentang keberadaan *depenalisasi* menurut Sudarto, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *kriminalisasi* dan *dekriminalisasi*. Kriminialisasi dimaksudkan sebagai sebuah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai sebuah perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya sebuah undang-undang dimana perbuatan yang diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Sebaliknya pengertian dekriminalisasi adalah suatu proses dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya sebuah perbuatan, proses ini diakhiri dengan dicoretnya ketentuan yang bersangkutan dari perundang-undangan. Sudarto menambahkan bahwa dekriminalisasi haruslah dibedakan dengan *depenalisasi*, yaitu adanya sebuah perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidananya dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain yaitu melalui hukum perdata atau hukum administrasi<sup>98)</sup>.

---

<sup>97)</sup> Dalam gerakan mahasiswa pro-reformasi yang terjadi menjelang Sidang Umum 1998, timbul sebuah fenomena yaitu dengan hampir tidak diterapkannya ketentuan-ketentuan pidana yang seringkali diterapkan pada aktivis gerakan mahasiswa sebelumnya. Fenomena ini disinyalir oleh penulis sebagai sebuah tindakan depenalisasi terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi. Ini terlihat bahwa dari banyaknya aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi, aksi keprihatinan, dan aksi massa, namun sangat sedikit sekali yang dijerat dengan ketentuan-ketentuan pidana yang biasa digunakan.

<sup>98)</sup> Dalam kaitannya dengan ketiga proses tersebut (*kriminalisasi*, *dekriminalisasi*, *depenalisasi*) maka kerangka kajian kritis dalam kriminologi telah melakukan sebuah upaya untuk memahami secara kritis tentang proses-proses pembentukan undang-undang dan sekaligus pola bekerjanya. Proses kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi, dalam acuan kerangka kriminologi kritis merupakan sebuah pola kajian baru yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi guna perbaikan-perbaikan hukum pidana menuju bentuk hukum pidana yang lebih responsif. Penelitian-penelitian yang dilakukan dalam lingkup kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (*kriminalisasi*) atau pencabutan undang-undang pidana (*dekriminalisasi*) dan terjadinya tindakan depenalisasi sebuah perbuatan atau tindakan.

Tindakan *depenalisasi* terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menunjukkan adanya indikasi bahwa penggunaan sarana-sarana penal sebagai alat untuk menegakkan hukum dan mengatur serta menjamin keamanan dan ketertiban bukan merupakan satu-satunya upaya hukum yang harus dilakukan. Fenomena terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan pidana secara tertulis (*law in books*) dengan pelaksanaan ketentuan pidana secara realita (*law in action*).

Dalam hukum pidana itu sendiri diakui adanya keterbatasan-keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, sehingga timbul sebuah pemikiran yang mengemukakan bahwa dalam menanggulangi kejahatan selain dikenal dengan upaya penal, terdapat pula penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal<sup>99)</sup>.

Apabila tindakan aparat keamanan dan ketertiban terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ternyata merupakan sebuah tindakan *depenalisasi* yang menyadari batas-batas kemampuan hukum pidana dalam menangani masalah kejahatan dan melakukan penanggulangan agar tidak terjadi bentrokan yang lebih besar dan lebih merugikan bagi semua pihak, maka tindakan tersebut merupakan upaya non penal sebagai upaya untuk menangani masalah yang sangat kompleks.

---

<sup>99)</sup> Mengingat keterbatasan-keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dalam menangani perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan tertentu dalam hukum pidana dilakukanlah tindakan *Depenalisasi*. Dengan kata lain dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan tertentu dalam hukum pidana, upaya penal tidak selalu harus digunakan. Ini sesuai dengan apa yang pernah dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** yang mengutip pemikiran **Nigel Walker** bahwa mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi 'upaya penal' seyogyanya harus dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Pendapat senada juga dikemukakan oleh **Jeremy Bentham** bahwa penggunaan hukum pidana janganlah digunakan apabila ternyata penggunaan hukum pidana tersebut tidak memiliki dasar yang kuat (*groundless*), tidak diperlukan (*needless*), tidak menguntungkan (*unprofitable or inefficacious*). Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh **Herbert L. Packer** bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan atau tidak pandang bulu atau menyamaratakan (*indiscriminately*) dan dikenakan secara paksa (*coercively*) akan menjadikan sarana pidana tersebut menjadi suatu pengancam yang utama (*prime threatener*).

Dalam melakukan pengungkapan sebuah permasalahan yang sangat kompleks ternyata membutuhkan beberapa alat bantu pemahaman diluar disiplin ilmu hukum. Demikian pula untuk membahasnya secara mendalam dibutuhkan perangkat-perangkat pemahaman non hukum. Pembahasan permasalahan ketiga yaitu tentang mengapa diterapkannya tindakan untuk melakukan *depenalisasi* terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang telah memenuhi rumusan-rumusan pidana tertentu, hal ini tidak dapat dilepaskan dari bentuk permasalahan keempat, yaitu pengaruh-pengaruh non hukum apakah yang mempengaruhi diterapkannya tindakan *depenalisasi*.

Namun untuk membahasnya secara sistematis dan rinci setiap permasalahan yang ada secara lebih terfokus, dalam sub bagian ketiga ini terlebih dahulu dikemukakan tentang pertimbangan-pertimbangan non hukum dan hukum yang melatarbelakangi mengapa diterapkannya tindakan *depenalisasi* terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa<sup>100)</sup>.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut dikemukakan secara *komponensial* dalam bentuk preposisi sebagai berikut:

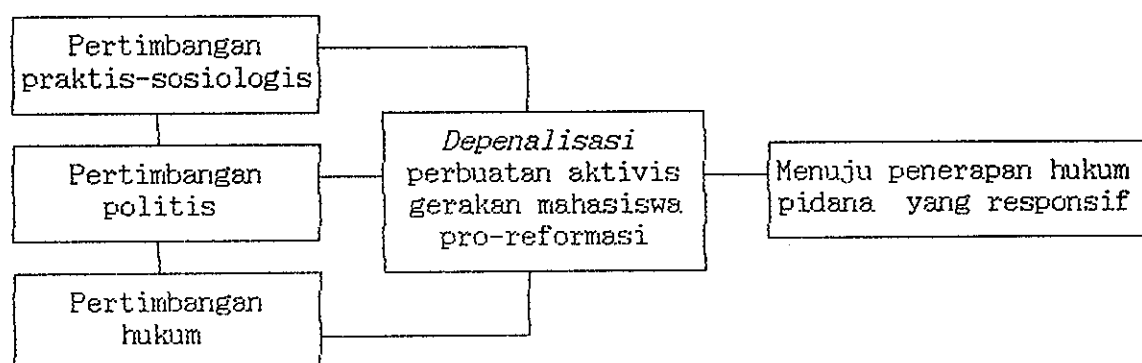
- Preposisi 1: *Pertimbangan praktis-sosiologis yang menyebabkan depenalisasi perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.*
- Preposisi 2: *Pertimbangan politis yang menyebabkan depenalisasi perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.*
- Preposisi 3: *Pertimbangan hukum yang menyebabkan depenalisasi perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.*

---

<sup>100)</sup> Sedangkan pengaruh-pengaruh non hukum apakah yang mempengaruhi bekerjanya hukum sehingga diterapkannya kebijakan depenalisasi terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, akan dibahas secara sistematis dan rinci dalam sub bagian keempat, setelah pembahasan sub bagian ketiga ini.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami bagaimana posisi pertimbangan-pertimbangan praktis-sosiologis, politis dan hukum dalam membangun konsepsi *depenalisasi* perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, dapat dilihat dalam bagan berikut ini, dan dalam beberapa uraian sesudahnya yang menjelaskan pertimbangan masing-masing preposisi (preposisi 1, 2 dan 3) secara komponensial.

Bagan 6. Posisi pertimbangan praktis-sosiologis, politis dan hukum dalam membangun konsepsi *depenalisasi* perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.



Bagan disusun berdasarkan hasil penelitian.

Preposisi pertama (1) menunjukkan bentuk-bentuk pertimbangan yang mengacu kepada perkembangan kondisi-kondisi empiris secara praktis dan sosiologis dilapangan. Dari pertimbangan yang mengacu pada kondisi-kondisi empiris ini, akan muncul preposisi kedua (2) yaitu bentuk-bentuk pertimbangan secara politis yang mengacu kepada tujuan yang hendak dicapai atau kondisi-kondisi politik yang menekannya. Dari kedua pertimbangan tersebut (preposisi 1 dan 2), akan muncul preposisi ketiga (3) yaitu bentuk-bentuk pertimbangan secara hukum yang mengacu kepada tujuan yang hendak dicapai atau manfaat apa yang dapat diambil dari tindakan tersebut, serta konsep-konsep hukum apa yang dapat digunakan atau mendukung sebuah tindakan secara tepat, baik dan benar.

# 1. Pertimbangan praktis-sosiologis yang menyebabkan depenalisasi Perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Pertimbangan *praktis-sosiologis* merupakan sebuah bentuk pertimbangan yang lebih mengedepankan aspek-aspek kepentingan yang lebih menguntungkan berdasarkan kondisi yang nyata dan kemudahan-kemudahan tertentu yang memungkinkan untuk diterapkan dilapangan. Pertimbangan ini merupakan bentuk pertimbangan pintas yang melihat adanya keuntungan untuk menerapkan komponen-komponen tertentu untuk mencapai hasil yang lebih menguntungkan. Disituasi pertimbangan ini merupakan sebuah bentuk pertimbangan yang mengabaikan tata hukum atau pola normatif yang biasanya berlaku dan disisi lain pertimbangan ini hanya mengarah kepada usaha-usaha tertentu untuk mencapai kondisi dan tujuan yang dikehendaki<sup>101)</sup>.

Secara *praktis-sosiologis* pertimbangan ini merupakan sebuah bentuk kebijakan yang muncul setelah melihat fenomena sosial yang ada serta memutuskan sebuah upaya secara rasional berdasarkan data-data empiris yang mendukung diambilnya tindakan tersebut.

Dalam menanggapi berbagai aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, para aparat keamanan dan ketertiban-pun mempertimbangkan untuk melakukan tindakan *depenalisasi* dengan beberapa bentuk pertimbangan secara *praktis-sosiologis* berdasarkan *kondisi-kondisi empiris* yang menun-

---

<sup>101)</sup> Bentuk pertimbangan ini cenderung hanya melihat sisi keuntungan yang dapat diperoleh, atau hanya memperhitungkan segi kerugian bila diterapkannya sebuah tindakan. Sehingga bentuk-bentuk pertimbangan ini sangat berkaitan erat dengan kondisi yang tengah dihadapi serta bentuk-bentuk tindakan yang memang harus segera dilakukan. Secara praktis sosiologis, pertimbangan ini lebih banyak menyimpangi elemen-elemen hukum demi kepentingan sementara, tetapi batasan yang membedakan antara kepentingan hukum dengan mendahulukan kepentingan masyarakat amatlah tipis sekali, sehingga dalam beberapa kasus, khususnya dalam kasus terjadinya penjarahan, perusakan oleh massa yang 'mendompleng' massa mahasiswa sulit untuk dilacak, ditangkap atau dipidanakan. Kepentingan inipun tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan politis terhadap sesuatu hal, misalnya masalah HAM, penggunaan 'exesive force' oleh polisi dan kondisi-kondisi ekonomi politik yang melatar belakangi. Oleh karena itulah, dalam bagan digambarkan bahwa pertimbangan praktis-sosiologis, pertimbangan politis dan pertimbangan hukum saling kait mengkait dan saling mendukung pertimbangan yang lainnya.

jang pertimbangan tersebut<sup>102)</sup>.

Tindakan *depenalisasi* terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi secara *praktis-sosiologis* dilandasi pemikiran-pemikiran tertentu yaitu, bahwa tindakan aparat keamanan dan ketertiban yang melakukan penangkapan serta dilanjutkan dengan mengajukan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan dan pemidanaan, dapat menyulut kemarahan atau kerusuhan massa yang lebih besar. Kondisi ini makin mempersulit melakukan pengamanan lokasi, dan lokasi yang sebenarnya dapat diamankan dan dikendalikan dengan mudah akan menjadi lebih sulit, lebih kompleks dan lebih beringas apabila dilakukan tindakan penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi<sup>103)</sup>.

Pertimbangan *praktis-sosiologis* mengemukakan bahwa bentuk penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang melakukan berbagai macam aksi serta didukung oleh sejumlah massa yang banyak, adalah sangat tidak mungkin dilakukan secara menyeluruh. Pertimbangan ini mendasarkan kepada realita bahwa dalam berbagai macam aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, peserta aksi yang

---

<sup>102)</sup> Kondisi-kondisi empiris yang penulis maksudkan ialah selain realita yang muncul dilapangan, penulis juga melakukan penafsiran terhadap realita-realita tersebut, untuk mencari makna dari perbuatan, atau tindakan yang terjadi. Kondisi-kondisi empiris seringkali hanya memunculkan sebuah realita yang hanya nampak pada sisi luarnya saja, namun untuk dapat memahaminya maka makna dibalik realita yang muncul itulah yang seharusnya digunakan sebagai bahan-bahan pertimbangan. Oleh karena itulah, kondisi empiris yang penulis maksudkan ialah realita yang nyata benar-benar terjadi, serta makna-makna yang ada di balik realita tersebut, atau makna-makna sosial yang berada di balik realita tersebut.

<sup>103)</sup> Realita menunjukkan bahwa sikap apriori dan 'kebencian' massa terhadap keberadaan Aparat Keamanan dan Ketertiban sudah mengakar begitu kuat, sehingga keberanian massa terhadap Aparat tersebut makin menjadi-jadi. Massa sudah mulai memanas dan tidak menganggap keberadaan aparat keamanan dan ketertiban merupakan alat negara yang harus dipatuhi, sehingga dalam beberapa kasus terjadi penyerangan aparat oleh massa, pembakaran markas Polsek oleh massa, penyerangan lokasi-lokasi tertentu oleh massa tanpa aparat mampu menghentikan dan membendungnya. Realita inilah yang menunjukkan bahwa penangkapan atau pemidanaan terhadap salah satu aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat memicu kebringasan menuju kerusuhan dan penjarahan.

mengikutinya mencapai ratusan dan ribuan mahasiswa (*massa*) dan realita ini jelas membutuhkan personil aparat keamanan dan ketertiban yang sebanding secara ideal untuk melakukan penangkapan, pengusutan, penyelidikan, penyidikan. Berdasarkan pertimbangan *praktis-sosiologis* inilah, aparat keamanan dan ketertiban hanya melakukan tindakan pengamanan secara massal dan tidak melakukan penangkapan orang perorang<sup>104)</sup>.

Pertimbangan *praktis-sosiologis* mengemukakan bahwa tindakan penangkapan, pemidanaan dan pembubaran aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban apabila dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik, maka dapat menyebabkan bentrokan massa yang cukup besar. Oleh karena itulah pengamanan cukup dilakukan dengan mengarahkan aksi, mengawasi aksi, dan mengendalikan aksi tanpa memberikan beban yang lebih berat kepada aparat keamanan dan ketertiban dengan menangkapi serta memidanakan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi<sup>105)</sup>.

Pertimbangan *praktis-sosiologis* lainnya mengemukakan bahwa tindakan penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi oleh aparat keamanan dan

---

104) Realita menunjukkan bahwa komposisi perbandingan antara jumlah massa, mahasiswa dengan Aparat keamanan dan ketertiban adalah jauh dari ideal. Massa berjumlah ribuan dan aparat keamanan dan ketertiban hanya berjumlah ratusan. walaupun aparat dilengkapi dengan berbagai peralatan, mulai dari pentungan, tameng, helm, rompi, senapan dan peluru hampa dan peluru karet, hingga kendaraan lapis baja pembubar massa, namun jelas perimbangan yang ada tidak sebanding. Sehingga penanganan massa lebih diutamakan ketimbang penanganan secara hukum. Konsep penanganan lapangan untuk mendahulukan keamanan dan ketertiban yang langsung menyangkut masyarakat diprioritas ketimbang kepentingan hukum itu sendiri.

105) Realita menunjukkan bahwa pola pengamanan secara preventif yaitu dengan melakukan pengawasan, pengendalian dan mengarahkan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi adalah lebih mudah ketimbang harus melakukan penertiban massa yang brutal, melakukan penangkapan atau pembubaran massa. Ketika massa mahasiswa telah mencapai tujuannya, maka massa mahasiswa tersebut mau untuk membubarkan diri kembali. Permasalahannya kadangkala kekacauan atau keonaran berasal dari kedua belah pihak, baik dari massa, mahasiswa maupun aparat keamanan dan ketertiban itu sendiri yang sama-sama dalam kondisi fisik yang lelah, tetapi tingkat emosional tinggi, sehingga friksi-friksi kecil yang tajam dapat saja terjadi atau terdetus secara tidak disengaja. Pada dasarnya baik mahasiswa maupun aparat menginginkan aksi tersebut berjalan secara tertib dan damai, namun yang namanya friksi dapat saja terjadi tanpa direncanakan.

ketertiban dalam melakukan tindakan pengamanan terhadap massa, ternyata tidak dapat meredam dan meredakan aksi yang tengah bergejolak serta tidak dapat menuntaskan permasalahan secara prinsipil, tetapi justru dapat memicu permasalahan baru yang makin memperpanjang permasalahan yang sebenarnya belum tuntas dan tidak perlu terjadi<sup>106)</sup>.

Pertimbangan *praktis-sosiologis* juga mengemukakan bahwa jika maksud dari dilakukannya penangkapan dan pemidanaan adalah untuk membuat jera para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dan meredam aksi tersebut jelas maksud tersebut tidak akan tercapai, sebab realita telah menunjukkan bahwa dengan ditangkapnya dan dipidananya beberapa aktivis gerakan mahasiswa, aktivitas yang ada dan gerakan yang muncul tidak pernah berhenti, bahkan malah menjadi semakin besar, semakin menjadi kritis dan semakin menjadi berani, sehingga jelas maksud untuk membuat jera dan meredam aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi dengan menangkap atau memidananya bukan merupakan maksud dan tujuan yang efektif<sup>107)</sup>.

Pertimbangan *praktis-sosiologis* mengemukakan bahwa kalau pengamanan terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat dilakukan dengan cara mengarahkan, men-

---

106) Realita menunjukkan bahwa penangkapan-penangkapan tersebut sengaja dihindari oleh aparat keamanan dan ketertiban untuk menjaga agar tidak terjadi friksi yang lebih tajam, oleh karena itulah satuan-satuan 'pengendalian massa' yang lebih diperbanyak untuk melakukan pengamanan secara fisik, baik preventif maupun represif seandainya benar-benar dibutuhkan. Permasalahan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi sendiri, sebenarnya sudah merupakan sebuah permasalahan yang kritis, kompleks dan rumit, sehingga tidak perlu ditambahi lagi dengan permasalahan-permasalahan lainnya yang mungkin saja timbul sebagai akibat adanya penangkapan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

107) Realita menunjukkan bahwa sudah sejak lama penangkapan dan pemidanaan terhadap diri para aktivis gerakan mahasiswa itu dilakukan, mulai sejak tahun 1974 hingga tahun 1998 ternyata tidak membuat gerakan mahasiswa itu jera dan menjadi surut. Tetapi gerakan tersebut malah menjadi semakin kritis dan semakin berani untuk mengambil risiko. Kunci permasalahannya adalah bukan pada perilaku mahasiswa tersebut yang dianggap sebagai sebuah perbuatan menyimpang menurut pola kacamata tertentu, tetapi justru ada pada kondisi politik dan ekonomi yang menyebabkan mahasiswa bergerak dan bersikap oposan kepada penguasa. Sehingga tindakan penguasa melalui perlengkapan yang dimilikinya untuk menindas atau memidanakan gerakan mahasiswa tidak akan pernah menuntaskan permasalahan, sebab permasalahan ada pada diri penguasa itu sendiri. Aksi mahasiswa merupakan sebuah reaksi terhadap perilaku penguasa yang sudah sedemikian jauh menyimpang dan melanggar rasa-rasa keadilan itu sendiri.



gawasi dan mengendalikannya secara hati-hati, mengapa harus melakukan penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivisnya. Pertimbangan untuk menangkapi dan memidanakan aktivisnya merupakan beban kerja kembali bagi aparat keamanan dan ketertiban, kalau tujuan yang dkehendakinya hanya melakukan pengamanan. Pertimbangan *praktis-sosiologis* lainnya juga mengatakan bahwa tindakan pembubaran aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa merupakan tindakan kekerasan fisik yang tidak efektif, sebab kalau memang aksi tersebut dapat diarahkan, diawasi dan dikendalikan secara aman dan hati-hati, mengapa para aktivisnya harus ditangkapi dan dipidanakan serta aksi tersebut harus dibubarkan. Jika aksi tersebut dapat berlangsung secara tertib, damai dan aman, aksi tersebut jadi dapat bubar dengan sendirinya secara aman, damai dan tertib, yang penting peranan aparat keamanan dan ketertiban untuk melakukan pengamanan agar aksi tersebut jangan sampai merusak, menimbulkan kerusuhan, melakukan penjarahan dan kekacauan. Aparat keamanan dan ketertiban hanya melakukan pengamanan, pengawasan agar kondisi aksi menjadi aman, damai, tertib dan terkendali<sup>108)</sup>.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pertimbangan *praktis-sosiologis* yang menyebabkan *depenalisasi* perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, secara

---

108) Realita menunjukkan bahwa dalam aksi gerakan mahasiswa yang akhirnya menimbulkan aksi kekerasan yang dimulai dengan tindakan represif aparat keamanan dan ketertiban telah menimbulkan permasalahan baru yang meninggalnya seorang mahasiswa di Yogyakarta, dan 4 orang mahasiswa di Jakarta. Oleh karena itulah sedapat mungkin friksi fisik dihindari, baik aparat maupun aktivis gerakan mahasiswa dapat menjaga diri dan mengendalikan sesuai kondisi yang ada. Kondisi yang sangat kritis dan tidak memungkinkan dilakukannya pengamanan secara preventif merupakan sebuah kondisi terburuk yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak, sebab di satu sisi mahasiswa tetap berpegang teguh pada keyakinannya dan disisi lain aparat keamanan dan ketertiban tetap berpegang teguh kepada tugas dan kewajiban yang harus di jalankan. Pada kondisi yang seperti ini sebenarnya yang dirugikan adalah kedua belah pihak tersebut. Satu yang membikin permasalahan (penguasa), kedua belah pihak tersebut (mahasiswa dan aparat keamanan dan ketertiban) itulah yang harus berhadapan, bertentangan, bersitegang dan menerima 'susahnya'.

*komponensial pertimbangan praktis-sosiologis* tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 14. Pertimbangan praktis sosiologis yang menyebabkan *depenalisasi* perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Pertimbangan	Bentuk Pertimbangan
Praktis sosiologis	Penangkapan dan pemidanaan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat menyulut kemarahan atau kerusuhan massa yang lebih besar dan lebih sulit untuk diamankan dan dikendalikan.
	Penangkapan dan pemidanaan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tidak mungkin dilakukan secara menyeluruh, karena peserta aksi mencapai ribuan dan pasti membutuhkan personil yang tidak sedikit, untuk mengusut, mengamankan dan memprosesnya.
	Penangkapan, pemidanaan dan pembubaran aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi apabila dilakukan dengan mengandalkan kekuatan fisik, dapat menyebabkan betrokan massa yang cukup besar, oleh karena itulah pengamanan cukup dilakukan dengan mengarahkan aksi, mengawasi aksi, dan mengendalikan aksi tanpa memberikan beban yang lebih berat dengan menangkap serta memidanakan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.
	Penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ternyata tidak meredakan aksi dan tidak menuntaskan permasalahan, justru dapat memicu permasalahan baru yang makin memperpanjang permasalahan.
	Jika maksud dari penangkapan dan pemidanaan adalah untuk membuat jera para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dan meredam aksi tersebut maka jelas maksud tersebut tidak akan tercapai, sebab aksi yang ada malah semakin besar, semakin kritis dan semakin berani.
	Kalau aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat diarahkan, diawasi dan dikendalikan secara aman, mengapa para aktivisnya harus ditangkap dan dipidanakan serta aksi tersebut harus dibubarkan, pertimbangan praktisnya, nanti aksi tersebut juga akan bubar dengan sendirinya, yang penting aksi tersebut jangan sampai merusak, menimbulkan kerusuhan, melakukan penjarahan dan kekacauan. Aparat keamanan dan ketertiban hanya melakukan pengamanan, pengawasan agar kondisi aksi menjadi terkendali.

Tabel disusun berdasarkan hasil penelitian.

## 2. Pertimbangan politis yang menyebabkan depenalisasi perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Pertimbangan *politis* merupakan sebuah bentuk pertimbangan yang lebih mengedepankan aspek-aspek kepentingan politik yang lebih menguntungkan berdasarkan kondisi yang nyata dan kemudahan-kemudahan tertentu yang memungkinkan untuk diterapkan dilapangan dan memberikan keuntungan politis tertentu. Pertimbangan ini merupakan bentuk pertimbangan pintas yang melihat adanya keuntungan untuk menerapkan komponen-komponen kepentingan politik tertentu untuk mencapai hasil yang lebih menguntungkan. Disatu-sisi pertimbangan politis ini merupakan bentuk sebuah pertimbangan yang mengabaikan keberadaan tata hukum atau pola normatif yang biasanya berlaku dan disisi lain pertimbangan *politis* ini hanya mengarah kepada usaha-usaha tertentu untuk mencapai kondisi dan tujuan yang dikehendaki<sup>109)</sup>.

Secara politis pertimbangan ini merupakan sebuah bentuk kebijakan yang muncul setelah melihat fenomena sosial yang ada serta memutuskan untuk melakukan sebuah upaya secara rasional berdasarkan komponen-komponen kepentingan politik yang mendukung diambilnya kebijakan tersebut.

Dalam menanggapi berbagai aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, para aparat keamanan dan ketertiban-pun mempertimbangkan untuk melakukan tindakan depenalisa

---

<sup>109)</sup> Bentuk pertimbangan ini merupakan bentuk pertimbangan kelanjutan dari pertimbangan-pertimbangan praktis-sosiologis yang mengacu kepada kondisi-kondisi empiris. Pada bentuk pertimbangan ini, aspek-aspek tekanan politik lebih dominan sehingga dijadikan bentuk pertimbangan politis. Dari sebuah fenomena sosial maka akan segera ditafsirkan aspek-aspek politik mana yang mendukung terhadap sebuah tindakan dan aspek-aspek politik mana yang sebaiknya dihindari. Dalam aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, maka aspek keterbukaan dan HAM sedang disoroti, sehingga untuk melakukan tindakan-tindakan represif baik melalui hukum maupun secara fisik, akan mengundang sorotan negatif terhadap penguasa. Dari bentuk pertimbangan praktis-sosiologis dan politis, maka pertimbangan akan berkembang menuju bentuk-bentuk pertimbangan hukum.

si dengan beberapa bentuk pertimbangan secara *politis* berdasarkan *kondisi-kondisi politik* yang menunjang pertimbangan tersebut<sup>110)</sup>.

Tindakan *depenalisasi* terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi secara *politis* dilandasi pemikiran-pemikiran tertentu yang mendasarkan kepada komponen kepentingan politik yaitu, berupa adanya tekanan atau pertimbangan non hukum yang didahulukan untuk kepentingan *politis* berikutnya.

Pertimbangan *politis* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan politik mengemukakan bahwa ketika terjadinya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi isu keterbukaan dan demokratisasi sedang menjadi sorotan banyak pihak, sehingga berbagai bentuk tekanan politik, intimidasi, penculikan, penangkapan dan pemidanaan kepada para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat memberikan citra yang lebih buruk bagi aparat keamanan dan ketertiban, serta bagi penguasa itu sendiri<sup>111)</sup>.

Pertimbangan *politis* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan politik mengemukakan bahwa penindakan, penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ketika mengadakan aksi untuk mengemukakan pendapatnya dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM oleh penguasa kepada masyarakatnya. Ini menunjuk-

---

110) Kondisi-kondisi politik yang penulis maksudkan ialah selain realita politik yang muncul dilapangan, penulis juga melakukan penafsiran terhadap realita-realita politik tersebut, untuk mencari makna dari perbuatan, atau tindakan yang terjadi. Kondisi-kondisi empiris seringkali hanya memunculkan sebuah realita yang hanya nampak pada sisi luarnya saja, namun untuk dapat memahaminya maka makna dibalik realita yang muncul itulah yang seharusnya digunakan sebagai bahan-bahan pertimbangan. Oleh karena itulah, kondisi empiris yang penulis maksudkan ialah realita politik yang nyata benar-benar terjadi, serta makna-makna yang ada di balik realita tersebut, atau makna-makna sosial yang berada di balik realita tersebut.

111) Realita menunjukkan bahwa banyaknya tekanan-tekanan non hukum yang mempengaruhi hukum menimbulkan pelaksanaan hukum mengikuti kepentingan politik itu sendiri. Misalnya saja ketika terjadi penculikan dan intimidasi, maka perbuatan tersebut diisyaratkan bertentangan dengan HAM dan demokratisasi. Oleh karena itulah maka bentuk tindakan penangkapan atau pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang melakukan gerakan aksi akan makin menambah tekanan-tekanan secara *politis* kepada penguasa, terutama dalam hal untuk memabangun kembali citra penguasa yang sudah terpuruk.

kan bahwa tekanan politik tertentu khususnya di bidang Hak Asasi Manusia telah dijadikan pertimbangan *politis* untuk tidak melakukan penangkapan, penahanan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dalam kondisi-kondisi tertentu<sup>112)</sup>.

Pertimbangan *politis* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan politik mengemukakan bahwa penindakan, penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi secara *politis* kurang menguntungkan dalam mengembalikan kondisi politik dan makin mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Ini menunjukkan bahwa kepentingan politik penguasa untuk memperoleh kembali kepercayaannya dari masyarakat masih dibutuhkan. Seandainya penguasa kembali menangkap dan memidanakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, yang jelas-jelas menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat, maka penguasapun akan kembali kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya. Penindakan, penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi secara *politis* kurang menguntungkan, karena secara faktual masyarakat mendukung aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut<sup>113)</sup>.

Pertimbangan *politis* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan politik mengemukakan bahwa timbulnya aksi

---

<sup>112)</sup> Realita menunjukkan bahwa pertimbangan *politis* juga memperhitungkan bentuk tekanan-tekanan dari aspek HAM, sehingga bila dilakukan penahanan atau pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang hanya berbeda pendapat atau terseberangan dengan penguasa akan menambah citra buruk bagi penguasa. Pada dasarnya tekanan-tekanan HAM inilah yang banyak dipertimbangkan dalam pertimbangan *politis*. Citra aparat keamanan dan ketertiban yang memang seringkali diaprioritaskan melanggar HAM akan membaik bila tidak melakukan penahanan atau pemidanaan sebaliknya bila aparat keamanan dan ketertiban melakukan penahanan atau pemidanaan maka justru bertambah buruknya citra mereka di mata masyarakat.

<sup>113)</sup> Realita menunjukkan bahwa upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat merupakan hal yang teramat sulit, sebab masyarakat sudah terlalu sering dibohongi, dipecundangi dan dijadikan kambing hitam dari segala permasalahan, sehingga keuntungan *politis* yang diambil dari tindakan depenalisasi para aktivis gerakan mahasiswa ini adalah mencoba membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparatnya.

gerakan mahasiswa pro-reformasi adalah sangat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan politik dalam negeri yang saat itu menunjukkan kondisi yang makin tidak menentu. aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi secara teknis merupakan bentuk reaksi dari berbagai ketimpangan serta penyimpangan perekonomian, politik, hukum dan kekuasaan, sehingga tindakan penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut bukanlah hal yang baik atau tepat atau menguntungkan untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan politik dalam negeri, tetapi justru akan makin memperparah keadaan<sup>114)</sup>.

Pertimbangan *politis* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan politik mengemukakan bahwa timbulnya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi sangat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan politik dalam negeri, sehingga aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut tidaklah dapat disamakan begitu saja dengan bentuk-bentuk perbuatan kriminal biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Karena aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut muncul sebagai bentuk perwujudan keperdulian mahasiswa terhadap masyarakatnya. Oleh karena itulah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *politis* tertentu dianggap kurang tepat dan kurang bijaksana jika melakukan penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, karena akan makin

---

<sup>114)</sup> Realita menunjukkan bahwa aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi bukan lahir tanpa sebab yang tidak berarti. Gerakan mahasiswa lahir sebagai sebuah bentuk keprihatinan atas kondisi sosial-politik, perekonomian, hukum dan kekuasaan, sehingga adalah sangat tidak tepat atau sangat tidak bijaksana untuk membungkam suara-suara kritis tersebut, selama tidak melakukan kerusakan, kekacauan dan kerusuhan yang menyebabkan penjarahan. Pola penanganan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dilakukan secara represif akan menimbulkan antipati terhadap Aparat maupun Penguasa, disamping itu pula dipertimbangkan bahwa penangkapan dan penahanan serta pemidanaan para aktivis tersebut tidak akan mengembalikan kondisi perekonomian, sosial politik, hukum dan kekuasaan kesediakalanya, tetapi dapat berakibat yang lebih buruk lagi.

mengurangi simpati masyarakat, disamping kurang tepat dan kurang bijaksana pula jika memperlakukan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut seperti para kriminal atau penjahat<sup>115</sup>).

Pertimbangan *politis* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan politik memunculkan pertimbangan *politis* yang lebih mengedepankan pandangan bahwa peserta aksi gerakan pro-reformasi secara mayoritas adalah mahasiswa, sehingga sangat tidak pada tempatnya memperlakukan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut sebagai musuh yang harus dihancurkan (*sebagaimana doktrin dan konsep pendekatan militeristik*), atau sebagai penjahat yang harus ditangkap dan dipidana (*sebagaimana doktrin dan konsep pendekatan Polri sebagai aparat penegak hukum*). Oleh karena itulah konsep pengamanannya lebih ditekankan kepada pola pengamanan yang preventif, yaitu hanya sekedar melakukan pengawasan, pengendalian massa, selama tidak melakukan tindak kriminal yang menyebabkan kerusuhan, kekacauan massa dan penjarahan<sup>116</sup>).

Untuk lebih memudahkan dalam memahami Pertimbangan *politis* yang menyebabkan *depenalisasi* perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, secara *komponensial* pertimbangan *politis* tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

---

<sup>115</sup>) Realita menunjukkan bahwa para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi bukanlah 'sosok musuh' yang harus dihancurkan, dan bukan pula 'sosok penjahat' yang harus ditangkap, ditahan atau dipidana. Oleh karena itulah sangat tidak pada tempatnya apabila pola penanganan terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi disamakan dengan pola penanganan pengamanan gaya 'militer' yang menghadapi para aktivis tersebut bagai menghadapi musuh, atau mengikuti pola penanganan pengamanan gaya Polri yang menghadapi para aktivis tersebut bagai menghadapi penjahat atau kriminal.

<sup>116</sup>) Realita menunjukkan apabila pola penanganan pengamanannya dilakukan secara preventif dan berusaha mengikuti jalannya aksi tersebut secara damai, maka bentrokan-bentrokan fisik yang seharusnya tidak terjadi dapat dihindarkan. Seringkali arogansi aparat masih saja terlihat dan sikap emosional serta apriori dari mahasiswa terhadap aparatnya-pun masih tambak. Ini tidak lain dari hasil interaksi beratus-tahun alamnya anatar aktivis gerakan mahasiswa dengan aparat keamanan dan ketertiban yang selalu berada dalam sisi yang berhadapan, sehingga untuk mengubah kebiasaan tersebut sudahlah teramat sulit, walaupun bukan berarti tidak bisa, namun masih dapat diusahakan.

Tabel 15. Pertimbangan politis yang menyebabkan *depenalisasi* perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi

Pertimbangan	Bentuk pertimbangan
Politis	Isu keterbukaan dan demokratisasi sedang menjadi sorotan banyak pihak, sehingga penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat memberikan citra yang lebih buruk bagi aparat keamanan dan ketertiban, serta bagi penguasa itu sendiri.
	Penindakan, penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ketika mengadakan aksi untuk mengemukakan pendapatnya dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM oleh penguasa kepada masyarakatnya.
	Penindakan, penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi secara politis kurang menguntungkan, karena akan makin mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya.
	Penindakan, penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi secara politis kurang menguntungkan, karena secara faktual masyarakat mendukung aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut.
	Timbulnya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan politik dalam negeri yang makin tidak menentu, sehingga penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut bukanlah hal yang menguntungkan untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan politik, tetapi justru akan makin memperparah keadaan.
	Timbulnya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan politik dalam negeri, sehingga perbuatan aksi tersebut tidak dapat disamakan dengan perbuatan kriminal biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, karena muncul sebagai bentuk perwujudan kepedulian terhadap masyarakat.
	Muncul pertimbangan politis yang lebih mengedepankan pandangan bahwa peserta aksi adalah mahasiswa, sehingga tidak pada tempatnya memperlakukan mahasiswa tersebut sebagai musuh yang harus dihancurkan (militer), atau sebagai penjahat yang harus ditangkap dan dipidana (Polri).

Tabel disusun berdasarkan hasil penelitian.



### 3. Pertimbangan hukum yang menyebabkan depenalisasi perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Pertimbangan *hukum* merupakan sebuah bentuk pertimbangan yang lebih mengedepankan aspek-aspek kepentingan hukum yang lebih menguntungkan berdasarkan kondisi yang nyata dan kemudahan-kemudahan tertentu yang memungkinkan untuk diterapkan dilapangan dan memberikan keuntungan bagi hukum itu sendiri. Keuntungan bagi hukum dapat diperoleh melalui bentuk-bentuk pertimbangan secara hukum yang mengacu kepada tujuan yang hendak dicapai atau manfaat apa yang dapat diambil dari tindakan tersebut<sup>117)</sup>.

Secara hukum pertimbangan ini merupakan sebuah bentuk kebijakan yang muncul setelah melihat fenomena sosial yang ada serta memutuskan sebuah upaya secara rasional berdasarkan komponen-komponen kepentingan hukum yang mendukung diambilnya tindakan tersebut.

Dalam menanggapi berbagai aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, para aparat keamanan dan ketertiban-pun mempertimbangkan untuk melakukan tindakan *depenalisasi* dengan beberapa bentuk pertimbangan secara hukum

---

117) Bentuk pertimbangan ini merupakan bentuk pertimbangan yang dilakukan setelah melihat pertimbangan-pertimbangan praktis-sosiologis dan politis. Dari kedua pertimbangan sebelumnya, maka langkah-langkah apakah yang akan ditempuh oleh hukum ditentukan oleh pertimbangan sebelumnya dan dalam pertimbangan hukum ini. Dalam pertimbangan hukum, lebih diutamakan pemikiran-pemikiran yang mengedepankan bentuk kepentingan hukum atau kepentingan masyarakat, manakah yang akan lebih didahulukan. Walaupun hukum sedapat mungkin bersifat obyektif, namun didalam keobyektifan tersebut tetap saja tersembunyi hal-hal yang subyektif. Oleh karena itulah sisi subyektif dalam keobyektifan mencoba mengedepankan sebuah tindakan berdasarkan keuntungan-keuntungan yang diperkirakan akan diperolehnya, dalam hal ini tindakan Depenalisasi tersebut merupakan bentuk tindakan yang mendahulukan kepentingan hukum demi keuntungan hukum ataukah bentuk tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat demi keuntungan hukum. Sebab pada dasarnya dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tercermin pula pertimbangan praktis-sosiologis dan politis yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat demi keuntungan hukum itu sendiri, walaupun pada prakteknya terlihat bahwa tindakan depenalisasi seakan-akan mengesampingkan legalitas hukum dan kepentingan hukum. Namun walaupun demikian tindakan depenalisasi selain dilakukan demi dan memperhatikan kepentingan masyarakat, maka sebenarnya tindakan tersebut dilakukan dengan dasar pemikiran hukum dan doktrin yang jelas, bukan hanya sekedar mengesampingkan pemidanaan tetapi juga dilandasi oleh doktrin-doktrin hukum pidana yang menunjang.

berdasarkan *kondisi-kondisi yuridis* yang menunjang pertimbangan tersebut<sup>118)</sup>.

Tindakan *depenalisasi* terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi secara hukum dilandasi pemikiran-pemikiran tertentu yang mendasarkan kepada komponen kepentingan masyarakat yaitu, berupa adanya tekanan atau pertimbangan non hukum untuk mendahulukan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan hukum itu sendiri.

Pertimbangan *hukum* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan masyarakat mengemukakan bahwa hukum memang telah mengisyaratkan untuk mengatur dan menertibkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun jika ada penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sebagai upaya penegakan hukum represif, atau upaya menegakan hukum positif untuk memenuhi ketentuan kepastian hukum positif, maka sebenarnya tujuan dari hukum untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keteraturan justru sulit untuk dicapai. Mengapa, karena dari tindakan hukum itu sendiri justru dapat memicu rasa ketidakpuasan, dapat memulai gelombang massa yang menentang penerapan hukum tersebut, bahkan dapat memicu munculnya berbagai kerusakan atau permasalahan yang lebih besar<sup>119)</sup>.

---

118) Kondisi-kondisi yuridis yang penulis maksudkan adalah pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dihasilkan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan praktis-sosiologis dan politis, kemudian mencoba melihat keadaan-keadaan yuridis mana yang lebih menguntungkan jika diambil sebuah tindakan tertentu. Keadaan yang lebih menguntungkan tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah keadaan yang memenuhi kepentingan masyarakat demi keuntungan hukum, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian berikutnya.

119) Realita menunjukkan bahwa hukum memang diakui sebagai sarana untuk menjaga ketertiban antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, badan hukum dengan negara dan orang dengan negara. Namun disisi lain juga harus diakui bahwa secara realita pula bahwa terkadang penerapan hukum terhadap sebuah permasalahan terkadang justru makin membuat rumit permasalahan tersebut dan makin jauh dari rasa keadilan yang sebenarnya. Pada dasarnya hukum memang diciptakan untuk menjaga dan mengatur konflik-konflik yang timbul di masyarakat, akan tetapi jika konflik-konflik tersebut justru muncul dari adanya penerapan hukum, atau timbulnya konflik yang lebih besar dari penerapan hukum yang bermaksud mengatur dan menyelesaikan konflik, maka hukum itu telah menjauhkan diri dari rasa keadilan yang sebenarnya ingin diciptakan oleh hukum itu sendiri. Demikian pula dalam tindakan depenalisasi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ini, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka diharapkan penyelesaian konflik dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dapat dilakukan tanpa harus menciptakan konflik yang lebih besar lagi.

Pertimbangan *hukum* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan masyarakat mengemukakan bahwa dalam sebuah permasalahan yang banyak melibatkan unsur-unsur sosial non hukum, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penal untuk mentuntaskan permasalahan tersebut adalah kurang tepat dan kurang bijaksana. Dalam menghadapi aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang muncul sebagai sebuah reaksi terhadap berbagai ketimpangan dan penyimpangan perekonomian, politik, hukum dan kekuasaan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penal untuk menangkap dan memidanakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi agar mereka menjadi jera atau gerakan pro-reformasi tersebut menjadi terhenti adalah tidak tepat dan tidak bijaksana, bahkan tindakan penal tidak dapat menuntaskan permasalahan yang sebenarnya. Sebab pokok permasalahannya bukan pada aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, tetapi ada pada kondisi perekonomian, sosial politik, hukum dan kekuasaan<sup>120)</sup>.

Pertimbangan *hukum* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan masyarakat mengemukakan bahwa jika terjadi penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dengan menggunakan Pasal-pasal pidana yang biasa diterapkan kepada para aktivis gerakan

---

<sup>120)</sup> Realita menunjukkan bahwa penggunaan sarana penal untuk mengatasi sebuah permasalahan yang kompleks tidak akan tepat dan tidak akan menuntaskan permasalahannya. Penggunaan hukum pidana sifatnya bukanlah merupakan pengobatan secara kausalitas tetapi sekedar pengobatan simptomatik, sehingga dalam hal timbulnya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang sebenarnya merupakan sebuah reaksi terhadap sebab-sebab yang sangat kompleks penggunaan hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak akan mungkin mengatasi secara tuntas aksi gerakan mahasiswa tersebut. Disamping itu pula penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanganan mengandung sifat yang kontradiktif atau memiliki efek samping yang negatif. Atau dengan kata lain penggunaan hukum pidana secara paksa atau menyamaratakan setiap perbuatan harus ditindak dengan hukum pidana, akan membuat hukum pidana tersebut menjadi suatu ancaman utama (*prime threatener*). Oleh karena itulah penggunaan hukum pidana atau penerapan pasal-pasal tertentu kepada para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dipertimbangkan kurang tepat dan kurang bijaksana, karena sebab-sebab mereka melakukan aksi karena permasalahan yang sangat kompleks dari penguasa itu sendiri. Hal lain yang menjadi pertimbangannya adalah bahwa penggunaan hukum pidana untuk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi memerlukan sarana pendukung yang banyak dan bervariasi serta membutuhkan biaya yang tinggi.

mahasiswa, maka penggunaan pasal-pasal tersebutpun sudah cukup mengundang permasalahan. Penggunaan pasal-pasal pidana yang biasa digunakan untuk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa sendiri sudah dianggap sebagai pasal-pasal 'karet' yang bermasalah, sehingga apabila kembali digunakan dan diterapkan untuk menangkap dan memidanakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar bagi keberadaan hukum itu sendiri<sup>121)</sup>.

Pertimbangan hukum yang mendasarkan kepada komponen kepentingan masyarakat mengemukakan bahwa realita telah menunjukkan bahwa penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa tidak dapat menyurutkan langkah mahasiswa atau membuat jera mahasiswa, sehingga penggunaan sarana penal untuk menekan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi sangatlah tidak efektif. Realita ini menunjukkan bahwa penggunaan sarana penal dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sosial yang muncul dikarenakan sebab-sebabnya yang kompleks, tidak dapat menyelesaikannya secara tuntas<sup>122)</sup>.

---

121) Realita menunjukkan bahwa salah satu pencetus aksi tersebut adalah penggunaan pasal-pasal tertentu dalam hukum pidana yang 'terlalu karet' dalam penerapannya sehingga banyak sekali mengundang permasalahan, dan begitu mudah untuk diterapkan kepada orang-orang yang berbeda pendapat atau berseberangan paham dengan penguasa. Perjuangan dari para ahli hukum, praktisi hukum untuk mencoba menggugat keberadaan pasal tersebut sudah dilakukan sejak lama, dan keberadaan pasal-pasal tersebut seringkali dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan serta iklim keterbukaan dan demokratisasi. Penentangan terhadap pasal-pasal tertentu dalam KUHP sudah berlangsung sejak lama, bahkan karena penentangan itulah tidak sedikit aktivis-aktivis yang terjerat oleh pasal-pasal tersebut. Realita juga membuktikan bahwa penggunaan pasal-pasal tertentu yang bersifat karet, lebih berpihak kepada kepentingan penguasa, bukan bertujuan untuk melindungi kepentingan negara, sedangkan antara penguasa dan negara adalah berbeda. Balih yang diajukan untuk melakukan pemidanaan seringkali dibuat demi keamanan dan ketertiban stabilitas nasional, padahal dibalik itu semua hanya kepentingan-kepentingan tertentu yang hendak dilindungi. Dengan demikian penggunaan pasal-pasal tersebut sangat tendensius dan dapat menimbulkan permasalahan baru, sebelum permasalahan yang utama tersebut selesai dan dapat dituntaskan.

122) Realita menunjukkan bahwa untuk melakukan penangan pengamanan terhadap berbagai aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa, sudah diperlukan banyak personil aparat keamanan dan ketertiban untuk mengamankannya dan itupun perbandingan yang ideal antara aparat dengan aktivis sangatlah tidak berimbang. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa untuk melakukan penanganan secara hukum dibutuhkan personil tambahan yang lebih banyak lagi, perangkat hukum yang memadai dan biaya tambahan yang lebih tinggi. Padahal dengan diberlakukannya hukum secara prosedural-pun belum tentu akan menuntaskan permasalahan tersebut, sebab permasalahan tersebut memiliki akar-akar masalah yang sangat kompleks. Keefektifannya jelas tidak akan tercapai, aparat akan melakukan kerja dua kali, selain melakukan penanganan pengamanan mereka juga harus melakukan penanganan secara hukum, padahal disini lain dengan jumlah personil yang sangat terbatas, keterbatasan waktu dan biaya-pun sangatlah meng-

Pertimbangan *hukum* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan masyarakat mengemukakan bahwa konsep dasar dari pemidanaan adalah untuk 'membuat jera' atau 'melakukan sebuah perbaikan', baik bagi pelaku maupun bagi masyarakatnya. Tetapi dalam hal terjadinya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tidak akan mencapai tujuan yang sebenarnya dari pemidanaan, sehingga dari pemidanaan tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa bagi perbaikan. Baik perbaikan terhadap pelaku maupun perbaikan terhadap masyarakatnya, sebab awal terjadinya aksi tersebut bersumber pada kondisi perekonomian, politik, hukum dan kekuasaan, sehingga jika terjadi penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi bukan mentuntaskan permasalahan tetapi justru akan menimbulkan permasalahan dan beban baru yang lebih besar bagi hukum itu sendiri<sup>123</sup>).

Pertimbangan *hukum* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan masyarakat mengemukakan bahwa didalam hukum itu sendiri dimungkinkan atau dikenal adanya tindakan untuk tidak memproses, tidak menuntut atau tidak memidanakan seseorang berdasarkan kepentingan umum, yang dikenal dengan istilah *diskresi*, *hak oportunitas* dan *depena-*

---

hambat kerja mereka, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kerja yang sia-sia, serta pemborosan yang kurang bermanfaat, pertimbangan-pertimbangan tersebut dikemukakan secara tepat dengan dasar hukum yang memadai pula.

123) Realita menunjukkan bahwa berbagai bentuk pemidanaan yang dilakukan kepada seorang terpidana yang melakukan sebuah kejahatan berdasarkan keadaan ekonomi dan politik tanpa menyingkirkan aspek politik dan ekonomi yang menyebabkan ia menjadi terpidana tidak akan membantu banyak, atau membawa perubahan dan perbaikan kepada terpidana tersebut. Konsep dasar pembinaannya terletak pada bagaimana menyingkirkan sebab-sebab sosio politik dan sosio ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah aksi dan dari aksi tersebut karena dianggap sebagai kejahatan atau sebagai perbuatan yang menyimpang berdasarkan kaidah-kaidah hukum resmi (positif) maka ia menjadi terpidana. Hal inipun menunjukkan bahwa konstruksi pemahaman seseorang terhadap kejahatan bergantung kepada konsepsi mana yang ia anut, konsep positivis atukah konsep sosiologis. Oleh karena itulah, pertimbangan untuk tidak melakukan penahanan, atau pemidanaan terlihat juga dalam bentuk pertimbangan berdasarkan kemanfaatan dan pola pembinaan itu sendiri.

*lisasi*, sehingga penyimpangan untuk tidak memproses, tidak menuntut atau tidak memidanakan seseorang atas perbuatannya-pun dapat secara hukum memiliki landasan dan demi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dapat dibenarkan<sup>124)</sup>.

Pertimbangan *hukum* yang mendasarkan kepada komponen kepentingan masyarakat mengemukakan bahwa dalam keadaan yang memaksa manakala sebuah aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi sudah berubah menjadi aksi massa yang menjurus kepada kerusuhan dan kebrutalan massa, penangkapan dan pemidanaan terhadap para pelaku aksi yang bersikap brutal atau membahayakan keadaan diri sendiri dan orang lain tetap dapat diberlakukan, namun itupun hanya sebagai upaya penal terakhir dari penindakan secara hukum represif<sup>125)</sup>.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami Pertimbangan hukum yang menyebabkan *depenalisasi* perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, secara *komponensial* pertimbangan *hukum* tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

---

<sup>124)</sup> Realita menunjukkan bahwa didalam hukum sendiri memang tersedia sarana yuridis untuk melakukan penyimpangan, untuk tidak memproses sebuah perkara demi kepentingan umum yang biasa dikenal dengan sebutan 'diskresi', hak oportunistas, dan depenalisasi. Penggunaan sarana yuridis tersebut dalam beberapa hal telah digunakan, sehingga dalam hal-hal tertentu yang memang mendesak dan demi kepentingan umum seringkali sarana untuk tidak memidanakan, tidak memproses atau tidak menuntut digunakan. Namun realita juga menunjukkan bahwa sarana-sarana hukum ini sering juga digunakan untuk meligitimasi kebijakan tertentu yang keliru, menutupi perbuatan-perbuatan tertentu yang keliru bahkan kejahatan-kejahatan tertentu. Dalam beberapa aksi gerakan mahasiswa sarana hukum ini jarang sekali digunakan, atau bahkan tidak pernah sama sekali, hanya baru kali inilah (dalam aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi) sarana hukum untuk tidak memidana, memproses atau menuntut digunakan.

<sup>125)</sup> Dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan digunakan sarana hukum untuk melakukan tindakan represif, maka hukum-pun tetap digunakan namun dalam bentuk-bentuknya yang terbatas dan dilakukan sebagai upaya terakhir dari berbagai upaya yang ada. Hal ini dipertimbangkan apabila dalam kondisi yang mendesak dan menuntut adanya kewibawaan hukum. Realita juga menunjukkan bahwa hal penagamanan terhadap degung DPR MPR atau sarana-sarana umum dan vital lainnya, saran represif tetap dibenarkan oleh hukum, karena hal itu juga berkaitan dengan penjagaanaan dan pengamanan kepentingan umum juga dari hal hal yang dapat merusaknya.

Tabel 16. Pertimbangan hukum yang menyebabkan *depenalisasi* perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Pertimbangan	Bentuk pertimbangan
Hukum	Jika ada penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, maka tujuan dari hukum untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keteraturan itu tidak akan tercapai karena dari tindakan hukum tersebut dapat memicu permasalahan yang lebih besar.
	Dalam menghadapi aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penal tidak akan menuntaskan permasalahan yang sebenarnya.
	Penggunaan pasal-pasal pidana yang biasa digunakan untuk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa sendiri sudah dianggap sebagai pasal-pasal 'karet' yang bermasalah, sehingga apabila kembali diterapkan untuk menangkap dan memidanakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi.
	Realita telah menunjukkan bahwa penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa tidak dapat menyurutkan langkah mahasiswa atau membuat jera mahasiswa, sehingga penggunaan sarana penal untuk menekan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi tidaklah efektif.
	Penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi bukan merupakan tujuan yang sebenarnya, sehingga dari pemidanaan tersebut tidak menghasilkan apa-apa bagi perbaikan, tetapi justru menimbulkan permasalahan dan beban baru bagi hukum.
	Didalam hukum sendiri dikenal adanya kebijakan untuk tidak memproses, tidak menuntut atau tidak memidanakan seseorang berdasarkan kepentingan umum, yang dikenal dengan istilah diskresi, hak oportunitas dan <i>depenalisasi</i> , sehingga penyimpangan untuk tidak memproses, tidak menuntut atau tidak memidanakan seseorang atas perbuatannya-pun dapat dibenarkan.
	Penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tetap diberlakukan, namun hanya sebagai upaya penal terakhir dari penindakan secara hukum.

Tabel disusun berdasarkan hasil penelitian.

#### D. Pengaruh-pengaruh Non Hukum Yang Mempengaruhi *Depenalisasi* Perbuatan Para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi

Realitas sosial menunjukkan bahwa keberadaan gerakan mahasiswa selalu cenderung untuk dicurigai dan diwaspadai sebagai sebuah bentuk gerakan massa yang menyimpang (*deviant*). Aparat keamanan dan ketertiban pada masa Orde Baru yang menangani langsung gerakan massa dan dilakukan oleh mahasiswa terlihat lebih banyak melakukan tindakan represif, tanpa melihat akar permasalahan yang sebenarnya mengapa gerakan massa itu timbul. Aparat keamanan dan ketertiban melihat bahwa gerakan massa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai sebuah realita yang menyimpang, sehingga mereka beranggapan perlu melakukan penanganan pengamanan yang lebih represif<sup>126</sup>).

Namun realitas yang berbeda muncul ketika menjelang timbulnya gelombang reformasi, dimana penanganan pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban adalah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban ketika masih dalam masa Orde Baru. Dari segi perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa Pro-reformasi, secara riil adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa ketika masa Orde Baru, bahkan dalam kondisi reformasi ini terlihat perbuatan dan tindakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut lebih '*berani*' dan '*lebih menentang*'. Sedangkan dari segi formalnya perbuatan dan

---

<sup>126</sup>) Namun apakah benar realitas sosial tersebut menunjukkan akar permasalahan yang sebenarnya, sebab selama ini orang lebih banyak melihat aksi yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan ketimbang menemukan, memahami dan menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya. Untuk memahami realitas sosial tersebut, maka bentuk pemahaman terhadap aspek hukum saja tidaklah cukup dapat untuk menjelaskan secara mendasar realita yang ada. Oleh karena itulah diperlukan bentuk pemahaman baru yang melibatkan aspek-aspek ilmu sosial lainnya, dalam upaya menjelaskan realitas sosial yang ada secara lebih mendalam. Dalam kajian ini, disamping bidang ilmu hukum, hukum pidana, kriminologi dan sosiologi hukum (pidana) penulis menggunakan pemahaman dari bidang ilmu politik, ekonomi, budaya, psikologi sosial, sejarah dan bidang-bidang lainnya yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan.



tindakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disyaratkan dalam berbagai pasal yang biasa diterapkan kepada para aktivis gerakan mahasiswa, yang bersikap kritis atau oposan di masa Orde Baru.

Fenomena menunjukkan bahwa ada dua realita yang serupa tetapi mendapatkan dua macam penanganan hukum yang berbeda. Dari kedua realita tersebut, dimana terjadi aksi gerakan mahasiswa yang serupa namun mendapatkan realita penanganan hukum yang berbeda. Dari kedua realita tersebut dicoba untuk melihat dan membandingkan pengaruh-pengaruh apakah yang mempengaruhi timbulnya dua macam penanganan hukum yang berbeda terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut.

Untuk mengetahui dan memahami pengaruh-pengaruh apakah yang membuat timbulnya penanganan hukum yang berbeda terhadap dua realita yang sama namun terjadi dalam periode yang berbeda, selain melakukan pengkajian dibidang hukum, diperlukan juga bantuan dari ilmu-ilmu sosial non hukum lainnya agar kajian yang dilakukannya menjadi lebih integral dan komprehensif.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick keberadaan ilmu hukum selalu memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai disiplin ilmu. Konsep abstrak tentang kewajiban hukum juga berbicara mengenai perbedaan pemahaman tentang bagaimana hukum itu bekerja dan bagaimana hukum itu digunakan. Pandangan filosofi (*termasuk didalamnya kritik terhadap positivisme*) dan rangkaian analisis (*termasuk didalamnya perbedaan antara peraturan dan prinsip-prinsip yang digunakan*) adalah sarana implisit untuk melakukan diagnosa terha-

dap kesulitan-kesulitan yang timbul dan menimpa hukum<sup>127)</sup>.

Solusi yang dilontarkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick untuk membuat ilmu hukum menjadi lebih relevan dan lebih hidup, ialah dengan melakukan reintegrasi antara hukum, politik dan berbagai teori dalam ilmu sosial lainnya. Dalam tahapan ini, kita harus memperhatikan masalah-masalah hukum ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan sosial. Kemudian untuk memahaminya kita mengajukan kerangka kerja dengan membandingkan masing-masing penalaran tersebut (*penalaran dari bidang hukum dan penalaran dari bidang ilmu sosial yang di-reintegrasikan*) untuk melakukan analisis mencari alternatif terhadap permasalahan yang ada<sup>128)</sup>.

Ilmu sosial yang banyak membantu ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam upayanya melakukan pendekatan dan memahami sebuah perilaku yang menyimpang tidak lain adalah sosiologi dan kriminologi. Namun sejauh mana sosiologi dan kriminologi itu dapat difungsikan sesuai kebutuhan tergantung pada penggunaan sosiologi dan kriminologi tersebut, serta dari sudut pandang sosiologi dan kriminologi yang mana yang digunakan untuk menganalisis perilaku yang menyimpang tersebut secara tepat dan mendekati.

Perkembangan kajian kriminologi, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan hukum pidana dan sosiologi hukum itu sendiri. Seiring perjalanannya kriminologi, hukum

---

<sup>127)</sup> Ini bukan berarti bahwa teori hukum yang ada tidak mampu menjelaskan terhadap berbagai permasalahan dan realitas sosial. Tetapi apabila kita mau melihat bagaimana hukum itu bekerja, maka kita juga harus memahami bagaimana proses hukum itu terjadi, dimana hukum itu dibuat dalam sebuah masyarakat dan dalam kondisi yang bagaimana hukum tersebut dicetuskan.

<sup>128)</sup> Pengkajian secara interdisipliner membuat sebuah kajian akan memiliki sebuah analisis yang komprehensif. Ia tidak hanya terpaku pada satu disiplin dan satu pisau analisis saja, tetapi ia akan selalu mengkaitkannya dengan berbagai disiplin ilmu dalam bidang yang berkaitan, sehingga kajian yang dihasilkannya akan menjadi semakin komprehensif dan terintegrasi. Pengkajian secara interdisipliner membuat kajian hukum pidana dan kriminologi menjadi kehilangan batasan-batasannya yang baku. Ia tidak lagi mengkaji hukum dan kriminologi secara normatif namun berkembang kearah pemahaman yang komprehensif serta integral. Komprehensif karena ia mencoba melakukan pemaduan analisis dari berbagai bidang ilmu yang terkait, integral karena kajian yang dilakukannya menyatukan dan saling melengkapi berbagai disiplin ilmu untuk mengupas obyek yang akan diteliti dan dianalisis.

pidana dan sosiologi hukum memiliki lahan kajian yang saling berkaitan, sehingga tidaklah mengherankan apabila dengan memfungsikan keberadaan ketiga kajian ini secara komprehensif dan integral diharapkan mendapat sebuah pemahaman yang jauh lebih mendekati kepada sebuah kebutuhan senyatanya dan realita yang ada<sup>129)</sup>.

Pengkajian yang interdisipliner membuat kajian ini menyertakan pula keikutsertaan aspek politik sebagai sebuah aspek yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Aspek politik akan ditunjukkan memiliki pengaruh secara timbal balik terhadap sesuatu hal yang menyebabkan sebuah perilaku menjadi menyimpang. Sebaliknya pula perilaku yang menyimpang akan memiliki pengaruh terhadap keberadaan kondisi politik yang ada<sup>130)</sup>.

Dalam sebuah periode, khususnya di masa Orde Baru, keberadaan gerakan mahasiswa (*dalam bentuk apapun*) telah mendapatkan sebuah '*stigma*' yang kurang baik. Stigma tersebut telah diberikan baik melalui lembaga formal yaitu lembaga peradilan melalui berbagai putusannya yang memvonis para aktivis gerakan mahasiswa dengan pasal-pasal KUHP dan pasal-pasal diluar KUHP, maupun stigma yang diberikan secara informal kepada para aktivis gerakan mahasiswa secara kese-

---

<sup>129)</sup> Mulyana W Kusumah, 'Realitas Sosial Kejahatan', dalam *Prisma: Manusia dan Kejahatan*, 5 Mei 1982, LP3ES, Jakarta, hal. 3-9, ia mengutip pendapatnya William J. Chambliss bahwa "kejahatan adalah gejala hukum, politik, ekonomi dan sosial yang benar-benar kompleks yang harus sistematis dipelajari dari banyak segi". Banyak orang dan masyarakat awam memandang bahwa penggunaan sosiologi dan kriminologi tidak lebih hanya sebagai alat bantu dalam sebuah skema besar analisis. Ia hanya berfungsi bila difungsikan dan diperlukan keberadaannya, padahal diluar itu semua, sebenarnya kerangka pemikiran sosiologi dan kriminologi yang ada senantiasa bekerja untuk selalu melakukan analisis. Bahkan apabila difungsikan secara tepat dan benar, maka hasil yang akan diperoleh akan jauh lebih tajam.

<sup>130)</sup> Dengan pengkajian yang interdisipliner, maka pengkajian terhadap fenomena sosial yang ada akan menjadi semakin tajam, ia tidak hanya akan memberikan penjelasan teoritik terhadap perilaku menyimpang yang 'nampak dipermukaan' tetapi mencoba mencari dan memahami 'akar permasalahan' yang sebenarnya agar dapat dipahami dan dapat dengan segera ditemukan pemecahannya. Penggunaan ilmu sosial lainnya sebagai upaya untuk membantu memahami proses bekerjanya hukum dapat dilakukan dengan bantuan sosiologi atau sosiologi hukum. Sosiologi hukum pidana digunakan untuk menjelaskan tentang keberadaan sebuah '*legal order*' dan pembentukannya. Dengan menggunakan pemahaman konstruksi sosial yang ditemukannya dari pendekatan etnometodologis, maka sosiologi hukum pidana mampu menjelaskan tentang bagaimana sebuah peraturan yang ada dalam hukum pidana tersebut dibuat dan dikonstruksikan oleh penguasa sebagai sebuah kenyataan yang mengikat.

luruhan bahwa mereka adalah orang-orang yang patut diawasi dan diwaspadai. Kondisi ini membentuk sebuah realita bahwa keberadaan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut dengan semua perilakunya dikonstruksikan sebagai sebuah kejahatan, dan karena rata-rata para aktivis tersebut bergerak di bidang politik (*praktis*), stigma kejahatan tersebut-pun mengenai kepada mereka sebagai orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan politik<sup>131</sup>).

Tentang latar belakang konsep teoritik kejahatan, **Chambliss** mengemukakan bahwa kejahatan atau bukan kejahatan berasal dari anggapan orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi kelompok dominannya. *Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan yang berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakat*<sup>132</sup>).

Pandangan kriminologi kritis terhadap kejahatan ialah bahwa kejahatan merupakan hasil dari konstruksi sosial, ini berarti bahwa manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dikonstruksikan tersebut adalah telah melakukan sebuah kejahatan. Kriminologi kritis melihat bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah sebuah fenomena yang berdiri sendiri atau sebagai *'sesuatu yang*

---

131) Proses pengkonstruksian perilaku, perbuatan dan tindakan para aktivis tersebut sebagai kejahatan politik, tidak lepas dari pengaruh kekuasaan yang ada pada saat itu. Dimana kekuasaanlah yang mengendalikan hukum serta politik sehingga stigma tersebut diakui atau dianggap benar dalam realitanya. Konsep ini mengutarakan bahwa bentuk apapun kejahatan yang dikemukakan oleh penguasa tidak lepas dari pengaruh politik dan kepentingan yang hendak dipertahankan, oleh karena itulah dalam masa Orde Baru dapat dilihat bahwa kepentingan politik dan ekonomi berada diatas hukum, atau hukumlah yang menjadi dasar untuk melegitimasi perbuatan penguasa. Lihat juga tesis **Arief Awaludin**, tentang *Stigmatisasi Gerakan Pro-Demokrasi*, *Loc.cit.*

132) **Edwin M. Schur** juga melihat bahwa kejahatan dan pelanggaran yang ada tidak lain merupakan hasil penilaian yang dituangkan sebagai sebuah produk politik terhadap fenomena sosial. Ada beberapa public policy yang ikut serta mendasari mengapa sebuah perbuatan tertentu menjadi sebuah perbuatan jahat dan perbuatan lainnya tidak menjadi perbuatan jahat. Menurut **Schur** semua ini diformulasikan, dihasilkan dan kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan tentang kebijakan publik yang mengikat. Dimana public policy yang dikeluarkan itu juga tidak lain merupakan produk dari pemegang kekuasaan sebagai hasil konflik diantara masyarakat sebagai sarana untuk mengatur keberadaan masyarakat (*politically organized society*).

*jatuh dari langit* begitu saja, tetapi melalui rumusan-rumusan tertentu yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang tercela atau menyimpang. Sedangkan proses pengkonstruksian itu sendiri bukannya sepi dari pengaruh-pengaruh non hukum, tetapi meliputi banyak pengaruh yang memiliki kepentingan di atasnya<sup>133</sup>).

Setelah memahami dasar pemikiran yang dikemukakan di atas, untuk mengkaji pengaruh-pengaruh non hukum apa sajakah yang menyebabkan dilakukannya tindakan *depenalisasi* terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, sudah menjadi kebutuhan pula untuk menggunakan ilmu-ilmu sosial lainnya dalam mengkaji secara integral dan komprehensif terhadap fenomena tersebut.

Hasil dari pemahaman atas realita sosial yang ada, serta upaya untuk menafsirkannya berdasarkan berbagai sumber informasi yang diperoleh serta melakukan klasifikasi komponen secara rinci. Pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi *depenalisasi* terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut secara *komponensial* dikemukakan dalam bentuk preposisi sebagai berikut:

**Preposisi 1:** *Pengaruh kekuasaan di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer di masa Orde Baru.*

**Preposisi 2:** *Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa di masa Orde Baru.*

---

<sup>133</sup>) Dengan pemahaman tersebut, **Mardjono Raksodiputro** melihat bahwa pemahaman kritis akan membawa pemahaman baru dalam memahami konstruksi kejahatan yang ada. Pendekatan interaksionis akan membawa kita kepada pemahaman untuk melihat bagaimana sebuah kejahatan atau penjahat itu diberi sebuah label atau cap jahat, sedangkan pendekatan konflik akan membawa kita kepada pemahaman bahwa bagi mereka yang memiliki kekuasaan (*power*) yang lebih besar (*dominant class, ruling class, powerful*) akan memiliki kemudahan dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya, sebagai sebuah perilaku yang perlu untuk segera diancam dengan pidana atau dikatakan sebagai sebuah kejahatan. Tindakan ini menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari pemegang kuasa yang harus dilindungi demi kepentingannya.

Preposisi 3: *Pengaruh perubahan sosial di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer Menjelang era reformasi.*

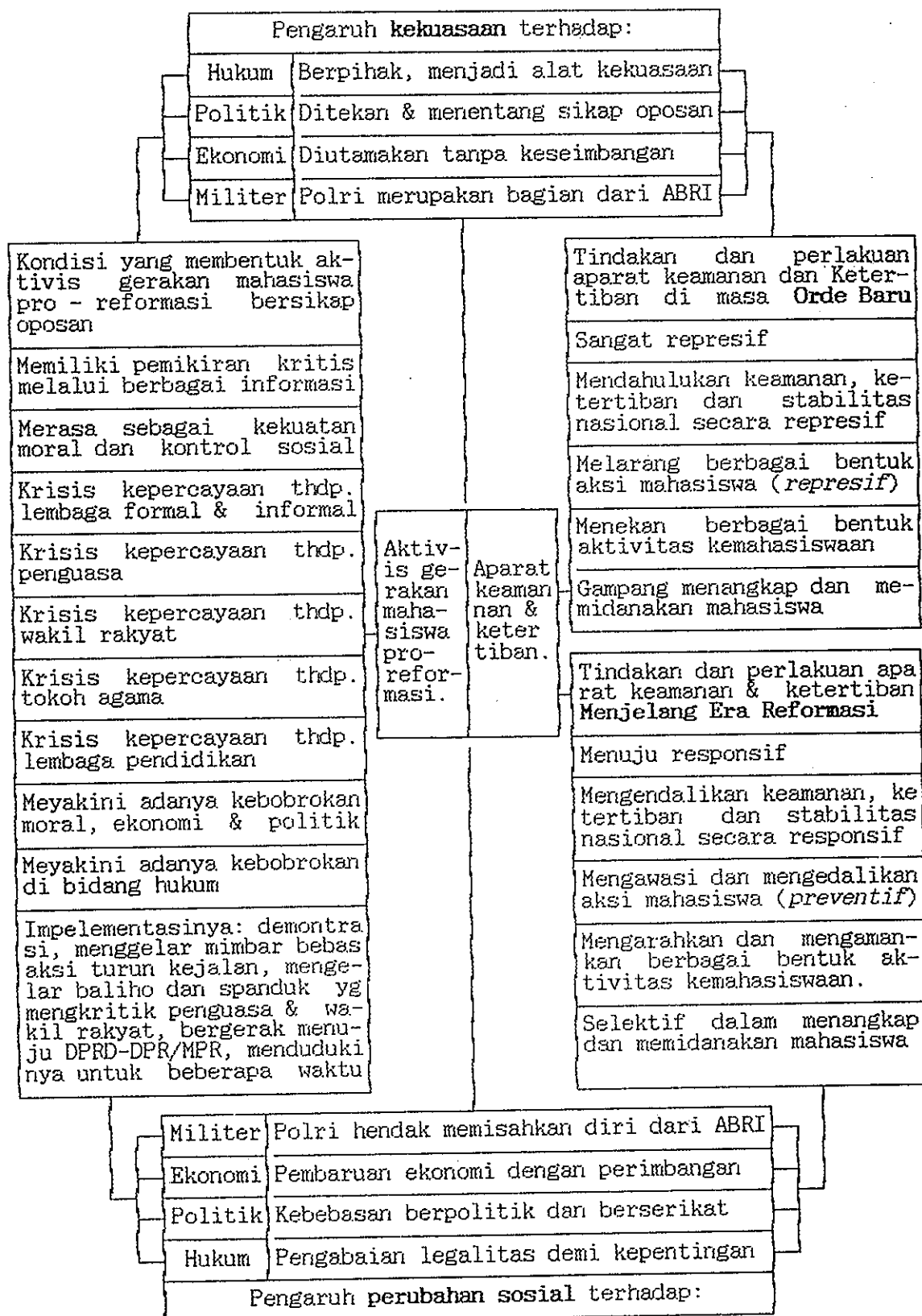
Preposisi 4: *Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menjelang era reformasi.*

Dari keempat preposisi tersebut, penulis mencoba untuk membagi kedalam dua bagian preposisi. Bagian preposisi pertama (preposisi 1 dan 2) merupakan bentuk preposisi yang mengemukakan kondisi, tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa di masa Orde Baru. Kemudian bagian preposisi yang kedua (preposisi 3 dan 4) merupakan bentuk preposisi yang mengemukakan kondisi, tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menjelang era reformasi.

Penulis mencoba untuk menggali serta mengkaji keberadaan pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi keberadaan hukum untuk melakukan tindakan *depenalisasi*. Dari kajian ini dicoba untuk membandingkan bentuk pengaruh non hukum dari dua periode yang berbeda, yaitu bentuk pengaruh kekuasaan terhadap hukum, politik, ekonomi dan militer di masa Orde Baru dengan bentuk pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, politik, ekonomi dan militer di masa menjelang era reformasi.

Untuk lebih memudahkan pemahaman kita dalam memahami dan mempunyai gambaran umum tentang masing-masing preposisi tersebut serta kaitannya dengan pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi hukum, visualisasi gambaran tersebut dapat dilihat dalam bentuk bagan berikut ini:

Bagan 7. Pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi *depenalisasi* perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi



Bagan disusun berdasarkan hasil penelitian

# 1. Pengaruh kekuasaan di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer di masa Orde Baru.

Pengaruh kekuasaan pada masa Orde Baru di bidang hukum menunjukkan adanya keberpihakan hukum kepada kekuasaan atau kepada penguasa dan menjadikan hukum sebagai bagian dari alat kekuasaan untuk melegitimasi kekuasaan yang ada. Dari kondisi yang seperti ini, keberadaan hukum kurang dapat memberikan rasa keadilan yang sebenarnya, dan dalam pelaksanaannya hukum hanya bersifat formal prosedural, sekedar memenuhi tuntutan ketentuan peraturan perundangan tanpa mampu memberikan kenyamanan atau keadilan dan ketentraman yang sebenarnya bagi masyarakat<sup>134)</sup>.

Pengaruh kekuasaan pada masa Orde Baru di bidang politik menunjukkan bahwa tidak adanya pertumbuhan politik yang sehat, kompetitif dan terbuka, yang ada hanyalah sikap politik yang takut-takut, tidak berani untuk mengambil sikap yang berbeda dan hanya mengikuti apa kehendak 'his master voice', sehingga pertumbuhan politik menjadi mati dan yang ada hanyalah sikap-sikap hipokrit, munafik dan oportunisme. Jika ada bentuk-bentuk sikap oposan atau sikap berseberangan pendapat dengan penguasa, maka penekanan-penekanan secara politik segera dilakukan. Sikap yang tidak menerima secara terbuka adanya perbedaan pendapat menunjukkan bahwa iklim kedewasaan berpolitik masih rendah dan masih diselubungi oleh ketakutan politik

134) Realita menunjukkan bahwa menjelang berakhirnya masa Orde Baru, banyak sekali putusan-putusan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung yang bermasalah. Misalnya saja tentang kasus Kedung Ombo, kasus Hanck Ohee di Irian Jaya, kasus Gandhi Memorial School, kasus PK Nohitar Pakpahan, kasus Sri Bintang Pamungkas, kasus PRD, dan masih banyak lagi kasus-kasus bermasalah, yang diputuskan tanpa mengindahkan rasa keadilan masyarakat, tanpa mengindahkan pendapat para pakar hukum. Terlihat sekali bahwa dominasi pengaruh kekuasaan terhadap putusan-putusan tersebut. Bandingkan pula dengan putusan gugatan kasus PDI pada masa Orde Baru dan sesudah masa Orde Baru, maka putusannya akan berbeda seratus delapan puluh derajat. Sungguh sebuah realita hukum yang menakutkan, betapa hukum berada dalam pengaruh kekuasaan yang maha kuat, sehingga putusa demi putusan dapat diabaikan rasa keadilannya. Lihat juga dalam: Achmad Fadilah, 'Sistem Peradilan Kita: Ada Apa?', H.U Bandung Pos, Bandung, 26 Juni 1975 dan Achmad Fadilah, 'Antara Soerjono dan Adi Andono', H.U Bandung Pos, Bandung, 19 Juli 1976.



yang berkepanjangan<sup>135)</sup>.

Pengaruh kekuasaan pada masa Orde Baru di bidang ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan pertumbuhan perekonomian masih diutamakan dan menjadi prioritas dalam berbagai kesempatan, namun dalam melakukan pembangunan pertumbuhan ekonomi kurang memperhatikan adanya keseimbangan, baik keseimbangan antara pemegang modal raksasa dengan pemegang modal yang kecil, sehingga dalam melakukan pembangunan perekonomian hanya mengutamakan pertumbuhan perekonomian yang raksasa tanpa memiliki basis atau dasar perekonomian rakyat yang kuat. Akibatnya ketimpangan ekonomi menjadi kendala dan kehancuran ekonomi yang tidak memiliki basis kekuatan menjadi sebuah kenyataan. Pertumbuhan perekonomian juga mengabaikan komponen-komponen perekonomian lainnya misalnya unsur sumber daya alam dan keseimbangannya, unsur sumber daya manusia dan kesejahteraannya, iklim persaingan yang sehat, serta melakukan rekayasa hukum dan politik demi kepentingan ekonomi<sup>136)</sup>.

135) Realita menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan terhadap politik, membuat politik tersebut menjadi tujuan dan alat sekaligus untuk mencapai apa yang diinginkan. Pengekangan terhadap berbagai pemikiran kritis yang berseberangan atau yang dianggap oposan semata-mata dilakukan untuk mengamankan laju roda pembangunan, bahkan dengan dalih atau cara apapun, dimungkinkan untuk menggunakan hukum sebagai sarana untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu, misalnya saja melalui penerapan pasal-pasal tertentu terhadap orang-orang yang berseberangan dengan penguasa, membenarkan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan 'lingkungan' sendiri, bahkan menciptakan slogan-slogan yang bagus-bagus, namun hanya sekedar kamuflase untuk menarik keuntungan dimasa krisis. Lihat juga: Achmad Fadilah, 'Maatzaai Artikelien Produk Hukum Kolonial', H.U Bandung Pos, Bandung, 5 Juni 1996; 'Nepotisme antara Hukum dan Moral', H.U Bandung Pos, Bandung, 1 Februari 1997; 'Nasionalisme: Gerakan Mencintai Rapih', H.U Bandung Pos, Bandung, 19 Januari 1998; 'Menuju Pers yang Responsif', H.U Bandung Pos, Bandung, 19 Februari 1997; dan 'Interelasi Ekonomi dan Politik' H.U Bandung Pos, Bandung, 4 Maret 1998.

136) Realita menunjukkan bahwa kepentingan-kepentingan ekonomi hampir mendominasi berbagai kebijakan yang ada, bahkan kepentingan-kepentingan tersebut tidak segan-segan menggunakan perangkat hukum untuk melegitimasinya. Kepentingan ekonomi yang hanya berpihak kepada pemilik modal raksasa, ternyata lebih banyak menyulitkan keberadaan pemilik modal kelas menengah dan rendah. Ini dapat dilihat dari mulai penguasaan sumber daya alam yang sangat tidak terbatas dan sulit untuk dibatasi. Sumber daya alam dikuasai untuk dieksploitasi demi keuntungan pribadi. Sumber daya manusianya dengan melakukan 'pemerasan' terhadap tenaga kerja secara kurang manusiawi, mengakibatkan kesenjangan perekonomian yang makin lama makin melebar. Disamping itu pula belum cukup menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mutlak, timbul keinginan untuk melakukan monopoli berbagai macam usaha yang mampu dikendalikan oleh perusahaan sendiri atau perusahaan yang masih berada dalam satu lingkup keluarga besar, ditambah lagi dengan berbagai kecurangan dalam melakukan pengucuran kredit dari bank masing-masing perusahaan kepada perusahaannya sendiri sehingga ada kecenderungan tidak mampu mengembalikan dana yang dikucurkan dan menyebabkan dilikuidasinya bank-bank tertentu yang membawa akibat kepada masyarakat juga sebagai korbannya. dan masih ada lagi model-model bisnis yang curang dan diselubungi dengan berbagai tindakan manis untuk menutupi tindakan kotornya. Lihat: Achmad

Pengaruh kekuasaan pada masa Orde Baru di bidang militer menunjukkan bahwa peran ABRI di berbagai bidang, khususnya bidang sosial politik masih nampak terlalu dominan, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan pihak sipil terhadap pihak ABRI itu sendiri. Masih bersatunya Polri didalam tubuh ABRI membuat Polri kurang leluasa untuk bergerak, dan membuat doktrin Polri seakan-akan bersenyawa dengan doktrin militer sehingga dalam bekerjanya Polri masih memiliki indikasi yang kuat sebagai satuan-satuan militer yang kurang responsif terhadap perkembangan keadaan dan perkembangan masyarakat. Ini terlihat dari berbagai pendekatan keamanan dan pertahanan yang dilakukan oleh militer dan Polri yang masih mengedepankan pendekatan keamanan yang represif dalam menjaga stabilitas nasional<sup>137</sup>).

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pengaruh kekuasaan di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer di masa Orde Baru, secara *komponensial* dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

---

Fadilah, 'Kejahatan Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup', H.S. Wawasan, Semarang, 5 Juni 1997; 'Kejahatan Korporasi Tenaga Kerja', H.U. Bandung Pos, Bandung, 29 September 1996; 'Likuidasi: Viktimisasi bagi Masyarakat?', H.U. Bandung Pos, Bandung, 24 November 1997; 'Urgensi UU Antimonopoli' H.U. Bandung Pos, Bandung, 5 Mei 1998; 'Kejahatan dalam Dunia Bisnis', H.U. Bandung Pos, Bandung, 22 Januari 1997; 'Renungan HPH 1998-Pers dan Tekanan Ekonomi', H.U. Bandung Pos, Bandung, 9 Februari 1998.

<sup>137</sup>) Realita menunjukkan bahwa penanganan permasalahan oleh Polri yang berkaitan dengan Militer terlihat mengalami 'permasalahan' sehingga jarang sekali dapat diselesaikan dengan tuntas. Sebagai misal dapat dilihat dalam penanganan kasus Marsinah, kasus wartawan Udin, terbunuhnya Ijetje Tadjudin dan masih banyak lagi. Selain itu pula penanganan Polri terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang berbasis massa, masih menggunakan pendekatan ala militer, yaitu sedikit menerapkan doktrin 'serang dan hancurkan' yang sebenarnya tidak tepat untuk digunakan secara utuh didalam tubuh Polri. Polri memiliki doktrin sendiri yaitu 'untuk melindungi dan melayani'. Namun karena kedekatan Polri dengan ABRI sebagai salah satu komponen dari sekian banyak komponen negara yang memperoleh hak untuk menggunakan senjata api, maka seringkali penugasan-penugasan Polri cenderung bersikap seperti Militer. Dalam hal peran sosial politik, maka selama ini dinilai oleh banyak pakar ABRI terlalu dominan sehingga pertimbangan-pertimbangan yang dikeluarkannya pun cenderung berupa pertimbangan taktis-strategis dan bukan pola pertimbangan pembinaan yang berupaya mencari pemecahannya secara substansi bukan pemecahan singkat dengan cara yang represif.

Tabel 17. Pengaruh kekuasaan di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer di masa Orde Baru

Pengaruh kekuasaan pada masa Orde Baru	Bentuk pengaruh menjadikan
Hukum	Keberadaannya berpihak dan menjadi alat kekuasaan serta sarana legitimasi kekuasaan.
	Kurang dapat memberikan rasa keadilan yang sebenarnya dan hanya bersifat formal prosedural.
Politik	Tidak adanya pertumbuhan politik yang sehat, kompetitif dan terbuka.
	Penekanan terhadap sikap oposan dan tidak dapat menerima adanya perbedaan pendapat secara terbuka.
Ekonomi	Mengutamakan membangun pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangannya.
	Mengabaikan komponen-komponen perekonomian lainnya dan hanya terpatok kepada pertumbuhannya
Militer	Peran ABRI terlalu dominan di berbagai bidang, dan Polri masih berada dalam tubuh ABRI.
	Pendekatan keamanan dan ketertiban yang terlalu dominan dalam menjaga stabilitas nasional.

Tabel disusun berdasarkan hasil penelitian.

## 2. Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa di masa Orde Baru.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa di masa Orde Baru *sangatlah represif*. aparat keamanan dan ketertiban selalu mencurigai dan mengawasi berbagai bentuk aktivitas kemahasiswaan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perlakuan untuk mengawasi secara ketat aktivitas kemahasiswaan, baik dari saat mengajukan perijinan untuk melaksanakan kegiatan hingga pelaksanaana kegiatannya itu sendiri.

Sikap apriori yang ditunjukkan oleh aparat keamanan

dan ketertiban terhadap aktivitas kemahasiswaan diwujudkan dalam bentuk kecurigaan yang berlebihan, pengawasan yang berlebihan dan selalu bersikap hati-hati dalam mengeluarkan izin kegiatan bagi kegiatan kemahasiswaan. Anggapan bahwa mahasiswa adalah *'orang-orang yang patut diawasi dan diwaspadai'* telah melekat dengan ketat di dalam konsep tugas pengamanan dan penertiban, sehingga tanpa disadari konsep *'stigma'* terhadap gerakan mahasiswa telah melekat pula pada setiap aktivis gerakan mahasiswa pro-demokrasi.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi berbagai kegiatan atau aktivitas para aktivis gerakan mahasiswa di masa Orde Baru ialah *mendahulukan keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional secara represif*. Ini terlihat dari berbagai tindakan dan perlakuannya dalam menghadapi setiap bentuk kegiatan kemahasiswaan. Aparat keamanan dan ketertiban dengan konsep *mendahulukan keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional*, senantiasa melarang berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan yang bersifat politik praktis. Para aparat tidak hanya melakukan pelarangan, tetapi juga melakukan penangkapan, penahanan sekaligus mengajukan para aktivis tersebut untuk diadili akibat adanya bentuk perbedaan pendapat yang dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan politik praktis.

Tindakan *mendahulukan keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional* tercermin pula dalam berbagai pembatasan dan pelarangan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa atau mahasiswa tertentu untuk mempelajari atau mendalami *'isme-isme'* tertentu yang dianggap bertentangan dengan kebijakan penguasa. Pelarangan tersebut tidak hanya bersifat melakukan pembatasan tetapi juga melakukan

penangkapan dan pemidanaan para aktivis gerakan mahasiswa yang tengah mempelajarinya.

Dengan dalih demi keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional, penguasa di masa Orde Baru telah menempatkan mahasiswa dengan segala aktivitasnya dan kampus dengan segenap sivitas akademiknya sebagai kawasan akademis yang polos tanpa iklim keperdulian terhadap masyarakatnya. Mahasiswa dan lingkungan kampus dijadikannya sebagai *'menara gading'* yang indah, mahal dan menggiurkan namun sebenarnya dalam kondisi yang demikian para penguasa telah *'mengebiri'* fungsi kritis mahasiswa dan kampus sebagai lembaga kontrol sosial dan menempatkan mahasiswa dan kampus dalam lingkungan yang tidak memiliki keperdulian sosial. Ini terlihat dari adanya penerapan konsep NKK/BKK yang berupaya membatasi kegiatan kemahasiswaan dan kampus dalam berbagai visi dan aktivitasnya.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa di masa Orde Baru juga melakukan *pelarangan terhadap berbagai bentuk aksi mahasiswa secara represif*. Ini terlihat dari tindakan aparat keamanan dan ketertiban yang melakukan pelarangan, pembatasan areal aksi dan pembubaran secara fisik terhadap aksi demonstrasi, pelarangan dan pembubaran secara fisik terhadap aksi unjuk rasa, aksi mimbar bebas, aksi turun kejalan dan *'long march'*, bahkan bila diperlukan, selain melakukan pembubaran secara paksa dengan menggunakan kekuatan fisik atau dengan cara apapun, para aparat keamanan dan ketertiban melakukan penangkapan, penahanan dan melakukan proses pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa tersebut.

Aparat keamanan dan ketertiban juga melakukan pembatasan ruang gerak (*pencekalan*) tokoh-tokoh tertentu yang

dianggap berseberangan dengan penguasa dan diundang oleh mahasiswa untuk hadir dalam lingkungan forum ilmiah atau dalam forum apapun. Sikap ini biasanya ditunjukkan ketika mahasiswa akan mengadakan sebuah kegiatan yang akan menghadirkan tokoh-tokoh tertentu sebagai pembicara, namun pengajuan tokoh-tokoh tertentu sebagai pembicara tersebut ditolak atau dibatasi oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan ijin kegiatan atau aparat keamanan dan ketertiban yang terkait.

Perlakuan represif-pun kerap kali diterima oleh para aktivis gerakan mahasiswa yang aktif di bidang lembaga penerbitan mahasiswa atau pers mahasiswa. Walaupun tindakan tersebut tidak dilakukan secara langsung dengan melakukan '*pembredelan*', tetapi pola intimidasi dengan mendatangi aktivis-aktivis pers tertentu, membatasi ruang lingkup pers mahasiswa serta mengawasinya jika melakukan hal-hal yang dapat membahayakan stabilitas nasional, atau menyinggung salah satu komponen pemegang kekuasaan yang tertinggi.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa di masa Orde Baru juga melakukan *penekanan terhadap berbagai bentuk aktivitas kemahasiswaan*. Penekanan aktivitas kemahasiswaan dilakukan dengan melakukan pembatasan kegiatan hanya diseputar kegiatan keilmiah saja. Itupun dilakukan dengan '*rambu-rambu*' tertentu yang sengaja dipasang agar para aktivis tidak melanggarnya.

Aparat keamanan dan ketertiban cenderung bersikap kaku atau menolak memberikan ijin kegiatan apabila para aktivis gerakan mahasiswa bermaksud mengadakan kegiatan yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan penguasa atau dianggap dapat mengganggu stabilitas nasional. Dan

apabila kegiatan kemahasiswaan itu tetap terus dilakukan, walau ijin kegiatannya tidak disetujui, atau ijin kegiatannya belum diturunkan, aparat keamanan dan ketertiban cenderung untuk melakukan pengamanan dan tindakan dengan menggunakan kekuatan fisik atau melakukan pembubaran secara paksa.

Tindakan dan perlakuan para aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa di masa Orde Baru juga terkesan begitu *gampang dan mudah dalam melakukan penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa*. Penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa yang dianggap berseberangan dengan berbagai kebijakan penguasa, atau yang dapat membahayakan stabilitas nasional dilakukan dengan menggunakan delik-delik pidana politik yang ada dalam KUHP maupun diluar KUHP.

Aparat keamanan dan ketertiban juga memandang bahwa adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para aktivis gerakan mahasiswa adalah sebuah bentuk kejahatan yang menyerang terhadap kewibawaan seseorang atau kewibawaan sebuah lembaga, oleh karena itulah perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa tersebut dianggap patut untuk dipidana dan diklasifikasikan sebagai sebuah bentuk kejahatan politik.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap aktivis gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru, secara *komponensial* dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 18. Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap aktivis gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru.

Pada masa Orde Baru	Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban thdp. aktivis gerakan mahasiswa
Sangat represif	Mencurigai dan mengawasi segala bentuk aktivitas kemahasiswaan, diwujudkan dengan pengawasan secara ketat aktivitas kemahasiswaan melalui proses perijinan kegiatan.
	Bersikap apriori terhadap segala bentuk kegiatan kemahasiswaan, diwujudkan dengan adanya ' <i>stigma</i> ' terhadap aktivis gerakan mahasiswa pro-demokrasi.
Mendahulukan keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional secara represif	Melarang berbagai bentuk kegiatan politik praktis di kalangan mahasiswa.
	Melarang untuk mempelajari atau mendalami ' <i>isme-isme</i> ' tertentu yang dianggap bertentangan dengan kebijakan penguasa.
	Menempatkan mahasiswa dan kampus sebagai kawasan akademis ' <i>menara gading</i> ' dan ' <i>meng-ebiri</i> ' fungsi kritis mahasiswa dan kampus sebagai lembaga kontrol sosial via NKK/BKK.
Melarang berbagai bentuk aksi mahasiswa secara represif	Melarang demonstrasi, unjuk rasa, mimbar bebas, aksi turun kejalan, long march, melalui pembatasan massa agar tidak keluar dari lingkungan kampus dan bila perlu melakukan pembubaran massa mahasiswa dengan cara apapun.
	Membatasi ruang gerak tokoh-tokoh tertentu yang diundang oleh mahasiswa dan dianggap berseberangan dengan penguasa ( <i>pencekalan</i> ) dalam forum ilmiah atau forum apapun.
	Melakukan pengawasan dan ' <i>pemberangusan</i> ' terhadap lembaga pers mahasiswa.
Menekan berbagai bentuk aktivitas kemahasiswaan	Membatasi aktivitas kemahasiswaan hanya sebatas kegiatan ilmiah.
	Cenderung bersikap kaku atau menolak apabila ada kegiatan mahasiswa yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan penguasa.
	Cenderung untuk menggunakan pengamanan dan tindakan fisik dalam menghadapi aktivitas kemahasiswaan yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan penguasa.
Gampang menangkap & memidanakan mahasiswa	Menangkap dan memidanakan aktivis kemahasiswaan yang bersikap berseberangan dengan Penguasa melalui delik-delik pidana.
	Memandang perbedaan pendapat yang dilontarkan oleh mahasiswa sebagai sebuah kejahatan dan oleh karenanya patut untuk dipidana.

Tabel disusun berdasarkan hasil penelitian.



### 3. Pengaruh perubahan sosial di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer menjelang era reformasi.

Pengaruh perubahan sosial menjelang reformasi di bidang hukum menunjukkan terjadinya pengabaian legalitas hukum demi kepentingan substansial yang hendak dicapai, yaitu adanya upaya untuk memujudkan hukum menuju bentuk hukum yang akomodatif dan bentuk hukum yang responsif. Ini terlihat dari beberapa tindakan para pemegang kekuasaan yang mencoba untuk merespons kebutuhan substansial masyarakat di bidang hukum dan memperlakukan hukum bukan sebagai sebuah perangkat mati, tetapi lebih mengarahkan hukum sebagai perangkat untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya atau pemenuhan kebutuhan hukum yang substansi. Sikap yang sama juga ditunjukkan dengan mencoba mempertanyakan dan mengkaji kembali berbagai macam produk hukum yang dianggap memiliki keberpihakan bagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu, baik produk hukum yang memiliki keberpihakan di bidang politik, keberpihakan di bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan hidup kenegaraan dan hidup bermasyarakat<sup>138)</sup>.

Pengaruh perubahan sosial menjelang reformasi di bidang politik menunjukkan bahwa gelombang perubahan sosial telah membawa masyarakat menuju bentuk pertumbuhan politik yang sehat, kompetitif dan terbuka. Ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai bentuk responsivitas yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan dalam mengakomoda-

---

<sup>138)</sup> Realita menunjukkan bahwa peninjauan terhadap berbagai produk hukum yang dikeluarkan semasa Orde Baru mulai dilakukan, mulai dari Undang-undang hingga Kepprr-nya. Peninjauan di bidang hukum membawa implikasi di bidang politik, yaitu dengan mulai ditinjau ulang tahanan dan narapidana politik yang dipidana semasa Orde Baru akibat pola pikir dan pendapat yang berbeda atau berseberangan dengan Penguasa. Mungkin masih terasa jauh apabila hukum dikatakan mulai menampilkan responsivitasnya, akan tetapi hal ini merupakan tahapan-tahapan menuju kehidupan hukum yang lebih responsif dan tahapan kehidupan bernegara yang lebih desokratis. Hukum tidak lagi diperhatikan secara ketat prosedural dan formalitasnya, namun mulai menampilkan upaya mengedepankan substansi yang sebenarnya. Misalnya saja perubahan tentang undang-undang politik dan orsospol sebagai cerminan upaya untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang sebenarnya dalam berpolitik.

si berbagai kepentingan politik yang banyak mencuat dan menuntut diadakannya pembaharuan dibidang politik dan tatanan pemerintahan. Hal inipun ditandai juga dengan mulai terbukanya iklim dalam menerima adanya sikap oposan dan menerima adanya perbedaan pendapat sebagai sebuah dinamika politik yang terbuka dan sehat<sup>139)</sup>.

Pengaruh perubahan sosial menjelang reformasi di bidang ekonomi menunjukkan bahwa mulai dikembangkannya pola pemikiran yang menuntut adanya pembaharuan kebijakan dan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kepada kepentingan masyarakat dan dengan memperhatikan pola-pola keseimbangan, baik keseimbangan pelaku-pelaku ekonomi yang bermodal raksasa maupun yang bermodal kecil, keseimbangan antara pemilik modal dan para pekerjanya, keseimbangan antara produksi dan sumber daya alam-nya dan keseimbangan antara kewajiban sumber daya manusia serta kesejahteraan-nya. Pembangunan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kepada keseimbangan menunjukkan adanya pola hubungan yang setara dalam arti yang sebenarnya, dalam arti saling membutuhkan dan menggunakannya demi kepentingan bersama, dan bukan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berbasis dan berbentuk '*exploitation de lohme par lohme*'. Pertumbuhan perekonomian yang juga memperhatikan komponen-komponen perekonomian lainnya, termasuk keberadaan dan keseimbangannya dengan sumber daya alam dan sumber

---

<sup>139)</sup> Realita menunjukkan bahwa responsivitas hukum dalam mawadahi kepentingan politik bermasyarakat ditandai dengan rencana akan dicabutnya Undang-undang yang mengatur orsospol dan akan diganti dengan undang-undang orsospol yang baru. Masyarakat kini mulai diberikan kebebasan membentuk partai-partai politik sesuai aspirasi yang dikehendakinya. Ini semua tidak lain merupakan upaya yang luas dibidang politik untuk mawadahi kepentingan berpolitik masyarakat. Bagi gerakan mahasiswa itu sendiri terlihat dengan keluarnya putusan PTUN yang membatalkan keputusan Mendagri yang mengatakan bahwa keberadaan PKO dilarang. Dan iklim kebebasan berpolitik yang nyata dapat dilihat dalam maraknya berbagai aksi gerakan mahasiswa yang mengeluarkan berbagai pernyataan, baik mengenai diri pejabat presiden yang tengah memegang jabatannya, maupun terhadap pejabat-pejabat negara yang dianggap memiliki kekurangan karena tidak bersih dari '*korupsi kolusi dan nepotisme*'. Iklim seperti ini tidak akan ditemui dalam masa Orde Baru karena sebelum masa menjadi besar dan tuntutan menjadi beragam, aksi gerakan mahasiswa sudah terlebih dahulu '*dibungkam*' dan '*tokoh-tokohnya diamankan*'.

daya manusia<sup>140)</sup>.

Pengaruh perubahan sosial menjelang reformasi di bidang militer menunjukkan bahwa peran ABRI di berbagai bidang mulai berkurang atau dituntut untuk dikurangi. Hal ini selain mencoba memberikan pola pembaharuan di bidang politik, juga memberikan secara nyata porsi-porsi sipil dalam menjalankan pemerintahan. Perubahan inipun memberikan dukungan dan dorongan yang kuat dari masyarakat agar Polri segera melepaskan diri (*mandiri*) dari ABRI. Hal ini dikemukakan agar Polri dapat melakukan tugasnya secara lebih baik dan terarah, dan dominasi ABRI dalam tubuh Polri dapat dikurangi atau dihilangkan. Implikasi dari pemisahan Polri dari tubuh ABRI diharapkan bahwa pendekatan sosial kemasyarakatan tidak lagi menggunakan pola pendekatan kemiliteran yang cenderung mengedepankan pendekatan keamanan dan ketertiban secara represif, tetapi Polri melakukan pendekatan keamanan dan ketertiban secara proporsional dan responsif<sup>141)</sup>.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pengaruh

---

140) Realita menunjukkan bahwa awal dari segala krisis nasional ini bermula dari krisis ekonomi yang merambat kepada krisis politik, krisis hukum dan terus melaju kepada kekuasaan. Krisis ekonomi dimulai sebagai pemicu yang menggerakkan berbagai massa untuk menuntut adanya pengembalian situasi. Krisis ekonomi bermula dari masa jatuh tempo-nya masa pembayaran hutang yang banyak dilakukan oleh pihak penguasa dan swasta. Penguasa dan pengusaha swasta berhutang dalam bentuk dolar, dan ketika masa jatuh tempo tersebut datang kebutuhan dolar meningkat sehingga harga dolar naik, mengakibatkan nilai rupiah terpuruk. Sebenarnya siapa yang harus disalahkan dan harus menanggung beban, bukankah yang berhutang adalah penguasa dan pengusaha swasta dalam upaya meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui hutang tersebut, lalu ketika mereka harus membayar hutang, beban tersebut harus dipikul oleh masyarakat. Jelas sebuah perbuatan yang curang dan tidak fair. Kini setelah banyak konglomerat anbruk, mereka mau membayar hutang dengan sejumlah aset yang mereka miliki. Tuntutan-demi tuntutan ekonomi yang akhirnya membawa dampak di bidang hukum, yaitu dengan mulai diperiksanya bank-bank bermasalah, berkaitan dengan GBI, mulai diperiksanya orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kekuasaan ekonomi, namun menggunakannya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, dan tuntutan-tuntutan di bidang GDM dan GDA. Mulai timbul gerakan pemulihan lingkungan (di Medan, Puncak, Irian), timbul gerakan pekerja yang menginginkan perbaikan kesejahteraan, dan maraknya tuntutan transparansi keadaan ekonomi yang sebenarnya.

141) Realita menunjukkan bahwa dukungan dan dorongan masyarakat untuk Polri agar segera memisahkan diri dari ABRI makin besar. Di satu sisi ini merupakan keuntungan bagi Polri sebab ia akan mampu menangani permasalahan sosial dengan bentuk penanganan yang baru (paradigma baru) dan bukan dengan menggunakan pendekatan keamanan dan ketertiban secara militeristik, namun di sisi lain Polri harus segera mempersiapkan diri untuk mampu menangani masyarakat secara responsif. Polri tidak boleh lagi beralasan bahwa permasalahan 'masih terbenturan dengan ABRI' karena kini Polri telah berada diluar ABRI. Pendekatan-pendekatan militeristik harus segera dikurangi, karena memang bukan pola penanganan model Polri. Dalam realitanya memang masih terlihat sisa-sisa pendekatan militeristik masih terlihat, namun melihat pola penanganan kepada gerakan mahasiswa pro-reformasi mulai terlihat responsivitasnya, walaupun masih jauh dari tataran sempurna.

perubahan sosial di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer menjelang era reformasi, secara *komponensial* dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 19. Pengaruh perubahan sosial di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer menjelang era reformasi

Pengaruh perubahan sosial menjelang era reformasi	Bentuk pengaruh menjadikan
Hukum	Terjadinya pengabaian legalitas demi kepentingan yang hendak dicapai ( <i>menuju bentuk hukum yang akomodatif dan responsif</i> ).
	Mempertanyakan kembali produk-produk hukum yang dianggap memiliki keberpihakan pada kelompok tertentu.
Politik	Menuju pertumbuhan politik yang sehat, kompetitif dan terbuka.
	Mulai terbuka dalam menerima adanya sikap oposan dan menerima adanya perbedaan pendapat sebagai sebuah dinamika politik.
Ekonomi	Pembaruan kebijakan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan.
	Memperhatikan komponen-komponen perekonomian lainnya termasuk keberadaan SDA dan SDM.
Militer	Peran ABRI mulai dikurangi ( <i>berkurang</i> ) di berbagai bidang dan Polri berkehendak untuk melepaskan diri dari tubuh ABRI ( <i>mandiri</i> ).
	Pendekatan keamanan dan ketertiban dalam menjaga stabilitas nasional dilakukan secara proporsional dan responsif.

Tabel disusun berdasarkan hasil penelitian.

#### 4. Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menjelang era reformasi.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menjelang era reformasi terlihat berubah dan bergerak *menuju sikap yang responsif*. Ini terlihat dari beberapa tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban

dalam mensikapi berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan. aparat keamanan dan ketertiban kini hanya melakukan bentuk-bentuk pengawasan secara intensif terhadap beberapa bentuk aktivitas kemahasiswaan, tanpa harus campur tangan secara represif terlalu jauh. Dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan secara formal memang harus memenuhi prosedur perijinan untuk melakukan kegiatan, namun hal itu kini tidaklah terlalu ketat dan sifatnya hanya pemberitahuan. Selain itu pula dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan, tidak semua kegiatan kemahasiswaan harus diawasi secara formal dan adakalanya kegiatan-kegiatan tertentu yang memang tidak mengundang risiko timbulnya permasalahan kerawanan sosial tidak memerlukan pengawasan yang serius.

Sikap responsif inipun ditunjukkan dengan mempermudah proses perijinan dalam melakukan sebuah kegiatan mahasiswa menjadi sekedar pemberitahuan formal saja. Namun demikian kesan yang ditangkap dalam proses pemberitahuan inipun masih kentara menerapkan proses perijinan secara formal-prosedural yang harus memenuhi persyaratan tertentu dan melakukan pengecekan pengamanan dengan alasan rutinitas tugas saja.

Walaupun perlakuan terhadap mahasiswa masih tetap dirasakan ada kekakuan, namun penerimaan dan perlakuan terhadap mahasiswa terlihat sudah mulai responsif, mahasiswa diterima dengan berbagai kebutuhannya, sembari mengingatkan beberapa prosedur yang harus dipenuhi untuk sekedar pengamanan maupun untuk sekedar prosedur memenuhi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan dapat menimbulkan permasalahan sosial.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

menjelang era reformasi terlihat berubah. Kini aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi hanya sekedar *mengendalikan keamanan, ketertiban agar tercipta stabilitas nasional yang responsif*. Hal ini dilakukan hanya dengan mengawasi berbagai bentuk kegiatan politik praktis yang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi atau kegiatan yang berdimensi politik atau dapat membawa dampak kepada kondisi politik secara menyeluruh.

Aparat keamanan dan ketertiban-pun kini hanya bertindak mengawasi kepada berbagai bentuk kajian yang dilakukan oleh mahasiswa, khususnya terhadap *'isme-isme'* tertentu yang dianggap bertentangan dengan kebijakan penguasa dan mencoba memahami fungsi mahasiswa dan kampus dalam lingkup akademis dalam mengkritisi berbagai kebijakan penguasa dan dalam fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menjelang era reformasi terlihat hanya *mengawasi dan mengendalikan massa dan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi secara preventif*. Hal ini terlihat dari cara pengendalian keamanan dan ketertiban terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang dilakukan secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan lokasi sekitarnya, bentuk dan jumlah massa, bentuk aksi dan tuntutan massa.

Aparat keamanan dan ketertibanpun mulai memberikan izin dan sedikit ruang gerak bagi tokoh-tokoh tertentu yang dianggap berseberangan dengan penguasa untuk diundang oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi namun hanya sebatas dalam forum ilmiah dan bukan dalam

bentuk politik praktis. Terhadap keberadaan lembaga pers mahasiswa, pengawasan masih tetap dilakukan, tetapi belum terlihat adanya upaya-upaya untuk *'meredakan atau membungkam'* keberadaan lembaga pers mahasiswa.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menjelang era reformasi terlihat hanya melakukan *pengarahan dalam mengamankan berbagai bentuk aktivitas kemahasiswaan*. Ini terlihat dari tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban yang memberikan keleluasaan dalam berbagai kegiatan keilmiah dikalangan mahasiswa, baik ilmiah murni, ilmiah terapan (*sosial kemasyarakatan*) maupun sedikit keleluasaan bagi kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan politik. Dan bagi kegiatan kemahasiswaan yang dianggap berseberangan dengan berbagai kebijakan penguasa, aparat keamanan dan ketertiban hanya memberikan sedikit keleluasaan dengan tentunya tidak lupa memberikan *'rambu-rambu'* bagi para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi agar tidak menjadikan kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang dapat memicu terjadinya *kekaucauan atau kerusuhan di masyarakat*.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menjelang era reformasi terlihat sangat *selektif dalam menangkap dan memidanakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi*. Dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, para aparat keamanan dan ketertiban memandang bahwa perbedaan pendapat yang dilontarkan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melalui berbagai aksi demonstrasi dan unjuk rasa serta mimbar bebas adalah sebagai sebuah kewajaran terkecuali bagi perbuatan atau tindakan para aktivis gerakan

mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi unsur-unsur pidana dan mengakibatkan kerugian secara materiil di masyarakat. Sikap inipun menunjukkan bahwa para aparat keamanan dan ketertiban lebih bersifat selektif dalam memilih dan menerapkan ancaman pidana. Bila ancaman pidana tersebut benar-benar tidak dibutuhkan dan dapat diatasi dengan perangkat hukum lainnya, maka penggunaan ancaman pidana mulai dikesampingkan. Aparat keamanan dan ketertiban memandang bahwa sebenarnya ada upaya-upaya lain yang lebih menguntungkan dalam mengatasi aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi, ketimbang menggunakan ancaman pidana yang selama ini dianggap lebih banyak mengundang permasalahan ketimbang menyelesaikannya secara tuntas.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menjelang era reformasi, secara *komponensial* dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:



Tabel 20. Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menjelang era reformasi

Menjelang reformasi	Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban thdp. aktivis gerakan mahasiswa
Menuju responsif	Melakukan pengawasan terhadap bentuk-bentuk aksi kemahasiswaan tertentu ( <i>tidak semua aktivitas kemahasiswaan harus diawasi</i> ).
	Proses perijinan hanyalah sekedar pemberitahuan kepada Polri.
	Walaupun perlakuan terhadap mahasiswa masih dirasakan ada kekakuan, namun penerimaan & perlakuan terhadap mahasiswa terlihat sudah mulai responsif.
Mengendalikan keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional secara responsif	Mengawasi berbagai bentuk kegiatan politik praktis atau kegiatan yang berdimensi politik atau dapat membawa dampak pada politik.
	Mengawasi berbagai bentuk kajian yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap 'isme-isme' tertentu yang dianggap bertentangan dengan kebijakan penguasa.
	Mencoba memahami fungsi mahasiswa dan kampus dalam lingkup akademis untuk mengkritisi berbagai kebijakan penguasa, dalam fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial.
Mengawasi dan mengendalikan aksi mahasiswa secara preventif	Pengendalian keamanan dan ketertiban terhadap aksi mahasiswa dilakukan secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan lokasi bentuk dan jumlah massa, bentuk aksi dan tuntutan massa.
	Memberikan izin dan sedikit ruang gerak bagi tokoh-tokoh tertentu yang diundang mahasiswa dan dianggap berseberangan dengan penguasa untuk tampil, namun sebatas dalam forum ilmiah & bukan bentuk politik praktis
	Tetap melakukan pengawasan terhadap lembaga pers mahasiswa tanpa 'pemberangusan'.
Mengarahkan dan mengamankan berbagai bentuk aktivitas kemasiswaan	Memberikan keleluasaan dalam kegiatan keilmiah, baik ilmiah murni, ilmiah terapan ( <i>sosial kemasyarakatan</i> ) dan sedikit keleluasaan dengan yang berkaitan politik.
	Memberikan sedikit keleluasaan bagi kegiatan kemahasiswaan yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan penguasa.
Selektif dlm. menangkap dan memidanakan	Memandang perbedaan pendapat yang dilontarkan oleh mahasiswa sebagai sebuah kewajaran kecuali memenuhi unsur-unsur pidana.

## BAB IV. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya, sebagai penutup penulis menyimpulkan hasil penelitian tersebut ke dalam beberapa uraian pernyataan berikut ini:

1. Sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sebenarnya merupakan sebuah bentuk reaksi atas sikap dan perilaku dari penguasa dan lembaga kekuasaan itu sendiri. Sikap oposan yang ditunjukkan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terbentuk oleh kondisi dan latar belakang pemikiran yang berbeda-beda, dimana kondisi dan latar belakang pemikiran tersebut dapat muncul secara sistematis maupun secara acak, dalam artian sikap oposan tersebut dapat muncul dari satu preposisi ke preposisi berikutnya secara sistematis, tetapi juga dapat muncul dari satu preposisi ke preposisi lainnya secara tidak beraturan dan tidak membentuk pola yang baku. Namun realita menunjukkan bahwa sikap oposan tersebut terbentuk dari sembilan preposisi yang menurut analisis penulis saling berkaitan erat dengan sikap penguasa dan lembaga kekuasaan itu sendiri.

Secara komponensial sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terbentuk karena timbulnya pemikiran kritis dikalangan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi (preposisi pertama). Dari sikap kritis inilah munculnya sebuah kesadaran bahwa mahasiswa memiliki sebuah kekuatan moral (*moral force*) dan sebagai sebuah lembaga kontrol sosial (*social control*) (preposisi kedua).

Berpijak kepada kedua preposisi tersebut yang merupakan preposisi intern, para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat bahwa kondisi sistem politik pemerintahan, perekonomian dan hukum telah banyak mengalami penyimpangan sehingga timbul krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap keberadaan lembaga formal dan lembaga informal yang selama ini dianggap kurang dapat merespon dan menjawab kepentingan masyarakat yang sebenarnya (preposisi ketiga).

Bentuk krisis kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap lembaga formal dan informal, dalam bentuk kongkritnya diwujudkan dengan bentuk krisis kepercayaan terhadap penguasa (preposisi keempat), wakil rakyat (preposisi kelima), tokoh agama (preposisi keenam) dan lembaga pendidikan (preposisi ketujuh).

Dari krisis kepercayaan tersebut membawa sikap mahasiswa para aktivis gerakan mahasiswa kepada keadaan yang meyakinkan adanya berbagai bentuk kebobrokan di bidang moral, sistem politik pemerintahan, perekonomian (preposisi kedelapan) dan hukum dan sistem peradilan (preposisi kesembilan).

Implementasi dari sikap oposan dan krisis kepercayaan ini diwujudkan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dalam bentuknya muncul dan maraknya aksi unjuk rasa, demonstrasi, aksi mimbar bebas, aksi 'long march', menggelar berbagai baliho dan spanduk yang isinya mengkritisi berbagai tindakan dan perilaku penguasa, wakil rakyat dan lembaga kekuasaan itu sendiri, serta melakukan aksi pendudukan gedung DPRD dan gedung DPR-MPR RI.

2. Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, melibatkan peran Polri sebagai kelompok

inti dan melibatkan peran ABRI sebagai kelompok pendukung. Secara teoritik pemisahan fungsi antara kelompok inti dan kelompok pendukung dalam menangani dan menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa lebih disebabkan pada perbedaan fungsi yang sangat mendasar, yaitu fungsi Polri sebagai sarana kamtibmas dan fungsi ABRI atau militer non Polri sebagai satuan-satuan tempur yang berfungsi menjaga keamanan negara apabila ada ancaman dari luar. Namun dalam realitanya perbedaan fungsi tersebut dapat diabaikan demi kepentingan untuk menjaga stabilitas nasional. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, secara komponensial tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban terbagi menjadi tiga preposisi, dimana ketiga preposisi tersebut dapat merupakan sebuah urutan formal prosedural dalam menangani perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa, tetapi juga dapat disebutkan sebagai tindakan taktis strategis operasional yang berkembang sesuai keadaan atau massa yang dihadapi.

Secara formal prosedural untuk menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi diturunkanlah kelompok inti yang berasal dari Polri (preposisi pertama) dan apabila masih membutuhkan dukungan atau bantuan pengamanan, diturunkanlah kelompok pendukung yang berasal dari ABRI atau militer non Polri (preposisi kedua), namun dalam kondisi tertentu dimana menurut perhitungan taktis strategis dan operasional memang membutuhkan penanganan pengamanan secara terpadu, maka kedua kelompok tersebut dapat diturunkan secara bersama-sama (preposisi ketiga). Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi bergantung kepada keadaan

dan lokasi aksi, rencana berjalan atau berkembangnya aksi, besar atau kecilnya jumlah massa peserta aksi dan tuntutan yang diinginkan melalui aksi tersebut, sedangkan perlakuan pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban bergantung kepada aksi yang berlangsung diseputar kampus, aksi yang berkehendak atau memiliki rencana untuk mengadakan '*long march*' atau turun kejalan, aksi yang berlangsung secara tertib dan damai, dan aksi yang memiliki kecenderungan untuk terjadinya kekacauan atau kerusuhan massa.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ada kecenderungan menuju responsif, walaupun dalam kondisi tertentu yang sangat memaksa ada aparat keamanan dan ketertiban yang bertindak represif.

3. Tidak dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi atas berbagai perbuatan yang dilakukannya merupakan indikasi adanya tindakan *depenalisasi* secara informal. Tindakan *depenalisasi* atau tidak dipidananya perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi berkaitan erat dengan munculnya sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang juga mengacu kepada latar belakang pemikiran yang memunculkan sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, tindakan *depenalisasi* berdasarkan realita merupakan tindakan yang mengakui adanya bentuk-bentuk keterbatasan hukum pidana dalam menangani masalah kejahatan yang bersifat kompleks. Tindakan *depenalisasi* terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dilandasi tiga bentuk pertimbangan, dimana antara satu pertimbangan dengan pertimbangan berikutnya tersusun secara sistematis.

Secara komponensial tindakan *depenalisasi* dilandasi dengan pertimbangan praktis-sosilogis (preposisi pertama), pertimbangan politis (preposisi kedua) dan pertimbangan hukum (preposisi ketiga), dengan memperhitungkan hal-hal yang lebih menguntungkan dari diterapkannya atau tidak diterapkannya hukum pidana pada perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut.

Preposisi pertama menunjukkan bentuk-bentuk pertimbangan yang mengacu kepada perkembangan kondisi-kondisi empiris secara praktis dan sosiologis di lapangan. Dari pertimbangan yang mengacu pada kondisi-kondisi empiris ini, akan muncul preposisi kedua yaitu bentuk-bentuk pertimbangan secara politis yang mengacu kepada tujuan yang hendak dicapai atau kondisi-kondisi politik yang menekannya. Dan dari kedua pertimbangan tersebut (preposisi pertama dan kedua), muncul preposisi ketiga yaitu bentuk-bentuk pertimbangan secara hukum yang mengacu kepada tujuan yang hendak dicapai atau manfaat apa yang dapat diambil dari tindakan tersebut, serta konsep-konsep hukum apa yang dapat digunakan atau mendukung sebuah tindakan secara tepat, baik dan benar.

4. Pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi tindakan *depenalisasi* terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi adalah pengaruh perubahan sosial di bidang ekonomi, politik dan militer.

Realita dengan tidak dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi adalah sebuah realita yang berbeda ketika pengaruh 'kekuasaan' masih nampak dengan jelas di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer pada masa Orde Baru (preposisi pertama), yaitu dengan banyaknya para aktivis gerakan mahasiswa yang dipidana oleh perbuatan yang serupa (preposisi kedua).

Di masa bergulirnya gelombang reformasi terjadilah perubahan sosial yang mempengaruhi aspek hukum, politik, ekonomi dan militer (preposisi ketiga) dan membawa dampak pada pola penanganan pengamanan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, yaitu dengan tidak dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi (preposisi keempat).

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan keempat kesimpulan tersebut penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Realita tersebut telah menunjukkan bahwa konsep *depenalisasi* berpijak kepada beberapa pertimbangan yang dilakukan untuk melihat efektif atau tidak efektifnya penggunaan atau penerapan hukum pidana terhadap sebuah realitas sosial. Dengan demikian dalam menerapkan dan menegakkan hukum pidana, selayaknya mempertimbangkan juga segi kemanfaatan, kondisi sosial-politik dan ekonomi, kendala yang dihadapi serta pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum secara sosiologis agar dapat membangun konsep hukum pidana yang lebih responsif.
2. Realita tersebut juga menunjukan bahwa ada semacam '*keterbatasan-keterbatasan hukum pidana*' dalam menjelaskan realitas sosial yang berbeda. Dengan demikian perlu diupayakan pengembangan kajian hukum pidana dan kriminologis yang lebih kritis dan responsif agar dapat melakukan pengkajian secara mendalam terhadap sebuah realitas sosial di masyarakat agar dapat menghasilkan bentuk-bentuk pemahaman baru terhadap sebuah realita yang berbeda dimasyarakat secara responsif.

## KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku literatur

- Abdullah, Taufik., , Pemuda dan Perubahan Sosial, LP3ES, Jakarta, 1994.
- , Pemuda dan Pembangunan, Leknas, Jakarta, 1972.
- Adams, Cindy., , Alih Bahasa : Abdul Bar Salim, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Gunung Agung Jakarta, 1986.
- Adji, Oemar Seno., , Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, 1990.
- , Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Di Masa Yang Akan Datang, CV Pantjuran Tudjuh, Tidak ada tahun, tidak ada kota.
- , Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Akhmadi, Heri, Ilusi Sebuah Kekuasaan, ISAI-Pusat HAM Ubaya, Midas Suurya Grafindo, Surabaya, 1997.
- Albach, Philip G., (Editor), Politik dan Mahasiswa Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini, Diterbitkan dengan bekerjasama antara Yayasan API dan Penerbit P.T Gramedia, Jakarta, 1988.
- Alkostar, Artidjo., M.Sholeh Amin (Ed), Pembangunan Hukum dan Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawali Pers dan LBH Yogyakarta, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Anderson, Bennedict R.O.G., , Revolusi Pemoeda : Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946, Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Annonim, Peristiwa 27 Juli 1996 Gerakan Pro Demokrasi digebuk, Human Rights Wactch/Asia, tanpa kota, Oktober 1996.
- Annonim, Sutan Syahrir. Renungan dan Perjuangan, Penerbit Jambatan Dian Raya, Jakarta, 1990.
- Anwar, Yozar., , Angkatan 66 Sebuah Catatan Harian Mahasiswa, Sinar Harapan, Jakarta, 1981.
- , Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20 Kisah Perjuangan Anak-anak Muda Pemberang, Sinar Harapan, Jakarta, 1981.
- Arief, Barda Nawawi., , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- , Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Arifin, Marzuki., , Peristiwa 15 Januari, Publishing House, Jakarta, 1974,
- Armada, Wina., , Wajah Hukum Pidana Pers Indonesia, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Article 19 (XIX) Internationale Centre Against Censorship, Pengadilan Pers di Indonesia - Kasus AJI dan Pijar, Lancaster House 33 Islington High Street London, N19LH, 1995.



- Atmakusumah (Penyunting), Mochtar Lubis, Wartawan Jihad, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Atmakusumah, Triuwana Said, Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 4 "Delik Pers", P.T Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989.
- Atmasasmita, Romli., , Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, YLBHI, Jakarta, 1989.
- Atmosudirjo, Prajudi., Usep Ranuwijaya, Padmo Wahjono, Soerjono Soekanto, Machrup Elrich (Ed), Konstitusi Amerika Serikat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bahar, Ahmad, Biografi Politik Megawati Soekarnoputri 1993-1996, PT Pena Cendikia, Yogyakarta, 1996.
- Bassar, M. Sudradjat., , Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUH Pidana, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Basuki, Wisnuh, Pers dan Penguasa. Pembocoran Pentagon Papers dan Pengungkapan oleh New York Times, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Becker, Howard S., , Outsider-Studies in The Sociology of Deviance, The Free Press, New York, 1966.
- Berger, Peter L., Terj. Daniel Dhakidae, Humanisme Sosiologi, Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1985.
- Berger, Peter L., Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Black, Donald, 'The Boundaries of Legal Sociology' dalam The Social Organization of Law, Donald Black, Maureen Mileski (editor), Seminar Press Inc. New York, 1973.
- , The Behaviour of Law, The Free Press, N.J, 1976.
- Box, Steven., , Power, Crime and Mystification, Tavistock Publications, New York, 1983.
- Braithwaite, John., , Crime Shame and Reintegration, Cambridge University Press, Cambridge, New York, New Rochelle, Meulborne, Sydney, 1989.
- Budiman, Arief, 'Dari Patriotisme, Ayam dan Itik sampai ke sosiologi Pengetahuan' dalam Ideologi dan Utopia - Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Karl Manheim, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Bujono, Bambang., Putu Setia, Thoriq Hadad, "Mengapa Kami Menggugat", Penerbit Yayasan Alumni TEMPO, Jakarta, 1995.
- Chadwick, Bruce A., Howard M Bahr, Stan L Albrecht, Terj. Sulistia, Yan Mujiyanto, Ahmad Sofwan, Suhardjito, Metode Penelitian Ilmu Sosial, IKIP Semarang Pres, I, 1991.
- Curzon, L.B., Baristen, Criminal Hand Book - Seven Edition, The M+E Handbook Series, Putman London Publishing, London, 1994.
- Dadang RHS, Roy Pakpahan, Jurnalis Independen Diadili-Pledoi Tiga Terpidana, Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, Maret 1996.
- Dirdjosisworo, Soedjono., , Anatomi Kejahatan di Indonesia, PT. Granesia, Bandung, 1996.

- , Pungli, Sinar Baru, Bandung, tahun tak tercatat.
- Duijs J.E.W, Membela Mahasiswa Indonesia Di Depan Pengadilan Belanda, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Duverger, Maurice.,, Terj. Daniel Dhakidae, Sosiologi Politik, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- Faisal, Sanafiah.,, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asah-Asih Asuh, Malang, 1990.
- Farid, Hilmar, 'Resistensi Mahasiswa dan Represi Negara', Catatan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1994, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1995.
- Forester, John.,, Planing in Face of Power, University of California Press, barkedey, Los Angeles, London, 1989.
- Gardner, John W.,, Yang Terbaik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Gie, Soe Hok.,, Catatan Seorang Demonstan, LP3ES, Jakarta Tahun tak tercatat.
- Goode, Erich, Deviant Behavior, Prentice hal. Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1984.
- Greenberg, David F.,, Crime and Capitalism - Reading in Marxist Criminology, Mayfield Publishing Company, California, 1981.
- Hadi, Sutamijah.,, Tentang Delik-delik Pers, Seri Pustaka Ilmu, CV Jawa Timur Perss, Surabaya, 1960.
- Hakim, Lukman.,, Kudengar Indonesia Memanggil. Pledoi Dihadapan Pengadilan Mahasiswa, Badan Kerjasama Pembe-laan Mahasiswa Indonesia, Jakarta, 1980.
- Hall, Kermit., William M. Wiecek, Paul Finkelman, 'Critical Legal Studies: An Introduction to Its Origins and Underpinnings - 1986', dalam American Legal Histories: Cases and Materials, Oxford University Press, New York, 1991.
- Harman, Benny K., Hendaridi, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Jaringan Informasi Masyarakat, Friedrich Stiftung Jakarta, YLBHI, Jakarta, 1992.
- Haryanto, Ariel, 'Memperjelas Sosok Yang Samar', dalam Politik Kelas Menengah di Indonesia, Richard Tanter; Kenenth Young (Editor), LP3ES, Jakarta, 1993.
- Haryanto, Ariel., Harjono Tjitrosoebono, Aristides Katop-po, Ashadi Siregar, Muladi, Pers Hukum dan Kekuasaan, Penerbit Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994.
- Hasibuan, Imran., dan Sitok Srengenge, Bredel di Udara Rekaman Radio ABC BBC DW. Nedherland. VOA, Penerbit ISAI, Jakarta, 1996.
- Hay, Douglas, Law And Ideology, Bahan mata kuliah Lembaga dan Pranata Hukum di S2 Ilmu Hukum UNDIP, Tidak dike-tahui, penerbit, kota dan tahun penerbitan.
- Hill, David T. ., The Press in The New Order Indonesia, University of Westren Australia Press in Assosiation with Asia Research Centre on Social Political and Economic Change, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

- Hoefnagels, G. Peter, The Other Side of Criminology, Kluwer Deventer Holland, 1969.
- Huchinson, Allan C., Critical Legal Studies, Rowman and Littlefield Publisher Inc, New Jersey, 1989
- Humphries, Drew, 'Crime and The State' dalam Crime in the Street and Crime in the Suites : Prespectives on Crime and Criminal Justice, Doug A. Timer, Stanley A Eitzen, Allyn and Bacon A Division of Simon and Schuster Needham Heights, USA, 1989.
- Huntington, Samuel P., , Gelombang Demokratisasi Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik.,, Yurisprudensi Indonesia, Penerbitan 1977-I.
- Ingelson, John.,, Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993.
- Jonhson, Dale L.,, Class and Social Development A New Theory of Middle Class, Sage Publication, Beverly Hills, London, New Delhi, 1982.
- , Middle Class in Dependent Countries, Sage Publication, Beverly Hills, London, New Delhi, 1985.
- Jonkers, J.E, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartodirdjo, Sartono., , Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Jidid 2, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Keller, Suzanne.,, Penguasa dan Kelompok Elit Pertama Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern, Rajawali Pers Yayasan Ilmu-Ilmu Sosia, Jakarta, 1984.
- Kemasyarakatan, Lembaga Studi Ilmu-ilmu (LSIK), Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia, Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, Jakarta, 1988.
- Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Penerbit Bentang, Yogyakarta, 1995.
- Kusumah, Mulyana W., , Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Tinjauan Ringkas), Armico, Bandung, 1984.
- , 'Perspektif dan Teori Tentang Konteks Sosial Hukum', dalam Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, Mulyana W. Kusumah, Paul S.Baut (editor), Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Lamintang. P.A.F.,, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Lamintang, P.A.F., Djisman Samosir C, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Legge, J.D, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Grafiti Pers, Jakarta, 1993.
- Lev, Daniel S. ., , 'Kelompok Tengah dan Perubahan di Indonesia', dalam Politik Kelas Menengah di Indonesia, Richard Tanter; Kenenth Young (Editor), LP3ES, Jakarta, 1993.
- Liklikuwata, Hengkie, Sosiologi Hukum Pidana Kejahatan dan Penjahat, Ind-Hillco, Jakarta, 1990.

- Livingstone, Jay, Crime and Criminology, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1992.
- Loqman, Loebby., , Delik Politik di Indonesia, In.Hill.Co. Jakarta, 1993.
- Lucas, Anton E., 'Masalah Wawancara Dengan Informan Pelaku Sejarah di Jawa', Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat, Koentjaraningrat, Donald K Emerson, Yayasan Obor Indonesia dan Gramedia, Jakarta, 1982.
- Manheim, Karl., , Ideologi dan Utopia - menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Moeljatno, Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Openbare Orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Moleong, Lexy J., , Metode Penelitian Kualitatif, CV Rosda Karya, Bandung, 1994.
- Muhadjir, Noeng., , Metode Penelitian Kualitatif, Raka Sarasin, Yogyakarta, 1993.
- Multatuli, Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda, Djambatan, Karya Nusantara Bandung, 1973.
- Mustafa, Bachsan, Hukum Pers Pancasila, Alumni, Bandung, 1987.
- Mustofa, Sumono., , Sukarni Dalam Kenangan Teman-temannya, Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
- Nagazumi, Akira Terj. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV-LIPI, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918 (The Origin and Earlier Years of the Budi Utomo, 1908-1918), Grafitipers, Jakarta, 1989.
- Nagel, Julian., (Ed), Student Power, Merlin Press, London, 1969.
- Nasution, A.H, Pokok-pokok Perang Gerilya, Angkasa, Bandung, 1984.
- , Sekitar Perang Kemerdekaan. Mulai buku: 1 Proklamasi sampai buku: 5 Agresi Militer Belanda I, Angkasa, Bandung, 1980.
- Nettler, Gwynn, Explaining Crime : Second Edition, McGraw-Hill Book Company, New York, USA, 1978.
- Niel, Robert van., Terj. Zahara Deliar Noer, Munculnya Elit Modern Indonesia, Pustaka Jaya, Jakarta, 1984.
- Nonet, Phillipe., Philip Selznick, Law and Society in Transition : Toward Responsive Law, Harper and Row, Colophon Books, New York, 1978.
- Notosusanto, Nugroho., , 'Generasi, Sejarah dan Pewarisan Nilai', Prisma 7 Nomor Khusus, 1976.
- , Sangkur dan Pena, Penerbit, Kota dan Tahun tidak diketahui.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta, 1988.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda., Loebby Loqman, Soetandyo Wignjosoebroto, Pidana Politik Seri Diskusi Hukum dan Politik, Divisi Pendidikan dan Kajian Strategis YLBHI, Jakarta, 1995.
- Onghokham, 'Angkatan Muda Dalam Sejarah Politik', Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. Pilihan Artikel Prisma, Farchan Bulkin (Ed), LP3ES, Jakarta, 1995.

- Panitia 75 Tahun Kasman, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1982.
- Peters, A.A.G, Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum III, Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Platt, Tony., , 'Prospect for A Radical Criminology in The USA' dalam Critical Criminology, Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young (Editor), International Library of Sociology edited by Jhon Rex, Routledge and Kegan Paul, London and Boston, 1975.
- Prakoso, Djoko., , Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Pramuka, Kwartir Nasional Gerakan., , 75 Tahun Kepanduan dan Kepramukaan di Indonesia, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono., , Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986
- Purnomo, Bambang., , Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Pour, Julius., , Benny Moerdani Profil Prajurit Negarawan, Bab V. Dinamika Tentara Pelajar, Yayasan Kejuangan Panglima Besar Soedirman, Jakarta, 1993.
- Quinney, Richard., , 'Crime Control in Capitalist Society: A Critical Philosophy of Legal Order' dalam Critical Criminology, Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young (Editor), International Library of Sociology edited by Jhon Rex, Routledge and Kegan Paul, London and Boston, 1975.
- , Criminology : Amalisys and Critique of Crime in America, Little Brown and Company, Boston/Toronto, 1975.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung 1983.
- , Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986,
- , Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1977.
- Rallion, Francois, Politik dan Idiologi Mahasiswa Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Ramadhan K.H, Bang Ali, Demi Jakarta 1966 - 1977, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- , Soemitro, Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Reksodiputro, Mardjono., , Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana - Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), Jakarta, 1994.
- Rose, Mavis., Terj: Hermawan Sulistyio, Biografi Politik Mohammad Hatta, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Sahetapy, J.E , Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bhakti, 1992.

- , Pisau Analisa Kriminologi Pidato Pengukuhan Guru Besar, Armico, Bandung, 1984.
- Sanit, Arbi, Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa Refleksi dan Gagasan Alternatif, Lingkaran Studi Indonesia, YLBHI, Jakarta, 1989.
- Saptono, Irawan., Lukas Suwarso, Megawati Soekarnoputri-Pantang Surut Langkah, ISAI, Jakarta, 1996.
- Sargent, Lyman Tower., Contemporary Political Ideologies - A Comparative Analysis, The Dorsey Press Chicago, Illionis, 1984.
- Sarwono, Sarlito Wirawan., Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivis Dalam Gerakan Protes Mahasiswa, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Schur, Edwind M., Radical Non-intervention : Rethinking The Delinquency Problem, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1973.
- Simadjuntak B. Chidir Ali, Cakrawala Baru Kriminologi (Suatu Konsep Dialog), Tarsito, Bandung, 1980.
- Simadjuntak, Togi., (Penyunting), ABRI Punya Golkar, Penerbit ISAI, Jakarta, 1996.
- Simbolon, Parakitri Tahi., 'Dibalik Mitos Angkatan 66', Analisa Kekuatan Politik di Indonesia - Artikel Pilihan, Farchan Bulkin (Ed), LP3ES, Jakarta, 1995.
- , Menjadi Indonesia, Kompas Grasindo, Jakarta, 1995.
- Siregar, Hariman, Hati Nurani Seorang Demontran, Mantika Media Utama, Jakarta, 1994.
- Smith, Edward C. ., Pembredelan Pers di Indonesia, Pustaka Grafitipers, Jakarta, 1986.
- Soedjatmoko, 'Kesadaran Sejarah dan Pembangunan', dalam Dimensi manusia dalam Pembangunan - Pilihan Karangan, Buku Obor dan LP3ES, Jakarta, 1983.
- Soegandhi, KUHP dengan Penielasannya, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1980.
- Soekanto, Soerjono., Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjono., Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kususmah, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soekarno, Indonesia Menggugat. Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial Belanda 1930, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- , 'Grounded Research di Dalam Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial', dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985.
- Soerodibroto, Soenarto., KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoogeraad, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1988.

- Soewandi, Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern, P.T Pembangunan, Djakarta, tahun tak diketahui.
- Stoddart, Lothrop., Rising Tide of Color (Pasang Naik Kulit Berwarna ), Panitia Penerbit : Letdjen H.M Muljadi Djojomartono, Brigdjen R. Rusli, H. Mualliff Nasution, Drs. Syafa'at, Ramli Thoha.S.H, Jakarta, 1966.
- Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Susanto, I.S, Kejahatan Korporasi, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- , Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Edisi 1995.
- Tantri, Ktut., Revolt In Paradise (Revolusi di Nusa Damai), Terjemahan: Maj. Abd. Bar Salim, Gunung Agung, Jakarta, 1965.
- Taylor, Ian., Paul Walton, Jock Young (Editor), Critical Criminology, International Library of Sociology edited by Jhon Rex, Routledge and Kegan Paul, London and Boston, 1975.
- , The New Criminology, International Library of Sociology edited by Jhon Rex, Routledge and Kegan Paul, London and Boston, 1973.
- Timer, Doug A., Stanley A Eitzen, Crime in the Street and Crime in the Suites : Prespectives on Crime and Criminal Justice, Allyn and Bacon A Division of Simon and Schuster Needham Heights, USA, 1989.
- Tim Redaksi Direktorat Komunikasi dan Program Khusus, LBH Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1995.
- Tim YLBHI, Laporan Hak Azasi Manusia di Indonesia 1990, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1990.
- Tjokropranolo, Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman. Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia. Kisah Seorang Pengawal, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1993.
- Turk, Austin T., Political Criminality The Defiance and Defense Authority, Sage Publication Inc., New Bury Park, California, 1982.
- Wardoyo, Danang Kukuh., Dari Celah Bui Tidurlah Akal Sehat, Diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independent, 1997.
- Wignjosebroto, Soetandyo., Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1994.
- Wriston, Walter B., The Twilight of Sovereignty : How The Information Revolution is Transforming Our World, PT Remaja Rosda karya, Bandung, 1996.

B. Artikel Jurnal, Artikel Majalah, Artikel Koran dan Tabloid

- Abidin, Zed., , *Jaring Haatzaai Buat Demonstran*, Majalah Detektif Romantika, 28 September 1996.
- Adji, Oemar Seno., , *Asas-asas Tata Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Pidana*, Mimbar Penerangan, Departemen Penerangan, Tahun XIV No. 2-64.
- Ali, Novel., , *Kapan Kaum Muda Berhenti 'Memusuhi' Pemerintahnya*, Suara Merdeka, Semarang, 11 November 1989.
- Annonim, *'Mahasiswa 21' Udara Bebas di Penghujung Tahun*, Majalah Independen, Nomor 10/1995, Edisi 10 Januari 1995.
- Amarullah, Andi, *'Demonstrasi'*, Suara Pembaruan, Jakarta, 28 Mei 1996.
- Arief, Barda Nawawi., , *'Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan'*, Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP, Edisi Khusus 1997, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1997.
- Bawantara, Agung., Romdiana Deborasari, *'Dari Rata-rata Menjadi Tidak Sama Rata'*, Tabloid Detik, Jakarta, Nomor 067. Tahun XVIII, 22-28 Juni 1994.
- Dhakidae, Daniel., , *'Penerbitan Kampus : Cagar Alam Kebebasan Pers'*, Prisma 10, Oktober 1977.
- Diah, B.M., *'Masalah Begitu Besar Tetapi Generasi Muda Tak Cukup Siap'*, Prisma 7 Nomor Khusus, 1976.
- Dwitadi Y, Dwi Sudarlan Sy, *'Krisis Wibawa'*, Majalah Hayamwuruk, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, No. 3 Tahun VIII, 1993.
- Fadilah, Achmad, *'Antara Soerjono dan Adi Andoyo'*, H.U Bandung Pos, Bandung, 19 Juli 1996.
- , *'Korps Baret Merah Lahir di Jawa Barat, 178 Kali Tugas Operasi Tempur'*, H.U Pikiran Rakyat, Bandung, 15-16 April 1992.
- , *'Haatzaai Artikelien Produk Hukum Kolonial'*, H.U Bandung Pos, Bandung, 5 Juni 1996.
- , *'Interelasi Ekonomi dan Politik'*, H.U Bandung Pos, Bandung 4 Maret 1998.
- , *'Kejahatan Dalam Dunia Bisnis'*, H.U Bandung Pos, Bandung 22 Januari 1997.
- , *'Kejahatan Korporasi Terhadap Tenaga Kerja'*, H.U Bandung Pos, Bandung 29 September 1996.
- , *'Kejahatan Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup'*, H.S Wawasan, Semarang 5 Juni 1997.
- , *'Likuidasi: Viktimisasi bagi Masyarakat?'*, H.U Bandung Pos, Bandung 24 November 1997.
- , *'Menuju Pers yang Responsif'*, H.U Bandung Pos, Bandung 19 Februari 1997.
- , *'Nasionalisme: Gerakan Mencintai Rupiah'*, H.U Bandung Pos, Bandung 19 Januari 1998.
- , *'Nepotisme antara Hukum dan Moral'*, H.U Bandung Pos, Bandung, 1 Februari 1997.
- , *'Renungan HPN 1998-Pers dan Tekanan Ekonomi'*, H.U Bandung Pos, Bandung 9 Februari 1998.



- , 'Sistem Peradilan Kita: Ada Apa', H.U Bandung Pos, Bandung 26 Juni 1996.
- , 'Urgensi UU Antimonopoli', H.U Bandung Pos, Bandung 5 Mei 1998.
- Ginanjar, Ging, 'Amartiwi Saleh : Hukum Disalahgunakan', Tabloid Detik, Jakarta, Nomor 042 tahun XVII 22-28 Desember 1993.
- Gunawan, Andrew, 'Youth and Student Politics In Retrospect : With Special Reference to The Guided Democracy Period', Kabar Seberang, No. 17.
- Hariyanto, Petrus H., (ed.), Sigid Istiawan, M.Aulia A, M Sobirin (reporter), 'Pengadilan Politik', Majalah Hayamwuruk, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, No. 3 Th. VIII, 1993.
- Hasibuan, Imran., dan Santoso, 'Menghina Presiden, Enam Bulan Penjara Saja', Forum Keadilan No. 4 th. III, 9 Juni 1994.
- Hendardi, 'Demo dan Politik Mahasiswa' Majalah Forum Keadilan, Edisi Nomor 21, Tahun II, 3 Februari 1994.
- Imran, Zuhri, 'Beragam Pasal Buat Demontran', Forum Keadilan, No. 21 TH II 3 Februari 1994.
- Juoro, Umar., , 'Problema Pendidikan Tinggi: Aksi Protes Mahasiswa', Prisma No. 2 Tahun X, Februari 1981.
- Kartodirdjo, Suyatno., , 'Pemberontakan Anak Buah Kapal 'Zeven Provincien' Tahun 1933', Prisma No. 7 Tahun XVII, 1988.
- Kusumah, Mulyana W., , 'Realitas Sosial Kejahatan', Prisma No. 5 Mei 1982, LP3ES, Jakarta.
- Loqman, Loebby., 'Ketentuan Pidana Terhadap Demontran' Majalah Detektif Romantika, 17 Agustus 1996.
- Magenda, Burhan B., , 'Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sisttem Politik: Suatu Tinjauan' Prisma 12, Desember, 1977.
- Mahruz, Zuhri., , 'Mengenal Gerakan Mahasiswa - Isu Keadilan Tetap Trendy', Pikiran Rakyat, Bandung, 19 November 1989.
- Mangiang, Masmimar., , 'Mahasiswa, Ilusi tentang sebuah Kekuatan', Prisma, 12 Desember 1981.
- Margana, A, 'Demontran dan Hukumannya', Tempo 15 Januari, 1994.
- Muis, H.A , 'Haatzaai Delicten', Surya, Surabaya, 24 September 1993.
- Mulyaningsih, Tri T., , 'Kerap Terjadi Perbedaan - Antara Idealisme dan Realisme', Pikiran Rakyat, Bandung, 14 Mei 1989.
- Naipospos, Bonar Tigor, 'Mahasiswa Indonesia Dalam Panggung Politik, K arah Gerakan Rakyat?', Prisma No. 7 Edisi Juli 1996.
- Prie, Gatot., , Mohammad Saroto, 'Dari Pawai sampai Wiro Sableng' Majalah Detektif Romantika, 24 Agustus 1996.
- Qoyum, Abdul, 'Proses Panjang Gerakan Mahasiswa Indonesia', Majalah Pro Justitia Fakultas Hukum UNSOED, No. 8 Th. VI, Oktober, Purwokerto, 1993.

- Rahardjo, Satjipto., , 'Hukum itu Tidak Steril', Suara Pembaruan, Jakarta, 31 Agustus 1989.
- , 'Mempertahankan Pikiran Holistik dan Watak Hukum Indonesia', Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP, Edisi Khusus 1997, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1997.
- Ramadhan S., 'Gerakan Mahasiswa Tahun 80-an', Suara Pembaruan, 10 Februari 1992.
- Rohadian, Agus Basari Andi Reza., Bambang Soejatmoko, Heddy Lugito, 'Demo Sama Hukuman Berbeda' Tempo, 15 Agustus 1994.
- Rusyadi, Khoirul.,, 'Gerakan Mahasiswa Era 90-an Diaspora kekuatan yang siap Meledak', Balsirung, Yogyakarta, 25/XII/1997.
- Sarwono, Sarlito Wirawan., , 'Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa : Suatu Studi Psikologi Sosial', Prisma 6, Juni 1979.
- Sasono, Hadi, "Yang Tersandung Selebaran Gelap Pemilu", Lembaran Yustisia, Suara Merdeka, 15 Maret 1997.
- Sastraatmadja, Entang, 'Perjuangan Mahasiswa Dalam Bentuk yang Berbeda', Pikiran Rakyat, Bandung, 10. September 1989.
- , 'Mimbar Bebas Mahasiswa Masih Perlu?', Pikiran Rakyat, Bandung, 0 Oktober 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 'Konsep Mengenai Hukum Responsif', Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP, No. 02-1984, UNDIP, Semarang, 1984.
- , 'Perkembangan Hukum dan Birokrasi Menurut Nonet dan Selznick', Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP, No. 03-1990, UNDIP, Semarang, 1990.
- Soewidji, Soecipto, 'Tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Terhadap Pembelaan Terdakwa Lukas Suwarso dan Poltak Ike Wibowo dan para Penasehat Hukum', Majalah Hayamwuruk, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, No. 3 Th. VIII, 1993.
- Surjomihardjo, Abdurrachman, 'Pola-pola Pemikiran Menuju Kemerdekaan Indonesia', Prisma 7 Nomor Khusus, 1976.
- , 'Penempatan Kamp Konsentrasi Digul dalam Penulisan Sejarah Indonesia', Prisma 7, LP3ES, 1988.
- Suryadinata, Leo.,, 'Indonesia Nationalism and Pre War, Youth Movement : Reexamination', Jurnal of Southeast Asian Studies, 1978.
- Susanto, I.S, 'Kejahatan White Collar Crime dan Pembangunan Masyarakat Adil Makmur', Majalah Masalah-masalah Hukum UNDIP, Semarang, No. 3/XXI/1991.
- , 'Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial', makalah Lokakarya Nasional Pengembangan Sumber Daya, IMKA, Karangbendan 12-17 Agustus 1992, dimuat dalam majalah masalah-masalah Hukum UNDIP.
- , 'Tentang Penggantian UU Produk Kolonial', Suara Merdeka, Semarang, 25 September 1993.

- , *'The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia'*, Majalah Hirodai UNDIP of Law and Political Review, Kazuyushi Takagi, Soekotjo Hardiwinoto (editor), Published by Diponegoro University Press Semarang Indonesia, With the Assistance of Faculty of Law Hiroshima University, Hiroshima Japan, 1993.
- Suwarso, Lukas., *'Bangkitlah Imajenasimu Indonesiaku'*, Majalah Hayamwuruk, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, No. 3 Tahun VIII, 1993
- Tim Liputan Khusus Majalah Mahasiswa Hayamwuruk, *'Mengadili Imajenasi - Pengadilan Lukas - Poltak di Pengadilan Negeri Semarang'*, Hayamwuruk No. 3 Tahun VIII/1993, UNDIP Semarang, 1993.
- Widiano, Untung., *'Menyelesaikan Delik Pers'*, Editor No. 52 TH VI, 25 September 1993.
- Zuhri dan Imran, *'Sukarno Terjerat Haatzaai Artikel'*, Forum Keadilan, Nomor 21 Tahun II, 3 Februari 1994.

### C. Ensiklopedia dan Dictionary

- Encyclopedia Americana International Edition. Vol. 24, Americana Corporation, International Headquarters 575 Lexington Avenue, New York, New York 10022, 1976.
- Encyclopedia Britanica - A new Survey of Universal Knowledge Vol. 20, The University of Chicago, Enciclopedia Inc. Chicago.
- Grolier Encyclopedia of Knowledge 1, Grolier Inc. Corporation, Danbury, Connecticut, MCMXCI.
- Grolier Encyclopedia of Knowledge 16, Grolier Inc. Corporation, Danbury, Connecticut, MCMXCI.
- Grolier Encyclopedia of Knowledge 17, Grolier Inc. Corporation, Danbury, Connecticut, MCMXCI.
- Kadish, Sanford H., (Chief Editor), Encyclopedia of Crime and Justice. Volume 4, The Free Press Division of Mac Millan Inc. New York, 1983.
- Nolan, Josep R., Black's Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn West Publishing C.O, 1979.
- The American People Enciclopedia A Comprehensive Work-17, Grolier in Corporated, New York, 1963.
- The Columbia Encyclopedia Vol-I-A-Count, Edited By. William Bridgtwater and Seymour Kutrts, Paret's Magazine Cultural Institute Advision of Parent's Magazine enterprises Inc. By Arrangement with Columbia University Pers New York and London, Third Edition, 1963.

#### D. Bahan Pustaka yang tidak diterbitkan

- Awaludin, Arif, Stigmatisasi Gerakan Pro-Demokrasi (Tinjauan Kriminologi Gerakan Mahasiswa di Purwokerto), Tesis Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, UNDIP, 1997, Tidak Diterbitkan.
- Billah, M.M., 'Segi-segi Sosial Sengketa (Konflik)', Workshop Alternative Dispute Resolution, LBH Bandung, 1998.
- Fadilah, Achmad, Delik Politik (Sebuah Kajian Penggunaan UU No. 11 PNPS 1963 dan Haatzaai Artikelene Terhadap Gerakan Mahasiswa Indonesia 1974-1994), Makalah Ilmiah untuk Mengikuti Program Magister (S2) Ilmu Hukum UNDIP Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, 1996.
- , Haatzaai Artikelene (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 154 KUH Pidana dalam Perkara no. 141/Pid/B/1989/Pn.Bdg), Skripsi Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto, 1995.
- , Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Melalui Gerakan Pramuka Dahulu. Kini dan Masa yang Akan Datang, Proyek Penelitian Pramuka Garuda dan Karya Tulis Bela Negara, UNSOED, Purwokerto, 1993.
- Hendardi, 'Hak-hak Sipil dan Politik' Makalah dalam Materi Pembekalan kepada Peserta Magang XII LBH Bandung, 24 Oktober 1995.
- Lastoto, Haneda Sri, 'Masalah Pidana Politik dan Hak Sipil Politik', Makalah Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Hukum, HMJ Al Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung - Lembaga Bantuan Hukum Bandung, 5-7 Juni 1998.
- Melani, 'Beberapa Catatan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana', Makalah Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Hukum, HMJ Al Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung - Lembaga Bantuan Hukum Bandung, 5-7 Juni 1998.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 'Hukum dan Politik Perizinan di Indonesia', Makalah Seminar Nasional Hukum dan Politik Perizinan di Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 1995.
- Wignjosoebroto, Soetandyo., 'Konsep Hukum, tipe Kajian dan Metode Penelitiannya', Makalah dalam Matrikulasi S2 Ilmu Hukum UNDIP, Juli-Agustus 1996, UNDIP Semarang.
- , 'Penulisan Laporan Penelitian: Apa, Mengapa, Bagaimana', Makalah dalam Matrikulasi S2 Ilmu Hukum UNDIP, Juli-Agustus 1996, UNDIP Semarang.
- Zon, Fadli, 'Pers Mahasiswa, Gerakan Mahasiswa dan Upaya Pengembangan Intelegktualitas Mahasiswa', Makalah dalam Pendidikan Pers Mahasiswa, FISIP UNSOED, Purwokerto, 1993, Tidak diterbitkan.